



**WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 31 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA SURABAYA TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 148);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020;
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);

24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SURABAYA TAHUN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
4. Walikota adalah Walikota Surabaya.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.
7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan adalah Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Badan, Dinas, Inspektorat, Bagian, Rumah Sakit Umum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Surabaya untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2020 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 merupakan penjabaran dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dengan mengacu Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur, kondisi lingkungan strategis daerah, hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun sebelumnya dan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi :
 - a. acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), berupa program/kegiatan PD dan/atau lintas PD;
 - b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan APBD Tahun 2020.

Pasal 4

Dalam hal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbeda dengan KUA dan PPAS Tahun 2020 hasil pembahasan dengan DPRD, maka KUA dan PPAS Tahun 2020 hasil pembahasan dengan DPRD menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pasal 5

- (1) PD membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja dari masing-masing target sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 dan/atau APBD Tahun Anggaran 2020.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh PD yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak sesuai dengan perkembangan keadaan tahun berjalan dapat dilakukan penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran indikatif serta program dan kegiatan apabila belum tertampung dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk tahun berjalan dan/atau;
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran indikatif serta program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Juli 2019

WALIKOTA SURABAYA

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 1 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
SURABAYA,**

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2019 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRA TURSILOWATI, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

DAFTAR ISI



Daftar Isi	i
Daftar Tabel.....	ii
Daftar Gambar	xi
Bab I Pendahuluan	I - 1
I.1. Latar Belakang	I - 1
I.2. Dasar Hukum	I - 2
I.3. Hubungan Antar Dokumen	I - 4
I.4. Maksud dan Tujuan	I - 6
I.5. Sistematika Dokumen RKPD.....	I - 6
Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah	II - 1
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah.....	II - 1
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.....	II - 133
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II - 291
Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah	III - 1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III - 1
Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah	IV - 1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV - 1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020	IV - 7
Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah	V - 1
Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	VI - 1
Bab VII Penutup.....	VII- 1

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Persebaran Situs, Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya di Tiap Kecamatan di Kota Surabaya.....	II - 5
Tabel II. 2 Kejadian Bencana di Kota Surabaya Tahun 2016 –2018	II - 11
Tabel II. 3 Kepadatan Penduduk yang ber-NIK per Kecamatan	II - 12
Tabel II. 4 Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Usia Sekolah Tahun 2018.....	II - 14
Tabel II. 5 Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Agama	II - 15
Tabel II. 6 Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2018.....	II - 16
Tabel II. 7 Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pendidikan Tahun 2018 ...	II - 17
Tabel II. 8 Tren IPM Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018	II - 17
Tabel II. 9 Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2016 – 2018 (dalam Juta Rp)	II - 19
Tabel II. 10 Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2016 – 2018 (dalam Juta Rp)	II - 21
Tabel II. 11 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	II - 23
Tabel II. 12 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2016 – 2018	II - 25
Tabel II. 13 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015 – 2017 (%).....	II - 26
Tabel II. 14 Tingkat Fluktuasi Harga Beberapa Bahan Pokok Tahun 2017 – 2018..	II - 28
Tabel II. 15 PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018	II - 30
Tabel II. 16 Gini Ratio Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017	II - 31
Tabel II. 17 Indeks Ketimpangan Wilayah Kota Surabaya.....	II - 31
Tabel II. 18 Persentase Pendapatan yang Diterima Penduduk Menurut Kelompok..	II - 32
Tabel II. 19 Angka dan Garis Kemiskinan serta Jumlah Penduduk Miskin	II - 33
Tabel II. 20 Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018..	II - 33

Tabel II. 21 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018	II - 34
Tabel II. 22 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan Terhadap Laki-Laki .	II - 35
Tabel II. 23 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018	II - 35
Tabel II. 24 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018.....	II - 36
Tabel II. 25 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Surabaya.....	II - 36
Tabel II. 26 Persentase Guru SD yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik Tahun 2017-2018	II - 36
Tabel II. 27 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Surabaya.....	II - 36
Tabel II. 28 Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota Surabaya	II - 37
Tabel II. 29 Prevalensi Balita Kurang Gizi (Gizi Buruk + Gizi Kurang) Kota Surabaya	II - 37
Tabel II. 30 Perkembangan Balita Gizi Buruk Kota Surabaya (menurut Kecamatan) Tahun 2015 – 2017	II - 38
Tabel II. 31 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya	II - 40
Tabel II. 32 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018	II - 40
Tabel II. 33 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2017 – 2018	II - 41
Tabel II. 34 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018	II - 42
Tabel II. 35 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2018	II - 44
Tabel II. 36 Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2018	II - 46
Tabel II. 37 Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kota Surabaya	II - 48
Tabel II. 38 Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kota Surabaya	II - 49
Tabel II. 39 Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kota Surabaya.....	II - 49
Tabel II. 40 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya	II - 50

Tabel II. 41 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2018	II - 50
Tabel II. 42 Jumlah Guru dan Murid Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018	II - 53
Tabel II. 43 Jumlah Guru PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan	II - 53
Tabel II. 44 Jumlah Guru Non PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan	II - 53
Tabel II. 45 Jumlah Guru Kota Surabaya Bersertifikat Pendidik Tahun 2018	II - 54
Tabel II. 46 Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Ditangani <24 Jam.....	II - 54
Tabel II. 47 Persentase Kelurahan Siaga Aktif Tahun 2016 – 2018	II - 56
Tabel II. 48 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Tahun 2016 – 2018	II - 57
Tabel II. 49 Cakupan kunjungan bayi Tahun 2016 – 2018	II - 57
Tabel II. 50 Persentase Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Tahun 2016 – 2018	II - 58
Tabel II. 51 Jumlah Posyandu dan Balita Kota Surabaya.....	II - 58
Tabel II. 52 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018	59
Tabel II. 53 Jumlah Rumah Sakit Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018	II - 59
Tabel II. 54 Jumlah Dokter Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018	II - 60
Tabel II. 55 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit Umum Daerah.....	II - 60
Tabel II. 56 Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Surabaya Tahun 2016 –2018.	II - 62
Tabel II. 57 IMB yang diterbitkan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018.....	II - 63
Tabel II. 58 Daftar Kawasan Prioritas Penataan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman di Kota Surabaya	II - 64
Tabel II. 59 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki di Kota Surabaya Tahun 2016 –2018	II - 65
Tabel II. 60 Jumlah Pemohon Rumah Susun di Kota Surabaya	II - 66
Tabel II. 61 Jumlah dan Lokasi Persebaran Rusunawa	II - 66
Tabel II. 62 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	II - 68
Tabel II. 63 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kota Surabaya Tahun 2016 –2018	II - 69

Tabel II. 64 Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018	II - 69
Tabel II. 65 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Surabaya.....	II - 70
Tabel II. 66 Kejadian Kebakaran per Penyebab	II - 71
Tabel II. 67 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018	II - 71
Tabel II. 68 Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran Kota Surabaya...	II - 72
Tabel II. 69 Jumlah Ormas Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018.....	II - 73
Tabel II. 70 Penanganan PMKS Kota Surabaya Tahun 2016 –2018.....	II - 74
Tabel II. 71 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surabaya Tahun 2017 – 2018 .	II - 75
Tabel II. 72 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Surabaya.....	II - 75
Tabel II. 73 Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Terakhir	II - 76
Tabel II. 74 Pencari Kerja yang Difasilitasi dan Ditempatkan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018	II - 77
Tabel II. 75 Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018	II - 77
Tabel II. 76 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018	II - 78
Tabel II. 77 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Surabaya Tahun 2017-2018	II - 79
Tabel II. 78 KDRT Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018	II - 79
Tabel II. 79 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak DariTindak Kekerasan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018	II - 80
Tabel II. 80 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2016 – 2018.....	II - 81
Tabel II. 81 Ketersediaan Pangan Utama Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018.....	II - 81
Tabel II. 82 Pola Pangan Harapan Tahun 2016 – 2018	II - 82
Tabel II. 83 Jumlah Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Tersertifikat	II - 83
Tabel II. 84 Jumlah Kasus Tanah Pemerintah Kota Surabaya	II - 83
Tabel II. 85 Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA	II - 84
Tabel II. 86 Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Tahun 2016 – 2018.....	II - 84

Tabel II. 87 Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tahun 2016 – 2018	II	-	85
Tabel II. 88 Permasalahan Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018..	II	-	86
Tabel II. 89 Indeks Penyusun IKLHS Kota Surabaya	II	-	87
Tabel II. 90 Penerapan Upaya Penerapan Konservasi Energi Tahun 2016-2018.....	II	-	88
Tabel II. 91 Jumlah Penduduk Kota Surabaya yang Memiliki KTP Berbasis NIK	II	-	89
Tabel II. 92 Rasio Akseptor KB Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018	II	-	89
Tabel II. 93 Cakupan Peserta KB Aktif Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018	II	-	90
Tabel II. 94 Total Fertility Rate (TFR) Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018	II	-	90
Tabel II. 95 Keluarga Miskin yang Melakukan Usaha Ekonomi Produktif	II	-	92
Tabel II. 96 Jumlah Terminal dan Angkutan Darat Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018	II	-	92
Tabel II. 97 Rasio Ijin Trayek Kota Surabaya, Tahun 2016 – 2018.....	II	-	93
Tabel II. 98 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Surabaya	II	-	93
Tabel II. 99 Pemasangan Rambu-Rambu Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018	II	-	94
Tabel II. 100 Jaringan Komunikasi Kota Surabaya Tahun 2016 –2018	II	-	95
Tabel II. 101 Website Milik Pemerintah Kota Surabaya, Tahun 2016 –2018	II	-	95
Tabel II. 102 Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Online Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018	II	-	96
Tabel II. 103 Pertumbuhan Anggota Koperasi Tahun 2016 – 2018	II	-	96
Tabel II. 104 Persentase Koperasi Aktif Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018	II	-	97
Tabel II. 105 Rasio Volume Usaha Koperasi Aktif Terhadap Jumlah Koperasi Aktif di Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018	II	-	97
Tabel II. 106 Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018	II	-	98
Tabel II. 107 Jumlah Proyek PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018.....	II	-	98
Tabel II. 108 Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017.....	II	-	99
Tabel II. 109 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018 .	II	-	99
Tabel II. 110 Lapangan Olahraga Milik Pemerintah Kota Surabaya	II	-	100
Tabel II. 111 Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018	II	-	102

Tabel II. 112 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018	II - 103
Tabel II. 113 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018	II - 104
Tabel II. 114 Jumlah Perpustakaan Kota Surabaya Tahun 2016 –2018.....	II - 105
Tabel II. 115 Jumlah Koleksi Buku Layanan Baca Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018	II - 105
Tabel II. 116 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018	II - 106
Tabel II. 117 Partisipasi Reading Text Levelling Tahun 2016-2018.....	II - 106
Tabel II. 118 Perangkat Daerah (PD), Unit Kerja, BUMD dan Sekolah Negeri yang Tertib Sistem Tata Kearsipan Tahun 2016 –2018.....	II - 107
Tabel II. 119 Kontribusi Sub Kategori Perikanan terhadap PDRB Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018	II - 108
Tabel II. 120 Jumlah Produksi Perikanan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018.....	II - 109
Tabel II. 121 Konsumsi Ikan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018.....	II - 109
Tabel II. 122 Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara dan Nusantara ke Kota Surabaya Tahun 2015 – 2018	II - 110
Tabel II. 123 Kunjungan Wisata Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017	II - 112
Tabel II. 124 Kontribusi Sub Kategori Pertanian terhadap PDRB Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018	II - 113
Tabel II. 125 Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar	II - 113
Tabel II. 126 Produksi Hasil Pertanian Menurut Jenis Komoditi Kota Surabaya	II - 114
Tabel II. 127 Jumlah Pasar Modern di Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018.....	II - 114
Tabel II. 128 Pasar yang Dibangun Oleh Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2017 – 2018	II - 115
Tabel II. 129 Jumlah Pasar PD Pasar Surya Tahun 2016 – 2018	II - 115
Tabel II. 130 Jumlah Usaha Berdasarkan Ijin yang Berlaku Di Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018	II - 116
Tabel II. 131 Ekspor Bersih Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018.....	II - 116
Tabel II. 132 Dokumen Perencanaan Kota Surabaya	II - 117
Tabel II. 133 Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD Kota Surabaya	II - 118

Tabel II. 134 Tingkat Capaian Keberhasilan Program Pembangunan Tahun 2016 – 2018	II - 118
Tabel II. 135 Rata – Rata Penyerapan anggaran Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018	II - 118
Tabel II. 136 Penilaian Evaluasi SAKIP Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017.....	II - 119
Tabel II. 137 Persentase Jenis Pelayanan yang Memiliki SOP Tahun 2016 – 2017. II -	119
Tabel II. 138 Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan Tahun 2016 – 2018	II - 120
Tabel II. 139 Survey Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018.....	II - 120
Tabel II. 140 MoU Kerjasama (Non Perdagangan) Antar Daerah dan Pihak Ketiga Tahun 2018	II - 122
Tabel II. 141 MoU Kerjasama (non perdagangan) Luar Negeri Tahun 2018	II - 122
Tabel II. 142 Rekapitulasi Sanksi Disiplin Terhadap Aparatur Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018	II - 122
Tabel II. 143 Persentase Pejabat Struktural yang telah Mengikuti Diklat Struktural Tahun 2015 – 2017	II - 124
Tabel II. 144 Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Surabaya	II - 124
Tabel II. 145 Produktivitas Ekonomi di Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018	II - 125
Tabel II. 146 Perkembangan PDRB Kategori Transportasi dan Pergudangan	II - 125
Tabel II. 147 Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Surabaya.....	II - 126
Tabel II. 148 Rasio Luas Wilayah Industri Kota Surabaya.....	II - 126
Tabel II. 149 Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kota Surabaya Tahun 2016 –2018.....	II - 127
Tabel II. 150 Perbandingan Panjang Jalan Dengan jumlah Kendaraan di Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018	II - 127
Tabel II. 151 Rata-rata Lama Terjadinya Genangan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018	II - 128
Tabel II. 152 Rata-rata Tinggi Genangan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018.....	II - 128
Tabel II. 153 Luas Wilayah Genangan di Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018.....	II - 128
Tabel II. 154 Persentase Cakupan Layanan Air Bersih Kota Surabaya Tahun 2016 –2018	II - 130
Tabel II. 155 Penerangan Jalan Umum Tahun 2016 – 2018	II - 130
Tabel II. 156 Jumlah Demonstrasi Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017.....	II - 131

Tabel II. 157 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kota Surabaya	II - 132
Tabel II. 158 Rasio Lulusan D4/S1/S2/S3 Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018	II - 132
Tabel II. 159 Rasio Ketergantungan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018.....	II - 133
Tabel II. 160 Rekapitulasi Evaluasi Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan dan Kinerja Hasil Program Tahun 2018.....	II - 133
Tabel II. 161 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2019	II - 135
Tabel III.1 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surabaya Tahun 2017 dan Tahun 2018 (dalam juta)	III - 1
Tabel III.2 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Surabaya Tahun 2017 dan Tahun 2018 (dalam juta)	III - 2
Tabel III.3 Peranan Ekonomi Per Kategori Terhadap PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017 dan 2018 (dalam persen)	III - 4
Tabel III.4 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Tahun 2017 dan 2018 (dalam persen)	III - 5
Tabel III.5 Tingkat Inflasi Kota Surabaya Tahun 2017-2018 dan Perkiraan Tahun 2019 (dalam persen)	III - 6
Tabel III.6 Realisasi Nilai Investasi Kota Surabaya Tahun 2015- 2018.....	III - 8
Tabel III.7 Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kota Surabaya Tahun 2013 – 2017	III - 8
Tabel III.8 Ekspor Impor Non Migas Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018.....	III - 9
Tabel III.9 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya Tahun 2017 dan Tahun 2018	III - 10
Tabel III.10 Incremental Labour Output Ratio (ILOR) Kota Surabaya Tahun 2013-2015 dan Perkiraan Tahun 2016 dan 2017	III - 10
Tabel IV.1 Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke dalam Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan	IV - 2
Tabel IV.2 Hubungan Keterkaitan Isu Strategis Kota Surabaya dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur.....	IV - 9
Tabel IV.3 Penjabaran Isu Strategis Berdasarkan Urusan	IV - 11
Tabel IV.4 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kota Surabaya Tahun 2020	IV - 16

Tabel IV.5 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2020 dengan Sasaran Pembangunan Kota Surabaya.....	IV - 20
Tabel VI.1 Indikator Kinerja Utama Kota Surabaya	VI - 3
Tabel VI.2 Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Surabaya.....	VI - 4

DAFTAR GAMBAR



Gambar I.1 Alur Penyusunan RKP	I	-	5
Gambar II. 1 Peta Penggunaan Lahan Kota Surabaya	II	-	3
Gambar II. 2 Peta Kawasan Strategis Kota Surabaya	II	-	3
Gambar II. 3 Kondisi Intrusi Air Laut di Kawasan Mangrove Pamurbaya	II	-	7
Gambar II. 4 Peta Sesar Kendeng	II	-	9
Gambar II. 5 Peta Rawan Genangan Banjir Rob Wilayah Surabaya Utara	II	-	9
Gambar II. 6 Peta Kawasan Genangan Di Kota Surabaya	II	-	10
Gambar II. 7 Peta Kawasan Rawan Bencana Kebakaran di Kota Surabaya	II	-	11
Gambar II. 8 Grafik Penduduk Kota Surabaya Tahun 2018	II	-	13
Gambar II. 9 Inflasi Kota Surabaya (persen) Tahun 2012-2017	II	-	27
Gambar II. 10 Kematian Bayi berdasarkan Penyebab Kematian Terbanyak Tahun 2018	II	-	40
Gambar II. 11 Kejadian Luar Biasa Kota Surabaya Tahun 2019	II	-	55
Gambar II. 12 Persentase Rumah Sehat Kota Surabaya Tahun 2018	II	-	56
Gambar II. 13 Cakupan pelayanan kesehatan bayi per Kecamatan Tahun 2018	II	-	57
Gambar II. 14 Jumlah Puskesmas Berdasarkan Status Akreditasi Tahun 2018	II	-	61
Gambar II. 15 Persentase Atlet Berprestasi	II	-	101
Gambar II. 16 Perangkat Smart Water Level	II	-	129
Gambar III.1 Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2014- 2018 (dalam persen)	III	-	7

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA**NOMOR :****TANGGAL :****BAB I
PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pemerintah daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah berkewajiban menyusun rencana pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan, salah satu dokumen perencanaan pembangunan tersebut adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dokumen RKPD Kota Surabaya Tahun 2020 disusun sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 16 dengan tahapan :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan Musrenbang
- e. Perumusan rancangan akhir;
- f. Penetapan.

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan anggaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, fungsi dan kedudukan RPJMD adalah menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD. Muatan dalam dokumen RKPD

merupakan penjabaran secara operasional per tahun dari dokumen RPJMD, yang juga memuat sasaran dan prioritas pembangunan tahunan, dan juga berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah.

Seluruh dokumen perencanaan, nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen anggaran yang tentunya akan disempurnakan melalui beberapa tahapan perumusan kebijakan keuangan sehingga menjadi dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kota Surabaya meliputi:

A. Sinergi Perencanaan Pusat – Daerah

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 8).

B. Sinergi Perencanaan dengan Anggaran

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310).

C. Ketentuan Pendukung Lainnya

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan yang lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.

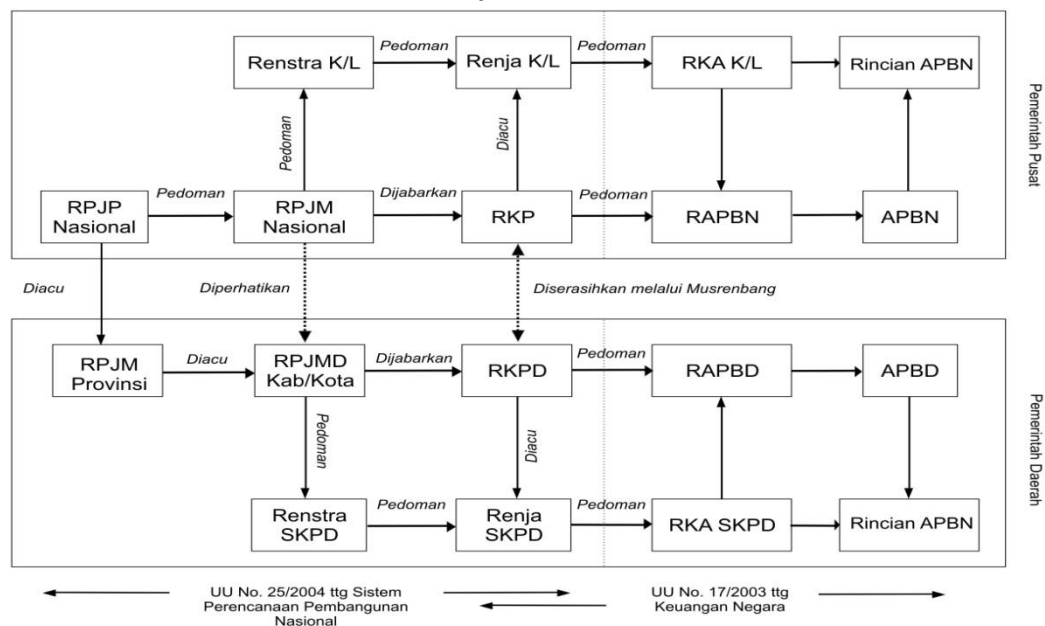
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sesuai dengan tahapan penyusunan RKPD dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa RKPD mengacu pada RPJMD Kabupaten/Kota, RKPD Provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. RKPD digunakan untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah Kota Surabaya dalam menyusun Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.

RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, serta atas-bawah dan bawah-atas.

Adapun gambaran tentang hubungan antara RKPD Kota Surabaya dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Alur Penyusunan RKPD



Sumber : UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 17 tentang Keuangan Negara

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Kota Surabaya Tahun 2020 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya RKPD tahun 2020 adalah untuk:

1. Memelihara konsistensi antara substansi rencana jangka menengah dengan substansi rencana jangka pendek;
2. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rancangan Akhir Renja PD;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi serta urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kota Surabaya ini disusun dengan sistematika yang disesuaikan dengan Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3 Hubungan antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Prov/Kab/Kota, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab/kota.

1.4 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Diisi sesuai dengan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Diisi sesuai dengan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah.

III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten/kota.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan

menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Kota Surabaya merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur yang terletak antara 07°9' s.d 07°21' Lintang Selatan dan 112°36' s.d 112°54' Bujur Timur. Luas wilayah Kota Surabaya seluruhnya kurang lebih 326,36 km² yang terbagi dalam 31 Kecamatan dan 154 Desa/Kelurahan. Batas wilayah Kota Surabaya yaitu batas sebelah utara adalah Laut Jawa dan Selat Madura, batas sebelah selatan merupakan Kabupaten Sidoarjo, batas sebelah barat merupakan Kabupaten Gresik, serta batas sebelah timur adalah Selat Madura.

Secara topografi, sebagian besar wilayah Kota Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3-6 meter di atas permukaan laut pada kemiringan kurang dari 3 persen. Wilayah barat Kota Surabaya memiliki kemiringan sebesar 12,77 persen dan sebelah selatan sebesar 6,52 persen. Kedua wilayah tersebut merupakan daerah perbukitan landai dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan 5-15 persen.

Jenis batuan yang ada terdiri dari 4 jenis yang pada dasarnya merupakan tanah liat atau unit-unit pasir. Sedangkan jenis tanah, sebagian besar berupa tanah alluvial, selebihnya tanah dengan kadar kapur yang tinggi (daerah perbukitan). Sebagaimana daerah tropis lainnya, Surabaya mengenal 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau. Curah hujan rata-rata 172 mm, dengan temperatur berkisar maksimum 30°C dan minimum 25°C.

Secara geografis, Kota Surabaya terletak di hilir sebuah Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang bermuara di Selat Madura. Beberapa sungai besar yang berasal dari hulu mengalir melintasi Kota Surabaya, yaitu Kali Surabaya, Kali Mas, Kali Jagir, dan Kali Lamong. Sebagai daerah hilir, Kota Surabaya sehingga dengan sendirinya Kota Surabaya merupakan daerah limpahan debit air dari sungai yang melintas sehingga rawan banjir pada musim penghujan.

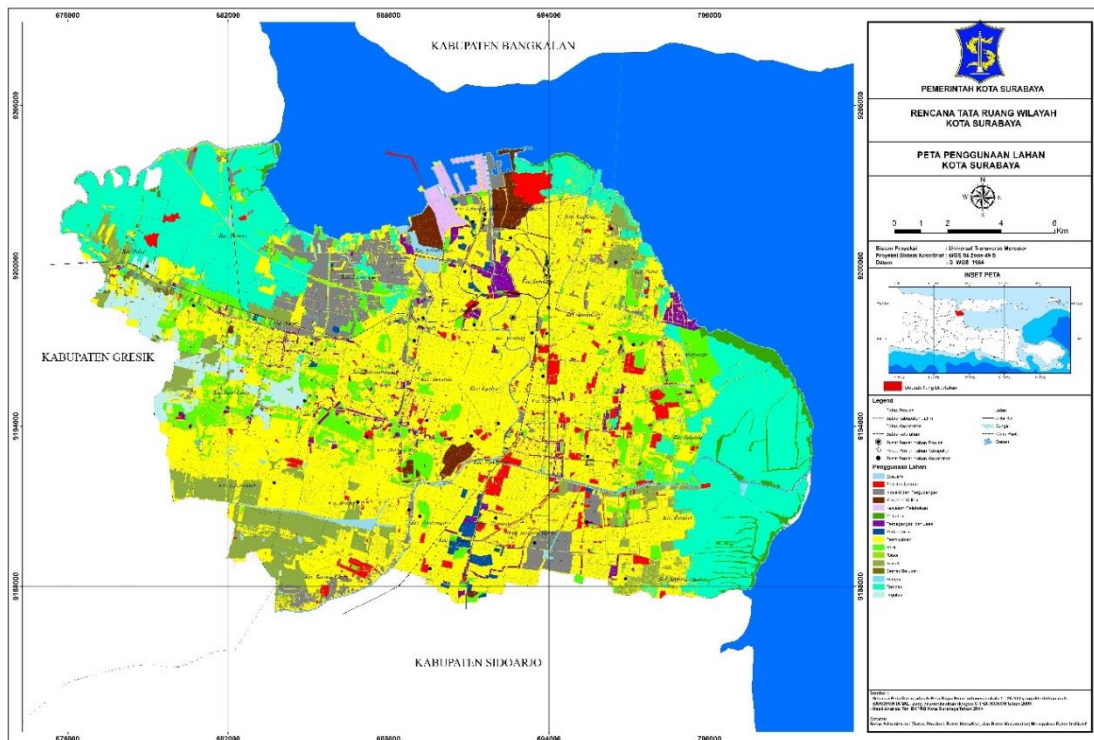
Secara administrasi pemerintahan Kota Surabaya terdiri dari 31 kecamatan, 154 kelurahan, 1368 Rukun Warga (RW) dan 9118 Rukun Tetangga (RT). Kota Surabaya adalah kota metropolitan kedua setelah Jakarta, Surabaya secara pola ruang perkembangannya terbagi menjadi:

1. Area permukiman vertikal baik berupa rumah susun (sederhana) maupun apartemen atau kondominium tersebar di hampir seluruh penjuru Kota Surabaya, sedangkan area permukiman diarahkan berkembang ke arah barat, timur dan selatan kota.
2. Area untuk kegiatan jasa dan perdagangan yang dipusatkan di kawasan pusat kota dan pusat-pusat sub kota dan unit pengembangan serta di kawasan yang ditetapkan

- menjadi kawasan strategis ekonomi antara lain di kawasan kaki Jembatan Suramadu dan kawasan Teluk Lamong;
3. Area untuk kegiatan industri dan pergudangan terkonsentrasi di kawasan pesisir utara di kawasan sekitar Pelabuhan Tanjung Perak dan Terminal *Multipurpose* Teluk Lamong, dan kawasan selatan kota yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gresik dan Sidoarjo;
 4. Wilayah pesisir khususnya ruang darat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi antara lain permukiman nelayan, tambak garam dan ikan, pergudangan, militer, industri kapal, pelabuhan, wisata pesisir sampai dengan fungsi kawasan lindung di Pantai Timur Surabaya serta terdapat aksesibilitas berupa jalan dan jembatan yang menghubungkan Kota Surabaya dan Pulau Madura (Jembatan Suramadu) dan Jembatan Sukolilo Lor – THP Kenjeran yang membuka akses di kawasan sisi timur laut Kota Surabaya;
 5. Wilayah Ruang laut Surabaya selain dimanfaatkan untuk kegiatan pelayaran baik interinsulair maupun internasional, juga dikembangkan untuk kegiatan penangkapan ikan tradisional, wisata pantai di Kenjeran dan sekitarnya dan kawasan lindung laut di sekitar Pantai Timur Surabaya.

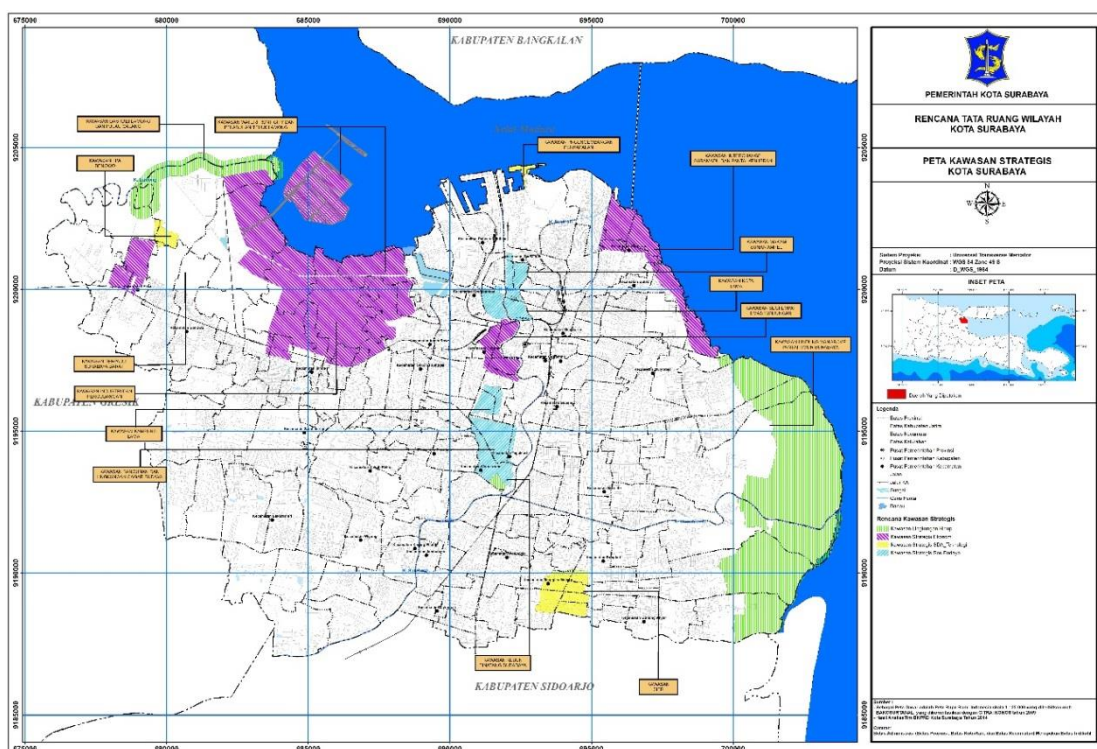
2.1.1.1 Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur memiliki peran strategis pada skala nasional sebagai pusat pelayanan kegiatan Indonesia Timur, dan pada skala regional sebagai kota perdagangan dan jasa yang pada simpul transportasi (darat, udara dan laut) nasional dan internasional sehingga memberi peluang bagi Kota Surabaya untuk meningkatkan perannya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Letak Kota Surabaya sangat strategis, menghubungkan antara Kota Surabaya dengan kota-kota di sekitarnya yaitu kota/kabupaten yang ada dalam Gerbangkertosusilo, sehingga sangat mendukung percepatan pembangunan di Kota Surabaya. Demikian juga sebaliknya, pertumbuhan Kota Surabaya juga berpengaruh pada perkembangan kota/kabupaten di sekitarnya, secara sektoral maupun keruangan.



Gambar Il. 1 Peta Penggunaan Lahan Kota Surabaya

Berdasarkan peta penggunaan lahan di atas, Kota Surabaya memiliki kawasan strategis yang berpotensi dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung eksistensi pengembangan wilayah kota dimasa mendatang. Gambar II.2 menunjukkan Peta kawasan strategis kota Surabaya.



Gambar II. 2 Peta Kawasan Strategis Kota Surabaya

Kota Surabaya memiliki kawasan strategis yang berpotensi dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung eksistensi pengembangan wilayah kota dimasa mendatang, diantaranya adalah :

a) Kawasan Strategis untuk Pendukung Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan-kawasan yang akan dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah:

- Kawasan Pergudangan dan Industri Margomulyo di Kecamatan Asemrowo dan Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun
Ditinjau dari aksesibilitas karena letaknya berdekatan dengan pelabuhan Tanjung Perak dan Jalan Tol Sidoarjo–Surabaya–Gresik, Kawasan Industri dan Pergudangan Margomulyo merupakan kawasan strategis untuk dioptimalisasi dan dikembangkan dengan orientasi pada *industry smart and clean* dengan didukung oleh infrastruktur yang memadai.
- Kawasan Tunjungan dan sekitarnya di Kecamatan Bubutan berada di Unit Pengembangan VI Tunjungan
Sebagai kawasan pusat perdagangan dan perkantoran, kawasan Tunjungan merupakan salah satu pusat kota yang sangat potensial untuk terus dikembangkan karena memiliki sejarah dan mengalami masa keemasan pada dekade 1940 hingga akhir 1970an dengan karakteristik *shopping-street dan shopping arcade*, sehingga dikenal dan menjadi salah satu *icon* kota Surabaya dengan Jargon “Rek Ayo Rek Mlaku – Mlaku nang Tunjungan”. Kawasan ini memerlukan penangan dan pengelolaan yang optimal untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya.
- Kawasan Kaki Jembatan Wilayah Suramadu-Pantai Kenjeran dan Kawasan Kota Tepi Pantai (Waterfront City) di Kecamatan Bulak berada di Unit Pengembangan III Tambak Wedi, merupakan kawasan strategis ditinjau dari lokasinya yang berada di kawasan kaki Jembatan Suramadu dan pesisir Pantai Bulak - Kenjeran yang memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai wisata pesisir dan laut. Keberadaan Jembatan Suramadu dan Pantai Kenjeran diharapkan dapat memberikan peningkatan potensi dan peran Kota Surabaya, sebagai pusat kegiatan regional. Dengan adanya Sentra Ikan Bulak, kawasan ini, khususnya Kecamatan Bulak menyumbang kontribusi PDRB pada kategori Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 33,36% dari total PDRB Kecamatan Bulak, diikuti kategori Perdag. Besar&Eceran; Reparasi Mobil & Motor sebesar 26,53% dari total PDRB Kecamatan Bulak.
- Kawasan Kota Tepi Pantai (Waterfront City) di Kecamatan Asemrowo dan Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun, merupakan kawasan strategis dengan konsep pengembangan penggunaan lahan mixed-use pendukung kawasan pelabuhan yang terintegrasi dengan rencana pengembangan Terminal

Multipurpose Teluk Lamong sebagai kawasan pelabuhan penunjalang Pelabuhan Utama Tanjung Perak. Kawasan Terpadu Surabaya Barat di Kecamatan Pakal di Unit Pengembangan XII Sambikerep dan Benowo di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangan, merupakan kawasan terpadu yang pusatnya akan dikembangkan di Stadion Gelora Bung Tomo sebagai pusat olahraga berskala nasional dan akan terintegrasi dengan pengembangan fungsi perdagangan dan jasa di sekitarnya.

b) Kawasan Strategis untuk Kepentingan Sosial Budaya

Kawasan yang dikembangkan dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah kawasan adat tertentu, kawasan dan konservasi warisan budaya. Kawasan strategis sosial-budaya yang ada di Kota Surabaya adalah :

- Kawasan Makam Sunan Ampel di Kecamatan Semampir berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak, yang merupakan kawasan cagar budaya dengan karakter dan daya tarik kuat sebagai obyek wisata ziarah di Indonesia yang berkembang tidak hanya sebagai kampung budaya yang khas dengan beragam aktivitasnya tetapi juga memiliki kultur religi yang kuat.
- Kawasan Kota Lama Surabaya di Kecamatan Krembangan, Kecamatan Pabean Cantian, Kecamatan Semampir dan Kecamatan Bubutan berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak dan Unit Pengembangan VI Tunjungan. Kawasan ini merupakan kawasan yang pada era kolonial terdelienasi sebagai kawasan eropa, kawasan arab dan kawasan cina.
- Bangunan dan lingkungan pada kawasan Darmo-Diponegoro serta kawasan kampung lama Tunjungan di Kecamatan Tegalsari berada di Unit Pengembangan VI Tunjungan yang merupakan kawasan bangunan dan lingkungan cagar budaya.

Tabel II. 1
Persebaran Situs, Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya di Tiap Kecamatan di Kota Surabaya

No	Kecamatan	Jumlah Situs Cagar Budaya
1	Pabean Cantian	29
2	Krembangan	50
3	Genteng	64
4	Sawahan	9
5	Wonokromo	21
6	Gubeng	11
7	Tegalsari	27
8	Bubutan	30
9	Semampir	14
10	Tambaksari	7
11	Simokerto	8
12	Dukuh Pakis	1
13	Lakarsantri	2

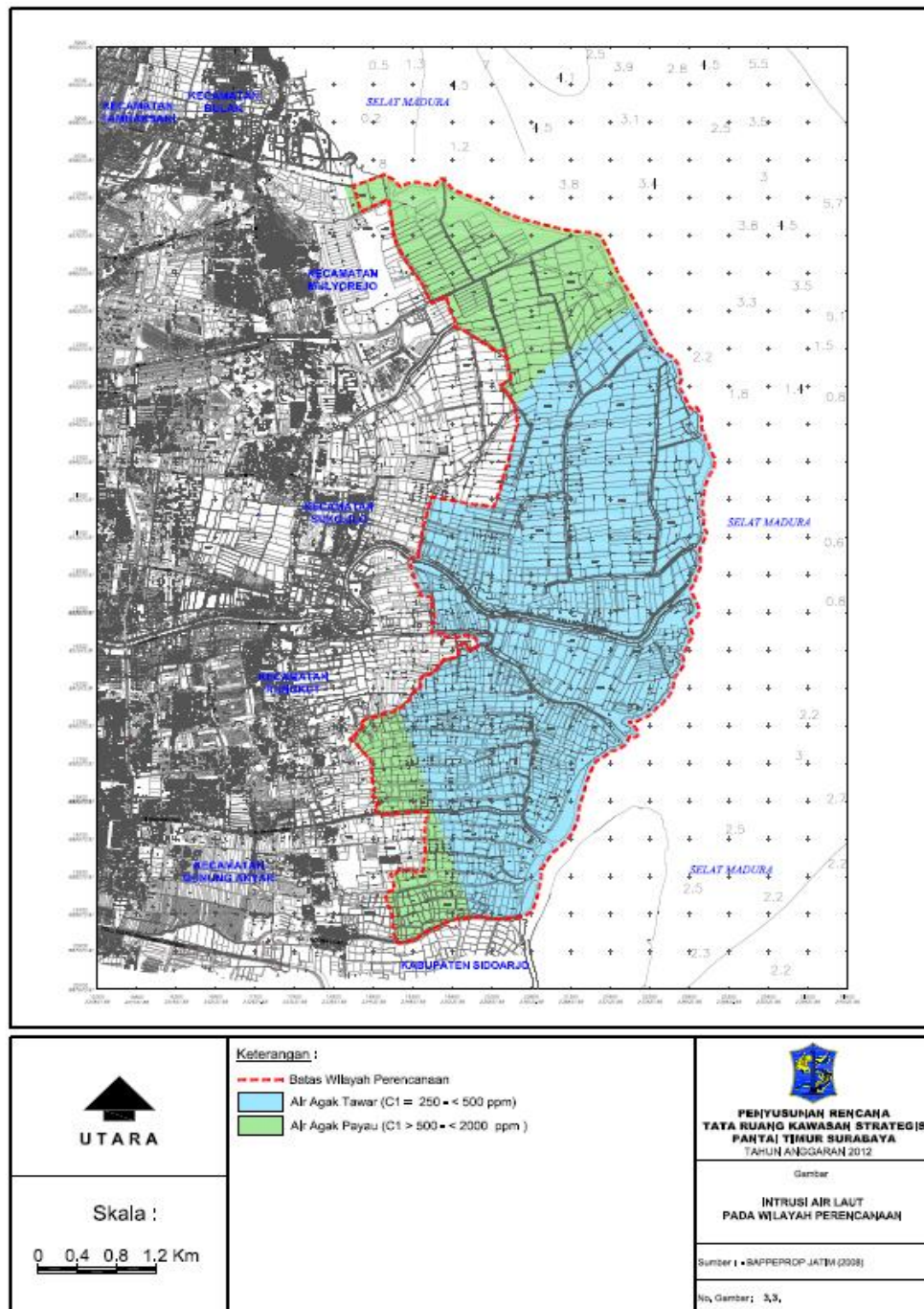
No	Kecamatan	Jumlah Situs Cagar Budaya
14	Wonocolo	1
15	Gayungan	1
Jumlah		273

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2017

c) Kawasan Strategis untuk Kepentingan Penyelamatan Lingkungan Hidup

Kawasan yang dikembangkan untuk meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kota Surabaya adalah:

- Kawasan Kebun Binatang Surabaya di Kecamatan Wonokromo berada di Unit Pengembangan VII Wonokromo, merupakan hutan kota di kawasan Wonokromo yang berfungsi sebagai tempat perlindungan satwa, hutan kota dan rekreasi alam, juga berperan dalam mengatur iklim mikro di Kota Surabaya. Melihat nilai strategis sebagai kawasan wisata dalam kota, maka keberadaan KBS harus dipertahankan dan dijaga kelestariannya.
- Kawasan Pantai Timur Surabaya di Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Sukolilo dan Kecamatan Mulyorejo, yang berada di Unit Pengembangan I Rungkut dan Unit Pengembangan II Kertajaya merupakan kawasan lindung alam berupa vegetasi mangrove yang berada di pesisir timur Kota Surabaya. Kawasan Mangrove Pamurbaya sangat berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan sebagai *barrier* alami dari proses abrasi dan intrusi air laut. Kondisi intrusi air laut di kawasan mangrove Pamurbaya dapat dilihat pada peta berikut ini.



Gambar II. 3
Kondisi Intrusi Air Laut di Kawasan Mangrove Pamurbaya

- Kawasan sekitar Kali Lamong di Kecamatan Benowo dan Kecamatan Pakal yang berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun dan Unit Pengembangan Sambikerep XII, merupakan kawasan perlindungan setempat/ sempadan sungai yang dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), penyediaan vegetasi, dan pendukung utilitas kota.

d) Kawasan Strategis Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) dan teknologi tinggi adalah penghasil SDA yang sangat potensial untuk kepentingan masyarakat beserta perangkat atau instalasi pengolahannya atau kawasan khusus untuk pengembangan teknologi untuk kepentingan strategis negara dan kepentingan umum. Kawasan strategis SDA dan Teknologi Tinggi di Kota Surabaya adalah:

- Kawasan Industri Pengembangan Perkapalan di Kecamatan Pabean Cantian berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak, merupakan salah satu kawasan yang digunakan dalam pengembangan teknologi perkapalan tingkat nasional. Sebagai industri perkapalan nasional, kawasan industri ini memiliki nilai strategis dan diperlukan upaya dalam menjaga dan meningkatkan nilai atau potensi kawasan tersebut.
- Kawasan industri/*industrial estate* di Kecamatan Rungkut berada di Unit Pengembangan I Rungkut, merupakan kawasan industri dan pergudangan yang telah lama berdiri di Kota Surabaya dan diarahkan menjadi kawasan industri dengan teknologi tinggi yang ramah lingkungan.
- Kawasan Depo dan Pengolahan BBM, berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak yang memiliki fungsi sebagai penyimpanan bahan bakar minyak dan pengelolaan BBM, sehingga kawasan ini memiliki nilai strategis dalam kaitannya dengan sistem energi di Kota Surabaya dan sekitarnya.
- Kawasan pengelolaan sampah teknologi tepat guna penghasil energi pada TPA Benowo di Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun, merupakan kawasan yang digunakan untuk pemrosesan akhir sampah di Kota Surabaya dengan konsep: “*Waste to Energy*”.

Selain potensi pengembangan kawasan strategis, perkembangan Kota Surabaya juga didukung oleh pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang meliputi:

1. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak untuk Terminal Peti Kemas/Reklamasi di Teluk Lamong.
2. Pengembangan jaringan jalan arteri yang menghubungkan antar pusat utama kota dengan pusat kota di kabupaten yang berbatasan langsung.
3. Pengembangan jalur komuter/kereta api *double track* serta angkutan massal dan prasarana pendukungnya yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan kota.

2.1.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Lokasi geografis Kota Surabaya tidak berhadapan langsung dengan samudera sehingga “relatif aman” dari bencana alam laut seperti tsunami. Namun pada perkembangannya sesuai dengan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditemukan potensi sumber gempa tektonik

terbaru dari pergerakan Sesar Kendeng dari Surabaya ke arah barat sampai Jawa Tengah yang sebelumnya tidak teridentifikasi sebagaimana pada Gambar II.3



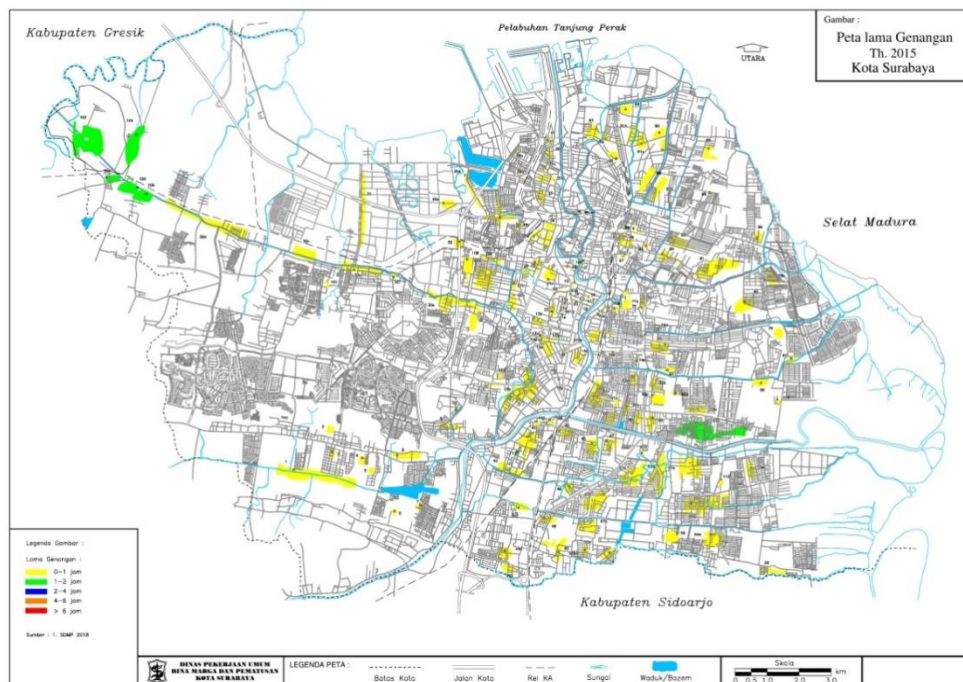
Gambar II. 4
Peta Sesar Kendeng

Sumber: (http://www.pu.go.id/main/view_pdf/11270)

Disamping itu Kota Surabaya diidentifikasi sebagai wilayah yang rawan genangan air dari limpahan debit air sungai dan saluran pada musim penghujan serta banjir rob khususnya wilayah pesisir pantai Surabaya utara. Kawasan rawan genangan banjir rob di Kota Surabaya seperti dalam gambar peta sebagai berikut:

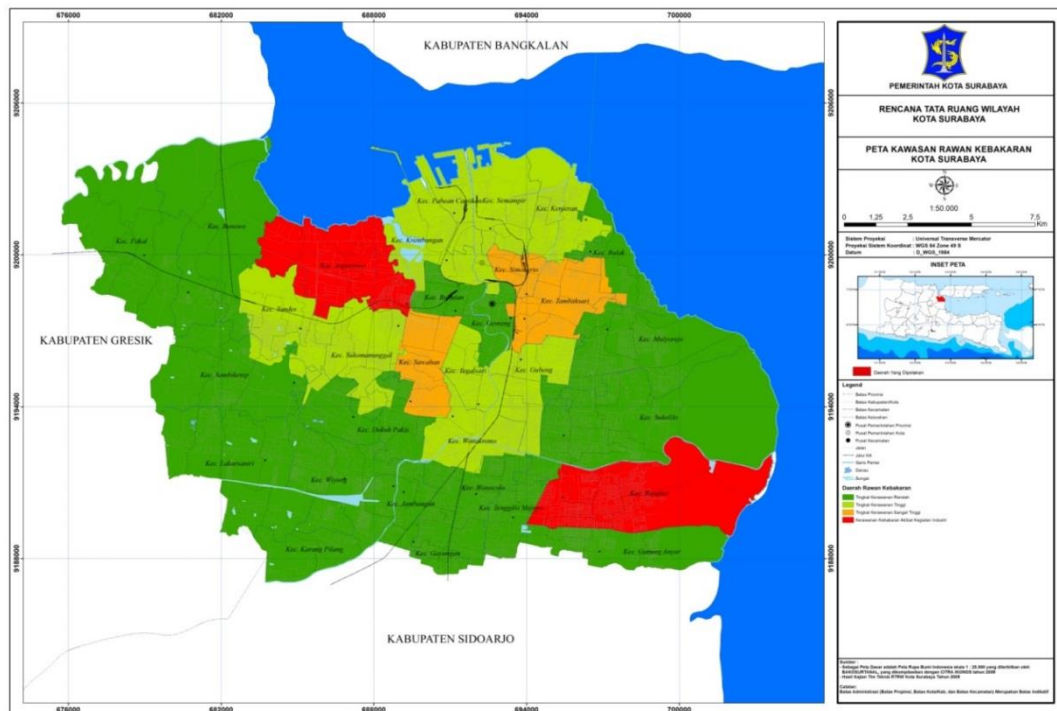


Gambar II. 5
Peta Rawan Genangan Banjir Rob Wilayah Surabaya Utara



Gambar II. 6
Peta Kawasan Genangan Di Kota Surabaya

Jenis bencana lainnya adalah kebakaran. Kejadian kebakaran adalah jenis bencana yang tidak dapat diprediksi akan tetapi dapat dicegah. Penentuan daerah rawan kebakaran di Kota Surabaya didasarkan atas kepadatan penduduk, kepadatan bangunan, data kejadian kebakaran, kondisi bangunan dan proporsi kegiatan terbangun dengan luas lahan. Berdasarkan klasifikasi kerawanan, maka kriteria yang dimaksud antara lain Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah. Kawasan rawan bencana kebakaran tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar II. 7
Peta Kawasan Rawan Bencana Kebakaran di Kota Surabaya

Dalam rangka mengantisipasi kejadian bencana di kota Surabaya diperlukan antisipasi dini dan kesiapsiagaan komponen masyarakat dan pemerintah agar sejalan dengan semangat untuk memberikan perlindungan dan rasa aman yang layak dan bermartabat kepada masyarakat. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah kejadian bencana di Kota Surabaya.

Tabel II. 2
Kejadian Bencana di Kota Surabaya Tahun 2016–2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Banjir	10	1	0
2	Angin Puting Beliung / Angin Kencang	12	3	3
3	Kebakaran	300	589	496

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat dan Dinas Pemadam Kebakaran, 2019

2.1.1.3 Kondisi Demografis

Keberadaan penduduk sangat penting di dalam proses pembangunan, oleh karena itu penduduk akan menjadi beban bagi daerah apabila tidak dikelola dengan baik dan sebaliknya akan menjadi modal potensial apabila mampu dikelola dengan baik. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Surabaya memiliki penduduk yang ber-NIKper 31 Desember Tahun 2018 sebesar 3.094.732 jiwa di 31 wilayah kecamatan. Rincian kepadatan penduduk per kecamatan ditunjukkan pada Tabel II. 3. Perkembangan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi. Tabel II. 3 menunjukkan bahwa masih

terdapat beberapa kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan lebih dari 20.000 jiwa/km² yaitu Kecamatan Wonokromo, Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Simokerto, Kecamatan Bubutan, Kecamatan Semampir, dan Kecamatan Kenjeran. Oleh karenanya program-program terkait dengan penyediaan pelayanan pendidikan, kesehatan, perumahan, lingkungan, pemberdayaan, keluarga berencana, sanitasi dan air bersih dapat diarahkan ke wilayah-wilayah yang padat penduduk sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan, sosial maupun ekonomi warganya. Pembangunan juga diarahkan pada wilayah dengan kepadatan penduduk sedang dan rendah yang membutuhkan pembangunan infrastruktur sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

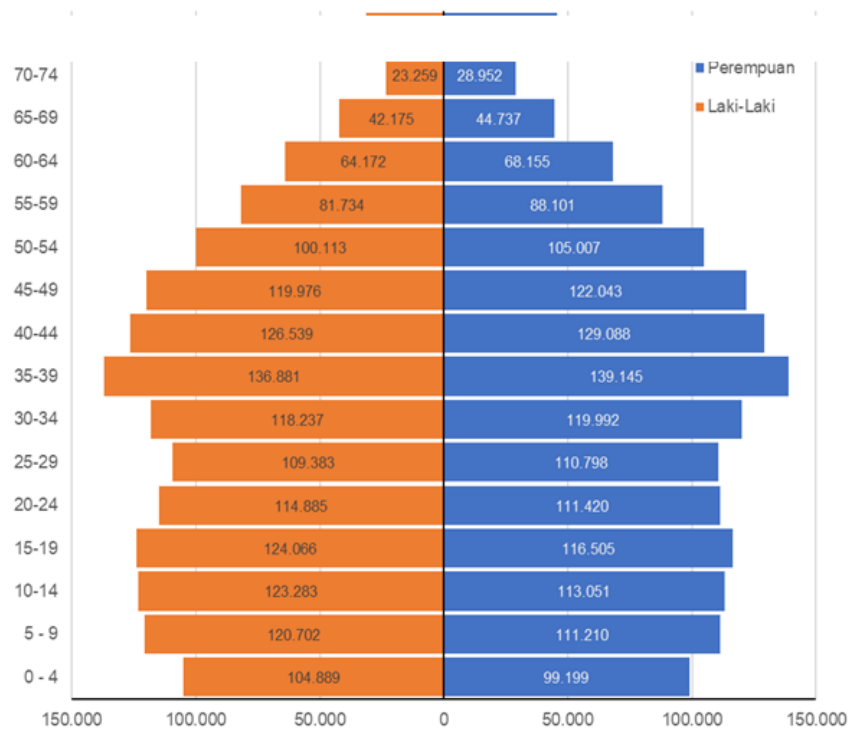
Tabel II. 3
Kepadatan Penduduk yang ber-NIK per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)	No	Kecamatan	Luas Wilayah (km2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)
1	Asemrowo	15,3241	48.744	3.181	17	Pakal	19,0729	56.453	2.960
2	Benowo	25,106	66.062	2.631	18	Rungkut	22,7359	117.591	5.172
3	Bubutan	3,947	106.399	26.957	19	Sambikerep	16,7174	64.947	3.885
4	Bulak	5,6633	45.211	7.983	20	Sawahan	7,0668	213.760	30.248
5	Dukuh Pakis	10,9526	62.520	5.708	21	Semampir	8,7024	202.040	23.217
6	Gayungan	5,5139	46.958	8.516	22	Simokerto	2,7723	102.764	37.068
7	Genteng	14,1224	61.934	4.386	23	Sukolilo	28,7225	114.309	3.980
8	Gubeng	7,8009	141.768	18.173	24	Sukomanunggal	9,2935	105.917	11.397
9	Gunung Anyar	9,7686	58.714	6.010	25	Tambaksari	9,3023	234.473	25.206
10	Jambangan	4,5385	52.376	11.540	26	Tandes	9,7564	94.810	9.718
11	Karang Pilang	9,9754	75.658	7.584	27	Tegalsari	4,2905	106.646	24.856
12	Kenjeran	8,7314	172.174	19.719	28	Tenggiling Mejoyo	5,8474	59.555	10.185
13	Krembangan	8,7253	124.419	14.260	29	Wiyung	11,3889	72.720	6.385
14	Lakarsantri	19,2742	59.930	3.109	30	Wonocolo	6,5355	83.743	12.814
15	Mulyorejo	12,7742	89.510	7.007	31	Wonokromo	8,3176	167.720	20.164
16	Pabean Cantian	5,5762	84.907	15.227					

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019 (diolah)

Berdasarkan jenis kelamin, total penduduk perempuan sebesar 1.552.994 jiwa atau 50,18% dan penduduk laki-laki sebesar 1.541.738 jiwa atau 49,82%. Dari piramida penduduk seperti

Gambar II. 8 menunjukkan bahwa struktur penduduk Kota Surabaya didominasi usia 35-39 tahun. Jumlah penduduk dengan usia yang potensial yaitu mulai dari usia 25 – 59 tahun sebesar 1.759.442 jiwa atau 52,64 persen dibanding usia sekolah mulai jenjang PAUD sampai dengan perguruan tinggi yaitu usia 5 – 24 tahun sebesar 1.008.567 jiwa atau 30,17 persen, sedangkan penduduk usia lanjut yaitu usia 60 tahun ke atas sebesar 370.637 atau 11,09 persen. Rincian komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia dapat dilihat pada Gambar II.8.



Gambar II. 8
Grafik Penduduk Kota Surabaya Tahun 2018
 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2019, diolah

Komposisi penduduk kota Surabaya berdasarkan usia sekolah pada triwulan IV tahun 2017 yaitu usia 0-4 tahun sebanyak 203.945 jiwa, usia 5-9 tahun sebanyak 252.438 jiwa, usia 10-14 tahun sebanyak 257.533 jiwa dan usia 15-19 tahun sebanyak 256.366 jiwa. Rincian data penduduk kota Surabaya berdasarkan usia sekolah pada triwulan IV tahun 2017 disajikan padatable berikut ini.

Tabel II. 4
Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Usia Sekolah
Tahun 2018

No	Kecamatan	3-6 Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
1	Asemrowo	3.160	5.143	2.434	2.466
2	Benowo	4.244	6.733	3.314	3.346
3	Bubutan	5.921	9.678	4.923	5.146
4	Bulak	2.864	4.557	2.314	2.368
5	Dukuh Pakis	3.546	5.599	2.698	2.822
6	Gayungan	2.596	3.971	2.033	2.188
7	Genteng	3.214	5.193	2.652	2.869
8	Gubeng	7.541	12.284	6.216	6.514
9	Gunung Anyar	3.623	5.481	2.633	2.641
10	Jambangan	3.262	4.895	2.437	2.376
11	Karang Pilang	4.343	6.787	3.380	3.679
12	Kenjeran	11.181	17.806	8.635	8.859
13	Krembangan	7.142	11.287	5.679	5.856
14	Lakar Santri	3.662	5.936	2.837	3.023
15	Mulyorejo	5.065	7.806	3.942	4.162
16	Pabean Cantian	4.451	7.534	3.781	3.814
17	Pakal	3.465	5.758	2.883	2.898
18	Rungkut	7.080	10.725	5.215	5.614
19	Sambikerep	3.990	6.232	3.028	3.035
20	Sawahan	12.106	19.868	9.863	10.172
21	Semampir	12.446	19.778	9.712	9.827
22	Simokerto	5.887	9.123	4.592	4.742
23	Sukolilo	6.682	10.351	5.050	5.151
24	Sukomanunggal	6.213	9.729	4.779	4.783
25	Tambak Sari	13.365	21.257	10.486	10.948
26	Tandes	5.662	9.146	4.301	4.245
27	Tegalsari	5.687	9.299	4.590	4.936
28	Tenggilis Mejoyo	3.291	5.370	2.495	2.623
29	Wiyung	4.213	6.648	3.269	3.571
30	Wonocolo	4.750	7.463	3.617	3.907
31	Wonokromo	8.737	14.936	7.766	8.048
Jumlah		179.389	286.373	141.554	146.629

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019

Data penduduk usia sekolah berdasarkan usia sekolah seperti tertuang pada Tabel II.4 tersebut di atas diperlukan bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk menyediakan maupun meningkatkan akses pelayanan pendidikan. Fasilitas pendidikan yang ada diharapkan mampu menampung jumlah anak usia sekolah di wilayah tersebut.

Komposisi penduduk Kota Surabaya menurut agama yang dipeluk menunjukkan bahwa penduduk Kota Surabaya mayoritas beragama Islam. Komposisi penduduk Kota Surabaya berdasarkan agama yang dipeluk untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel II. 5.

Tabel II. 5
Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Agama

AGAMA	2016	2017	2018
1. Islam	85,04%	85,11%	85,35%
2. Katholik	4,00%	3,96%	3,94%
3. Kristen	9,14%	9,12%	8,98%
4. Hindu	0,28%	0,28%	0,26%
5. Budha	1,51%	1,50%	1,45%
6. Konghuchu	0,02%	0,02%	0,02%
7. Lainnya	0,01%	0,01%	0,01%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019

Dilihat dari Tabel II. 5 tersebut di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2019, Kota Surabaya didominasi oleh penduduk yang beragama Islam yaitu sebesar 85,35% sedangkan sebesar 14,65% adalah penduduk beragama Katolik, Kristen, Hindu, Budha, Konghuchu dan lainnya. Keanekaragaman agama dan budaya yang ada di Kota Surabaya harus mampu dipelihara dan diwujudkan dalam toleransi kehidupan beragama dan sosial agar tidak terjadi konflik dimasyarakat. Salah satu prasyarat agar pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik adalah terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan pekerjaan, penduduk Kota Surabaya cenderung tersebar di seluruh jenis pekerjaan. Dari 101 jenis pekerjaan, karyawan swasta merupakan jenis pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh penduduk yakni sebesar 28,14 persen. Posisi kedua ditempati oleh belum/tidak bekerja sebesar 25,22 persen dan di posisi ketiga adalah mengurus rumah tangga sebesar 18,68 persen. Komposisi penduduk Kota Surabaya menurut pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 6
Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2018

No	Pekerjaan	Jumlah	%	No	Pekerjaan	Jumlah	%
1	Belum Tidak Bekerja	780.504	25,22	46	Juru Masak	76	0,00
2	Mengurus Rumah Tangga	578.118	18,68	47	Promotor Acara	2	0,00
3	Pelajar Mahasiswa	523.811	16,93	48	Anggota Dpr Ri	10	0,00
4	Pensiunan	23.408	0,76	49	Anggota Dpd	1	0,00
5	Pegawai Negeri Sipil	46.093	1,49	50	Anggota Bpk	1	0,00
6	Tentara Nasional Indonesia	12.781	0,41	51	Presiden	-	0,00
7	Kepolisian Ri	5.285	0,17	52	Wakil Presiden	-	0,00
8	Perdagangan	2.998	0,10	53	Anggota Mahkamah Konstitusi	1	0,00
9	Petani Pekebun	3.256	0,11	54	Anggota Kabinet Kementerian	5	0,00
10	Peternak	26	0,00	55	Duta Besar	1	0,00
11	Nelayan Perikanan	1.164	0,04	56	Gubernur	1	0,00
12	Industri	517	0,02	57	Wakil Gubernur	-	0,00
13	Konstruksi	277	0,01	58	Bupati	-	0,00
14	Transportasi	271	0,01	59	Wakil Bupati	1	0,00
15	Karyawan Swasta	870.758	28,14	60	Walikota	1	0,00
16	Karyawan Bumn	5.640	0,18	61	Wakil Walikota	2	0,00
17	Karyawan Bumda	571	0,02	62	Anggota DPRD Provinsi	16	0,00
18	Karyawan Honorer	1.588	0,05	63	Anggota DPRD Kabupaten Kota	17	0,00
19	Buruh Harian Lepas	5.714	0,18	64	Dosen	5.964	0,19
20	Buruh Tani Perkebunan	365	0,01	65	Guru	24.377	0,79
21	Buruh Nelayan Perikanan	101	0,00	66	Pilot	18	0,00
22	Buruh Peternakan	19	0,00	67	Pengacara	203	0,01
23	Pembantu Rumah Tangga	709	0,02	68	Notaris	189	0,01
24	Tukang Cukur	38	0,00	69	Arsitek	116	0,00
25	Tukang Listrik	124	0,00	70	Akuntan	67	0,00
26	Tukang Batu	1.447	0,05	71	Konsultan	181	0,01
27	Tukang Kayu	290	0,01	72	Dokter	6.499	0,21
28	Tukang Sol Sepatu	64	0,00	73	Bidan	776	0,03
29	Tukang Las Pandai Besi	167	0,01	74	Perawat	2.649	0,09
30	Tukang Jahit	507	0,02	75	Apoteker	353	0,01
31	Tukang Gigi	7	0,00	76	Psikiater Psikolog	47	0,00
32	Penata Rias	68	0,00	77	Penyiar Televisi	8	0,00
33	Penata Busana	21	0,00	78	Penyiar Radio	15	0,00
34	Penata Rambut	65	0,00	79	Pelaut	327	0,01
35	Mekanik	382	0,01	80	Peneliti	34	0,00
36	Seniman	144	0,00	81	Sopir	1.971	0,06
37	Tabib	13	0,00	82	Pialang	10	0,00
38	Paraji	4	0,00	83	Paranormal	4	0,00
39	Perancang Busana	15	0,00	84	Pedagang	8.429	0,27
40	Penterjemah	19	0,00	85	Perangkat Desa	7	0,00
41	Imam Masjid	16	0,00	86	Kepala Desa	2	0,00
42	Pendeta	498	0,02	87	Biarawati	158	0,01
43	Pastor	30	0,00	88	Wiraswasta	168.897	5,46
44	Wartawan	216	0,01	89	Lainnya	4.625	0,15
45	Ustadz Mubaligh	77	0,00		Jumlah	2.868.186	100%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019

Berdasarkan pendidikan, komposisi penduduk Kota Surabaya ditampilkan pada Tabel II. 7. Penduduk Kota Surabaya paling banyak, yakni sebesar 28,82 persen, merupakan lulusan SMA. Posisi kedua adalah penduduk yang tidak/belum sekolah sebesar 21,81 persen dan posisi selanjutnya adalah lulusan SD sebanyak 16,59 persen.

Tabel II. 7
Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pendidikan Tahun 2018

No.	Uraian	Jumlah Penduduk	%
1.	Tidak/Belum Sekolah	674.846	21,81
2.	Belum Tamat SD/ sederajat	225.231	7,28
3.	SD/ sederajat	513.384	16,59
4.	SLTP/ sederajat	402.379	13,00
5.	SLTA/ sederajat	891.913	28,82
6.	DI/ D II	21.054	0,68
7.	Akademi DIII/ Sarjana Muda	40.013	1,29
8.	DIV/ S1	303.549	9,81
9.	S2/ S3	22.363	0,72
10.	LAIN-LAIN	-	0
JUMLAH		3.094.732	100%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita. Tren IPM Kota Surabaya yang menggunakan metode baru ditunjukkan pada Tabel II. 8.

Tabel II. 8
Tren IPM Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018

Uraian	2016	2017	2018
IPM	80,38	81,07	81,74

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, April 2019

2.1.2.1.3 PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah dalam satu tahun. PDRB umumnya digunakan

sebagai indikator kinerja perekonomian suatu negara. Berbeda dengan perhitungan PDRB sebelumnya, dasar perhitungan PDRB saat ini tidak lagi menggunakan angka tahun dasar 2000 melainkan menggunakan angka tahun dasar 2010. Perubahan tahun dasar PDRB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT). Salah satu implikasi perubahan ini adalah meningkatnya nominal PDRB dan perubahan struktur ekonomi yang mulanya 9 sektor ekonomi menjadi 17 kategori lapangan usaha.

Nilai PDRB Kota Surabaya atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 sebesar Rp547.769.496.960.000,- yang meningkat dibanding tahun 2017 sebesar Rp495.043.304.500.000,-. Kinerja sektor ekonomi pembentuk PDRB tersebut pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang bervariasi namun masih lebih tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya. Kinerja sektor tertinggi yang berkontribusi terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya tahun 2018 adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp154.687.454.960.000,- atau meningkat sebesar 12,65% dibanding dengan tahun 2017 sebesar Rp137.322.725.100.000,-. Selanjutnya diikuti oleh sektor industri pengolahan dengan nilai kontribusi sebesar Rp101.871.621.070.000,- di tahun 2018 atau meningkat sebesar 9,82% dibanding tahun 2017 sebesar Rp92.762.070.100.000,- sebagai sektor yang berkontribusi paling tinggi kedua dalam pembentuk PDRB ADHB Kota Surabaya, seperti yang dapat dilihat pada tabel II.9.

Sama halnya dengan PDRB ADHB Kota Surabaya, PDRB ADHK pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 PDRB ADHK Kota Surabaya sebesar Rp364.714.819.500.000,- meningkat menjadi sebesar Rp387.292.704.090.000,- di tahun 2018. Kategori lapangan usaha yang paling besar menghasilkan PDRB ADHK tahun 2018 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar Rp109.871.557.540.000,- diikuti oleh sektor Industri Pengolahan sebesar Rp73.033.402.380,- serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar Rp58.460.906.750.000, seperti dapat dilihat pada tabel II.9 berikut.

Tabel II. 9
Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Seri Tahun Dasar 2010,Tahun 2016 – 2018 (dalam Juta Rp)

Kategori	Uraian	2016		2017*		2018**	
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	808.811,90	0,18	883.177,30	0,18	913.484,74	0,17
B	Pertambangan dan Penggalan	29.145,20	0,01	30.638,60	0,01	31.562,67	0,01
C	Industri Pengolahan	85.213.283,80	18,87	92.762.070,10	18,74	101.871.621,07	18,60
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.144.720,80	0,48	2.263.680,00	0,46	2.238.366,85	0,41
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	678.586,70	0,15	740.173,40	0,15	771.856,00	0,14
F	Konstruksi	45.103.247,10	9,99	49.603.609,40	10,02	52.770.743,61	9,63
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	124.579.579,50	27,59	137.322.725,10	27,74	154.687.454,96	28,24
H	Transportasi dan Pergudangan	23.647.508,70	5,24	26.215.295,80	5,30	29.211.518,37	5,33
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	70.854.863,30	15,69	78.971.933,90	15,95	88.834.803,18	16,22
J	Informasi dan Komunikasi	24.457.105,40	5,42	26.571.784,80	5,37	29.039.867,68	5,30
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	24.105.835,20	5,34	25.631.465,10	5,18	28.132.150,09	5,14
L	Real Estate	11.614.141,30	2,57	12.495.064,20	2,52	14.186.426,67	2,59
M,N	Jasa Perusahaan	10.926.169,80	2,42	12.098.851,20	2,44	13.339.657,11	2,44

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kota Surabaya Tahun 2020

Kategori	Uraian	2016		2017*		2018**	
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.221.289,50	1,38	6.768.287,70	1,37	7.171.019,61	1,31
P	Jasa Pendidikan	11.036.182,80	2,44	11.958.097,20	2,42	12.661.378,86	2,31
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.389.778,00	0,75	3.730.513,90	0,75	4.053.988,68	0,74
R,S,T,U	Jasa lainnya	6.676.541,90	1,48	6.995.936,80	1,41	7.853.596,80	1,43
Produk Domestik Regional Bruto		451.486.791,00	100,00	495.043.304,50	100,00	547.769.496,96	100,00

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, Februari 2019, *) data sangat sementara **) data proyeksi Bappeko Surabaya

Tabel II. 10
Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2016 – 2018 (dalam Juta Rp)

Kategori	Uraian	2016		2017*		2018**	
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	570.789,40	0,17	589.909,40	0,16	587.185,38	0,15
B	Pertambangan dan Penggalian	20.028,10	0,01	20.544,80	0,01	20.121,43	0,01
C	Industri Pengolahan	66.582.825,60	19,38	69.881.287,90	19,16	73.033.402,38	18,86
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.514.658,20	0,44	1.541.129,00	0,42	1.540.006,38	0,40
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	528.322,40	0,15	564.406,80	0,15	583.121,24	0,15
F	Konstruksi	33.864.739,10	9,85	36.208.179,00	9,93	38.371.797,07	9,91
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	97.443.597,60	28,36	103.301.112,80	28,32	109.871.557,54	28,37
H	Transportasi dan Pergudangan	16.569.183,70	4,82	17.707.950,20	4,86	19.276.049,86	4,98
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	49.881.297,70	14,52	54.192.882,20	14,86	58.460.906,75	15,09
J	Informasi dan Komunikasi	22.421.127,20	6,52	23.974.911,30	6,57	25.925.129,71	6,69
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	17.184.785,50	5,00	17.685.808,00	4,85	18.536.478,96	4,79
L	Real Estate	9.145.630,80	2,66	9.610.228,80	2,63	10.165.858,67	2,62
M,N	Jasa Perusahaan	7.761.412,10	2,26	8.278.199,90	2,27	8.867.969,79	2,29

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kota Surabaya Tahun 2020

Kategori	Uraian	2016		2017*		2018**	
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	570.789,40	0,17	4.597.265,30	1,26	4.585.695,63	1,18
P	Jasa Pendidikan	20.028,10	0,01	8.531.781,70	2,34	8.843.385,71	2,28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	66.582.825,60	19,38	2.804.625,20	0,77	3.023.872,00	0,78
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.514.658,20	0,44	5.224.597,00	1,43	5.605.165,63	1,45
Produk Domestik Regional Bruto		343.652.595,00	100,00	364.714.819,50	100,00	387.297.704,13	100,00

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, Februari 2018, *) data sangat sementara **) data proyeksi Bappeko Surabaya

Tabel II. 11
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Kategori	Uraian	2016		2017		2018	
		ADHB (%)	ADHK (%)	ADHB (%)	ADHK (%)	ADHB (%)	ADHK (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,18	0,17	0,18	0,16	0,17	0,15
B	Pertambangan dan Penggalan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
C	Industri Pengolahan	18,87	19,38	18,74	19,16	18,60	18,86
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,48	0,44	0,46	0,42	0,41	0,40
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,15
F	Konstruksi	9,99	9,85	10,02	9,93	9,63	9,91
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	27,59	28,36	27,74	28,32	28,24	28,37
H	Transportasi dan Pergudangan	5,24	4,82	5,30	4,86	5,33	4,98
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15,69	14,52	15,95	14,86	16,22	15,09
J	Informasi dan Komunikasi	5,42	6,52	5,37	6,57	5,30	6,69
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,34	5,00	5,18	4,85	5,14	4,79
L	Real Estate	2,57	2,66	2,52	2,63	2,59	2,62
M,N	Jasa Perusahaan	2,42	2,26	2,44	2,27	2,44	2,29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,38	0,17	1,37	1,26	1,31	1,18
P	Jasa Pendidikan	2,44	0,01	2,42	2,34	2,31	2,28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,75	19,38	0,75	0,77	0,74	0,78
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,48	0,44	1,41	1,43	1,43	1,45
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, Februari 2018,

*) data sangat sementara

**) data proyeksi Bappeko Surabaya

Struktur ekonomi Kota Surabaya masih memiliki pola yang sama seperti tahun sebelum-sebelumnya, dimana kategori yang mendominasi dalam berkontribusi terhadap perekonomian Kota Surabaya yaitu kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor, industri pengolahan serta akomodasi,serta makanan minuman. Tingginya kontribusi ketiga kategori tersebut selaras dengan maraknya aktivitas perdagangan barang dan jasa yang terus tumbuh pesat di Kota Surabaya. Disamping itu, daya dukung seperti padatnya jumlah penduduk Kota Surabaya disertai tingginya tingkat konsumsi membuat Kota Surabaya memiliki nilai tambah lebih besar bagi pelaku pasar.

Selama tahun 2016-2018 kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor memberikan kontribusi terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya sebesar 27-28 persen setiap tahunnya. Sebagai penggerak utama perekonomian Kota Surabaya, pesatnya aktivitas perdagangan tersebut tentunya menjadi pengungkit (*multiplier effect*) bagi aktivitas lapangan usaha lainnya seperti aktivitas industri, penyediaan akomodasi dan makanan minuman serta aktivitas jasa lainnya. Hal itu terjadi karena semakin meningkatnya aktivitas perdagangan maka semakin meningkat pula permintaan barang dan jasa pada aktivitas industri. Berdasarkan keterkaitan tersebut menjadikan kategori industri pengolahan sebagai kategori lapangan usaha paling dominan kedua dengan nilai kontribusi 18-19 persen terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya setiap tahunnya.

Kategori tertinggi selanjutnya yaitu akomodasi dan makanan minuman dengan kontribusi rata-rata sebesar 15-16 persen terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya. Potensi aktivitas akomodasi dan makanan minuman di Kota Surabaya sangatlah besar. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh pembangunan hotel, wisma/penginapan, serta tempat makan mulai dari warung kecil hingga restoran yang terus bermunculan mengikuti pesatnya perkembangan ekonomi Kota Surabaya. Ditambah lagi, semakin modernnya perilaku hidup masyarakat Kota Surabaya turut mendukung tumbuhnya aktivitas kategori akomodasi dan makanan minuman dari tahun ke tahun.

2.1.2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya

Kota Surabaya sebagai salah satu ibu kota Provinsi yang memiliki fungsi strategis dalam perekonomian Indonesia memiliki beragam infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi termasuk aktivitas perdagangan, baik perdagangan antar pulau maupun perdagangan antar Negara. Kinerja laju pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi per kategori lapangan usaha menunjukkan pergerakan yang beragam, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel II. 12. Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha terkecuali lapangan usaha pengadaan listrik dan gas. Jika dirinci, kategori lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan rata-rata tinggi setiap tahunnya adalah kategori jasa keuangan dan asuransi, kategori informasi dan komunikasi, kategori penyediaan

akomodasi dan makan minum serta kategori perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor.

Adapun kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang rendah yaitu kategori pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial; serta jasa lainnya. Berdasarkan rinciannya, hampir seluruh kategori lapangan usaha pembentuk PDRB Kota Surabaya mengalami pertumbuhan yang positif terkecuali kategori pengadaan listrik dan gas. Kategori tersebut mengalami pertumbuhan yang negatif selama ini dikarenakan kebijakan pemerintah yang mencabut subsidi sehingga mempengaruhi produktivitas pada aktivitas lapangan usaha pengadaan listrik dan gas.

Tabel II. 12
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha
Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2016 – 2018

Kategori	Uraian	2016	2017	2018*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,36	3,35	-1,31
B	Pertambangan dan Penggalian	3,14	2,58	-2,06
C	Industri Pengolahan	4,91	4,95	4,51
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-1,05	1,75	-0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,92	6,83	3,32
F	Konstruksi	5,01	6,92	5,98
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,82	6,01	6,36
H	Transportasi dan Pergudangan	4,89	6,87	8,86
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,63	8,64	7,88
J	Informasi dan Komunikasi	6,98	6,93	8,13
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,65	2,92	4,81
L	Real Estate	5,32	5,08	5,78
M,N	Jasa Perusahaan	5,05	6,66	7,12
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,09	4,85	-0,25
P	Jasa Pendidikan	6,02	5,95	3,65
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,85	5,87	7,82
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,99	2,89	7,28
PDRB		5,97	6,13	6,19
PDRB TANPA MIGAS		5,97	6,13	6,19

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, Februari 2019,

*) data sangat sementara

Ditengah berlangsungnya pemulihan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi domestik tetap terjaga kestabilitasnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya masihtumbuh

positif. Beberapa permasalahan diindikasikan beresiko menghambat kemampuan perekonomian untuk tumbuh lebih tinggi. Dari sisi permintaan, peran konsumsi rumah tangga sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi cenderung semakin terbatas. Kendati demikian, capaian pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya masih memiliki pola yang sama dari tahun ke tahun, yakni pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional. Selengkapnya pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional terangkum dalam tabel berikut.

Tabel II. 13
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2015 – 2017(%)

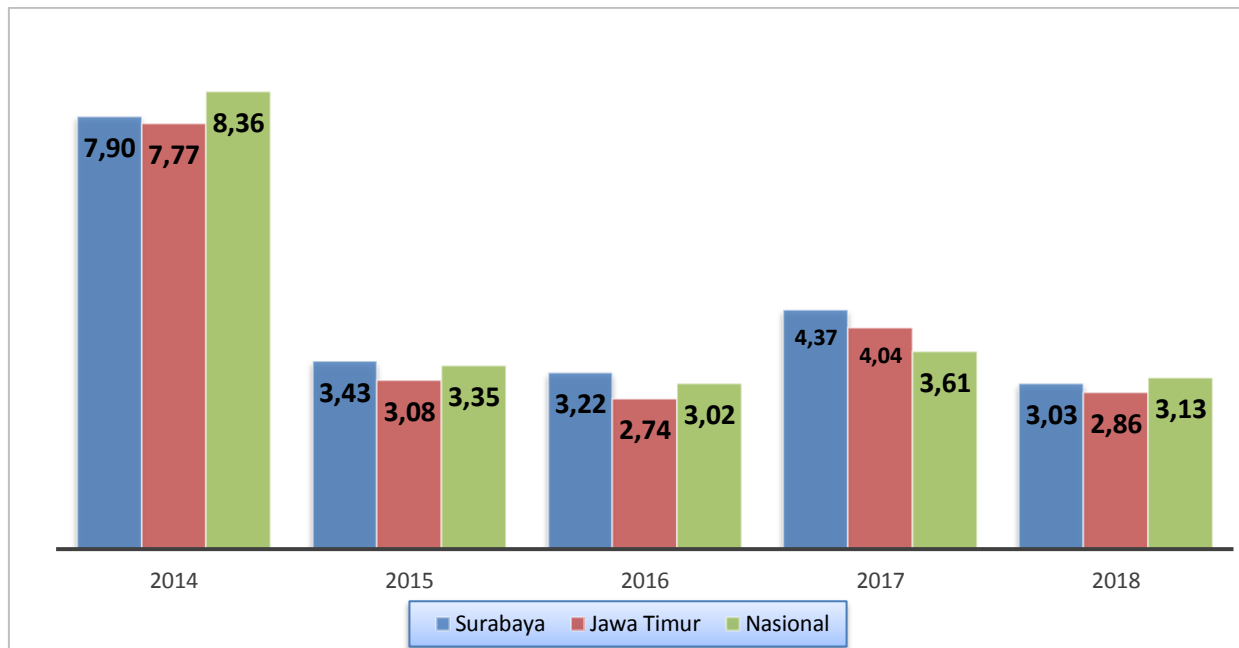
Pertumbuhan Ekonomi	2016	2017	2018*
Surabaya	6,00	6,13	6,19
Jawa Timur	5,57	5,45	5,50
Nasional	5,03	5,07	5,17

Sumber data: BPS Kota Surabaya Februari 2019 diolah

*) Angka sementara

2.1.2.1.5 Tingkat Inflasi

Pada tahun 2018 tingkat inflasi Kota Surabaya sebesar 3,03 persen. Angka tersebut menurun dibandingkan inflasi Kota Surabaya Tahun 2017 sebesar 4,37 persen. Selaras dengan target yang ditetapkan, tingkat inflasi Kota Surabaya tahun 2018 juga sejalan dengan target sasaran inflasi pemerintah tahun 2018 sebesar $3,5 \pm 1$ persen, sebagaimana dapat dilihat pada grafik dibawah.



Gambar II. 9
Inflasi Kota Surabaya (persen) Tahun 2012-2017

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, Februari 2019,

Pergerakan inflasi Kota Surabaya dari tahun ke tahun selalu selaras dengan inflasi Jawa Timur dan Nasional. Bahkan capaian inflasi Kota Surabaya pada tahun 2018 cukup baik, dimana dalam 3 (tiga) tahun terakhir umumnya inflasi Kota Surabaya selalu lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur dan Nasional, namun kali ini meskipun lebih tinggi dibanding inflasi Jawa Timur sebesar 2,86% namun lebih rendah dibandingkan Nasional yakni sebesar 3,13 persen.

Berdasarkan pemantauan harga yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 10 (sepuluh) komoditas utama yang memberikan sumbangan terbesar secara berurutan yang membentuk inflasi Kota Surabaya tahun 2018 antara lain: bensin, daging ayam ras, beras, kontrak rumah, rokok kretek filter, sekolah dasar, akademi/perguruan tinggi, bawang merah, emas perhiasan dan tukang bukan mandor.

Jika diamati berdasarkan kelompok pembentuknya, capaian inflasi Kota Surabaya tahun 2018 paling banyak dikontribusi oleh inflasi pada kelompok inti dan kelompok barang yang harganya diatur oleh pemerintah (*administered price*).

Selain komoditas dari kelompok *administered price*, komoditas dari kelompok *volatile food* turut mendorong inflasi akibat tidak seimbangnya antara ketersediaan dan permintaan. Beras menjadi komoditi yang turut andil memicu inflasi tinggi di tahun 2018. Hal itu terjadi karena selain faktor cuaca yang mempengaruhi turunnya produksi beras serta jumlah pasokan beras yang sedikit tersendat, disamping itu juga, adanya penetapan harga eceran tertinggi (HET) beras oleh pemerintah turut memicu kenaikan harga sampai akhir tahun 2018. Selain

beras, komoditi bawang putih sempat menjadi pemicu inflasi di tahun 2018 dikarenakan disebabkan kelangkaan produksi, mengingat sebagian besar bawang putih yang beredar dipasaran berasal dari impor. Harga bawang putih kembali normal setelah impor kembali dibuka dan dilakukan operasi pasar di beberapa titik pasar.

Sementara komoditas yang menahan laju inflasi di tahun 2018 sebagai dampak terjaganya pasokan yakni bawang merah, bawang putih, cabai rawit, gula pasir, kembung rebus. Komoditas bawang merah selama tahun 2018 mengalami beberapa kali penurunan harga dikarenakan melimpahnya ketersediaan serta pengaruh cuaca yang membaik membuat harganya relatif stabil.

Inflasi yang lebih tinggi dibanding nasional dan Jawa Timur dari sisi kelompok harga diatur pemerintah memberikan analisa seperti dua mata uang, komposisi penggunaan listrik dan BBM maupun banyaknya kepemilikan kendaraan pribadi masyarakat Kota Surabaya disatu sisi akan menyebabkan namun disisi lain, komposisi tersebut mengindasikan bahwa masyarakat Kota Surabaya akan kemampuannya memiliki.

Pergerakan inflasi yang fluktuatif perlu dikendalikan untuk meningkatkan dan menjaga daya beli masyarakat tetap stabil melalui upaya-upaya yang dapat menjaga stabilitas harga khususnya bahan pokok, mengingat Surabaya bukan produsen melainkan pasar. Berdasarkan pergerakan harga (harian) beberapa bahan pokok dapat dihitung tingkat fluktuasi sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel II. 14
Tingkat Fluktuasi Harga Beberapa Bahan Pokok
Tahun 2017 –2018

Nama Bahan Pokok	Satuan	Tahun			
		2017		2018*	
		Fluktuasi Harga	Tingkat Stabilisasi Harga (Target Fluktuasi 5%)	Fluktuasi Harga	Tingkat Stabilisasi Harga (Target Fluktuasi 5%)
BERAS					
Beras IR.64 Kualitas I	Kg	0,87%	182,6%	2,2%	156,4%
Beras IR.64 Kualitas II	Kg	1,60%	168,0%	5,4%	92,0%
Beras IR.64 Kualitas III	Kg	1,60%	167,9%	3,1%	138,1%
GULA					
Gula Pasir Lokal Curah	Kg	4,82%	103,5%	3,0%	139,8%
MINYAK GORENG					
Minyak Goreng Curah (Bening)	Kg	2,49%	150,3%	3,5%	131,0%
DAGING					
Daging Sapi "Grade Atas"	Kg	4,31%	113,8%	0,8%	184,3%
Daging Sapi "Grade Sedang"	Kg	1.74%	165.1%	0.9%	181.3%

Nama Bahan Pokok	Satuan	Tahun			
		2017		2018*	
		Fluktuasi Harga	Tingkat Stabilisasi Harga (Target Fluktuasi 5%)	Fluktuasi Harga	Tingkat Stabilisasi Harga (Target Fluktuasi 5%)
Daging Sapi "Grade Bawah"	Kg	1,28%	174,3%	0,9%	182,3%
Daging Ayam Broiler	Kg	5,17%	96,5%	7,2%	56,1%
I K A N					
Ikan Tongkol Segar (Uk. Sedang)	Kg	4,51%	109,7%	-	-
Ikan Mujair Segar (Uk. Sedang)	Kg	11,63%	32,64%	-	-
Udang Segar (Uk. Sedang)	Kg	6,45%	71,0%	-	-
Ikan Lele Segar (Uk. Sedang)	Kg	2,15%	157,1%	-	-
Ikan Bandeng Segar (Uk. Sedang)	Kg	3,93%	121,3%	-	-
Ikan Teri Asin (Bukan Teri Medan)	Kg	2,79%	144,2%	-	-
TELUR					
Telur Ayam Broiler	Kg	9,62%	7,5%	8,2%	36,0%
Telur Ayam Kampung	Butir	14,68%	93,54%	3,8%	124,1%

Sumber: Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah dan Dinas Perdagangan, diolah Bappeko, 2019

*) Angka sementara

2.1.2.1.6 PDRB Per Kapita

Kinerja ekonomi suatu wilayah dapat dinilai dengan berbagai ukuran. Secara umum, kinerja tersebut diukur melalui sebuah besaran yaitu PDRB perkapita. PDRB per kapita merupakan konsep yang paling sering dipakai sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk di suatu wilayah. PDRB perkapita merupakan gambaran pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi. PDRB per kapita ADHB untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. Besaran PDRB per kapita diperoleh dari *output* yang dihasilkan pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada tahun tersebut. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk membandingkan kesejahteraan atau standar hidup suatu wilayah dari tahun ke tahun. Dengan melakukan perbandingan seperti itu, kita dapat mengamati apakah kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah secara rata-rata telah meningkat. Berikut rangkuman data yang menggambarkan tingkat pendapatan perkapita penduduk di Kota Surabaya tahun 2016–2018.

Tabel II. 15
PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2018

Tahun	2016	2017	2018**
ATAS DASAR HARGA BERLAKU			
PDRB (Milyar Rp)	451.486,79	495.043,31	547.769,49
PDRB Per Kapita (Juta Rp)	149,68	160,99	177,00
ATAS DASAR HARGA KONSTAN			
PDRB (Milyar Rp)	343.652,59	364.714,82	387.292,71
PDRB Per Kapita (Juta Rp)	113,93	118,61	125,15
Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun	3.016.368	3.074.883	3.094.732

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, Februari 2019,

*) data sangat sementara

**) data proyeksi Bappeko Surabaya

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, PDRB perkapita Kota Surabaya ADHK menunjukkan peningkatan pada setiap tahunnya. Peningkatan PDRB perkapita harus diiringi dengan peningkatan dan pemerataan pendapatan penduduk sehingga tujuan pembangunan untuk masyarakat sejahtera dapat terwujud.

2.1.2.1.7 Indeks Gini

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Koefisien Gini bernilai nol, jika pendapatan secara nyata menyebar merata, dan mendekati 1 jika secara nyata distribusi pendapatan menyebar tidak merata. Berdasarkan nilai *gini ratio*, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu: ketimpangan tinggi jika nilai koefisien *gini ratio* 0,5 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,30.

Nilai Indeks Gini Kota Surabaya selama kurun waktu 4 tahun berada pada kisaran 0,3 – 0,4, yang tergolong dalam kategori sedang, namun pada tahun 2015 tingkat pemerataan pendapatan masuk dalam kategori tinggi. Oleh karena itu, tingkat pemerataan distribusi pendapatan perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Surabaya agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang dapat berakibat pada kesenjangan sosial dan menimbulkan konflik karena tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah rakyat sejahtera. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya- upaya untuk pemerataan ekonomi melalui peningkatan produktivitas usaha masyarakat.

Tabel II. 16
Gini Ratio Kota Surabaya Tahun 2014 – 2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Gini Ratio	0,39	0,42	0,41	0,39	0,387

Sumber data: BPS Provinsi Jawa Timur, diolah, Februari 2019

2.1.2.1.8 Indeks Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan SDA dan perbedaan kondisi geografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi terhadap kebijakan pembangunan wilayah dan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Ukuran ketimpangan wilayah ini menggunakan metode *Williamson Index* yang menganalisa PDRB per kapita sebagai data dasar. Karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat, dengan ukuran bila angka indeks mendekati 1 berarti semakin timpang dan bila angka indeks mendekati nol berarti semakin merata.

Tabel II. 17
Indeks Ketimpangan Wilayah Kota Surabaya

Tahun	2016	2017	2018
Indeks Ketimpangan Wilayah (PDRB Tahun dasar 2010)	0,67	0,669	0,669

Sumber : Hasil Analisa Bappeko, 2019

Terjadinya perubahan tahun dasar dalam PDRB yaitu yang awalnya menggunakan tahun dasar 2000 menjadi tahun dasar 2010 maka terjadi perubahan besaran indeks Williamson dapat disajikan pada Tabel II. 17. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa secara umum ketimpangan pembangunan antar kecamatan di Kota Surabaya relatif tinggi dengan nilai indeks sekitar 0,6 namun mempunyai kecenderungan yang terus meningkat.

2.1.2.1.9 Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Pencapaian kesejahteraan masyarakat dengan melihat distribusi pendapatan juga menjadi perhatian Bank Dunia yang kemudian membuat suatu indikator untuk mengukur tingkat pemerataan tersebut. Dalam mengukur tingkat pemerataan pendapatan tersebut, Bank Dunia memfokuskan pada persentase pendapatan yang diterima oleh 40 % penduduk dengan pendapatan terendah.

Menurut Bank Dunia, ketimpangan distribusi pendapatan dikatakan tinggi jika persentase pendapatan yang diterima oleh 40 % penduduk berpendapatan terendah kurang dari 12 %, sedang jika persentasenya berada antara 12 % hingga 17%, dan ketimpangan rendah jika persentase mencapai lebih dari 17%.

Tabel II. 18
Persentase Pendapatan yang Diterima Penduduk Menurut Kelompok
Pendapatan Kota Surabaya

Tahun	40 % terbawah	40 % menengah	20 % tertinggi
2012	21,38	32,01	46,61
2013	23,55	36,62	39,83
2014	19,74	31,64	48,62
2015	17,81	32,34	49,85
2016	17,96	33,80	48,24

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2013 diolah

Seperti disajikan pada Tabel II. 18, pada tahun 2015 ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Surabaya tergolong rendah, yaitu persentase pendapatan/pengeluaran yang dikuasai oleh 40% penduduk termiskin mencapai lebih dari 17% dari total pendapatan/pengeluaran penduduk. Persentase tersebut mencapai 17,81%.

2.1.2.1.10 Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis kemiskinan Kota Surabaya tahun 2017 sebesar Rp474.365,- dan meningkat menjadi Rp530.178,- pada tahun 2018. Jumlah penduduk miskin menurun dari tahun 2017 sebanyak 154.710 jiwa menjadi 140.810 jiwa pada tahun 2018, sehingga persentase penduduk miskin menurun menjadi 4,54%. Angka Kemiskinan Kota Surabaya ditunjukkan pada Tabel II. 19.

Tabel II. 19
Angka dan Garis Kemiskinan serta Jumlah Penduduk Miskin
Kota Surabaya Tahun 2014 – 2018

Kemiskinan	2014	2015	2016	2017	2018
Angka Kemiskinan (persen)	5,79	N/A	5,63	5,39	4,54
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)	393.151	N/A	438.283	474.365	530.178
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	164,36	N/A	161,01	154,71	140,81

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2019

Program dan kegiatan berbagai sektor yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya bertujuan untuk meringankan beban penduduk miskin melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan maupun program dan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan skill melalui pelatihan, pemberdayaan UKM serta inkubasi dan klinik usaha mandiri. Intervensi tersebut diharapkan mampu menurunkan jumlah penduduk miskin.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.2 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperandalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin baik kualitas SDM menjadikan semakin baik pula kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial di bidang pendidikan diukur melalui beberapa indikator, di antaranya meliputi angka melek huruf, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan rata-rata lama sekolah.

Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf penduduk Kota Surabaya sebesar 100 persen pada tahun 2016-2018. Pada tahun 2016 jumlah penduduk Kota Surabaya dengan usia 15 tahun ke atas tercatat sebanyak 2.361.908 jiwa, pada tahun 2017 sebanyak 2.408.552 jiwa, pada tahun 2018 sebanyak 2.157.098 dan seluruhnya dapat membaca dan menulis. Rekapitulasi data perkembangan AMH Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II. 20
Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah Penduduk Usia Diatas 15 tahun yang Bisa Membaca dan Menulis	2.361.908	2.408.552	2.157.098
2	Jumlah Penduduk Usia 15 tahun Keatas	2.361.908	2.408.552	2.157.098
3	Angka Melek Huruf (%)	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Dinas Pendidikan & Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019

Dari data pada Tabel II. 20 tersebut diatas, berdasarkan data yang tercatat di Dinas Pendidikan Kota Surabaya menunjukkan bahwa penduduk Kota Surabaya usia 15 tahun keatas seluruhnya telah mampu membaca dan menulis.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM merupakan indikator yang melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar usia siswa di jenjang tersebut.

APM pada tahun 2016 jenjang SD/MI sebesar 92,38 persen, jenjang SMP/MTs sebesar 90,93 persen. APM pada tahun 2017 jenjang SD/MI sebesar 100,54 persen dan jenjang SMP/MTs sebesar 75,09 persen. Sedangkan pada tahun 2018 APM jenjang SD/MI sebesar 95,71 persen dan jenjang SMP/MTs sebesar 83,80 persen. Khusus APM jenjang SMA/MA/SMK, terhitung mulai 1 Januari 2017 telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rekap data perkembangan APM Kota Surabaya tahun 2016-2018 disajikan pada Tabel II. 21 sebagai berikut:

Tabel II. 21
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya
Tahun 2016 - 2018

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018
1	SD/MI			
1.1	Jumlah Siswa Kelompok usia 7-12 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI	255.142	282.604	274.104
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	276.183	281.089	286.373
	APM SD/MI (persen)	92,38	100,54	95,71
2	SMP/MTs			
2.1	Jumlah Siswa Kelompok usia 13-15 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs	128.810	108.231	118.636
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	141.653	144.127	141.554
	APM SMP/MTs (persen)	90,93	75,09	83,80

Sumber: Dinas Pendidikan, 2019

Adapun rasio perempuan terhadap laki-laki untuk APM Kota Surabaya dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel II. 22
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan Terhadap Laki-Laki
Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018
1.	Rasio APM perempuan/laki-laki SD/MI (persen)	97,78	99,76	101,73%
2.	Rasio APM perempuan/laki-laki SMP/MTs (persen)	90,42	94,52	105,49%

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2019

Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK ini berfungsi untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan sekaligus merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Rekap data perkembangan APK Kota Surabaya tahun 2015 - 2017 disajikan pada Tabel II. 23 sebagai berikut.

Tabel II. 23
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018
1.	PAUD (KB, TK, PPT, TPA)			
1.1	Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan PAUD	123.925	119.747	119.047
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 3-6 Tahun	192.239	177.009	179.389
	APK PAUD (persen)	64,46	67,65	66,36
2.	SD/MI			
2.1	Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI	281.310	287.406	287.830
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	276.183	281.089	286.373
	APK SD/MI (persen)	101,86	102,25	100,50
3.	SMP/MTs			
3.1	Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs	135.283	143.426	129.136
3.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	141.653	144.127	141.554
	APK SMP/MTs (persen)	95,50	99,51	91,22

Sumber: Dinas Pendidikan, 2019

Rata-rata lama sekolah menurut BPS adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 21 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Data perkembangan rata-rata lama sekolah Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018 disajikan pada Tabel II. 24.

Tabel II. 24
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Surabaya
Tahun 2016 - 2018

Indikator	2016	2017	2018
Rata-Rata Lama Sekolah	10,44	14,48	14,7

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2019

Angka harapan lama sekolah menurut BPS adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Data perkembangan angka harapan lama sekolah Kota Surabaya tahun 2016 –2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II. 25
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2018

Indikator	2016	2017	2018
Angka Harapan Lama Sekolah	13,99	10,64	10,59

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2019

Dari data pada tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kota Surabaya berharap mengenyam pendidikan melebihi jenjang menengah atau SMA.

Aspek lain yang menjadi fokus Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat adalah pemenuhan tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehingga memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Adapun Persentase guru SD yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik yang dibuktikan melalui ijazah S1 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau AKTA 4 di tahun 2017 mencapai 93,26 persen, sedangkan pada tahun 2018 telah mencapai 100 persen.

Tabel II. 26
Persentase Guru SD yang Memiliki Kesesuaian Kualifikasi Akademik
Tahun 2017– 2018

Indikator	2017	2018
Persentase Guru SD yang Memiliki Kesesuaian Kualifikasi Akademik	93,26	100

Sumber: Dinas Pendidikan, 2019

2.1.2.2.3 Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah salah satunya dapat diukur dengan angka harapan hidup (AHH) dan penurunan balita gizi buruk. Perkembangan AHH Kota Surabaya disajikan pada Tabel II. 27.

Tabel II. 27
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Surabaya
Tahun 2016– 2018

Indikator	2016	2017	2018
Angka Harapan Hidup (persen)	73,87	73,88	73,89

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2019

AHH penduduk Kota Surabaya pada tahun 2017 sebesar 73,88 tahun dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 73,89 tahun.

Status gizi masyarakat pada balita di Kota Surabaya secara umum terus menunjukkan kemajuan signifikan yang ditandai dengan menurunnya angka prevalensi gizi buruk pada balita. Persentase balita gizi buruk pada tahun 2016 sebesar 0,16 persen dan pada tahun 2017 menurun menjadi 0,15 persen. Berikut ini merupakan rekapitulasi data prevalensi balita gizi buruk tahun 2015- 2017.

Tabel II. 28
Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2018

No.	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah balita dengan status gizi buruk	280	278	254
2	Jumlah balita yang ditimbang	176.439	179.662	181.842
3	Persentase (persen)	0,16	0,15	0,14

Sumber : Dinas Kesehatan, 2019

Tabel II. 29
Prevalensi Balita Kurang Gizi (Gizi Buruk + Gizi Kurang) Kota Surabaya
Tahun 2017 – 2018

No.	Uraian	2017	2018
1	Jumlah balita dengan status gizi buruk dan kurang	16.627	15.274
2	Jumlah balita yang ditimbang	179.662	181.842
3	Persentase (persen)	9,25	8,39

Sumber : Dinas Kesehatan, 2019

Tabel II. 30
Perkembangan Balita Gizi Buruk Kota Surabaya (menurut Kecamatan)
Tahun 2015 –2017

No.	Kecamatan	2016			2017			2018		
		Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk
1	Kec. Asemrowo	5	3.629	0,14%	0	3.633	0,00%	4	3.369	0,12%
2	Kec. Benowo	2	4.198	0,05%	4	4.506	0,09%	4	4.559	0,09%
3	Kec. Bubutan	3	6.153	0,05%	4	6.361	0,06%	3	5.989	0,05%
4	Kec. Bulak	5	2.887	0,17%	3	2.770	0,11%	4	2.839	0,14%
5	Kec. Dukuh Pakis	3	2.849	0,11%	5	3.436	0,15%	4	3.293	0,12%
6	Kec. Gayungan	11	2.291	0,48%	3	2.449	0,12%	2	2.338	0,09%
7	Kec. Genteng	3	2.974	0,10%	8	3.203	0,25%	11	3.257	0,34%
8	Kec. Gubeng	7	7.327	0,10%	2	7.164	0,03%	0	7.268	0,00%
9	Kec. Gunung Anyar	0	2.672	0,00%	2	3.321	0,06%	2	3.483	0,06%
10	Kec. Jambangan	6	3.562	0,17%	6	3.586	0,17%	3	3.587	0,08%
11	Kec. Karangpilang	4	3.759	0,11%	2	4.155	0,05%	2	4.347	0,05%
12	Kec. Kenjeran	4	10.888	0,04%	7	11.251	0,06%	13	11.822	0,11%
13	Kec. Krembangan	5	7.533	0,07%	7	7.597	0,09%	2	7.987	0,03%
14	Kec. Lakarsantri	2	3.760	0,05%	2	5.148	0,04%	9	3.670	0,25%
15	Kec. Mulyorejo	5	5.624	0,09%	2	5.373	0,04%	4	5.589	0,07%
16	Kec. Pabean Cantian	9	4.462	0,20%	3	4.425	0,07%	5	4.357	0,11%
17	Kec. Pakal	48	4.496	1,07%	44	4.576	0,96%	16	4.394	0,36%
18	Kec. Rungkut	9	6.210	0,14%	11	6.803	0,16%	8	7.304	0,11%
19	Kec. Sambikerep	6	4.282	0,14%	2	2.864	0,07%	5	4.229	0,12%

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Surabaya Tahun 2020

No.	Kecamatan	2016			2017			2018		
		Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk
20	Kec. Sawahan	12	12.865	0,09%	16	12.390	0,13%	14	12.380	0,11%
21	Kec. Semampir	16	11.456	0,14%	21	11.651	0,18%	25	11.740	0,21%
22	Kec. Simokerto	14	5.868	0,24%	16	5.807	0,28%	14	5.694	0,25%
23	Kec. Sukolilo	11	5.751	0,19%	7	6.246	0,11%	2	6.540	0,03%
24	Kec. Sukomanunggal	47	6.791	0,69%	63	6.775	0,93%	60	6657	0,90%
25	Kec. Tambaksari	7	10.520	0,07%	12	11.482	0,10%	18	12.229	0,15%
26	Kec. Tandes	3	6.282	0,05%	4	5.989	0,07%	4	6.108	0,07%
27	Kec. Tegalsari	7	5.991	0,12%	9	5.911	0,15%	7	5.884	0,12%
28	Kec. Tenggilis Mejoyo	1	3.121	0,03%	1	2.820	0,04%	0	3.022	0,00%
29	Kec. Wiyung	8	4.125	0,19%	5	4.364	0,11%	3	4.318	0,07%
30	Kec. Wonocolo	2	5.111	0,04%	7	5.037	0,14%	5	4.859	0,10%
31	Kec. Wonokromo	15	9.005	0,17%	16	8.569	0,19%	5	8.730	0,06%
Total		280	176.439	0.16%	278	179.332	0.15%	254	181.842	0.14%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2019

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dapat dilihat pada Tabel II. 31 dan Tabel II. 32 sebagai berikut:

Tabel II. 31
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2018

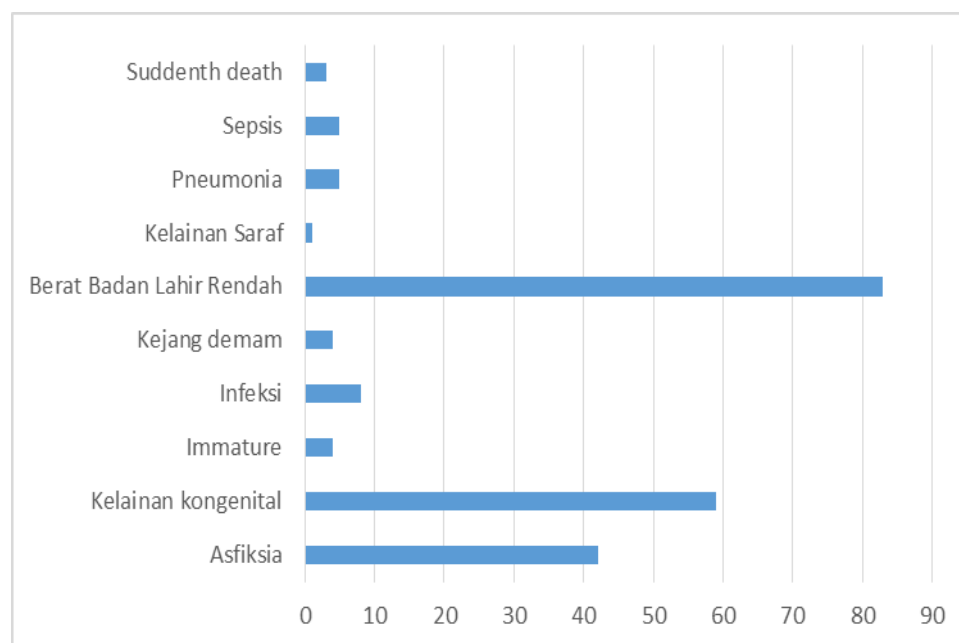
No.	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah Ibu melahirkan yang meninggal	37	34	31
2	Kelahiran Hidup	43.164	42.822	42.474
3	AKI per 100.000 KH	85,72	79,40	72,99

Sumber : Dinas Kesehatan, 2019

Tabel II. 32
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2018

No.	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah bayi lahir meninggal	276	219	214
2	Kelahiran Hidup	43.164	42.822	42.474
3	AKB per 1.000 KH	6,39	5,11	5,04

Sumber : Dinas Kesehatan, 2019



Gambar II. 10
Kematian Bayi berdasarkan Penyebab Kematian Terbanyak Tahun 2018

Sumber: Dinas Kesehatan, 2018 diolah

Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup menurun dari tahun 2016 sebesar 85,72 menjadi 72,99 pada tahun 2018. Demikian pula dengan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2016 sebesar 6,39 menurun menjadi 5,04 pada tahun 2019. Penyebab kematian bayi terbanyak adalah bayi berat lahir rendah (BBLR), asfiksia dan kelainan kongenital.

Dari data padatabel tersebut diatas menunjukkan bahwa Prevalensi Balita Gizi Buruk, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Prevalensi Balita gizi Buruk di Kota Surabaya telah mengalami penurunan setiap tahunnya, sedangkan prevalensi balita kurang gizi dibawah target bahkan capaiannya telah di bawah standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Meskipun capaiannya telah mencapaitarget yang telah ditetapkan, namun dari jumlah kasus kejadian masih cukup besar dan diupayakan menurun setiap tahunnya.

2.1.2.2.4 Ketenagakerjaan

Dengan semakin bertambahnya penduduk maka tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah penduduk usia kerja (tenaga kerja) dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun hal ini belum diiringi dengan perkembangan lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka dalam kurun waktu tahun 2017 dan 2018 mempunyai trend meningkat dengan angka tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2018 yaitu sebesar 6,12%. Adapun data tahun 2016 belum tersedia dikarenakan anggaran Sakernas Besar (Bulan Agustus) berdasarkan kebijakan pemerintah pusat digeser untuk kegiatan lain. Beberapa faktor yang menyebabkan semakin tingginya tingkat pengangguran di Kota Surabaya antara lain faktor kependudukan yang terdiri dari jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi namun tidak dibekali dengan ketrampilan dan mental kerja, tingkat pendidikan rendah, tingkat urbanisasi yang tinggi serta faktor jumlah lapangan kerja yang terbatas, faktor tenaga kerja kontrak (*outsourcing*), dan faktor pemutusan hubungan kerja. Berikut adalah rekapitulasi data tentang tingkat pengangguran terbuka tahun 2017 sampai dan 2018 disajikan pada Tabel II. 33.

Tabel II. 33
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja	85.345	102.914	N/A	89.479	93.096
2	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	1.465.502	1.468.094	N/A	1.495.837	1.520.041
3	Persen Pengangguran Terbuka	5,82%	7,01%	N/A	5,98%	6,12%

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2019

Jumlah angkatan kerja di Kota Surabaya mengalami peningkatan dari tahun 2017 jumlah angkatan kerja di Kota Surabaya sebesar 1.468.094 menjadi 1.520.041 pada tahun 2018. Peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut dapat mendorong kegiatan ekonomi di berbagai sektor, sehingga dapat memberikan dampak positif baik langsung maupun tidak langsung terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan. Peningkatan kesempatan kerja yang diikuti dengan peningkatan produktivitas diharapkan mampu menambah penghasilan/pendapatan masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan seni, budaya dan olahraga merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembinaan dan pembangunan bangsa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya insani, terutama diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, serta untuk membentuk watak dan kepribadian yang memiliki disiplin dan sportivitas yang tinggi. Di samping itu, pembangunan seni, budaya dan olahraga juga dijadikan sebagai alat untuk memperlihatkan eksistensi bangsa melalui pembinaan prestasi yang setinggi-tingginya. Data perkembangan seni, budaya dan olahraga Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel II. 34.

Tabel II. 34
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Surabaya
Tahun 2016 –2018

No.	Capaian Pembangunan	2016	2017	2018
1	Jumlah Grup Kesenian	498	591	611
2	Jumlah Gedung Kesenian	4	4	4
3	Jumlah Klub Olahraga	43	42	42
4	Jumlah Gedung Olahraga	4	4	4

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2019

Dasar pembangunan seni budaya tentu adalah minat masyarakat kota Surabaya terhadap seni budaya itu sendiri, terutama minat akan budaya lokal. Salah satu wadah untuk menyalurkan minat terhadap budaya lokal adalah melalui kelompok/grup kesenian. Jumlah grup kesenian yang ada di Kota Surabaya tahun 2016 sebanyak 498 grup kesenian, tahun 2017 meningkat menjadi 591 grup kesenian dan sampai dengan tahun 2018 meningkat menjadi 611 grup kesenian.

Jumlah cabang olahraga sampai dengan tahun 2018 sebanyak 42 cabang olahraga, dan yang telah berprestasi di tingkat nasional maupun internasional sebanyak 41 cabang olahraga. Untuk

memberikan fasilitasi pembinaan cabang olahraga tersebut, diperlukan gedung olahraga yang baik dan memadai. Sampai dengan tahun 2018, gedung olahraga yang merupakan aset milik Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 4 unit antara lain Gelanggang Remaja, Gelora 10 Nopember, Gelora Bung Tomo dan gedung indoor Surabaya *Sport Center* (SSC). Selain itu, terdapat pula fasilitas gedung untuk pembinaan cabang-cabang olahraga milik KONI Provinsi Jawa Timur, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, dan milik perseorangan maupun badan usaha yang memperhatikan pengembangan olahraga.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan:

2.1.3.1.2 Pendidikan

Untuk mewujudkan Surabaya sebagai kota sentosa melalui peningkatan SDM yang berkualitas, salah satunya dilakukan melalui pelayanan bidang pendidikan yang merupakan pelayanan dasar. Keberhasilan pelayanan pendidikan dapat diukur melalui APK, APM, Angka Kelulusan (AL), dan Angka Putus Sekolah (APS).

2.1.3.1.2.a Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah persentase jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Data perkembangan APK Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018 telah disajikan di atas pada Tabel II. 23 dan APK per kecamatan dalam Tabel berikut.

Tabel II. 35
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya
Menurut Kecamatan Tahun 2018

Kecamatan	APK PAUD			APK SD/MI			APK SMP/MTS		
	jumlah penduduk usia 3-6 tahun	jumlah seluruh siswa di jenjang PAUD	APK	jumlah penduduk usia 7-12 tahun	jumlah seluruh siswa di jenjang SD/MI	APK	jumlah penduduk usia 13-15 tahun	jumlah seluruh siswa di jenjang SMP/MTS	APK
Asemrowo	3.160	1.693	53,58%	5.143	3724	72,41%	2.434	1742	71,57%
Benowo	4.244	3.432	80,87%	6.733	6821	101,31%	3.314	2476	74,71%
Bubutan	5.921	3.654	61,71%	9.678	8964	92,62%	4.923	2224	45,18%
Bulak	2.864	1.809	63,16%	4.557	6152	135,03%	2.314	2631	113,70%
Dukuh Pakis	3.546	2.838	80,03%	5.599	6454	115,31%	2.698	3012	111,68%
Gayungan	2.596	1.732	66,72%	3.971	6138	154,57%	2.033	2355	115,84%
Genteng	3.214	2.655	82,61%	5.193	6587	126,84%	2.652	5210	196,46%
Gubeng	7.541	5.159	68,41%	12.284	13617	110,85%	6.216	3843	61,82%
Gunung Anyar	3.623	3.127	86,31%	5.481	4747	86,61%	2.633	1358	51,58%
Jambangan	3.262	2.042	62,60%	4.895	4801	98,08%	2.437	4048	166,11%
Karangpilang	4.343	3.165	72,88%	6.787	6794	100,10%	3.380	3623	107,19%
Kenjeran	11.181	6.005	53,71%	17.806	16891	94,87%	8.635	8692	100,66%
Krembangan	7.142	4.365	61,12%	11.287	12843	113,79%	5.679	8064	142,00%
Lakarsantri	3.662	3.250	88,85%	5.936	8183	137,95%	2.837	4535	159,91%
Mulyorejo	5.065	4.970	98,12%	7.806	10082	129,16%	3.942	5435	137,87%
Pabean Cantian	4.451	2.083	46,80%	7.534	4377	58,10%	3.781	1823	48,21%
Pakal	3.465	2.827	81,59%	5.758	7132	123,88%	2.883	3091	107,21%
Rungkut	7.080	5.204	73,50%	10.725	10824	100,92%	5.215	5077	97,35%
Sambikerep	3.990	2.291	57,42%	6.232	5699	91,46%	3.028	3658	120,81%

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kota Surabaya Tahun 2020

Kecamatan	APK PAUD			APK SD/MI			APK SMP/MTS		
	jumlah penduduk usia 3-6 tahun	jumlah seluruh siswa di jenjang PAUD	APK	jumlah penduduk usia 7-12 tahun	jumlah seluruh siswa di jenjang SD/MI	APK	jumlah penduduk usia 13-15 tahun	jumlah seluruh siswa di jenjang SMP/MTS	APK
Sawahan	12.106	6.374	52,65%	19.868	16050	80,79%	9.863	3801	38,55%
Semampir	12.446	6.093	48,96%	19.778	20524	103,77%	9.712	5741	59,11%
Simokerto	5.887	4.047	68,74%	9.123	6717	73,63%	4.592	3539	77,09%
Sukolilo	6.682	4.850	72,58%	10.351	12143	117,31%	5.050	6788	134,42%
Sukomanunggal	6.213	4.658	74,98%	9.729	10107	103,91%	4.779	5493	114,99%
Tambaksari	13.365	8.488	63,51%	21.257	17544	82,53%	10.486	5755	54,88%
Tandes	5.662	4.834	85,38%	9.146	11251	123,02%	4.301	3608	83,89%
Tegalsari	5.687	3.611	63,50%	9.299	10199	109,68%	4.590	3536	77,07%
Tenggiling Mejoyo	3.291	2.609	79,28%	5.370	5464	101,75%	2.495	2800	112,22%
Wiyung	4.213	3.271	77,66%	6.648	6831	102,81%	3.269	2892	88,47%
Wonocolo	4.750	2.634	55,45%	7.463	8393	112,46%	3.617	4675	129,25%
Wonokromo	8.737	5.277	60,40%	14.936	11777	78,86%	7.766	7611	98,00%
Jumlah	179.389	119.047	66,36%	286.737	287.830	100,52%	141.554	129.136	91,23%

Sumber: Dinas Pendidikan, 2019 diolah

2.1.3.1.2.b Angka Partisipasi Murni (APM)

APM merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Data perkembangan APM Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018 telah disajikan di atas pada Tabel II. 21 dan APM per kecamatan pada Tabel II.36.

Tabel II. 36
Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Menurut Kecamatan
Tahun 2018

Kecamatan	APM SD/MI			APM SMP/MTS		
	jumlah penduduk usia 7-12 tahun	siswa berusia 7-12 tahun yang berada di jenjang SD/MI	APM	jumlah penduduk usia 13-15 tahun	siswa berusia 13-15 tahun yang berada di jenjang SMP/MTs	APM
Asemrowo	5.143	3.573	69,47%	2.434	1619	66,52%
Benowo	6.733	6.657	98,87%	3.314	2284	68,92%
Bubutan	9.678	8.682	89,71%	4.923	2033	41,30%
Bulak	4.557	5.958	130,77%	2.314	2440	105,45%
Dukuh Pakis	5.599	6.075	108,54%	2.698	2789	103,41%
Gayungan	3.971	5.830	146,81%	2.033	2191	107,77%
Genteng	5.193	6.319	121,68%	2.652	4826	181,98%
Gubeng	12.284	12.992	105,76%	6.216	3544	57,01%
Gunung Anyar	5.481	4.559	83,18%	2.633	1231	46,75%
Jambangan	4.895	4.542	92,79%	2.437	3757	154,16%
Karangpilang	6.787	6.465	95,26%	3.380	3309	97,90%
Kenjeran	17.806	16.296	91,52%	8.635	7975	92,36%
Krembangan	11.287	12.179	107,90%	5.679	7443	131,06%
Lakarsantri	5.936	7.589	127,93%	2.837	4183	147,50%
Mulyorejo	7.806	9.298	119,11%	3.942	5030	127,60%
Pabean Cantian	7.534	4.144	55,00%	3.781	1682	44,49%
Pakal	5.758	6.807	118,24%	2.883	2869	99,51%
Rungkut	10.725	10.388	96,86%	5.215	4726	90,62%
Sambikerep	6.232	5.397	86,62%	3.028	3333	110,07%
Sawahan	19.868	15.391	77,47%	9.863	3521	35,71%
Semampir	19.778	19.384	98,01%	9.712	5281	54,38%
Simokerto	9.123	6.451	70,71%	4.592	3280	71,44%
Sukolilo	10.351	11.470	110,81%	5.050	6302	124,79%
Sukomanunggal	9.729	9.527	97,94%	4.779	5096	106,68%
Tambaksari	21.257	16.913	79,56%	10.486	5244	50,01%
Tandes	9.146	10.729	117,31%	4.301	3282	76,31%
Tegalsari	9.299	9.673	104,02%	4.590	3194	69,62%
Tenggilis Mejoyo	5.370	5.257	97,90%	2.495	2558	102,53%
Wiyung	6.648	6.421	96,64%	3.269	2588	79,17%

Kecamatan	APM SD/MI			APM SMP/MTS		
	jumlah penduduk usia 7-12 tahun	siswa berusia 7-12 tahun yang berada di jenjang SD/MI	APM	jumlah penduduk usia 13-15 tahun	siswa berusia 13-15 tahun yang berada di jenjang SMP/MTs	APM
Wonocolo	7.463	7.927	106,22%	3.617	4193	115,92%
Wonokromo	14.936	11.211	75,07%	7.766	6833	87,99%
Jumlah	286.737	286.355	95,72%	141.554	118.636	83,81%

Sumber: Dinas Pendidikan, 2019

Tabel II. 34 dan Tabel II. 36 menunjukkan bahwa aksesibilitas layanan pendidikan sudah baik namun perlu dilakukan upaya pemerataan fasilitas layanan pendidikan yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. APM dan APK seluruh jenjang sekolah di Kota Surabaya menunjukkan fluktuasi namun secara garis besar mengalami peningkatan.

Dari data pada Tabel II.34 terdapat beberapa kecamatan yang memiliki APK lebih dari 100%, kondisi ini menunjukkan bahwa di wilayah tersebut jumlah sekolah lebih banyak dari wilayah lain dan sekolah-sekolahnya memiliki kualitas lebih baik, sehingga menjadi tujuan bagi penduduk usia sekolah di wilayah kecamatan lainnya untuk bersekolah di wilayah tersebut. Sebaliknya kecamatan yang memiliki APK 100% menunjukkan kondisi bahwa di wilayah kecamatan tersebut ketersediaan atau jumlah sekolah sedikit dan kualitas sekolah masih kurang sehingga menyebabkan penduduk usia sekolah cenderung memilih bersekolah di luar wilayah kecamatan. Aspek yang mendorong tingginya nilai APK dan APM adalah sarana prasarana, fasilitas, kualitas tenaga pendidik dan penerapan kurikulum.

2.1.3.1.2.c Angka Kelulusan (AL)

Angka kelulusan dihitung berdasarkan jumlah siswa pada setiap jenjang pendidikan yang lulus dibandingkan dengan jumlah seluruh siswa yang mengikuti ujian tingkat akhir.

AL untuk jenjang SD/MI tahun 2016 mencapai angka 100 persen dan konsisten sebesar 100 persen pada tahun 2017 dan 2018. Sedangkan AL untuk jenjang SMP/MTs tahun 2016 sebesar 99,97 persen, dan meningkat pada tahun 2017 dan 2018 menjadi 100 persen. Perkembangan Angka Kelulusan (AL) jenjang pendidikan dasar Kota Surabaya disajikan pada Tabel II. 37.

Tabel II. 37
Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2018

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018
1.	SD/MI			
1.1	Jumlah Siswa SD/MI yang Lulus	40.849	42.621	44.223
1.2	Jumlah Keseluruhan Siswa SD/MI Kelas 6	40.849	42.621	44.223
	AL SD/MI (persen)	100	100	100
2.	SMP/MTs			
2.1	Jumlah Siswa SMP/MTs yang Lulus	39.570	41.834	42.282
2.2	Jumlah Keseluruhan Siswa SMP/MTs Kelas 9	39.580	41.834	42.282
	AL SMP/MTs (persen)	99,97	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan, 2019

Kelulusan siswa ditentukan oleh masing-masing sekolah, alat ukur kelulusan tidak lagi berdasarkan Nilai Ujian Nasional, akan tetapi juga ditentukan poses pembelajaran dan prestasi siswa selama bersekolah dijenjang masing-masing. Dari data pada Tabel II. 36 menunjukkan bahwa seluruh siswa yang mengikuti ujian tingkat akhir dinyatakan lulus.

2.1.3.1.2.d Angka Putus Sekolah (APS)

Angka Putus Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah anak-anak usia sekolah yang sudah tidak lagi bersekolah atau yang tidak menamatkan pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok usia sekolah. Jadi semakin rendah APS, maka kondisi pendidikan menjadi semakin baik. Saat ini, penyebab utama putus sekolah lebih disebabkan karena kurangnya kesadaran orang tua maupun anak yang bersangkutan akan pentingnya pendidikan sebagai investasi masa depan, baik karena dari dalam diri anak yang bersangkutan merasa malas untuk pergi ke sekolah, terpengaruh oleh lingkungan pergaulan yang tidak mendukung untuk menempuh pendidikan, maupun karena menikah sehingga tidak lagi menganggap pendidikan sebagai prioritas.

Pada tahun 2016 APS di jenjang SD/MI sebesar 0,00% dan konsisten sebesar 0,00% sampai dengan tahun 2018. Begitu pula dengan APS SMP/MTs pada tahun 2016 sebesar 0,00% dan konsisten sebesar 0,00% sampai dengan tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada anak putus sekolah jenjang pendidikan dasar di Kota Surabaya. Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018 dapat dilihat pada Tabel II.38.

Tabel II. 38
Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2018

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018
1.	SD/MI			
	Jumlah Siswa putus sekolah di jenjang SD/MI	0	0	0
	Jumlah Keseluruhan Siswa SD/MI	281.310	282.408	287.830
	APS SD/MI (persen)	0	0	0
2.	SMP/MTs			
	Jumlah Siswa putus sekolah di jenjang SMP/MTs	0	0	0
	Jumlah Keseluruhan Siswa SMP/MTs	135.283	130.505	129.136
	APS SMP/MTs (persen)	0	0	0

Sumber: Dinas Pendidikan, 2019

2.1.3.1.2.e Angka Melanjutkan (AM)

AM diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dengan jumlah siswa yang lulus ujian. Untuk angka melanjutkan SD/MI ke jenjang SMP/MTs diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa baru kelas 7 SMP/MTs dengan jumlah lulusan SD/MI. Sedangkan angka melanjutkan SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat 10 SMA/MA/SMK dengan jumlah lulusan SMP/MTs.

Angka Melanjutkan SD/MI ke jenjang SMP/MTs pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 95,03% dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 105,51%. Penurunan juga terjadi pada Angka Melanjutkan SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2016 sebesar 116,54% dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 96,68%. Pada tahun 2018, Angka Melanjutkan SD/MI ke jenjang SMP/MTs sebesar 92,35% persen dan Angka Melanjutkan SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK sebesar 100%. Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 39
Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2018

No.	Indikator	2016	2017	2018
1	(AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs			
	Jumlah Siswa yang melanjutkan ke Jenjang SMP/MTs	43.099	40.503	40.841
	Jumlah Lulusan pada Jenjang SD/MI Tahun Sebelumnya	40.849	42.621	44.223
	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs (persen)	105,51	95,03	92,35
2	(AM) SD/MI ke jenjang SMA/MA/SMK			
	Jumlah Siswa yang melanjutkan ke Jenjang SMA/MA/SMK	46.116	40.445	42.282

No.	Indikator	2016	2017	2018
	Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP/MTs Tahun Sebelumnya	39.570	41.834	42.282
	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMA/MA/SMK (persen)	116,54	96,68	100

Sumber: Dinas Pendidikan, 2019

Seperti halnya angka kelulusan dan angka putus sekolah, dari data pada tabel diatas menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil siswa yang tidak melanjutkan, hal ini dikarenakan mengikuti orang tua yang pindah tugas dan bekerja.

2.1.3.1.2.f Rasio Ketersediaan Sekolah dibanding Penduduk Usia Sekolah

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan juga merupakan faktor penting dalam upaya pemerataan dan perluasan pendidikan, baik dari ketersediaan sekolah, kelas ataupun guru. Dengan demikian jika ketersediaan ruang kelas dan guru pengajar masih kurang memadai maka dibutuhkan perhatian untuk memperlancar proses belajar mengajar pada tingkat pendidikan dasar.

Data ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018 disajikan pada Tabel II.40.

Tabel II. 40
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2018

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018
1	SD/MI			
1.1.	Jumlah gedung sekolah	733	900	846
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	304.652	281.089	286.373
1.3.	Rasio	1 : 415	1 : 312	1 : 339
2	SMP/MTs			
2.1	Jumlah gedung sekolah	341	393	404
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	158.893	144.127	141.554
2.3	Rasio	1 : 465	1 : 367	1 : 350

Sumber : Dinas Pendidikan, 2019

Tabel II. 41
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya Menurut
Kecamatan Tahun 2018

KECAMATAN	SD/MI					SMP/MTs				
	Jumlah SD	Jumlah MI	Total	Jumlah Penduduk Usia 7-12	Rasio	Jumlah SMP	Jumlah MTs	Total	Jumlah Penduduk Usia 13-15	Rasio
Asemrowo	8	9	17	5.143	1 : 303	4	3	7	2.434	1 : 348

KECAMATAN	SD/MI					SMP/MTs				
	Jumlah SD	Jumlah MI	Total	Jumlah Penduduk Usia 7-12	Rasio	Jumlah SMP	Jumlah MTs	Total	Jumlah Penduduk Usia 13-15	Rasio
Benowo	12	5	17	6.733	1 : 396	3	2	5	3.314	1 : 663
Bubutan	29	2	31	9.678	1 : 312	8	0	8	4.923	1 : 615
Bulak	13	6	19	4.557	1 : 240	5	1	6	2.314	1 : 386
Dukuh Pakis	24	1	25	5.599	1 : 224	11	1	12	2.698	1 : 225
Gayungan	14	1	15	3.971	1 : 265	6	1	7	2.033	1 : 290
Genteng	17	1	18	5.193	1 : 289	11	0	11	2.652	1 : 241
Gubeng	25	5	30	12.284	1 : 409	14	0	14	6.216	1 : 444
Gununganyar	13	1	14	5.481	1 : 392	7	0	7	2.633	1 : 376
Jambangan	7	5	12	4.895	1 : 408	7	0	7	2.437	1 : 348
Karangpilang	12	3	15	6.787	1 : 452	9	0	9	3.380	1 : 376
Kenjeran	23	20	43	17.806	1 : 414	14	9	23	8.635	1 : 375
Krembangan	32	7	39	11.287	1 : 289	17	1	18	5.679	1 : 316
Lakarsantri	21	5	26	5.936	1 : 228	11	2	13	2.837	1 : 218
Mulyorejo	25	0	25	7.806	1 : 312	16	0	16	3.942	1 : 246
Pabean Cantian	14	4	18	7.534	1 : 419	7	1	8	3.781	1 : 473
Pakal	14	6	20	5.758	1 : 288	7	2	9	2.883	1 : 320
Rungkut	24	4	28	10.725	1 : 383	9	2	11	5.215	1 : 474
Sambikerep	15	6	21	6.232	1 : 297	15	3	18	3.028	1 : 168
Sawahan	46	0	46	19.868	1 : 432	14	1	15	9.863	1 : 658
Semampir	36	32	68	19.778	1 : 291	17	14	31	9.712	1 : 313
Simokerto	20	6	26	9.123	1 : 351	10	2	12	4.592	1 : 383
Sukolilo	33	1	34	10.351	1 : 304	17	1	18	5.050	1 : 218
Sukomanunggal	28	1	29	9.729	1 : 335	17	2	19	4.779	1 : 252
Tambaksari	41	10	51	21.257	1 : 417	21	3	24	10.486	1 : 437
Tandes	21	10	31	9.146	1 : 295	12	2	14	4.301	1 : 307
Tegalsari	31	2	33	9.299	1 : 282	12	0	12	4.590	1 : 383
Tenggiling Mejoyo	16	1	17	5.370	1 : 316	7	0	7	2.495	1 : 356
Wiyung	15	1	16	6.648	1 : 416	11	0	11	3.269	1 : 297
Wonocolo	19	2	21	7.463	1 : 355	9	1	10	3.617	1 : 362
Wonokromo	34	7	41	14.936	1 : 364	19	3	22	7.766	1 : 353

Sumber: Dinas Pendidikan, 2019

Dari data pada Tabel II.39 di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan kebutuhan akan ketersediaan sekolah di jenjang SD semakin meningkat, sedangkan pada jenjang SMP

mengalami penurunan di tahun 2018. Namun jika dilihat rasio ketersediaan sekolah seperti data pada Tabel II.40 pada beberapa wilayah kecamatan yang memiliki rasio ketersediaan sekolah tinggi dan ada beberapa wilayah kecamatan dengan rasio ketersediaan sekolah rendah. Kecamatan yang memiliki rasio ketersediaan sekolah jenjang SD/MI tertinggi adalah Kecamatan Karangpilang dengan nilai rasio sebesar 1:452, sedangkan kecamatan yang memiliki rasio terkecil adalah Kecamatan Dukuh Pakis dengan nilai rasio sebesar 1:224. Pada tingkat SMP/MTs Kecamatan Benowo memiliki rasio tertinggi yaitu 1:663 dan Kecamatan Sambikerep merupakan Kecamatan dengan rasio terendah yaitu 1:168.

Rasio kecamatan yang ketersediaan sekolahnya rendah justru menjadi tujuan bagi penduduk usia sekolah di wilayah kecamatan lain untuk sekolah di wilayah tersebut sehingga menyebabkan APK dan APM di wilayah kecamatan tersebut tinggi. Sedangkan untuk wilayah yang memiliki rasio ketersediaan sekolahnya tinggi perlu direncanakan penyediaan fasilitas pendidikan baru atau mengembangkan daya tampung sekolah yang ada agar penduduk usia sekolah dapat tertampung pendidikannya.

Selain ketersediaan sekolah, kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh mutu lembaga pendidikan yang dapat dilihat dari akreditasi lembaga pendidikan tersebut. Akreditasi memberikan gambaran tingkat kinerja sekolah yang dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan sekolah baik dari segi mutu, efektifitas, efisiensi, produktifitas dan inovasinya. Selain itu akreditasi juga memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa sekolah sudah memenuhi standar yang ditetapkan.

Dari data Dinas Pendidikan tahun 2018 terdapat 337 sekolah SMP yang telah terakreditasi, terdiri dari 215 sekolah yang terakreditasi A, 105 sekolah terakreditasi B dan terdapat 17 sekolah yang terakreditasi C. Sedangkan untuk sekolah SD/MI /Sederajat terdapat 777 sekolah yang terakreditasi, terdiri dari 504 sekolah yang terakreditasi A, 240 sekolah terakreditasi B dan 33 sekolah SD/MI yang terakreditasi C. Sedangkan untuk lembaga kursus/pelatihan berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Tahun 2018 terdapat 264 lembaga kursus/pelatihan, yang telah terakreditasi 110 lembaga kursus/pelatihan, dan sebanyak 154 lembaga kursus/pelatihan belum terdaftar.

Disamping pendidikan di sekolah dan lembaga kursus/pelatihan juga terdapat Pusat Kegiatan Belajar Mengajar yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan berupa kejar paket A, B dan C. Berdasarkan data Dinas Pendidikan tahun 2018 dari PKBM yang tersebar di kecamatan terdapat peserta pendidikan kesetaraan Paket A sebanyak 654 peserta, namun hanya 528 peserta yang lulus. Sedangkan peserta pendidikan kesetaraan Paket B sebanyak 1357 peserta, namun hanya 1091 peserta yang lulus. Dan untuk peserta pendidikan kesetaraan Paket C terdapat 2870 peserta, tetapi hanya 2354 peserta yang lulus.

2.1.3.1.2.g Rasio Guru dibanding Murid

Kebutuhan guru yang memenuhi kualifikasi menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di semua jenjang pendidikan. Dengan pendidikan guru yang sesuai dengan standar kualifikasi maka diharapkan akan mampu menghasilkan kualitas siswa didik yang lebih berkualitas pula, dan tentunya juga dibutuhkan ketersediaan guru yang berkompetensi di setiap sekolah.

Tabel II. 42
Jumlah Guru dan Murid Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018
1	SD/MI			
1.1	Guru	12.642	12.797	14.132
1.2	Murid	281.310	282.408	287.830
1.3	Rasio	1:22	1 : 22	1 : 21
2	SMP/MTs			
2.1	Guru	7.167	7.231	7524
2.2	Murid	135.283	128.471	129.136
2.3	Rasio	1:19	1:18	1 : 18

Sumber : Dinas Pendidikan, 2019

Terkait dengan kualitas guru dapat dilihat dari jenjang pendidikan guru dan sertifikasi guru sebagaimana tabel berikut.

Tabel II. 43
Jumlah Guru PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2018

JENJANG	≤ SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	TOTAL
TK	15		12	1	-	259	31	-	318
SD	155	1	92	13	-	3616	573	1	4451
SMP	26	6	6	15	-	1527	437	5	2022
TOTAL	196	7	110	29	-	5402	1041	6	6791

Sumber : Dinas Pendidikan, 2019

Tabel II. 44
Jumlah Guru Non PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2018

JENJANG	≤ SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	TOTAL
TK	730	10	63	44	4	6455	299	3	7608
SD	382	4	4	29	4	3706	319	1	4449
SMP	1315	55	126	53	2	3984	126	4	5665
TOTAL	2427	69	193	126	10	14145	744	8	17722

Sumber : Dinas Pendidikan, 2019

Tabel II. 45
Jumlah Guru Kota Surabaya Bersertifikat Pendidik Tahun 2018

No	Jenjang	Guru Bersertifikat Pendidik			Jumlah Total Guru			Guru Yang Belum Sertifikasi		
		PNS	NON PNS	Jumlah	PNS	NON PNS	Jumlah	PNS	NON PNS	Jumlah
1	SD	3535	1756	5291	4451	7608	12059	916	5852	6768
2	SMP	1699	1045	2744	2022	4449	6471	323	3404	3727
Jumlah		5.234	2.801	8.035	6.473	12.057	18.530	1.239	9.256	10.495

Sumber : Dinas Pendidikan, 2019

Dari data pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa masih ada 10.495 guru di jenjang pendidikan dasar yang belum sertifikasi. Diharapkan dengan program dan kegiatan yang telah diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya jumlah guru yang bersertifikasi akan mengalami peningkatan.

2.1.3.1.3 Kesehatan

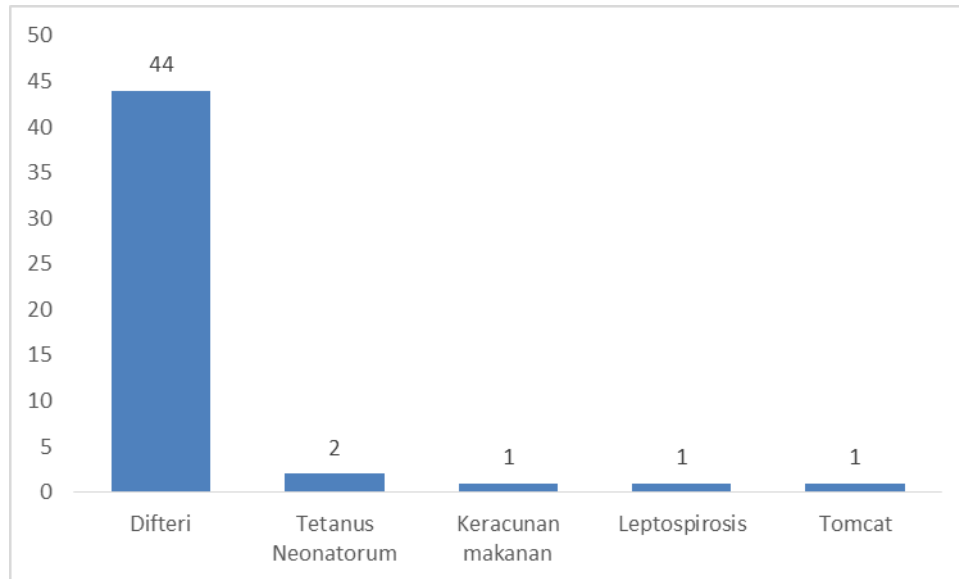
Kualitas SDM salah satunya dipengaruhi oleh derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat salah satunya ditandai dengan meningkatnya AHH dan perilaku masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat.

Dalam meningkatkan AHH, terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, salah satunya melalui cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam serta layanan kesehatan ibu dan anak yaitu cakupan pelayanan ibu nifas, cakupan kunjungan bayi, balita gizi buruk yang mendapat perawatan yang dapat dilihat pada Tabel II. 46.

Tabel II. 46
Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Ditangani <24 Jam Tahun 2016 –2018

No.	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam	38	30	49
2	Jumlah kelurahan yang mengalami KLB	38	30	49
3	Persentase (persen)	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2019



Gambar II. 11
Kejadian Luar Biasa Kota Surabaya Tahun 2019

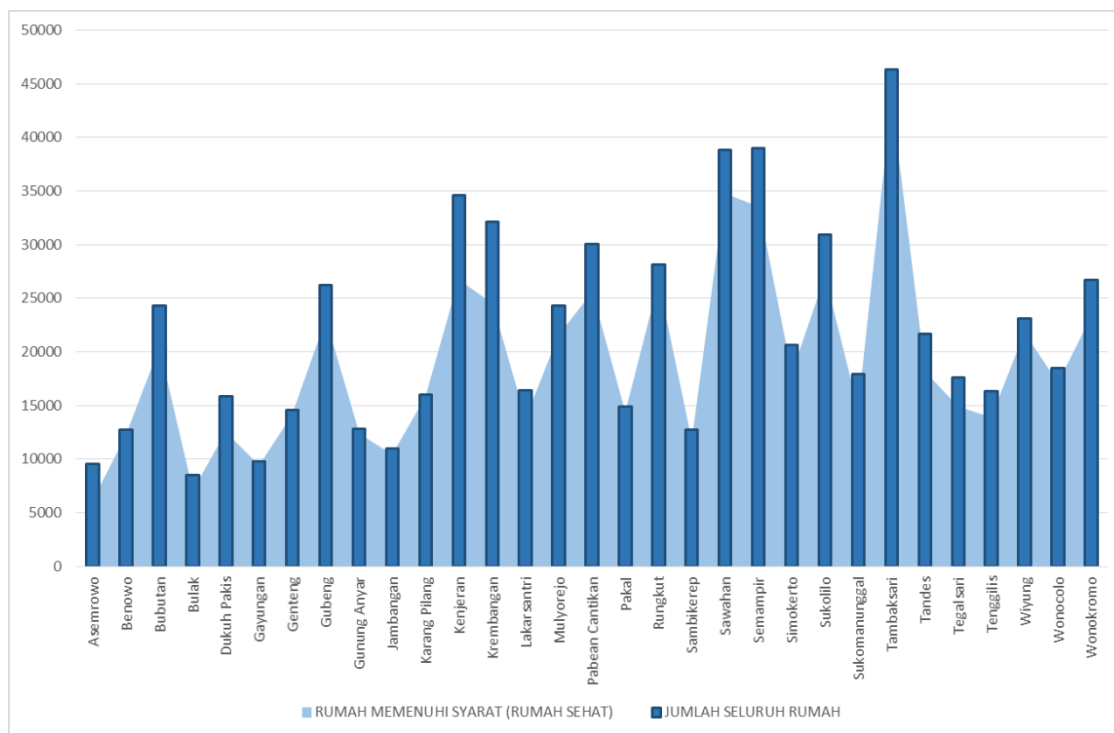
Sumber : Dinas Kesehatan, diolah, 2019

Kejadian Luar Biasa tahun 2018terbanyak adalah Difteri yang terjadi di42 kelurahan, diikuti tetanus neonatorumyang terjadi di 2 kelurahan, serta leptospirosis, keracunan makanan dan tomcat masing-masing terjadi di 1 kelurahan.Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sesuai RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021, target penanganan KLB telah ditingkatkan menjadi <20 jam.

Kesehatan masyarakat juga diupayakan melalui terwujudnya rumah sehat. Kriteria rumah sehat yang digunakan meliputi tujuh kriteria, yaitu atap berplafon, dinding permanen (tembok/papan), jenis lantai bukan tanah, tersedia jendela, ventilasi cukup, pencahayaan alami cukup, dan tidak padat huni (lebih besar atau sama dengan 8 m²/orang). Selain itu, sarana sanitasi seperti sarana air bersih, jamban, sarana pembuangan air limbah dan sarana pembuangan sampah serta perilaku hidup sehat penghuni rumah menjadi pertimbangan dalam penilaian rumah sehat.

Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat dimulai dari lingkungan yang terkecil. Lingkungan terkecil dan efektif untuk mendukung tercapainya derajat kesehatan masyarakat adalah rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat, yaitu memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Persentase

rumah sehat dapat dilihat pada Gambar II.12 dibawah dan diharapkan setiap tahun jumlah rumah sehat meningkat dan derajat kesehatan masyarakat semakin baik.



Gambar II. 12
Persentase Rumah Sehat Kota Surabaya Tahun 2018

Sumber : Dinas Kesehatan, diolah, 2019

Pembentukan kelurahan siaga aktif dan pengembangan Pembinaan Terpadu (Bindu) juga menjadi upaya pemerintah kota Surabaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawat darurat kesehatan, secara mandiri. Pada tahun 2018, seluruh kelurahan telah memiliki Bindu. Persentase kelurahan siaga aktif kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel II. 47.

Tabel II. 47
Persentase Kelurahan Siaga Aktif Tahun 2016 – 2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah kelurahan siaga aktif	154	154	154
2	Jumlah kelurahan siaga	154	154	154
3	Persentase (persen)	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2019

Tabel II. 48
Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Tahun 2016 – 2018

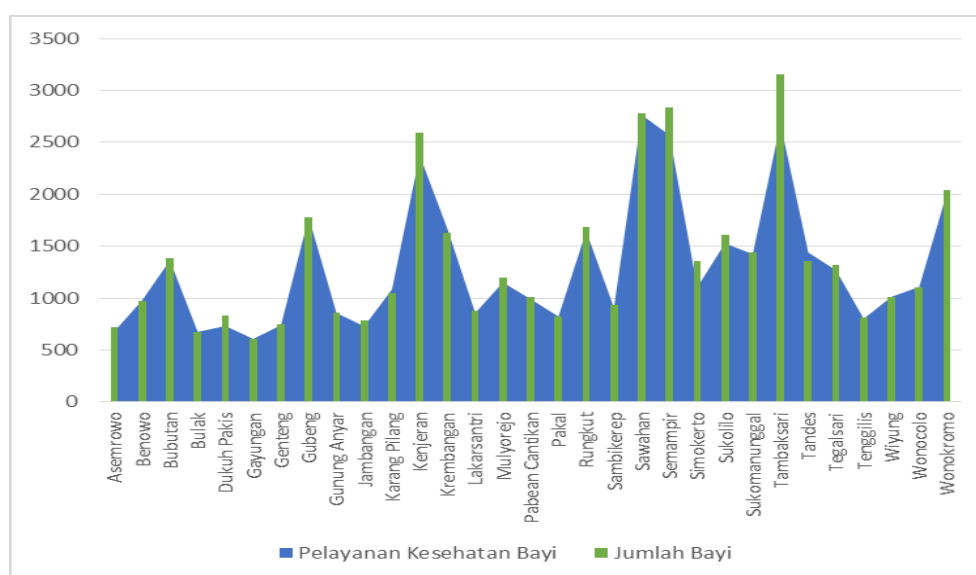
No.	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan	42.548	42.502	42.791
2	Jumlah ibu nifas	45.322	44.963	44.598
3	Persentase (persen)	93,88%	94,65%	95,95%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2019

Tabel II. 49
Cakupan kunjungan bayi Tahun 2016 –2018

No.	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan di puskesmas sesuai standar	40.086	40.668	41.070
2	Jumlah bayi	42.767	42.377	42.003
3	Persentase (persen)	93,73%	95,97%	97,78%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2019



Gambar II. 13
Cakupan pelayanan kesehatan bayi per Kecamatan Tahun 2018

Sumber : Dinas Kesehatan, diolah, 2019

Pelayanan kesehatan bayi per kecamatan paling banyak sesuai gambar II.13 adalah di Kecamatan Tambaksari. Sedangkan pelayanan kesehatan bayi per kecamatan paling sedikit ada di Kecamatan Gayungan.

Tabel II. 50
Persentase Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan
Tahun 2016 – 2018

No.	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan	280	278	254
2	Jumlah balita gizi buruk	280	278	254
3	Persentase (persen)	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2019

Akses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah maupun upaya-upaya kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat melalui posyandu. Pada tahun 2016 jumlah Posyandu balita sebanyak 2.824 posyandu, pada tahun 2017 jumlah posyandu balita mengalami penurunan karena terdapat penggabungan beberapa posyandu yang menyesuaikan jumlah balita diwilayahnya masing-masing, dan di 2018 jumlah posyandu balita sebanyak 2.804. Perkembangan dan cakupan posyandu dapat dilihat dalam Tabel II. 51.

Tabel II. 51
Jumlah Posyandu dan Balita Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah posyandu	2.824	2.797	2.804
2	Jumlah balita	215.713	219.367	211.564
3	Rasio posyandu per 1.000 balita	13,09	12,75	13,25

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2019

Dari data Tabel II. 510 diatas, menunjukkan bahwa rasio posyandu per 1000 penduduk berkisar angka 12-13. Keberadaan posyandu sangatlah penting karena merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, bersama masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sarana pelayanan kesehatan dasar di Kota Surabaya yang terus meningkat, maka Pemerintah Kota meningkatkan pelayanan Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap. Pada tahun 2017, dari 63 Puskesmas induk, sebanyak 21 Puskesmas merupakan puskesmas rawat inap, dan terdapat puskesmas pembantu sebanyak 59 puskesmas. Jika ditinjau dari skala wilayah Kota Surabaya dengan data jumlah penduduk Kota Surabaya sampai dengan tahun 2018 sejumlah 3.094.247 jiwa, maka 1 Puskesmas kurang lebih melayani 23.362 jiwa. Apabila dibandingkan dengan

standar nasional bahwa 1 Puskesmas melayani 30.000 jiwa, maka pada saat ini sarana kesehatan dasar di Kota Surabaya masih mencukupi.

Jumlah puskesmas, puskesmas pembantu, dan klinik tahun 2016 sampai tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel II. 52.

Tabel II. 52
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah puskesmas	63	63	63
2	Jumlah klinik	296	241	352
3	Jumlah pustu	59	59	59

Sumber: Dinas Kesehatan, 2019

Sebagai fasilitas kesehatan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, rumah sakit berperan dalam memberikan layanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Data rumah sakit dapat dilihat pada Tabel II. 53.

Tabel II. 53
Jumlah Rumah Sakit Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah Penduduk	3.016.368	3.074.883	3.094.732
2	Rumah Sakit Umum (Pemerintah/ Provinsi)	3	4	3
3	Rumah Sakit Jiwa/Paru dan Penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah/ Provinsi	4	4	4
4	Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	7	7	7
5	Rumah Sakit Daerah	2	2	2
6	Rumah Sakit Swasta	43	42	43
Jumlah Rumah Sakit		59	59	59
Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk		0,0178	0,0179	0,0191

Sumber : Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019

Salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan adalah SDM tenaga kesehatan yang bertugas di sarana pelayanan kesehatan di masyarakat. Pada tahun 2016, jumlah dokter di kota Surabaya sebanyak 7.358 orang, dengan rasio sebesar 2,22 dokter per 1.000 penduduk atau 22,2 dokter per 100.000 penduduk. Pada tahun 2017, jumlah dokter sebanyak 5.195 orang, dengan rasio 1,55 per 1000 penduduk. Pada tahun 2018, jumlah dokter sebanyak 4.295 orang, dengan rasio 1,38 per 1000 penduduk. Apabila dibandingkan dengan rasio jumlah dokter di Indonesia berdasarkan Sistem Kesehatan Nasional tahun 2012 sebesar 19 dokter per 100.000 penduduk, maka pada saat ini jumlah

dokter di Kota Surabaya masih belum mencukupi. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II. 54.

Tabel II. 54
Jumlah Dokter Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah penduduk	3.016.368	3.074.883	3.094.732
2	Jumlah dokter	7.358	5195	4295
3	Rasio dokter per 1.000 penduduk	2,22	1,55	1,38

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2017

Pemberian layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah berupaya untuk terus ditingkatkan. Hal ini dapat diukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di 2 (dua) rumah sakit umum pemerintah yang dapat dilihat pada Tabel II. 55. Pada tahun 2017, pelaksanaan survey kepuasan masyarakat akan dilaksanakan pada bulan April.

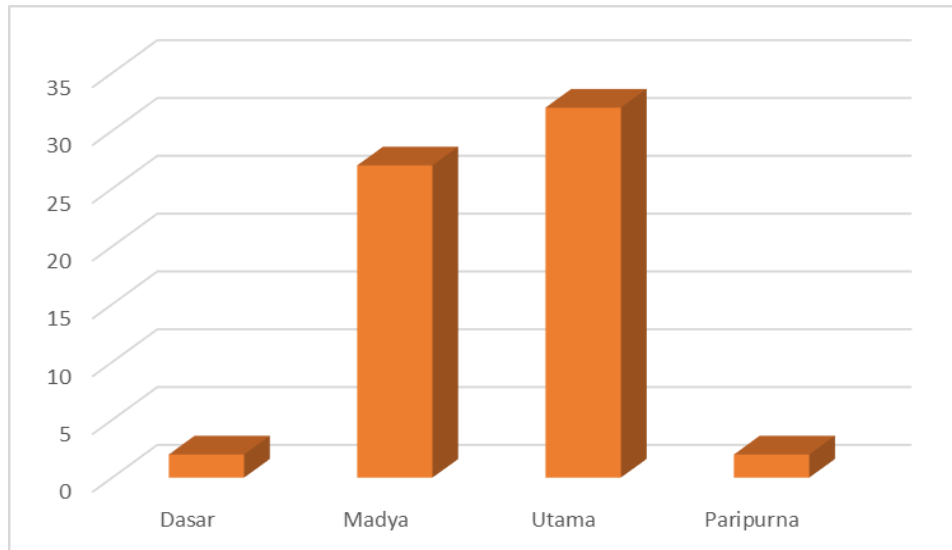
Tabel II. 55
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit Umum Daerah
Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018

Instansi	2016	2017	2018
RSUD Bhakti Dharma Husada	78,91	78,73	86,41
RSUD dr. Mohamad Soewandhie	77,02	81,12	87,72

Sumber : Bagian Organisasi, 2019

Selain itu, peningkatan mutu pelayanan kesehatan juga diupayakan melalui akreditasi fasilitas kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang mengamanatkan bahwa puskesmas wajib terakreditasi. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2016 terdapat 16 puskesmas telah dilakukan akreditasi diantaranya yaitu Puskesmas Pucang Sewu, Puskesmas Dupak, Puskesmas Jagir, Puskesmas Simomulyo, Puskesmas Sawahan, Puskesmas Tanah Kali Kedinding, Puskesmas Balongsari, Puskesmas Medokan Ayu, Puskesmas Gunung Anyar, Puskesmas Keputih, Puskesmas Pegirian, Puskesmas Jeruk, Puskesmas Tenggilis, Puskesmas Putat Jaya, Puskesmas Wonokromo dan Puskesmas Duku Kupang. Pada tahun 2017, terdapat 44 puskesmas yang dilaksanakan akreditasi, dan sisanya di tahun 2018. Dengan demikian, sampai dengan akhir tahun 2018 telah dilaksanakan penilaian akreditasi di semua puskesmas. Untuk rumah sakit umum daerah, pada tahun 2017 RSUD dr. Mohamad Soewandhie dan RSUD Bhakti Dharma Husada telah diakreditasi dengan hasil akreditasi paripurna.

Hasil akreditasi puskesmas Kota Surabaya dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar II. 14****Jumlah Puskesmas Berdasarkan Status Akreditasi Tahun 2018**

Sumber: Dinas Kesehatan, 2019 diolah

2.1.3.1.4 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**2.1.3.1.4.a Pekerjaan Umum**

Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang mendasar dalam segala aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia. Pemerintah Kota Surabaya berupaya penuh dalam pelaksanaan pengembangan jaringan jalan sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat segera terlaksana. Pada tahun 2017, rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk Kota Surabaya adalah 0,51; di mana jalan Kota Surabaya sepanjang 1.689.290 meter melayani jumlah penduduk sebesar 3.342.627 orang.

Jalan dianggap dalam kondisi baik jika masih dapat dimanfaatkan secara optimal dan belum membutuhkan perbaikan yang mendasar. Untuk meningkatkan dan mempertahankan infrastruktur jalan dalam kondisi baik sebagai pendukung sarana transportasi dan peningkatan aksesibilitas kawasan perlu dilakukan upaya pembangunan dan pemeliharaan jalan kota serta mengoptimalkan jalan yang mengalami *bottle neck* di Kota Surabaya yang terintegrasi dengan jaringan jalan regional dan nasional.

Pada Tahun 2016, panjang jalan dalam kondisi baik 1.662,99 km, dengan prosentase 98,61%. Pada tahun 2017, panjang jalan dalam kondisi baik menjadi 1.667,78 km dari panjang jalan 1.689,29 km, dengan persentase 98,73%. Sedangkan pada Tahun 2018, panjang jalan kondisi baik meningkat menjadi 1.678,86 km dari panjang jalan 1.692,53 km, dengan persentase 99,19%. Persentase panjang jalan kondisi baik di Kota Surabaya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dapat dilihat pada Tabel II. 56.

Tabel II. 56
Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Surabaya
Tahun 2016 –2018

Uraian	2016	2017	2018
Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (Km)	1.662,99	1.667,78	1.678,86
Panjang Jalan (Km)	1.686,38	1.689,29	1.692,53
Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik (%)	98,61%	98,73%	99,19%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, 2019

2.1.3.1.4.b Penataan Ruang

Kota Surabaya merupakan kota yang berkembang secara pesat dan dinamis, sehingga membutuhkan dasar terkait arah dan pedoman pemanfaatan ruang yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah dan rencana rincinya. Kota Surabaya telah memiliki RTRW yang berupa Perda No. 12 tahun 2014 tentang RTRW Kota Surabaya tahun 2014-2034 dan perlu didetailkan dalam rencana rinci. Dengan pesatnya perkembangan kota, maka kualitas perencanaan ruang perlu ditingkatkan yang terintegrasi dengan rencana-rencana sektoral lainnya.

Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan ruang, upaya yang telah dilakukan antara lain adalah dengan melakukan integrasi rencana tata ruang dengan rencana sektoral lainnya dan meningkatkan koordinasi penataan ruang melalui optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Surabaya. Sedangkan dalam rangka peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang kota, upaya yang telah dilakukan antara lain menggunakan referensi tunggal dalam penyusunan peta rencana tata ruang yang kemudian menjadi dasar bagi perizinan pemanfaatan ruang kota. Peta rencana tata ruang kota tersebut berbasis GIS dan dapat diakses langsung oleh masyarakat dalam aplikasi perizinan Surabaya Single Window (SSW).

Rencana tata ruang wilayah kota dan rencana rincinya menjadi dasar untuk penerbitan perizinan pemanfaatan ruang dan administrasi pertanahan. Penerbitan perizinan pemanfaatan ruang berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang kota. Berdasarkan jenisnya, terdapat 3 (tiga) jenis IMB yang diterbitkan Pemerintah Kota Surabaya yaitu IMB rumah tinggal, IMB non rumah tinggal serta IMB Reklame. Jumlah IMB yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Surabaya disajikan pada Tabel II.57.

Tabel II. 57
IMB yang diterbitkan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018

No.	Uraian	2016	2017	2018
1	Rumah Tinggal	7.196	7.638	4.923
2	Non Rumah Tinggal	1.762	1.717	1.773
3	Reklame	2.450	1.576	1.148
Total		11.408	10.931	7.844

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2019

Meningkatnya upaya pengendalian pemanfaatan ruang kota dapat diindikasikan dengan semakin meningkatnya jumlah ijin mendirikan bangunan yang diterbitkan. Penerbitan ijin tersebut telah sesuai dengan dokumen perencanaan tata ruang yang didalamnya memuat ketentuan mengenai pemanfaatan ruang kota.

2.1.3.1.5 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pertumbuhan penduduk secara pesat terutama di perkotaan umumnya merupakan akibat dari urbanisasi, sehingga menimbulkan ancaman meluasnya lingkungan hunian atau permukiman kumuh di perkotaan. Permasalahan di kawasan perumahan dan permukiman, yaitu masih terdapat kawasan yang kondisi lingkungan, kualitas dan kelayakan bangunan rumah tempat tinggal dan fasilitas sarana prasarannya kurang memadai antara lain kelayakan jalan lingkungan, ketersediaan sanitasi lingkungan (sampah, IPAL Komunal dan MCK) dan sistem drainase lingkungan yang perlu ditingkatkan.

Berdasarkan SK Walikota No. 188.45/143/436.1.2/2015 tentang Kawasan Prioritas Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kota Surabaya ditetapkan 26 Kelurahan dengan luas 145,89 Ha sebagai kawasan prioritas peningkatan kualitas perumahan dan permukiman (Gambar II.11 terlampir). Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam penanganan permukiman kumuh antara lain melalui peningkatan sarana prasarana dasar permukiman antara lain jalan lingkungan, sanitasi, drainase lingkungan dan perbaikan kualitas kawasan permukiman dilakukan dalam rangka mendukung salah satu pencapaian target RPJMN III 2015-2019, yang dikenal dengan “Gerakan 100-0-100”, yakni pencapaian akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0% dan menyediakan akses sanitasi layak 100% untuk masyarakat. Daftar kawasan prioritas penataan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman dapat dilihat pada Tabel II. 58.

Tabel II. 58
Daftar Kawasan Prioritas Penataan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan
Permukiman di Kota Surabaya

No	Kecamatan	Kelurahan	Keterangan
1	Wonokromo	Sawunggaling	PRIORITAS I
2	Bulak	Kenjeran	
3	Bulak	Kedung Cowek	
4	Bulak	Sukolilo Baru	
5	Kenjeran	Bulak Banteng	
6	Rungkut	Rungkut Kidul	
7	Rungkut	Kalirungkut	
8	Semampir	Wonokusumo	
9	Semampir	Sidotopo	
10	Gubeng	Airlangga	PRIORITAS II
11	Mulyorejo	Kalisari	
12	Pakal	Benowo	
13	Simokerto	Tambakrejo	
14	Sukomanunggal	Putat Gede	
15	Tenggilis Mejoyo	Kutisari	
16	Krembangan	Morokrembangan	
17	Asemrowo	Asemrowo	PRIORITAS III
18	Bubutan	Bubutan	
19	Bubutan	Gundih	
20	Bulak	Kenjeran	
21	Gunung Anyar	Gunung Anyar Tambak	
22	Semampir	Sidotopo	
23	Tandes	Tandes	
24	Wonokromo	Darmo	
25	Krembangan	Dupak	
26	Tandes	Karangpoh	

Sumber: RTRW Kota Surabaya, 2017

Salah satu faktor penilaian kawasan kumuh adalah cakupan layanan sanitasi di kawasan tersebut. Untuk itu untuk menurunkan luasan permukiman kumuh di Kota Surabaya dapat dilakukan dengan upaya pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan sistem setempat untuk meningkatkan cakupan layanan sanitasi.

Terkait dengan upaya perbaikan kualitas kawasan permukiman salah satunya dilakukan melalui perbaikan rumah tinggal tidak layak huni yang diutamakan pada kawasan prioritas. Data terkait jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki dapat dilihat pada Tabel II. 59 berikut:

Tabel II. 59
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki di Kota Surabaya
Tahun 2016 –2018

Uraian	2016	2017	2018
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	749	1.629	1.648

Sumber: Dinas Sosial, 2019

Pemerintah Surabaya terus berupaya dalam mengentaskan kemiskinan, salah satunya adalah pelaksanaan kegiatan terpadu Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kota Surabaya, baik untuk perbaikan fisik lingkungan, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat di lingkungan perkampungan.

Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) dalam kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni ini merupakan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada masyarakat miskin yang menempati rumah tidak layak huni dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan / atau keluarga miskin utamanya dikawasan permukiman kumuh.

Sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2015, kegiatan RSDK kota Surabaya ini memiliki tujuan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat da-tau keluarga miskin utamanya di kawasan permukiman kumuh;
- Meningkatkan kualitas lingkungan hunian melalui suatu upaya penyadaran dan perlunya penanganan terpadu baik dari aspek fisik, sarana dan prasarana maupun kondisi sosial ekonomi masyarakatnya;
- Pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan inisiatif, kreatifitas, dan jiwa kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan di lingkungan tempat tinggalnya;
- Meningkatkan kemampuan usaha dalam rangka pengembangan sumber pendapatan yang dapat menunjang perekonomian keluarga. Dengan sasaran menanggulangi masyarakat miskin di Surabaya.

RSDK Kota Surabaya merupakan kegiatan pembangunan berdasar partisipasi masyarakat (*community based development*). Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk melakukan pemberdayaan kepada warga masyarakat setempat agar dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan lingkungannya secara mandiri dan berkelanjutan.

Selain dengan melakukan perbaikan rumah tidak layak huni secara bertahap, penanganan rumah tidak layak huni di Kota Surabaya juga dilaksanakan melalui penyediaan rumah

susun sederhana sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Secara rinci jumlah pemohon rumah susun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 60
Jumlah Pemohon Rumah Susun di Kota Surabaya

Tahun	2016	2017	2018
Jumlah Pemohon Rusun	801	1.287	1.588

Sumber: Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, 2019

Dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tinggal yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sampai dengan tahun 2016 Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan 79 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 15 lokasi dan pada 2017 Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan 85 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 17 lokasi. Sedangkan pada tahun 2018, penyediaan rumah susun mengalami peningkatan menjadi 93 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 17 lokasi yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Surabaya seperti yang disajikan pada Tabel II. 61 berikut.

Tabel II. 61
Jumlah dan Lokasi Persebaran Rusunawa

No	Nama Rumah Susun	Lokasi Kelurahan/ Kecamatan	Tipe	Blok	Luas lahan (m2)	Keterangan
1	Dupak Bangunrejo	Kel. Dupak Kec. Krembangan	18	6	± 3.000	Dibangun th. 1989/1990 (APBN)
2	Sombo	Kel. Simolawang Kec. Simokerto	18	10	± 41. 044	Dibangun th. 1993/1994 (APBN)
3	Urip Sumoharjo	Kel. Embongkaliasin Kec. Genteng	21	3	± 3.500	Dibangun th. 1975 direhab th. 2004/2005 (APBD I)
4	Penjaringan Sari	Kel. Penjaringan Sari Kec. Rungkut	18	3	± 32.350	Dibangun th. 1995 (APBN)
			21	6		Dibangun th. 2004 (APBN)
			24	2		Dibangun th. 2009 (APBN)
			24	2		Dibangun 2018 (APBD)
5	Wonorejo	Kel. Wonorejo Kec. Rungkut	21	2	± 5.466	Dibangun th. 2004 (APBN)
			21	4		Dibangun th. 2005/2006 (APBN)
6	Waru Gunung	Kel. Warugunung Kec. Karangpilang	21	10	± 29,845	Dibangun th. 1996 kerjasama dg PERUMNAS
7	Randu	Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran	21	6	± 44.290	Dibangun t. 2008 (APBN)

No	Nama Rumah Susun	Lokasi Kelurahan/ Kecamatan	Tipe	Blok	Luas lahan (m2)	Keterangan
8	Tanah Merah	Kel. Tanah Kalikedinding Kec. Kenjeran	21	4	± 28.810	Dibangun th. 2008 (APBN)
			24	4		
9	Grudo	Kel dr Soetomo Kec Tegalsari	24	2	± 5.000	Dibangun 2011 (APBN)
10	Pesapen	Kel. Krembangan Selatan Kec. Krembangan	24	1	± 2.500	Dibangun 2011-2012 (APBN)
11	Jambangan	Kel. Jambangan Kec. Jambangan	24	1	± 2.977,3	Dibangun 2011-2012 (APBN)
12.	TPI/PPI Romokalisari (1-3)	Kel. Romokalisari Kec. Benowo	24	10	± 25.000	Dibangun 2013-2015 (APBN)
13.	Siwalankerto	Kel. Siwalankerto Kec. Wonocolo	24	2	± 8.000	Dibangun 2012 (APBN)
			24	2		Dibangun 2018 (APBD)
14.	Jl. Bandarejo	Kel. Sememi Kec. Benowo	24	2	± 4.320	Dibangun 2012 (APBN)
15.	Gununganyar	Kelurahan Gununganyar Tambak Kecamatan Gununganyar	36	1	± 9.438	Dibangun 2014 (APBN)
16.	Dukuh Menanggal	Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan	24	2	± 14.388	Dibangun 2017 (APBN)
17.	Keputih	Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo	36	4	±258.140	Dibangun 2016 (APBN)
			36	2		Dibangun 2017 (APBN)
			36	2		Dibangun 2018 (APBN)
Total				93		

Sumber : Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, 2019

2.1.3.1.6 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui penegakan perda, penyelesaian pelanggaran K3, pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta upaya-upaya lainnya terkait

pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.

2.1.3.1.6.a Penegakan Perda

Sebagai salah satu unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kepatuhan masyarakat dan disiplin aparaturnya dalam menegakkan peraturan. Data jumlah Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 62
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Surabaya
Tahun 2016 –2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah Polisi Pamong Praja	648	663	677
2	Jumlah penduduk	3.016.368	3.074.883	3.094.732
3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	2,14	2,15	2,18

Sumber :Satuan Polisi Pamong Praja, 2019

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya memberikan ketentuan bahwa Satpol PP bertugas untuk memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Salah satu upaya untuk melaksanakan tugas tersebut melalui patroli dalam rangka pemantauan dan penertiban pelanggaran perda atau Ketertiban, Keamanan dan Keindahan (K3).

Pada tahun 2016, jumlah patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 adalah sejumlah 168 kali patroli dalam 24 jam/setiap harinya. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 mengalami kenaikan yaitu sejumlah 189kali patroli dalam 24 jam/setiap harinya, dan pada tahun 2018 jumlah patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 sebanyak 192patroli.

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan. Pelanggaran perda/K-3, antara lain, pelanggaran HO, IMB, Reklame, Kebersihan, Parkir Umum, Anjal/Gepeng, PKL, PSK dan Perda lainnya. Pada tahun 2016, dari pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)

sejumlah 47.067, keseluruhannya telah dapat diselesaikan. Sehingga tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah 100% dari 47.067 obyek yang ditangani. Pada tahun 2017, sebanyak 41.111 pelanggaran K3 telah diselesaikan atau sebesar 100 persen, dan pada tahun 2018, jumlah pelanggaran menurun menjadi 24.095 dan kesemuanya telah dapat diselesaikan 100 persen. Data penyelesaian pelanggaran K3 dapat dilihat pada Tabel II. 63.

Tabel II. 63
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kota Surabaya
Tahun 2016 –2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah penyelesaian pelanggaran K3	47.067	41.111	24.095
2	Jumlah pelanggaran K3	47.067	41.111	24.095
3	% penyelesaian pelanggaran K3	100	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2018

Selain anggota Satpol PP, upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban juga didukung dengan adanya keanggotaan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Anggota Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di kota Surabaya pada tahun 2016, setiap 10.000 penduduk dilayani oleh 82 personil Linmas. Pada tahun 2017, setiap 10.000 penduduk dilayani oleh 63 personil Linmas, dan pada tahun 2018, setiap 10.000 penduduk dilayani oleh 64-65 personil Linmas. Data rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk dapat dilihat pada Tabel II. 64.

Tabel II. 64
Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah Linmas	24.859	19.372	20.033
2	Jumlah penduduk	3.016.368	3.074.883	3.094.732
3	Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk	82,41	63,00	64,73

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2019

Terdapat penurunan jumlah personil Linmas yang disebabkan oleh adanya petugas Linmas yang pindah ke luar kota, menikah, memiliki pekerjaan, serta meneruskan pendidikannya. Untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib sebagai salah satu prasyarat pelaksanaan pembangunan selain peningkatan petugas Satpol PP dan personil Linmas juga dilakukan pemasangan CCTV di setiap lokasi-lokasi yang berpotensi

menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.

Masih terdapat kejadian unjuk rasa yang mengarah pada tindakan anarkis pada tahun 2017 terdapat 10 kejadian anarkis dari 226 jumlah kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, sedangkan di tahun 2018, hanya ada 1 kejadian anarkis dari 236 jumlah kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Guna mencegah dan meminimalisasi kondisi tersebut, diperlukan kesiagaan petugas Linmas dan Satpol PP di Kota Surabaya.

2.1.3.1.6.b Penanganan Bencana Kebakaran

Salah satu pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani bencana kebakaran yakni cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Surabaya. Cakupan tersebut diukur dari peningkatan jumlah mobil pemadam kebakaran terhadap jumlah penduduk. Selain itu Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya dalam meningkatkan cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran melalui pembangunan pos pemadam kebakaran. Peningkatan dari cakupan pelayanan bencana tersebut tercantum dalam Tabel II. 65 berikut.

Tabel II. 65
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran	57	64	74
2	Jumlah Penduduk	3.016.368	3.074.883	3.094.732
3	Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran	93%	93%	93%

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2019

Pesatnya pembangunan yang diikuti oleh arus urbanisasi yang meningkat menimbulkan potensi munculnya kawasan-kawasan padat penduduk dengan sarana dan prasarana/infrastruktur yang belum memadai. Umumnya pemasangan dan pemeliharaan listrik rumah tangga yang belum sesuai ketentuan menjadi salah satu penyebab bencana kebakaran yang merupakan salah satu bencana perkotaan, di samping kejadian bencana lainnya.

Tabel II. 66
Kejadian Kebakaran per Penyebab

No	Penyebab	2016	2017	2018
1	Hubungan Listrik	142	114	107
2	Api Terbuka	125	239	301
3	Api Mekanis	3	0	4
4	Dalam Penyelidikan	30	234	70
5	Tidak Ada Keterangan	0	2	14
Total		300	589	496

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran, 2019

Penanggulangan bencana kebakaran dilakukan Pemerintah Kota dengan merespon laporan kejadian kebakaran hingga siap sampai di tempat tujuan dalam jangka waktu maksimal 15 menit. Waktu tanggap ini dapat terlaksana didukung oleh upaya dan kesiapan kerja tim pemadam kebakaran serta ketersediaan sarana prasarana pemadam kebakaran yang optimal. Pada tahun 2017, rata-rata pemenuhan waktu tanggap Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani kejadian kebakaran telah mencapai 100 persen. Rincian tingkat waktu tanggap dapat dilihat pada Tabel II. 67.

Tabel II. 67
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Kota Surabaya
Tahun 2016 –2018

No.	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap (<i>Response Time Rate</i>) $\leq$ 15 Menit	300	589	496
2	Jumlah Kejadian Kebakaran	300	589	496

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya, 2019

Sepanjang tahun 2016, jumlah kejadian kebakaran yaitu 300 kejadian dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya $\leq$ 15 menit setelah pengaduan adalah 300 kejadian. Pada tahun 2017, jumlah kejadian kebakaran yaitu 534 kejadian dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya $\leq$ 15 menit setelah pengaduan adalah 534 kejadian. Sedangkan pada tahun 2018, jumlah kejadian kebakaran yaitu 496 kejadian dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya $\leq$ 15 menit setelah pengaduan adalah 496 kejadian, sebagaimana tampak pada tabel di atas.

Cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran Kota Surabaya Tahun 2016 –2018 dapat dilihat bahwa jumlah pos pemadam kebakaran sebanyak 21

unit, jumlah pos pemadam kebakaran sebanyak 21 unit direncanakan dapat mencakup jumlah penduduk Kota Surabaya sesuai dengan response time yang telah ditentukan.

Tabel II. 68
Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran Kota Surabaya
Tahun 2016 –2018

No.	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah Pos Pemadam Kebakaran	20	20	21
2	Jumlah Penduduk	3.307.300	3.342.627	3.094.732

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2019

Berikut adalah beberapa kondisi yang perlu mendapatkan perhatian lebih agar penanggulangan kebakaran dapat berjalan dengan optimal di masing-masing WMK:

- a. Cakupan layanan WMK belum merata, tetapi terdapat kawasan yang cakupan layanannya saling berhimpit dan tumpang tindih.
- b. Terdapat kawasan yang belum dilayani WMK pos kebakaran pembantu (2,5 km), memiliki beberapa lapangan sebagai tempat evakuasi, terjadi kebakaran cukup sering namun tanpa ada sumber air sama sekali (atau tidak dilalui sungai).
- c. Terdapat WMK dengan kepadatan penduduk sedang dan tinggi, jumlah kejadian kebakaran banyak, kawasan kumuh luas, titik kemacetan banyak, tidak ada lapangandan tamansebagai tempat evakuasi, tetapi memiliki jumlah sumur kebakaran banyak dan dilalui sungai.
- d. Terdapat WMK dengan kepadatan penduduk rendah, jumlah kejadian kebakaran banyak, tidak ada kawasan kumuh, titik kemacetan sedang, tidak ada lapangan dan tamansebagai tempat evakuasi, memiliki jumlah sumur kebakaran sedikit bahkan tidak ada sama sekali tetapi dilalui sungai.

2.1.3.1.6.c Pembinaan Politik dan Organisasi Masyarakat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Perppu RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi,

kehendak,kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan pengertian ini bahwa dapat dijelaskan semua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya merupakan bagian dari Ormas. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 bahwa dalam rangka tertib administrasi terkait keberadaan organisasi masyarakat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, setiap Ormas di Indonesia wajib mendaftarkan diri ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing. Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sedangkan untuk Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tidak memerlukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Bagi Ormas yang telah mendapat SKT akan mendapatkan pembinaan dan pengawasan. Sebagai sebuah organisasi oleh anggota masyarakat, organisasi kemasyarakatan atau yang disebut Ormas juga memiliki peran penting dalam rangka pemberdayaan, pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Adapun jumlah Ormas Tahun 2016 –2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 69
Jumlah Ormas Kota Surabaya Tahun 2016 –2018

No.	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah Ormas Aktif	51	32	25
2	Jumlah Ormas Terdaftar	167	167	167

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2019

Pemerintah Kota Surabaya melakukan pembinaan/pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja Ormas. Bentuk pemberdayaan Ormas melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembinaan terhadap Ormas dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas. Pemberdayaan Ormas melalui antara lain fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sampai dengan akhir tahun 2018, kegiatan pembinaan terhadap ormas terhadap 25 lembaga.

2.1.3.1.7 Sosial

Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya untuk menangani permasalahan sosial khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dengan lingkungan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup (jasmani, rohani, dan sosial) secara wajar.

2.1.3.1.7.a PMKS yang Ditangani

Bentuk penanganan yang diterima PMKS antara lain berupa pembinaan dan pelatihan keterampilan, pemulangan PMKS ke daerah asal, perbaikan rumah tidak layak huni, pemberian permakanaan, pembinaan mental, pemberian beasiswa, dan pelayanan di 5 (lima) UPTD Dinas Sosial, yaitu UPTD Griya Werda melayani dan menangani lanjut usia miskin dan terlantar, UPTD Kampung Anak negeri yang melayani dan menangani anak jalanan, anak nakal dan anak terlantar, UPTD Babat Jerawat melayani dan menangani eks penderita kusta, UPTD Ponsos Kalijudan melayani dan menangani anak berkebutuhan khusus dan pengasramaan mahasiswa miskin berprestasi serta UPTD Liponsos Keputih yang melayani dan menangani gelandangan, penderita psikotik dan PMKS hasil penertiban.

Tabel II. 70
Penanganan PMKS Kota Surabaya Tahun 2016 –2018

No.	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah PMKS yang ada	50.222	47.633	58.129
2	Jumlah PMKS yang ditangani	30.468	28.643	36.098
3	Persentase PMKS yang ditangani (persen)	60,67	60,13	62,09

Sumber : Dinas Sosial Kota Surabaya, 2019

Secara umum, walaupun jumlah PMKS meningkat dari tahun 2017-2018 sebanyak 47.633 orang menjadi 58.129 orang pada tahun 2018. Namun prosentase yang ditangani semakin meningkat. Hal tersebut tidak lepas dari upaya pengentasan PMKS dilakukan melalui pemulangan ke daerah asal dan pelatihan PMKS usia produktif. Namun demikian, adanya jenis PMKS yang secara status tidak dapat berubah, misalnya penyandang cacat, lansia dan orang dengan gangguan mental tetap ditangani Dinas Sosial melalui pemberian permakanaan, pembinaan mental maupun pelayanan mental di UPTD terkait.

Tabel di atas menunjukkan bahwa penanganan PMKS oleh Pemerintah Kota Surabaya perlu dioptimalkan, didukung dengan ketersediaan data PMKS yang terverifikasi serta keterlibatan dan peran serta PSKS dalam penanganan PMKS.

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar, yaitu urusan:

2.1.3.2.2 Tenaga Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Surabaya cenderung meningkat hingga tahun 2018. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan angkatan kerja usia 15 tahun ke atas seiring dengan peningkatan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas, yaitu sebesar 1.495.837 pada tahun 2017 menjadi 1.520.041 pada tahun 2018. Adapun data tahun 2016 belum dapat disediakan dikarenakan anggaran untuk Sakernas besar (bulan agustus) pada tahun 2016 digeser oleh Pemerintah Pusat untuk kepentingan yang lain. Secara rinci, rasio angkatan kerja 15 tahun keatas terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas, dapat dilihat pada Tabel II. 71.

Tabel II. 71
Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surabaya Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Angkatan Kerja 15 Tahun Keatas	1.465.502	1.468.094	N/A	1.495.837	1.520.041
2	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	2.201.854	2.220.853	N/A	2.254.188	2.269.293
3	Rasio angkatan kerja	0,66	0,66	N/A	0,66	0,67

Sumber : BPS Kota Surabaya, April 2019

2.1.3.2.2.a Sengketa Pengusaha dan Pekerja

Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa antara pekerja dengan pengusaha antara lain adanya pengaduan terkait masalah jamsostek, masalah upah pekerja, dan sistem kontrak kerja waktu tertentu. Secara rinci rasio jumlah sengketa pekerja pengusaha terhadap jumlah perusahaan, dapat dilihat pada Tabel II. 72.

Tabel II. 72
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Surabaya
Tahun 2014 – 2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Sengketa Pekerja Pengusaha	366	244	275	280	226
2	Jumlah Perusahaan	12.690	12.782	12.782	12.782	12.782
3	Rasio sengketa	2,88	1,91	2,15	2,19	1,77

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, 2019

Jumlah sengketa pekerja pengusaha pada tahun 2016 sebanyak 275, meningkat pada tahun 2017 menjadi 280 sengketa. Sengketa pada tahun 2017 tersebut dipicu oleh kenaikan UMK yang menyebabkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan adanya hak-hak pekerja yang belum terpenuhi. Jumlah sengketa kembali menurun menjadi sebesar 226 pada tahun 2018 sebagai dampak dari upaya pemeliharaan hubungan industrial yang baik.

2.1.3.2.2.b Pencari Kerja yang Ditempatkan dan Difasilitasi

Dalam data pengangguran terbuka, kontribusi terbesar adalah penduduk yang mempunyai pendidikan terakhir SMA maupun SMK sehingga perlu dilakukan upaya sinkronisasi antara dunia pendidikan dan dunia kerja khususnya untuk penyiapan tenaga kerja siap pakai. Data pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan terakhir dapat dilihat pada Tabel II. 73.

Tabel II. 73
Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Tahun 2018
1	Tidak/belum pernah sekolah	14.001
2	Tidak/belum tamat SD	
3	Sekolah Dasar	
4	SMP	6.264
5	SMA	28.608
6	SMK	22.724
7	Diploma I/II/III/Akademi	3.012
8	Universitas	18.487

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2019

Untuk menurunkan angka pengangguran terbuka, Pemerintah Kota Surabaya berupaya mengurangi angka tersebut dengan cara memfasilitasi para pencari kerja dengan kegiatan pelatihan keterampilan kerja, pemagangan, bimbingan keterampilan *softskill*, bursa kerja, dan sebagainya. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran terbuka dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran.

Melalui adanya pelatihan, jumlah angkatan kerja yang ditempatkan semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 pencari kerja yang difasilitasi sebesar 7.502 orang dan 3.803 orang diantaranya berhasil ditempatkan, sedangkan pada 2017 jumlah pencari kerja yang difasilitasi sebesar 8.035 orang dan berhasil ditempatkan sebesar 4.305 orang. Sementara itu, pada tahun 2018, jumlah pencari kerja yang difasilitasi sebesar 8.288 orang dan berhasil ditempatkan sebesar 5.805 orang. Secara rinci pencari kerja yang difasilitasi dan ditempatkan dapat dilihat pada Tabel II. 74.

Tabel II. 74
Pencari Kerja yang Difasilitasi dan Ditempatkan Kota Surabaya
Tahun 2014 – 2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Pencari Kerja yang Difasilitasi dan berhasil ditempatkan	3.902	5.225	3.803	4.305	5.805
2	Jumlah Pencari Kerja yang difasilitasi	12.307	85.345	7.502	8.035	8.288

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, 2019

Jumlah pencari kerja yang difasilitasi dan ditempatkan oleh Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2018 mengalami peningkatan. Diharapkan kegiatan fasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja bisa efektif mengurangi angka pengangguran terbuka dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran. Diharapkan dengan keahlian yang telah diperoleh dari fasilitasi oleh Pemerintah Kota Surabaya pencari kerja juga mampu membuka lapangan pekerjaan yang baru dari sektor informal agar mampu mengurangi jumlah pengangguran terbuka di Kota Surabaya.

2.1.3.2.c Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Keselamatan dan perlindungan Tenaga Kerja merupakan aspek yang penting terkait ketenagakerjaan. Dengan adanya keselamatan dan perlindungan tenaga kerja atau Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan (K3), dapat memberikan manfaat dalam menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja melalui jaminan keselamatan kerja. Persentase perusahaan yang menerapkan K3 mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2018. Secara rinci rekap data presentase perusahaan yang menerapkan K3 dapat dilihat pada Tabel II. 75.

Tabel II. 75
Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Kota Surabaya
Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	3.242	3.303	5.174	5.215	6.689
2	Jumlah Perusahaan	12.690	12.782	12.782	12.782	12.782
3	Persentase Perusahaan yang Menerapkan K3 (persen)	25,54	25,84	40,48	40,80	52,33

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, 2019

Pada tahun 2016 jumlah perusahaan yang menerapkan K3 sebanyak 5.174 perusahaan atau 40,48% dari total perusahaan yang terdaftar. Sedangkan pada tahun 2017, jumlah

perusahaan yang menerapkan K3 meningkat menjadi 5.215 perusahaan atau 40,80% dari total perusahaan yang terdaftar. Pada tahun 2018, jumlah perusahaan yang menerapkan K3 meningkat menjadi 6.689 perusahaan atau 52,33% dari total perusahaan yang terdaftar.

2.1.3.2.3 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender dan hak anak, diperlukan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui perluasan akses terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan serta pemenuhan hak anak. Indikator untuk mengukur keberhasilan pengarusutamaan gender dan hak anak adalah jumlah perempuan yang bekerja, jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan, jumlah tindak kekerasan dalam rumah tangga.

2.1.3.2.3.a Jumlah Perempuan yang Bekerja di Pemerintah Kota Surabaya

Pada tahun 2016 jumlah pekerja perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 10.159 orang. Adapun pada tahun 2017 jumlah pekerja perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 12.125 orang dan di tahun 2018, jumlah pekerja perempuan yang bekerja di Pemerintah Kota Surabaya terdiri dari 8.003 orang sebagai PNS dan 13.362 orang sebagai tenaga kontrak yang tersebar di seluruh Perangkat Daerah. Data partisipasi perempuan yang bekerja di Pemerintah Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel II. 76.

Tabel II. 76
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2016 –2018

No.	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah Pekerja Perempuan	-	583.772	587.684
2	Jumlah Perempuan yang Bekerja di Pemerintah Kota Surabaya	10.159	12.125	21.365
3	Persen partisipasi perempuan di lembaga pemerintah kota	-	2,07	3,63

Sumber : Badan Pusat Statistik, Badan Kepegawaian dan Diklat dan Bagian Administrasi Pembangunan, 2019

Dari data pada Tabel II. 76 di atas menunjukkan bahwa banyak perempuan yang bekerja diluar sektor pemerintahan, dan persentasenya mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

2.1.3.2.3.b Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan di Surabaya pada tahun 2017, sebesar 583.772 orang atau 95,23% dari jumlah angkatan kerja perempuan dan meningkat di 2018 menjadi sebesar 587.684 orang. Data partisipasi angkatan kerja perempuan dapat dilihat pada Tabel II. 77.

Tabel II. 77
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Surabaya
Tahun 2017-2018

No.	Uraian	2017	2018
1.	Jumlah angkatan kerja perempuan	612.988	617.096
2.	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan	583.772	587.684
3.	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	95,23	95,23

Sumber : BPS dan Dinas Tenaga Kerja, 2019

2.1.3.2.3.c Kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kasus KDRT secara rinci dapat dilihat pada Tabel II. 78 di bawah ini.

Tabel II. 78
KDRT Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018

No.	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah Rumah Tangga	-	-	-
2	Jumlah KDRT	77	26	37
3	Rasio KDRT	-	-	-

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Surabaya, 2019

Fenomena KDRT ibarat fenomena gunung es, kasus yang dilaporkan dengan fakta yang ada di masyarakat berbeda. Data pada Tabel II. 78 di atas jumlah KDRT menurun dari tahun 2016-2017 namun mengalami peningkatan di tahun 2018. Salah satu upaya yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan tetap waspada terhadap semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dan terbukanya akses bagian korban KDRT untuk mengadu ke berbagai layanan yang ada di masyarakat diantaranya adalah PPTP2A, Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM), Pos Curhat dan Halo Anak Surabaya serta Satgas perlindungan perempuan dan Anak.

Kepedulian Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat digambarkan dalam indikator jumlah penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak umumnya adalah tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), non KDRT dan *Trafficking* (perdagangan orang), untuk rekap data penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dapat dilihat pada Tabel II. 79.

Tabel II. 79

**Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan
Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018**

No.	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak	263	138	123
2	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak yang terselesaikan	263	138	123
3	Persen penyelesaian pengaduan	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Surabaya, 2019

Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan fasilitasi terhadap semua kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penanganan atas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut dilakukan dengan tindakan konseling, medis berupa rujukan ke pusat pelayanan terpadu/rumah sakit, hukum berupa konsultasi hukum serta pendampingan ke Polisi, Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan Negeri (PN), Psikososial meliputi identifikasi kasus, konseling, *home visit*, *outreach*, sosialisasi serta reintegrasi (pelatihan keterampilan) dan pemberdayaan *dishelter* (rumah aman).

Dalam hal pengarusutamaan gender dan perlindungan terhadap anak Pemerintah Kota berupaya untuk mewujudkan Kecamatan yang Responsif Gender dan Kelurahan Ramah Anak. Pada tahun 2014, terdapat 3 kecamatan yang responsif gender. Kemudian pada tahun 2015 ditingkatkan menjadi 6 kecamatan yang responsif gender dan 15 kelurahan ramah anak. Pada tahun 2016, terdapat 11 kecamatan yang responsif gender dan 30 kelurahan ramah anak. Pada tahun 2017, terdapat 15 kecamatan yang responsif gender dan 50 kelurahan ramah anak, dan sampai dengan tahun 2018, terdapat 19 kecamatan yang responsif gender dan 81 kelurahan ramah anak.

Dari keseluruhan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam bidang pengarusutamaan gender maka Indeks Pembangunan Gender Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 80
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2016 – 2018

Uraian	2016	2017	2018
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,66***	93,65***	93,66***

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2019

*** Angka Sangat Sementara, Bappeko, diolah

2.1.3.2.4 Pangan

Ketahanan pangan diukur dari ketersediaan pangan utama (beras), dibandingkan dengan tingkat konsumsi pangan utama (beras). Pada Tabel II. 81 menunjukkan bahwa ketersediaan pangan utama di Kota Surabaya meningkat sejak tahun 2016 yaitu pada tahun 2016 sebesar 145,01 kg/kapita/th dan pada tahun 2017 menjadi 167,946 kg/kapita/th, selanjutnya pada tahun 2018 sebesar 521,49 kg/kapita/th. Hal tersebut dikarenakan Surabaya merupakan pasar yang potensial yang dapat memberikan harga yang cukup baik sehingga banyak daerah penghasil pangan yang memasok hasil panennya ke kota Surabaya.

Tabel II. 81
Ketersediaan Pangan Utama Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Kg)	479.602.970	561.380.280	1.613.871.200
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	3.016.368	3.074.883	3.094.732
3	Ketersediaan Pangan Utama (kg/kapita/th)	145,01	167,946	521,49

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur tingkat konsumsi beras masyarakat di Kota Surabaya pada tahun 2018 rata-rata sebesar 101,54 kg/kapita/th, sehingga apabila dibandingkan dengan data ketersediaan pangan sebesar 521,49 kg/kapita/th maka ketersediaan pangan kota Surabaya tahun 2018 masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Kota Surabaya.

Selain diukur dari ketersediaan pangan utama, ketahanan pangan diukur juga dengan menggunakan skor Pola Pangan Harapan (PPH). PPH adalah indikator untuk mengukur pola konsumsi pangan masyarakat berdasarkan gizi yang cukup dan seimbang. Semakin

tinggi skor pola pangan menunjukkan satuan pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya.

Berdasarkan Tabel II. 82 dapat disampaikan bahwa Pola pangan harapan masyarakat kota Surabaya pada tahun 2018 mencapai 96,76. Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 95,5 maka capaian kinerjanya mencapai 101,32%. Hal ini menunjukkan bahwa satuan pangan yang dikonsumsi masyarakat sudah semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya.

Tabel II. 82
Pola Pangan Harapan Tahun 2016 – 2018

Uraian	2016	2017	2018
Pola Pangan Harapan	95,28	95,62	96,76

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2019

2.1.3.2.5 Pertanahan

Seiring dengan perkembangan pembangunan Kota Surabaya, maka kebutuhan akan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung kegiatan masyarakat akan semakin meningkat pula. Penyediaan sarana dan prasarana yang akan dilakukan meliputi penyediaan sarana penunjang kegiatan masyarakat, sistem jaringan jalan dan drainase yang membutuhkan ruang dan lahan. Namun ketersediaan lahan aset Pemerintah Kota Surabaya yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kebutuhan masyarakat sangatlah terbatas. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut melalui pengadaan lahan untuk merealisasikan rencana pembangunan sehingga dapat terwujud sarana, prasarana dan fasilitas yang terpadu dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Surabaya memiliki cukup banyak aset khususnya aset tak bergerak berupa tanah yang tersebar di tiap-tiap wilayah Kota Surabaya yang pemanfaatannya dapat dimaksimalkan dan disesuaikan dengan arahan pemanfaatan ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya dan Rencana Rincinya. Pada Tabel II. 84 dapat disimpulkan bahwa hingga tahun 2015, masih 48,84 persen dari keseluruhan aset tanah Pemerintah Kota yang telah bersertifikat, sedangkan sisanya masih belum memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat. Pada tahun 2016, sebanyak 744 aset tanah Pemerintah Kota telah bersertifikat dan pada tahun 2017 sebesar 16,56 persen dari keseluruhan aset tanah Pemerintah Kota telah bersertifikat. Sedangkan pada tahun 2018, tanah aset yang bersertifikat telah mencapai 20,27 persen dari total tanah aset Pemerintah Kota. Pengamanan administrasi berupa pencatatan / inventarisasi aset, sertifikasi dan pengamanan fisik berupa pemasangan pagar, papan, patok merupakan upaya yang terus

menerus dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam meningkatkan pengelolaan tanah aset bagi pembangunan untuk kepentingan umum, namun masih terdapat aset tanah maupun bangunan yang belum diamankan secara administrasi dan fisik.

Tabel II. 83
Jumlah Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Tersertifikat
Tahun 2016 – 2018

Tahun	2016	2017	2018
Jumlah Aset Pemerintah kota yang telah bersertifikat	744	1076	1317
Total aset pemerintah	1567**	6497	6497
Presentase Aset Pemerintah yang telah bersertifikat	47,48%	16,56%	20,27%

Sumber : Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, 2019

***) Total aset 2016 adalah aset tanah dan bangunan yang dikelola oleh DPBT

Total aset 2017-2018 adalah aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Surabaya

Tabel II. 84
Jumlah Kasus Tanah Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1.	Jumlah Kasus yang Terdaftar	29	24	30
2.	Jumlah Kasus yang Diselesaikan	6	2	2
3.	Persen Kasus yang Diselesaikan	20,68%	8,33%	6,67%

Sumber : Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, 2019

Kasus tanah diatas merupakan kasus terkait kepemilikan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya. Kasus-kasus tersebut merupakan kasus yang ditangani/terdaftar di Pengadilan. Kasus yang belum selesai di tahun terdaftar masih terus berlanjut di tahun berikutnya (ditambahkan dalam jumlah kasus terdaftar di tahun berikutnya).

2.1.3.2.6 Lingkungan Hidup

Pertumbuhan kota dan penduduk Kota Surabaya, menyebabkan terjadinya peningkatan pembangunan dan penggunaan kendaraan bermotor yang menjadi pemicu terjadinya pencemaran lingkungan, antara lain tingginya produksi sampah kota serta pencemaran udara dan air, sehingga pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan persampahan dan optimalisasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau menjadi upaya yang utama untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Volume produksi sampah Kota Surabaya didasarkan pada asumsi timbulan sampah yang dihasilkan tiap orang per hari. Volume produksi sampah Kota Surabaya dalam satuan

m³/hari yaitu pada tahun 2016 sebanyak 9.710,61 m³/hari, pada tahun 2017 sebanyak 10.674,63 m³/hari, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 7.143,36 m³/hari, sebagaimana rekap data pada Tabel II. 85.

Tabel II. 85
Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA
Kota Surabaya Tahun 2016 –2018

No.	Uraian	2016	2017	2018
1	Volume Produksi Sampah (m ³ /hari)	9.710,61	10.674,63	7.143,36
2	Jumlah Sampah yang ditangani di TPA (m ³ /hari)	5.237,7	5.539,15	5.501,12
3	Persentase Sampah yang ditangani di TPA (persen)	53,94%	51,89%	77,01%

Sumber : Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, 2019

Seiring dengan peningkatan volume produksi sampah diperlukan adanya peningkatan daya tampung TPS yang dapat melayani pertumbuhan penduduk dan perlunya upaya pengoptimalan fungsi TPS dalam mereduksi volume sampah yang akan diangkut ke TPA melalui pembangunan TPS 3R. Tabel terkait jumlah TPS tahun 2016-2018 dapat dilihat pada Tabel II. 86.

Tabel II. 86
Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Tahun 2016 – 2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah Penduduk	3.307.300	3.342.627	3.094.732
2	Jumlah TPS (unit)	187	187	183

Sumber : Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, 2019

Di samping masalah persampahan dalam pengelolaan lingkungan hidup terkait pemenuhan kebutuhan terhadap Ruang Terbuka Hidup (RTH) perlu diperhatikan. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang seimbang baik secara fisik, ekologis, maupun sosial bagi warga kota maka keberadaan RTH terutama RTH Publik di perkotaan sangat diperlukan. Rendahnya kualitas lingkungan dan penyediaan ruang terbuka publik secara psikologis dapat menyebabkan kondisi mental dan kualitas sosial masyarakat perkotaan makin buruk dan tertekan. Karena kebutuhan kota terhadap RTH tersebut maka penyediaan dan pengelolaan RTH harus dilakukan secara proporsional terhadap pembangunan infrastruktur fisik kota.

Luasan RTH publik Kota Surabaya sampai dengan tahun 2016 mencapai 21,73 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 6.853,46 Ha yang meliputi RTH makam, RTH lapangan, RTH telaga/waduk/boezem, RTH dari penyerahan fasum dan fasos, RTH

kawasan lindung, RTH hutan kota, RTH taman dan jalur hijau. Pada tahun 2017 luasan RTH publik Kota Surabaya mencapai 21,75 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 7.275,27Ha. Sedangkan pada tahun 2018 luasan RTH publik Kota Surabaya mencapai 21,88 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 7.321,93Ha. Secara rinci luasan RTH publik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 87
Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tahun 2016 – 2018

NO.	JENIS RTH PUBLIK	2016	2017	2018
1	RTH makam	283,53	283,53	283,53
2	RTH lapangan dan stadion	350,34	352,50	355,19
3	RTH telaga/waduk/boezem	191,86	191,86	191,86
4	RTH dari fasum dan fasos permukiman	204,61	204,61	204,61
5	RTH kawasan lindung dan pesisir timur	4.548,59	4.548,59	4.548,59
6	RTH hutan	45,23	48,01	88,88
7	RTH tamandan jalur hijau (JH)	1.643,55	1.646,17	1.649,27
Jumlah Luasan RTH Publik total (Ha)		7.267,72	7.275,27	7.321,93
Luas Kota Surabaya		33.451	33.451	33.451
Persentase luas RTH terhadap luas kota (persen)		21,73	21,75	21,89

Sumber: Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2019

Secara kuantitas, proporsi dan jumlah RTH publik di Kota Surabaya telah memenuhi standar minimum kebutuhan RTH publik suatu kota, namun sebagian besar dari RTH publik tersebut masih belum dimanfaatkan atau berfungsi secara optimal sebagai paru-paru kota. Upaya yang dilakukan dalam penyediaan, pengelolaan dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara umum diarahkan optimalisasi fungsi, kualitas dan distribusi RTH publik secara proporsional di seluruh Kota Surabaya serta melibatkan partisipasi / peran serta masyarakat dan pihak swasta dengan menjalin kerjasama secara komprehensif dengan berbagai stakeholder.

Jumlah kasus dugaan pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan masyarakat pada tahun 2016 jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 75 kasus yang secara keseluruhan juga dapat ditangani. Pada tahun 2017, jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 54 kasus, dan sebanyak 54 kasus dapat ditangani. Sedangkan pada tahun 2017, jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 66 kasus, dan sebanyak 66 kasus dapat ditangani.

Berikut rekapitulasi data persentase penyelesaian permasalahan lingkungan hidup di Kota Surabaya tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 yang disajikan pada Tabel II. 88.

Tabel II. 88
Permasalahan Lingkungan Hidup Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2018

No.	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah Permasalahan Lingkungan yang ada	75	54	66
2	Jumlah Permasalahan Lingkungan yang Diselesaikan Pemerintah Kota	75	54	66
3	Persentase Permasalahan Lingkungan yang ditangani (persen)	100	100	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2019

Terjadinya permasalahan lingkungan hidup di Kota Surabaya disebabkan oleh berbagai jenis kegiatan usaha yang berbeda-beda baik dalam bentuk industri, rumah sakit, hotel, mall, apartemen, maupun kantor. Dari jenis kegiatan usaha tersebut bisa ditentukan limbah apa yang dihasilkan baik padat, cair, dan udara. Limbah padat yaitu berupa sampah domestik maupun sampah B3. Limbah cair dihasilkan dari kegiatan usaha yang menggunakan air, baik itu domestik maupun air proses. Sedangkan pencemaran udara antara lain berupa gas buang hasil dari pembakaran seperti adanya *boiler*, *genset*, *furnace*, *dryer*, serta suara kebisingan dari kegiatan usaha. Dengan adanya beragam aktivitas dari kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan, maka perlu adanya tolak ukur kesadaran masyarakat pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Diantara pelaku usaha ada yang sudah melakukan seluruh pengelolaan lingkungan dengan baik, dan juga ada yang belum melakukan seluruhnya. Oleh karena itu untuk menginventarisir penaatan pengelolaan lingkungan dapat dilakukan suatu upaya pengawasan dan pemantauan yang diwujudkan dalam bentuk penilaian ketaatan terhadap pengelolaan lingkungan antara lain aspek administrasi (aspek ini meliputi perijinan dan rekomendasi dokumen lingkungan) dan aspek teknis (aspek ini meliputi pengendalian pencemaran air bagi yang berpotensi menghasilkan limbah cair, pengendalian pencemaran udara bagi yang menggunakan alat penghasil emisi, pengelolaan TPS Limbah B3). Nilai inilah yang nantinya bisa dijadikan sebagai target pencapaian bersama dan sistem kontrol bersama.

Penyelesaian ketiga permasalahan lingkungan hidup tersebut dapat diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS) yang bertujuan memberikan informasi tentang kondisi lingkungan hidup menggunakan kualitas air sungai, kualitas udara, tutupan hutan dan persampahan sebagai indikator.

Tabel II. 89
Indeks Penyusun IKLHS Kota Surabaya

Indeks	Tahun		
	2016	2017	2018
Indeks Pencemaran Air (IPA)	54,9	57,5	57,62
Indeks Pencemaran Udara (IPU)	89,57	90,26	90,26
Indeks Ruang Terbuka Hijau (ITH)	42,38	42,38	42,44
Indeks Persampahan	69,27	74,96	74,98

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, diolah, 2019

Pengukuran indikator Kualitas Air Sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

Indeks Kualitas Udara dihitung berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep- 45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemar Udara. Indeks kualitas udara dipantau pada kepadatan transportasi tinggi, kawasan industri, kawasan permukiman, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan area sekolah sehingga dapat mewakili kualitas udara ambien di Kota Surabaya

Perhitungan indeks tutupan hutan merupakan perbandingan langsung antara luas hutan dengan luas wilayah administratif kota. Karena Kota Surabaya tidak memiliki hutan maka untuk menghitung indeks tutupan lahan digunakan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Berdasarkan UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, da-tau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Oleh karena itu indikator di bidang persampahan mencakup:

1. Pengurangan sampah yang terdiri atas peran serta masyarakat dan pengurangan sampah skala kawasan dan perkotaan
2. Tingkat pelayanan persampahan yang mencakup sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
3. Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Berdasarkan undang-undang No. 30 tahun 2007 tentang Energi pasal 25 menyatakan bahwa konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat, mencakup seluruh tahap pengelolaan energi. Dalam undang-undang ini juga disebutkan dalam pasal 21 bahwa Pemanfaatan

energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Listrik.

Konversi energi adalah perubahan bentuk energi dari yang satu menjadi bentuk energi lain. Penghematan energi atau konservasi energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Pemerintah Kota Surabaya memulai upaya konversi dan konservasi energi dengan cara penerapan solar cell, pemasangan PJU dengan LED, mengkonversi gas metan dari sampah organik menjadi listrik di rumah kompos/TPS dan TPA Benowo dan penggunaan BBG untuk kendaraan roda empat yang terdaftar pada tahun 2015 sebanyak 257 mobil. Selain itu, dibangun juga kincir angin di beberapa titik lokasi. Namun, upaya memulai konversi dan konservasi energi ini belum diterapkan oleh masyarakat Surabaya secara keseluruhan.

Tabel II. 90
Penerapan Upaya Penerapan Konservasi Energi Tahun 2016-2018

Penerapan Konservasi Energi	Satuan	Jumlah (titik) s.d. Tahun		
		2016	2017	2018
Jumlah PJU LED	Unit	2.747	8.127	13.499
<i>Solar cell</i> di Sekolah Adiwiyata	Unit	18	22	22
<i>Solar cell</i> di gedung pemerintah	Lokasi	3	7	7
Kincir Angin	Unit	8	8	8
Warning Light (APIL) Solar Cell	Unit	26	21	18
Traffic Light (APIL) Solar Cell	Unit	0	9	24

Sumber : Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang, 2019

2.1.3.2.7 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan bagi penduduk yang wajib ber-KTP adalah kepemilikan KTP. Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk PADsecara Nasional, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 KTP non elektronik tidak berlaku lagi dan hanya berlaku KTP elektronik. Data penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 91
Jumlah Penduduk Kota Surabaya yang Memiliki KTP Berbasis NIK
Tahun 2014 – 2018

Tahun	Jumlah Penduduk Wajib KTP	Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP
2014	2.160.362	2.026.310
2015	2.218.411	2.066.693
2016	2.267.213	2.057.533
2017	2.313.440	2.040.526
2018	2.348.598	2.020.291

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2017

Dari data pada Tabel II. 91 di atas menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk yang belum memiliki KTP yang salah satunya disebabkan karena kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan.

2.1.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas dilakukan melalui pengendalian angka kelahiran. Keberhasilan pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat diukur melalui indikator jumlah akseptor KB, jumlah cakupan peserta KB aktif, dan jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I.

2.1.3.2.8.a Jumlah Akseptor KB

Akseptor KB merupakan akseptor KB baru yaitu Pasangan Usia Subur (PUS) yang pertama kali menggunakan alat kontrasepsi atau PUS yang kembali menggunakan alat kontrasepsi setelah mengalami keguguran/melahirkan. Jumlah akseptor KB pada tahun 2016 sebesar 40.349 atau sebesar 7,96 persen dari jumlah PUS 504.416. Di tahun 2017, Jumlah akseptor KB sebesar 66.425 atau sebesar 12,97 persen dari jumlah PUS 512.066. Sedangkan sampai dengan tahun 2018, jumlah akseptor KB sebesar 67.972 atau sebesar 13,23 persen dari jumlah PUS sebesar 513.412. Selengkapnya untuk data pasangan usia subur dan jumlah akseptor KB dapat dilihat pada Tabel II. 92.

Tabel II. 92
Rasio Akseptor KB Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018

No.	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah Pasangan Usia Subur	506.416	512.066	513.412
2	Jumlah Akseptor KB	40.349	66.425	67.972
3	Rasio Akseptor KB (persen)	7,96	12,97	13,23

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2019

2.1.3.2.8.b Jumlah Cakupan Peserta KB Aktif

Peserta KB aktif merupakan PUS yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Peserta KB aktif mengalami penurunan dari tahun ke tahun yang diakibatkan oleh adanya angka *drop out* peserta KB jenis pil, suntik dan kondom. Upaya yang dilakukan untuk menekan turunnya angka peserta KB aktif adalah revitalisasi Keluarga Berencana melalui pembinaan kelompok KB pria dan pembentukan Kampung KB. Selengkapnya untuk data jumlah pasangan usia subur dan jumlah peserta program KB aktif dapat dilihat pada Tabel II. 93.

Tabel II. 93
Cakupan Peserta KB Aktif Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018

No.	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah Pasangan Usia Subur	506.416	512.066	513.412
2	Jumlah Peserta Program KB Aktif	415.241	414.571	412.170
3	Cakupan Peserta KB Aktif	81,99	80,96	80,28

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Surabaya, 2017

Sehubungan dengan upaya pengendalian penduduk melalui pelayanan KB, maka salah satu targetnya adalah Pasangan Usia Subur yaitu wanita usia 15-49 tahun yang telah menikah. Pada tahun 2014 terdapat 481.687 PUS, tahun 2015 terdapat 508.380 PUS, dan pada tahun 2016 terdapat 506.416 PUS. Sampai dengan 2017, terdapat 512.066 PUS dengan jumlah peserta KB aktif sebanyak 414.571.

Keberhasilan program Keluarga Berencana, salah satunya diukur dari indikator *Total Fertility Rate* (TFR) yang merupakan indikator untuk melihat jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Fungsi TFR yaitu untuk membantu para perencana program pembangunan dalam meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan Ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Capaian TFR Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel II. 94.

Tabel II. 94
Total Fertility Rate (TFR) Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018

Uraian	2016	2017	2018
Total Fertility Rate (TFR)	1,78***	1,79***	1,73***

Sumber : Bappeko, 2019 diolah

***angka sangat sementara

Catatan : Tahun 2019 merupakan data olahan Susenas

2.1.3.2.8.c Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencana yang tertuang dalam RPJMN 2014-2019. Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan adalah penyediaan pelayanan KB gratis bagi masyarakat yang berasal dari Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I). Selain itu secara mikro kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas keluarga dengan kecilnya jumlah anggota suatu keluarga diharapkan dapat meningkatkan gizi, tingkat kesehatan dan pendidikan anggota keluarganya.

Pada tahun 2014, jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I sebesar 193.550 atau 27,18% dari jumlah keluarga sebesar 712.172. Dalam hal mewujudkan keluarga yang sejahtera, maka memerlukan peran aktif dari berbagai pihak, utamanya kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Pada tahun 2016, sebanyak 233 BKB, 31 BKR, dan 31 BKL yang aktif melakukan kegiatan. Pada tahun 2017, terdapat 724 BKB, 209 BKR, dan 42 BKL yang aktif melakukan kegiatan, dan sampai dengan 2018, terdapat 1000 BKB, 232 BKR dan 97 BKL yang aktif melakukan kegiatan.

2.1.3.2.8.d Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat. Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari a) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain; b) Lembaga Adat; c) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan; d) RT/RW; e) Karang Taruna; f) Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Jumlah lembaga LKMK di Kota Surabaya sebanyak 154 lembaga. Selain itu, kepedulian Pemerintah Kota Surabaya dalam pemberdayaan masyarakat dapat digambarkan dalam indikator Persentase PMKS usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi. Pada tahun 2017, dari 1017 PMKS yang dilatih, 695 orang atau sebesar 68,34% di antaranya berproduksi. Sedangkan dari 695 orang yang telah berproduksi sebanyak 508 orang atau sebesar 73,09 % yang telah menghasilkan omzet diatas 1 juta. Sedangkan di tahun 2018, dari 464 orang yang dibina, 335 orang diantaranya telah berproduksi dan sebanyak 277 orang telah menghasilkan omzet diatas 1 juta atau sebesar 82,68%. Data keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif ditunjukkan pada Tabel II.95.

Tabel II. 95
Keluarga Miskin yang Melakukan Usaha Ekonomi Produktif
di Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018

Uraian	2016	2017	2018
Jumlah Keluarga Miskin yang telah Melakukan Usaha Ekonomi Produktif	1.824	695	335

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019

Kepedulian Pemerintah Kota Surabaya dalam pemberdayaan masyarakat dapat digambarkan dalam indikator Persentase PMKS terutama keluarga miskin usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi. Data PMKS terutama keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif ditunjukkan pada Tabel II.94 diatas kelompok keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif akan tetap diupayakan diberikan pendampingan agar memenuhi kriteria bagi Perangkat Daerah terkait untuk melakukan pembinaan kearah peningkatan usaha dan omzet bagi kelompok usaha keluarga miskin yang telah berjalan.

2.1.3.2.9 Perhubungan

Kota Surabaya sampai dengan saat ini memiliki 4 terminal yang melayani angkutan umum dengan jenis bis dan angkutan kota (angkot) yang terdiri dari Terminal Purabaya, Terminal Tambak Oso Wilangun, Terminal Joyoboyo dan Terminal Bratang dengan fluktuasi jumlah angkutan darat di Kota Surabaya pada tahun 2016 sejumlah 10.202 kendaraan seperti yang disajikan pada Tabel II. 96. Sampai dengan tahun 2017, jumlah angkutan darat yang beroperasi di Kota Surabaya berjumlah 8.444 kendaraan. Sedangkan sampai dengan tahun 2018, jumlah angkutan darat yang beroperasi di Kota Surabaya berjumlah 8.001 kendaraan. Untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya akan melakukan restrukturisasi angkutan kota (mikrolet dan bus kota) untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat di bidang transportasi.

Tabel II. 96
Jumlah Terminal dan Angkutan Darat Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2018

No.	Uraian	2015	2017	2018
1	Jumlah Terminal Bis	4	4	4
2	Jumlah Angkutan Darat	10.202	8.444	8.001

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2019

Dalam merealisasikan restrukturisasi angkutan kota tersebut, Pemerintah Kota Surabaya masih menjamin pelayanan transportasi (angkutan umum dalam trayek dan tidak dalam trayek) eksisting. Salah satu contohnya adalah pemberian ijin trayek yang dikeluarkan kepada pemilik angkutan umum seperti yang disajikan pada Tabel II. 97. Dalam pemberian ijin trayek tersebut, angkutan umum harus memenuhi syarat laik jalan dan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel II. 97
Rasio Ijin Trayek Kota Surabaya, Tahun 2016 – 2018

No.	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah Penduduk	3.307.300	3.342.627	3.094.732
2	Jumlah Izin Trayek yang Dikeluarkan	7.017	3.699	3.341
3	Rasio Izin Trayek	0,0021	0,0011	0,0011

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2019

Pada tahun 2016, ijin trayek yang dikeluarkan sebanyak 7.017 ijin dengan jumlah penduduk sebanyak 3.307.300 jiwa sehingga rasio ijin trayek sebesar 0,0023. Sementara tahun 2017, ijin trayek yang dikeluarkan sebanyak 3.699 ijin dengan jumlah penduduk sebanyak 3.342.627 jiwa sehingga rasio ijin trayek sebesar 0,0011. Sedangkan untuk tahun 2018, ijin trayek yang dikeluarkan sebanyak 3.341 ijin dengan jumlah penduduk sebanyak 3.094.732 jiwa sehingga rasio ijin trayek sebesar 0,0011.

Untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum (baik penumpang dan barang) di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya melakukan upaya melalui pemeriksaan kendaraan melalui Uji KIR. yang berada di UPTD PKB Tandes dan Wiyung, khususnya bagi angkutan penumpang dan angkutan barang. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara berkala selama tiap hari kerja. Jumlah kendaraan yang lulus uji pada tahun 2016 sebanyak 123.830 kendaraan, sementara sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah kendaraan umum yang lulus uji sebanyak 131.256 kendaraan. Sedangkan pada tahun 2018, jumlah kendaraan umum yang lulus uji sebanyak 150.494 kendaraan. Rekapitulasi jumlah kendaraan yang lulus uji dapat dilihat dalam Tabel II. 98.

Tabel II. 98
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2018

No.	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	37.575	39.610	46.989
2	Jumlah kendaraan wajib uji KIR	97.377	99.983	155.450
3	Jumlah kendaraan yang diuji KIR	133.463	148.528	158.619

No.	Uraian	2016	2017	2018
4	Jumlah kendaraan lulus uji KIR	123.830	131.256	150.494

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2019

Demi menjaga kondisi lalu lintas di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya melakukan penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan setiap tahunnya, yang salah satunya berupa pemasangan rambu-rambu baik rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk. Jumlah pemasangan rambu-rambu di Kota Surabaya selalu meningkat dari tahun ke tahun, di mana sampai dengan tahun 2016 mencapai 12.775 unit, dan sampai dengan tahun 2017 berjumlah 13.974 unit. Sedangkan sampai dengan tahun 2018, pemasangan rambu meningkat menjadi 16.337 unit yang dapat dilihat pada Tabel II. 99. Dengan adanya penambahan jumlah rambu tersebut, diharapkan mampu mengubah perilaku berkendara para pengguna kendaraan serta menjadi lebih taat dan tertib terhadap peraturan.

Tabel II. 99
Pemasangan Rambu-Rambu Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018

Uraian	2016	2017	2018
Jumlah Pemasangan Rambu-rambu	12.775	13.974	16.337

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2019

2.1.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Guna mendukung jangkauan jaringan komunikasi, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Komunikasi dan Informasi telah melakukan pemeliharaan terhadap sejumlah tower yang tersebar di berbagai lokasi dan alat komunikasi (HT) pada tiap SKPD. Sampai dengan tahun 2016 Pemerintah Kota telah membangun 30 sistem informasi pelayanan perijinan dan 10 sistem informasi pelayanan non perijinan. Pada tahun 2017 tower yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah sebanyak 88 unit dan jumlah alat komunikasi (HT) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah 997 unit. Sedangkan pada tahun 2018 tower yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah sebanyak 29 unit dan jumlah alat komunikasi (HT) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah 1.542 unit. Selain menggunakan menara dan alat komunikasi (HT), untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan infrastruktur TIK khususnya jangkauan jaringan, Pemerintah Kota Surabaya juga menggunakan sejumlah infrastruktur lain maupun bekerjasama dengan pihak ketiga.

Tabel II. 100
Jaringan Komunikasi Kota Surabaya Tahun 2016 –2018

Uraian	2016	2017	2018
Menara (Tower) (unit)	88	88	29
Alat Komunikasi (HT)	802	997	1.542

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2019

Pemerintah Kota Surabaya memiliki situs resmi yang dapat diakses pada alamat <http://www.surabaya.go.id>. Selain halaman utama, juga terdapat beberapa sub domain dalam website tersebut yang dikelola oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Karena media komunikasi bukan hanya melalui internet, Pemerintah Kota juga melakukan sejumlah upaya untuk mengelola dan membangun komunikasi dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan tatap muka secara langsung seperti dialog melalui media massa maupun beragam kegiatan yang melibatkan masyarakat.

Tabel II. 101
Website Milik Pemerintah Kota Surabaya, Tahun 2016 –2018

Uraian	2016	2017	2018
Website Milik Pemerintah Kota	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2019

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Komunikasi dan Informasi berusaha meningkatkan pelayanan publiknya dengan mendayagunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Salah satu bentuk pendayagunaan ini adalah dengan menggunakan aplikasi sebagai sarana untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik. Sampai dengan tahun 2016 Pemerintah Kota telah membangun 30 sistem informasi pelayanan perijinan dan 10 sistem informasi pelayanan non perijinan. Sedangkan pada tahun 2017 dan tahun 2018 setiap tahunnya terdapat penambahan sebanyak 10 sistem informasi pelayanan perijinan dan 5 sistem informasi pelayanan non perijinan yang terbangun. Karena masih banyak terdapat layanan perizinan dan non perizinan yang belum berbasis TIK maka Pemerintah Kota terus mengupayakan untuk membangun aplikasi guna meningkatkan jumlah layanan perizinan dan non perizinan yang berbasis TIK seperti dapat dilihat pada Tabel II. 102.

Tabel II. 102
Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Online Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018

No.	Uraian	2016	2017	2018
1	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan	6	10	10
2	Sistem Informasi Pelayanan Non Perijinan	7	5	5

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2019

2.1.3.2.11 Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil

Pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) serta Koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian. Daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif di Kota Surabaya adalah daya saing UMK pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi. UMK menjadi satu sektor yang memiliki peran strategis terhadap perekonomian Kota Surabaya, yang antara lain ditunjukkan dengan penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap PDRB Kota Surabaya melalui peningkatan produktivitas usaha.

2.1.3.2.11.a Koperasi

Peningkatan jumlah koperasi di Kota Surabaya disertai dengan peningkatan pertumbuhan jumlah anggota koperasi, hal ini menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dapat dikatakan berhasil. Pada tahun 2016 jumlah anggota koperasi di Kota Surabaya sebanyak 261.799 orang, pada tahun 2017 jumlah anggota koperasi juga meningkat menjadi 262.153 orang, serta ditahun 2018 jumlah anggota koperasi mencapai 266.396 Orang. Secara rinci pertumbuhan anggota koperasi dapat dilihat pada Tabel II. 103.

Tabel II. 103
Pertumbuhan Anggota Koperasi Tahun 2016 – 2018

Uraian	2016	2017	2018
Jumlah anggota koperasi	261.799	262.153	266.396

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2019

Pembinaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dapat dikatakan cukup berhasil, hal tersebut dapat ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah koperasi aktif. Pada tahun 2016 jumlah koperasi di Kota Surabaya adalah sebanyak 1.726 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 1.461 koperasi. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah koperasi di Kota Surabaya adalah sebanyak 1.747 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 1.484 koperasi, pada

tahun 2018 jumlah koperasi meningkat menjadi 1.750 koperasi dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 1.487. Secara rinci presentase koperasi aktif dapat dilihat pada Tabel II. 104.

Tabel II. 104
Persentase Koperasi Aktif Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018

No.	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah koperasi	1.726	1.747	1.750
2	Jumlah koperasi aktif	1.461	1.484	1.487
3	Persen koperasi aktif	84,65	84,95	84,97

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2019

Rasio volume usaha koperasi dibandingkan dengan jumlah koperasi aktif pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 jumlah volume usaha koperasi adalah sebesar 1,657 milyar dari 1.463 koperasi, pada tahun 2017, volume usaha koperasi meningkat menjadi 1,797 milyar dari 1.484 koperasi, di tahun 2018 volume usaha koperasi meningkat mencapai 2,092 milyar dari 1.487 koperasi. Secara rinci rasio volume usaha koperasi dibandingkan dengan jumlah koperasi dapat dilihat pada Tabel II. 105.

Tabel II. 105
Rasio Volume Usaha Koperasi Aktif Terhadap Jumlah Koperasi Aktif di Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018

Uraian	2016	2017	2018
Jumlah Koperasi Aktif	1.463	1.484	1.487
Volume Usaha Koperasi Aktif (Rp. Milyar)	1.657	1.797	2.092
Rasio	1,13	1,21	1,41

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2019

2.1.3.2.11.b Usaha Mikro dan Kecil

Dasar perekonomian juga ditunjukkan dengan peningkatan jumlah UMKM. Sampai dengan tahun 2018 jumlah UMKM tercatat sebanyak 26.854 di mana sebanyak 22.924 merupakan Usaha Mikro dan Kecil. Jumlah usaha kecil dan menengah yang tercatat merupakan usaha kecil dan menengah yang telah memiliki ijin dan untuk usaha mikro yang tercatat merupakan jumlah usaha mikro baik yang memiliki ijin maupun yang masih belum memiliki ijin. Secara rinci rekap data presentase usaha mikro dan kecil Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel II.106.

Tabel II. 106
Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Surabaya
Tahun 2016 –2018

No.	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah seluruh UMKM	26.854	26.854	26.854
2	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	22.924	22.924	22.924
3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	85,37	85,37	85,37

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2019

2.1.3.2.12 Penanaman Modal

Pengaruh penanaman modal atau investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dapat di lihat melalui *multiplier effect* yang di timbulkannya. *Multiplier effect* atau efek pengganda dari investasi dipengaruhi oleh besarnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi.

2.1.3.2.12.a PMA dan PMDN

Penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk penanaman modal langsung (*direct investment*) maupun penanaman modal portofolio surat berharga (*portofolio investment*). Berikut ini tabel realisasi penanaman modal langsung PMDN dan PMA di Kota Surabaya. Jumlah proyek PMDN dan PMA kota Surabaya selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II. 107 di bawah ini.

Tabel II. 107
Jumlah Proyek PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018

No.	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah Proyek PMDN	16	10	13
2	Jumlah Proyek PMA	43	34	109
3	Total	20	59	44

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2019

Penanaman Modal Kota Surabaya menunjukkan bahwa nilai investasi di Kota Surabaya pada tahun 2015 sebanyak 20 investasi dan pada tahun 2016 tercatat sejumlah 58 investasi. Tahun 2017 realisasi investasi di Kota Surabaya sejumlah 44 PMA dan PMDN dengan nilai investasi sebesar Rp.3.972,13 Milyarsedangkan pada tahun 2018 nilai investasi sebanyak 122 investasi dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp.4.854,57 Milyar. Menurut jenisnya, realisasi investasi lebih banyak berasal dari investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dibanding dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pada tahun 2015 realisasi investasi PMA sebanyak 12 investasi dan PMDN sebanyak 6 investasi dan pada tahun 2016 realisasi PMA sebanyak 43 investasi dan PMDN sebanyak 15

investasi. Sedangkan pada tahun 2017 realisasi investasi PMA sebanyak 34 investasi dan PMDN sebanyak 10 investasi dan pada tahun 2018 realisasi PMA sebanyak 109 investasi dan realisasi PMDN sebanyak 13 investasi. Kinerja investasi yang relatif baik tidak terlepas prospek perekonomian domestik yang dipersepsikan masih cukup baik disertai iklim usaha yang kondusif.

Laporan realisasi Penanaman Modal di Surabaya merupakan potret atas aktivitas penanaman modal berdasarkan persetujuan perijinan baik berupa Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel II. 108 di bawah ini.

Tabel II. 108
Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017

No.	Uraian	2016	2017	2018
1	Persetujuan			
1.1	Jumlah Proyek	109	82	136
1.2	Nilai Investasi (Rp Milyar)	2.371,45	4.964,37	10.379,22
	(USD Juta)	351,62	-	774,57
2	Realisasi			
2.1	Jumlah Proyek	59	44	122
2.2	Nilai Investasi (Rp Milyar)	3.797,87	3.972,13	4.854,57
	(USD Juta)	209,65	166,45	362,28

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2019

Adanya investasi PMA dan PMDN di Kota Surabaya menimbulkan dampak positif terhadap tingkat tenaga kerja di Surabaya. Peningkatan nilai dan proyek investasi PMA dan PMDN berkontribusi dalam membuka lapangan kerja baru yang berkaitan dengan daya serap tenaga kerja sebagai dampak investasi langsung, dimana rekap tabel dapat dilihat pada Tabel II. 109 di bawah ini.

Tabel II. 109
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018

No.	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah PMA/PMDN	59	44	122
2	Jumlah Tenaga Kerja Yang Bekerja Pada Perusahaan PMA/PMDN	6.897	10.627	10.607
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	116,90	241,52	86,94

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2018

Sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi, pada sisi penawaran tingginya investasi akan meningkatkan kapasitas barang dan jasa yang dihasilkan sementara pada sisi permintaan peran investasi juga akan menciptakan lapangan pekerjaan. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal, realisasi investasi baik dari penanaman PMA dan PMDN pada tahun 2016 jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 6.897 orang dari 59 proyek maka nilai rasio investasi yang ditanamkan di Kota Surabaya terhadap daya serap tenaga kerja sebesar 116,90. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 10.627 orang dari 44 proyek maka nilai rasio investasi yang ditanamkan di Kota Surabaya terhadap daya serap tenaga kerja sebesar 241,52. Pada tahun 2018 jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 10.607 orang dari 122 proyek maka nilai rasio investasi yang ditanamkan di Kota Surabaya terhadap daya serap tenaga kerja sebesar 86,94.

2.1.3.2.13 Kepemudaan dan Olah Raga

Pencapaian prestasi olahraga tidak terlepas dari fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang memadai bagi pelaku olahraga. Prasarana olahraga milik Pemerintah Kota Surabaya bersifat terbuka (*outdoor*) maupun tertutup (*indoor*) yang tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya diantaranya adalah Lapangan Atletik THOR, Lapangan Softball dan Hockey Dharmawangsa, Gelora 10 Nopember, dan Gelora Bung Tomo. Sampai dengan tahun 2016, Pemerintah Kota Surabaya telah membangun sebanyak 428 lapangan olahraga. Pada tahun 2017, total lapangan olahraga milik Pemerintah Kota Surabaya adalah sejumlah 393 lapangan yang berada di atas lahan fasilitas umum perumahan dan permukiman maupun di tanah aset BTKD di wilayah kota Surabaya. Sedangkan pada tahun 2018, jumlah lapangan olahraga milik Pemerintah Kota Surabaya mengalami peningkatan menjadi 479 lapangan olahraga. Untuk rincian dapat dilihat pada Tabel II. 110.

Tabel II. 110
Lapangan Olahraga Milik Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2016 –2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah lapangan olahraga	428	393	479
2	Jumlah penduduk	3.307.300	3.342.627	3.094.732
3	Rasio lapangan olahraga	1 : 7.727	1 : 8.505	1 : 6461

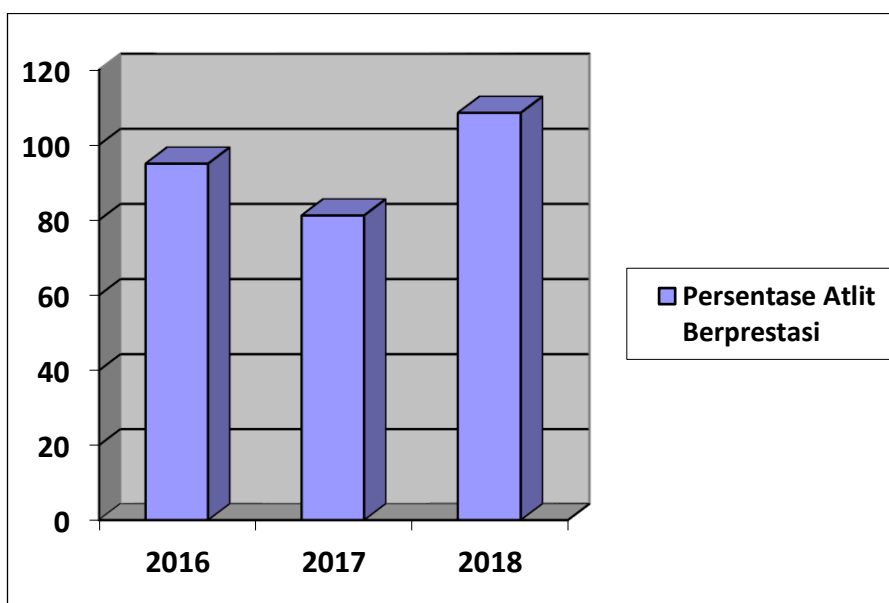
Sumber: Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil dan Dinas Kepemudaan & Olahraga, 2019

Namun sebaran prasarana olahraga di Kota Surabaya memang belum merata. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya lahan kosong di beberapa wilayah kota. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Surabaya tetap berupaya untuk mewujudkan pemerataan sebaran

prasarana olahraga di seluruh kelurahan di wilayah Kota Surabaya dengan berbagai cara diantaranya yaitu dengan pengadaan lahan.

Dengan penyediaan fasilitas tersebut diharapkan masyarakat Kota Surabaya khususnya generasi muda, dapat memanfaatkan waktu luang untuk diarahkan untuk kegiatan yang positif. Hal ini juga akan memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat Kota Surabaya secara umum dan menumbuhkan bibit-bibit atlet olahraga secara khusus.

Pada tahun 2016, nilai persentase atlet yang berprestasi sangat memuaskan yaitu mencapai 95%, dari 847 orang atlet olahraga yang dibina sejumlah 805 orang diantaranya meraih prestasi olahraga ditingkat regional, nasional maupun internasional. Sementara pada tahun 2017, nilai persentase atlet yang berprestasi mencapai 81,24% terdapat 581 orang atlet yang dibina dan sejumlah 472 orang diantaranya berhasil meraih prestasi olahraga di tingkat regional, nasional maupun internasional. Sedangkansampai dengan tahun 2018, nilai persentase atlet yang berprestasi mencapai 108,56% terdapat 2307 orang atlet yang dibina dan sejumlah 2125 orang diantaranya berhasil meraih prestasi olahraga di tingkat regional, nasional maupun internasional.



Gambar II. 15

Persentase Atlet Berprestasi

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2019

Kepemudaan dan Olahraga juga erat kaitanya dengan pemuda-pemuda yang dapat menjadi kader. Pemerintah Kota Surabaya juga telah mengadakan pembinaan untuk kader anti kenakalan remaja.

Dalam bidang kepemudaan, Pemerintah Kota Surabaya juga memiliki program dan kegiatan khusus terkait pembinaan kepemudaan diantaranya adalah pembentukan pemuda kader anti kenakalan remaja (anti narkoba dan peduli HIV AIDS). Pada tahun 2016 terdapat sejumlah 389 orang pemuda menjadi kader anti kenakalan remaja yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya. Sementara sampai dengan tahun 2017 terdapat sejumlah 787 orang pemuda menjadi kader anti kenakalan remaja yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya. Sedangkan sampai dengan tahun 2018 terdapat sejumlah 1.244 orang pemuda menjadi kader anti kenakalan remaja yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya.

2.1.3.2.14 Statistik

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar untuk Statistik sebelumnya dilaksanakan melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan melaksanakan kegiatan penyusunan dan analisa data dan informasi perencanaan pembangunan. Pemerintah Kota Surabaya telah menyusun buku PDRB Kota Surabaya dan Informasi Data Pokok Surabaya sebagai bagian penyelenggaraan statistik, serta disusunnya buku Surabaya Dalam Angka.

Tabel II. 111

Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018

No.	Dokumen	2016	2017	2018
1.	PDRB Kota Surabaya	Ada	-	Ada
2.	PDRB Kecamatan	Ada	-	Ada
3.	Informasi Data Pokok Surabaya	Ada	Ada	Ada
3.	Surabaya Dalam Angka	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bappeko Surabaya, 2019

Selain itu pelaksanaan sektoral juga telah diselenggarakan di SKPD masing-masing, dalam rangka mendukung dan untuk memenuhi kebutuhan perencanaan sektoral di masing-masing SKPD, seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat & Keluarga Berencana terkait pengumpulan dan pengolahan data kemiskinan, Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah melalui PD Pasar Surya terkait harga pasar, dsb.

Dengan memperhatikan urgensi data dan informasi pembangunan dalam perencanaan seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota perlu mengupayakan kualitas data dan informasi pembangunan daerah yang ditunjukkan melalui penyediaan data dan informasi

yang valid untuk mendukung pengukuran indikator kinerja seperti yang tertuang pada PRJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021.

2.1.3.2.15 Kebudayaan

Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka mendukung bidang kepariwisataan banyak mengadakan kegiatan festival seni dan budaya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah kota maupun pihak swasta.

2.1.3.2.15.a Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Banyaknya penyelenggaraan festival seni dan budaya bertujuan untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan serta memberi kesempatan pada seniman-seniman kota Surabaya untuk menampilkan karyanya. Disisi lain, banyaknya penyelenggaraan festival seni dan budaya dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi kelompok seni di Surabaya, Oleh karena itu diperlukan kerja sama dengan stakeholder untuk meningkatkan jumlah penyelenggaraan seni dan budaya. Perkembangan penyelenggaraan festival seni dan budaya dapat dilihat pada Tabel II. 112 di bawah ini.

Tabel II. 112
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2018

Tahun	2016	2017	2018
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	887	445	984

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2019

tahun 2016 festival seni dan budaya yang dilaksanakan di kota Surabaya sebanyak 887 festival, dan pada tahun 2017 sebanyak 445 festival seni dan budaya yang diselenggarakan. Sedangkan di 2018, jumlah festival seni dan budaya meningkat menjadi sebanyak 984 kali. Banyaknya penyelenggaraan festival seni dan budaya bertujuan untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan serta memberi kesempatan pada seniman-seniman kota Surabaya untuk menampilkan karyanya.

2.1.3.2.15.b Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Pemerintah Kota Surabaya dalam mendukung perkembangan kesenian menyediakan sarana berupa gedung/tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan kesenian/bereksprei di UPTD Tugu Pahlawan, THR dan Balai Pemuda serta UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel.

2.1.3.2.15.c Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya

Dalam rangka perlindungan dan pelestarian terhadap cagar budaya yang ada di kota Surabaya, pemerintah kota melakukan upaya perlindungan dan pelestarian dalam bentuk pemberian penetapan terhadap benda, situs dan kawasan sebagai cagar budaya dan pengawasan agar jika ada proses renovasi tidak sampai merubah bentuk aslinya. Jumlah benda, situs dan kawasan yang dilindungi dan dilestarikan oleh Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2015 terdapat 273 benda, situs dan kawasan yang dilindungi dan dilestarikan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pada tahun 2016 dan sampai dengan tahun 2018 tidak ada penambahan cagar budaya yang ditetapkan karena masih dalam proses evaluasi terhadap bangunan/benda yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah cagar budaya tersebut masih memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai cagar budaya.

Rekapitulasi data jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II. 113
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2018

No.	Uraian	2016	2017	2018
1	Total Benda, Situs dan Kawasan yang Dimiliki Daerah	273	273	273
2	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	273	273	273
3	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	100	100	100

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2019

2.1.3.2.16 Perpustakaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2009, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk didalamnya taman bacaan dan sudut baca.

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya dalam mengembangkan perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan dan TBM, menyelenggarakan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Kecamatan, Kelurahan, RW, Rumah Sakit, Puskesmas,

Taman, Dinas, Rusun, Liponsos dan Terminal serta menyediakan layanan TBM yang tersebar secara merata, menyelenggarakan perpustakaan keliling yang menggunakan sarana angkutan yang melayani di sekolah dan taman kota, menyediakan Sumber Daya Manusia dan biaya operasional pada layanan perpustakaan dan TBM, melaksanakan promosi budaya gemar membaca dengan mengadakan pameran buku, bedah buku, lomba-lomba pemasyarakatan perpustakaan, seminar, lokakarya, penyebarluasan informasi melalui brosur/*leaflet*, spanduk, *banner*, *billboard*, media cetak dan elektronik, melaksanakan kerjasama dan jaringan antar perpustakaan, melaksanakan bimbingan teknis kepada tenaga pengelola perpustakaan, melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Taman Bacaan Masyarakat dan Perpustakaan bukan hanya di Pemerintah Kota, namun ada perpustakaan milik non pemerintah Kota yang diselenggarakan masyarakat dan Perguruan Tinggi. Data yang tercatat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat dilihat pada Tabel II. 114.

Tabel II. 114
Jumlah Perpustakaan Kota Surabaya Tahun 2016 –2018

No.	Uraian	2016	2017	2018
1	Perpustakaan Milik Pemda	2	2	2
2	Perpustakaan Milik Non Pemda	61	61	61
3	Total	63	63	63

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2019

Untuk menambah kunjungan di Perpustakaan diperlukan buku yang variatif dan koleksi baru. Jumlah koleksi buku padatahun 2017 terdapat penambahan 54.326 buku sehingga sampai dengan tahun 2017 jumlah koleksi buku sebanyak 898.466 buku. Pada tahun 2018, terdapat penambahan buku sebanyak 21.924 buku, dengan persentase penyediaan koleksi buku sampai dengan tahun 2018 sebesar 87,45% atau 2.326.889 buku dari target sebanyak 2.660.695 di tahun 2021, dengan demikian capaian kinerjanya sebesar 100,95%. Data koleksi buku sebagaimana Tabel II. 115.

Tabel II. 115
Jumlah Koleksi Buku Layanan Baca Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2018

No.	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah judul buku	133.281	-	323.342
2	Jumlah buku	844.140	898.466	920.390

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2019

Jumlah kunjungan perpustakaan milik Pemerintah Kota Surabaya ditampilkan pada Tabel II. 116. Pada tahun 2018, salah satu indikator yang digunakan sebagai pengukur kinerja adalah persentase pengunjung layanan baca yang meminjam buku. Pada tahun 2018, sebanyak 1.762.516 pengunjung di layanan baca dan seluruhnya meminjam buku meningkat dari tahun 2017 yang sebanyak 729.877 pengunjung. Pengunjung perpustakaan ini antara lain merupakan pengunjung perpustakaan daerah, taman bacaan masyarakat, maupun perpustakaan keliling. Pada tahun 2018, pengembangan minat dan budaya dilaksanakan dengan kegiatan bedah buku, festival budaya pustaka dan pameran buku.

Tabel II. 116
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Surabaya
Tahun 2016 –2018

Uraian	2016	2017	2018
Kunjungan layanan baca per bulan (orang)	4.762.438	5.496.517	7.259.033

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2019

Pembangunan dan pengembangan perpustakaan yang dilakukan pada periode sebelumnya ditekankan pada peningkatan jumlah kunjungan. Selanjutnya perlu diukur peningkatan kemampuan literasi terutama pada siswa sekolah, yang diukur melalui tes *reading text leveling*. Tes *reading text leveling* bertujuan untuk mengukur kemampuan membaca siswa sesuai dengan level standar usia siswa. Sampai dengan tahun 2018, sebanyak 55.871 siswa atau sebesar 40,92% dari target 289.166 siswa di tahun 2021 telah mengikuti tes *reading text levelling*. Dan dari 55.871 siswa yang mengikuti tes di tahun 2018, seluruh siswa kemampuan membacanya sesuai dengan *reading text levelling*.

Tabel II. 117
Partisipasi Reading Text Levelling Tahun 2016-2018

Uraian	2016	2017	2018
Jumlah siswa mengikuti <i>readingtext levelling</i>	3.041	59.438	55.871
Jumlah siswa yang kemampuan membacanya sesuai dengan <i>reading text levelling</i>	2.219	59.438	55.871
Persentase (%)	72,97	100	100

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2019

2.1.3.2.17 Kearsipan

Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang

didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, sertapendampingan dan monitoring penerapan penggunaan sistem pola baru yang dikembangkan dengan sistem aplikasi kearsipan berbasis IT sesuai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Perangkat Daerah diarahkan untuk tertib sistem tata kearsipan sesuai Ketentuan, yaitu: 1) Adanya SDM Tenaga Pengelola Arsip/Arsiparis; 2) Menggunakan program/aplikasi dalam pengelolaan arsip; 3) Tertib penataan pemberkasan arsip dan pembuatan Daftar Arsip; 4) Tersedianya Sarana Prasarana kearsipan Arsip Aktif (*Filing Cabinet*, Map gantung, Buku daftar Pengendali) dan Arsip Inaktif (Rak Arsip/Mobil File, Box Arsip, Folder Besar) serta 5) Adanya Ruang Simpan Arsip/Depo.

Data Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II. 118.

Tabel II. 118
Perangkat Daerah (PD), Unit Kerja, BUMD dan Sekolah Negeri yang Tertib Sistem Tata Kearsipan Tahun 2016 –2018

No.	Uraian	2016	2017	2018
1.	Jumlah Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri	224	684	899
2.	Jumlah Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeritertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan	24	154	284
3.	Persentase Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeritertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan (%)	10,71%	22,51%	43,89%

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2019

Pada tahun 2016 sebanyak 24 Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan, dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 154 Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeriyang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan, dan pada tahun 2018 menjadi 284 Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan.

Dalam rangka penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah, maka dilaksanakan juga akuisisi arsip, yaitu proses penambahan khasanah arsip statis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari Perangkat Daerah pencipta arsip kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pada tahun 2017, jumlah arsip diakuisisi sebanyak 473 arsip dari target 1.725 arsip diakusisi di tahun 2021. Dan di tahun 2018, jumlah arsip diakuisisi

sebanyak 876 arsip dari target 1.725 arsip diakuisi di tahun 2021. Dengan demikian persentase arsip diakuisi sebesar 50,78%.

Untuk mendorong pelaksanaan sistem tata kearsipan yang tertib sesuai ketentuan, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompeten pada kearsipan. Pada tahun 2017 peningkatan SDM pengelola kearsipan dilaksanakan melalui pendampingan dan evaluasi pelaksanaan sistem tata kearsipan pada 2 Perangkat Daerah, 7 Kecamatan, 11 Kelurahan; serta pelatihan/Bintek/Inhouse training kepada 50 SMPN di kota Surabaya. Sedangkan di tahun 2018, peningkatan SDM pengelola kearsipan dilaksanakan melalui pendampingan dan evaluasi pelaksanaan sistem tata kearsipan pada 40 lembaga; serta pelatihan/Bintek/Inhouse training kearsipan kepada 90 lembaga pendidikan di kota Surabaya

2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan, yaitu urusan:

2.1.3.3.2 Kelautan dan Perikanan

Perkembangan kelautan dan perikanan di Surabaya dapat dilihat pada Tabel II. 119 dan Tabel II.120.

Tabel II. 119
Kontribusi Sub Kategori Perikanan terhadap PDRB Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2018

Uraian	2016	2017	2018
Total Nilai Tambah PDRB	452.345.242,07	495.043.304,5	547.769.497,0
Total Nilai Tambah Sub Kategori Perikanan	721.552,58	786.764,6	814.659,3
Kontribusi Sub Kategori Perikanan terhadap PDRB	0,16%	0,16%	0,15%

Sumber : BPS Kota Surabaya, 2019

Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya pada tahun 2017 sebesar 0,16% atau sebesar Rp. 786.764,6 juta rupiah dari total PDRB sebesar Rp. 495.043.304,5 juta rupiah. Di tahun 2018, kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya sebesar 0,15% atau sebesar Rp.814.659,3 juta rupiah dari total PDRB sebesar Rp.547.769.497,0 juta rupiah.

Nilai tambah sub kategori kelautan dan perikanan relatif dapat mengikuti perkembangan PDRB Kota dengan kontribusi yang relatif stabil yaitu pada kisaran 0,15-

0.16%. Kontribusi sub kategori perikanan pada tahun 2018 menurun menjadi 0,15%, hal tersebut dikarenakan peningkatan nilai tambah PDRB lebih besar daripada peningkatan nilai tambah sub kategori perikanan, seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 120
Jumlah Produksi Perikanan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018

No.	Jenis Usaha	Jumlah Produksi (ton)		
		2016	2017	2018
1.	Perikanan Laut	10.578,30	8.416,60	8.151,50
2.	Perikanan Tambak	6.915,03	6.798,68	6.956,58
3.	Perairan umum	93,38	94	91,80
4.	Kolam	1.116,48	1.133,33	1.104,94
5.	Jaring Apung	144,82	134,22	138
Jumlah		14.954,15	18.849,44	16.576,83

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2019

Pada Tabel II. 120 terlihat bahwa jumlah produksi perikanan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 16.478,82 ton. Penurunan jumlah produksi terjadi pada jenis usaha perikanan laut, perairan umum dan kolam. Menurunnya produksi perikanan laut karena sumber daya ikan semakin berkurang serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam penangkapan ikan sehingga hasil tangkapan nelayan berkurang. Sedangkan kenaikan terjadi pada jumlah produksi perikanan tambak dan jaring apung, hal ini dikarenakan adanya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya dalam budidaya perikanan melalui pelatihan teknologi tepat guna dan fasilitasi penyediaan sarana produksi dalam budidaya perikanan.

Untuk tingkat konsumsi ikan kota Surabaya pada tahun 2018 sebesar 45,85 kg/kapita/th atau tercapai sebesar 90,52% dari yang ditargetkan nasional yaitu 50,65 kg/kapita/th. Adapun upaya untuk meningkatkan konsumsi ikan di Surabaya melalui memasyarakatkan gemar makan ikan, sosialisasi/penyuluhan, dan pelatihan diversifikasi pangan berbahan baku dari ikan. Perkembangan tingkat konsumsi ikan Kota Surabaya disajikan pada Tabel II.121.

Tabel II. 121
Konsumsi Ikan Kota Surabaya Tahun 2016 –2018

No.	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah Konsumsi Ikan (kg/kap/thn)	40,33	43,23	45,85
2	Target Nasional (Kg/kap/thn)	43,88	47,12	50,65
3	Persentase Konsumsi Ikan (persen)	91,91	91,74	90,52

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2019

2.1.3.3.3 Pariwisata

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk meningkatkan daya tarik obyek-obyek wisata sehingga mampu mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Surabaya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel II. 122 mengenai jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara ke Kota Surabaya.

Pada tahun 2016 kunjungan wisatawan ke kota Surabaya sebanyak 21.352.786 wisatawan dengan rincian jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 772.058 wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebanyak 20.580.728 wisatawan. Pada tahun 2017, kunjungan wisatawan ke kota Surabaya sebanyak 24.283.022 wisatawan dengan rincian jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 1.569.130 wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebanyak 22.713.892 wisatawan. Sedangkan pada tahun 2018, kunjungan wisatawan ke kota Surabaya sebanyak 29.283.022 wisatawan dengan rincian jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 1.728.194 wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebanyak 27.575.125 wisatawan

Tabel II. 122
Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara dan Nusantara ke Kota Surabaya
Tahun 2015 –2018

No.	Uraian	2016	2017	2018
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	772.058	1.569.130	1.728.194
2.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	20.580.728	22.713.892	27.575.125
Jumlah		21.352.786	24.283.022	29.283.022

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2019

Dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perkembangan perekonomian kota Surabaya dan multiplier efek bagi kesejahteraan masyarakat. Jumlah Kunjungan Wisatawan berdasarkan objek wisata jika dibandingkan dengan total kunjungan wisata ke Surabaya masih relatif kecil, hal ini menunjukkan bahwa daya tarik objek wisata di Surabaya belum optimal sehingga masih diperlukan pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata yang efektif.

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk meningkatkan kualitas obyek-obyek wisata sehingga mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan dan berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Surabaya. Jumlah kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata sebagaimana tertera pada Tabel II. 1231 hanya memperhitungkan jumlah wisatawan yang berkunjung pada 20 obyek wisata yang ada di Kota Surabaya,

belum memperhitungkan wisatawan yang berkunjung ke tempat-tempat wisata kuliner, lapangan golf, mall, maupun obyek wisata lainnya seperti hutan mangrove, museum Bank Indonesia, rumah pahlawan, dsb. Dari data table tersebut dapat dilihat bahwa kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata pada tahun 2016 sebanyak 5.622.177 orang. Sedangkan tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata sebanyak 5.811.227 orang. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata sebanyak 7.215.914 orang dan selama 3 tahun terakhir obyek wisata yang paling banyak pengunjungnya adalah kawasan religi Ampel.

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

Tabel II. 123
Kunjungan Wisata Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018

Uraian	2016		2017		2018	
	Jumlah Kunjungan	Persentase (persen)	Jumlah Kunjungan	Persentase (persen)	Jumlah Kunjungan	Persentase (persen)
THP Kenjeran	747.950	13,30	511.227	8,79	490.353	6,79
Kenjeran Park	549.144	9,77	950.195	16,35	725.790	10,06
Taman Prestasi	41.925	0,75	55.156	0,95	98.085	1,36
Taman Hiburan Rakyat	18.725	0,33	11.115	0,19	9.696	0,13
Taman Remaja Surabaya	157.470	2,80	71.043	1,22	147.554	2,04
Monumen Tugu Pahlawan	246.400	4,38	264.501	4,55	324.290	4,49
Kawasan Wisata Religi Ampel	1.513.076	26,91	1.845.913	31,76	2.502.546	34,68
Masjid Al-Akbar	75.123	1,34	89.299	1,54	63.966	0,89
Masjid Cheng Ho	20.918	0,37	17.200	0,29	19.643	0,27
Kebun Binatang	1.157.643	20,59	1.220.669	21,01	1.996.738	27,67
Monumen Kapal Selam	333.122	5,93	219.654	3,78	265.783	3,68
Monumen Jalesveva Jayamahe	-	-	-	-		
Loka Jala Srana	48.247	0,86	35.222	0,61	36.816	0,51
Rumah wafat WR. Soepratman	804	0,01	1.244	0,02	6.425	0,09
Makam DR. Soetomo	5.101	0,09	18.755	0,32	8.029	0,11
Patung Djoko Dolog	5.399	0,10	1.170	0,02	1.438	0,02
Balai Pemuda	252.299	4,49	176.792	3,04	213.020	2,95
House Of Sampoerna	212.100	3,77	165.200	2,84	186.447	2,58
Ciputra Water Park	227.704	4,05	147.457	2,54	110.477	1,53
Museum Kesehatan	9.027	0,16	9.395	0,16	8.818	0,12
Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Obyek Wisata	5.622.177	100	5.811.227	100	7.215.914	100

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2019

2.1.3.3.4 Pertanian

Perkembangan pertanian di Surabaya dapat dilihat dari kontribusi sub kategori pertanian terhadap perekonomian Surabaya dan produktivitas serta hasil produksi pertanian di Surabaya. Sebagaimana Tabel II. 124 sampai dengan Tabel II. 125 berikut:

Tabel II. 124
Kontribusi Sub Kategori Pertanian terhadap PDRB Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2018

Uraian	2016	2017	2018
Total Nilai Tambah PDRB	452.345.242,07	495.043.304,5	547.769.497,0
Total Nilai Tambah Sub Kategori Pertanian	98.797,92	96.412,8	98.825,4
Kontribusi Sub Kategori Pertanian terhadap PDRB	0,02%	0,02%	0,02%

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2019

Kontribusi Sub Kategori pertanian di Surabaya terhadap PDRB kota Surabaya dari tahun ke tahun relatif kecil yaitu 0,02%, hal ini disebabkan karena semakin terbatasnya lahan pertanian di kawasan kota Surabaya serta mulai beralihnya mata pencaharian petani ke sektor yang lain yang lebih menjanjikan dari segi ekonomi. Hal ini perlu dilakukan upaya yang dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian dengan mengaplikasikan teknologi tepat guna, pemilihan jenis komoditi serta penyuluhan dan pendampingan yang intensif.

Tabel II. 125
Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar
Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018

No.	Uraian	2016	2017	2018
1.	Produksi Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ton)	11.799,80	10.568,57	10.130,64
2.	Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ha)	2.289	2.017	1.844
3.	Produktivitas (ton/ha)	5,16	5,24	5,44

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2019

Pada Tabel II. 125 disajikan data bahwa jumlah produksi padi/bahan pangan utama lainnya di kota Surabaya pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 4,1% dari tahun 2017 atau menurun dari 10.568,57 ton menjadi 10.130,64 ton. Penurunan jumlah produksi tersebut dikarenakan adanya penurunan luas areal penanaman. Namun, produktivitas mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi 5,44 ton/ha, hal ini dikarenakan adanya pembinaan terhadap petani melalui pelatihan dan pendampingan pemanfaatan teknologi tepat guna budidaya tanaman pangan, serta fasilitasi penyediaan sarana prasarana produksi.

Tabel II. 126
Produksi Hasil Pertanian Menurut Jenis Komoditi Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2018

No.	Uraian	2016	2017	2018
1.	Jumlah Produksi Padi (ton)	11.799,80	10.568,57	10.130,64
2.	Jumlah Produksi Jagung (ton)	519,2	503,05	400,49
3.	Jumlah Produksi Lombok (ton)	406,9	174,11	471
4.	Jumlah Produksi Sayur (ton)	757,2	773,60	352,24
5.	Jumlah Produksi Buah (ton)	4.466,57	26,80	3.182,5

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2019

Produksi hasil pertanian menurut jenis komoditi (padi, jagung, lombok, sayur dan buah) dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Untuk tahun 2018 komoditi yang mengalami peningkatan produksi yaitu lombok dan buah, sedangkan jagung, padi dan sayur mengalami penurunan. Produksi padi, jagung dan sayur mengalami penurunan antara lain disebabkan berkurangnya luas areal penanaman karena pengurukan lahan serta alih komoditi ke tanaman buah, dan alih fungsi tanah menjadi tambak. Sedangkan jumlah produksi lombok mengalami kenaikan karena petani beralih komoditi ke tanaman lombok, serta adanya target tanam dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk komoditi lombok. Selanjutnya, produksi buah meningkat dikarenakan alih komoditi dari tanaman padi ke tanaman buah. Data perkembangan produksi hasil pertanian menurut jenis komoditi disajikan sebagaimana Tabel II. 126.

2.1.3.3.5 Perdagangan

Perdagangan di Surabaya merupakan salah satu sektor/kategori yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian Kota Surabaya yaitu lebih dari 26persen, hal ini ditunjukkan dengan perkembangan jumlah pasar modern, pasar tradisional yang dikelola PD Pasar dan pembangunan pasar oleh pemerintah kota sebagaimana Tabel II. 127 sampai dengan Tabel II. 127.

Tabel II. 127
Jumlah Pasar Modern di Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018

No	Jenis Pasar Modern	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Supermarket	61	61	67
2	Minimarket	566	566	593
3	Departement Store	9	9	12
4	Mall/Plaza	33	33	34
Total		603	669	669

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Surabaya, 2019

Perkembangan pasar modern yang cukup pesat perlu adanya upaya untuk melakukan pengendalian agar tidak mematikan pasar tradisional dan usaha kecil. Kehadiran toko modern diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan daya saing UMK (usaha Mikro Kecil). Untuk menumbuhkan pusat-pusat kegiatan ekonomi, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan pembangunan pasar-pasar tradisional, serta berupaya meningkatkan peran PD. Pasar Surya untuk mengoptimalkan pengelolaan pasar-pasar tradisional yang dikelola.

Tabel II. 128
Pasar yang Dibangun Oleh Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2017 –2018

No	Tahun	
	2017	2018
1	Pasar Sememi/ Bandarejo (Lanjutan)	
2	Pasar Gunung Anyar (Lanjutan)	
3	Pasar Nambangan/ Kenjeran (Lanjutan)	Pasar Nambangan/ Kenjeran (Lanjutan)
4	Pasar Penjaringansari	
5	Pasar Keputih	
6	Pasar Dukuh Menanggal	
7	Pasar Jambangan	
8		Pasar Kapasari
9		Pasar Kutasari

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2019

Tabel II. 129
Jumlah Pasar PD Pasar Surya Tahun 2016 – 2018

Cabang	Tahun		
	2016	2017	2018
Selatan	17	17	17
Timur	22	22	22
Utara	28	28	28
Total	67	67	67

Sumber : Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah, 2019

Perkembangan sektor perdagangan selain ditunjukkan dengan perkembangan pasar modern, juga dapat dilihat dari pertumbuhan ijin usaha perdagangan sebagaimana pada Tabel II. 130 berikut.

Tabel II. 130
Jumlah Usaha Berdasarkan Ijin yang Berlaku Di Kota Surabaya
Tahun 2016 –2018

No	Jenis Perusahaan	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Perdagangan	12.849	12.791	13.887
2	Industri	275	330	185
T o t a l		14.975	13.124	13.121

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Surabaya, 2017

Dalam upaya mewujudkan Kota Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional yang berdaya saing global, dilakukan integrasi fasilitas pendukung perdagangan dan jasa (termasuk di dalamnya pelabuhan laut dan udara, pergudangan, kawasan industri, kawasan perdagangan, terminal dan stasiun) melalui implementasi manajemen logistik kota/city logistic.

Aktivitas perdagangan di kota surabaya dapat dilihat dari aktivitas ekspor impor yang tercermin dari Tabel II. 131.

Tabel II. 131
Ekspor Bersih Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Nilai Ekspor (US \$)	17.901.405.669	18.268.869.178	19.165.996.010
2	Nilai Impor (US \$)	15.632.269.630	16.956.900.232	19.612.835.745
3	Nilai Ekspor Bersih (US \$)	2.269.136.039	1.311.968.946	-446.839.735

Sumber: Bank Indonesia dan Bappeko Surabaya, 2019

Berdasarkan perkembangannya, neraca perdagangan Kota Surabaya pada tahun 2016 dan tahun 2017 tercatat surplus sebesar US \$2.269.136.039 dan US \$1.311.968.946 dan pada tahun 2018, defisit menjadi -446.839.735. Hal tersebut didorong oleh permintaan eksternal, yaitu sebesar US \$19.165.996.010 dan impor sebesar US \$19.612.835.745. Permintaan eksternal turut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi mitra dagang Kota Surabaya seperti China, Amerika Serikat dan Jepang. Dengan demikian, terjaganya kondisi ekonomi mitra dagang Kota Surabaya mempengaruhi terhadap net ekspor Kota Surabaya selama tahun 2018.

2.1.3.4 Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Manajemen Non Pelayanan Dasar

2.1.3.4.2 Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan

Perencanaan Pembangunan yang baik didukung dengan penerapan manajemen strategis melalui penjabaran rencana strategis menjadi rencana operasional yang dapat dilaksanakan oleh PD, yang dituangkan dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

RPJMD memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan program pembangunan untuk jangka waktu 5 tahunan. Dalam hal ini, rencana program pembangunan daerah merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Melalui RKPD, Renstra serta Renja PD, program-program pembangunan pada RPJMD dijabarkan secara operasional menjadi rencana kegiatan yang dilaksanakan di setiap tahun. Sebagai bentuk pengendalian dan evaluasi terhadap keberhasilan perencanaan pembangunan, maka kinerja program dan kegiatan diukur secara periodik untuk memastikan kegiatan yang direncanakan secara efektif menunjang pencapaian keberhasilan program.

Pada tahun 2012, Pemerintah Kota Surabaya telah menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 tahun 2012. Sedangkan di tahun 2016, disusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016, sehingga dengan ditetapkan dokumen perencanaan tersebut dalam peraturan daerah, Pemerintah Kota telah memiliki dokumen perencanaan yang memiliki kekuatan hukum. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 132
Dokumen Perencanaan Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2018

No.	Jenis Dokumen	2016	2017	2018
1	RPJPD	Ada	Ada	Ada
2	RPJMD	Ada	Ada	Ada
3	RKPD	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, 2017.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rencana capaian kinerja program pembangunan yang dijabarkan melalui program dan kegiatan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Program-program pembangunan yang dituangkan di

dalam dokumen RPJMD merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Implementasi kebijakan dilaksanakan melalui program pembangunan daerah. Pada tahun 2015 jumlah program pembangunan pada RKPD adalah sebanyak 60 program, tahun 2016 sebanyak 79 program dan pada tahun 2017 jumlah program pembangunan pada RKPD adalah sebanyak 102 program. Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan program-program pembangunan telah mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur.

Tabel II. 133
Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2018

No.	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan	79	102	102
2	Jumlah Program RKPD	79	102	102
3	Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100	100	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, 2019

Tabel II. 134
Tingkat Capaian Keberhasilan Program Pembangunan
Tahun 2016 – 2018

Tahun	2016	2017	2018
Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program	94,94%	91,18%	90,05%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, 2019

Salah satu unsur pembentuk tata kelola pemerintah adalah terkait tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan dapat ditunjukkan dari rata-rata penyerapan anggaran kegiatan, sehingga diperlukan upaya untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar lebih efektif dan efisien. Rata-rata penyerapan anggaran di tahun 2018 mencapai 90,19% sehingga dikatakan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dapat berjalan secara optimal.

Tabel II. 135
Rata – Rata Penyerapan anggaran Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2018

Uraian	2016	2017	2018
Rata-rata penyerapan anggaran kegiatan	89,29	87,29	90,19

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, diolah, 2019

2.1.3.4.3 Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah

2.1.3.4.3.a Tata Kelola Pemerintahan

Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik adalah evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja. Penilaian evaluasi SAKIP dapat dilihat pada Tabel II. 136.

Tabel II. 136
Penilaian Evaluasi SAKIP Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017

No.	Uraian	2016	2017	2018
1.	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	BB
2.	Nilai Evaluasi SAKIP	63,08	68,86	72,47

Sumber : Bagian Organisasi, 2019

Pada tahun 2016, telah dilaksanakan penilaian evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Surabaya dengan nilai 63,08 atau tingkat akuntabilitas kinerjanya B. Pada tahun 2017, penilaian evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Surabaya tahun 2017 meningkat yaitu 68,86 dengan tingkat akuntabilitas kinerja B. Sedangkan di tahun 2018, penilaian evaluasi SAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengalami peningkatan yaitu 72,47 dengan tingkat akuntabilitas kinerja BB. Peningkatan ini diupayakan melalui perbaikan indikator kinerja utama Walikota dan Kepala Perangkat Daerah, dan akan terus ditingkatkan melalui proses penyusunan rencana kerja, pelaksanaan serta evaluasi hasil rencana yang lebih baik dan terintegrasi.

Dari segi ketatalaksanaan, perangkat daerah menjalankan ketatalaksanaan dengan berpedoman pada *standard operational procedure* (SOP). Dalam hal ini, perangkat daerah perlu melakukan pemrosesan produk inti atau rancangan SOP sampai ditetapkan dalam Peraturan Walikota maupun surat keputusan Kepala SKPD.

Pada tahun 2018, Pemerintah Kota Surabaya menjalankan ketatalaksanaan pelaksanaan pemerintahan dengan berpedoman pada adanya *standard operational procedure* (SOP) pada setiap jenis pelayanan. Pada 329 jenis pelayanan, sebanyak 267 jenis pelayanan atau 81,16% telah memiliki *standard operational procedure* (SOP).

Tabel II. 137
Persentase Jenis Pelayanan yang Memiliki SOP Tahun 2016 –2017

No	Uraian	2016	2017	2018
1.	Jumlah jenis pelayanan	329	329	329
2.	Jumlah jenis pelayanan yang memiliki SOP	267	267	267

No	Uraian	2016	2017	2018
3.	Persentase jenis pelayanan yang memiliki SOP	81,16%	81,16%	81,16%

Sumber : Bagian Organisasi, 2019

Pemerintah Kota Surabaya juga berkomitmen untuk terus mensinkronkan produk hukum daerah dengan peraturan perundangan di atasnya. Hal ini ditunjukkan pada Tabel II. 138.

Tabel II. 138
Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan Tahun 2016 – 2018

No.	Uraian	2016	2017	2018
1.	Jumlah rancangan produk hukum	73	79	89
2.	Jumlah rancangan produk hukum yang diselesaikan	73	79	89
3.	Persentase rancangan produk hukum yang diselesaikan	100%	100%	100%

Sumber : Bagian Hukum, 2019

2.1.3.4.3.b Pelayanan Publik

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Hasil SKM menjadi salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kota Surabaya disajikan pada Tabel II. 139 berikut.

Tabel II. 139
Survey Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018

Uraian	2016	2017	2018
Survey Kepuasan Masyarakat	Ada	Ada	Ada
Rata-rata nilai SKM Pelayanan Pemerintah Kota Surabaya	82,67	76,30	83,74

Sumber: Bagian Organisasi, 2019

Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat pada tahun 2018 telah mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap

Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2018 dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, UPTSA Surabaya Pusat, UPTSA Surabaya Timur, RSUD Bhakti Dharma Husada, RSUD Dr. M. Soewandhie, Laboratorium Kesehatan Daerah, 63 puskesmas, 31 kecamatan, dan 154 kelurahan di Kota Surabaya. Dari survey tersebut diperoleh hasil untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masuk kategori Baik, UPTSA Surabaya Pusat dan UPTSA Surabaya Timur masuk kategori Baik, RSUD Bhakti Dharma Husada, RSUD Dr. M. Soewandhie, Laboratorium Kesehatan Daerah, dan 61 Puskesmas masuk kategori Baik, serta 2 Puskesmas masuk kategori Sangat Baik. Penilaian untuk 31 kecamatan, dengan hasil 15 kecamatan masuk kategori Baik dan 3 kecamatan masuk kategori Sangat Baik, sedangkan 13 kecamatan masuk kategori cukup. Sedangkan 14 kelurahan masuk kategori Sangat Baik dan 77 kelurahan masuk kategori Baik, sisanya masuk dalam kategori Cukup. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masih banyak Unit Pelayanan yang belum mencapai kategori Sangat Baik, dan kondisi tersebut secara umum menurun dari tahun 2017 di mana sebanyak 118 Unit Pelayanan masuk dalam Kategori Sangat Baik.

2.1.3.4.3.c Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya

Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik kerjasama antar pemerintah daerah maupun kerjasama dengan pihak luar negeri merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang dilaksanakan guna mengembangkan dan meningkatkan kerjasama, antara lain dengan perluasan jaringan kerjasama Kota Surabaya dengan mitra kerjasama di dalam dan di luar negeri serta peningkatan kualitas upaya tindak lanjut kerjasama guna menciptakan integrasi antar daerah dalam menyelesaikan permasalahan lintas sektor.

Pada tahun 2018 terdapat 102 MoU kerjasama antar daerah dan pihak ketiga. Dari jumlah tersebut sebanyak 72 MoU atau 70,59% memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Surabaya. Untuk kerjasama luar negeri, terdapat 15 MoU dan 12 MoU diantaranya memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Surabaya. Dari keseluruhan 117 MoU kerjasama antar daerah, pihak ketiga, dan luar negeri, 65 MoU diantaranya telah dievaluasi. Pada tahun 2018, dari 4 MoU kerjasama yang memuat sektor perdagangan, 3 di antaranya terealisasi tindak lanjut, atau sebesar 75%.

Tabel II. 140
MoU Kerjasama (Non Perdagangan) Antar Daerah dan Pihak Ketiga
Tahun 2018

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti tahun 2018	72
2.	Jumlah bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga keseluruhan tahun 2018	102
3.	Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti tahun 2018	70,59%

Sumber : Bagian Administrasi Kerjasama, 2019

Tabel II. 141
MoU Kerjasama (non perdagangan) Luar Negeri Tahun 2018

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah bidang MoU kerjasama (non perdagangan) luar negeri yang ditindaklanjuti tahun 2018	12
2.	Jumlah bidang MoU kerjasama (non perdagangan) luar negeri keseluruhan tahun 2018	15
3.	Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti tahun 2018	80%

Sumber : Bagian Administrasi Kerjasama, 2019

2.1.3.4.3.d Pengawasan

Selain peningkatan kapasitas dan kompetensi, diperlukan unsur pengawasan internal guna mendisiplinkan aparatur. Sanksi disiplin aparatur sebagaimana ditunjukkan pada Tabel II. 142 mengalami fluktuasi. Oleh karena itu diperlukan optimalisasi pengawasan internal agar mengurangi sanksi.

Tabel II. 142
Rekapitulasi Sanksi Disiplin Terhadap Aparatur
Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2018

JENIS HUKUMAN DISIPLIN		2016	2017	2018
Hukuman Disiplin Ringan				
1	Teguran Lisan	-	1	2
2	Teguran Tertulis	2	10	1
3	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	2	3	2
	Jumlah Hukuman Disiplin Ringan	4	14	5

JENIS HUKUMAN DISIPLIN		2016	2017	2018
Hukuman Disiplin Sedang				
1	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun	2	1	1
2	Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun	1	0	2
3	Penurunan Pangkat Pada Pangkat Yang Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun	1	3	0
Jumlah Hukuman Disiplin Sedang		4	4	3
Hukuman Disiplin Berat				
1	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun	7	9	4
2	Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan setingkat Lebih Rendah	0	1	1
3	Pembebasan Dari Jabatan	8	4	2
4	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil	5	3	3
5	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil	1	1	0
6	Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai CPNS	-	1	0
Jumlah Hukuman Disiplin Berat		21	19	10
Hukuman Disiplin				
1	Pemberhentian Sementara (PP. No. 11 Tahun 2017)	3	2	1
2	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS	0	0	3
3	Pencabutan Pemberhentian Sementara	0	0	0
4	Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri / Pensiun Dini / Mengundurkan diri	0	0	0
5	Pemberhentian Dengan Hormat Karena Menjadi Anggota Parpol	0	0	0
6	Rehabilitasi	0	0	0
Jumlah		3	2	4
TOTAL HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN		32	39	22

Sumber : Badan Kepegawaian dan Diklat, 2019

2.1.3.5 Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Manajemen Non Pelayanan Dasar

2.1.3.5.2 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur, salah satunya melalui pelaksanaan diklat. Tabel II. 143 menunjukkan bahwa masih terdapat pejabat struktural yang belum mengikuti diklat struktural sehingga diperlukan penyelenggaraan diklat secara komprehensif.

Tabel II. 143
Persentase Pejabat Struktural yang telah Mengikuti Diklat Struktural
Tahun 2016 – 2018

No.	Uraian	2016	2017	2018
1.	Jumlah pejabat struktural	1.638	1.577	1.577
2.	Jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural	1.135	1.134	1.255
3.	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural	69,29%	71,91%	78,24%

Sumber : Badan Kepegawaian dan Diklat, 2019

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi dapat diukur dari tingkat produktivitas per kategori lapangan usaha. Selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

Tabel II. 144
Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Surabaya
Tahun 2014 – 2018

Tahun	Konsumsi Rumah Tangga perkapita				Total	
	Makanan	persen	Non Makanan	persen		
2014	511.324	36,82	877.523	63,18	1.388.848	100
2015	581.474	33,75	1.141.526	66,25	1.722.999	100
2016	727.886	39,94	1.094.588	60,06	1.822.474	100
2017	758.750	39,88	1.143.770	60,12	1.902.520	100
2018	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2018

Konsumsi Rumah tangga setiap tahunnya menunjukkan peningkatan. Jika diuraikan berdasarkan kelompok pengeluaran, persentase terbesar pada kelompok non makanan. Semakin besarnya proporsi konsumsi non makanan dibanding konsumsi makanan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya meningkat. Produktivitas ekonomi Kota Surabaya yang tercermin sebagaimanaberikut:

Tabel II. 145
Produktivitas Ekonomi di Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Angkatan Kerja (orang)	1.465.502	1.468.094	-	1.495.837	1.520.041
PDRB (Juta Rp)	365.350.944,40	406.223.496,20	451.486.791,00	503.824.868,16	547.769.496,96
Produktivitas (Juta per orang)	249,30	276,70	-	336,81	360,36

Sumber: BPS Kota Surabaya diolah, 2019

Produktivitas ekonomi yang merupakan cerminan dari PDRB Kota Surabaya maka untuk menunjang pembangunan ekonomi. Dari beberapa sub kategori PDRB yang menjadi salah satu prioritas antara lain yang pendukung perdagangan yaitu kategori transportasi dan pergudangan.

Tabel II. 146
Perkembangan PDRB Kategori Transportasi dan Pergudangan

Uraian		2014	2015	2016	2017	2018
Nilai PDRB ADHB						
Transportasi dan Pergudangan		19.016.375,3	21.370.858,8	23.617.508,7	26.215.295,8	29.211.518,4
1	Angkutan Rel	151.459,0	194.327,6	233.756,5	256.320,1	287.986,4
2	Angkutan Darat	4.278.765,5	4.829.863,8	5.460.711,5	6.290.095,9	6.714.990,6
3	Angkutan Laut	2.942.710,4	3.343.306,0	3.667.317,9	3.968.894,3	4.613.688,2
4	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	76.754,0	79.694,3	85.644,6	90.600,4	100.298,9
5	Angkutan Udara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	11.566.686,5	12.923.667,0	14.170.078,2	15.609.385,1	17.494.554,4
Laju Pertumbuhan						
Transportasi dan Pergudangan		8,46	6,42	4,89	6,87	8,86
1	Angkutan Rel	15,15	10,49	9,60	8,75	7,58
2	Angkutan Darat	7,88	6,12	8,06	9,79	8,37
3	Angkutan Laut	11,87	4,51	4,12	5,77	11,31

Uraian		2014	2015	2016	2017	2018
4	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,09	-1,36	1,27	2,14	0,05
5	Angkutan Udara	-	-	-	-	-
6	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	7,85	7,07	3,73	5,89	8,52

Sumber : BPS Kota Surabaya, 2019

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.1.4.2.2 Penataan Ruang

Pada tahun 2016, sebagian besar luasan wilayah budidaya di Kota Surabaya adalah berupa wilayah produktif yaitu sebesar 93,27 persen. Wilayah produktif di Kota Surabaya antara lain berupa kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum, komersial, industri dan militer.

Tabel II. 147
Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Surabaya
Tahun 2016 –2018

No.	Uraian	2016	2017	2018
1	Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40
2	Luas Wilayah Produktif (ha)	23.665,80	23.665,80	23.665,80
3	Persentase luas wilayah produktif (persen)	93,27	93,27	93,27

Sumber: RTRW Kota Surabaya, 2019

Tabel II. 148
Rasio Luas Wilayah Industri Kota Surabaya
Tahun 2016 –2018

No.	Uraian	2016	2017	2018
1	Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40
2	Luas Wilayah Industri (ha)	2.506,40	2.506,40	2.506,40
3	Rasio luas wilayah industri (persen)	9,88	9,88	9,88

Sumber: RTRW Kota Surabaya, 2019

Berdasarkan luasannya, wilayah industri di Kota Surabaya terbagi menjadi kawasan industri dan zona industri. Kawasan industri berlokasi di kawasan Rungkut dan kawasan

Margomulyo. Sedangkan zona industri berlokasi tersebar di beberapa tempat antara lain kawasan Kalirungkut kawasan Karangpilang, kawasan Tanjungsari dan kawasan Kalianak. Luas wilayah industri pada tahun 2016 adalah sebesar 9,88 persen dari keseluruhan Kota Surabaya.

Tabel II. 149
Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kota Surabaya Tahun 2016 –2018

No.	Uraian	2016	2017	2018
1	Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40
2	Luas Wilayah Perkotaan (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40
3	Rasio luas wilayah perkotaan (persen)	100	100	100

Sumber: Review RTRW Kota Surabaya, 2019

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Seluruh kawasan budidaya yang ada di Kota Surabaya adalah merupakan kawasan perkotaan karena kegiatan utama pada kawasan budidaya di Kota Surabaya adalah bukan pertanian. Untuk itu rasio luas wilayah perkotaan adalah sebesar 100 persen dari keseluruhan kawasan budidaya di Kota Surabaya.

2.1.4.2.3 Perhubungan

Dari tahun ke tahun, jumlah kendaraan di Kota Surabaya selalu mengalami peningkatan cukup tajam. Data jumlah kendaraan hanya bisa didapatkan dari perhitungan jumlah kendaraan (kepemilikan) oleh BPKAD Provinsi Jatim (melalui perhitungan pajak kendaraan bermotor di Kota Surabaya), sehingga Kota/Kabupaten tidak mempunyai kewenangan akan hal tersebut. Namun, melihat perkembangan jumlah kendaraan di Kota Surabaya yang semakin tahun semakin meningkat, diperlukan upaya untuk melakukan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi melalui *Traffic Demand Management* yang diwujudkan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas-ruas jalan.

Tabel II. 150
Perbandingan Panjang Jalan Dengan jumlah Kendaraan di Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018

No.	Uraian	2016	2017	2018
1	Panjang Jalan (m)	1.686.380,5	1.689.289,1	1.678.857,7
2	Jumlah Kendaraan	-	-	-

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, 2018

2.1.4.2.4 Drainase

Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan pengembangan dan optimalisasi kinerja sistem drainase karena kondisi geografis Kota Surabaya yang relatif datar dan berada di pesisir pantai sehingga mengakibatkan sistem drainase kota tidak hanya dipengaruhi oleh hujan, namun juga oleh pasang surut air laut.

Lama rata-rata terjadinya genangan Kota Surabaya mengalami penurunan. Pada tahun 2016, capaian lama rata-rata terjadinya genangan sebesar 52,98 menit dan pada tahun 2017, rata-rata lama terjadinya genangan di Kota Surabaya sebesar 25,03 menit. Sedangkan pada tahun 2018, rata-rata lama terjadinya genangan di Kota Surabaya sebesar 9,56 menit sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel II. 151
Rata-rata Lama Terjadinya Genangan Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2018

Uraian	2016	2017	2018
Rata-rata Lama Terjadinya Genangan (menit)	52,98	25,03	9,56

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, 2018

Rata-rata tinggi genangan Kota Surabaya mengalami juga mengalami penurunan. Pada tahun 2016, rata-rata tinggi genangan sebesar 16,27 cm. Pada tahun 2017, rata-rata tinggi genangan Kota Surabaya sebesar 13,37 cm. Sedangkan pada tahun 2018, rata-rata tinggi genangan Kota Surabaya sebesar 2,66 cm sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel II. 152
Rata-rata Tinggi Genangan Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2018

Uraian	2016	2017	2018
Rata-rata Tinggi Genangan (cm)	16,27	13,37	2,66

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, 2018

Berdasarkan Tabel II. 153 dapat terlihat bahwa luasan wilayah genangan Kota Surabaya mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 sebesar 1.257 ha dan pada tahun 2017, luasan wilayah genangan Kota Surabaya sebesar 765,12 ha. Sedangkan pada tahun 2018, luasan wilayah genangan Kota Surabaya sebesar 159,3 ha. sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel II. 153
Luas Wilayah Genangan di Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018

Uraian	2016	2017	2018
Luas Wilayah Genangan (ha)	1.257	765,12	159,3

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, 2018

Pemerintah Kota Surabaya dalam mengendalikan banjir dan genangan telah melakukan pembangunan sarana prasarana serta normalisasi saluran pematusan di Kota Surabaya antara lain membangun boezem-boezem kurang lebih seluas 124,78 hektar, membangun dan meningkatkan kapasitas pompa sebanyak 56 rumah pompa, serta mengembangkan sistem pemantauan ketinggian muka air pada muara-muara saluran yang menuju ke laut (*smart water level*) sehingga pada ketinggian tertentu, pompa harus segera dioperasikan untuk mencegah timbulnya genangan di wilayah tersebut (Gambar II.10). Hingga sekarang, *smart water level* telah terpasang pada 7 (tujuh) rumah pompa, yaitu pada Pompa Boezem Kalidami, Pompa Boezem Morokembangan, Pompa Darmokali, Pompa Balong II, Pompa Gadukan, Pompa Dinoyo dan Pompa Tambak Wedi. Namun masih terjadi genangan di beberapa wilayah di Kota Surabaya. Dalam upaya menurunkan luas wilayah genangan ini, Pemerintah Kota Surabaya telah dan akan terus melakukan upaya peningkatan sarana prasarana pematusan antara lain melalui pembangunan dan normalisasi saluran, peningkatan kapasitas pompa, pembangunan rumah pompa baru, boezem, tanggul laut, dan pemasangan *smart water level* di rumah pompa lainnya.



Perangkat



Sensor dan Tiang Penyangga



Display Matrix

Gambar II. 16
Perangkat *Smart Water Level*

2.1.4.2.5 Air Bersih

Seiring meningkatnya jumlah penduduk, perkembangan jumlah penduduk yang terlayani air bersih juga mengalami peningkatan. Rincian peningkatan prosentase cakupan layanan air bersih seperti pada Tabel II. 154 di bawah ini.

Tabel II. 154
Persentase Cakupan Layanan Air Bersih Kota Surabaya
Tahun 2016 –2018

No.	Uraian	2016	2017	2018
1	Total Jumlah Penduduk Terlayani Air Bersih	3.127.782	3.137.496	3.306.059
2	Jumlah Penduduk*	3.016.368	3.074.883	3.094.732
3	Cakupan Layanan Air Bersih (%)	103,69	102,04	106,82

Sumber: PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, 2019

Untuk peningkatan pelayanan air bersih perkotaan, Pemerintah Kota Surabaya dan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya telah melakukan upaya pembangunan jaringan pipa tersier, pemasangan sambungan rumah, master meter, pembangunan reservoir, rehabilitasi jaringan pipa distribusi dan penggantian meter air pelanggan. Cakupan layanan air bersih di Kota Surabaya sebesar hingga tahun 2016 telah mencapai 103,69 persen. Begitupun pula di tahun 2017 dan tahun 2018, dimana capaiannya telah mencapai diatas 100%. Walaupun telah mencapai target diatas 100 persen, namun pelayanan tetap terus dioptimalkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

2.1.4.2.6 Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata, Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan penyebaran dan layanan jaringan utilitas kota diantaranya dengan terus meningkatkan sistem jaringan dan kualitas PJU secara merata di seluruh wilayah Kota Surabaya. Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang pada tahun 2017 sebanyak 5.380 titik, sedangkan pada tahun 2018, Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang mencapai 5.372 titik dan dengan demikian sampai dengan tahun 2018 jumlah titik PJU sebanyak 95.449 titik dan seluruhnya dalam kondisi baik.

Tabel II. 155
Penerangan Jalan Umum Tahun 2016 – 2018

Tahun	2016	2017	2018
Jumlah PJU terpasang (Titik)	5.293	5.380	5.372

Sumber : Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, 2019

Setiap tahun Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan pemasangan PJU di seluruh Kota Surabaya secara merata. Selain melakukan pemasangan baru PJU tersebut, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan kegiatan pelimpahan rekening PJU dari warga. Dengan semakin banyaknya PJU yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya, maka

beban tagihan rekening listrik PJU yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kota Surabaya semakin besar. Oleh karena itu salah satu upaya yang terus dilakukan adalah dengan melakukan pemasangan PJU yang hemat energi sehingga semakin banyaknya PJU hemat energi yang terpasang di Kota Surabaya maka beban tagihan rekening listrik PJU yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kota Surabaya bisa semakin berkurang dan sekaligus dapat mendukung upaya penghematan / konservasi energi kota. Hal tersebut terlihat bahwa sampai dengan tahun 2018, jumlah PJU hemat energi sebanyak 15.365 titik dari 95.449 titik PJU yang terpasang.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.1.4.3.2 Keamanan dan Ketertiban

Untuk meningkatkan iklim investasi, Pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan pengendalian terhadap demonstrasi atau unjuk rasa. Adapun jumlah kejadian unjuk rasa di Surabaya pada Tahun 2015-2017 dapat dilihat pada Tabel II. 156 berikut.

Tabel II. 156
Jumlah Demonstrasi Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Bidang Politik	48	35	67
2	Ekonomi	126	84	64
3	Sosial Budaya	165	107	105
4	Jumlah unjuk rasa	339	226	236

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2019

Jumlah unjuk rasa di kota Surabaya dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan, namun di 2018 mengalami sedikit kenaikan. Hal ini menunjukkan kondisi keamanan dan ketertiban di Surabaya masih tetap kondusif dan tidak menimbulkan kerusuhan, hal ini dikarenakan adanya pendekatan persuasif dan antisipasi dini yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan instansi terkait serta masih tingginya kesadaran warga kota Surabaya akan pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban kota sebagai modal utama dalam meningkatkan kegiatan perekonomian di Kota Surabaya.

Seperti disajikan pada Tabel II. 157 dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif, Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk menerbitkan peraturan yang mendukung iklim usaha Kota Surabaya, antara lain perda terkait perijinan, lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait ketenagakerjaan. Pada tahun 2016, perda yang mendukung iklim usaha adalah Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah (IPT). Pada

tahun 2018, perda yang mendukung iklim usaha adalah Perda nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya.

Tabel II. 157
Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2018

No.	Uraian	2016	2017	2018
1.	Jumlah Perda Terkait Perijinan	1	0	0
2.	Jumlah Perda Terkait Lalu Lintas Barang Dan Jasa	0	0	1
3.	Jumlah Perda Terkait Ketenagakerjaan	0	0	0

Sumber :Bagian Hukum, 2019

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.1.4.4.2 Ketenagakerjaan

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam rangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja yang tercermin dari jumlah lulusan sarjana. Data terkait rasio lulusan D4/S1/S2/S3 Kota Surabaya sebagaimana Tabel II. 158.

Tabel II. 158
Rasio Lulusan D4/S1/S2/S3 Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah lulusan D4/S1	325.755	328.211	303.549
2	Jumlah lulusan S2	21.579	22.091	21.010
3	Jumlah lulusan S3	1.279	1.315	1.353
4	Jumlah lulusan D4/S1/S2/S3	348.613	351.617	325.912
5	Jumlah penduduk	3.016.368	3.074.883	3.094.732
6	Rasio lulusan D4/S1/S2/S3	0,116	0,114	0,105

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019

2.1.4.4.3 Tingkat ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun dengan jumlah penduduk yang belum/tidak produktif, yaitu penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 65 tahun ke atas. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung

penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, demikian pula sebaliknya.

Tabel II. 159
Rasio Ketergantungan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018

No	Uraian	2016	2017	2018
1	Jumlah penduduk usia <15 tahun	717.636	713.916	672.334
2	Jumlah penduduk usia >64 tahun	220.340	232.830	216.158
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif	937.976	946.746	888.492
4	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	2.369.324	2.395.881	2.206.240
6	Rasio ketergantungan	0,396	0,395	0,402

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019

Dari data rasio ketergantungan pada tabel di atas, komposisi penduduk Surabaya pada tahun 2018 antara lain kelompok usia non produktif usia (15< th) sebesar 672.334 orang (21,72%), dan usia (>64 th) sebesar 232.830 orang (6,98%), sedangkan jumlah penduduk kelompok usia produktif (15-64th) sebesar 2.206.240 orang (71,29%). Sehingga rasio ketergantungan sebesar 0,402 yaitu setiap 100 orang yang berusia kerja/produktif mempunyai tanggungan sebanyak 40 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Berdasarkan rekapitulasi hasil monitoring pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2018 dan realisasi tahun kedua RPJMD 2016-2021 yang bersumber dari hasil monitoring pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2018 dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah serta dari laporan pertanggungjawaban APBD Akhir Tahun Anggaran 2018, maka rekapitulasi hasil telaah evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2018 menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun 2018, secara umum disajikan pada Tabel II.160 berikut.

Tabel II. 160
Rekapitulasi Evaluasi Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan dan Kinerja Hasil Program Tahun 2018

No.	Jenis Pencapaian Indikator Kinerja	Program (indikator kinerja hasil)		Kegiatan (indikator kinerja keluaran)	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Realisasi indikator kinerja yang tidak memenuhi	24	10,08%	196	16,23%

	target yang direncanakan (capaian kurang dari 100%)				
2	Realisasi indikator kinerja yang telah memenuhi target yang direncanakan (capaian 100% - 110%)	99	41,59%	629	52,11%
3	Realisasi indikator kinerja yang melebihi target yang direncanakan (capaian lebih dari 110%)	115	48,31%	382	31,64%
Total		238		1207	

Adapun capaian kinerja pembangunan Kota Surabaya berdasarkan urusan pemerintahan daerah program dan kegiatan yang dilaksanakansampai dengan triwulan Itahun 2019, dijelaskan pada Tabel II.161 tentang Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2019 sebagaimana berikut.

Tabel II.161 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2019

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16							
		1	Urusan Pemerintahan																								
		1.1	Wajib																								
		1.1.1	Pelayanan Dasar																								
		1.1.1. 01	Pendidikan																								
1	Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal	1.1.1. 01.01	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan		5,296,023,077		849,119,340		810,589,704		74,933,913		0		0		0		74,933,913		9.24%		849,119,340		16.03%		
				Persentase PAUD yang ditingkatkan sarana prasarananya	79.21%		97.41 %		49.04%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%			97.41%		122.98%			
				Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SD/MI	100.00%		100.00 %		100.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%			100.00%		100.00%			
				Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SMP/MTs	100.00%		102.57 %		100.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%			102.57%		102.57%			
				Persentase lembaga pendidikan SD yang sarana prasarananya sesuai standar	75.77%		89.44 %		72.83%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%			90.03%		118.82%			
				Persentase lembaga pendidikan SMP yang sarana prasarananya sesuai standar	81.18%		82.66 %		78.03%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%			82.66%		101.82%			
				Persentase fasilitas pendidikan dalam kondisi baik	100.00%		66.58 %		77.88%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%			66.58%		66.58%			
		1.1.1. 01.01. 0001	Pembangunan / Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan	Jumlah Fasilitas/Gedung Pendidikan yang dibangun dan direhabilitasi				94 bangunan	203,543,791		8	9,683,300	0	0	0	0	0	8	9,683,300	8.51%	4.76%				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1.01.01.0002	Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Gedung Pendidikan	Jumlah dokumen perencanaan perencanaan Fasilitas/Gedung Pendidikan yang disusun					40 dokumen	2,051,174	0	275	0	0	0	0	0	0	0	275	0.00%	0.01%					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1.01.01.0003	Fasilitasi Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Dasar Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar sederajat yang mendapatkan biaya pendidikan daerah selama 12 bulan					698 lembaga	185,993,461	695	30,513,651	0	0	0	0	0	0	695	30,513,651	99.57%	16.41%					Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.01.0004	Fasilitasi Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Menengah Sederajat	Jumlah sekolah menengah sederajat yang mendapatkan biaya pendidikan daerah selama 12 bulan					317 lembaga	93,747,778	300	17,533,704	0	0	0	0	0	0	300	17,533,704	94.64%	18.70%					Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.01.0005	Fasilitasi Penerimaan Peserta Didik Baru	Jumlah kegiatan fasilitasi penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan					2 kali	855.395	0	5.2	0	0	0	0	0	0	0	5.2	0.00%	0.61%					Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.01.0006	Peningkatan Perlengkapan Sekolah Dasar	Jumlah SD yang menerima peningkatan perlengkapan sekolah dasar					301 lembaga	18,474,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.01.0007	Peningkatan Perlengkapan Sekolah Menengah	Jumlah SMP yang menerima peningkatan perlengkapan sekolah menengah					62 lembaga	10,734,574	0	14.3	0	0	0	0	0	0	0	14.3	0.00%	0.13%					Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.01.0008	Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD	Jumlah APE yang diberikan					447 paket	1,344,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.01.0009	Penunjang Operasional Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah	Jumlah sekolah yang mendapatkan fasilitas operasional selama 12 bulan					363 lembaga	86,077,559	365	14,628,111	0	0	0	0	0	0	365	14,628,111	100.55%	16.99%					Dinas Pendidikan

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urutan/ Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7	8		9		10		11	12=8+9+10+11		13=12/7*100	14=6+12		15=14/5*100	16				
		1.1.1.01.01.0010	Penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik	Jumlah lembaga yang mendapatkan penyediaan bantuan operasional penyelenggaraa n PAUD yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik selama 12 Bulan					2 lembaga	111.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%				Dinas Pendidikan			
		1.1.1.01.01.0012	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD negeri	Jumlah lembaga sekolah Dasar Negeri yang mendapatkan biaya Operasional Sekolah (BOS) selama 12 bulan					301 lembaga	123,406,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%				Dinas Pendidikan			
		1.1.1.01.01.0013	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMP Negeri	Jumlah lembaga sekolah Menengah Negeri yang mendapatkan biaya Operasional Sekolah (BOS) selama 12 bulan					62 lembaga	58,075,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%				Dinas Pendidikan			
		1.1.1.01.01.0014	Pemeliharaan sistem PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)	Jumlah sistem yang dipelihara					1 sistem	675.555	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%				Dinas Pendidikan			
		1.1.1.01.01.0015	Pemeliharaan Fasilitas Gedung Pendidikan	Jumlah Gedung/Fasilitas Pendidikan yang dipelihara					100 bangunan	21,605,638	15	2,555,371	0	0	0	0	0	0	15	2,555,371	15.00%	11.83%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			
		1.1.1.01.01.0016	Penyediaan Sarana dan Rehabilitasi Gedung Pendidikan Sekolah Dasar yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	Jumlah lembaga penerima sarana dan rehabilitasi gedung pendidikan sekolah dasar yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan					6 lembaga	1,728,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%				Dinas Pendidikan			

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)										
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	
			1.1.1.01.01.0017	Penyediaan Sarana Sekolah Menengah yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	Jumlah lembaga penerima sarana sekolah menengah yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan			8 lembaga	2,163,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Pendidikan	
			1.1.1.01.02	Program Penerapan Kurikulum			185,262,935		26,556,046		28,499,591		2,939,358		0		0		0		2,939,358		10.31%		26,556,046		14.33%	
				Persentase PAUD yang menerapkan kurikulum sesuai ketentuan	86.60%		100.00 %		68.69%	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		115.47%				
				Persentase lembaga pendidikan SD yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	86.59%		100.00 %		83.23%	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		115.49%				
				Persentase lembaga pendidikan SMP yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	86.59%		100.00 %		83.23%	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		115.49%				
			1.1.1.01.02.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan inklusi, Pendidikan Layanan Khusus Sekolah Dasar dan unit layanan disabilitas	Jumlah Pendidikan inklusi, Pendidikan Layanan Khusus Sekolah Dasar dan unit layanan disabilitas yang diselenggarakan dan dibina selama 12 bulan			73 lembaga	14,361,551	55	965.688	0	0	0	0	0	0	55	965.688	75.34%	6.72%					Dinas Pendidikan		
			1.1.1.01.02.0002	Fasilitasi Penyelenggaraan Sekolah Menengah Inklusi dan Sekolah Terbuka	Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah inklusi dan Sekolah Terbuka yang diselenggarakan dan dibina selama 12 bulan			37 lembaga	8,093,235	37	1,249,571	0	0	0	0	0	0	37	1,249,571	100.00%	15.44%					Dinas Pendidikan		

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1. 01.02. 0003	Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Nasional Sekolah Menengah	Jumlah pelaksanaan Ujian Nasional Sekolah Menengah					1 kali	835.997	0	375.552	0	0	0	0	0	0	0	375.552	0.00%	44.92%					Dinas Pendidikan
		1.1.1. 01.02. 0004	Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Sekolah Dasar	Jumlah pelaksanaan Ujian Sekolah Dasar					2 kali	2,616,756	1	46.8	0	0	0	0	0	0	1	46.8	50.00%	1.79%					Dinas Pendidikan
		1.1.1. 01.02. 0005	Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar	Jumlah lembaga yang mendapatkan Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar					410 lembaga	524.803	62	0	0	0	0	0	0	0	62	0	15.12%	0.00%					Dinas Pendidikan
		1.1.1. 01.02. 0006	Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Menengah	Jumlah lembaga yang mendapatkan peningkatan dan pemetaan mutu kelembagaan sekolah menengah					297 lembaga	381.035	0	22.938	0	0	0	0	0	0	0	22.938	0.00%	6.02%					Dinas Pendidikan
		1.1.1. 01.02. 0007	Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar PAUD	Jumlah lembaga yang mendapatkan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar PAUD					893 lembaga	454.818	0	17.5	0	0	0	0	0	0	0	17.5	0.00%	3.85%					Dinas Pendidikan
		1.1.1. 01.02. 0008	Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Dasar	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Dasar					729 lembaga	761.219	0	261.308	0	0	0	0	0	0	0	261.308	0.00%	34.33%					Dinas Pendidikan
		1.1.1. 01.02. 0009	Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah					286 lembaga	470.178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Pendidikan
		1.1.1. 01.03	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			888,580,31 1		134,027,49 0		148,311,51 5		64.747		0		0		0		64.747		0.04%		134,027,49 0		15.08%	
				Persentase guru PAUD yang kompeten	76.00%		100.00 %		69.09%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		131.58%		

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16		
				Persentase guru SD yang memiliki sertifikasi	97.92%		44.13 %		82.81%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		44.33%		45.28%				
				Persentase guru SMP yang memiliki sertifikasi	94.78%		45.95 %		85.93%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		47.82%		50.46%				
				Persentase guru SMP yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar	100.00%		100.00 %		100.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		100.00%				
				Persentase guru SD yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik yang dibuktikan melalui ijazah S1 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau AKTA 4	100.00%		100.00 %		100.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		100.00%				
				Persentase tenaga kependidikan PAUD yang kompeten	82.23%		100.00 %		67.93%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		121.61%				
				Persentase tenaga kependidikan SD yang kompeten	63.05%		100.00 %		54.71%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		158.60%				
				Persentase tenaga kependidikan SMP yang kompeten	70.07%		100.00 %		60.95%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		142.71%				
		1.1.1.01.03.0001	Perencanaan Penempatan serta Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah dokumen Perencanaan Penempatan serta Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan					2 dokumen	45,771,011	0	19.2	0	0	0	0	0	0	19.2	0.00%	0.04%					Dinas Pendidikan			
		1.1.1.01.03.0002	Fasilitasi Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan					12 kali	53,167,230	0	19.2	0	0	0	0	0	0	19.2	0.00%	0.04%					Dinas Pendidikan			

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1. 01.03. 0003	Pengawasan serta Penilaian Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah lembaga yang mendapatkan pengawasan serta penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan					957 lembaga	6,871,740	317	26.347	0	0	0	0	0	0	317	26.347	33.12%	0.38%					Dinas Pendidikan
		1.1.1. 01.03. 0004	Peningkatan Mutu Pendidik PAUD	Jumlah pendidik PAUD yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					12010 orang	41,677,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Pendidikan
		1.1.1. 01.03. 0006	Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah kegiatan Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan					1 kali	823.809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Pendidikan
		1.1.1. 01.04	Program Peningkatan Prestasi			109,900,11 7		25,199,851		32,758,048		6,119,908		0		0		0		6,119,908		18.68%		25,199,851		22.93%	
				Persentase prestasi SD pada event tingkat provinsi/nasio nal/internasio nal	71.88%		95.36 %		62.50%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		95.36%		132.66%		
				Persentase prestasi SMP pada event tingkat provinsi/nasio nal/internasio nal	70.59%		98.93 %		62.50%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		98.93%		140.15%		
				Persentase PAUD beprestasi	3.36%		5.20 %		2.25%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		5.75%		171.07%		
		1.1.1. 01.04. 0001	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Lembaga PAUD yang mendapatkan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini					1339 lembaga	473.512	330	53.158	0	0	0	0	0	0	330	53.158	24.65%	11.23%					Dinas Pendidikan
		1.1.1. 01.04. 0002	Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Dasar	Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Dasar					5 kali	1,447,303	3	232.526	0	0	0	0	0	0	3	232.526	60.00%	16.07%					Dinas Pendidikan
		1.1.1. 01.04. 0003	Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Menengah	Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Menengah					1 kali	652.874	1	426.322	0	0	0	0	0	0	1	426.322	100.00%	65.30%					Dinas Pendidikan

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1. 01.04. 0004	Penunjang Peningkatan Prestasi Pendidikan Luar Sekolah	Jumlah kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Pendidikan Luar Sekolah yang dilaksanakan					21 kali	3,172,303	11	219.832	0	0	0	0	0	0	11	219.832	52.38%	6.93%					Dinas Pendidikan
		1.1.1. 01.04. 0005	Penunjang Peningkatan Prestasi Siswa dan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Siswa dan Masyarakat					4 kali	23,306,138	3	4,191,876	0	0	0	0	0	0	3	4,191,876	75.00%	17.99%					Dinas Pendidikan
		1.1.1. 01.04. 0007	Pemberian Makanan Tambahan PAUD	Jumlah lembaga penerima pemberian makanan tambahan PAUD					893 lembaga	3,705,917	845	996.193	0	0	0	0	0	0	845	996.193	94.62%	26.88%					Dinas Pendidikan
		1.1.1. 01.05	Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan			8,230,190		672.031		1,055,181		100.224		0		0		0		100.224		9.50%		672.031		8.17%	
				Persentase lembaga pendidikan SD yang tertib administrasi	73.05%		79.62 %		64.94%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		98.37%		134.66%		
				Persentase lembaga pendidikan MI yang tertib administrasi	53.02%		90.24 %		46.31%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		99.33%		187.34%		
				Persentase lembaga pendidikan SMP yang tertib administrasi	87.04%		87.28 %		83.70%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		99.26%		114.04%		
				Persentase lembaga pendidikan MTs yang tertib administrasi	79.59%		87.93 %		59.18%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		98.08%		123.23%		
		1.1.1. 01.05. 0001	Fasilitasi Pengelolaan Manajemen Sekolah	Jumlah lembaga pendidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengelolaan manajemen sekolah					4022 lembaga	1,055,181	363	100.224	0	0	0	0	0	0	363	100.224	9.03%	9.50%					Dinas Pendidikan
2	Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan nonformal	1.1.1. 01.06	Program Pendidikan Kesetaraan			11,389,676		3,459,216		4,188,589		343.946		0		0		0		343.946		8.21%		3,459,216		30.37%	

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
				Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket A	74.29%		89.04 %		72.14%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		89.04%		119.85%		
				Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket B	89.66%		89.65 %		88.89%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		89.65%		99.99%		
				Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket C	91.37%		91.06 %		91.11%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		90.78%		99.36%		
		1.1.1.01.06.0001	Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan	Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitas pembinaan pendidikan kesetaraan					34 lembaga	4,188,589	0	343.946	0	0	0	0	0	0	343.946	0.00%	8.21%						Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.07	Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan		216,006,145	48,214,175		57,033,897		172.4		0		0		0		172.4		0.30%		48,214,175		22.32%			
				Persentase lembaga kursus dan pelatihan yang mendaftar proses akreditasi	6.32%		15.53 %		5.93%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		15.53%		245.73%		
				Persentase pertumbuhan peserta didik yang mengikuti pendidikan masyarakat	4.17%		10.36 %		2.08%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		10.36%		248.51%		
		1.1.1.01.07.0001	Fasilitasi Pelaksanaan TPA/TPQ dan Kelas Minggu	Jumlah guru TPA/TPQ dan kelas minggu yang mendapatkan fasilitas pelaksanaan TPA/TPQ dan kelas minggu					12000 orang	56,161,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%						Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.07.0002	Fasilitasi Pembelajaran dan Sumber Belajar Pendidikan Keluarga	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan sumber belajar pendidikan keluarga					2 kali	224.776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%						Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.07.0003	Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan serta PKBM	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan serta PKBM					289 lembaga	647.234	0	172.4	0	0	0	0	0	0	172.4	0.00%	26.64%						Dinas Pendidikan

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		1.1.1.02	Kesehatan																								
3	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bagi warga miskin	1.1.1.02.01	Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin		1,096,049,895	148,352,004	172,563,730		48,479,661	0	0		0	0		48,479,661		28.09%		148,352,004		13.54%					
			Persentase Kepemilikan Jaminan Kesehatan	100.00%		100.00 %	100.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		99.98%		99.98%						
			Persentase penduduk miskin yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	15.00%		24.71 %	13.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		25.61%		170.75%						
		1.1.1.02.01.0001	Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan			537252 orang	163,515,215	564742	39,431,162	0	0	0	0	0	0	564742	39,431,162	105.12%	24.11%				Dinas Kesehatan			
		1.1.1.02.01.0002	Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan			32784 orang	9,048,515	393413	9,048,499	0	0	0	0	0	0	393413	9,048,499	1,200.02 %	100.00%				Dinas Kesehatan			
4	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu dan anak	1.1.1.02.02	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		204,193,800	32,217,739	32,340,705		7,446,608	0	0		0	0		7,446,608		23.03%		32,217,739		15.78%					
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	98.50%		98.98 %	98.48%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		98.55%		100.05%						
			Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes)	96.98%		97.68 %	96.96%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		97.16%		100.18%						
			Cakupan kunjungan neonatal lengkap	95.00%		100.28 %	90.00%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		92.51%		97.38%						
			Cakupan imunisasi dasar lengkap	94.00%		97.77 %	93.85%	0.00%		0.00%	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		89.74%		95.47%						

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16									
		1.1.1. 02.02. 0001	Pelayanan kesehatan keluarga	Jumlah Lembaga yang melakukan Upaya Pelayanan Kesehatan Keluarga				64 lembaga	30,673,705	64	7,446,608	0	0	0	0	0	0	64	7,446,608	100.00%	24.28%				Dinas Kesehatan		
		1.1.1. 02.02. 0002	Jaminan Persalinan (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah Ibu dan bayi baru lahir yang mendapatkan perawatan persalinan dan pasca persalinan di sarana kesehatan				428 kunjungan	1,667,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%				Dinas Kesehatan		
		1.1.1. 02.03	Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak			63,114,385	2,696,197		8,242,541		342.978		0		0		0		342.978		4.16%		2,696,197		4.27%		
			Prevalensi Balita Gizi kurang		9.50%		8.26 %		9.50%	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		8.30%		87.42%			
			Prevalensi Balita gizi buruk		%		0.14 %		%	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.14%		0.00%			
			Persentase Penimbangan balita		81.70%		85.95 %		81.50%	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		85.49%		104.64%			
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan 90 tablet Fe		94.70%		99.96 %		94.66%	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		95.78%		101.14%			
		1.1.1. 02.03. 0001	Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Jumlah ibu, calon pengantin wanita (CPW), dan balita yang mendapatkan layanan perbaikan gizi				686 orang	5,582,824	220	342.978	0	0	0	0	0	0	220	342.978	32.07%	6.14%				Dinas Kesehatan		
		1.1.1. 02.03. 0002	Penyediaan Obat Perbaikan Gizi Masyarakat (DAK)	Jumlah obat gizi yang diadakan				3 item	2,659,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%				Dinas Kesehatan		
5	Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan	1.1.1. 02.04	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu			296,371,729	165,204,696		139,945,474		17,655,993		0		0		0		17,655,993		12.62%		165,204,696		55.74%		
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu		80.00%		83.61 %		78.00%	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		83.61%		104.51%			

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
				Persentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik	100.00%		83.61 %		76.35%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		83.61%		83.61%		
		1.1.1.02.04.0001	Pelayanan Kesehatan Primer	Jumlah lembaga yang melaksanakan pelayanan kesehatan primer					64 lembaga	79,421,189	64	13,809,086	0	0	0	0	0	0	64	13,809,086	100.00%	17.39%					Dinas Kesehatan
		1.1.1.02.04.0002	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan	Jumlah sistem informasi manajemen kesehatan yang dikembangkan					1 sistem	929.294	0	76.308	0	0	0	0	0	0	0	76.308	0.00%	8.21%					Dinas Kesehatan
		1.1.1.02.04.0003	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan Yang Diadakan					54 jenis	27,356,287	82	305.083	0	0	0	0	0	0	82	305.083	151.85%	1.12%					Dinas Kesehatan
		1.1.1.02.04.0004	Penunjang Operasional Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang Terpenuhi Penunjang Operasionalnya					64 lembaga	19,112,520	64	3,465,240	0	0	0	0	0	0	64	3,465,240	100.00%	18.13%					Dinas Kesehatan
		1.1.1.02.04.0005	Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu	Jumlah Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang dibangun/ direhabilitasi					28 bangunan	8,924,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1.02.04.0006	Penyusunan Dokumen Perencanaan Puskesmas/Puskesmas Pembantu	Jumlah dokumen perencanaan Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang disusun					11 dokumen	597.141	0	275	0	0	0	0	0	0	0	275	0.00%	0.05%					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1.02.04.0007	Pengadaan Sarana Kesehatan Dasar (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah Sarana Kesehatan Dasar yang diadakan					1 jenis	949.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Kesehatan
		1.1.1.02.04.0010	Penyediaan/Perbaikan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan Yang Diadakan					4 jenis	2,654,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1. 02.05	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan puskesmas/puskesmas pembantu			259,758,524		26,222,683		25,747,651		1,244,369		0		0		0		1,244,369		4.83%		26,222,683		10.10%	
				Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan	100.00%		100.00%		100.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		100.00%				
		1.1.1. 02.05. 0001	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan yang diadakan				173 jenis	22,615,290	7	1,244,369	0	0	0	0	0	0	7	1,244,369	4.05%	5.50%						Dinas Kesehatan
		1.1.1. 02.05. 0002	Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah obat dan perbekalan kesehatan dasar di Puskesmas yang diadakan				34 jenis	3,132,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%						Dinas Kesehatan
		1.1.1. 02.06	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan			507,762,685		54,758,957		66,017,863		1,631,619		0		0		0		1,631,619		2.47%		54,758,957		10.78%	
				Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin	90.00%		98.15%		86.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		98.15%		109.06%				
				Persentase sarana kesehatan yang memiliki izin	90.00%		98.27%		86.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		98.27%		109.19%				
				Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada	76.00%		86.73%		74.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		85.86%		112.97%				
				Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit dr. Mohamad Soewandhie	79.50%		82.65%		78.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		81.82%		102.92%				
		1.1.1. 02.06. 0001	Akreditasi Puskesmas (DAK)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan akreditasi				17 lembaga	3,984,048	0	686.474	0	0	0	0	0	0	0	686.474	0.00%	17.23%						Dinas Kesehatan
		1.1.1. 02.06. 0002	Pembinaan dan Pengawasan Sarana Kesehatan Rujukan	Jumlah Sarana Kesehatan yang Dibina dan Diawasi				134 lembaga	491.556	38	62.503	0	0	0	0	0	0	38	62.503	28.36%	12.72%						Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1. 02.06. 0003	Pembinaan dan pengembangan SDM Kesehatan	Jumlah Kegiatan pembinaan dan pengembangan SDM di bidang kesehatan					45 kali	4,212,396	174	784.432	0	0	0	0	0	0	174	784.432	386.67%	18.62%					Dinas Kesehatan
		1.1.1. 02.06. 0004	Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan keperawatan					9216 orang	3,599,980	3221	0	0	0	0	0	0	0	3221	0	34.95%	0.00%					RSUD Bhakti Dharma Husada
		1.1.1. 02.06. 0005	Pelayanan Medik Rumah Sakit	Jumlah Pasien RS yang Mendapatkan Pelayanan Medik					2887 orang	2,676,776	651	5.06	0	0	0	0	0	0	651	5.06	22.55%	0.19%					RSUD Bhakti Dharma Husada
		1.1.1. 02.06. 0006	Pengembangan Manajemen Rumah Sakit dan Peningkatan Kinerja SDM Kesehatan	Jumlah kegiatan Pengembangan Manajemen Rumah Sakit dan Peningkatan Kinerja SDM Kesehatan					96 kali	17,363,103	42	0	0	0	0	0	0	0	42	0	43.75%	0.00%					RSUD Bhakti Dharma Husada
		1.1.1. 02.06. 0007	Promosi Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah kegiatan Promosi Kesehatan yang Dilaksanakan					134 kali	992.947	19	0	0	0	0	0	0	0	19	0	14.18%	0.00%					RSUD Bhakti Dharma Husada
		1.1.1. 02.06. 0008	Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan keperawatan					26000 orang	6,911,686	7151	0	0	0	0	0	0	0	7151	0	27.50%	0.00%					RSUD Dr. Mohamad Soewandie
		1.1.1. 02.06. 0009	Penyelenggaraan Layanan Medik Rumah Sakit	Jumlah kegiatan layanan medik Rumah Sakit yang diselenggarakan					115 kali	414.208	41	0	0	0	0	0	0	0	41	0	35.65%	0.00%					RSUD Dr. Mohamad Soewandie
		1.1.1. 02.06. 0010	Pengembangan Manajemen Rumah Sakit	Jumlah jenis kegiatan pengembangan manajemen rumah sakit yang dilaksanakan					4 jenis	642.6	1	89.575	0	0	0	0	0	0	1	89.575	25.00%	13.94%					RSUD Dr. Mohamad Soewandie
		1.1.1. 02.06. 0011	Peningkatan Kinerja SDM Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan yang mendapatkan peningkatan kinerja					200 orang	24,127,234	88	0	0	0	0	0	0	0	88	0	44.00%	0.00%					RSUD Dr. Mohamad Soewandie
		1.1.1. 02.06. 0017	Analisa Pengembangan Sarana Kesehatan	Jumlah dokumen analisa pengembangan sarana dan prasarana kesehatan					5 dokumen	240.649	0	3.575	0	0	0	0	0	0	0	3.575	0.00%	1.49%					Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		1.1.1.02.06.0019	Akreditasi Rumah Sakit (DAK Kesehatan)	Jumlah kegiatan Akreditasi Rumah Sakit (DAK Kesehatan) yang dilaksanakan			1 kali	360,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					RSUD Bhakti Dharma Husada		
		1.1.1.02.07	Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit			910,265,321		52,808,827		109,724,583		1.58		0		0		0		1.58		0.00%		52,808,827		5.80%	
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit	85.00%		96.08 %		82.00%	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		69.16%		81.37%			
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai standar tipe rumah sakit	90.00%		103.68 %		90.00%	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		98.95%		109.94%			
				Rata-rata waktu tunggu layanan operasi elektif RSUD Bhakti Dharma Husada	3,00 hari		5.00 hari		5,00 hari	0,00 hari		0,00 hari		0,00 hari		0,00 hari		0,00 hari		0.00%		5.00%		166.67%			
				Rata-rata waktu tunggu layanan rawat jalan RSUD Bhakti Dharma Husada	40,00 menit		52.50 menit		43,00 menit	0,00 menit		0,00 menit		0,00 menit		0,00 menit		0,00 menit		0.00%		52.50%		131.25%			
				Rata-rata waktu tunggu layanan operasi elektif RSUD dr. Mohamad Soewandie	36,00 hari		11.00 hari		45,00 hari	0,00 hari		0,00 hari		0,00 hari		0,00 hari		0,00 hari		0.00%		11.00%		30.56%			
		1.1.1.02.07.0001	Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung RSUD beserta peralatannya	Jumlah bangunan gedung RSUD beserta peralatannya yang dibangun/ direhabilitasi			2 bangunan	2,593,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		
		1.1.1.02.07.0002	Penyusunan Dokumen Perencanaan Gedung RSUD beserta Peralatannya	Jumlah dokumen perencanaan Gedung RSUD beserta peralatannya yang disusun			2 dokumen	2,580,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1. 02.07. 0003	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokt eran	Jumlah jenis pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan/Kedo kteran					3 jenis	27,976,594	9	1.58	0	0	0	0	0	0	0	1.58	300.00%	0.01%					RSUD Bhakti Dharma Husada
		1.1.1. 02.07. 0005	Penyediaan/penin gkatan/pemelihar aan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	Jumlah jenis Penyediaan/peni ngkatan/pemeli haraan sarana/prasaran a fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial					1 jenis	4,925,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					RSUD Bhakti Dharma Husada	
		1.1.1. 02.07. 0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokt eran	Jumlah jenis alat kesehatan/kedo kteran yang diadakan dan dipelihara					3 jenis	16,424,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					RSUD Dr. Mohamad Soewandie	
		1.1.1. 02.07. 0007	Pengadaan Sarana Kesehatan yang bersumber dari DAK Kesehatan	Jumlah jenis alat kesehatan yang bersumber dari DAK Kesehatan yang diadakan					1 jenis	5,223,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					RSUD Dr. Mohamad Soewandie	
		1.1.1. 02.07. 0010	Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung RSUD berserta peralatannya (Tahun Jamak / Multiyears)	Jumlah bangunan gedung RSUD berserta peralatannya yang dibangun/ direhab (Tahun Jamak / Multiyears)					1 bangunan	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
		1.1.1. 02.08	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan rumah sakit			476,425,200		99,337,895		94,978,677		2,032,292		0		0		0		2,032,292		2.14%		99,337,895		20.85%	
				Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD dr. M. Soewandhie	100.00%		100.00 %		100.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		100.00%		
				Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada	100.00%		100.00 %		100.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		100.00%		

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16		
		1.1.1. 02.08. 0001	Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah jenis Obat dan perbekalan Kesehatan RS yang disediakan					2 jenis	29,978,677	2	2,032,292	0	0	0	0	0	0	2	2,032,292	100.00%	6.78%					RSUD Bhakti Dharma Husada		
		1.1.1. 02.08. 0002	Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah jenis obat dan perbekalan kesehatan rumah sakit yang disediakan					2 jenis	65,000,000	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	100.00%	0.00%					RSUD Dr. Mohamad Soewandie		
6	Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat	1.1.1. 02.09	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			437,361,49 7		92,916,537		103,217,94 6		21,109,937		0		0		0		21,109,937		20.45%		92,916,537		21.24%			
				Persentase rumah sehat	80.00%		86.38 %		78.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		86.36%		107.95%				
				Persentase TPM memenuhi syarat higienis sanitasi	85.00%		84.84 %		83.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		84.84%		99.82%				
				Cakupan Kelurahan Yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	90.00%		100.00 %		86.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		111.11%				
		1.1.1. 02.09. 0001	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah lembaga yang melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan					64 lembaga	33,649,343	65	2,480,347	0	0	0	0	0	0	65	2,480,347	101.56%	7.37%					Dinas Kesehatan		
		1.1.1. 02.09. 0002	Penanggulangan Kejadian Darurat dan Pasca Kejadian Darurat	Jumlah lokasi kejadian keawatdarurat an yang dilayani					600 lokasi	1,206,277	60	111.565	0	0	0	0	0	0	60	111.565	10.00%	9.25%					Dinas Kesehatan		
		1.1.1. 02.09. 0003	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular					154 lembaga	16,639,330	154	7,743,778	0	0	0	0	0	0	154	7,743,778	100.00%	46.54%					Dinas Kesehatan		
		1.1.1. 02.09. 0004	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Jumlah lembaga yang melaksanakan Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular					154 lembaga	3,408,452	155	484.559	0	0	0	0	0	0	155	484.559	100.65%	14.22%					Dinas Kesehatan		
		1.1.1. 02.09. 0005	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus dan Tradisional	Jumlah lembaga yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan khusus dan tradisional					64 lembaga	928.542	18	210.632	0	0	0	0	0	0	18	210.632	28.13%	22.68%					Dinas Kesehatan		

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1. 02.09. 0006	Penyelenggaraan Upaya Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melakukan Upaya Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga					63 lembaga	3,929,766	63	1,049,320	0	0	0	0	0	0	63	1,049,320	100.00%	26.70%					Dinas Kesehatan
		1.1.1. 02.09. 0007	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan	Jumlah puskesmas dengan Penyelenggaraa n Promosi Kesehatan					63 lembaga	9,585,203	63	1,228,222	0	0	0	0	0	0	63	1,228,222	100.00%	12.81%					Dinas Kesehatan
		1.1.1. 02.09. 0008	Surveilans dan Imunisasi	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Surveilans Terpadu dan Pembinaan Imunisasi					63 lembaga	1,386,402	63	100.371	0	0	0	0	0	0	63	100.371	100.00%	7.24%					Dinas Kesehatan
		1.1.1. 02.09. 0009	Pembinaan dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat	Jumlah lembaga yang melakukan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat					82 lembaga	26,963,405	63	7,701,144	0	0	0	0	0	0	63	7,701,144	76.83%	28.56%					Dinas Kesehatan
		1.1.1. 02.09. 0010	Penyediaan Alat Kesehatan Pengendalian Penyakit (DAK)	Jumlah alat kesehatan pengendalian penyakit yang diadakan					6 item	5,521,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Kesehatan
		1.1.1. 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																								
7	Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien	1.1.1. 03.01	Program pengembangan dan pengelolaan sistem drainase kota			3,815,252, 120		421,233,84 5		427,089,55 2		17,010,846		0		0		0		17,010,846		3.98%		421,233,84 5		11.04%	
				Luas genangan (ha)	1,094,00 ha			159.30 ha		1.150,00 ha		0,00 ha		0,00 ha		0,00 ha		0,00 ha		0,00 ha		0.00%		159.30%		14.56%	
				Tinggi genangan (cm)	14,00 cm			2.66 cm		15,00 cm		0,00 cm		0,00 cm		0,00 cm		0,00 cm		0,00 cm		0.00%		2.66%		18.98%	
				Lama genangan (menit)	45,00 menit			9.56 menit		49,00 menit		0,00 menit		0,00 menit		0,00 menit		0,00 menit		0,00 menit		0.00%		9.56%		21.25%	
				Persentase pembangunan jaringan drainase yang selesai tepat waktu	80.00%			100.00 %		80.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		125.00%	

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
			1.1.1. 03.01. 0001	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Re hab Sarana Prasarana Pematusan	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/R ehab Saluran Drainase/Goron g-gorong					20 dokumen	10,912,624	0	63.652	0	0	0	0	0	0	0	63.652	0.00%	0.58%				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
			1.1.1. 03.01. 0003	Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan	Jumlah unit pompa yang dipelihara selama 12 bulan sebanyak					56 unit	28,311,168	5	3,009,168	0	0	0	0	0	0	5	3,009,168	8.93%	10.63%				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
			1.1.1. 03.01. 0004	Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan	Jumlah Lokasi Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan					21 lokasi	186,159,637	0	1,785,174	0	0	0	0	0	0	0	1,785,174	0.00%	0.96%				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
			1.1.1. 03.01. 0006	Pemeliharaan/Reh abilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem					1025 lokasi	160,040,675	538	11,700,747	0	0	0	0	0	0	538	11,700,747	52.49%	7.31%				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
			1.1.1. 03.01. 0007	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pematusan Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pematusan Kota yang disusun					65 dokumen	7,744,183	12	452.105	0	0	0	0	0	0	12	452.105	18.46%	5.84%				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
			1.1.1. 03.01. 0008	Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears 2019-2020)	Jumlah Lokasi Prasarana Pematusan beserta sarana kelengkapannya yang dibangun dan disediakan					2 lokasi	32,616,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
			1.1.1. 03.01. 0009	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears 2019-2020)	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/R ehab Saluran Drainase/Goron g-gorong					2 dokumen	1,304,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
8	Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan	1.1.1. 03.02	Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan			1,889,861, 158		271,488,20 1		575,047,89 8		6,205,451		0		0		0		6,205,451		1.08%		271,488,20 1		14.37%	
				Persentase jalan yang terbangun (%)	0.71%		0.65 %		0.48%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.65%		91.42%		

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
				Persentase penyediaan prasarana pejalan kaki (%)	34.36%		17.27 %		22.91%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		17.27%		50.26%		
				Persentase jalan yang mendapatkan perbaikan (%)	15.48%		10.46 %		10.32%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		10.46%		67.56%		
				Persentase Pembangunan Jaringan Jalan dan Jembatan yang selesai tepat waktu	80.00%		96.88 %		80.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		96.88%		121.09%		
		1.1.1. 03.02. 0001	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Re hab Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/R ehab Jalan Dan Jembatan				12 dokumen	13,058,730	0	70.59	0	0	0	0	0	0	0	70.59	0.00%	0.54%					Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
		1.1.1. 03.02. 0002	Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut	Jumlah peralatan dan alat angkut yang dioperasikan dan dipelihara selama 12 bulan sebanyak				200 unit	16,077,287	33	2,378,324	0	0	0	0	0	0	33	2,378,324	16.50%	14.79%					Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
		1.1.1. 03.02. 0003	Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK)	Jumlah lokasi Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK)				1 lokasi	10,025,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
		1.1.1. 03.02. 0004	Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	Jumlah lokasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya yang dibangun				21 lokasi	256,023,227	0	269.759	0	0	0	0	0	0	0	269.759	0.00%	0.11%					Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
		1.1.1. 03.02. 0005	Pemeliharaan/Reh abilitasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	Jumlah lokasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya yang dipelihara/direh abilitasi				1222 lokasi	39,530,682	4830	2,829,135	0	0	0	0	0	0	4830	2,829,135	395.25%	7.16%					Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
		1.1.1. 03.02. 0006	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan yang disusun				55 dokumen	7,792,248	11	657.643	0	0	0	0	0	0	11	657.643	20.00%	8.44%					Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
		1.1.1. 03.02. 0007	Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya (Tahun Jamak/Multiyears 2018-2019)	Jumlah lokasi Jalan yang dibangun				2 lokasi	212,641,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1. 03.02. 0008	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Re hab Jalan Dan Jembatan (Tahun Jamak/Multiyears 2018 - 2019)	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/R ehab Jalan Dan Jembatan (Tahun Jamak/Multiyear s 2018 - 2019)					2 dokumen	6,379,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
		1.1.1. 03.02. 0009	Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya (Tahun Jamak/Multiyears 2019-2020)	Jumlah lokasi Jembatan yang dibangun					1 lokasi	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
		1.1.1. 03.02. 0010	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Re hab Jalan Dan Jembatan (Tahun Jamak/Multiyears 2019 - 2020)	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/R ehab Jembatan yang disusun					1 dokumen	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
9	Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih	1.1.1. 03.03	Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan			16,573,760		0		354.078		0		0		0		0		0	0.00%		0		0.00%		
				Persentase pelanggan baru PDAM (%)	16.59%		7.66 %		15.07%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		7.66%		46.20%		
		1.1.1. 03.03. 0001	Fasilitasi Penunjang Penyediaan Jaringan Air Bersih/Air Minum	Jumlah dokumen fasilitasi penunjang penyediaan jaringan air bersih/air minum					2 dokumen	354.078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
10	Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU	1.1.1. 03.04	Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU			1,129,650, 703		252,632,16 0		239,634,07 8		28,470,477		0		0		0		28,470,477		11.88%		252,632,16 0		22.36%	
				Panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan	2,780,250,00 m		2,902,320.00 m		2.660.250,00 m		0,00 m		0,00 m		0,00 m		0,00 m		0,00 m		0.00%		2,902,32 0,00 %		104.39%		
				Persentase pemasangan PJU hemat energi	85.90%		146.92 %		79.81%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		146.92%		171.04%		
		1.1.1. 03.04. 0001	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang					4800 titik	115,766,411	0	70.267	0	0	0	0	0	0	0	70.267	0.00%	0.06%					Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1. 03.04. 0002	Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum	Jumlah rekening listrik PJU yang dibayarkan				6674 rekening	111,320,330	19738	27,823,329	0	0	0	0	0	0	19738	27,823,329	295.74%	24.99%					Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	
		1.1.1. 03.04. 0003	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Jumlah titik PJU yang dipelihara				73680 titik	12,547,336	239271	576.88	0	0	0	0	0	0	239271	576.88	324.74%	4.60%					Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	
11	Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya	1.1.1. 03.05	Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota			3,691,812		791.834		2,561,297		242.536		0		0		0	242.536		9.47%		791.834		21.45%		
				Persentase rekomendasi utilitas yang dikeluarkan dibanding permohonan utilitas yang memenuhi syarat	100.00%		100.00 %		100.00%	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		100.00%			
		1.1.1. 03.05. 0001	Fasilitasi Perijinan Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas	Jumlah ijin Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas yang diterbitkan				10 ijin	1,393,602	7	142.639	0	0	0	0	0	0	7	142.639	70.00%	10.24%					Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
		1.1.1. 03.05. 0002	Fasilitasi dan Rekomendasi Teknis Jalan, Jembatan, Sarana dan Prasarana Pematusan	Jumlah rekomendasi teknis pendukung Jalan, Jembatan, Sarana dan Prasarana Pematusan				240 rekomendasi	1,167,695	60	99.896	0	0	0	0	0	0	60	99.896	25.00%	8.55%					Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
12	Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)	1.1.1. 03.06	Program Perencanaan Ruang Kota			37,561,991		6,098,714		8,245,314		912.541		0		0		0	912.541		11.07%		6,098,714		16.24%		
				Persentase rencana induk sektoral yang disusun	100.00%		71.43 %		85.71%	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		71.43%		71.43%			
				Persentase rencana rinci tata ruang yang disusun	73.33%		60.00 %		60.00%	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		60.00%		81.82%			
		1.1.1. 03.06. 0002	Penyusunan Perencanaan Tata Ruang Kota dan Pertanahan	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang kota dan pertanahan				3 dokumen	1,355,782	2	193.751	0	0	0	0	0	0	2	193.751	66.67%	14.29%					Badan Perencanaan Pembangunan	

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1. 03.06. 0003	Pendukung Perencanaan Rinci Ruang Kota	Jumlah dokumen perencanaan rinci ruang kota yang disusun					1 dokumen	5,283,703	3	579.778	0	0	0	0	0	0	3	579.778	300.00%	10.97%					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1. 03.06. 0004	Penyusunan Perencanaan Induk Sektoral Transportasi dan Drainase	Jumlah Dokumen Perencanaan Induk Sektoral Transportasi dan Drainase					2 dokumen	1,605,828	96126	139.012	0	0	0	0	0	0	96126	139.012	4,806,30 0.00%	8.66%					Badan Perencanaan Pembangunan
		1.1.1. 03.07	Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota			40,680,937		10,399,137		25,244,416		2,717,097		0		0		0		2,717,097		10.76%		10,399,137		25.56%	
				Persentase jumlah bangunan yang ber IMB	60.79%		55.96 %		56.93%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		55.96%		92.05%		
				Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB	100.00%		100.00 %		100.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		119.20%		119.20%		
		1.1.1. 03.07. 0001	Pemeliharaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Kearsipan	Jumlah arsip yang dipelihara					5 jenis	493.839	0	10.395	0	0	0	0	0	0	0	10.395	0.00%	2.10%					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1. 03.07. 0002	Pendataan Penyelenggaraan Bangunan	Jumlah pendataan penyelenggaraa n bangunan					6000 bangunan	1,632,126	1694	212.848	0	0	0	0	0	0	1694	212.848	28.23%	13.04%					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1. 03.07. 0004	Pengawasan Bangunan	Jumlah lokasi pengawasan bangunan yang dilaksanakan					240 lokasi	1,456,869	111	148.128	0	0	0	0	0	0	111	148.128	46.25%	10.17%					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1. 03.07. 0005	Pelayanan Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota	Jumlah berkas pemanfaatan rencana ruang kota yang dilayani					7334 berkas	4,137,683	2037	475.439	0	0	0	0	0	0	2037	475.439	27.77%	11.49%					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1. 03.07. 0006	Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUK)	Jumlah ijin usaha jasa konstruksi yang diterbitkan					500 ijin	216.456	319	0	0	0	0	0	0	0	0	319	0	63.80%	0.00%				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1. 03.07. 0007	Penyusunan Dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman	Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman yang disusun					9 dokumen	1,401,584	0	210.489	0	0	0	0	0	0	0	0	210.489	0.00%	15.02%				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1. 03.07. 0010	Pendataan dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang serta Infrastruktur Kota	Jumlah pemanfaatan ruang dan infrastruktur kota yang didata dan dipetakan					12677 persil	12,074,335	3327	1,610,612	0	0	0	0	0	0	3327	1,610,612	26.24%	13.34%				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
		1.1.1. 03.07. 0011	Penyusunan Dokumen Penataan Bangunan	Jumlah dokumen penataan bangunan yang disusun					5 dokumen	3,831,524	0	49.187	0	0	0	0	0	0	0	0	49.187	0.00%	1.28%				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1. 04	Perumahan dan Kawasan Permukiman																								
13	Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni	1.1.1. 04.01	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		2,146,266, 129		340,793,48 4		526,547,27 9		14,461,417		0		0		0		14,461,417		2.75%		340,793,48 4		15.88%		
				Persentase rumah tinggal tidak layak huni yang diperbaiki	100.00%		91.06 %		60.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		78.37%		78.37%		
				Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	58.00%		22.33 %		35.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		22.33%		38.50%		
				Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapann ya	73.80%		62.65 %		61.50%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		62.65%		84.89%		

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
				Persentase Pelayanan Sanitasi Permukiman	100.00%		93.73 %		72.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		93.73%		93.73%		
		1.1.1.04.01.0001	Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)	Jumlah Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi) yang dibangun					4 Lokasi	2,799,027	0	42.12	0	0	0	0	0	0	42.12	0.00%	1.50%					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
		1.1.1.04.01.0002	Pembangunan / Rehabilitasi Rumah	Jumlah rumah yang dibangun / direhabilitasi					12 bangunan	87,847,687	0	115.017	0	0	0	0	0	0	115.017	0.00%	0.13%					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
		1.1.1.04.01.0003	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan					1323 lokasi	329,059,899	31	4,521,834	0	0	0	0	0	0	31	4,521,834	2.34%	1.37%					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1.04.01.0004	Penyusunan Dokumen Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang disusun					178 dokumen	10,481,051	4	445.142	0	0	0	0	0	0	4	445.142	2.25%	4.25%					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1.04.01.0005	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman					3 dokumen	1,115,686	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0.00%	0.06%					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
		1.1.1.04.01.0006	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan / Rehabilitasi Rumah	Jumlah dokumen Perencanaan Penyediaan Perumahan yang disusun					10 dokumen	1,571,309	0	13.132	0	0	0	0	0	0	13.132	0.00%	0.84%					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
		1.1.1.04.01.0007	Pemanfaatan dan Pengawasan Rumah dan Rumah Bertingkat	Jumlah persil rumah ber-SIP dan rumah sewa aset Pemerintah Kota Surabaya yang dikelola					3967 lokasi	15,628,997	3967	2,236,080	0	0	0	0	0	0	3967	2,236,080	100.00%	14.31%					Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		1.1.1.04.01.0009	Pengelolaan Rumah Susun	Jumlah blok rumah susun sederhana yang dikelola					91 blok	9,669,231	273	1,602,179	0	0	0	0	0	0	273	1,602,179	300.00%	16.57%					Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		1.1.1.04.01.0010	Perbaikan rumah tidak layak huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki					1000 unit	36,484,865	138	2,351,005	0	0	0	0	0	0	138	2,351,005	13.80%	6.44%					Dinas Sosial

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100											
		1.1.1.04.01.0011	Pemeliharaan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi perbaikan / pemeliharaan rusun dan paving				100 Lokasi	28,317,765	90	3,106,813	0	0	0	0	0	90	3,106,813	90.00%	10.97%					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		
		1.1.1.04.01.0012	Peningkatan Kualitas Sarana Sanitasi Permukiman	Jumlah lokasi rumah yang terpasang jamban				1000 lokasi	3,571,763	0	27.482	0	0	0	0	0	0	27.482	0.00%	0.77%					Dinas Lingkungan Hidup		
		1.1.1.05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																								
14	Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah	1.1.1.05.01	Program Penegakan Peraturan Daerah		202,165,482	48,215,545		52,860,838	6,779,652		0		0		0		6,779,652		12.83%		48,215,545		23.85%				
				Persentase pelanggaran Perda terkait reklame yang ditemukan /dilaporkan dan ditindaklanjuti	100.00%		100.00 %	100.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		99.99%		99.99%					
				Persentase pelanggaran Perda bidang terkait PKL, PSK, anjal dan gepeng, dan RHU yang ditemukan /dilaporkan dan ditindaklanjuti	100.00%		100.00 %	100.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		99.99%		99.99%					
				Persentase pelanggaran Perda terkait HO, IMB, Kebersihan, Parkir Umum, Perda Lainnya yang ditemukan /dilaporkan dan ditindaklanjuti	100.00%		100.00 %	100.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		99.99%		99.99%					
				Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentrman dan ketertiban umum	100.00%		100.00 %	100.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		100.00%					

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		1.1.1. 05.01. 0001	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			288 kali 400.073	72 17.106	0 0	0 0	0 0	72 17.106	25.00% 4.28%			Kec. Asemrowo											
		1.1.1. 05.01. 0002	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			336 kali 524.529	84 54.872	0 0	0 0	0 0	84 54.872	25.00% 10.46%			Kec. Benowo											
		1.1.1. 05.01. 0003	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			360 kali 543.125	90 48.3	0 0	0 0	0 0	90 48.3	25.00% 8.89%			Kec. Bubutan											
		1.1.1. 05.01. 0004	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			360 kali 616.102	90 28.89	0 0	0 0	0 0	90 28.89	25.00% 4.69%			Kec. Bulak											
		1.1.1. 05.01. 0005	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			360 kali 418.461	88 37.171	0 0	0 0	0 0	88 37.171	24.44% 8.88%			Kec. Dukuh Pakis											
		1.1.1. 05.01. 0006	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			300 kali 473.958	75 42.15	0 0	0 0	0 0	75 42.15	25.00% 8.89%			Kec. Gayungan											
		1.1.1. 05.01. 0007	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			348 kali 593.935	87 41.986	0 0	0 0	0 0	87 41.986	25.00% 7.07%			Kec. Genteng											
		1.1.1. 05.01. 0008	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			360 kali 421.072	88 41.892	0 0	0 0	0 0	88 41.892	24.44% 9.95%			Kec. Gubeng											

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1. 05.01. 0009	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					420 kali	383.522	90	26.399	0	0	0	0	0	0	90	26.399	21.43%	6.88%					Kec. Gunung Anyar
		1.1.1. 05.01. 0010	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	540.985	90	58.839	0	0	0	0	0	0	90	58.839	25.00%	10.88%					Kec. Jambangan
		1.1.1. 05.01. 0011	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					312 kali	550.916	78	46.408	0	0	0	0	0	0	78	46.408	25.00%	8.42%					Kec. Karangpilang
		1.1.1. 05.01. 0012	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					264 kali	568.094	66	38.132	0	0	0	0	0	0	66	38.132	25.00%	6.71%					Kec. Kenjeran
		1.1.1. 05.01. 0013	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	476.232	90	36.275	0	0	0	0	0	0	90	36.275	25.00%	7.62%					Kec. Krembangan
		1.1.1. 05.01. 0014	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	597.555	90	85.305	0	0	0	0	0	0	90	85.305	25.00%	14.28%					Kec. Lakarsantri
		1.1.1. 05.01. 0015	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					408 kali	554.254	90	41.835	0	0	0	0	0	0	90	41.835	22.06%	7.55%					Kec. Mulyorejo
		1.1.1. 05.01. 0016	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	349.584	89	22.718	0	0	0	0	0	0	89	22.718	24.72%	6.50%					Kec. Pabean Cantian

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1. 05.01. 0017	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	499.645	90	53.458	0	0	0	0	0	0	90	53.458	25.00%	10.70%					Kec. Pakal
		1.1.1. 05.01. 0018	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					336 kali	584.115	84	42.138	0	0	0	0	0	0	84	42.138	25.00%	7.21%					Kec. Rungkut
		1.1.1. 05.01. 0019	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					312 kali	549.976	78	41.237	0	0	0	0	0	0	78	41.237	25.00%	7.50%					Kec. Sambikerep
		1.1.1. 05.01. 0020	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	560.294	90	51.373	0	0	0	0	0	0	90	51.373	25.00%	9.17%					Kec. Sawahan
		1.1.1. 05.01. 0021	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					312 kali	541.51	89	34.017	0	0	0	0	0	0	89	34.017	28.53%	6.28%					Kec. Semampir
		1.1.1. 05.01. 0022	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					312 kali	560.978	78	43.139	0	0	0	0	0	0	78	43.139	25.00%	7.69%					Kec. Simokerto
		1.1.1. 05.01. 0023	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					408 kali	653.481	102	69.968	0	0	0	0	0	0	102	69.968	25.00%	10.71%					Kec. Sukolilo
		1.1.1. 05.01. 0024	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	712.303	90	43.819	0	0	0	0	0	0	90	43.819	25.00%	6.15%					Kec. Sukomanung gal

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16		
		1.1.1. 05.01. 0025	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	627.779	89	51.876	0	0	0	0	0	0	89	51.876	24.72%	8.26%					Kec. Tambaksari		
		1.1.1. 05.01. 0026	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					312 kali	552.549	78	52.127	0	0	0	0	0	0	78	52.127	25.00%	9.43%					Kec. Tandes		
		1.1.1. 05.01. 0027	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					264 kali	573.086	66	42.161	0	0	0	0	0	0	66	42.161	25.00%	7.36%					Kec. Tegalsari		
		1.1.1. 05.01. 0028	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	527.099	90	37.677	0	0	0	0	0	0	90	37.677	25.00%	7.15%					Kec. Tenggilis Mejoyo		
		1.1.1. 05.01. 0029	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	405.011	87	33.515	0	0	0	0	0	0	87	33.515	24.17%	8.28%					Kec. Wiyung		
		1.1.1. 05.01. 0030	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					312 kali	586.055	78	37.955	0	0	0	0	0	0	78	37.955	25.00%	6.48%					Kec. Wonocolo		
		1.1.1. 05.01. 0031	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	883.956	89	46.387	0	0	0	0	0	0	89	46.387	24.72%	5.25%					Kec. Wonokromo		
		1.1.1. 05.01. 0032	Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I	Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I					480 kali	2,460,042	122	156.253	0	0	0	0	0	0	122	156.253	25.42%	6.35%					Satuan Polisi Pamong Praja		
		1.1.1. 05.01. 0033	Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II	Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II					192 Kali	813.508	48	102.998	0	0	0	0	0	0	48	102.998	25.00%	12.66%					Satuan Polisi Pamong Praja		

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12=8+9+10+11		13=12/7*100	14=6+12		15=14/5*100		16		
		1.1.1. 05.01. 0034	Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III	Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III				1368 Kali	4,799,140	766	576.659	0	0	0	0	0	0	766	576.659	55.99%	12.02%				Satuan Polisi Pamong Praja		
		1.1.1. 05.01. 0035	Penindakan Hasil Evaluasi Pelanggaran Perda	Jumlah penindakan pelanggaran Perda				84 Kali	565.647	13	87.258	0	0	0	0	0	0	13	87.258	15.48%	15.43%				Satuan Polisi Pamong Praja		
		1.1.1. 05.01. 0036	Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa				228 Kali	1,207,429	1310	77.946	0	0	0	0	0	0	1310	77.946	574.56%	6.46%				Satuan Polisi Pamong Praja		
		1.1.1. 05.01. 0037	Penyiapan Tenaga Penanggulangan Keamanan Kota	Jumlah tenaga penanggulangan keamanan kota yang disediakan				620 orang	26,184,841	574	4,429,417	0	0	0	0	0	0	574	4,429,417	92.58%	16.92%				Satuan Polisi Pamong Praja		
15	Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma masyarakat, toleransi dan kerukunan antar umat beragama	1.1.1. 05.02	Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan		178,927,96 5		42,416,280		62,684,836		9,612,253		0		0		0		9,612,253		15.33%		42,416,280		23.71%		
				Persentase tertanganinya gangguan ketentrman dan ketertiban umum	100.00%		100.00 %		100.00%	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	100.00%		100.00%				
				Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dan difasilitasi yang berjalan dengan lancar	100.00%		100.00 %		100.00%	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	100.00%		100.00%				
		1.1.1. 05.02. 0001	Orientasi Kewaspadaan Nasional	Jumlah Kegiatan Orientasi Kewaspadaan Nasional				16 Kali	613.385	4	87.877	0	0	0	0	0	0	4	87.877	25.00%	14.33%				Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat		
		1.1.1. 05.02. 0002	Pemantauan dan Pengendalian Ketenteraman Kota	Jumlah kegiatan pemantauan dan pengendalian ketenteraman kota				70 kali	601.999	9	77.839	0	0	0	0	0	0	9	77.839	12.86%	12.93%				Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat		

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1. 05.02. 0003	Kerjasama pengendalian keamanan kota	Jumlah kegiatan kerjasama pengendalian keamanan kota					194 kali	4,231,465	63	583.595	0	0	0	0	0	0	63	583.595	32.47%	13.79%					Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
		1.1.1. 05.02. 0004	Peningkatan toleransi dan kehidupan beragama	Jumlah kegiatan peningkatan toleransi dan kehidupan beragama					30 kali	1,143,435	10	119.143	0	0	0	0	0	0	10	119.143	33.33%	10.42%					Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
		1.1.1. 05.02. 0005	Pengendalian Perlindungan Masyarakat	Jumlah orang yang mendukung pengendalian keamanan, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat					737 orang	39,643,887	728	5,774,028	0	0	0	0	0	0	728	5,774,028	98.78%	14.56%					Badan Penanggu langan Bencana dan Perlindungan Masyarakat
		1.1.1. 05.02. 0006	Fasilitasi Penyelenggara an kegiatan keagamaan	Jumlah fasilitasi penyelenggara an kegiatan keagamaan					102 kali	15,184,392	22	2,932,202	0	0	0	0	0	0	22	2,932,202	21.57%	19.31%					Dinas Sosial
		1.1.1. 05.02. 0007	Pembinaan Potensi Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan potensi masyarakat					81 kali	810.983	258	37.568	0	0	0	0	0	0	258	37.568	318.52%	4.63%					Badan Penanggu langan Bencana dan Perlindungan Masyarakat
		1.1.1. 05.02. 0008	Pelatihan kader perlindungan masyarakat	Jumlah peserta pelatihan kader perlindungan masyarakat					100 orang	455.291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Badan Penanggu langan Bencana dan Perlindungan Masyarakat
16	Pengembang an sistem penanggu langan bencana yang antisipatif dan tanggap.	1.1.1. 05.03	Program Penanggu langan Bencana			265,512,930		52,264,410		127,170,704		7,459,989		0		0		0		7,459,989		5.87%		52,264,410		19.68%	
				Angka kejadian kebakaran gedung/bangu nan per 1 juta penduduk Surabaya	52,00 kejadian		51.38 kejadian		53,00 kejadian		0,00 kejadian		0,00 kejadia n		0,00 kejadia n		0,00 kejadian		0,00 kejadian		0.00%		41.68%		80.16%		
				Angka kejadian kebakaran non bangunan per 1 juta penduduk Surabaya	108,00 kejadian		108.89 kejadian		109,00 kejadian		0,00 kejadian		0,00 kejadia n		0,00 kejadia n		0,00 kejadian		0,00 kejadian		0.00%		190.97%		176.82%		

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16		
				Persentase waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	99.00%		100.00 %		97.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		101.01%				
				Persentase waktu tanggap ≤ 24 jam penanggulangan an kejadian bencana alam	100.00%		100.00 %		100.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		100.00%				
				Persentase kelurahan tangguh bencana	100.00%		40.91 %		68.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		40.91%		40.91%				
		1.1.1.05.03.0002	Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana	Jumlah peserta Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana					2100 orang	1,741,907	552	211.334	0	0	0	0	0	0	552	211.334	26.29%	12.13%				Badan Penanggulangan an Bencana dan Perlindungan Masyarakat			
		1.1.1.05.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Pokok Korban Bencana	Terpenuhinya Kebutuhan Pokok Korban Bencana					100%	1,959,735	100	95.759	0	0	0	0	0	0	100	95.759	100.00%	4.89%				Badan Penanggulangan an Bencana dan Perlindungan Masyarakat			
		1.1.1.05.03.0004	Pengadaan Sarana Penanggulangan Bencana	Jumlah jenis sarana penanggulangan bencana yang diadakan					25 jenis	2,002,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%				Badan Penanggulangan an Bencana dan Perlindungan Masyarakat			
		1.1.1.05.03.0005	Pengembangan Manajemen Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Kegiatan Pengembangan Manajemen Penanggulangan Bencana Daerah					4 Kegiatan	2,204,344	1	317.786	0	0	0	0	0	0	1	317.786	25.00%	14.42%				Badan Penanggulangan an Bencana dan Perlindungan Masyarakat			
		1.1.1.05.03.0006	Peningkatan Kapabilitas Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Jumlah peserta peningkatan kapabilitas kesiapsiagaan menghadapi bencana					515 orang	799.266	86	76.086	0	0	0	0	0	0	86	76.086	16.70%	9.52%				Badan Penanggulangan an Bencana dan Perlindungan Masyarakat			
		1.1.1.05.03.0007	Pengembangan Manajemen Logistik, Rehabilitasi dan Rekontruksi dalam Penanggulangan Bencana	jumlah kegiatan Pengembangan Manajemen Logistik, Rehabilitasi dan Rekontruksi dalam Penanggulangan Bencana					4 Kegiatan	710.022	2	75.548	0	0	0	0	0	0	2	75.548	50.00%	10.64%				Badan Penanggulangan an Bencana dan Perlindungan Masyarakat			

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1. 05.03. 0008	Operasional Pemadaman Kebakaran	Jumlah pelaksana operasional pemadaman kebakaran yang dipenuhi kebutuhannya					832 orang	30,794,669	0	4,820,586	0	0	0	0	0	0	0	4,820,586	0.00%	15.65%					Dinas Pemadam Kebakaran
		1.1.1. 05.03. 0009	Pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran yang terpelihara					210 unit	4,480,855	65	853.214	0	0	0	0	0	0	65	853.214	30.95%	19.04%					Dinas Pemadam Kebakaran
		1.1.1. 05.03. 0010	Perencanaan dan Pengadaan/pemb angunan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah unit sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran yang diadakan/diban gun					567 unit	70,024,331	43	323.471	0	0	0	0	0	0	43	323.471	7.58%	0.46%					Dinas Pemadam Kebakaran
		1.1.1. 05.03. 0011	Pemeriksaan Tingkat Resiko Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan	Jumlah bangunan gedung dan lingkungan yang dilaksanakan pemeriksaan					700 bangunan	5,900,667	25	86.298	0	0	0	0	0	0	25	86.298	3.57%	1.46%					Dinas Pemadam Kebakaran
		1.1.1. 05.03. 0012	Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kegiatan pencegahan bahaya kebakaran					199 kali	2,829,632	39	512.211	0	0	0	0	0	0	39	512.211	19.60%	18.10%					Dinas Pemadam Kebakaran
		1.1.1. 05.03. 0013	Pengendalian Bahaya Kebakaran	Jumlah pelatihan pengendalian pemadaman kebakaran					48 kali	1,040,953	30	45.902	0	0	0	0	0	0	30	45.902	62.50%	4.41%					Dinas Pemadam Kebakaran
		1.1.1. 05.03. 0014	Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Pemadam Kebakaran	Jumlah bangunan fasilitas Pemadam Kebakaran yang dibangun/direha bilitasi					6 bangunan	2,444,629	0	41.794	0	0	0	0	0	0	0	41.794	0.00%	1.71%					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1. 05.03. 0015	Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Pemadam Kebakaran	Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Pemadam Kebakaran yang disusun					4 dokumen	237.103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1. 06	Sosial																								
17	Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS	1.1.1. 06.01	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial			1,142,659, 571		168,625,44 1		213,093,78 6		48,494,601		0		0		0		48,494,601		22.76%		168,625,44 1		14.76%	

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16		
				Persentase PMKS yang ditangani	60.00%		62.10 %		60.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		62.10%		103.50%				
		1.1.1.06.01.0002	Pemenuhan kebutuhan dasar permakanan bagi anak	Jumlah anak yang mendapat bantuan permakanan					6000 orang	28,886,424	5635	7,960,629	0	0	0	0	0	0	5635	7,960,629	93.92%	27.56%				Dinas Sosial			
		1.1.1.06.01.0003	Pemenuhan kebutuhan dasar permakanan bagi lanjut usia	Jumlah lanjut usia yang mendapat bantuan permakanan					20000 orang	93,668,972	17961	26,588,756	0	0	0	0	0	0	17961	26,588,756	89.81%	28.39%				Dinas Sosial			
		1.1.1.06.01.0004	Pemenuhan kebutuhan dasar permakanan bagi penyandang disabilitas dan penyakit tertentu	Jumlah penyandang disabilitas dan penyakit tertentu yang mendapat bantuan permakanan					9414 orang	44,833,891	6022	8,946,632	0	0	0	0	0	0	6022	8,946,632	63.97%	19.96%				Dinas Sosial			
		1.1.1.06.01.0005	Pembinaan dan pemulangan PMKS	Jumlah PMKS yang mendapat pelayanan					1235 orang	1,485,902	157	77.774	0	0	0	0	0	0	157	77.774	12.71%	5.23%				Dinas Sosial			
		1.1.1.06.01.0006	Pemutakhiran data PMKS dan PSKS	Jumlah lokasi pemutakhiran data PMKS dan PSKS					154 Kelurahan	1,695,453	0	66.608	0	0	0	0	0	0	0	66.608	0.00%	3.93%				Dinas Sosial			
		1.1.1.06.01.0007	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri					45 orang	2,351,034	35	348.642	0	0	0	0	0	0	35	348.642	77.78%	14.83%				Dinas Sosial			
		1.1.1.06.01.0008	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Pondok Sosial Kalijudan	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Pondok Sosial Kalijudan					85 orang	2,655,990	65	335.666	0	0	0	0	0	0	65	335.666	76.47%	12.64%				Dinas Sosial			
		1.1.1.06.01.0009	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Babat Jerawat	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Babat Jerawat					95 orang	1,624,632	95	218.791	0	0	0	0	0	0	95	218.791	100.00%	13.47%				Dinas Sosial			

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16		
		1.1.1. 06.01. 0010	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Griya Werdha	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Griya Werdha					150 orang	6,118,102	150	613.974	0	0	0	0	0	0	150	613.974	100.00%	10.04%					Dinas Sosial		
		1.1.1. 06.01. 0011	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih					1150 orang	19,824,541	1209	2,701,167	0	0	0	0	0	0	1209	2,701,167	105.13%	13.63%					Dinas Sosial		
		1.1.1. 06.01. 0012	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat					48 Kali	148.33	12	4.744	0	0	0	0	0	0	12	4.744	25.00%	3.20%					Kec. Asemrowo		
		1.1.1. 06.01. 0014	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat					48 Kali	142.735	12	3.963	0	0	0	0	0	0	12	3.963	25.00%	2.78%					Kec. Benowo		
		1.1.1. 06.01. 0016	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat					48 Kali	219.937	15	11.67	0	0	0	0	0	0	15	11.67	31.25%	5.31%					Kec. Bubutan		
		1.1.1. 06.01. 0018	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat					48 Kali	184.174	11	9.84	0	0	0	0	0	0	11	9.84	22.92%	5.34%					Kec. Bulak		
		1.1.1. 06.01. 0020	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat					48 Kali	172.652	0	1.517	0	0	0	0	0	0	0	1.517	0.00%	0.88%					Kec. Dukuh Pakis		
		1.1.1. 06.01. 0022	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat					48 Kali	157.779	16	2.273	0	0	0	0	0	0	16	2.273	33.33%	1.44%					Kec. Gayungan		

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1. 06.01. 0024	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat					48 Kali	159.467	39	2.222	0	0	0	0	0	0	39	2.222	81.25%	1.39%					Kec. Genteng
		1.1.1. 06.01. 0026	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat					48 Kali	74.792	19	1.794	0	0	0	0	0	0	19	1.794	39.58%	2.40%					Kec. Gubeng
		1.1.1. 06.01. 0028	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat					48 Kali	147.89	16	1.966	0	0	0	0	0	0	16	1.966	33.33%	1.33%					Kec. Gunung Anyar
		1.1.1. 06.01. 0030	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat					48 Kali	147.277	3	4.756	0	0	0	0	0	0	3	4.756	6.25%	3.23%					Kec. Jambangan
		1.1.1. 06.01. 0032	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat					48 Kali	154.651	1	1.048	0	0	0	0	0	0	1	1.048	2.08%	0.68%					Kec. Karangpilang
		1.1.1. 06.01. 0034	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat					48 Kali	160.327	8	964	0	0	0	0	0	0	8	964	16.67%	0.60%					Kec. Kenjeran
		1.1.1. 06.01. 0036	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat					48 Kali	168.175	12	2.577	0	0	0	0	0	0	12	2.577	25.00%	1.53%					Kec. Krembangan
		1.1.1. 06.01. 0038	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat					48 Kali	211.458	8	3.314	0	0	0	0	0	0	8	3.314	16.67%	1.57%					Kec. Lakarsantri

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5		6		7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100												
		1.1.1. 06.01. 0040	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat				48 Kali	177.863	8	3.105	0	0	0	0	0	8	3.105	16.67%	1.75%					Kec. Mulyorejo				
		1.1.1. 06.01. 0042	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat				48 Kali	198.6	20	10.05	0	0	0	0	0	20	10.05	41.67%	5.06%					Kec. Pabean Cantian				
		1.1.1. 06.01. 0044	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat				48 Kali	160.165	12	1.475	0	0	0	0	0	12	1.475	25.00%	0.92%					Kec. Pakal				
		1.1.1. 06.01. 0046	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat				48 Kali	201.987	16	8.148	0	0	0	0	0	16	8.148	33.33%	4.03%					Kec. Rungkut				
		1.1.1. 06.01. 0048	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat				48 Kali	158.695	12	2.021	0	0	0	0	0	12	2.021	25.00%	1.27%					Kec. Sambikerep				
		1.1.1. 06.01. 0050	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat				48 Kali	198.421	7	532	0	0	0	0	0	7	532	14.58%	0.27%					Kec. Sawahan				
		1.1.1. 06.01. 0052	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat				48 Kali	151.489	15	1.395	0	0	0	0	0	15	1.395	31.25%	0.92%					Kec. Semampir				
		1.1.1. 06.01. 0054	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat				48 Kali	140.743	17	2.605	0	0	0	0	0	17	2.605	35.42%	1.85%					Kec. Simokerto				

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1. 06.01. 0056	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat					48 Kali	225.343	12	3.164	0	0	0	0	0	0	12	3.164	25.00%	1.40%					Kec. Sukolilo
		1.1.1. 06.01. 0058	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat					48 Kali	173.075	12	2.7	0	0	0	0	0	0	12	2.7	25.00%	1.56%					Kec. Sukomanung gal
		1.1.1. 06.01. 0060	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat					48 Kali	218.232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Kec. Tambaksari
		1.1.1. 06.01. 0062	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat					48 Kali	225.561	12	8.295	0	0	0	0	0	0	12	8.295	25.00%	3.68%					Kec. Tandes
		1.1.1. 06.01. 0064	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat					48 Kali	63.064	12	1.687	0	0	0	0	0	0	12	1.687	25.00%	2.67%					Kec. Tegalsari
		1.1.1. 06.01. 0066	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat					48 Kali	182.596	8	4.87	0	0	0	0	0	0	8	4.87	16.67%	2.67%					Kec. Tenggilis Mejoyo
		1.1.1. 06.01. 0068	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat					48 Kali	172.754	12	8.328	0	0	0	0	0	0	12	8.328	25.00%	4.82%					Kec. Wiyung
		1.1.1. 06.01. 0070	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat					48 Kali	203.78	12	4.96	0	0	0	0	0	0	12	4.96	25.00%	2.43%					Kec. Wonocolo

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
			1.1.1. 06.01. 0072	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat					48 Kali	243.183	214	9.342	0	0	0	0	0	0	214	9.342	445.83%	3.84%					Kec. Wonokromo
			1.1.1. 06.01. 0074	Penyelenggaraan layanan ambulance gratis					4416 kali	2,839,731	1540	421.97	0	0	0	0	0	0	1540	421.97	34.87%	14.86%					Dinas Sosial
			1.1.1. 06.01. 0077	Pemberian bahan pokok kepada panti sosial					17 lembaga	215.759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Sosial
			1.1.1. 06.01. 0078	Fasilitasi pemakaman					960 orang	941.097	63	43.641	0	0	0	0	0	0	63	43.641	6.56%	4.64%					Dinas Sosial
			1.1.1. 06.01. 0079	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Masalah Sosial					4 kali	607.062	0	45.03	0	0	0	0	0	0	0	45.03	0.00%	7.42%					Dinas Sosial
			1.1.1. 06.02	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial		32,670,064		1,915,097		2,722,431		217.237		0		0		0		217.237		7.98%		1,915,097		5.86%	
				Persentase PSKS Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	65.00%		58.36 %		55.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		58.36%		89.79%		
			1.1.1. 06.02. 0001	Koordinasi pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan					24 kali	1,064,061	6	88.775	0	0	0	0	0	0	6	88.775	25.00%	8.34%					Dinas Sosial
			1.1.1. 06.02. 0002	Peningkatan peran serta lanjut usia					34 kali	725.854	9	83.802	0	0	0	0	0	0	9	83.802	26.47%	11.55%					Dinas Sosial
			1.1.1. 06.02. 0003	Pembinaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)					1038 orang	932.515	408	44.66	0	0	0	0	0	0	408	44.66	39.31%	4.79%					Dinas Sosial
			1.1.2	Non Pelayanan Dasar																							
			1.1.2. 01	Tenaga Kerja																							

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
18	Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja	1.1.2.01.01	Program Peningkatan Kesempatan Kerja			35,021,611		3,837,207		4,361,985		650.932		0		0		0		650.932		14.92%		3,837,207		10.96%	
				Persentase pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat diinformasikan	5.00%		5.04 %		5.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		5.04%		100.72%		
				Persentase pemuda yang membuka wirausaha mandiri	15.00%		35.19 %		15.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		35.19%		234.57%		
		1.1.2.01.01.0001	Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah Pemuda yang mendapatkan Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan					400 Orang	1,301,515	200	154.474	0	0	0	0	0	0	200	154.474	50.00%	11.87%					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		1.1.2.01.01.0002	Bimtek Pengembangan Softskill Kerja Bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mengikuti bimtek pengembangan softskill kerja					1050 orang	347.801	105	57.632	0	0	0	0	0	0	105	57.632	10.00%	16.57%					Dinas Tenaga Kerja
		1.1.2.01.01.0003	Sosialisasi Bidang dan Standar Kerja di Luar Negeri	Jumlah peserta sosialisasi bidang dan standar kerja di luar negeri					250 orang	106.2	200	35.652	0	0	0	0	0	0	200	35.652	80.00%	33.57%					Dinas Tenaga Kerja
		1.1.2.01.01.0004	Fasilitasi Perluasan Kesempatan Kerja Bagi Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi perluasan kesempatan kerja					150 orang	546.954	85	98.952	0	0	0	0	0	0	85	98.952	56.67%	18.09%					Dinas Tenaga Kerja
		1.1.2.01.01.0005	Bimtek Bagi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja yang mengikuti bimtek					60 lembaga	145.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Tenaga Kerja
		1.1.2.01.01.0006	Bimtek Bagi Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing	Jumlah perusahaan pengguna tenaga kerja asing yang mengikuti bimtek					120 lembaga	103.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Tenaga Kerja
		1.1.2.01.01.0007	Penyebarnyaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah even job fair yang diselenggarakan					7 kali	1,177,719	110	130.241	0	0	0	0	0	0	110	130.241	1,571.43 %	11.06%					Dinas Tenaga Kerja

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2.01.01.0009	Fasilitasi Pendampingan Pemilihan Bidang Kerja	Jumlah siswa SMK yang mendapatkan pendampingan pemilihan bidang kerja					1000 orang	492.33	469	173.981	0	0	0	0	0	0	469	173.981	46.90%	35.34%					Dinas Tenaga Kerja
		1.1.2.01.01.0010	Bimtek Persiapan Usaha Mandiri Pra Purna Kerja	Jumlah masyarakat pra purna kerja yang mengikuti bimtek persiapan usaha					100 orang	141.072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Tenaga Kerja
		1.1.2.01.02	Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas			91,289,389		12,459,892		14,967,525		1,468,102		0		0		0		1,468,102		9.81%		12,459,892		13.65%	
				Persentase Angkatan Kerja yang Lulus sertifikasi	70.00%		81.72 %		66.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		81.72%		116.74%		
				Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi yang lulus pelatihan	85.00%		100.00 %		81.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		117.65%		
		1.1.2.01.02.0001	Pembinaan Peningkatan Produktivitas Perusahaan	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pembinaan untuk meningkatkan produktivitas					200 lembaga	130.085	47	16.697	0	0	0	0	0	0	47	16.697	23.50%	12.84%					Dinas Tenaga Kerja
		1.1.2.01.02.0002	Fasilitasi Magang Bagi Pencari Kerja Penyandang Cacat	Jumlah pencari kerja penyandang cacat yang difasilitasi magang					20 orang	132.513	12	31.53	0	0	0	0	0	0	12	31.53	60.00%	23.79%					Dinas Tenaga Kerja
		1.1.2.01.02.0003	Fasilitasi Magang Bagi Pencari Kerja Yang Memiliki Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang memiliki kompetensi yang difasilitasi magang					100 orang	257.756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Tenaga Kerja
		1.1.2.01.02.0004	Fasilitasi Sertifikasi Profesi Bagi Angkatan Kerja	Jumlah angkatan kerja yang mengikuti sertifikasi profesi					2290 orang	6,342,865	517	1,295,625	0	0	0	0	0	0	517	1,295,625	22.58%	20.43%					Dinas Tenaga Kerja
		1.1.2.01.02.0006	Penyusunan Dokumen Pengukuran Tingkat Produktivitas Skala Kota	Jumlah dokumen pengukuran tingkat produktivitas skala kota yang disusun					1 dokumen	131.802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Tenaga Kerja

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16		
		1.1.2. 01.02. 0007	Bimtek Bagi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta mengikuti bimtek					50 lembaga	98.312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Tenaga Kerja		
		1.1.2. 01.02. 0008	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja					1136 orang	7,874,192	72	124.25	0	0	0	0	0	0	72	124.25	6.34%	1.58%					Dinas Tenaga Kerja		
19	Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis	1.1.2. 01.03	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja			16,292,034		2,535,972		2,575,740		420.328		0		0		0		420.328		16.32%		2,535,972		15.57%			
				Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/P erjanjian Kerja Bersama	7.76%		7.77 %		7.26%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		7.77%		100.11%				
		1.1.2. 01.03. 0001	Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)					110 Kasus	357.264	34	46.02	0	0	0	0	0	0	34	46.02	30.91%	12.88%					Dinas Tenaga Kerja		
		1.1.2. 01.03. 0002	Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan	Jumlah perusahaan yang mendapat pembinaan syarat kerja					250 lembaga	394.85	83	95.956	0	0	0	0	0	0	83	95.956	33.20%	24.30%					Dinas Tenaga Kerja		
		1.1.2. 01.03. 0003	Koordinasi Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit	Jumlah pelaksanaan koordinasi Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit					12 kali	613.892	3	83.214	0	0	0	0	0	0	3	83.214	25.00%	13.56%					Dinas Tenaga Kerja		
		1.1.2. 01.03. 0004	Penyusunan Dokumen Perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Surabaya	Jumlah dokumen perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Surabaya yang disusun					1 dokumen	1,014,824	3	172.088	0	0	0	0	0	0	3	172.088	300.00%	16.96%					Dinas Tenaga Kerja		
		1.1.2. 01.03. 0005	Bimtek Hubungan Industrial Bagi Pekerja dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Jumlah pekerja dan serikat pekerja/serikat buruh yang mengikuti bimtek hubungan industrial					300 orang	194.909	64	23.05	0	0	0	0	0	0	64	23.05	21.33%	11.83%					Dinas Tenaga Kerja		

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
		1.1.2.01.04	Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan			8,343,254		562.896		341.704		24.805		0		0		0		24.805		7.26%		562.896		6.75%	
				Persentase perusahaan yang telah diperiksa dan mematuhi norma ketenagakerjaan dan/ norma K3	83.00%		52.33 %		61.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		52.33%		63.05%				
		1.1.2.01.04.0001	Bimtek Norma Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang mengikuti bimtek norma ketenagakerjaan					500 lembaga	107.241	72	9.48	0	0	0	0	0	0	72	9.48	14.40%	8.84%					Dinas Tenaga Kerja
		1.1.2.01.04.0002	Bimtek Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Jumlah perusahaan yang mengikuti bimtek norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja					500 lembaga	234.463	70	15.326	0	0	0	0	0	0	70	15.326	14.00%	6.54%					Dinas Tenaga Kerja
		1.1.2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																								
20	Meningkatkan pemberdayaan perempuan	1.1.2.02.01	Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan			10,570,239		1,997,591		3,304,838		375.446		0		0		0		375.446		11.36%		1,997,591		18.90%	
				Persentase indikator PUG tingkat kecamatan yang terpenuhi	100.00%		100.00 %		100.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		100.00%		
		1.1.2.02.01.0001	Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	Jumlah lembaga yang mengikuti Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender					147 lembaga	959.833	134	105.828	0	0	0	0	0	0	134	105.828	91.16%	11.03%					Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.1.2.02.01.0002	Fasilitasi Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah fasilitasi pembinaan organisasi perempuan					25 kali	991.727	9	106.62	0	0	0	0	0	0	9	106.62	36.00%	10.75%					Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2. 02.01. 0005	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan					7 kali	572.357	401	63.09	0	0	0	0	0	0	401	63.09	5,728.57 %	11.02%					Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.1.2. 02.01. 0007	Penyusunan Profil Gender dan Evaluasi Atas Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kota Surabaya	Jumlah dokumen yang disusun					3 dokumen	376.206	0	21.548	0	0	0	0	0	0	0	21.548	0.00%	5.73%					Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.1.2. 02.01. 0008	Peningkatan pemahaman pengarusutamaan gender kepada masyarakat	jumlah orang yang mengikuti peningkatan pemahaman pengarusutamaa n gender kepada masyarakat					1000 orang	404.714	510	78.361	0	0	0	0	0	0	510	78.361	51.00%	19.36%					Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
21	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak	1.1.2. 02.02	Program perlindungan perempuan dan anak			39,321,616		8,804,731		16,194,181		1,322,327		0		0		0		1,322,327		8.17%		8,804,731		22.39%	
				Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani	100.00%		100.00 %		100.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		100.00%		
				Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A)	68.10%		72.70 %		66.86%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		72.70%		106.75%		
				Persentase jejaring yang berperan dalam penanganan permasalahan terhadap perempuan dan anak	64.00%		100.00 %		35.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		156.25%		
				Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100.00%		100.00 %		100.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		144.29%		144.29%		

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2. 02.02. 0001	Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak	Jumlah kasus permasalahan perempuan dan anak yang dilakukan pendampingan dan pembinaan					330 kasus	1,755,101	22	260.712	0	0	0	0	0	0	22	260.712	6.67%	14.85%					Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.1.2. 02.02. 0002	Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak	Jumlah lembaga yang difasilitasi dalam pencapaian indikator kota layak anak					431 lembaga	916.363	258	75.461	0	0	0	0	0	0	258	75.461	59.86%	8.23%					Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.1.2. 02.02. 0003	Capacity Building bagi relawan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) dan Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah orang yang mengikuti Capacity Building					926 orang	532.967	0	63.5	0	0	0	0	0	0	0	63.5	0.00%	11.91%					Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.1.2. 02.02. 0004	Pembinaan Pengembangan Kampung Arek Suroboyo	Jumlah kampung Kampung Arek Suroboyo yang dibina dan dikembangkan					154 kampung	681.678	0	2.498	0	0	0	0	0	0	0	2.498	0.00%	0.37%					Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.1.2. 02.02. 0005	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutama an Gender dan Anak					16 Kali	256.951	6	18.875	0	0	0	0	0	0	6	18.875	37.50%	7.35%					Kec. Asemrowo
		1.1.2. 02.02. 0006	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutama an Gender dan Anak					14 Kali	244.256	9	18.356	0	0	0	0	0	0	9	18.356	64.29%	7.51%					Kec. Benowo
		1.1.2. 02.02. 0007	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutama an Gender dan Anak					22 Kali	364.868	11	26.671	0	0	0	0	0	0	11	26.671	50.00%	7.31%					Kec. Bubutan

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2. 02.02. 0008	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutama an Gender dan Anak					32 Kali	325.78	7	29.088	0	0	0	0	0	0	7	29.088	21.88%	8.93%					Kec. Bulak
		1.1.2. 02.02. 0009	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutama an Gender dan Anak					20 Kali	274.259	4	13.504	0	0	0	0	0	0	4	13.504	20.00%	4.92%					Kec. Dukuh Pakis
		1.1.2. 02.02. 0010	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutama an Gender dan Anak					21 Kali	316.586	5	27.32	0	0	0	0	0	0	5	27.32	23.81%	8.63%					Kec. Gayungan
		1.1.2. 02.02. 0011	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutama an Gender dan Anak					23 Kali	295.44	15	22.984	0	0	0	0	0	0	15	22.984	65.22%	7.78%					Kec. Genteng
		1.1.2. 02.02. 0012	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutama an Gender dan Anak					22 Kali	383.32	7	34.201	0	0	0	0	0	0	7	34.201	31.82%	8.92%					Kec. Gubeng
		1.1.2. 02.02. 0013	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutama an Gender dan Anak					13 Kali	241.593	6	18.04	0	0	0	0	0	0	6	18.04	46.15%	7.47%					Kec. Gunung Anyar
		1.1.2. 02.02. 0014	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutama an Gender dan Anak					24 Kali	275.249	8	16.775	0	0	0	0	0	0	8	16.775	33.33%	6.09%					Kec. Jambangan
		1.1.2. 02.02. 0015	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutama an Gender dan Anak					21 Kali	293.413	4	12.162	0	0	0	0	0	0	4	12.162	19.05%	4.15%					Kec. Karangpilang

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2. 02.02. 0016	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutama an Gender dan Anak					23 Kali	297.848	5	13.412	0	0	0	0	0	0	5	13.412	21.74%	4.50%					Kec. Kenjeran
		1.1.2. 02.02. 0017	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutama an Gender dan Anak					23 Kali	410.546	5	25.744	0	0	0	0	0	0	5	25.744	21.74%	6.27%					Kec. Krembangan
		1.1.2. 02.02. 0018	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutama an Gender dan Anak					19 Kali	392.996	3	35.722	0	0	0	0	0	0	3	35.722	15.79%	9.09%					Kec. Lakarsantri
		1.1.2. 02.02. 0019	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutama an Gender dan Anak					16 Kali	296.727	4	18.237	0	0	0	0	0	0	4	18.237	25.00%	6.15%					Kec. Mulyorejo
		1.1.2. 02.02. 0020	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutama an Gender dan Anak					20 Kali	385.72	5	25.747	0	0	0	0	0	0	5	25.747	25.00%	6.68%					Kec. Pabean Cantian
		1.1.2. 02.02. 0021	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutama an Gender dan Anak					10 Kali	255.067	2	4.405	0	0	0	0	0	0	2	4.405	20.00%	1.73%					Kec. Pakal
		1.1.2. 02.02. 0022	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutama an Gender dan Anak					18 Kali	408.149	3	34.302	0	0	0	0	0	0	3	34.302	16.67%	8.40%					Kec. Rungkut
		1.1.2. 02.02. 0023	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutama an Gender dan Anak					20 Kali	275.9	3	13.156	0	0	0	0	0	0	3	13.156	15.00%	4.77%					Kec. Sambikerep

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16		
		1.1.2. 02.02. 0024	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutama an Gender dan Anak					16 Kali	362.933	10	25.744	0	0	0	0	0	0	10	25.744	62.50%	7.09%					Kec. Sawahan		
		1.1.2. 02.02. 0025	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutama an Gender dan Anak					12 Kali	269.42	2	11.015	0	0	0	0	0	0	2	11.015	16.67%	4.09%					Kec. Semampir		
		1.1.2. 02.02. 0026	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutama an Gender dan Anak					20 Kali	263.064	6	10.667	0	0	0	0	0	0	6	10.667	30.00%	4.06%					Kec. Simokerto		
		1.1.2. 02.02. 0027	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutama an Gender dan Anak					20 Kali	389.82	18	41.79	0	0	0	0	0	0	18	41.79	90.00%	10.72%					Kec. Sukolilo		
		1.1.2. 02.02. 0028	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutama an Gender dan Anak					22 Kali	344.548	6	15.81	0	0	0	0	0	0	6	15.81	27.27%	4.59%					Kec. Sukomanung gal		
		1.1.2. 02.02. 0029	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutama an Gender dan Anak					22 Kali	433.311	6	35.787	0	0	0	0	0	0	6	35.787	27.27%	8.26%					Kec. Tambaksari		
		1.1.2. 02.02. 0030	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutama an Gender dan Anak					24 Kali	407.333	6	34.746	0	0	0	0	0	0	6	34.746	25.00%	8.53%					Kec. Tandes		
		1.1.2. 02.02. 0031	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutama an Gender dan Anak					23 Kali	283.299	4	7.662	0	0	0	0	0	0	4	7.662	17.39%	2.70%					Kec. Tegalsari		

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2. 02.02. 0032	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutama an Gender dan Anak					12 Kali	344.373	10	27.987	0	0	0	0	0	0	10	27.987	83.33%	8.13%					Kec. Tenggilis Mejoyo
		1.1.2. 02.02. 0033	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutama an Gender dan Anak					25 Kali	285.307	7	11.513	0	0	0	0	0	0	7	11.513	28.00%	4.04%					Kec. Wiyung
		1.1.2. 02.02. 0034	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutama an Gender dan Anak					21 Kali	374.436	8	41.315	0	0	0	0	0	0	8	41.315	38.10%	11.03%					Kec. Wonocolo
		1.1.2. 02.02. 0035	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutama an Gender dan Anak					25 Kali	412.778	7	44.023	0	0	0	0	0	0	7	44.023	28.00%	10.67%					Kec. Wonokromo
		1.1.2. 02.02. 0037	Penyelenggaraan Operasional Shelter	Jumlah shelter yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan					2 lembaga	1,228,795	2	203.397	0	0	0	0	0	0	2	203.397	100.00%	16.55%					Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.1.2. 02.02. 0038	Pengelolaan Tempat Penitipan Anak	jumlah tempat penitipan anak yang dikelola selama 12 bulan					1 lembaga	913.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.1.2. 03	Pangan																								
22	Meningkatkan ketersediaan, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan	1.1.2. 03.01	Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragama n, dan Keamanan Pangan			33,234,068		5,876,259		7,887,187		435.269		0		0		0		435.269		5.52%		5,876,259		17.68%	
			Tingkat keamanan bahan pangan segar yang beredar		85.00%		89.01 %		83.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		89.01%		104.72%		

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
				Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan	90.00%		98.04 %		86.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		98.04%		108.93%		
				Tingkat keanekaragaman konsumsi masyarakat (PPH)	96.5		96.76		96		0		0		0		0		0		0.00%		96.80%		100.31%		
		1.1.2.03.01.0001	Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan dan siap saji	Jumlah Sampel Yang Diperiksa					8097 sampel	1,710,904	0	73.456	0	0	0	0	0	0	0	73.456	0.00%	4.29%				Dinas Kesehatan	
		1.1.2.03.01.0002	Monitoring Bidang Ketahanan Pangan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam monitoring bidang ketahanan pangan					222 kali	299.677	54	61.99	0	0	0	0	0	0	54	61.99	24.32%	20.69%				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		1.1.2.03.01.0003	Pembinaan Keamanan Pangan yang beredar	Jumlah pelaksanaan pembinaan keamanan pangan yang beredar					12 kali	223.588	9	27.575	0	0	0	0	0	0	9	27.575	75.00%	12.33%				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		1.1.2.03.01.0005	Pembinaan Pemanfaatan Lahan Pekarangan	Jumlah kelompok pembinaan pemanfaatan lahan pekarangan					253 Kelompok	3,761,556	0	48.018	0	0	0	0	0	0	0	48.018	0.00%	1.28%				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		1.1.2.03.01.0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Produk Pangan Segar	Jumlah sampel produk pangan segar yang diawasi					2020 sampel	863.58	570	114.884	0	0	0	0	0	0	570	114.884	28.22%	13.30%				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		1.1.2.03.01.0007	Pengembangan Diversifikasi Pangan	Jumlah pelaksanaan Pengembangan Diversifikasi Pangan					59 kali	806.877	28	109.347	0	0	0	0	0	0	28	109.347	47.46%	13.55%				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		1.1.2.03.01.0008	Penyusunan Kajian Bidang Ketahanan Pangan	Jumlah Dokumen penyusunan Kajian Bidang Ketahanan Pangan					3 dokumen	221.004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		1.1.2.04	Pertanahan																								
23	Mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum	1.1.2.04.01	Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum			1,309,485,692		472,475,700		529,184,063		226,782,167		0		0		0		226,782,167		42.86%		472,475,700		36.08%	

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
				Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum	7,40 Ha		5.18 Ha		4,70 Ha		0,00 Ha		0,00 Ha		0,00 Ha		0,00 Ha		0,00 Ha		0.00%		5.18%		69.92%		
				Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	48,05 Ha		24.56 Ha		41,75 Ha		0,00 Ha		0,00 Ha		0,00 Ha		0,00 Ha		0,00 Ha		0.00%		24.56%		51.12%		
		1.1.2. 04.01. 0001	Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk infrastruktur	Jumlah lokasi tanah dan / atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan infrastruktur					5 lokasi	195,431,813	189	121,157,248	0	0	0	0	0	0	189	121,157,248	3,780.00 %	61.99%				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pemataan	
		1.1.2. 04.01. 0002	Pendataan dan Persiapan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah dokumen pendataan dan persiapan pengadaan tanah dan/atau bangunan					6 dokumen	5,306,374	0	554.546	0	0	0	0	0	0	0	554.546	0.00%	10.45%				Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	
		1.1.2. 04.01. 0006	Pengadaan/Pemb elian Tanah dan/atau Bangunan untuk Kepentingan Umum guna Pembangunan Non Infrastruktur	Lokasi tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan umum guna pembangunan non infrastruktur yang diadakan					6 lokasi	328,445,876	4	105,070,373	0	0	0	0	0	0	4	105,070,373	66.67%	31.99%				Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	
24	Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan	1.1.2. 04.02	Program pengamanan aset			43,026,498		10,472,261		17,126,971		1,954,903		0		0		0		1,954,903		11.41%		10,472,261		24.34%	
				Persentase tanah aset yang telah dilakukan pemagaran, papan, patok	21.18%		16.21 %		17.85%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		16.21%		76.52%		
				Persentase tanah aset yang tersertifikasi	14.52%		20.27 %		13.22%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		20.27%		139.61%		

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
				Persentase kasus tanah dan/ atau bangunan yang ditangani	100.00%		100.00 %		100.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		100.00%		
		1.1.2.04.02.0001	Penanganan Sengketa Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah sengketa bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani					12 obyek	1,302,915	3	154.705	0	0	0	0	0	0	3	154.705	25.00%	11.87%				Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	
		1.1.2.04.02.0002	Penanganan Sengketa Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah sengketa tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani					18 obyek	1,387,496	3	124.103	0	0	0	0	0	0	3	124.103	16.67%	8.94%				Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	
		1.1.2.04.02.0003	Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah tanah aset yang diamankan					100 bidang	4,894,444	33	591.078	0	0	0	0	0	0	33	591.078	33.00%	12.08%				Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	
		1.1.2.04.02.0004	Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah	Jumlah berkas arsip yang dikelola					47350 berkas	1,211,623	23675	242.393	0	0	0	0	0	0	23675	242.393	50.00%	20.01%				Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	
		1.1.2.04.02.0005	Pengendalian dan Penyuluhan Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah kegiatan penyuluhan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya					4 kali	1,624,100	1	161.039	0	0	0	0	0	0	1	161.039	25.00%	9.92%				Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	
		1.1.2.04.02.0006	Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah dokumen sertifikasi tanah aset yang diajukan					75 dokumen	4,895,738	72	511.23	0	0	0	0	0	0	72	511.23	96.00%	10.44%				Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	
		1.1.2.04.02.0007	Pengamanan Aset Infrastruktur Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah tanah aset Infrastruktur yang diamankan					40 bidang	1,810,655	10	170.356	0	0	0	0	0	0	10	170.356	25.00%	9.41%				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
		1.1.2.04.03	Program pengelolaan aset			94,121,367		16,524,885		21,658,700		3,361,851		0		0		0		3,361,851		15.52%		16,524,885		17.56%	
				Persentase aset tanah dan/atau bangunan yang tercatat pemanfaatannya	100.00%		65.52 %		62.62%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		65.52%		65.52%		

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100						16				
		1.1.2. 04.03. 0001	Pendataan dan Penataan Tanah Aset Pemerintah Kota	Jumlah dokumen hasil Pendataan dan penataan terhadap tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang dilaksanakan				2 dokumen	1,575,920	0	254.106	0	0	0	0	0	0	0	254.106	0.00%	16.12%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah			
		1.1.2. 04.03. 0002	Pelayanan Pemanfaatan Tanah Aset	Jumlah izin yang diterbitkan atas pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya				7000 izin	1,627,722	2273	569.288	0	0	0	0	0	0	2273	569.288	32.47%	34.97%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah			
		1.1.2. 04.03. 0003	Pengawasan dan Pengelolaan Bangunan Sewa	Jumlah bangunan yang diawasi dan dikelola				24 lokasi	14,683,708	24	2,404,455	0	0	0	0	0	0	24	2,404,455	100.00%	16.37%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah			
		1.1.2. 04.03. 0004	Pengukuran dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah lokasi tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang diukur dan dipetakan				8000 lokasi	3,137,956	2384	95.734	0	0	0	0	0	0	2384	95.734	29.80%	3.05%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah			
		1.1.2. 04.03. 0005	Perencanaan Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah dokumen Perencanaan Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya				4 dokumen	633.394	0	38.268	0	0	0	0	0	0	0	38.268	0.00%	6.04%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah			
		1.1.2. 05	Lingkungan Hidup																								
25	Meningkatkan Manajemen Pengelolaan dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.1.2. 05.01	Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau		463,163,48 2		119,623,30 1		128,711,75 6		12,418,523		0		0		0		12,418,523		9.65%		119,623,30 1	25.83%			
				Persentase pertumbuhan luas RTH yang dipelihara dan diawasi	10.24%		10.34 %		7.07%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		10.34%	100.93%			
				Persentase luas RTH yang dibangun dan ditingkatkan fungsinya	60.73%		84.39 %		50.76%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		84.39%	138.97%			
		1.1.2. 05.01. 0001	Pemeliharaan dan Penyediaan Sarana Taman dan Jalur Hijau	Jumlah lokasi taman dan jalur hijau yang dipelihara				401 lokasi	34,888,130	401	3,755,031	0	0	0	0	0	0	401	3,755,031	100.00%	10.76%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			
		1.1.2. 05.01. 0002	Pemeliharaan dan Penyediaan Sarana Taman Rekreasi	Jumlah lokasi taman rekreasi yang dipelihara				35 lokasi	16,894,137	35	2,478,717	0	0	0	0	0	0	35	2,478,717	100.00%	14.67%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2. 05.01. 0003	Penataan Taman dan Jalur Hijau	Jumlah taman dan jalur hijau yang ditata					71 lokasi	27,251,497	0	2,426,679	0	0	0	0	0	0	0	2,426,679	0.00%	8.90%					Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
		1.1.2. 05.01. 0004	Pengembangan Dekorasi Kota	Jumlah Pengembangan Dekorasi Kota yang Difasilitasi					15 lokasi	8,417,537	29	1,619,533	0	0	0	0	0	0	29	1,619,533	193.33%	19.24%					Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
		1.1.2. 05.01. 0005	Penyediaan Sarana dan Prasarana, Operasional dan Pemeliharaan Makam	Jumlah makam yang dipelihara					13 lokasi	11,853,528	13	1,739,133	0	0	0	0	0	0	13	1,739,133	100.00%	14.67%					Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
		1.1.2. 05.01. 0006	Pembangunan Hutan Kota dan Kebun Raya	Jumlah lokasi Hutan Kota dan Kebun Raya yang dibangun					4 lokasi	9,375,283	1	22.744	0	0	0	0	0	0	1	22.744	25.00%	0.24%					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		1.1.2. 05.01. 0008	Pemeliharaan Hutan Kota dan Kebun Raya	Jumlah lokasi Hutan Kota dan Kebun Raya yang Dipelihara					12 lokasi	3,371,186	12	365.791	0	0	0	0	0	0	12	365.791	100.00%	10.85%					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		1.1.2. 05.01. 0009	Pengawasan dan Rehabilitasi Kawasan Pesisir	Jumlah pelaksanaan Pengawasan dan Rehabilitasi Kawasan Pesisir					12 kali	1,039,068	4	3.094	0	0	0	0	0	0	4	3.094	33.33%	0.30%					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		1.1.2. 05.01. 0010	Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana Makam	Jumlah pembangunan/ rehabilitasi makam					63 Lokasi	15,621,390	0	7.8	0	0	0	0	0	0	0	7.8	0.00%	0.05%					Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
26	Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan	1.1.2. 05.02	Program pengelolaan kebersihan			1,834,156, 720		365,533,96 1		404,278,14 1		52,896,524		0		0		0		52,896,524		13.08%		365,533,96 1		19.93%	
				Persentase pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R	38.46%		14.81 %		23.08%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		14.81%		38.52%		
				Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	0.11%		12.58 %		0.07%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		12.58%		11,503,13 %		

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16		
				Persentase pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yang ≤ 1 hari	85.95%		90.37 %		83.78%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		90.37%		105.15%				
		1.1.2. 05.02. 0002	Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah	Jumlah instalasi pengolahan air limbah yang dioperasikan					1 lokasi	6,616,649	1	177.407	0	0	0	0	0	0	1	177.407	100.00%	2.68%				Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau			
		1.1.2. 05.02. 0003	Operasional Pembersihan Jalan dan Jalur Pedestrian	Jumlah lokasi pelaksanaan pembersihan jalan dan jalur pedestrian					573 lokasi	91,757,899	645	15,141,193	0	0	0	0	0	645	15,141,193	112.57%	16.50%				Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau				
		1.1.2. 05.02. 0004	Operasional Pembersihan Sampah di Saluran	Jumlah lokasi operasional pembersihan sampah di saluran					300 lokasi	17,745,531	710	2,895,309	0	0	0	0	0	710	2,895,309	236.67%	16.32%				Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau				
		1.1.2. 05.02. 0005	Operasional Pengangkutan Sampah	Jumlah lokasi pelaksanaan operasional pengangkutan sampah					267 lokasi	72,198,333	267	10,550,883	0	0	0	0	0	267	10,550,883	100.00%	14.61%				Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau				
		1.1.2. 05.02. 0006	Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Kebersihan dan RTH	Jumlah sarana dan prasarana kebersihan dan RTH yang disediakan					7906 unit	25,687,038	4	931.142	0	0	0	0	0	4	931.142	0.05%	3.62%				Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau				
		1.1.2. 05.02. 0007	Pembayaran Operasional Pengolahan Sampah	Jumlah Rekening Pengolahan Sampah yang Dibayar					1 rekening	119,293,629	3	19,947,454	0	0	0	0	0	3	19,947,454	300.00%	16.72%				Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau				
		1.1.2. 05.02. 0008	Operasional sarana dan prasarana Kebersihan	Jumlah sarana kebersihan yang dikelola					19 unit	6,188,383	0	275.177	0	0	0	0	0	0	275.177	0.00%	4.45%				Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau				
		1.1.2. 05.02. 0009	Pemeliharaan prasarana kebersihan dan sarana pendukungnya	Jumlah lokasi prasarana kebersihan yang dikelola					183 lokasi	7,113,252	183	421.456	0	0	0	0	0	183	421.456	100.00%	5.92%				Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau				
		1.1.2. 05.02. 0010	Pengembangan sarana dan prasarana air limbah	Jumlah lokasi penyediaan sarana dan prasarana air limbah yang disediakan					3 lokasi	1,287,421	2	2.6	0	0	0	0	0	2	2.6	66.67%	0.20%				Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau				
		1.1.2. 05.02. 0011	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Kebersihan dan RTH	Jumlah pelaksanaan peningkatan manajemen pengelolaan kebersihan dan RTH					4 kali	1,548,533	1	226.422	0	0	0	0	0	1	226.422	25.00%	14.62%				Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau				
		1.1.2. 05.02. 0012	Operasional dan Penyediaan Sarana Posko Kebersihan	Jumlah operasional peningkatan pelayanan posko kebersihan yang dilaksanakan					104 kali	3,568,903	55	204.885	0	0	0	0	0	55	204.885	52.88%	5.74%				Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau				

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16		
		1.1.2. 05.02. 0013	Penyelenggaraan Kompetisi Pengelolaan Lingkungan	Jumlah kompetisi pengelolaan kebersihan yang diselenggarakan					5 kali	3,475,050	2	96.767	0	0	0	0	0	0	2	96.767	40.00%	2.78%					Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		
		1.1.2. 05.02. 0014	Penyediaan Sarana, Operasional dan Pemeliharaan Pengelolaan Rumah Kompos/PLTSa/TP S 3R	Jumlah Rumah Kompos/PLTSa/ TPS 3R yang dikelola					33 lokasi	14,497,465	35	1,837,843	0	0	0	0	0	0	35	1,837,843	106.06%	12.68%					Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		
		1.1.2. 05.02. 0015	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					5 Kali	57.598	1	1.661	0	0	0	0	0	0	1	1.661	20.00%	2.88%					Kec. Asemrowo		
		1.1.2. 05.02. 0016	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					4 Kali	60.545	1	1.971	0	0	0	0	0	0	1	1.971	25.00%	3.25%					Kec. Benowo		
		1.1.2. 05.02. 0017	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					10 Kali	71.386	2	6.832	0	0	0	0	0	0	2	6.832	20.00%	9.57%					Kec. Bubutan		
		1.1.2. 05.02. 0018	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					6 Kali	95.5	2	5.83	0	0	0	0	0	0	2	5.83	33.33%	6.10%					Kec. Bulak		
		1.1.2. 05.02. 0019	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					4 Kali	64.584	2	4.989	0	0	0	0	0	0	2	4.989	50.00%	7.73%					Kec. Dukuh Pakis		
		1.1.2. 05.02. 0020	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					6 Kali	78.692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Kec. Gayungan		

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16		
		1.1.2. 05.02. 0021	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					12 Kali	68.524	3	4.334	0	0	0	0	0	0	3	4.334	25.00%	6.32%					Kec. Genteng		
		1.1.2. 05.02. 0022	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					6 Kali	191.453	1	2.567	0	0	0	0	0	0	1	2.567	16.67%	1.34%					Kec. Gubeng		
		1.1.2. 05.02. 0023	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					3 Kali	60.106	1	2.87	0	0	0	0	0	0	1	2.87	33.33%	4.77%					Kec. Gunung Anyar		
		1.1.2. 05.02. 0024	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					3 Kali	74.389	6	5.124	0	0	0	0	0	0	6	5.124	200.00%	6.89%					Kec. Jambangan		
		1.1.2. 05.02. 0025	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					9 Kali	65.929	3	6.086	0	0	0	0	0	0	3	6.086	33.33%	9.23%					Kec. Karangpilang		
		1.1.2. 05.02. 0026	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					6 Kali	62.435	4	1.563	0	0	0	0	0	0	4	1.563	66.67%	2.50%					Kec. Kenjeran		
		1.1.2. 05.02. 0027	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					12 Kali	90.255	3	5.882	0	0	0	0	0	0	3	5.882	25.00%	6.52%					Kec. Krembangan		
		1.1.2. 05.02. 0028	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					6 Kali	78.919	1	3.473	0	0	0	0	0	0	1	3.473	16.67%	4.40%					Kec. Lakarsantri		

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16		
		1.1.2. 05.02. 0029	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					6 Kali	68.407	1	2.069	0	0	0	0	0	0	1	2.069	16.67%	3.02%					Kec. Mulyorejo		
		1.1.2. 05.02. 0030	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					6 Kali	101.642	1	3.029	0	0	0	0	0	0	1	3.029	16.67%	2.98%					Kec. Pabean Cantian		
		1.1.2. 05.02. 0031	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					6 Kali	72.099	2	3.52	0	0	0	0	0	0	2	3.52	33.33%	4.88%					Kec. Pakal		
		1.1.2. 05.02. 0032	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					10 Kali	75.202	10	5.638	0	0	0	0	0	0	10	5.638	100.00%	7.50%					Kec. Rungkut		
		1.1.2. 05.02. 0033	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					3 Kali	65.763	1	2.824	0	0	0	0	0	0	1	2.824	33.33%	4.29%					Kec. Sambikerep		
		1.1.2. 05.02. 0034	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					12 Kali	96.795	3	11.625	0	0	0	0	0	0	3	11.625	25.00%	12.01%					Kec. Sawahan		
		1.1.2. 05.02. 0035	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					4 Kali	53.83	1	2.498	0	0	0	0	0	0	1	2.498	25.00%	4.64%					Kec. Semampir		
		1.1.2. 05.02. 0036	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					6 Kali	56.369	2	5.684	0	0	0	0	0	0	2	5.684	33.33%	10.08%					Kec. Simokerto		

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16		
		1.1.2. 05.02. 0037	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					4 Kali	52.507	1	1.481	0	0	0	0	0	0	1	1.481	25.00%	2.82%					Kec. Sukolilo		
		1.1.2. 05.02. 0038	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					4 Kali	65.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Kec. Sukomanung gal		
		1.1.2. 05.02. 0039	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					8 Kali	79.845	1	3.006	0	0	0	0	0	0	1	3.006	12.50%	3.76%					Kec. Tambaksari		
		1.1.2. 05.02. 0040	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					5 Kali	86.195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Kec. Tandes		
		1.1.2. 05.02. 0041	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					10 Kali	169.062	2	3.926	0	0	0	0	0	0	2	3.926	20.00%	2.32%					Kec. Tegalsari		
		1.1.2. 05.02. 0042	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					21 Kali	75.239	5	10.104	0	0	0	0	0	0	5	10.104	23.81%	13.43%					Kec. Tenggilis Mejoyo		
		1.1.2. 05.02. 0043	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					12 Kali	85.206	3	6.028	0	0	0	0	0	0	3	6.028	25.00%	7.07%					Kec. Wiyung		
		1.1.2. 05.02. 0044	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					2 Kali	55.655	1	2.77	0	0	0	0	0	0	1	2.77	50.00%	4.98%					Kec. Wonocolo		

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2. 05.02. 0045	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					10 Kali	73.903	2	5.607	0	0	0	0	0	0	2	5.607	20.00%	7.59%					Kec. Wonokromo
		1.1.2. 05.02. 0051	Penanganan Limbah B3	Jumlah kegiatan penanganan limbah B3 yang dilakukan					2 Kegiatan	3,181,434	0	65	0	0	0	0	0	0	0	65	0.00%	2.04%					Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
		1.1.2. 05.02. 0052	Penyediaan Sarana Prasarana Kebersihan (DAK)	Jumlah sarana prasarana kebersihan yang disediakan					2 unit	753.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
		1.1.2. 05.02. 0053	Layanan Pengolahan Sampah (DAK)	Jumlah Rekening Pengolahan Sampah yang Dibayar					1 Rekening	26,912,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
27	Meningkatkan kualitas udara dan air	1.1.2. 05.03	Program pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan		61,537,246		9,892,891		10,363,939		1,601,070		0		0		0		1,601,070		15.45%		9,892,891		16.08%		
			Persentase ketaatan/kepatuhan terhadap aspek lingkungan		95.00%		63.50 %		70.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		63.50%		66.84%		
		1.1.2. 05.03. 0001	Penyusunan Kajian dan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah dokumen kajian dan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah yang disusun					2 dokumen	442.656	0	58.749	0	0	0	0	0	0	0	58.749	0.00%	13.27%					Dinas Lingkungan Hidup
		1.1.2. 05.03. 0002	Pendukung Penilaian Adipura	Jumlah Kegiatan Pendukung Penilaian Adipura yang diselenggarakan					1 kali	177.149	0	8.516	0	0	0	0	0	0	0	8.516	0.00%	4.81%					Dinas Lingkungan Hidup
		1.1.2. 05.03. 0003	Monitoring Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah	Jumlah titik IPAL kegiatan monitoring pengelolaan air limbah					50 lokasi	233.184	10	18.382	0	0	0	0	0	0	10	18.382	20.00%	7.88%					Dinas Lingkungan Hidup
		1.1.2. 05.03. 0004	Pelaksanaan Car Free Day	Jumlah pelaksanaan Car Free Day					160 kali	2,400,226	41	532.53	0	0	0	0	0	0	41	532.53	25.63%	22.19%					Dinas Lingkungan Hidup

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2. 05.03. 0005	Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan	Jumlah kegiatan pelaksanaan pendidikan lingkungan yang diselenggarakan					14 kali	304.504	3	43.006	0	0	0	0	0	0	3	43.006	21.43%	14.12%					Dinas Lingkungan Hidup
		1.1.2. 05.03. 0006	Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup	Jumlah permasalahan lingkungan hidup yang ditangani					50 obyek	500.976	18	50.483	0	0	0	0	0	0	18	50.483	36.00%	10.08%					Dinas Lingkungan Hidup
		1.1.2. 05.03. 0007	Penyusunan Kajian Penanggulangan dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen kajian Penanggulangan dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup yang disusun					2 dokumen	199.41	0	13.032	0	0	0	0	0	0	0	13.032	0.00%	6.54%					Dinas Lingkungan Hidup
		1.1.2. 05.03. 0008	Inventarisasi dan Perencanaan Penataan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen inventarisasi dan perencanaan penataan lingkungan hidup yang disusun					2 dokumen	286.565	0	22.408	0	0	0	0	0	0	0	22.408	0.00%	7.82%					Dinas Lingkungan Hidup
		1.1.2. 05.03. 0009	Pengawasan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Jumlah kegiatan usaha yang diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya					254 lembaga	908.488	0	137.327	0	0	0	0	0	0	0	137.327	0.00%	15.12%					Dinas Lingkungan Hidup
		1.1.2. 05.03. 0011	Penyelenggaraan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang lingkungan	Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang diselenggarakan					6 kali	650.615	4	222.118	0	0	0	0	0	0	4	222.118	66.67%	34.14%					Dinas Lingkungan Hidup
		1.1.2. 05.03. 0012	Pengujian Kualitas Air dan Udara Ambien	Jumlah sampel air dan udara ambien yang diuji dan dianalisa					224 sampel	612.863	57	35.345	0	0	0	0	0	0	57	35.345	25.45%	5.77%					Dinas Lingkungan Hidup
		1.1.2. 05.03. 0013	Pemantauan dan Sosialisasi Pengguna Sumber Daya Air	Jumlah kegiatan/ usaha pengguna sumber daya air yang dipantau					30 lembaga	190.966	0	29.91	0	0	0	0	0	0	0	29.91	0.00%	15.66%					Dinas Lingkungan Hidup

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8								12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2. 05.03. 0014	Pengendalian Pencemaran Udara Melalui Uji Emisi Gas Buang	Jumlah Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor yang Dilaksanakan					48 kali	2,175,242	12	307.635	0	0	0	0	0	0	12	307.635	25.00%	14.14%					Dinas Perhubungan
		1.1.2. 05.03. 0015	Pemantauan Kualitas Air Laut di Kawasan Pesisir	Jumlah sampel air laut yang diambil dan diuji untuk pengendalian pencemaran kawasan pesisir dan laut					48 sampel	407.366	12	68.841	0	0	0	0	0	0	12	68.841	25.00%	16.90%					Dinas Lingkungan Hidup
		1.1.2. 05.03. 0016	Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Monitoring Udara Ambien dan Data Display	Jumlah stasiun monitoring udara ambien yang dipelihara					2 unit	873.728	2	52.789	0	0	0	0	0	0	2	52.789	100.00%	6.04%					Dinas Lingkungan Hidup
28	Meningkatkan upaya penerapan konservasi energi	1.1.2. 05.05	Program Upaya Konservasi Energi			1,615,560		266.353		509.489		87.57		0		0		0		87.57		17.19%		266.353		16.49%	
				Akumulasi kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi	164,00 kegiatan dan /atau usaha		245,00 kegiatan dan /atau usaha		144,00 kegiatan dan /atau usaha		0,00 kegiatan dan /atau usaha		0,00 kegiata n dan /atau usaha		0,00 kegiata n dan /atau usaha		0,00 kegiatan dan /atau usaha		0,00 kegiatan dan /atau usaha		0.00%		245.00%		149.39%		
		1.1.2. 05.05. 0001	Pembinaan Pengusahaan Konservasi Energi	Jumlah kegiatan/usaha yang mendapatkan pembinaan pengusahaan konservasi energi					120 lembaga	509.489	0	87.57	0	0	0	0	0	0	0	87.57	0.00%	17.19%					Dinas Lingkungan Hidup
29	Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembang an dan pemanfaatan energi alternatif	1.1.2. 05.08	Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif			23,121,683		2,542,790		2,700,313		12.387		0		0		0		12.387		0.46%		2,542,790		11.00%	
				Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembang an dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan	49,00 unit		45.00 unit		41,00 unit		0,00 unit		0,00 unit		0,00 unit		0,00 unit		0,00 unit		0.00%		54.00%		110.20%		

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100	16			
				Akumulasi entitas lingkungan yang berperan serta dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	14,00 lingkungan			7,00 lingkungan		10,00 lingkungan		0,00 lingkungan		0,00 lingkungan		0,00 lingkungan		0,00 lingkungan		0,00 lingkungan		0,00%		7,00%		50,00%			
		1.1.2.05.08.0002	Penyediaan Sarana dalam rangka Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung dan Permukiman	Jumlah Sarana dalam rangka Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung dan Permukiman yang disediakan					11 unit	2,208,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		
		1.1.2.05.08.0003	Penyusunan Dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman	Jumlah dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman yang disusun					4 dokumen	247.141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		
		1.1.2.05.08.0004	Pendampingan Pengembangan Energi Alternatif di Masyarakat	Jumlah lokasi pendampingan dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif					2 lokasi	244.481	0	12.387	0	0	0	0	0	0	0	12.387	0,00%	5,07%					Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		
		1.1.2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																										
30	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.1.2.06.01	Program Penataan Administrasi Kependudukan			501,414,988		18,180,208		24,141,552		1,312,985		0		0		0		1,312,985		5.44%		18,180,208		3.63%			
				Persentase ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	99.94%		100.00 %		99.69%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		100.06%				
				Cakupan penerbitan akta kelahiran (berdasarkan data SIAK)	99.94%		100.00 %		99.69%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		100.06%				

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16		
				Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP dan KK)	100.00%		99.46 %		100.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		99.46%		99.46%				
				Cakupan penerbitan akte kematian (berdasarkan data SIAK)	89.51%		100.00 %		87.55%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		111.72%						
				Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	93.96%		100.00 %		93.94%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		106.43%						
				Persentase jenis data kependudukan yang dimanfaatkan	100.00%		100.00 %		100.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		100.00%						
				Persentase sistem pelayanan publik berbasis SIAK	100.00%		100.00 %		100.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		100.00%						
				Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100.00%		99.14 %		100.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		99.14%		99.14%						
		1.1.2.06.01.0001	Pelayanan Kartu Keluarga dan KTP-el	Jumlah berkas permohonan kartu keluarga dan KTP-el yang dilayani					300000 berkas	807.493	193921	10.4	0	0	0	0	0	0	193921	10.4	64.64%	1.29%				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
		1.1.2.06.01.0003	Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk Musiman	Jumlah permohonan berkas pindah datang dan pendataan penduduk musiman					40930 berkas	502.358	12346	128.666	0	0	0	0	0	0	12346	128.666	30.16%	25.61%				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
		1.1.2.06.01.0004	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah sistem informasi administrasi kependudukan yang dikembangkan dan dipelihara					6 sistem	1,139,088	6	162.736	0	0	0	0	0	0	6	162.736	100.00%	14.29%				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
		1.1.2.06.01.0005	Pemberian Pelayanan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen layanan data kependudukan yang diberikan					12 dokumen	964.754	24	96.011	0	0	0	0	0	0	24	96.011	200.00%	9.95%				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2. 06.01. 0006	Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian	Jumlah berkas permohonan akta kelahiran dan kematian yang dilayani					75130 berkas	478.555	25760	76.53	0	0	0	0	0	0	25760	76.53	34.29%	15.99%					Dinas Kependuka n dan Pencatatan Sipil
		1.1.2. 06.01. 0007	Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan	Jumlah berkas permohonan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegara an yang dilayani					3250 berkas	455.643	1475	29.572	0	0	0	0	0	0	1475	29.572	45.38%	6.49%					Dinas Kependuka n dan Pencatatan Sipil
		1.1.2. 06.01. 0008	Pelayanan kerjasama pemanfaatan data dan rekomendasi inovasi pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Pelayanan kerjasama pemanfaatan data dan rekomendasi inovasi pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil					7 dokumen	410.896	1	30.363	0	0	0	0	0	0	1	30.363	14.29%	7.39%					Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil
		1.1.2. 06.01. 0009	Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)	Jumlah Blanko dan Formulir Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang bersumber dari DAK yang disediakan					200000 berkas	6,439,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil
		1.1.2. 06.01. 0010	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani					14412 berkas	222.941	3605	11.354	0	0	0	0	0	0	3605	11.354	25.01%	5.09%					Kec. Asemrowo
		1.1.2. 06.01. 0011	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani					22340 berkas	241.188	7686	10.508	0	0	0	0	0	0	7686	10.508	34.40%	4.36%					Kec. Benowo
		1.1.2. 06.01. 0012	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani					15057 berkas	438.801	3132	31.49	0	0	0	0	0	0	3132	31.49	20.80%	7.18%					Kec. Bubutan
		1.1.2. 06.01. 0013	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani					11186 berkas	278.712	4036	13.328	0	0	0	0	0	0	4036	13.328	36.08%	4.78%					Kec. Bulak
		1.1.2. 06.01. 0014	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani					12616 berkas	272.821	4864	14.102	0	0	0	0	0	0	4864	14.102	38.55%	5.17%					Kec. Dukuh Pakis

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16		
		1.1.2. 06.01. 0015	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani					5326 berkas	289.771	1090	11.88	0	0	0	0	0	0	1090	11.88	20.47%	4.10%					Kec. Gayungan		
		1.1.2. 06.01. 0016	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani					14463 berkas	359.36	4223	24.156	0	0	0	0	0	0	4223	24.156	29.20%	6.72%					Kec. Genteng		
		1.1.2. 06.01. 0017	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani					25178 berkas	575.837	6297	32.192	0	0	0	0	0	0	6297	32.192	25.01%	5.59%					Kec. Gubeng		
		1.1.2. 06.01. 0018	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani					11226 berkas	289.303	2716	11.544	0	0	0	0	0	0	2716	11.544	24.19%	3.99%					Kec. Gunung Anyar		
		1.1.2. 06.01. 0019	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani					12785 berkas	250.541	5010	13.108	0	0	0	0	0	0	5010	13.108	39.19%	5.23%					Kec. Jambangan		
		1.1.2. 06.01. 0020	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani					7397 berkas	273.975	4175	15.756	0	0	0	0	0	0	4175	15.756	56.44%	5.75%					Kec. Karangpilang		
		1.1.2. 06.01. 0021	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani					72000 berkas	282.852	5654	16.626	0	0	0	0	0	0	5654	16.626	7.85%	5.88%					Kec. Kenjeran		
		1.1.2. 06.01. 0022	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani					28440 berkas	383.963	4141	20.267	0	0	0	0	0	0	4141	20.267	14.56%	5.28%					Kec. Krembangan		
		1.1.2. 06.01. 0023	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani					5336 berkas	373.473	3483	13.552	0	0	0	0	0	0	3483	13.552	65.27%	3.63%					Kec. Lakarsantri		
		1.1.2. 06.01. 0024	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani					16551 berkas	371.462	2849	19.807	0	0	0	0	0	0	2849	19.807	17.21%	5.33%					Kec. Mulyorejo		
		1.1.2. 06.01. 0025	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani					18209 berkas	339.103	6723	26.509	0	0	0	0	0	0	6723	26.509	36.92%	7.82%					Kec. Pabean Cantian		
		1.1.2. 06.01. 0026	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani					15500 berkas	307.729	2750	14.269	0	0	0	0	0	0	2750	14.269	17.74%	4.64%					Kec. Pakal		
		1.1.2. 06.01. 0027	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani					15963 berkas	484.697	5477	39.696	0	0	0	0	0	0	5477	39.696	34.31%	8.19%					Kec. Rungkut		
		1.1.2. 06.01. 0028	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani					9318 berkas	319.639	5114	16.791	0	0	0	0	0	0	5114	16.791	54.88%	5.25%					Kec. Sambikerep		

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2. 06.01. 0029	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani					40320 berkas	538.804	6991	54.308	0	0	0	0	0	0	6991	54.308	17.34%	10.08%					Kec. Sawahan
		1.1.2. 06.01. 0030	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani					24931 berkas	403.946	13175	39.349	0	0	0	0	0	0	13175	39.349	52.85%	9.74%					Kec. Semampir
		1.1.2. 06.01. 0031	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani					20400 berkas	406.502	4701	20.307	0	0	0	0	0	0	4701	20.307	23.04%	5.00%					Kec. Simokerto
		1.1.2. 06.01. 0032	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani					22442 berkas	486.579	6841	28.345	0	0	0	0	0	0	6841	28.345	30.48%	5.83%					Kec. Sukolilo
		1.1.2. 06.01. 0033	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani					26312 berkas	326.36	3187	17.952	0	0	0	0	0	0	3187	17.952	12.11%	5.50%					Kec. Sukomanung gal
		1.1.2. 06.01. 0034	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani					39620 berkas	562.589	9893	43.955	0	0	0	0	0	0	9893	43.955	24.97%	7.81%					Kec. Tambaksari
		1.1.2. 06.01. 0035	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani					20944 berkas	462.524	6201	36.287	0	0	0	0	0	0	6201	36.287	29.61%	7.85%					Kec. Tandes
		1.1.2. 06.01. 0036	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani					14557 berkas	382.26	4519	20.931	0	0	0	0	0	0	4519	20.931	31.04%	5.48%					Kec. Tegalsari
		1.1.2. 06.01. 0037	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani					17850 berkas	263.181	2244	16.734	0	0	0	0	0	0	2244	16.734	12.57%	6.36%					Kec. Tenggilis Mejoyo
		1.1.2. 06.01. 0038	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani					7253 berkas	351.03	4515	18.09	0	0	0	0	0	0	4515	18.09	62.25%	5.15%					Kec. Wiyung
		1.1.2. 06.01. 0039	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani					24000 berkas	375.934	5374	17.66	0	0	0	0	0	0	5374	17.66	22.39%	4.70%					Kec. Wonocolo
		1.1.2. 06.01. 0040	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani					32522 berkas	504.122	7400	29.678	0	0	0	0	0	0	7400	29.678	22.75%	5.89%					Kec. Wonokromo
		1.1.2. 06.01. 0041	Penyusunan Dokumen Kependudukan	Jumlah dokumen kependudukan yang disusun					2 dokumen	432.663	0	25.644	0	0	0	0	0	0	0	25.644	0.00%	5.93%					Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2. 06.01. 0042	Pelayanan Informasi Bidang Kependudukan	Jumlah kegiatan Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan					24 kali	716.728	0	52.533	0	0	0	0	0	0	0	52.533	0.00%	7.33%					Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil
		1.1.2. 06.01. 0043	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pelayanan Bidang Kependudukan	Jumlah peserta pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pelayanan Bidang Kependudukan					213 orang	224.17	213	0	0	0	0	0	0	0	213	0	100.00%	0.00%					Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil
		1.1.2. 06.01. 0044	Penyusunan Analisa Regulasi Bidang Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen analisa regulasi Bidang Administrasi Kependudukan yang disusun					1 dokumen	149.749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil
		1.1.2. 08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																								
31	Meningkatnya kualitas layanan KB dasar	1.1.2. 08.01	Program Keluarga Berencana			24,895,562		5,450,968		8,991,758		1,012,839		0		0		0		1,012,839		11.26%		5,450,968		21.90%	
				Persentase peserta KB baru	84.35%		97.90 %		82.75%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		30.66%		36.35%		
				Persentase peserta KB aktif	80.95%		80.28 %		79.60%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		80.14%		99.00%		
				Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi	4.90%		3.20 %		5.25%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.16%		3.17%		
				Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	19.95%		19.78 %		20.20%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		19.19%		96.19%		
		1.1.2. 08.01. 0001	Pembinaan Saka Kencana	jumlah Pembinaan Saka Kencana					1 kali	194.552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2. 08.01. 0002	Fasilitasi Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	Jumlah orang Yang Mengikuti Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana					1740 orang	1,844,640	1566	399.262	0	0	0	0	0	0	1566	399.262	90.00%	21.64%					Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.1.2. 08.01. 0003	Pembinaan Keluarga Berencana	jumlah orang yang mengikuti pembinaan Keluarga Berencana					1718 orang	581.879	0	35.384	0	0	0	0	0	0	0	35.384	0.00%	6.08%					Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.1.2. 08.01. 0004	Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga	Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan KB					775 orang	1,289,058	184	192.365	0	0	0	0	0	0	184	192.365	23.74%	14.92%					Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.1.2. 08.01. 0005	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana					2 unit	1,060,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.1.2. 08.01. 0007	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)	jumlah lembaga yang mendapat Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)					32 lembaga	3,894,200	32	385.828	0	0	0	0	0	0	32	385.828	100.00%	9.91%					Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.1.2. 08.01. 0008	Penyusunan Profil Pengendalian Penduduk	Jumlah dokumen profil pengendalian penduduk yang disusun					1 dokumen	127.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.1.2. 08.02	Program Bina Keluarga			3,941,955		1,903,907		1,673,382		344		0		0		0		344		20.56%		1,903,907		48.30%	

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
				Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif	100.00%		100.00 %		92.89%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		100.00%		
				Persentase Pasangan Usia Subur yang Usia Istrinya Kurang dari 20 Tahun	3.00%		0.07 %		3.20%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.01%		0.40%				
		1.1.2.08.02.0001	Pembinaan terhadap Pendamping Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia	Jumlah pendamping yang mengikuti pembinaan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia yang didampingi					1350 orang	539.391	713	213.633	0	0	0	0	0	0	713	213.633	52.81%	39.61%				Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak	
		1.1.2.08.02.0002	Pembinaan Keluarga Sejahtera	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan keluarga sejahtera					1280 orang	548.505	41	56.972	0	0	0	0	0	0	41	56.972	3.20%	10.39%				Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak	
		1.1.2.08.02.0003	Penyelenggaraan Operasional PUSPAGA	Jumlah Puspaga yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan					2 lembaga	585.486	2	73.395	0	0	0	0	0	0	2	73.395	100.00%	12.54%				Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak	
32	Meningkatkan keterampilan PMKS usia produktif	1.1.2.08.03	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat			105,496,444		5,411,826		3,798,708		489.732		0		0		0		489.732		12.89%		5,411,826		5.13%	
				Persentase PMKS usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi	75.00%		100.00 %		75.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		133.33%		

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16		
		1.1.2. 08.03. 0002	Fasilitasi dan Pendampingan Inkubasi Usaha Mandiri	Jumlah orang yang difasilitasi dan mendapatkan pendampingan inkubasi usaha mandiri					300 orang	1,817,592	138	216.316	0	0	0	0	0	0	138	216.316	46.00%	11.90%					Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak		
		1.1.2. 08.03. 0003	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Jumlah lembaga yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha ekonomi					63 lembaga	1,653,543	0	224.097	0	0	0	0	0	0	0	224.097	0.00%	13.55%					Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak		
		1.1.2. 08.03. 0004	Evaluasi Inkubasi Usaha Mandiri	Jumlah dokumen evaluasi inkubasi usaha mandiri					12 dokumen	327.573	3	49.319	0	0	0	0	0	0	3	49.319	25.00%	15.06%					Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak		
		1.1.2. 09	Perhubungan																										
33	Menyediakan sistem manajemen transportasi yang berkualitas	1.1.2. 09.01	Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi			1,068,216, 370		211,780,95 5		277,095,02 0		33,915,576		0		0		0		33,915,576		12.24%		211,780,95 5		19.83%			
				Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	32,53 km/jam		49.73 km/jam		31,27 km/jam		0,00 km/jam		0,00 km/jam		0,00 km/jam		0,00 km/jam		0,00 km/jam		0.00%		50.65%		155.71%				
				Persentase selisih tingkat kecelakaan lalu lintas	2.00%		11.71 %		2.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		20.24%		1,011,86 %				
		1.1.2. 09.01. 0001	Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Melaksanakan Uji KIR					149069 unit	8,464,223	40047	1,053,266	0	0	0	0	0	0	40047	1,053,266	26.86%	12.44%					Dinas Perhubungan		
		1.1.2. 09.01. 0002	Pembangunan Prasarana Transportasi	Jumlah Bangunan Prasarana Transportasi Yang Dibangun					2 bangunan	8,618,410	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	300.00%	0.00%					Dinas Perhubungan		

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		1.1.2. 09.01. 0003	Pembangunan Prasarana Transportasi (Tahun Jamak/Multiyears)	Jumlah Bangunan Prasarana Transportasi Yang Dibangun (Tahun Jamak/Multiyear s)			1 bangunan	116,027,674	1	22,240,850	0	0	0	0	0	0	1	22,240,850	100.00%	19.17%					Dinas Perhubungan		
		1.1.2. 09.01. 0004	Pengawasan dan Pengendalian sarana Angkutan Jalan	Jumlah Sarana Angkutan Jalan yang Diawasai dan Dikendalikan selama 12 bulan			7 Jenis	3,511,104	12	485.788	0	0	0	0	0	0	12	485.788	171.43%	13.84%					Dinas Perhubungan		
		1.1.2. 09.01. 0005	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan yang Dipelihara	Jumlah Perengkapan Jalan yang Dipelihara			5 Jenis	15,182,391	7	1,275,196	0	0	0	0	0	0	7	1,275,196	140.00%	8.40%					Dinas Perhubungan		
		1.1.2. 09.01. 0006	Pemeliharaan Prasarana Transportasi	Jumlah Lokasi Prasarana Transportasi yang Dipelihara			36 lokasi	7,199,870	1	788.749	0	0	0	0	0	0	1	788.749	2.78%	10.96%					Dinas Perhubungan		
		1.1.2. 09.01. 0007	Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas selama 12 bulan			365 Kali	15,225,184	90	1,530,635	0	0	0	0	0	0	90	1,530,635	24.66%	10.05%					Dinas Perhubungan		
		1.1.2. 09.01. 0008	Pengadaan Perlengkapan Jalan yang Diadakan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Diadakan			2510 unit	55,962,804	301	682.612	0	0	0	0	0	0	301	682.612	11.99%	1.22%					Dinas Perhubungan		
		1.1.2. 09.01. 0010	Penyelenggaraan Perparkiran	Jumlah Tempat Parkir yang Diselenggarakan selama 12 bulan			1684 Lokasi	19,413,594	1717	3,624,587	0	0	0	0	0	0	1717	3,624,587	101.96%	18.67%					Dinas Perhubungan		
		1.1.2. 09.01. 0011	Perencanaan dan Pengawasan Prasarana Transportasi	Jumlah Paket Perencanaan dan Pengawasan Prasarana Transportasi			33 Paket	5,888,513	0	294.049	0	0	0	0	0	0	0	294.049	0.00%	4.99%					Dinas Perhubungan		
		1.1.2. 09.01. 0012	Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor	Jumlah Kegiatan Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor			5 Kali	10,136,241	0	686.486	0	0	0	0	0	0	0	686.486	0.00%	6.77%					Dinas Perhubungan		
		1.1.2. 09.01. 0013	Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Yang Tersusun			17 dokumen	3,226,418	0	115.175	0	0	0	0	0	0	0	115.175	0.00%	3.57%					Dinas Perhubungan		

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2. 09.01. 0014	Penyelenggaraan Sarana Transportasi Bagi Pelajar	Jumlah sarana transportasi pelajar yang diselenggarakan selama 12 bulan					8 unit	1,235,084	24	187.485	0	0	0	0	0	0	24	187.485	300.00%	15.18%					Dinas Perhubungan
		1.1.2. 09.01. 0016	Pengelolaan Parkir Tempat Khusus	Jumlah Tempat Khusus Parkir yang Dikelola selama 12 bulan					118 Lokasi	7,003,510	135	950.7	0	0	0	0	0	0	135	950.7	114.41%	13.57%					Dinas Perhubungan
34	Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang berkualitas dan ramah lingkungan	1.1.2. 09.02	Program pengembangan sistem transportasi berkelanjutan			178,518,29 4		61,526,214		49,551,361		7,049,458		0		0		0		7,049,458		14.23%		61,526,214		34.46%	
				Rata-rata headway angkutan umum (Angkot/feeder)	23,00 menit		26.84 menit		25,00 menit		0,00 menit		0,00 menit		0,00 menit		0,00 menit		0,00 menit		0.00%		26.84%		116.70%		
				Rata-rata headway angkutan umum (Bus Kota)	40,54 menit		41.93 menit		42,50 menit		0,00 menit		0,00 menit		0,00 menit		0,00 menit		0,00 menit		0.00%		41.93%		103.44%		
				Persentase penyediaan sarana prasarana pendukung transportasi berkelanjutan	100.00%		100.00 %		100.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		100.00%		
		1.1.2. 09.02. 0001	Pengelolaan Terminal Angkutan Umum	Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan					14 Lokasi	27,924,729	14	4,446,542	0	0	0	0	0	0	14	4,446,542	100.00%	15.92%					Dinas Perhubungan
		1.1.2. 09.02. 0002	Penyelenggaraan Transportasi Umum Perkotaan	Jumlah Transportasi Umum Perkotaan yang Diselenggarakan					20 unit	16,203,926	20	2,380,241	0	0	0	0	0	0	20	2,380,241	100.00%	14.69%					Dinas Perhubungan
		1.1.2. 09.02. 0003	Perencanaan Angkutan Umum Perkotaan	Jumlah dokumen Perencanaan Angkutan Umum Perkotaan yang disusun					7 Dokumen	5,422,705	0	222.675	0	0	0	0	0	0	0	222.675	0.00%	4.11%					Dinas Perhubungan
35	Peningkatan sistem manajemen city logistik	1.1.2. 09.03	Program manajemen lalu lintas angkutan barang			2,447,798		614.74		803.19		0		0		0		0		0		0.00%		614.74		25.11%	

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
				Rata-rata waktu tempuh kendaraan barang dari dan menuju hub	90,30 menit		100,22 menit		100,33 menit		0,00 menit		0,00 menit		0,00 menit		0,00 menit		0,00 menit		0,00%		100,22%		110,98%		
		1.1.2.09.03.0001	Penyelenggaraan Pelayanan Aksesibilitas Angkutan Barang	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Survey Aksesibilitas Angkutan Barang					2 kali	803.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%				Dinas Perhubungan	
		1.1.2.10	Komunikasi dan Informatika serta Persandian																								
36	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.1.2.10.01	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi			319,294,870		53,386,809		64,065,620		1,279,242		0		0		0		1,279,242		2,00%		53,386,809		16,72%	
				Persentase layanan publik administratif yang berbasis TIK	45,74%		35,11 %		38,65%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		35,11%		76,76%		
				Persentase pengelolaan jaringan telekomunikasi pendukung pelayanan publik	100,00%		100,00 %		100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%		100,00%		
		1.1.2.10.01.0001	Layanan Sistem Informasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Laporan Pengaduan Layanan Sistem Informasi Pemerintahan					12 dokumen	330.14	3	12.932	0	0	0	0	0	0	3	12.932	25,00%	3,92%				Dinas Komunikasi dan Informatika	
		1.1.2.10.01.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi Informasi yang Disusun					1 dokumen	342.501	0	29,017	0	0	0	0	0	0	0	29,017	0,00%	8,47%				Dinas Komunikasi dan Informatika	
		1.1.2.10.01.0003	Pelaksanaan Sistem Persandian Perkotaan	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasaran Persandian					930 unit	1,806,270	293	201.895	0	0	0	0	0	0	293	201.895	31,51%	11,18%				Dinas Komunikasi dan Informatika	
		1.1.2.10.01.0004	Pembangunan Integrasi Sistem	Jumlah Integrasi Sistem yang Dibangun					3 basis data	420.18	0	41.719	0	0	0	0	0	0	0	41.719	0,00%	9,93%				Dinas Komunikasi dan Informatika	

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2. 10.01. 0005	Pembangunan Sarana Prasarana TIK	Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana TIK					5 jenis	12,360,454	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	20.00%	0.00%					Dinas Komunikasi dan Informatika
		1.1.2. 10.01. 0006	Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik Dan Sistem Informasi Manajemen	Jumlah Aplikasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang Dibangun					15 aplikasi	828.941	0	125.087	0	0	0	0	0	0	0	125.087	0.00%	15.09%					Dinas Komunikasi dan Informatika
		1.1.2. 10.01. 0007	Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen	Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang dipelihara dan dikembangkan					134 sistem	1,127,681	134	169.742	0	0	0	0	0	134	169.742	100.00%	15.05%					Dinas Komunikasi dan Informatika	
		1.1.2. 10.01. 0008	Pemeliharaan Sarana Prasarana TIK	Jumlah Pemeliharaan Sarana Prasarana TIK					5 jenis	40,055,046	0	484.678	0	0	0	0	0	0	0	484.678	0.00%	1.21%					Dinas Komunikasi dan Informatika
		1.1.2. 10.01. 0009	Pengelolaan Pusat Data	Jumlah Pusat Data yang dikelola					2 Lokasi	2,866,231	2	11.258	0	0	0	0	0	0	2	11.258	100.00%	0.39%					Dinas Komunikasi dan Informatika
		1.1.2. 10.01. 0010	Penanganan Serangan terhadap Sistem Keamanan Informasi	Persentase Serangan terhadap Sistem Keamanan Informasi yang ditangani					100 persen	3,460,900	100	177.837	0	0	0	0	0	0	100	177.837	100.00%	5.14%					Dinas Komunikasi dan Informatika
		1.1.2. 10.01. 0011	Penyusunan Dokumen Pendukung Tata Kelola E-Gov	Jumlah Dokumen Pendukung Tata Kelola e-Gov yang disusun					1 dokumen	467.276	0	25.078	0	0	0	0	0	0	0	25.078	0.00%	5.37%					Dinas Komunikasi dan Informatika
		1.1.2. 10.02	Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat			106,901,316		20,514,531		25,003,526		3,331,100		0		0		0		3,331,100		13.32%		20,514,531		19.19%	
				Persentase berita positif Pemerintah Kota Surabaya yang terinformasika n kepada masyarakat	85.00%		87.95 %		84.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		87.95%		103.47%		

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
				Rata-rata pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya	10,254,00 kunjungan		42,303.67 kunjungan		9,481,00 kunjungan		0,00 kunjungan		0,00 kunjungan		0,00 kunjungan		0,00 kunjungan		0,00 kunjungan		0,00 kunjungan		0,00 kunjungan		0,00 kunjungan		
		1.1.2.10.02.0001	Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah peliputan kegiatan pemerintah kota Surabaya					1990 kali	7,307,333	466	1,410,417	0	0	0	0	0	0	466	1,410,417	23.42%	19.30%					Bagian Hubungan Masyarakat
		1.1.2.10.02.0003	Penyelenggaraan Event Kehumasan	Jumlah pelaksanaan event kehumasan					20 kali	294.72	3	3	0	0	0	0	0	0	3	3	15.00%	1.02%					Bagian Hubungan Masyarakat
		1.1.2.10.02.0004	Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Komunikasi	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan KIM					4 Kali	1,166,410	1	68.893	0	0	0	0	0	0	1	68.893	25.00%	5.91%					Dinas Komunikasi dan Informatika
		1.1.2.10.02.0005	Penyusunan Dokumen Analisa Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Analisa Data Dan Informasi Pemerintah Daerah yang disusun					5 dokumen	976.3	0	70.03	0	0	0	0	0	0	0	70.03	0.00%	7.17%					Dinas Komunikasi dan Informatika
		1.1.2.10.02.0006	Penyusunan Dokumen Pelayanan Keluhan masyarakat, Permintaan dan Dokumentasi Informasi Publik	Jumlah dokumen Pelayanan Keluhan masyarakat, Permintaan dan Dokumentasi Informasi Publik yang disusun					13 dokumen	1,000,583	3	149.458	0	0	0	0	0	0	3	149.458	23.08%	14.94%					Dinas Komunikasi dan Informatika
		1.1.2.10.02.0007	Pengelolaan Saluran Komunikasi	Jumlah saluran komunikasi yang dikelola					19 Saluran	990.583	19	87.611	0	0	0	0	0	0	19	87.611	100.00%	8.84%					Dinas Komunikasi dan Informatika
		1.1.2.10.02.0008	Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi	Jumlah Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi yang dilaksanakan					4 Jenis	1,357,558	2	204.974	0	0	0	0	0	0	2	204.974	50.00%	15.10%					Dinas Komunikasi dan Informatika
		1.1.2.10.02.0009	Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Jumlah Kegiatan Publikasi Penyelenggaraa n Pembangunan Daerah yang Dilaksanakan					4 Jenis	3,479,721	3	289.529	0	0	0	0	0	0	3	289.529	75.00%	8.32%					Dinas Komunikasi dan Informatika

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2. 10.02. 0010	Penyelenggaraan Pembelajaran Sistem Informasi Pemerintahan dan Publik	Jumlah BLC yang melaksanakan Pembelajaran Sistem Informasi Pemerintahan dan Publik					49 lembaga	5,652,987	49	623.069	0	0	0	0	0	0	49	623.069	100.00%	11.02%					Dinas Komunikasi dan Informatika
		1.1.2. 10.02. 0011	Penyusunan Dokumentasi Profil Kota Surabaya	Jumlah dokumentasi profil kota Surabaya yang disusun					8 dokumen	874.911	2	107.53	0	0	0	0	0	0	2	107.53	25.00%	12.29%					Bagian Hubungan Masyarakat
		1.1.2. 10.02. 0012	Penerbitan Majalah Gapura	Jumlah majalah Gapura yang diterbitkan					40440 Eksemplar	1,093,981	10110	241.355	0	0	0	0	0	0	10110	241.355	25.00%	22.06%					Bagian Hubungan Masyarakat
		1.1.2. 10.02. 0013	Penyusunan Data dan Informasi Publikasi	Jumlah dokumen penyusunan data dan informasi publikasi yang disusun					2 dokumen	175.858	0	15.5	0	0	0	0	0	0	0	15.5	0.00%	8.81%					Bagian Hubungan Masyarakat
		1.1.2. 10.02. 0014	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Kehumasan	Jumlah kegiatan forum komunikasi kehumasan					149 kali	533.505	17	52.035	0	0	0	0	0	0	17	52.035	11.41%	9.75%					Bagian Hubungan Masyarakat
		1.1.2. 10.02. 0015	Evaluasi Kinerja Kehumasan	Jumlah dokumen evaluasi kehumasan					1 dokumen	99.075	0	7.7	0	0	0	0	0	0	0	7.7	0.00%	7.77%					Bagian Hubungan Masyarakat
		1.1.2. 11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah																								
37	Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa	1.1.2. 11.02	Program perkuatan permodalan usaha mikro			1,181,387		208.766		259.558		41.55		0		0		0		41.55		16.01%		208.766		17.67%	
				Persentase usaha mikro yang berhasil mendapatkan bantuan permodalan	6.00%		8.31 %		5.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		8.31%		138.53%		
		1.1.2. 11.02. 0001	Fasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha Skala Mikro	Jumlah pelaku usaha skala mikro yang mendapatkan fasilitasi kemitraan					125 orang	259.558	89	41.55	0	0	0	0	0	0	89	41.55	71.20%	16.01%				Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
		1.1.2. 11.03	Program standarisasi produk usaha mikro			28,762,309		1,546,555		1,371,673		84.114		0		0		0		84.114		6.13%		1,546,555		5.38%	
				Persentase usaha mikro yang mengaplikasik an Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam proses usaha	40.00%		44.42 %		30.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		44.42%		111.04%		

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16		
				Persentase produk usaha mikro yang layak diuji mutukan	40.00%		35.06 %		30.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		35.06%		87.66%				
		1.1.2. 11.03. 0001	Fasilitasi Sertifikasi Produk bagi Pelaku Usaha Skala Mikro	Jumlah pelaku usaha skala mikro yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi produk					25 orang	124.83	0	3.589	0	0	0	0	0	0	0	3.589	0.00%	2.87%					Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		
		1.1.2. 11.03. 0002	Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang dimonitoring dan dievaluasi perkembangan usahanya					385 orang	614.228	385	80.525	0	0	0	0	0	0	385	80.525	100.00%	13.11%					Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		
		1.1.2. 11.03. 0003	Peningkatan Mutu Produk Bagi Pelaku Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi peningkatan mutu produk					125 orang	302.447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		
		1.1.2. 11.03. 0004	Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di Sentra Wisata Kuliner	Jumlah pelaku usaha di sentra wisata kuliner yang mendapatkan pelatihan peningkatan mutu produk					140 orang	176.532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		
		1.1.2. 11.03. 0005	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pelaku Usaha Skala Mikro (DAK)	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan					125 Orang	153.637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		
38	Meningkatkan produktivitas koperasi	1.1.2. 11.04	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi			12,388,230		1,697,989		1,912,913		176.863		0		0		0		176.863		9.25%		1,697,989		13.71%			
				Persentase koperasi berklasifikasi AAB	77.05%		65.98 %		66.24%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		65.98%		85.63%				
		1.1.2. 11.04. 0001	Pengawasan Koperasi	Jumlah lembaga koperasi yang mendapatkan pengawasan					450 lembaga	1,135,945	0	148.313	0	0	0	0	0	0	0	148.313	0.00%	13.06%					Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		
		1.1.2. 11.04. 0003	Penilaian Kinerja Koperasi	Jumlah lembaga koperasi yang dinilai kinerjanya					150 lembaga	282.321	0	4.175	0	0	0	0	0	0	0	4.175	0.00%	1.48%					Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		
		1.1.2. 11.04. 0004	Pelatihan Perkoperasian (DAK)	Jumlah lembaga koperasi yang mendapatkan pelatihan					200 lembaga	155.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2. 11.04. 0005	Fasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi	Jumlah lembaga koperasi yang mendapatkan fasilitasi pembentukan dan peningkatan kualitas lembaga					61 lembaga	338.847	0	24.375	0	0	0	0	0	0	0	24.375	0.00%	7.19%					Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		1.1.2. 11.05	Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi			21,035,265		1,628,794		1,597,777		149.525		0	0	0	0		149.525		9.36%		1,628,794		7.74%		
			Tingkat pertumbuhan koperasi yang meningkat volume usahanya		88.00%		73.19 %		78.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		73.19%		83.17%		
		1.1.2. 11.05. 0001	Penyelenggaraan Promosi Produk Unit Bisnis Koperasi	Jumlah Kegiatan Promosi Produk Unit Bisnis Koperasi aktif yang dilaksanakan					5 kali	184.751	0	2.442	0	0	0	0	0	0	2.442	0.00%	1.32%					Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
		1.1.2. 11.05. 0002	Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan antar Koperasi, dengan Distributor, dan /atau Lembaga Keuangan/Perban kan	Jumlah lembaga koperasi yang difasilitasi pembentukan jaringan kerjasama bisnis dan permodalan antar koperasi, distributor, dan/atau lembaga keuangan/perba nkan					144 lembaga	123.574	37	6.608	0	0	0	0	0	0	6.608	25.69%	5.35%					Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
		1.1.2. 11.05. 0003	Fasilitasi Uji Sertifikasi Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI- KJK)	Jumlah lembaga koperasi yang pengelola usaha simpan pinjam - nya mengikuti uji sertifikasi					60 lembaga	269.349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		1.1.2. 11.05. 0004	Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola Usaha Simpan Pinjam Koperasi (DAK)	Jumlah koperasi yang pengelola usaha simpan pinjam - nya mengikuti diklat berbasis kompetensi					80 lembaga	158.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		1.1.2. 11.05. 0005	Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah lembaga koperasi yang dinilai kesehatan usahanya					150 lembaga	265.34	0	26.216	0	0	0	0	0	0	26.216	0.00%	9.88%					Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
			1.1.2. 11.05. 0006	Facilitasi Peningkatan dan Pengembangan Usaha Bisnis Koperasi	Jumlah lembaga koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan dan mengembangka n usaha bisnis				144 lembaga	596.699	42	114.259	0	0	0	0	0	0	42	114.259	29.17%	19.15%					Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			1.1.2. 12	Penanaman Modal																							
39	Peningkatan sistem manajemen city logistik		1.1.2. 12.01	Program Peningkatan Investasi fasilitas pendukung logistik		207.815		215.975		227.606		4.568		0		0		0		4.568		2.01%		215.975		103.93%	
				Tingkat pertumbuhan investasi fasilitas pendukung logistik	42.00%		100.00 %		30.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		238.10%		
			1.1.2. 12.01. 0001	Temu Usaha Fasilitas Pendukung Logistik	Jumlah temu usaha fasilitas pendukung logistik yang dilaksanakan				1 kali	227.606	0	4.568	0	0	0	0	0	0	0	4.568	0.00%	2.01%					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
40	Meningkatkan realisasi PMA dan PMDN (SPIPISE dan non SPIPISE)		1.1.2. 12.03	Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi		19,122,557		4,597,794		3,884,682		313.482		0		0		0		313.482		8.07%		4,597,794		24.04%	
				Tingkat pertumbuhan ijin realisasi investasi	24.00%		20.59 %		16.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		14.59%		60.80%		
				Tingkat pertumbuhan jumlah minat dan rencana investasi	36.00%		65.85 %		24.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		65.85%		182.93%		
			1.1.2. 12.03. 0001	Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal	Jumlah koordinasi perencanaan penanaman modal yang dilaksanakan				1 kali	209.578	0	332	0	0	0	0	0	0	0	332	0.00%	0.16%					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			1.1.2. 12.03. 0002	Pemetaan Data Pelaku Usaha di Surabaya	Jumlah pelaku usaha yang dipetakan				500 lembaga	317.537	340	68.228	0	0	0	0	0	0	340	68.228	68.00%	21.49%					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			1.1.2. 12.03. 0003	Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal	Jumlah perusahaan penanam modal yang dimonitor dan dievaluasi				2700 lembaga	813.561	100	85.131	0	0	0	0	0	0	100	85.131	3.70%	10.46%					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			1.1.2. 12.03. 0004	Penyelenggaraan Promosi Investasi	Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan				3 kali	791.249	0	25.007	0	0	0	0	0	0	0	25.007	0.00%	3.16%					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2. 12.03. 0005	Penyusunan Dokumen Analisa Potensi dan Peluang Investasi di Surabaya	Jumlah dokumen analisa Potensi dan Peluang Investasi di Surabaya yang disusun					3 dokumen	232.821	0	575	0	0	0	0	0	0	0	575	0.00%	0.25%					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1.1.2. 12.03. 0006	Pengelolaan Data Investasi	Jumlah data investasi yang dikelola					34403 data	544.3	10366	60.347	0	0	0	0	0	0	10366	60.347	30.13%	11.09%					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1.1.2. 12.03. 0008	Pembinaan PMA dan PMDN	Jumlah PMA dan PMDN yang dibina					200 lembaga	234.959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1.1.2. 12.03. 0009	Pendampingan PMA dan PMDN	Jumlah PMA dan PMDN yang didampingi					300 lembaga	451.775	100	47.524	0	0	0	0	0	0	100	47.524	33.33%	10.52%					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1.1.2. 12.03. 0010	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal	Jumlah fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal yang dilaksanakan					12 kali	288.901	2	26.34	0	0	0	0	0	0	2	26.34	16.67%	9.12%					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
41	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.1.2. 12.04	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan			144,498,179		20,458,068		21,091,932		2,669,421		0		0		0		2,669,421		12.66%		20,458,068		14.16%	
				Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	80.00%		84.05 %		76.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		84.05%		105.06%		
		1.1.2. 12.04. 0001	Bimtek Penyusunan Laporan Industri	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek laporan Industri					200 orang	197.734	50	28.51	0	0	0	0	0	0	50	28.51	25.00%	14.42%					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1.1.2. 12.04. 0002	Bimtek Perizinan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang mengikuti bimtek perizinan penanaman modal					100 lembaga	282.76	50	37.994	0	0	0	0	0	0	50	37.994	50.00%	13.44%					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1.1.2. 12.04. 0003	Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu	Jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu yang dihasilkan					60000 berkas	5,236,952	26392	714.443	0	0	0	0	0	0	26392	714.443	43.99%	13.64%					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2. 12.04. 0004	Pembinaan Petugas Layanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu	Jumlah petugas layanan perizinan dan non perizinan terpadu yang dibina					100 orang	209.665	100	11.221	0	0	0	0	0	0	0	100	11.221	100.00%	5.35%				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1.1.2. 12.04. 0005	Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan	Jumlah pelaku usaha yang yang memperoleh pembinaan tanda daftar perusahaan					500 orang	363.003	150	69.804	0	0	0	0	0	0	0	150	69.804	30.00%	19.23%				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1.1.2. 12.04. 0006	Pengawasan Perijinan Industri dan Tanda Daftar Perusahaan	Jumlah pelaku usaha yang memiliki ijin industri dan tanda daftar perusahaan yang diawasi					10300 orang	378.547	2075	59.55	0	0	0	0	0	0	0	2075	59.55	20.15%	15.73%				Dinas Penanamtan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1.1.2. 12.04. 0007	Pelayanan Rekomendasi Dokumen Lingkungan	Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan yang diterbitkan					800 berkas	1,568,045	449	272.346	0	0	0	0	0	0	0	449	272.346	56.13%	17.37%				Dinas Lingkungan Hidup
		1.1.2. 12.04. 0008	Pelayanan Perijinan Pembuangan Air Limbah	Jumlah Ijin Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan					50 izin	437.605	18	48.409	0	0	0	0	0	0	0	18	48.409	36.00%	11.06%				Dinas Lingkungan Hidup
		1.1.2. 12.04. 0009	Peningkatan Pelayanan Perijinan Limbah B3	Jumlah pelayanan ijin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun yang terlayani dan terverifikasi					45 izin	646.659	22	95.082	0	0	0	0	0	0	0	22	95.082	48.89%	14.70%				Dinas Lingkungan Hidup
		1.1.2. 12.04. 0010	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata	Jumlah TDUP Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata yang diproses					400 berkas	119.55	175	6.05	0	0	0	0	0	0	0	175	6.05	43.75%	5.06%				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1.1.2. 12.04. 0011	Pelayanan perizinan dan non perizinan usaha rekreasi dan Hiburan Umum	Jumlah Tanda Daftar Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang diproses					169 berkas	117.83	93	6.05	0	0	0	0	0	0	0	93	6.05	55.03%	5.13%				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1.1.2. 12.04. 0012	Pelayanan Perijinan Bidang Tata Bangunan	Jumlah berkas Perijinan Bidang Tata Bangunan yang diproses					9467 berkas	5,742,868	2527	925.65	0	0	0	0	0	0	0	2527	925.65	26.69%	16.12%				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.2. 12.04. 0014	Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perhubungan	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perhubungan yang Diadakan					5 Jenis	3,088,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%				Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8								12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2. 12.04. 0015	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian	Jumlah berkas perizinan dan non perizinan bidang pertanian yang diproses					255 berkas	194.938	48	35.645	0	0	0	0	0	0	48	35.645	18.82%	18.29%				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		1.1.2. 12.04. 0016	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ketenagakerjaan	Jumlah berkas perizinan dan non perizinan ketenagakerjaan yang diproses					1000 berkas	123.34	116	15.863	0	0	0	0	0	0	116	15.863	11.60%	12.86%				Dinas Tenaga Kerja	
		1.1.2. 12.04. 0017	Pelayanan Perizinan di Bidang Perdagangan	Jumlah ijin bidang perdagangan yang diterbitkan					400 berkas	406.571	141	48.847	0	0	0	0	0	0	141	48.847	35.25%	12.01%				Dinas Perdagangan	
		1.1.2. 12.04. 0018	Monitoring Perizinan dan Non Perizinan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata	Jumlah Usaha Jasa dan sarana Pariwisata yang dimonitor					240 lokasi	365.666	76	80.712	0	0	0	0	0	0	76	80.712	31.67%	22.07%				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		1.1.2. 12.04. 0019	Monitoring perizinan dan non perizinan usaha rekreasi dan Hiburan Umum	Jumlah Usaha rekreasi dan hiburan Umum pariwisata yang dimonitor					240 lokasi	370.481	31	57.64	0	0	0	0	0	0	31	57.64	12.92%	15.56%				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		1.1.2. 12.04. 0021	Koordinasi Teknis Pelayanan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu	Jumlah koordinasi teknis pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan terpadu yang dilaksanakan					24 kali	822.332	6	116.668	0	0	0	0	0	0	6	116.668	25.00%	14.19%				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		1.1.2. 12.04. 0022	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan atau Pemangku Kepentingan (DBHCHT)	Jumlah penyampaian informasi ketentuan peraturan cukai yang dilakukan					4 kali	23.297	2	11.64	0	0	0	0	0	0	2	11.64	50.00%	49.96%				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		1.1.2. 12.04. 0023	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau (DBHCHT)	Jumlah pelaksanaan pengumpulan informasi hasil tembakau					2 kali	11.704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2. 12.04. 0024	Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan atau Penggunaan Mesin Pelinting Rokok dan Pemberian Sertifikat / Kode Registrasi Mesin Pelinting Rokok (DBHCHT)	Jumlah pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat / kode registrasi mesin pelinting rokok yang dilaksanakan					1 kali	16.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1.1.2. 12.04. 0025	Pelayanan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Jumlah berkas permohonan SLF yang diproses					50 berkas	367.981	5	27.3	0	0	0	0	0	0	5	27.3	10.00%	7.42%					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.2. 13	Kepemudaan dan Olahraga																								
42	Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan dan karakter kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan	1.1.2. 13.01	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan			31,085,054		2,897,557		3,191,529		499.809		0		0		0		499.809		15.66%		2,897,557		9.32%	
				Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja	80.00%			99.78 %	80.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		99.78%		124.73%		
		1.1.2. 13.01. 0002	Peningkatan Jiwa Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Jumlah Kegiatan Peningkatan Jiwa Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda yang diselenggarakan					22 kali	1,817,866	2	181.672	0	0	0	0	0	0	2	181.672	9.09%	9.99%					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		1.1.2. 13.01. 0003	Pembentukan Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja	Jumlah Peserta Pemuda yang mendapatkan pembinaan untuk menjadi Kader Anti Kenakalan Remaja					3600 peserta	1,373,663	971	318.137	0	0	0	0	0	0	971	318.137	26.97%	23.16%					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
43	Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional	1.1.2.13.02	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga			804,337,286		108,500,546		154,060,036		3,385,883		0		0		0		3,385,883		2.20%		108,500,546		13.49%	
				Akumulasi atlet yang dibina dan berprestasi	2,107,00 orang		2,307,00 orang		1.607,00 orang		0,00 orang		0,00 orang		0,00 orang		0,00 orang		0,00 orang		0,00%		2,307,00 %		109.49%		
				Cakupan / sebaran fasilitas olahraga	154,00 kelurahan		124,00 kelurahan		130,00 kelurahan		0,00 kelurahan		0,00 kelurahan		0,00 kelurahan		0,00 kelurahan		0,00 kelurahan		0,00%		124.00%		80.52%		
		1.1.2.13.02.0001	Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Olahraga	Jumlah fasilitas olahraga yang dibangun/direhabilitasi					4 bangunan	56,547,750	0	1.35	0	0	0	0	0	0	0	0	1.35	0.00%	0.00%				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.2.13.02.0002	Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Olahraga	Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Olahraga yang disusun					2 dokumen	924.721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
		1.1.2.13.02.0003	Operasional Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang difasilitasi					9 unit	8,112,271	10	1,102,982	0	0	0	0	0	0	0	10	1,102,982	111.11%	13.60%				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		1.1.2.13.02.0004	Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Olahraga	Jumlah Prasarana Olahraga yang dibangun dan ditingkatkan					90 unit	26,907,045	5	754.412	0	0	0	0	0	0	5	754.412	5.56%	2.80%					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		1.1.2.13.02.0005	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Rekreasi	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Rekreasi yang diselenggarakan					29 kali	2,086,739	852	329.651	0	0	0	0	0	0	852	329.651	2,937.93 %	15.80%					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		1.1.2.13.02.0006	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Prestasi	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Prestasi yang diselenggarakan					36 kali	2,835,127	0	17.5	0	0	0	0	0	0	0	17.5	0.00%	0.62%					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2. 13.02. 0007	Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Olahraga Rekreasi	Jumlah kegiatan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM olahraga rekreasi dan tradisional yang diselenggarakan					25 kali	2,716,537	286	201.342	0	0	0	0	0	0	286	201.342	1,144.00 %	7.41%					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		1.1.2. 13.02. 0008	Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi	Jumlah Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi yang difasilitasi					41 kali	25,564,613	66	285.049	0	0	0	0	0	0	66	285.049	160.98%	1.12%					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		1.1.2. 13.02. 0009	Penyediaan Sarana Olahraga	Jumlah Sarana Olahraga yang Disediakan					2302 unit	5,853,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		1.1.2. 13.02. 0010	Perbaikan Prasarana Olahraga	Jumlah Prasarana Olahraga yang Diperbaiki					133 unit	17,738,829	29	233.423	0	0	0	0	0	0	29	233.423	21.80%	1.32%					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		1.1.2. 13.02. 0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah dokumen perencanaan prasarana olahraga yang disusun					56 dokumen	2,654,097	6	275.54	0	0	0	0	0	0	6	275.54	10.71%	10.38%					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		1.1.2. 13.02. 0012	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Anak	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Anak yang diselenggarakan					26 kali	2,118,413	365	184.633	0	0	0	0	0	0	365	184.633	1,403.85 %	8.72%					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		1.1.2. 16	Kebudayaan																								
44	Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	1.1.2. 16.01	Program perlindungan budaya lokal			6,931,179		1,347,536		1,528,609		256.551		0		0		0		256.551		16.78%		1,347,536		19.44%	
				Persentase cagar budaya yang terpelihara	91.50%		91.58 %		91.50%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		91.58%		100.08%		
		1.1.2. 16.01. 0001	Monitoring dan evaluasi cagar budaya	Jumlah cagar budaya yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan kaidah pelestarian					250 lokasi	1,528,609	33	256.551	0	0	0	0	0	0	33	256.551	13.20%	16.78%					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2. 16.02	Program pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal			31,172,802		7,281,926		6,739,874		919.658		0		0		0		919.658		13.65%		7,281,926		23.36%	
				Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	49.00%			57.63 %		47.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		57.83%		118.02%	
				Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal pada 17 lokasi	100.00%			100.00 %		76.50%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		100.00%	
		1.1.2. 16.02. 0001	Fasilitasi penyelenggaraan even budaya daerah	Jumlah penyelenggaraa n event budaya daerah					546 kali	5,341,422	187	902.775	0	0	0	0	0	0	187	902.775	34.25%	16.90%					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1.1.2. 16.02. 0002	Monitoring penyelenggaraan seni budaya lokal pada ruang publik dan usaha pariwisata	Jumlah ruang publik dan usaha pariwisata yang dimonitoring					14 lokasi	260.061	15	16.883	0	0	0	0	0	0	15	16.883	107.14%	6.49%					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1.1.2. 16.02. 0003	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Lokal	Jumlah pelaksanaan Festival budaya lokal					3 kali	406.051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1.1.2. 16.02. 0004	Pengembangan Kreativitas Budaya Daerah Sekolah Dasar	Jumlah lembaga yang mengikuti pelatihan pengembangan kreativitas budaya daerah sekolah dasar					668 lembaga	464.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Pendidikan
		1.1.2. 16.02. 0005	Pengembangan Kreativitas Budaya Daerah Sekolah Menengah	Jumlah lembaga yang mengikuti pelatihan pengembangan kreativitas budaya daerah sekolah Menengah					267 lembaga	267.913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Pendidikan
45	Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan	1.1.2. 16.03	Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal			78,801,277		14,409,464		16,542,052		1,571,331		0		0		0		1,571,331		9.50%		14,409,464		18.29%	
				Persentase partisipasi peserta dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan	17.00%			29.63 %		16.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		29.63%		174.31%	

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16		
				Persentase kader wawasan kebangsaan	100.00%		98.49 %		100.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		98.49%		98.49%				
		1.1.2.16.03.0001	Pemberdayaan dan fasilitasi Parpol dan Ormas	Jumlah lembaga yang mendapatkan pemberdayaan					31 lembaga	395.329	11	8.179	0	0	0	0	0	0	11	8.179	35.48%	2.07%				Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat			
		1.1.2.16.03.0002	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta komunikasi, informasi dan edukasi peningkatan wawasan kebangsaan					750 orang	609.446	102	18.345	0	0	0	0	0	102	18.345	13.60%	3.01%				Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat				
		1.1.2.16.03.0003	Fasilitasi penyelenggaraan even peningkatan nilai kebangsaan	Jumlah pelaksanaan event peningkatan nilai-nilai kebangsaan					11 kali	1,246,663	0	8.624	0	0	0	0	0	0	8.624	0.00%	0.69%				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				
		1.1.2.16.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Karakter Kebangsaan di Sekolah	Jumlah lembaga yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan karakter Kebangsaan di Sekolah					376 lembaga	634.331	908	0	0	0	0	0	0	908	0	241.49%	0.00%				Dinas Pendidikan				
		1.1.2.16.03.0005	Fasilitasi Pengembangan Wawasan Kebangsaan di Sekolah	Jumlah lembaga yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Wawasan Kebangsaan di Sekolah					245 lembaga	416.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%				Dinas Pendidikan				
		1.1.2.16.03.0006	Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa PLS	Jumlah kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa PLS yang dilaksanakan					13 kali	2,453,289	2	181.852	0	0	0	0	0	2	181.852	15.38%	7.41%				Dinas Pendidikan				
		1.1.2.16.03.0007	Fasilitasi kegiatan organisasi sosial keparahlanan	Jumlah fasilitasi kegiatan organisasi sosial keparahlanan					62 kali	6,320,422	8	966.577	0	0	0	0	0	8	966.577	12.90%	15.29%				Dinas Sosial				
		1.1.2.16.03.0008	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					2 Kali	74.527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%				Kec. Asemrowo				
		1.1.2.16.03.0009	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					2 Kali	76.651	1	4.168	0	0	0	0	0	1	4.168	50.00%	5.44%				Kec. Benowo				
		1.1.2.16.03.0010	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					7 Kali	87.01	2	6.237	0	0	0	0	0	2	6.237	28.57%	7.17%				Kec. Bubutan				

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16		
		1.1.2. 16.03. 0011	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					2 Kali	95.718	1	3.679	0	0	0	0	0	0	1	3.679	50.00%	3.84%					Kec. Bulak		
		1.1.2. 16.03. 0012	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					2 Kali	86.447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Kec. Dukuh Pakis		
		1.1.2. 16.03. 0013	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					3 Kali	62.875	1	2.35	0	0	0	0	0	0	1	2.35	33.33%	3.74%					Kec. Gayungan		
		1.1.2. 16.03. 0014	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					2 Kali	59.531	1	4.6	0	0	0	0	0	0	1	4.6	50.00%	7.73%					Kec. Genteng		
		1.1.2. 16.03. 0015	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					2 Kali	98.856	1	14.253	0	0	0	0	0	0	1	14.253	50.00%	14.42%					Kec. Gubeng		
		1.1.2. 16.03. 0016	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					2 Kali	74.586	1	2.765	0	0	0	0	0	0	1	2.765	50.00%	3.71%					Kec. Gunung Anyar		
		1.1.2. 16.03. 0017	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					2 Kali	70.769	1	3.575	0	0	0	0	0	0	1	3.575	50.00%	5.05%					Kec. Jambangan		
		1.1.2. 16.03. 0018	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					2 Kali	71.195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Kec. Karangpilang		
		1.1.2. 16.03. 0019	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					2 Kali	78.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Kec. Kenjeran		
		1.1.2. 16.03. 0020	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					4 Kali	89.073	1	3.004	0	0	0	0	0	0	1	3.004	25.00%	3.37%					Kec. Krembangan		
		1.1.2. 16.03. 0021	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					2 Kali	83.074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Kec. Lakarsantri		
		1.1.2. 16.03. 0022	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					3 Kali	97.326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Kec. Mulyorejo		
		1.1.2. 16.03. 0023	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					6 Kali	90.695	1	2.349	0	0	0	0	0	0	1	2.349	16.67%	2.59%					Kec. Pabean Cantian		
		1.1.2. 16.03. 0024	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					2 Kali	79.129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Kec. Pakal		

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.2. 16.03. 0025	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					3 Kali	77.782	1	3.704	0	0	0	0	0	0	1	3.704	33.33%	4.76%					Kec. Rungkut
		1.1.2. 16.03. 0026	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					3 Kali	80.353	1	2.832	0	0	0	0	0	0	1	2.832	33.33%	3.52%					Kec. Sambikerep
		1.1.2. 16.03. 0027	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					3 Kali	145.213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Kec. Sawahan
		1.1.2. 16.03. 0028	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					4 Kali	81.359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Kec. Semampir
		1.1.2. 16.03. 0029	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					2 Kali	73.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Kec. Simokerto
		1.1.2. 16.03. 0030	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					2 Kali	91.975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Kec. Sukolilo
		1.1.2. 16.03. 0031	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					6 Kali	86.759	1	3.505	0	0	0	0	0	0	1	3.505	16.67%	4.04%					Kec. Sukomanung gal
		1.1.2. 16.03. 0032	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					4 Kali	91.96	1	4.313	0	0	0	0	0	0	1	4.313	25.00%	4.69%					Kec. Tambaksari
		1.1.2. 16.03. 0033	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					2 Kali	102.41	1	5.349	0	0	0	0	0	0	1	5.349	50.00%	5.22%					Kec. Tandes
		1.1.2. 16.03. 0034	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					2 Kali	82.487	0	54	0	0	0	0	0	0	0	54	0.00%	0.07%					Kec. Tegalsari
		1.1.2. 16.03. 0035	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					4 Kali	67.446	1	2.825	0	0	0	0	0	0	1	2.825	25.00%	4.19%					Kec. Tenggilis Mejoyo
		1.1.2. 16.03. 0036	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					3 Kali	103.349	1	2.566	0	0	0	0	0	0	1	2.566	33.33%	2.48%					Kec. Wiyung
		1.1.2. 16.03. 0037	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					2 Kali	73.889	1	3.533	0	0	0	0	0	0	1	3.533	50.00%	4.78%					Kec. Wonocolo
		1.1.2. 16.03. 0038	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan					2 Kali	103.837	1	4.409	0	0	0	0	0	0	1	4.409	50.00%	4.25%					Kec. Wonokromo

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
			1.1.2. 16.03. 0039	Pemeliharaan TMP dan MPN	Jumlah TMP dan MPN yang dipelihara			7 lokasi	1,827,520		7	307.685	0	0	0	0	0	0	7	307.685	100.00%	16.84%					Dinas Sosial
			1.1.2. 17	Perpustakaan																							
46	Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca	1.1.2. 17.01	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			162,179,066	26,662,860		31,741,665			4,360,445		0		0		0		4,360,445		13.74%		26,662,860		16.44%	
				Persentase pertumbuhan event literasi yang diselenggarakan	10.00%		8.33 %		10.00%	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		8.33%		83.33%			
				Persentase koleksi buku	100.00%		87.45 %		91.56%	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		87.45%		87.45%			
				Persentase siswa yang terlibat dalam tes reading text levelling	100.00%		40.93 %		60.30%	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		40.93%		40.93%			
				Persentase perpustakaan yang berhasil dibina	33.00%		31.06 %		22.80%	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		31.06%		94.11%			
		1.1.2. 17.01. 0001	Pelaksanaan Tes Reading Text Levelling	Jumlah siswa yang terlibat dalam tes reading text levelling				57433 orang	235.935	0	4.29	0	0	0	0	0	0	0	4.29	0.00%	1.82%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		1.1.2. 17.01. 0002	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Jumlah kegiatan pengembangan minat dan budaya baca				189 kali	503.098	30	38.859	0	0	0	0	0	0	30	38.859	15.87%	7.72%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		1.1.2. 17.01. 0003	Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang dibina				500 lembaga	619.56	403	117.512	0	0	0	0	0	0	403	117.512	80.60%	18.97%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		1.1.2. 17.01. 0004	Pengelolaan Layanan Baca	Jumlah layanan baca yang dikelola				1494 lokasi	25,025,465	1382	4,057,878	0	0	0	0	0	0	1382	4,057,878	92.50%	16.21%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		1.1.2. 17.01. 0005	Penyediaan dan Perawatan Sarana Perpustakaan Daerah dan Taman Bacaan Masyarakat	Jumlah sarana Perpustakaan Daerah dan Taman Bacaan Masyarakat yang disediakan dan dirawat				43069 Buku	4,234,400	0	57.401	0	0	0	0	0	0	0	57.401	0.00%	1.36%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		1.1.2. 17.01. 0006	Fasilitasi Pengembangan Budaya Baca dan Menulis di Sekolah	Jumlah kegiatan Fasilitasi Pengembangan Budaya Baca dan Menulis di Sekolah yang diselenggarakan				3 kali	469.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Pendidikan	

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		1.1.2. 17.01. 0007	Akse Literasi	Jumlah rangkaian kegiatan pelaksanaan akse literasi			1 kali	653.791	0	84.505	0	0	0	0	0	0	84.505	0.00%	12.93%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
		1.1.2. 18	Kearsipan																								
47	Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik	1.1.2. 18.01	Program Penataan, Penyelamatan, dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah		13,051,862	3,531,366		4,862,804		362.745	0		0		0		362.745		7.46%		3,531,366		27.06%				
				Persentase jumlah arsip yang diakuisisi	20.00%		50.78 %		20.00%	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		50.78%		253.91%					
				Persentase perangkat daerah, unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan	100.00%		43.89 %		60.80%	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		43.89%		43.89%					
		1.1.2. 18.01. 0001	Layanan Informasi Kearsipan	Jumlah pelaksanaan layanan informasi kearsipan			40 kali	352.313	11	35.917	0	0	0	0	0	0	11	35.917	27.50%	10.19%				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
		1.1.2. 18.01. 0002	Pembinaan Sistem Kearsipan	Jumlah PD/unit kerja dan sekolah yang mendapatkan pembinaan sistem kearsipan			130 lembaga	369.698	17	16.846	0	0	0	0	0	0	17	16.846	13.08%	4.56%				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
		1.1.2. 18.01. 0003	Pendataan dan Penataan Sistem Kearsipan	Jumlah kegiatan pendataan dan penataan sistem kearsipan			52 kali	2,494,588	0	307.245	0	0	0	0	0	0	0	307.245	0.00%	12.32%				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
		1.1.2. 18.01. 0004	Pengadaan Sarana Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan dan Penyelamatan Kearsipan	Jumlah sarana penyimpanan, pengolahan, pemeliharaan dan penyelamatan kearsipan yang diadakan			23 item	1,646,206	1	2.738	0	0	0	0	0	0	1	2.738	4.35%	0.17%				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
		1.1.2. 14	Statistik																								
48	Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik	1.1.2. 14.01	Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik		17,098,829	1,278,730		1,493,163		341.629	0		0		0		341.629		22.88%		1,278,730		7.48%				

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
				Rata-rata toleransi (margin of error) pada data-data terkait perhitungan indikator kinerja dalam RPJMD	5.00%		2.67 %	5.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		2.67%		53.48%					
		1.1.2.14.01.0002	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah data urusan yang dikelola				17 data urusan	1,493,163	500	341.629	0	0	0	0	0	500	341.629	2,941.18 %	22.88%					Badan Perencanaan Pembangunan		
		1.2	Pilihan																								
		1.2.2	Non Pelayanan Dasar																								
		1.2.2.03	Pertanian																								
49	Meningkatkan produktivitas sektor pertanian	1.2.2.03.01	Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura			9,271,379		1,030,176		1,301,221		108.365		0		0		108.365		8.33%		1,030,176		11.11%			
				Persentase pembudidayaan tanaman pangan dan hortikultura yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi	16.00%		15.31 %	14.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		15.31%		95.71%					
		1.2.2.03.01.0001	Pengadaan sarana dan prasarana produksi budidaya tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah sarana dan prasarana produksi budidaya tanaman pangan dan hortikultura yang disediakan				5 jenis	1,028,729	3	100.391	0	0	0	0	0	3	100.391	60.00%	9.76%					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
		1.2.2.03.01.0002	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah sarana dan prasarana produksi budidaya tanaman pangan dan hortikultura yang dipelihara				13 unit	272.492	0	7.975	0	0	0	0	0	0	7.975	0.00%	2.93%					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
		1.2.2.03.02	Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura			10,520,282		2,626,513		2,272,744		59.679		0		0		59.679		2.63%		2,626,513		24.97%			

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
				Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	80.00%		36.31 %		50.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		36.31%		45.39%		
		1.2.2.03.02.0001	Pelatihan dan pendampingan pemanfaatan teknologi tepat guna budidaya tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah pelaksanaan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Budidaya Pangan dan Hortikultura					3 kali	298.72	100	11.151	0	0	0	0	0	0	100	11.151	3,333.33 %	3.73%					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		1.2.2.03.02.0002	Pembibitan	Jumlah bahan pembibitan yang disediakan					13 jenis	1,266,192	0	20.252	0	0	0	0	0	0	0	20.252	0.00%	1.60%					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		1.2.2.03.02.0003	Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian	Jumlah peserta pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian					125 orang	707.832	75	28.276	0	0	0	0	0	0	75	28.276	60.00%	3.99%					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		1.2.2.03.04	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan ternak			14,607,788		745.397		1,225,113		137.26		0		0		0		137.26		11.20%		745.397		5.10%	
				Persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan	87.00%		87.74 %		85.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		87.74%		100.85%		
		1.2.2.03.04.0002	Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan	Jumlah pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit hewan					1558 kali	1,035,679	396	137.26	0	0	0	0	0	0	396	137.26	25.42%	13.25%					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		1.2.2.03.04.0003	Sosialisasi Teknis Pemotongan Hewan	Jumlah peserta Sosialisasi Teknis Pemotongan Hewan					200 peserta	189.434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		1.2.2.03.05	Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Peternakan			2,016,349		700.863		656.486		4.123		0		0		0		4.123		0.63%		700.863		34.76%	

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urutan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
				Persentase pembudidaya ternak yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	80.00%		37.81 %		50.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		37.81%		47.27%		
		1.2.2.03.05.0001	Pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya peternakan	Jumlah pelaksanaan pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya peternakan					16 kali	383.155	0	3.9	0	0	0	0	0	0	3.9	0.00%	1.02%					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		1.2.2.03.05.0002	Penyediaan Sarana Budidaya Peternakan	Jumlah Sarana Budidaya Peternakan yang disediakan					6 jenis	273.331	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0.00%	0.08%					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		1.2.2.02	Pariwisata																								
50	Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan	1.2.2.02.01	Program pengembangan destinasi wisata			26,196,203		4,420,182		5,702,822		741.905		0		0		0		741.905		13.01%		4,420,182		16.87%	
				Persentase ODTW yang berhasil dikembangkan	55.00%		46.15 %		36.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		46.15%		83.92%		
		1.2.2.02.01.0001	Pemeliharaan obyek wisata THP Kenjeran, wisata air kalimas dan Wisata Religi Ampel	Jumlah obyek wisata yang dipelihara					3 lokasi	1,401,646	3	268.525	0	0	0	0	0	0	3	268.525	100.00%	19.16%				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		1.2.2.02.01.0002	Pemeliharaan obyek wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR	Jumlah obyek wisata yang dipelihara					3 lokasi	1,595,995	4	300.511	0	0	0	0	0	0	4	300.511	133.33%	18.83%				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		1.2.2.02.01.0003	Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM di sektor Pariwisata	Jumlah peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM di sektor pariwisata					600 orang	252.678	60	20.147	0	0	0	0	0	0	60	20.147	10.00%	7.97%				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		1.2.2.02.01.0004	Penyediaan Sarana Penunjang Wisata THP Kenjeran dan wisata religi Ampel	Jumlah sarana penunjang wisata THP Kenjeran dan wisata religi Ampel yang disediakan					11 unit	1,578,151	0	44.775	0	0	0	0	0	0	0	44.775	0.00%	2.84%				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
			1.2.2. 02.01. 0005	Penyediaan Sarana Penunjang Wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR yang disediakan					81 unit	874.352	7	107.948	0	0	0	0	0	0	7	107.948	8.64%	12.35%					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			1.2.2. 02.02	Program pengembangan kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata		21,456,254		984.919		830.121		84.008		0		0		0		84.008		10.12%		984.919		4.59%	
				Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan 5 kesepakatan	100.00%		60.00 %		60.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		60.00%		60.00%		
			1.2.2. 02.02. 0001	Forum komunikasi pelaku usaha jasa dan sarana pariwisata	Jumlah pelaksanaan forum komunikasi pelaku usaha jasa dan sarana pariwisata				10 kali	385.68	3	58.692	0	0	0	0	0	0	3	58.692	30.00%	15.22%					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			1.2.2. 02.02. 0002	Forum komunikasi pelaku usaha rekreasi hiburan umum	Jumlah pelaksanaan forum komunikasi pelaku usaha rekreasi dan hiburan umum				10 kali	334.208	1	25.315	0	0	0	0	0	0	1	25.315	10.00%	7.57%					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			1.2.2. 02.02. 0003	Monitoring dan evaluasi kemitraan usaha jasa dan sarana pariwisata serta usaha rekreasi dan hiburan umum pariwisata	Jumlah lokasi usaha jasa dan sarana pariwisata yang dimonitor dan dievaluasi				6 lokasi	110.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			1.2.2. 02.03	Program Pemasaran Pariwisata		59,904,319		7,785,686		8,718,807		1,591,839		0		0		0		1,591,839		18.26%		7,785,686		13.00%	
				Persentase kunjungan di objek wisata terhadap kunjungan wisatawan	52.27%		48.03 %		47.74%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		48.03%		91.89%		
			1.2.2. 02.03. 0001	Penyelenggaraan pemilihan dan pengiriman duta wisata	Jumlah kegiatan pemilihan dan pengiriman duta wisata yang diselenggarakan dan diikuti				81 kali	941.758	31	55.748	0	0	0	0	0	0	31	55.748	38.27%	5.92%					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.2.2. 02.03. 0002	Penyelenggaraan even di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel	Jumlah Penyelenggaraa n event di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel					93 kali	1,386,328	25	172.178	0	0	0	0	0	0	25	172.178	26.88%	12.42%					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1.2.2. 02.03. 0003	Penyelenggaraan even di UPTD Tugu Pahlawan Balai Pemuda dan THR	Jumlah penyelenggaraa n event di UPTD Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR					64 kali	1,500,459	16	284.139	0	0	0	0	0	0	16	284.139	25.00%	18.94%					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1.2.2. 02.03. 0004	Penyelenggaraan even wisata	Jumlah Event Wisata yang diselenggarakan					1 kali	342.975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1.2.2. 02.03. 0005	Penyelenggaraan festival kuliner	Jumlah Penyelenggaraa n festival kuliner					7 kali	1,743,935	506	507.423	0	0	0	0	0	0	506	507.423	7,228.57 %	29.10%					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1.2.2. 02.03. 0006	Fasilitasi promosi wisata	Jumlah fasilitasi promosi wisata					295 kali	2,803,352	113	572.351	0	0	0	0	0	0	113	572.351	38.31%	20.42%					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
51	Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif	1.2.2. 02.04	Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif			7,876,252		3,630,908		4,734,766		570.604		0		0		0		570.604		12.05%		3,630,908		46.10%	
				Persentase individu/kelo mpok yang mengaplikasik an keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif kuliner	9.00%		18.30 %		7.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		18.30%		203.31%		
				Persentase individu/kelo mpok yang mengaplikasik an keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif desain dan fashion	9.00%		7.50 %		7.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		7.50%		83.33%		
				Persentase individu/kelo mpok yang mengaplikasik an keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif handicraft	9.00%		7.84 %		7.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		7.84%		87.15%		

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
				Persentase individu/ke- mpok yang mengaplikasik- an keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif seni pertunjukkan	9.00%		7.76 %		7.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		25.37%		281.92%				
				Persentase rumah kreatif yang beroperasi	100.00%		87.50 %		81.25%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		87.50%		87.50%				
		1.2.2. 02.04. 0001	Pengelolaan Rumah Kreatif Handycraft	Jumlah rumah kreatif yang dikelola selama 12 bulan					1 bangunan	329.738	1	41.489	0	0	0	0	0	0	1	41.489	100.00%	12.58%				Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak	
		1.2.2. 02.04. 0002	Fasilitasi Pelatihan dan pertunjukan seni budaya lokal di rumah kreatif	Jumlah Pelatihan dan pertunjukan seni budaya di rumah kreatif yg difasilitasi					770 kali	782.396	6331	130.043	0	0	0	0	0	0	6331	130.043	822.21%	16.62%				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		1.2.2. 02.04. 0003	Pengelolaan Rumah Kreatif Kuliner	Jumlah rumah kreatif yang dikelola					1 bangunan	154.719	0	70	0	0	0	0	0	0	0	70	0.00%	0.05%				Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
		1.2.2. 02.04. 0004	Pelatihan Seni Musik Modern di Rumah Kreatif	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan seni musik modern di rumah kreatif					100 orang	655.354	43	62.505	0	0	0	0	0	0	43	62.505	43.00%	9.54%				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
		1.2.2. 02.04. 0005	Pengelolaan Rumah Kreatif Desain dan Fashion	Jumlah rumah kreatif yang dikelola					2 bangunan	686.731	2	101.967	0	0	0	0	0	0	2	101.967	100.00%	14.85%				Dinas Perdagangan	
		1.2.2. 02.04. 0006	Pengelolaan Rumah Kreatif	Jumlah Rumah Kreatif yang dikelola					2 bangunan	578.892	2	79.683	0	0	0	0	0	0	2	79.683	100.00%	13.76%				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		1.2.2. 02.04. 0007	Pelatihan Desain dan Fashion di Rumah Kreatif	Jumlah pelaku usaha kreatif yang dilatih					120 orang	438.397	60	96.501	0	0	0	0	0	0	60	96.501	50.00%	22.01%				Dinas Perdagangan	
		1.2.2. 02.04. 0010	Pendampingan usaha olahan pangan di rumah kreatif	Jumlah pelaksanaan Pendampingan Usaha Olahan Pangan di Rumah Kreatif					7 kali	314.884	5	43.6	0	0	0	0	0	0	5	43.6	71.43%	13.85%				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.2.2. 02.04. 0011	Pelatihan Handycraft di Rumah Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan handycraft di rumah kreatif					25 orang	215.183	21	14.746	0	0	0	0	0	0	21	14.746	84.00%	6.85%					Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.2.2. 02.04. 0012	Pelatihan Kuliner di Rumah Kreatif	Jumlah pelaku usaha kreatif yang mendapat pelatihan kuliner di rumah kreatif					25 orang	37.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		1.2.2. 02.04. 0013	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pembinaan UKM (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana penunjang pembinaan UKM yang disediakan					268 unit	540.573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Perdagangan
		1.2.2. 02.05	Program legalisasi usaha kreatif			718.467		131.576		95.984		0		0		0		0		0		0.00%		131.576		18.31%	
				Persentase pelaku usaha kreatif yang mendapatkan legalisasi usaha	40.00%		50.88 %		30.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		50.88%		127.19%		
		1.2.2. 02.05. 0001	Fasilitasi Sertifikasi Produk bagi Pelaku Usaha Kreatif	Jumlah pelaku usaha kreatif yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi produk					25 orang	95.984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		1.2.2. 02.06	Program perkuatan permodalan usaha kreatif			830.89		113.806		117.442		0		0		0		0		0		0.00%		113.806		13.70%	
				Persentase kebutuhan modal kerja dan modal investasi pelaku usaha kreatif yang dapat dipenuhi	25.00%		24.56 %		15.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		24.56%		98.25%		
		1.2.2. 02.06. 0001	Fasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi Pelaku Usaha Kreatif	Jumlah pelaku usaha kreatif yang difasilitasi kemitraan permodalan					50 orang	117.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		1.2.2. 01	Kelautan dan Perikanan																								
52	Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan	1.2.2. 01.01	Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan			14,039,819		3,638,005		4,754,862		317.928		0		0		0		317.928		6.69%		3,638,005		25.91%	

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
				Persentase pembudidaya yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana perikanan dan kelautan	16.00%		13.38 %	14.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		13.38%		83.60%					
		1.2.2.01.01.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan (DAK)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan yang disediakan			15 Paket	827.805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
		1.2.2.01.01.0002	Pengadaan sarana dan prasarana perikanan budidaya	Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya yang diadakan			724 paket	1,158,165	0	35.5	0	0	0	0	0	0	35.5	0.00%	3.07%					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
		1.2.2.01.01.0003	Pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang diadakan			383 paket	857.424	0	17.961	0	0	0	0	0	0	17.961	0.00%	2.09%					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
		1.2.2.01.01.0004	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap yang dipelihara			13 unit	1,911,467	0	264.467	0	0	0	0	0	0	264.467	0.00%	13.84%					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
		1.2.2.01.02	Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Budidaya Perikanan dan Kelautan			2,108,344		453.939		389.489	14.525	0	0	0	0	0	14.525	3.73%			453.939	21.53%					
				Persentase pembudidaya perikanan dan kelautan yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	80.00%		35.43 %	50.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		35.43%		44.29%					
		1.2.2.01.02.0001	Pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan	Jumlah pelaksanaan pelatihan teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan			18 kali	389.489	123	14.525	0	0	0	0	0	0	123	14.525	683.33%	3.73%				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
		1.2.2.06	Perdagangan																								

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16													
53	Peningkatan sistem manajemen city logistik	1.2.2.06.01	Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial			3,274,905		1,314,551		1,343,312		169.259		0		0		0		169.259		12.60%		1,314,551		40.14%			
				Persentase realisasi pengembangan hub dan simpul logistik	100.00%		75.00 %		100.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		75.00%		75.00%				
				Tingkat kelengkapan data gudang terdaftar	100.00%		69.59 %		75.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		69.59%		69.59%				
		1.2.2.06.01.0001	Pembinaan terhadap pelaku distribusi perdagangan	Jumlah pelaku distribusi perdagangan yang dibina				350 orang	686.779	82	106.977	0	0	0	0	0	0	82	106.977	23.43%	15.58%					Dinas Perdagangan			
		1.2.2.06.01.0003	Koordinasi Pengembangan Hub/Simpul Logistik	Jumlah koordinasi pengembangan hub/simpul logistik yang dilaksanakan				5 kali	195.957	1	10.269	0	0	0	0	0	0	1	10.269	20.00%	5.24%					Dinas Perdagangan			
		1.2.2.06.01.0004	Monitoring Kelengkapan Data Gudang Terdaftar	Jumlah gudang yang dimonitor laporannya				250 lokasi	460.576	102	52.013	0	0	0	0	0	0	102	52.013	40.80%	11.29%					Dinas Perdagangan			
54	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.2.2.06.03	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan			13,760,431		2,944,505		5,112,848		427.31		0		0		0		427.31		8.36%		2,944,505		21.40%			
				Persentase temuan yang ditindaklanjuti	85.00%		100.00 %		80.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		117.65%				
		1.2.2.06.03.0001	Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Jumlah alat UTTP yang dilayani				23160 unit	669.16	9352	18.349	0	0	0	0	0	0	9352	18.349	40.38%	2.74%					Dinas Perdagangan			
		1.2.2.06.03.0002	Operasional UPTD Metrologi legal	Jumlah Sarana Pendukung Pelayanan UPTD Metrologi Legal yang dipelihara dan disediakan				119 jenis	2,024,027	49	156.366	0	0	0	0	0	0	49	156.366	41.18%	7.73%					Dinas Perdagangan			
		1.2.2.06.03.0003	Pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Jumlah alat UTTP yang diawasi				4100 unit	619.508	1115	45.808	0	0	0	0	0	0	1115	45.808	27.20%	7.39%					Dinas Perdagangan			
		1.2.2.06.03.0005	Pengawasan Perijinan di Bidang Perdagangan	Jumlah usaha di bidang perdagangan yang diawasi perjinannya				1521 lembaga	1,135,352	439	206.787	0	0	0	0	0	0	439	206.787	28.86%	18.21%					Dinas Perdagangan			

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.2.2. 06.03. 0006	Pengadaan Peralatan Kemetrologian (DAK)	Jumlah peralatan kemetrologian yang diadakan					6 unit	664.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Perdagangan
55	Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa	1.2.2. 06.04	Program perluasan jangkauan pemasaran			221,739,98 7		22,898,909		44,368,943		2,822,197		0		0		0		2,822,197		6.36%		22,898,909		10.33%	
				Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	60.00%			72.00 %		53.00%	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		72.00%		120.00%		
				Persentase sentra yang beroperasi secara optimal	80.00%			46.81 %		60.00%	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		46.81%		58.51%		
				Persentase pembangunan fasilitas ekonomi rakyat	7.19%			19.40 %		4.79%	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		19.40%		269.86%		
		1.2.2. 06.04. 0002	Penyelenggaraan Event Promosi Sentra Wisata Kuliner	Jumlah kegiatan promosi sentra wisata kuliner yang diselenggarakan					4 kali	247.217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		1.2.2. 06.04. 0003	Pembangunan/Re habilitasi Prasarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil	Jumlah Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil yang dibangun/direha bilitasi					35 bangunan	19,946,418	1	404.665	0	0	0	0	0	0	1	404.665	2.86%	2.03%					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.2.2. 06.04. 0004	Perencanaan Prasarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil	Jumlah dokumen Perencanaan Prasarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil yang disusun					7 dokumen	402.608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.2.2. 06.04. 0005	Pendampingan Pemasaran Produk Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang difasilitasi pembinaan					80 orang	943.905	160	140.319	0	0	0	0	0	0	160	140.319	200.00%	14.87%					Dinas Perdagangan
		1.2.2. 06.04. 0006	Fasilitasi Sertifikasi Produk Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang memperoleh fasilitasi sertifikasi produk					280 orang	645.596	117	152.959	0	0	0	0	0	0	117	152.959	41.79%	23.69%					Dinas Perdagangan
		1.2.2. 06.04. 0007	Pengelolaan Sentra Usaha Mikro Surabaya	Jumlah sentra Usaha Mikro Surabaya yang dikelola					3 lokasi	1,966,237	3	299.191	0	0	0	0	0	0	3	299.191	100.00%	15.22%					Dinas Perdagangan

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.2.2. 06.04. 0009	Penyediaan Stand Usaha Mikro	Jumlah stand usaha yang disediakan					7 lokasi	3,403,325	7	682.442	0	0	0	0	0	0	7	682.442	100.00%	20.05%					Dinas Perdagangan
		1.2.2. 06.04. 0010	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro	Jumlah Event pameran yang diikuti					16 kali	3,495,204	38	375.145	0	0	0	0	0	0	38	375.145	237.50%	10.73%					Dinas Perdagangan
		1.2.2. 06.04. 0011	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	184.677	12	3.911	0	0	0	0	0	0	12	3.911	25.00%	2.12%					Kec. Asemrowo
		1.2.2. 06.04. 0012	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	170.032	12	1.487	0	0	0	0	0	0	12	1.487	25.00%	0.87%					Kec. Benowo
		1.2.2. 06.04. 0013	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	165.724	189	6.188	0	0	0	0	0	0	189	6.188	393.75%	3.73%					Kec. Bubutan
		1.2.2. 06.04. 0014	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	214.881	12	2.879	0	0	0	0	0	0	12	2.879	25.00%	1.34%					Kec. Bulak
		1.2.2. 06.04. 0015	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	200.619	12	2.369	0	0	0	0	0	0	12	2.369	25.00%	1.18%					Kec. Dukuh Pakis
		1.2.2. 06.04. 0016	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	190.083	12	2.132	0	0	0	0	0	0	12	2.132	25.00%	1.12%					Kec. Gayungan
		1.2.2. 06.04. 0017	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	146.744	13	1.559	0	0	0	0	0	0	13	1.559	27.08%	1.06%					Kec. Genteng

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.2.2. 06.04. 0018	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	237.614	12	439	0	0	0	0	0	0	12	439	25.00%	0.18%					Kec. Gubeng
		1.2.2. 06.04. 0019	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	169.711	12	1.665	0	0	0	0	0	0	12	1.665	25.00%	0.98%					Kec. Gunung Anyar
		1.2.2. 06.04. 0020	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	110.888	8	2.415	0	0	0	0	0	0	8	2.415	16.67%	2.18%					Kec. Jambangan
		1.2.2. 06.04. 0021	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	212.314	12	5.74	0	0	0	0	0	0	12	5.74	25.00%	2.70%					Kec. Karangpilang
		1.2.2. 06.04. 0022	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	204.267	11	2.336	0	0	0	0	0	0	11	2.336	22.92%	1.14%					Kec. Kenjeran
		1.2.2. 06.04. 0023	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	209.334	15	7.243	0	0	0	0	0	0	15	7.243	31.25%	3.46%					Kec. Krembangan
		1.2.2. 06.04. 0024	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	245.583	9	828	0	0	0	0	0	0	9	828	18.75%	0.34%					Kec. Lakarsantri
		1.2.2. 06.04. 0026	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	252.738	17	7.651	0	0	0	0	0	0	17	7.651	35.42%	3.03%					Kec. Pabean Cantian

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.2.2. 06.04. 0027	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	258.415	48	7.477	0	0	0	0	0	0	48	7.477	100.00%	2.89%					Kec. Pakal
		1.2.2. 06.04. 0028	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	237.806	12	7.257	0	0	0	0	0	0	12	7.257	25.00%	3.05%					Kec. Rungkut
		1.2.2. 06.04. 0029	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	195.959	12	3.138	0	0	0	0	0	0	12	3.138	25.00%	1.60%					Kec. Sambikerep
		1.2.2. 06.04. 0030	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	233.882	11	45	0	0	0	0	0	0	11	45	22.92%	0.02%					Kec. Sawahan
		1.2.2. 06.04. 0031	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	191.73	12	2.718	0	0	0	0	0	0	12	2.718	25.00%	1.42%					Kec. Semampir
		1.2.2. 06.04. 0032	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	166.914	12	4.094	0	0	0	0	0	0	12	4.094	25.00%	2.45%					Kec. Simokerto
		1.2.2. 06.04. 0033	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	253.623	14	2.13	0	0	0	0	0	0	14	2.13	29.17%	0.84%					Kec. Sukolilo
		1.2.2. 06.04. 0034	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian					48 Kali	229.288	10	4.113	0	0	0	0	0	0	10	4.113	20.83%	1.79%					Kec. Sukomanung gal

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16												
		1.2.2. 06.04. 0035	Pengumpulan, Validasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian			48 Kali	248.737	10	1.704	0	0	0	0	0	0	10	1.704	20.83%	0.69%					Kec. Tambaksari		
		1.2.2. 06.04. 0036	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian			48 Kali	268.883	12	7.719	0	0	0	0	0	0	12	7.719	25.00%	2.87%					Kec. Tandes		
		1.2.2. 06.04. 0037	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian			48 Kali	229.697	12	6.231	0	0	0	0	0	0	12	6.231	25.00%	2.71%					Kec. Tegalsari		
		1.2.2. 06.04. 0038	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian			48 Kali	228.197	32	7.883	0	0	0	0	0	0	32	7.883	66.67%	3.45%					Kec. Tenggilis Mejoyo		
		1.2.2. 06.04. 0039	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian			48 Kali	197.716	12	5.275	0	0	0	0	0	0	12	5.275	25.00%	2.67%					Kec. Wiyung		
		1.2.2. 06.04. 0040	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian			48 Kali	243.086	18	2.963	0	0	0	0	0	0	18	2.963	37.50%	1.22%					Kec. Wonocolo		
		1.2.2. 06.04. 0041	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian			48 Kali	259.062	511	7.004	0	0	0	0	0	0	511	7.004	1,064.58 %	2.70%					Kec. Wonokromo		
		1.2.2. 06.04. 0042	Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Sentra Wisata Kuliner dan Pasar Tradisional	Jumlah sentra wisata kuliner dan pasar tradisional yang dimonitoring dan dievaluasi perkembangan usahanya			60 lokasi	737.562	61	92.374	0	0	0	0	0	0	61	92.374	101.67%	12.52%					Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		1.2.2. 06.04. 0043	Pengadaan Sarana Penunjang Tempat Usaha Skala Mikro	Jumlah sarana penunjang tempat usaha skala mikro yang disediakan			238 unit	900.21	0	5.352	0	0	0	0	0	0	5.352	0.00%	0.59%					Dinas Koperasi dan Usaha Mikro			
		1.2.2. 06.04. 0044	Pemeliharaan Tempat Usaha Skala Mikro	Jumlah tempat usaha skala mikro yang dipelihara			15 lokasi	5,095,183	15	542.481	0	0	0	0	0	15	542.481	100.00%	10.65%					Dinas Koperasi dan Usaha Mikro			
		1.2.2. 06.04. 0048	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian			48 Kali	227.275	12	8.677	0	0	0	0	0	12	8.677	25.00%	3.82%					Kec. Mulyorejo			
56	Meningkatkan distribusi pangan	1.2.2. 06.05	Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan			13,005,760		1,824,475		2,151,957		163.375		0		0		163.375		7.59%		1,824,475		14.03%			
				Tingkat frekuensi intervensi ketersediaan komoditas	15,00 kali/kejadian		19,00 kali/kejadian		15,00 kali/kejadian		0,00 kali/kejadia n		0,00 kali/kej adian		0,00 kali/ke jadian		0,00 kali/kejad ian		0.00%		19.00%		126.67%				
				Persentase pasar yang dipantau harganya	8.00%		10.45 %		8.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		10.45%		130.60%				
		1.2.2. 06.05. 0001	Analisa dan Evaluasi Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah	Jumlah Laporan Analisa Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah			12 laporan	695.558	3	42.4	0	0	0	0	0	3	42.4	25.00%	6.10%					Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah			
		1.2.2. 06.05. 0003	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah kegiatan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting lainnya yang diselenggarakan			131 kali	956.379	14	62.57	0	0	0	0	0	14	62.57	10.69%	6.54%					Dinas Perdagangan			
		1.2.2. 06.05. 0004	Fasilitasi Akses Pasokan Bahan Pokok dan Barang Penting lainnya	Jumlah lembaga yang difasilitasi akses pasokan bahan pokok dan barang penting lainnya			10 lembaga	500.019	8	58.405	0	0	0	0	0	8	58.405	80.00%	11.68%					Dinas Perdagangan			
57	Meningkatkan produktivitas sektor pertanian	1.2.2. 06.06	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian			5,476,667		550.416		974.75		17.89		0		0		17.89		1.84%		550.416		10.05%			

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
				Persentase pembudidaya yang omzetnya meningkat	65.00%		67.49 %		63.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		67.49%		103.83%		
		1.2.2. 06.06. 0001	Promosi Pemasaran Produk Pertanian	Jumlah kegiatan promosi pemasaran produk pertanian yang dilaksanakan					67 kali	974.75	14	17.89	0	0	0	0	0	14	17.89	20.90%	1.84%					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		2	Penunjang Urusan Pemerintahan																								
		2.1	Fungsi Manajemen																								
		2.1.2	Non Pelayanan Dasar																								
		2.1.2. 01	Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan																								
58	Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik	2.1.2. 01.01	Program Pengendalian Pembangunan Daerah			28,235,522		5,492,294		5,500,840		964.256		0		0		0	964.256		17.53%		5,492,294		19.45%		
				Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan di aspek waktu	90.00%		92.29 %		90.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		92.29%		102.55%		
				Tingkat capaian keberhasilan kegiatan di aspek output	100.00%		94.45 %		98.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		94.45%		94.45%		
		2.1.2. 01.01. 0001	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah					72 PD	741.262	5	160.746	0	0	0	0	0	5	160.746	6.94%	21.69%					Badan Perencanaan Pembangunan	
		2.1.2. 01.01. 0005	Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring kegiatan pembangunann ya					72 lembaga	1,508,652	75	275.121	0	0	0	0	0	75	275.121	104.17%	18.24%					Bagian Administrasi Pembangunan	
		2.1.2. 01.01. 0006	Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan	Jumlah sistem informasi manajemen sumber daya pemerintahan yang dikembangkan dan dipelihara					7 sistem	2,168,861	0	367.419	0	0	0	0	0	0	367.419	0.00%	16.94%					Bagian Administrasi Pembangunan	

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		2.1.2. 01.01. 0007	Evaluasi Kinerja APBD Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja APBD yang disusun			16 dokumen	1,082,064	5	160.97	0	0	0	0	0	0	5	160.97	31.25%	14.88%					Bagian Administrasi Pembangunan		
		2.1.2. 01.02	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			115,813,713	22,612,915	25,791,464	2,167,528	0	0	0	0	0	0	2,167,528		8.40%		22,612,915		19.53%					
				Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100.00%		98.61 %	100.00%	0.00%		0.00%		0.00%	0.00%		0.00%		0.00%		98.61%		98.61%					
				Persentase PD lingkup bidang kesejahteraan rakyat dan aparat pemerintahan yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas	85.00%		100.00 %	75.00%	0.00%		0.00%		0.00%	0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		117.65%					
				Persentase PD lingkup bidang fisik dan prasarana yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas	85.00%		100.00 %	75.00%	0.00%		0.00%		0.00%	0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		117.65%					
				Persentase PD lingkup bidang ekonomi yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas	85.00%		100.00 %	75.00%	0.00%		0.00%		0.00%	0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		117.65%					
		2.1.2. 01.02. 0008	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi perencanaan pembangunan			2140 lembaga	605.961	2401	157.391	0	0	0	0	0	0	2401	157.391	112.20%	25.97%					Badan Perencanaan Pembangunan		
		2.1.2. 01.02. 0014	Penelitian dan Pengembangan Inovasi Pembangunan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi			4 dokumen	826.858	52254	158.646	0	0	0	0	0	0	52254	158.646	1,306,350.00%	19.19%					Badan Perencanaan Pembangunan		
		2.1.2. 01.02. 0016	Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Infrastruktur Kota	Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Infrastruktur Kota			4 dokumen	872.473	0	256.837	0	0	0	0	0	0	0	256.837	0.00%	29.44%					Badan Perencanaan Pembangunan		

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2. 01.02. 0017	Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Kepariwisata dan Pertanian	Jumlah Kajian Pendukung Perencanaan Kepariwisata dan Pertanian yang disusun					2 dokumen	638.192	0	85.477	0	0	0	0	0	0	0	85.477	0.00%	13.39%					Badan Perencanaan Pembangunan
		2.1.2. 01.02. 0018	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah					17 dokumen	139.429	4	12.825	0	0	0	0	0	0	4	12.825	23.53%	9.20%					Badan Perencanaan Pembangunan
		2.1.2. 01.02. 0019	Analisa Kinerja Indikator Ekonomi Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja Indikator Ekonomi yang disusun					6 dokumen	1,133,648	0	28	0	0	0	0	0	0	0	28	0.00%	2.47%					Badan Perencanaan Pembangunan
		2.1.2. 01.02. 0020	Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen kajian pendukung perencanaan kesejahteraan rakyat					1 dokumen	448.744	0	54.901	0	0	0	0	0	0	0	54.901	0.00%	12.23%					Badan Perencanaan Pembangunan
		2.1.2. 01.02. 0021	Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah dokumen kajian pendukung perencanaan tata kelola pemerintahan yang disusun					2 dokumen	524.965	0	95.228	0	0	0	0	0	0	0	95.228	0.00%	18.14%					Badan Perencanaan Pembangunan
		2.1.2. 01.02. 0022	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen rencana dan anggaran rencana pembangunan daerah yang disusun					10 dokumen	1,298,177	0	212.093	0	0	0	0	0	0	0	212.093	0.00%	16.34%					Badan Perencanaan Pembangunan
		2.1.2. 01.02. 0024	Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pendapatan Daerah yang disusun					2 dokumen	798.834	0	161.606	0	0	0	0	0	0	0	161.606	0.00%	20.23%					Badan Perencanaan Pembangunan
		2.1.2. 01.02. 0025	Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen bahan RAPBD dan perubahan APBD yang disusun					6 dokumen	1,462,207	1	176.675	0	0	0	0	0	0	1	176.675	16.67%	12.08%					Bagian Administrasi Pembangunan
		2.1.2. 01.02. 0035	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah					17 dokumen	705.974	4	4.173	0	0	0	0	0	0	4	4.173	23.53%	0.59%					Bagian Umum dan Protokol

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16		
		2.1.2. 01.02. 0039	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah					17 dokumen	121.665	4	6.785	0	0	0	0	0	0	4	6.785	23.53%	5.58%					Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil		
		2.1.2. 01.02. 0040	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah					17 dokumen	536.819	4	955	0	0	0	0	0	0	4	955	23.53%	0.18%					Dinas Kesehatan		
		2.1.2. 01.02. 0043	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah					17 dokumen	502.545	4	168.815	0	0	0	0	0	0	4	168.815	23.53%	33.59%					Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		
		2.1.2. 01.02. 0044	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah					17 dokumen	325.305	4	11.018	0	0	0	0	0	0	4	11.018	23.53%	3.39%					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		
		2.1.2. 01.02. 0047	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah					17 dokumen	439.134	4	20.145	0	0	0	0	0	0	4	20.145	23.53%	4.59%					Dinas Pendidikan		
		2.1.2. 01.02. 0054	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah					17 dokumen	313.87	4	8.824	0	0	0	0	0	0	4	8.824	23.53%	2.81%					Inspektorat		
		2.1.2. 01.02. 0055	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	153.881	4	2.992	0	0	0	0	0	0	4	2.992	100.00%	1.94%					Kec. Asemrowo		

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2. 01.02. 0057	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	170.325	4	3.96	0	0	0	0	0	0	4	3.96	100.00%	2.32%					Kec. Benowo
		2.1.2. 01.02. 0059	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	199.292	4	5.37	0	0	0	0	0	0	4	5.37	100.00%	2.69%					Kec. Bubutan
		2.1.2. 01.02. 0061	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	200.066	4	5.725	0	0	0	0	0	0	4	5.725	100.00%	2.86%					Kec. Bulak
		2.1.2. 01.02. 0063	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	167.877	4	2.975	0	0	0	0	0	0	4	2.975	100.00%	1.77%					Kec. Dukuh Pakis
		2.1.2. 01.02. 0065	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	180.863	4	6.523	0	0	0	0	0	0	4	6.523	100.00%	3.61%					Kec. Gayungan

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2. 01.02. 0067	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	238.634	4	4.101	0	0	0	0	0	0	0	4	4.101	100.00%	1.72%				Kec. Genteng
		2.1.2. 01.02. 0069	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	260.305	4	7.006	0	0	0	0	0	0	0	4	7.006	100.00%	2.69%				Kec. Gubeng
		2.1.2. 01.02. 0071	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	168.564	4	5.48	0	0	0	0	0	0	0	4	5.48	100.00%	3.25%				Kec. Gunung Anyar
		2.1.2. 01.02. 0073	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	157.436	4	6.183	0	0	0	0	0	0	0	4	6.183	100.00%	3.93%				Kec. Jambangan
		2.1.2. 01.02. 0075	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	198.664	4	3.818	0	0	0	0	0	0	0	4	3.818	100.00%	1.92%				Kec. Karangpilang

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16		
		2.1.2. 01.02. 0077	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	168.692	4	8.145	0	0	0	0	0	0	4	8.145	100.00%	4.83%					Kec. Kenjeran		
		2.1.2. 01.02. 0079	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	259.077	4	14.881	0	0	0	0	0	0	4	14.881	100.00%	5.74%					Kec. Krembangan		
		2.1.2. 01.02. 0081	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	254.022	4	6.589	0	0	0	0	0	0	4	6.589	100.00%	2.59%					Kec. Lakarsantri		
		2.1.2. 01.02. 0083	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	219.33	4	2.864	0	0	0	0	0	0	4	2.864	100.00%	1.31%					Kec. Mulyorejo		
		2.1.2. 01.02. 0085	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	204.186	4	6.906	0	0	0	0	0	0	4	6.906	100.00%	3.38%					Kec. Pabean Cantian		

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16		
		2.1.2. 01.02. 0087	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	198.34	4	3.836	0	0	0	0	0	0	4	3.836	100.00%	1.93%					Kec. Pakal		
		2.1.2. 01.02. 0089	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	301.094	4	5.335	0	0	0	0	0	0	4	5.335	100.00%	1.77%					Kec. Rungkut		
		2.1.2. 01.02. 0091	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	198.78	4	4.988	0	0	0	0	0	0	4	4.988	100.00%	2.51%					Kec. Sambikerep		
		2.1.2. 01.02. 0093	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	234.212	24	5.582	0	0	0	0	0	0	24	5.582	600.00%	2.38%					Kec. Sawahan		
		2.1.2. 01.02. 0095	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	179.782	4	6.47	0	0	0	0	0	0	4	6.47	100.00%	3.60%					Kec. Semampir		

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2. 01.02. 0097	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	206.267	4	6.375	0	0	0	0	0	0	4	6.375	100.00%	3.09%					Kec. Simokerto
		2.1.2. 01.02. 0099	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	275.816	4	6.025	0	0	0	0	0	0	4	6.025	100.00%	2.18%					Kec. Sukolilo
		2.1.2. 01.02. 0101	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	251.251	4	5.89	0	0	0	0	0	0	4	5.89	100.00%	2.34%					Kec. Sukomanung gal
		2.1.2. 01.02. 0103	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	287.119	4	8.35	0	0	0	0	0	0	4	8.35	100.00%	2.91%					Kec. Tambaksari
		2.1.2. 01.02. 0105	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	278.509	4	6.026	0	0	0	0	0	0	4	6.026	100.00%	2.16%					Kec. Tandes

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16		
		2.1.2. 01.02. 0107	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	177.486	4	5.702	0	0	0	0	0	0	4	5.702	100.00%	3.21%					Kec. Tegalsari		
		2.1.2. 01.02. 0109	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	212.544	4	7.334	0	0	0	0	0	0	4	7.334	100.00%	3.45%					Kec. Tenggilis Mejoyo		
		2.1.2. 01.02. 0111	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	188.736	4	4.077	0	0	0	0	0	0	4	4.077	100.00%	2.16%					Kec. Wiyung		
		2.1.2. 01.02. 0113	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	233.521	4	4.364	0	0	0	0	0	0	4	4.364	100.00%	1.87%					Kec. Wonocolo		
		2.1.2. 01.02. 0117	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah					17 dokumen	34.874	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	23.53%	0.00%					RSUD Bhakti Dharma Husada		
		2.1.2. 01.02. 0118	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah					17 dokumen	34.874	4	10.645	0	0	0	0	0	0	4	10.645	23.53%	30.52%					RSUD Dr. Mohamad Soewandie		

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16													
		2.1.2. 01.02. 0121	Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Keciptakaryaan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Keciptakaryaan, Permukiman dan Lingkungan Hidup			1 dokumen	1,031,940	0	94.796	0	0	0	0	0	0	94.796	0.00%	9.19%					Badan Perencanaan Pembangunan					
		2.1.2. 01.02. 0122	Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Perdagangan dan Ketenagakerjaan	Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Perdagangan dan Ketenagakerjaa n yang disusun			2 dokumen	591.274	0	58.686	0	0	0	0	0	0	58.686	0.00%	9.93%					Badan Perencanaan Pembangunan					
		2.1.2. 01.02. 0123	Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Forum Kota Sehat	Jumlah pelaksanaan kegiatan Forum Kota Sehat yang difasilitasi			12 kali	672.377	3	104.539	0	0	0	0	0	3	104.539	25.00%	15.55%					Badan Perencanaan Pembangunan					
		2.1.2. 01.02. 0125	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah			48 Kali	120.786	14	2.271	0	0	0	0	0	14	2.271	29.17%	1.88%					Kec. Asemrowo					
		2.1.2. 01.02. 0126	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			4 lembaga	258.609	4	7.767	0	0	0	0	0	4	7.767	100.00%	3.00%					Kec. Wonokromo					
		2.1.2. 01.02. 0127	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah			48 Kali	216.088	290	9.967	0	0	0	0	0	290	9.967	604.17%	4.61%					Kec. Wonokromo					
		2.1.2. 01.02. 0128	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah			48 Kali	183.941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Kec. Tambaksari					
		2.1.2. 01.02. 0129	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah			48 Kali	128.556	12	1.981	0	0	0	0	0	12	1.981	25.00%	1.54%					Kec. Benowo					

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16		
		2.1.2. 01.02. 0130	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	163.084	270	8.172	0	0	0	0	0	0	270	8.172	562.50%	5.01%					Kec. Bubutan		
		2.1.2. 01.02. 0131	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	148.761	12	1.857	0	0	0	0	0	0	12	1.857	25.00%	1.25%					Kec. Bulak		
		2.1.2. 01.02. 0132	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	141.266	12	6.098	0	0	0	0	0	0	12	6.098	25.00%	4.32%					Kec. Dukuh Pakis		
		2.1.2. 01.02. 0133	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	157.722	12	2.118	0	0	0	0	0	0	12	2.118	25.00%	1.34%					Kec. Gayungan		
		2.1.2. 01.02. 0134	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	171.364	12	800	0	0	0	0	0	0	12	800	25.00%	0.47%					Kec. Genteng		
		2.1.2. 01.02. 0135	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	189.871	72	1.644	0	0	0	0	0	0	72	1.644	150.00%	0.87%					Kec. Gubeng		
		2.1.2. 01.02. 0136	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	124.775	58	1.711	0	0	0	0	0	0	58	1.711	120.83%	1.37%					Kec. Gunung Anyar		
		2.1.2. 01.02. 0137	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	109.163	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	16.67%	0.00%					Kec. Jambangan		

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2. 01.02. 0138	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	134.89	28	900	0	0	0	0	0	0	28	900	58.33%	0.67%					Kec. Karangpilang
		2.1.2. 01.02. 0139	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	125.565	60	2.109	0	0	0	0	0	0	60	2.109	125.00%	1.68%					Kec. Kenjeran
		2.1.2. 01.02. 0140	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	216.346	9	5.126	0	0	0	0	0	0	9	5.126	18.75%	2.37%					Kec. Krembangan
		2.1.2. 01.02. 0141	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	174.316	18	1.25	0	0	0	0	0	0	18	1.25	37.50%	0.72%					Kec. Lakarsantri
		2.1.2. 01.02. 0142	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	155.65	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	25.00%	0.00%					Kec. Mulyorejo
		2.1.2. 01.02. 0143	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	171.027	12	5.1	0	0	0	0	0	0	12	5.1	25.00%	2.98%					Kec. Pabean Cantian
		2.1.2. 01.02. 0144	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	148.743	12	1.604	0	0	0	0	0	0	12	1.604	25.00%	1.08%					Kec. Pakal
		2.1.2. 01.02. 0145	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	231.493	12	2.646	0	0	0	0	0	0	12	2.646	25.00%	1.14%					Kec. Rungkut

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16		
		2.1.2. 01.02. 0146	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	145.847	12	1.761	0	0	0	0	0	0	12	1.761	25.00%	1.21%					Kec. Sambikerep		
		2.1.2. 01.02. 0147	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	168.637	12	4.549	0	0	0	0	0	0	12	4.549	25.00%	2.70%					Kec. Sawahan		
		2.1.2. 01.02. 0148	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	116.328	15	2.34	0	0	0	0	0	0	15	2.34	31.25%	2.01%					Kec. Semampir		
		2.1.2. 01.02. 0149	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	162.795	12	9.03	0	0	0	0	0	0	12	9.03	25.00%	5.55%					Kec. Simokerto		
		2.1.2. 01.02. 0150	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	190.05	12	2.229	0	0	0	0	0	0	12	2.229	25.00%	1.17%					Kec. Sukolilo		
		2.1.2. 01.02. 0151	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	183.226	10	1.8	0	0	0	0	0	0	10	1.8	20.83%	0.98%					Kec. Sukomanung gal		
		2.1.2. 01.02. 0152	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	215.147	12	6.802	0	0	0	0	0	0	12	6.802	25.00%	3.16%					Kec. Tandes		
		2.1.2. 01.02. 0153	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	160.147	10	2.047	0	0	0	0	0	0	10	2.047	20.83%	1.28%					Kec. Tegalsari		

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16		
		2.1.2. 01.02. 0154	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	167.85	8	5.044	0	0	0	0	0	0	8	5.044	16.67%	3.01%					Kec. Tenggilis Mejoyo		
		2.1.2. 01.02. 0155	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	154.199	12	4.59	0	0	0	0	0	0	12	4.59	25.00%	2.98%					Kec. Wiyung		
		2.1.2. 01.02. 0156	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					48 Kali	170.414	15	1.287	0	0	0	0	0	0	15	1.287	31.25%	0.76%					Kec. Wonocolo		
		2.1.2. 02	Keuangan																										
59	Meningkatkan dan mengoptimalk an pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien	2.1.2. 02.01	Program Pengelolaan Keuangan Daerah			25,082,100		5,333,055		6,898,231		1,291,525		0		0		0		1,291,525		18.72%			5,333,055		21.26%		
				Tingkat ketepatan penyelesaian dokumen keuangan	80.00%		100.00 %		80.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		125.00%				
		2.1.2. 02.01. 0001	Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah					4 dokumen	57.969	1	10.245	0	0	0	0	0	0	1	10.245	25.00%	17.67%					Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah		
		2.1.2. 02.01. 0002	Koordinasi Perimbangan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Perimbangan Keuangan Daerah					4 dokumen	160.19	1	34.395	0	0	0	0	0	0	1	34.395	25.00%	21.47%					Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah		
		2.1.2. 02.01. 0003	Pelayanan Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran	Jumlah Berkas Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang dilayani					72000 berkas	3,121,440	11696	322.014	0	0	0	0	0	0	11696	322.014	16.24%	10.32%					Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah		

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2. 02.01. 0004	Pengelolaan dan Penatausahaan Penerimaan serta Pengeluaran Daerah	Jumlah dokumen Penerimaan serta Pengeluaran Daerah yang dikelola					245 dokumen	337.635	62	51.762	0	0	0	0	0	0	62	51.762	25.31%	15.33%					Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
		2.1.2. 02.01. 0005	Penyusunan APBD, Perubahan APBD, RAPBD dan Anggaran Kas	Jumlah Laporan Penganggaran yang Disusun					5 laporan	954.364	1	179.034	0	0	0	0	0	0	1	179.034	20.00%	18.76%					Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
		2.1.2. 02.01. 0007	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun					22 dokumen	1,151,117	7	237.618	0	0	0	0	0	0	7	237.618	31.82%	20.64%					Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
		2.1.2. 02.01. 0008	Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah yang disusun					4 dokumen	850.748	3	446.769	0	0	0	0	0	0	3	446.769	75.00%	52.51%					Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
		2.1.2. 02.01. 0011	Pengembangan Sistem Penganggaran	Jumlah sistem penganggaran yang dikembangkan					1 sistem	264.768	1	9.689	0	0	0	0	0	0	1	9.689	100.00%	3.66%					Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
		2.1.2. 02.02	Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah			170,414,651		25,550,118		29,704,654		5,319,590		0		0		0		5,319,590		17.91%		25,550,118		14.99%	
				Persentase Peningkatan Pajak Daerah	81.70%		26.83 %		33.53%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		26.83%		32.84%		
		2.1.2. 02.02. 0001	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah	Jumlah Objek Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi					23656 obyek	4,905,335	13453	1,062,928	0	0	0	0	0	0	13453	1,062,928	56.87%	21.67%					Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
		2.1.2. 02.02. 0002	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir	Jumlah Objek Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi					5496 obyek	9,079,325	18724	1,527,487	0	0	0	0	0	0	18724	1,527,487	340.68%	16.82%					Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
		2.1.2. 02.02. 0003	Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB	Jumlah Objek PBB dan BPHTB hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi					672096 obyek	11,087,452	683772	1,660,526	0	0	0	0	0	0	683772	1,660,526	101.74%	14.98%					Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2. 02.02. 0004	Penagihan, Pelayanan Pengurangan, Angsuran, Restitusi, Kompensasi, Keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir	Jumlah berkas Penagihan dan Pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir yang ditagih dan dilayani					6852 berkas	1,008,084	2216	358.978	0	0	0	0	0	0	2216	358.978	32.34%	35.61%					Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
		2.1.2. 02.02. 0005	Penagihan, Pelayanan Pengurangan, Angsuran, Restitusi, Kompensasi, Keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Air Tanah	Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Air Tanah yang ditagih dan dilayani					4376 berkas	806.976	2966	129.849	0	0	0	0	0	0	2966	129.849	67.78%	16.09%					Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
		2.1.2. 02.02. 0006	Penagihan, Pelayanan Pengurangan, Angsuran, Restitusi, Kompensasi, Keberatan dan Penghapusan Piutang PBB dan BPHTB	Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang PBB dan BPHTB yang ditagih dan dilayani					195392 berkas	2,817,481	63810	579.822	0	0	0	0	0	0	63810	579.822	32.66%	20.58%					Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
		2.1.2. 03	Kebijakan, Pelayanan Publik, dan Koordinasi Perangkat Daerah																								
60	Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik	2.1.2. 03.01	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaa n			31,332,209		2,808,276		3,160,159		347.938		0		0		0		347.938		11.01%		2,808,276		8.96%	
				Persentase Standar Pelayanan (SP), yang di dalamnya mencakup proses bisnis, yang tersusun	100.00%		100.00 %		100.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		100.00%		

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16		
				Persentase Pendampingan Penyusunan POS (Prosedur Operasional Standar) SKPD	100.00%		100.00 %		100.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		100.00%				
				Persentase Prosedur Operasional Standar (POS) dan Standar Pelayanan (SP) Perangkat Daerah yang dievaluasi	75.00%		43.47 %		45.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		43.47%		57.97%				
				Persentase Perangkat Daerah (PD) yang dilakukan evaluasi kelembagaan	100.00%		100.00 %		100.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		100.00%				
		2.1.2. 03.01. 0001	Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analis Beban Kerja serta Standar Kompetensi	Jumlah dokumen pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta standar kompetensi yang disusun					2 dokumen	603.798	0	169.76	0	0	0	0	0	0	0	169.76	0.00%	28.12%				Bagian Organisasi			
		2.1.2. 03.01. 0002	Pelaksanaan Analisis Kelembagaan	Jumlah dokumen pelaksanaan analisis kelembagaan yang disusun					1 dokumen	386.799	0	34.342	0	0	0	0	0	0	0	34.342	0.00%	8.88%				Bagian Organisasi			
		2.1.2. 03.01. 0003	Pembinaan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah POS perangkat daerah yang dilakukan monitoring dan evalusi					155 POS	637.9	0	63.964	0	0	0	0	0	0	0	63.964	0.00%	10.03%				Bagian Organisasi			
		2.1.2. 03.01. 0004	Peningkatan Implementasi Standar Pelayanan	Jumlah unit pelayanan yang dilakukan peningkatan implementasi standar pelayanan					264 lembaga	260.311	0	28.488	0	0	0	0	0	0	0	28.488	0.00%	10.94%				Bagian Organisasi			
		2.1.2. 03.01. 0006	Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja dan Monitoring Implementasi Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen pendampingan penyusunan laporan kinerja dan monitoring implementasi reformasi birokrasi yang disusun					2 dokumen	529.928	1	49.135	0	0	0	0	0	0	1	49.135	50.00%	9.27%				Bagian Organisasi			

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		2.1.2. 03.01. 0008	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah unit layanan publik yang dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat			254 lembaga 741.423	0	2.25	0	0	0	0	0	0	2.25	0.00%	0.30%							Bagian Organisasi		
		2.1.2. 03.02	Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan			25,811,197		5,917,655	1,004,778	0	0	0	0		1,004,778		16.98%		5,781,505		22.40%						
				Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	100.00%	103.80 %	100.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%		105.06%		105.06%						
				Persentase produk hukum daerah yang dievaluasi	100.00%	100.00 %	100.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%		100.00%		100.00%						
				Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	100.00%	100.00 %	100.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%		100.00%		100.00%						
				Persentase Produk hukum yang disebarluaskan	100.00%	100.00 %	100.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%		100.00%		100.00%						
		2.1.2. 03.02. 0001	Evaluasi Produk Hukum Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi produk hukum daerah			12 dokumen 302.547	3	45.665	0	0	0	0	0	0	3	45.665	25.00%	15.09%					Bagian Hukum			
		2.1.2. 03.02. 0002	Penanganan Permasalahan Bidang Hukum	Jumlah permasalahan hukum yang ditangani			65 permasalahan hukum	12	491.949	0	0	0	0	0	0	12	491.949	18.46%	16.93%					Bagian Hukum			
		2.1.2. 03.02. 0003	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah	Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun			70 rancangan produk hukum	15	248.468	0	0	0	0	0	0	15	248.468	21.43%	16.20%					Bagian Hukum			
		2.1.2. 03.02. 0004	Publikasi Produk Hukum	Jumlah produk hukum yang dipublikasi			70 produk hukum	13	218.696	0	0	0	0	0	0	13	218.696	18.57%	18.61%					Bagian Hukum			
		2.1.2. 03.03	Program Penataan Daerah Otonom			641,328,535		126,293,876	73,938,252	14,768,038	0	0	0		14,768,038		19.97%		126,293,876		19.69%						
				Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100.00%	100.00 %	100.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%		100.00%		100.00%						
				Persentase nama rupabumi yang memenuhi syarat untuk diajukan pembakuan	100.00%	64.00 %	71.27%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%		64.00%		64.00%						

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2. 03.03. 0001	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah					2 dokumen	756.516	0	112.29	0	0	0	0	0	0	0	112.29	0.00%	14.84%					Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		2.1.2. 03.03. 0002	Evaluasi Perkembangan Kelurahan	Jumlah pelaksanaan evaluasi perkembangan kelurahan					1 kali	515.569	1	117.629	0	0	0	0	0	0	1	117.629	100.00%	22.82%					Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		2.1.2. 03.03. 0003	Pembakuan Nama Rupabumi di Kota Surabaya	Jumlah objek rupabumi yang berpotensi diajukan pembakuan					115 objek	532.767	0	46.08	0	0	0	0	0	0	0	46.08	0.00%	8.65%					Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		2.1.2. 03.03. 0004	Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang mengikuti pembinaan administrasi umum pemerintahan					185 lembaga	926.805	0	57.424	0	0	0	0	0	0	0	57.424	0.00%	6.20%					Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		2.1.2. 03.03. 0005	Pembinaan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan Administrasi Lembaga Kemasyarakata n					16 kali	3,108,929	0	229.146	0	0	0	0	0	0	0	229.146	0.00%	7.37%					Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		2.1.2. 03.03. 0006	Penataan, Pembinaan dan Penegasan Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen Penataan, Pembinaan dan Penegasan Wilayah Kecamatan					1 dokumen	1,600,072	0	125.319	0	0	0	0	0	0	0	125.319	0.00%	7.83%					Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		2.1.2. 03.03. 0161	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					139 Lembaga	964.843	140	191.55	0	0	0	0	0	0	140	191.55	100.72%	19.85%					Kec. Asemrowo
		2.1.2. 03.03. 0162	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					183 Lembaga	1,216,197	183	252.6	0	0	0	0	0	0	183	252.6	100.00%	20.77%					Kec. Benowo

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16		
		2.1.2. 03.03. 0163	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					414 Lembaga	2,570,283	415	567.75	0	0	0	0	0	0	415	567.75	100.24%	22.09%					Kec. Bubutan		
		2.1.2. 03.03. 0164	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					157 Lembaga	1,122,330	157	216.9	0	0	0	0	0	0	157	216.9	100.00%	19.33%					Kec. Bulak		
		2.1.2. 03.03. 0165	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					195 Lembaga	1,293,730	196	269.7	0	0	0	0	0	0	196	269.7	100.51%	20.85%					Kec. Dukuh Pakis		
		2.1.2. 03.03. 0166	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					197 Lembaga	1,334,797	197	272.25	0	0	0	0	0	0	197	272.25	100.00%	20.40%					Kec. Gayungan		
		2.1.2. 03.03. 0167	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					364 Lembaga	2,242,383	368	335.2	0	0	0	0	0	0	368	335.2	101.10%	14.95%					Kec. Genteng		
		2.1.2. 03.03. 0168	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					480 Lembaga	2,944,903	480	658.5	0	0	0	0	0	0	480	658.5	100.00%	22.36%					Kec. Gubeng		
		2.1.2. 03.03. 0169	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					215 Lembaga	1,436,897	215	296.4	0	0	0	0	0	0	215	296.4	100.00%	20.63%					Kec. Gunung Anyar		

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2. 03.03. 0170	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					168 Lembaga	1,143,683	168	232.5	0	0	0	0	0	0	168	232.5	100.00%	20.33%					Kec. Jambangan
		2.1.2. 03.03. 0171	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					220 Lembaga	1,416,830	220	301.35	0	0	0	0	0	0	220	301.35	100.00%	21.27%					Kec. Karangpilang
		2.1.2. 03.03. 0172	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					455 Lembaga	2,696,663	458	621.75	0	0	0	0	0	0	458	621.75	100.66%	23.06%					Kec. Kenjeran
		2.1.2. 03.03. 0173	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					430 Lembaga	2,655,233	430	503.35	0	0	0	0	0	0	430	503.35	100.00%	18.96%					Kec. Krembangan
		2.1.2. 03.03. 0174	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					199 Lembaga	1,444,437	199	274.15	0	0	0	0	0	0	199	274.15	100.00%	18.98%					Kec. Lakarsantri
		2.1.2. 03.03. 0175	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					346 Lembaga	2,041,587	346	477.75	0	0	0	0	0	0	346	477.75	100.00%	23.40%					Kec. Mulyorejo
		2.1.2. 03.03. 0176	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					377 Lembaga	2,289,167	377	519	0	0	0	0	0	0	377	519	100.00%	22.67%					Kec. Pabean Cantian

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2. 03.03. 0177	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					226 Lembaga	1,512,930	226	208	0	0	0	0	0	0	226	208	100.00%	13.75%					Kec. Pakal
		2.1.2. 03.03. 0178	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					486 Lembaga	2,977,753	487	672.6	0	0	0	0	0	0	487	672.6	100.21%	22.59%					Kec. Rungkut
		2.1.2. 03.03. 0179	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					250 Lembaga	1,642,531	250	344.85	0	0	0	0	0	0	250	344.85	100.00%	21.00%					Kec. Sambikerep
		2.1.2. 03.03. 0180	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					627 Lembaga	3,547,780	626	858.6	0	0	0	0	0	0	626	858.6	99.84%	24.20%					Kec. Sawahan
		2.1.2. 03.03. 0181	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					636 Lembaga	3,728,450	636	871.35	0	0	0	0	0	0	636	871.35	100.00%	23.37%					Kec. Semampir
		2.1.2. 03.03. 0182	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					356 Lembaga	2,274,383	427	490.05	0	0	0	0	0	0	427	490.05	119.94%	21.55%					Kec. Simokerto
		2.1.2. 03.03. 0183	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					439 Lembaga	2,797,123	439	605.85	0	0	0	0	0	0	439	605.85	100.00%	21.66%					Kec. Sukolilo

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2. 03.03. 0184	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					323 Lembaga	2,057,270	323	444.15	0	0	0	0	0	0	323	444.15	100.00%	21.59%					Kec. Sukomanung gal
		2.1.2. 03.03. 0185	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					748 Lembaga	4,465,943	748	1,025,100	0	0	0	0	0	0	748	1,025,100	100.00%	22.95%					Kec. Tambaksari
		2.1.2. 03.03. 0186	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					371 Lembaga	2,356,503	373	511.2	0	0	0	0	0	0	373	511.2	100.54%	21.69%					Kec. Tandes
		2.1.2. 03.03. 0187	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					366 Lembaga	2,298,850	366	503.55	0	0	0	0	0	0	366	503.55	100.00%	21.90%					Kec. Tegalsari
		2.1.2. 03.03. 0188	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					185 Lembaga	1,237,297	185	255.3	0	0	0	0	0	0	185	255.3	100.00%	20.63%					Kec. Tenggilis Mejoyo
		2.1.2. 03.03. 0189	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					210 Lembaga	1,440,063	630	290.4	0	0	0	0	0	0	630	290.4	300.00%	20.17%					Kec. Wiyung
		2.1.2. 03.03. 0190	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan					278 Lembaga	1,830,617	278	222.15	0	0	0	0	0	0	278	222.15	100.00%	12.14%					Kec. Wonocolo

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		2.1.2. 03.03. 0191	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			574 Lembaga	3,516,137	574	786.3	0	0	0	0	0	0	574	786.3	100.00%	22.36%					Kec. Wonokromo		
		2.1.2. 03.04	Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah			15,377,805		2,168,916		2,032,828		214.041		0		0		214.041		10.53%		2,168,916		14.10%			
				Persentase kajian/rekom endasi terkait perekonomian yang termanfaatkan sebagai dasar kebijakan/kep utusan	25.00%		40.00 %		25.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		40.00%		160.00%				
				Persentase kajian/rekom endasi di sektor kesejahteraan rakyat yang termanfaatkan sebagai dasar kebijakan/kep utusan	100.00%		100.00 %		100.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		100.00%				
		2.1.2. 03.04. 0001	Evaluasi Bidang Ketahanan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi program bidang ketahanan masyarakat yang disusun			1 dokumen	172.483	0	1.866	0	0	0	0	0	0	0	1.866	0.00%	1.08%					Bagian Administrasi Kesejahteraa n Rakyat		
		2.1.2. 03.04. 0002	Evaluasi program bidang kesejahteraan masyarakat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi program bidang kesejahteraan masyarakat yang disusun			2 dokumen	244.948	0	51.936	0	0	0	0	0	0	0	51.936	0.00%	21.20%					Bagian Administrasi Kesejahteraa n Rakyat		
		2.1.2. 03.04. 0003	Evaluasi Program Bidang Pengembangan Potensi Sumber Daya Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi Program Bidang Pengembangan Potensi Sumber Daya Masyarakat yang disusun			2 dokumen	304.542	0	7.539	0	0	0	0	0	0	0	7.539	0.00%	2.48%					Bagian Administrasi Kesejahteraa n Rakyat		

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12=8+9+10+11		13=12/7*100	14=6+12		15=14/5*100		16		
		2.1.2. 03.04. 0004	Evaluasi Program Layanan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi Program Layanan Masyarakat					1 dokumen	174.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%				Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat		
		2.1.2. 03.04. 0006	Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Mikro	Jumlah dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Mikro					4 dokumen	392.672	0	15.6	0	0	0	0	0	0	15.6	0.00%	3.97%				Bagian Administrasi Perencanaan dan Usaha Daerah		
		2.1.2. 03.04. 0007	Fasilitasi penyelenggaraan bidang ketahanan masyarakat	Jumlah kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan bidang ketahanan masyarakat yang diselenggarakan					19 kali	269.735	3	42.937	0	0	0	0	0	3	42.937	15.79%	15.92%				Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat		
		2.1.2. 03.04. 0008	Fasilitasi Penunjang Sekretariat Komda Lansia	Jumlah kegiatan fasilitasi penunjang sekretariat Komda Lansia					3 kali	236.447	1	42.98	0	0	0	0	0	1	42.98	33.33%	18.18%				Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat		
		2.1.2. 03.04. 0009	Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	Jumlah kegiatan Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah yang diselenggarakan					31 kali	237.93	5	51.183	0	0	0	0	0	5	51.183	16.13%	21.51%				Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat		
		2.1.2. 03.05	Program Peningkatan kapasitas lembaga fasilitator perwakilan rakyat daerah			542,885,870		83,411,985		102,333,617		13,561,844		0		0		0	13,561,844		13.25%		83,411,985		15.36%		
				Persentase kegiatan DPRD terkait rapat dan perundang-undangan yang terfasilitasi	100.00%		100.00 %		100.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%			0.00%		100.00%		100.00%			
				Persentase kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang terfasilitasi	100.00%		100.00 %		100.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%			0.00%		100.00%		100.00%			
		2.1.2. 03.05. 0001	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD					38 kali	3,266,537	13	403.402	0	0	0	0	0	13	403.402	34.21%	12.35%				Sekretariat DPRD		

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2. 03.05. 0002	Publikasi Kegiatan DPRD	Jumlah jenis media publikasi kegiatan DPRD					5 jenis	16,805,321	7	3,658,581	0	0	0	0	0	0	7	3,658,581	140.00%	21.77%					Sekretariat DPRD
		2.1.2. 03.05. 0003	Fasilitasi Reses DPRD	Jumlah Fasilitasi Reses					2 kali	8,488,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Sekretariat DPRD
		2.1.2. 03.05. 0004	Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Kegiatan Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD					185 kali	61,542,102	62	8,202,860	0	0	0	0	0	0	62	8,202,860	33.51%	13.33%					Sekretariat DPRD
		2.1.2. 03.05. 0005	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda usul prakarsa DPRD yang dibahas					6 dokumen	2,371,664	0	288.351	0	0	0	0	0	0	0	288.351	0.00%	12.16%					Sekretariat DPRD
		2.1.2. 03.05. 0006	Penyusunan dokumen Kajian/Telaah terhadap Kebijakan Daerah	Jumlah dokumen kajian/telaah terhadap kebijakan daerah yang disusun					10 dokumen	1,362,828	0	15.299	0	0	0	0	0	0	0	15.299	0.00%	1.12%					Sekretariat DPRD
		2.1.2. 03.05. 0007	Pengendalian Keamanan	Jumlah kegiatan pengendalian keamanan yang dilaksanakan					264 kali	1,269,937	62	85.457	0	0	0	0	0	0	62	85.457	23.48%	6.73%					Sekretariat DPRD
		2.1.2. 03.05. 0008	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah rapat- rapat alat kelengkapan Dewan yang diselenggarakan					930 kali	2,803,208	179	317.039	0	0	0	0	0	0	179	317.039	19.25%	11.31%					Sekretariat DPRD
		2.1.2. 03.05. 0009	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Paripurna	jumlah rapat- paripurna yang diselenggarakan					45 kali	1,857,260	4	91.409	0	0	0	0	0	0	4	91.409	8.89%	4.92%					Sekretariat DPRD
		2.1.2. 03.05. 0010	Penerimaan Studi Banding	Jumlah studi banding yang difasilitasi					240 kali	2,566,479	42	499.446	0	0	0	0	0	0	42	499.446	17.50%	19.46%					Sekretariat DPRD
		2.1.2. 03.06	Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			34,295,564		11,360,694		12,345,837		2,519,484		0		0		0		2,519,484		20.41%		11,360,694		33.13%	
				Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar	100.00%		100.00 %		100.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		100.00%		

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		2.1.2. 03.06. 0001	Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			100%	12,345,837	100	2,519,484	0	0	0	0	0	0	100	2,519,484	100.00%	20.41%					Bagian Umum dan Protokol		
		2.1.2. 03.07	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah			100,767,63 6	10,757,048		11,334,541		825.122		0		0		0	825.122		7.28%		10,757,048		10.68%			
				Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti	42.86%		70.59 %		42.86%	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	70.59%		164.69%				
				Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) luar negeri yang ditindaklanjuti	33.33%		80.00 %		33.33%	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	80.00%		240.02%				
				Persentase MoU kerjasama (non perdagangan) yang dievaluasi	100.00%		60.00 %		75.00%	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	60.00%		60.00%				
		2.1.2. 03.07. 0001	Fasilitasi Delegasi Internasional di Dalam Negeri	Jumlah fasilitasi kegiatan delegasi internasional di dalam negeri			10 kali	751.063	5	114.036	0	0	0	0	0	0	5	114.036	50.00%	15.18%					Bagian Administrasi Kerjasama		
		2.1.2. 03.07. 0002	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri non Perdagangan	Jumlah mitra kerjasama dalam negeri non perdagangan yang difasilitasi			16 lembaga	1,191,243	11	421.574	0	0	0	0	0	0	11	421.574	68.75%	35.39%					Bagian Administrasi Kerjasama		
		2.1.2. 03.07. 0003	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri non Perdagangan	Jumlah mitra kerjasama luar negeri non perdagangan yang difasilitasi			4 lembaga	1,593,010	0	178.437	0	0	0	0	0	0	0	178.437	0.00%	11.20%					Bagian Administrasi Kerjasama		
		2.1.2. 03.07. 0004	Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan ke Luar Negeri	Jumlah delegasi pendidikan yang difasilitasi			78 orang	7,258,250	0	53.376	0	0	0	0	0	0	0	53.376	0.00%	0.74%					Bagian Administrasi Kerjasama		

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5		6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	16		
		2.1.2. 03.07. 0005	Monitoring dan evaluasi kerjasama daerah	Jumlah mitra kerjasama daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi				26 lembaga	384.135	0	52.5	0	0	0	0	0	0	52.5	0.00%	13.67%						Bagian Administrasi Kerjasama			
		2.1.2. 03.07. 0007	Pelaksanaan Rekomendasi Roadmap Kerjasama Daerah	Jumlah kegiatan pelaksanaan rekomendasi road map kerjasama daerah				5 kali	156.841	0	5.2	0	0	0	0	0	0	5.2	0.00%	3.32%						Bagian Administrasi Kerjasama			
61	Meningkatnya jaringan bisnis (G to G dan G to B) jasa dan perdagangan komoditi barang dalam skala internasional dan antar pulau yang ditunjang dengan pusat pelayanan informasi yang terintegrasi	2.1.2. 03.08	Program Kerjasama Bidang Perdagangan			2,584,908	175.953		236.246	4.314	0		0		0		4.314	1.83%		175.953	6.81%								
				Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan yang telah ditandatangani	100.00%		57.14 %		71.43%	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		57.14%		57.14%							
				Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan tertandanga ni yang telah terealisasi	85.71%		75.00 %		80.00%	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		75.00%		87.50%							
		2.1.2. 03.08. 0001	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri Perdagangan	Jumlah mitra kerjasama perdagangan yang ditindaklanjuti				5 lembaga	236.246	2	4.314	0	0	0	0	0	2	4.314	40.00%	1.83%						Bagian Administrasi Kerjasama			
62	Meningkatkan dan mengoptimalk an pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien	2.1.2. 03.09	Program Peningkatan Kinerja BUMD Pendukung Keuangan Daerah			2,237,691	1,662,962		1,495,143	205.4	0		0		0		205.4	13.74%		1,662,962	74.32%								
				Persentase BUMD yang berkinerja sesuai standar	83.00%		66.67 %		67.00%	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		66.67%		80.32%							

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2. 03.09. 0001	Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Jumlah BUMD yang dimonitor dan dievaluasi				6 lembaga	1,153,786	6	205.4	0	0	0	0	0	0	6	205.4	100.00%	17.80%					Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah	
		2.1.2. 03.09. 0003	Review Peraturan Daerah tentang BUMD	Jumlah dokumen Peraturan Daerah BUMD yang direview				4 dokumen	341.357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah	
		2.1.2. 04	Pengawasan																								
63	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan	2.1.2. 04.01	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal		31,964,247		5,270,534		4,623,539		459.148		0		0		0		459.148		9.93%		5,270,534		16.49%		
				Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah I	100.00%		100.00 %		100.00%	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		100.00%			
				Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah I	100.00%		100.00 %		100.00%	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		100.00%			
				Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah II	100.00%		100.00 %		100.00%	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		100.00%			
				Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah II	100.00%		100.00 %		100.00%	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		100.00%			
				Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah III	100.00%		100.00 %		100.00%	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		100.00%			
				Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah III	100.00%		100.00 %		100.00%	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		100.00%			
		2.1.2. 04.01. 0001	Pengelolaan Disiplin Pegawai	Jumlah pegawai yang mendapatkan intervensi pengelolaan disiplin pegawai				633 orang	713.027	119	127.499	0	0	0	0	0	0	119	127.499	18.80%	17.88%					Badan Kepegawaian dan Diklat	
		2.1.2. 04.01. 0002	Reviu Dokumen Pelaporan Kinerja Tingkat Kota	Jumlah dokumen pelaporan kinerja tingkat kota yang direviu				2 dokumen	201.448	0	7.098	0	0	0	0	0	0	0	7.098	0.00%	3.52%					Inspektorat	

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2. 04.01. 0003	Inventarisasi dan Monitoring Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Jumlah dokumen inventarisasi dan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan					12 dokumen	316.594	3	40.485	0	0	0	0	0	0	3	40.485	25.00%	12.79%					Inspektorat
		2.1.2. 04.01. 0008	Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan					35 lembaga	503.663	23	41.231	0	0	0	0	0	0	23	41.231	65.71%	8.19%					Inspektorat
		2.1.2. 04.01. 0009	Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan					35 lembaga	387.616	20	75.369	0	0	0	0	0	0	20	75.369	57.14%	19.44%					Inspektorat
		2.1.2. 04.01. 0010	Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan					35 lembaga	471.282	41	52.061	0	0	0	0	0	0	41	52.061	117.14%	11.05%					Inspektorat
		2.1.2. 04.01. 0011	Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektur Pembantu Wilayah IV	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan					35 lembaga	308.171	11	14.664	0	0	0	0	0	0	11	14.664	31.43%	4.76%					Inspektorat
		2.1.2. 04.01. 0013	Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah II	Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja					18 lembaga	384.603	18	9.489	0	0	0	0	0	0	18	9.489	100.00%	2.47%					Inspektorat
		2.1.2. 04.01. 0014	Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah I	Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja					18 lembaga	384.087	18	59.145	0	0	0	0	0	0	18	59.145	100.00%	15.40%					Inspektorat
		2.1.2. 04.01. 0015	Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah III	Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja					18 lembaga	363.85	11	726	0	0	0	0	0	0	11	726	61.11%	0.20%					Inspektorat
		2.1.2. 04.01. 0016	Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah IV	Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja					18 lembaga	237.305	19	1.551	0	0	0	0	0	0	19	1.551	105.56%	0.65%					Inspektorat

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5		6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	16		
		2.1.2. 04.01. 0017	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Jumlah pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP					50 kali	163.337	8	24.629	0	0	0	0	0	0	8	24.629	16.00%	15.08%					Inspektorat		
		2.1.2. 04.01. 0018	Reviu Dokumen Perencanaan Tingkat Kota	Jumlah dokumen perencanaan tingkat kota yang direviu					1 dokumen	188.554	0	5.2	0	0	0	0	0	0	0	5.2	0.00%	2.76%					Inspektorat		
		2.2	Unsur Manajemen																										
		2.2.2	Non Pelayanan Dasar																										
		2.2.2. 01	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan																										
64	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan	2.2.2. 01.01	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			103,415,79 8		14,595,122		18,529,866		2,779,366		0		0		0		2,779,366		15.00%			14,595,122		14.11%		
				Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural	97.08%		78.24 %		92.58%		0.00%		0.00%	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		78.24%		80.60%					
				Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	89.47%		70.46 %		62.52%		0.00%		0.00%	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		70.46%		78.76%					
				Persentase terbentuknya dan berfungsinya assessment centre	100.00%		70.00 %		60.00%		0.00%		0.00%	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		70.00%		70.00%					
				Persentase aparatur yang memiliki kinerja baik	95.00%		96.68 %		93.00%		0.00%		0.00%	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		96.68%		101.76%					
		2.2.2. 01.01. 0002	Pelaksanaan Assesment Centre	Jumlah pelaksanaan assesment pegawai					5 kali	492.057	3	74.696	0	0	0	0	0	0	3	74.696	60.00%	15.18%					Badan Kepegawaian dan Diklat		
		2.2.2. 01.01. 0003	Penataan Administrasi Kepegawaian	Jumlah berkas penataan administrasi kepegawaian					9513 berkas	738.125	3836	116.477	0	0	0	0	0	0	3836	116.477	40.32%	15.78%					Badan Kepegawaian dan Diklat		
		2.2.2. 01.01. 0004	Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Fungsional dan Sosial Kultural	Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi fungsional dan sosial kultural					2 jenis	2,259,865	3	409.614	0	0	0	0	0	0	3	409.614	150.00%	18.13%					Badan Kepegawaian dan Diklat		
		2.2.2. 01.01. 0005	Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial	Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial					2 jenis	4,115,798	1	146.485	0	0	0	0	0	0	1	146.485	50.00%	3.56%					Badan Kepegawaian dan Diklat		

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.2.2. 01.01. 0007	Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis	Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis					2 jenis	2,712,226	2	341.749	0	0	0	0	0	0	2	341.749	100.00%	12.60%					Badan Kepegawaian dan Diklat
		2.2.2. 01.01. 0008	Penempatan Pegawai, Promosi dan Rotasi Jabatan	Jumlah berkas penempatan pegawai, promosi dan rotasi jabatan					127 berkas	1,026,323	68	138.959	0	0	0	0	0	0	68	138.959	53.54%	13.54%					Badan Kepegawaian dan Diklat
		2.2.2. 01.01. 0009	Pengelolaan Data Pegawai	Jumlah data pegawai yang dikelola					9000 data	462.783	4290	6.838	0	0	0	0	0	0	4290	6.838	47.67%	1.48%					Badan Kepegawaian dan Diklat
		2.2.2. 01.01. 0010	Pengembangan Wawasan Aparatur	Jumlah aparatur yang dikembangkannya					439 orang	3,199,162	210	1,356,985	0	0	0	0	0	0	210	1,356,985	47.84%	42.42%					Badan Kepegawaian dan Diklat
		2.2.2. 01.01. 0011	Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pegawai yang dinilai kinerjanya					6954 orang	647.623	7046	104.939	0	0	0	0	0	0	7046	104.939	101.32%	16.20%					Badan Kepegawaian dan Diklat
		2.2.2. 01.01. 0012	Penyiapan Materi Diklat Pembelajaran (e- learning)	Jumlah materi diklat pembelajaran (e- learning)					3 materi	359.504	0	24.266	0	0	0	0	0	0	0	24.266	0.00%	6.75%					Badan Kepegawaian dan Diklat
		2.2.2. 01.01. 0013	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Jumlah tahapan seleksi penerimaan Calon PNS					4 tahap	2,224,079	0	41.377	0	0	0	0	0	0	0	41.377	0.00%	1.86%					Badan Kepegawaian dan Diklat
		2.2.2. 01.01. 0014	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah orang yang dilayani administrasi kepegawaianny a					3500 orang	292.32	0	16.981	0	0	0	0	0	0	0	16.981	0.00%	5.81%					Badan Kepegawaian dan Diklat
		2.2.2. 02	Sarana dan Prasarana Perkantoran																								
65	Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik	2.2.2. 02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,636,274, 912		420,114,71 8		499,563,13 5		78,551,567		0		0		0		78,551,567		15.72%		420,114,71 8		15.94%	
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	80.00%		86.97 %		76.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		86.97%		108.72%		
		2.2.2. 02.01. 0001	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	2,793,513	6	440.888	0	0	0	0	0	0	6	440.888	6.00%	15.78%					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2.2.2. 02.01. 0002	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,513,902	18	229.779	0	0	0	0	0	0	18	229.779	18.00%	15.18%					Badan Kepegawaian dan Diklat

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16		
		2.2.2. 02.01. 0003	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,093,182	12	151.925	0	0	0	0	0	0	12	151.925	12.00%	13.90%					Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat		
		2.2.2. 02.01. 0004	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,915,551	19	380.094	0	0	0	0	0	0	19	380.094	19.00%	19.84%					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		2.2.2. 02.01. 0005	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,241,804	15	187.01	0	0	0	0	0	0	15	187.01	15.00%	15.06%					Dinas Lingkungan Hidup		
		2.2.2. 02.01. 0006	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	3,784,467	15	697.198	0	0	0	0	0	0	15	697.198	15.00%	18.42%					Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak		
		2.2.2. 02.01. 0007	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	2,061,609	11	188.554	0	0	0	0	0	0	11	188.554	11.00%	9.15%					Badan Penanggulang an Bencana dan Perlindungan Masyarakat		
		2.2.2. 02.01. 0008	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	2,706,452	6	563.718	0	0	0	0	0	0	6	563.718	6.00%	20.83%					Badan Perencanaan Pembangunan		
		2.2.2. 02.01. 0009	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,074,280	5	143.967	0	0	0	0	0	0	5	143.967	5.00%	13.40%					Bagian Administrasi Pembangunan		
		2.2.2. 02.01. 0010	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	2,709,704	15	424.526	0	0	0	0	0	0	15	424.526	15.00%	15.67%					Bagian Hubungan Masyarakat		
		2.2.2. 02.01. 0011	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	779,237	17	110.825	0	0	0	0	0	0	17	110.825	17.00%	14.22%					Bagian Hukum		
		2.2.2. 02.01. 0012	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,165,513	15	161.778	0	0	0	0	0	0	15	161.778	15.00%	13.88%					Bagian Administrasi Kerjasama		

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.2.2. 02.01. 0013	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	914.717	15	159.023	0	0	0	0	0	0	15	159.023	15.00%	17.38%					Bagian Administrasi Kesejahteraa n Rakyat
		2.2.2. 02.01. 0014	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	580.137	13	98.141	0	0	0	0	0	0	13	98.141	13.00%	16.92%					Bagian Organisasi
		2.2.2. 02.01. 0015	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	763.344	10	86.893	0	0	0	0	0	0	10	86.893	10.00%	11.38%					Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		2.2.2. 02.01. 0016	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	513.821	6	67.39	0	0	0	0	0	0	6	67.39	6.00%	13.12%					Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah
		2.2.2. 02.01. 0017	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,672,631	5	236.22	0	0	0	0	0	0	5	236.22	5.00%	14.12%					Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
		2.2.2. 02.01. 0018	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	78,092,131	19	11,385,833	0	0	0	0	0	0	19	11,385,833	19.00%	14.58%					Bagian Umum dan Protokol
		2.2.2. 02.01. 0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	3,914,375	19	529.22	0	0	0	0	0	0	19	529.22	19.00%	13.52%					Dinas Pemadam Kebakaran
		2.2.2. 02.01. 0020	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	5,396,224	15	1,081,694	0	0	0	0	0	0	15	1,081,694	15.00%	20.05%					Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
		2.2.2. 02.01. 0021	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	11,321,659	8	1,917,162	0	0	0	0	0	0	8	1,917,162	8.00%	16.93%					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		2.2.2. 02.01. 0022	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	8,455,618	15	1,287,165	0	0	0	0	0	0	15	1,287,165	15.00%	15.22%					Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil
		2.2.2. 02.01. 0023	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	106,046,081	14	16,869,539	0	0	0	0	0	0	14	16,869,539	14.00%	15.91%					Dinas Kesehatan

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.2.2. 02.01. 0024	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	2,033,832	14	327.908	0	0	0	0	0	0	14	327.908	14.00%	16.12%					Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.2.2. 02.01. 0025	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,913,494	15	325.05	0	0	0	0	0	0	15	325.05	15.00%	16.99%					Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		2.2.2. 02.01. 0026	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	30,920,050	5	9,032,686	0	0	0	0	0	0	5	9,032,686	5.00%	29.21%					Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
		2.2.2. 02.01. 0027	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	6,382,975	11	1,615,267	0	0	0	0	0	0	11	1,615,267	11.00%	25.31%					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		2.2.2. 02.01. 0028	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	2,832,720	7	492.938	0	0	0	0	0	0	7	492.938	7.00%	17.40%					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		2.2.2. 02.01. 0029	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	6,621,320	14	1,122,356	0	0	0	0	0	0	14	1,122,356	14.00%	16.95%					Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
		2.2.2. 02.01. 0030	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	13,056,893	10	952.581	0	0	0	0	0	0	10	952.581	10.00%	7.30%					Dinas Pendidikan
		2.2.2. 02.01. 0031	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	3,213,226	6	622.338	0	0	0	0	0	0	6	622.338	6.00%	19.37%					Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		2.2.2. 02.01. 0032	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	4,629,750	16	903.497	0	0	0	0	0	0	16	903.497	16.00%	19.52%					Dinas Perdagangan
		2.2.2. 02.01. 0033	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	12,192,415	13	2,057,662	0	0	0	0	0	0	13	2,057,662	13.00%	16.88%					Dinas Perhubungan
		2.2.2. 02.01. 0034	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	7,138,293	15	1,272,421	0	0	0	0	0	0	15	1,272,421	15.00%	17.83%					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16		
		2.2.2. 02.01. 0035	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	5,229,753	17	828.503	0	0	0	0	0	0	17	828.503	17.00%	15.84%					Dinas Sosial		
		2.2.2. 02.01. 0036	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	2,427,436	16	470.611	0	0	0	0	0	0	16	470.611	16.00%	19.39%					Dinas Tenaga Kerja		
		2.2.2. 02.01. 0037	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,377,533	7	255.993	0	0	0	0	0	0	7	255.993	7.00%	18.58%					Inspektorat		
		2.2.2. 02.01. 0038	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	864.642	16	119.161	0	0	0	0	0	0	16	119.161	16.00%	13.78%					Kec. Asemrowo		
		2.2.2. 02.01. 0039	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,346,188	7	131.921	0	0	0	0	0	0	7	131.921	7.00%	9.80%					Kec. Benowo		
		2.2.2. 02.01. 0040	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,301,698	21	181.294	0	0	0	0	0	0	21	181.294	21.00%	13.93%					Kec. Bubutan		
		2.2.2. 02.01. 0041	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,206,478	7	177.746	0	0	0	0	0	0	7	177.746	7.00%	14.73%					Kec. Bulak		
		2.2.2. 02.01. 0042	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,245,156	19	187.745	0	0	0	0	0	0	19	187.745	19.00%	15.08%					Kec. Dukuh Pakis		
		2.2.2. 02.01. 0043	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,388,923	15	256.088	0	0	0	0	0	0	15	256.088	15.00%	18.44%					Kec. Gayungan		
		2.2.2. 02.01. 0044	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,443,402	8	184.756	0	0	0	0	0	0	8	184.756	8.00%	12.80%					Kec. Genteng		
		2.2.2. 02.01. 0045	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,662,110	15	218.087	0	0	0	0	0	0	15	218.087	15.00%	13.12%					Kec. Gubeng		

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.2.2. 02.01. 0046	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	983.332	11	144.761	0	0	0	0	0	0	11	144.761	11.00%	14.72%					Kec. Gunung Anyar
		2.2.2. 02.01. 0047	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,262,539	8	183.881	0	0	0	0	0	0	8	183.881	8.00%	14.56%					Kec. Jambangan
		2.2.2. 02.01. 0048	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,076,320	18	135.963	0	0	0	0	0	0	18	135.963	18.00%	12.63%					Kec. Karangpilang
		2.2.2. 02.01. 0049	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,416,743	16	185.038	0	0	0	0	0	0	16	185.038	16.00%	13.06%					Kec. Kenjeran
		2.2.2. 02.01. 0050	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,552,358	21	212.798	0	0	0	0	0	0	21	212.798	21.00%	13.71%					Kec. Krembangan
		2.2.2. 02.01. 0051	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,154,953	7	154.952	0	0	0	0	0	0	7	154.952	7.00%	13.42%					Kec. Lakarsantri
		2.2.2. 02.01. 0052	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,895,179	17	249.102	0	0	0	0	0	0	17	249.102	17.00%	13.14%					Kec. Mulyorejo
		2.2.2. 02.01. 0053	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,565,196	14	150.705	0	0	0	0	0	0	14	150.705	14.00%	9.63%					Kec. Pabean Cantian
		2.2.2. 02.01. 0054	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,327,043	8	179.393	0	0	0	0	0	0	8	179.393	8.00%	13.52%					Kec. Pakal
		2.2.2. 02.01. 0055	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,669,499	15	227.119	0	0	0	0	0	0	15	227.119	15.00%	13.60%					Kec. Rungkut
		2.2.2. 02.01. 0056	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,325,020	20	186.996	0	0	0	0	0	0	20	186.996	20.00%	14.11%					Kec. Sambikerep

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.2.2. 02.01. 0057	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	2,413,860	15	299.942	0	0	0	0	0	0	15	299.942	15.00%	12.43%					Kec. Sawahan
		2.2.2. 02.01. 0058	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,652,047	21	221.857	0	0	0	0	0	0	21	221.857	21.00%	13.43%					Kec. Semampir
		2.2.2. 02.01. 0059	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,083,007	15	148.971	0	0	0	0	0	0	15	148.971	15.00%	13.76%					Kec. Simokerto
		2.2.2. 02.01. 0060	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,645,373	15	356.149	0	0	0	0	0	0	15	356.149	15.00%	21.65%					Kec. Sukolilo
		2.2.2. 02.01. 0061	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,753,249	15	230.306	0	0	0	0	0	0	15	230.306	15.00%	13.14%					Kec. Sukomanung gal
		2.2.2. 02.01. 0062	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	2,317,896	16	262.434	0	0	0	0	0	0	16	262.434	16.00%	11.32%					Kec. Tambaksari
		2.2.2. 02.01. 0063	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,436,334	16	172.432	0	0	0	0	0	0	16	172.432	16.00%	12.00%					Kec. Tandes
		2.2.2. 02.01. 0064	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,471,202	7	177.655	0	0	0	0	0	0	7	177.655	7.00%	12.08%					Kec. Tegalsari
		2.2.2. 02.01. 0065	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,309,971	14	164.777	0	0	0	0	0	0	14	164.777	14.00%	12.58%					Kec. Tenggilis Mejoyo
		2.2.2. 02.01. 0066	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,290,869	14	184.313	0	0	0	0	0	0	14	184.313	14.00%	14.28%					Kec. Wiyung
		2.2.2. 02.01. 0067	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,394,601	6	188.224	0	0	0	0	0	0	6	188.224	6.00%	13.50%					Kec. Wonocolo

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16		
		2.2.2. 02.01. 0068	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,499,665	19	217.725	0	0	0	0	0	0	0	19	217.725	19.00%	14.52%					Kec. Wonokromo	
		2.2.2. 02.01. 0069	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	32,671,456	14	4,756,053	0	0	0	0	0	0	0	14	4,756,053	14.00%	14.56%					RSUD Bhakti Dharma Husada	
		2.2.2. 02.01. 0070	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	61,124,806	24	6,610,671	0	0	0	0	0	0	0	24	6,610,671	24.00%	10.82%					RSUD Dr. Mohamad Soewandie	
		2.2.2. 02.01. 0071	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	1,688,646	8	322.639	0	0	0	0	0	0	0	8	322.639	8.00%	19.11%					Satuan Polisi Pamong Praja	
		2.2.2. 02.01. 0072	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran					100%	18,643,730	7	3,091,564	0	0	0	0	0	0	0	7	3,091,564	7.00%	16.58%					Sekretariat DPRD	
		2.2.2. 02.02	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan			1,593,568, 610		434,221,78 1		309,687,56 5		25,702,919		0		0		0			25,702,919		8.30%		434,221,78 1		27.25%		
				Persentase pemanfaatan aset	95.00%			98.27 %		93.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		98.27%		103.44%			
				Persentase sistem informasi pemerintah kota surabaya yang diintegrasikan dengan sistem informasi barang daerah	100.00%			40.00 %		60.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		40.00%		40.00%			
				Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik	85.00%			100.00 %		81.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		117.65%			
				Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik	100.00%			81.22 %		87.18%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		81.22%		81.22%			
				Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100.00%			94.71 %		100.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		94.71%		94.71%			

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
				Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100.00%		99.11 %		100.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		99.11%		99.11%		
		2.2.2.02.02.0001	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	680.43	6	55.772	0	0	0	0	0	0	6	55.772	6.00%	8.20%				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		2.2.2.02.02.0002	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	485.688	4	59.42	0	0	0	0	0	4	59.42	4.00%	12.23%				Badan Kepegawaian dan Diklat		
		2.2.2.02.02.0003	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	271.253	2	5.591	0	0	0	0	0	2	5.591	2.00%	2.06%				Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat		
		2.2.2.02.02.0004	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	423.488	4	31.366	0	0	0	0	0	4	31.366	4.00%	7.41%				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		2.2.2.02.02.0005	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	504.198	8	101.103	0	0	0	0	0	8	101.103	8.00%	20.05%				Dinas Lingkungan Hidup		
		2.2.2.02.02.0006	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	1,098,389	3	57.963	0	0	0	0	0	3	57.963	3.00%	5.28%				Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak		
		2.2.2.02.02.0007	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	880.911	3	132.424	0	0	0	0	0	3	132.424	3.00%	15.03%				Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat		
		2.2.2.02.02.0008	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	545.317	4	99.331	0	0	0	0	0	4	99.331	4.00%	18.22%				Badan Perencanaan Pembangunan		
		2.2.2.02.02.0009	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	2,131,773	6	242.566	0	0	0	0	0	6	242.566	6.00%	11.38%				Bagian Administrasi Pembangunan		

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.2.2. 02.02. 0010	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	370.154	7	60.02	0	0	0	0	0	0	7	60.02	7.00%	16.21%					Bagian Hubungan Masyarakat
		2.2.2. 02.02. 0011	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	266.802	6	28.736	0	0	0	0	0	0	6	28.736	6.00%	10.77%					Bagian Hukum
		2.2.2. 02.02. 0012	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	222.059	4	48.693	0	0	0	0	0	0	4	48.693	4.00%	21.93%					Bagian Administrasi Kerjasama
		2.2.2. 02.02. 0013	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	130.367	5	17.355	0	0	0	0	0	0	5	17.355	5.00%	13.31%					Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
		2.2.2. 02.02. 0014	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	259.821	2	16.96	0	0	0	0	0	0	2	16.96	2.00%	6.53%					Bagian Organisasi
		2.2.2. 02.02. 0015	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	250.855	6	11.947	0	0	0	0	0	0	6	11.947	6.00%	4.76%					Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		2.2.2. 02.02. 0016	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	203.496	2	15.101	0	0	0	0	0	0	2	15.101	2.00%	7.42%					Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah
		2.2.2. 02.02. 0017	Evaluasi dan Penghapusan Aset/Barang Daerah	Jumlah berkas penetapan Penghapusan Aset/Barang Daerah					6 Berkas	2,315,499	0	475.798	0	0	0	0	0	0	0	475.798	0.00%	20.55%					Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
		2.2.2. 02.02. 0018	Pelayanan Unit Layanan Pengadaan	Jumlah dokumen pengadaan barang/jasa yang terselesaikan					900 dokumen	5,880,312	388	1,107,517	0	0	0	0	0	0	388	1,107,517	43.11%	18.83%					Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
		2.2.2. 02.02. 0019	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara dan diurus administrasinya					2352 unit	7,181,740	302	1,345,738	0	0	0	0	0	0	302	1,345,738	12.84%	18.74%					Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
		2.2.2. 02.02. 0020	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	619.797	1	13.602	0	0	0	0	0	0	1	13.602	1.00%	2.19%					Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset

Rancangan Akhir RKPD
Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.2.2. 02.02. 0021	Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan					8012 stel	3,369,782	261	47.301	0	0	0	0	0	0	261	47.301	3.26%	1.40%					Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
		2.2.2. 02.02. 0022	Pengadaan Sarana Kedinasan	Jumlah sarana kedinasan yang diadakan					3334 unit	41,889,195	739	2,818,858	0	0	0	0	0	0	739	2,818,858	22.17%	6.73%					Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
		2.2.2. 02.02. 0023	Monitoring Pencatatan Barang Milik Daerah	Jumlah perangkat daerah yang pencatatan Barang Milik Daerah nya dimonitor					72 lembaga	2,315,612	72	147.688	0	0	0	0	0	0	72	147.688	100.00%	6.38%					Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
		2.2.2. 02.02. 0024	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Persentase Kelayakan dan Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran					100%	4,832,821	9	810.069	0	0	0	0	0	0	9	810.069	9.00%	16.76%					Bagian Umum dan Protokol
		2.2.2. 02.02. 0025	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	1,197,485	9	343.097	0	0	0	0	0	0	9	343.097	9.00%	28.65%					Dinas Pemadam Kebakaran
		2.2.2. 02.02. 0026	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	1,605,339	25	212.334	0	0	0	0	0	0	25	212.334	25.00%	13.23%					Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
		2.2.2. 02.02. 0027	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	718.68	2	82.687	0	0	0	0	0	0	2	82.687	2.00%	11.51%					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		2.2.2. 02.02. 0028	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	922.663	5	58.688	0	0	0	0	0	0	5	58.688	5.00%	6.36%					Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil
		2.2.2. 02.02. 0029	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	5,612,610	7	635.578	0	0	0	0	0	0	7	635.578	7.00%	11.32%					Dinas Kesehatan
		2.2.2. 02.02. 0030	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	1,977,575	6	155.117	0	0	0	0	0	0	6	155.117	6.00%	7.84%					Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.2.2. 02.02. 0031	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	547.677	6	24.035	0	0	0	0	0	0	6	24.035	6.00%	4.39%					Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.2.2. 02.02. 0032	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	4,989,776	0	25.614	0	0	0	0	0	0	0	25.614	0.00%	0.51%					Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
		2.2.2. 02.02. 0033	Pembangunan/Re habilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Daerah	Jumlah fasilitas gedung pemerintah daerah yang dibangun/direha bilitasi					78 bangunan	72,580,380	0	3,212,825	0	0	0	0	0	0	0	3,212,825	0.00%	4.43%					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		2.2.2. 02.02. 0034	Pembangunan/Re habilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah (Tahun Jamak / Multiyears)	Jumlah gedung pemerintah dan pemerintah daerah (tahun jamak/multiyear s) yang dibangun/direha bilitasi					1 bangunan	24,042,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		2.2.2. 02.02. 0035	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	1,066,795	2	122.664	0	0	0	0	0	0	2	122.664	2.00%	11.50%					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		2.2.2. 02.02. 0036	Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Gedung Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah yang disusun					62 dokumen	4,418,907	0	53.325	0	0	0	0	0	0	0	53.325	0.00%	1.21%					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		2.2.2. 02.02. 0037	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	523.064	2	52.84	0	0	0	0	0	0	2	52.84	2.00%	10.10%					Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		2.2.2. 02.02. 0038	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	3,702,013	9	1,881,061	0	0	0	0	0	0	9	1,881,061	9.00%	50.81%					Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
		2.2.2. 02.02. 0039	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	2,406,386	2	108.7	0	0	0	0	0	0	2	108.7	2.00%	4.52%					Dinas Pendidikan
		2.2.2. 02.02. 0040	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	772.494	6	108.145	0	0	0	0	0	0	6	108.145	6.00%	14.00%					Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16		
		2.2.2. 02.02. 0041	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	1,403,689	11	477.24	0	0	0	0	0	0	11	477.24	11.00%	34.00%					Dinas Perdagangan		
		2.2.2. 02.02. 0042	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	7,893,404	8	1,243,585	0	0	0	0	0	0	8	1,243,585	8.00%	15.75%					Dinas Perhubungan		
		2.2.2. 02.02. 0043	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	1,427,347	4	225.875	0	0	0	0	0	0	4	225.875	4.00%	15.82%					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
		2.2.2. 02.02. 0044	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	661.543	6	74.893	0	0	0	0	0	0	6	74.893	6.00%	11.32%					Dinas Sosial		
		2.2.2. 02.02. 0045	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	433.019	2	64.521	0	0	0	0	0	0	2	64.521	2.00%	14.90%					Dinas Tenaga Kerja		
		2.2.2. 02.02. 0046	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	492.584	3	90.862	0	0	0	0	0	0	3	90.862	3.00%	18.45%					Inspektorat		
		2.2.2. 02.02. 0047	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	364.189	5	19.715	0	0	0	0	0	0	5	19.715	5.00%	5.41%					Kec. Asemrowo		
		2.2.2. 02.02. 0048	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	528.03	4	11.689	0	0	0	0	0	0	4	11.689	4.00%	2.21%					Kec. Benowo		
		2.2.2. 02.02. 0049	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	358.916	6	18.173	0	0	0	0	0	0	6	18.173	6.00%	5.06%					Kec. Bubutan		
		2.2.2. 02.02. 0050	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	427.003	6	28.93	0	0	0	0	0	0	6	28.93	6.00%	6.78%					Kec. Bulak		
		2.2.2. 02.02. 0051	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	474.122	5	22.079	0	0	0	0	0	0	5	22.079	5.00%	4.66%					Kec. Dukuh Pakis		

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.2.2. 02.02. 0052	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	432.156	6	25.445	0	0	0	0	0	0	6	25.445	6.00%	5.89%					Kec. Gayungan
		2.2.2. 02.02. 0053	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	473.623	5	26.116	0	0	0	0	0	0	5	26.116	5.00%	5.51%					Kec. Genteng
		2.2.2. 02.02. 0054	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	478.982	4	34.52	0	0	0	0	0	0	4	34.52	4.00%	7.21%					Kec. Gubeng
		2.2.2. 02.02. 0055	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	385.761	5	19.467	0	0	0	0	0	0	5	19.467	5.00%	5.05%					Kec. Gunung Anyar
		2.2.2. 02.02. 0056	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	481.599	2	23.173	0	0	0	0	0	0	2	23.173	2.00%	4.81%					Kec. Jambangan
		2.2.2. 02.02. 0057	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	412.528	5	19.254	0	0	0	0	0	0	5	19.254	5.00%	4.67%					Kec. Karangpilang
		2.2.2. 02.02. 0058	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	474	5	18.533	0	0	0	0	0	0	5	18.533	5.00%	3.91%					Kec. Kenjeran
		2.2.2. 02.02. 0059	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	426.423	6	33.412	0	0	0	0	0	0	6	33.412	6.00%	7.84%					Kec. Krembangan
		2.2.2. 02.02. 0060	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	450.7	4	22.616	0	0	0	0	0	0	4	22.616	4.00%	5.02%					Kec. Lakarsantri
		2.2.2. 02.02. 0061	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	696.399	5	24.329	0	0	0	0	0	0	5	24.329	5.00%	3.49%					Kec. Mulyorejo
		2.2.2. 02.02. 0062	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	540.065	1	23.562	0	0	0	0	0	0	1	23.562	1.00%	4.36%					Kec. Pabean Cantian

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.2.2. 02.02. 0063	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	349.824	2	9.94	0	0	0	0	0	0	2	9.94	2.00%	2.84%					Kec. Pakal
		2.2.2. 02.02. 0064	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	491.774	4	20.834	0	0	0	0	0	0	4	20.834	4.00%	4.24%					Kec. Rungkut
		2.2.2. 02.02. 0065	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	336.642	6	17.222	0	0	0	0	0	0	6	17.222	6.00%	5.12%					Kec. Sambikerep
		2.2.2. 02.02. 0066	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	579.052	5	24.802	0	0	0	0	0	0	5	24.802	5.00%	4.28%					Kec. Sawahan
		2.2.2. 02.02. 0067	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	471.383	5	19.519	0	0	0	0	0	0	5	19.519	5.00%	4.14%					Kec. Semampir
		2.2.2. 02.02. 0068	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	444.866	5	25.515	0	0	0	0	0	0	5	25.515	5.00%	5.74%					Kec. Simokerto
		2.2.2. 02.02. 0069	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	576.244	6	32.413	0	0	0	0	0	0	6	32.413	6.00%	5.62%					Kec. Sukolilo
		2.2.2. 02.02. 0070	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	487.846	5	21.216	0	0	0	0	0	0	5	21.216	5.00%	4.35%					Kec. Sukomanung gal
		2.2.2. 02.02. 0071	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	768.318	5	38.106	0	0	0	0	0	0	5	38.106	5.00%	4.96%					Kec. Tambaksari
		2.2.2. 02.02. 0072	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	553.861	5	17.294	0	0	0	0	0	0	5	17.294	5.00%	3.12%					Kec. Tandes
		2.2.2. 02.02. 0073	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	438.373	2	28.471	0	0	0	0	0	0	2	28.471	2.00%	6.49%					Kec. Tegalsari

Rancangan Akhir RKPD

Kota Surabaya Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab																	
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)															
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)												K	Rp.(000)													
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16																	
		2.2.2. 02.02. 0074	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	418.291	4	13.733	0	0	0	0	0	0	4	13.733	4.00%	3.28%					Kec. Tenggilis Mejoyo																	
		2.2.2. 02.02. 0075	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	392.171	5	19.711	0	0	0	0	0	0	5	19.711	5.00%	5.03%					Kec. Wiyung																	
		2.2.2. 02.02. 0076	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	422.345	2	31.856	0	0	0	0	0	0	2	31.856	2.00%	7.54%					Kec. Wonocolo																	
		2.2.2. 02.02. 0077	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	490.416	5	39.472	0	0	0	0	0	0	5	39.472	5.00%	8.05%					Kec. Wonokromo																	
		2.2.2. 02.02. 0078	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	7,672,299	3	22.77	0	0	0	0	0	0	3	22.77	3.00%	0.30%					RSUD Bhakti Dharma Husada																	
		2.2.2. 02.02. 0079	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	11,179,209	7	995.269	0	0	0	0	0	0	7	995.269	7.00%	8.90%					RSUD Dr. Mohamad Soewandie																	
		2.2.2. 02.02. 0080	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	2,400,014	3	316.599	0	0	0	0	0	0	3	316.599	3.00%	13.19%					Satuan Polisi Pamong Praja																	
		2.2.2. 02.02. 0081	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran					100%	5,771,107	5	503.042	0	0	0	0	0	0	5	503.042	5.00%	8.72%					Sekretariat DPRD																	
		2.2.2. 02.02. 0085	Pemeliharaan Fasilitas Gedung Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Pemerintah yang dipelihara					200 bangunan	51,513,466	25	6,129,519	0	0	0	0	0	0	25	6,129,519	12.50%	11.90%					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang																	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																																												
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																																												
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																																												
(Dalam narasi)																																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																												
(Dalam narasi)																																												
Tidak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																																												
(Dalam narasi)																																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:																																												
(Dalam narasi)																																												

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan gambaran umum dan evaluasi pelaksanaan program tahun 2019 terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan harus ditangani Pemerintah Kota Surabaya sebagai berikut:

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

1. Belum meratanya aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal dan non formal;
2. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bagi warga miskin;
3. Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi;
4. Belum optimalnya kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan;
5. Masih ditemukannya pangan yang belum aman untuk dikonsumsi masyarakat;
6. Masih adanya pencari kerja yang belum terserap pada pasar kerja Formal;
7. Masih terjadinya kasus pelanggaran perda dan kejadian anarkis;
8. Belum optimalnya upaya pengurangan sampah dari sumber, yang menyebabkan masih lambatnya laju penurunan timbulan sampah;
9. Belum optimalnya penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni;
10. Masih adanya jenis budaya yang belum dilestarikan;
11. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan pembangunan dan penyerapan anggaran;
12. Belum optimalnya kontribusi pajak dan BUMD terhadap pendapatan asli daerah;
13. Belum optimalnya sistem drainase kota, kinerja jaringan jalan, sistem manajemen transportasi serta penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang berkualitas dan ramah lingkungan.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

2.3.2.1 Pendidikan

1. Masih terdapat sarana dan prasarana lembaga PAUD yang belum optimal.
2. Daya tampung yang ada telah mencukupi untuk jumlah penduduk usia SD, namun masih terdapat penduduk dari luar kota yang perlu diakomodasi, sehingga perlu dilakukan penambahan daya tampung kembali.
3. Masih kurangnya kapasitas jumlah siswa pada SMP sehingga menyebabkan masih adanya anak-anak usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah.

4. Masih terdapat sarana dan prasarana dari SD swasta yang belum sesuai standar dikarenakan adanya kendala dari dana yang tidak tercukupi.
5. Masih terdapat sarana dan prasarana dari SMP yang belum sesuai Standar.
6. Masih terdapat sekolah baik SD maupun SMP yang fasilitasnya kurang baik.
7. Masih terdapat SD yang belum memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum.
8. Masih cukup banyak guru baik PAUD, SD maupun SMP yang belum memenuhi kompetensi dan memiliki sertifikasi.
9. Masih relatif banyak guru SD dan SMP yang belum memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mapel yang diajar.
10. Masih sangat kurangnya minat pengelola lembaga kursus dan pelatihan untuk mendaftarkan lembaganya untuk akreditasi karena kendala dana.

2.3.2.2 Kesehatan

1. Masih adanya penduduk miskin di Kota Surabaya yang belum memiliki Jaminan Kesehatan.
2. Relatif banyaknya penduduk miskin yang belum memanfaatkan pelayanan Kesehatan.
3. Cakupan pelayanan bayi, balita dan anak yang belum maksimal.
4. Masih adanya balita dengan kondisi gizi kurang dan masih adanya balita dengan status gizi buruk.
5. Masih terdapat ibu hamil dan ibu nifas yang belum mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.
6. Ketersediaan sarana dan prasarana di puskesmas dan puskesmas pembantu sebagai faskes pratama belum memadai.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang belum sepenuhnya mencapai SPM yang ada.
8. Masih adanya rumah tidak sehat di semua kecamatan yaitu sebanyak.
9. Masih terdapat Tempat Pengolahan Makanan (TPM) binaan Pemerintah Kota Surabaya yang belum memenuhi syarat higienis sanitasi.
10. Masih ditemukannya bahan pangan segar serta sampel makanan jadi/olahan yang belum memenuhi syarat keamanan
11. Telah dilakukan penanggulangan terhadap penderita penyakit tropis dan penyakit serius lainnya untuk mencegah kejadian lebih lanjut. Telah dilakukan juga penanganan terhadap penderita penyakit menular termasuk juga

penderita HIV/AIDS dan NAPZA, namun pencegahan secara aktif belum optimal, di antaranya promosi kesehatan dan surveilans.

2.3.2.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Masih adanya bangunan yang belum memiliki IMB. Hal ini salah satunya disebabkan jumlah bangunan dan kecepatan pelaksanaan pembangunan lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan dan sarana prasana penunjang pelaksanaan pengawasan di lapangan, serta kelengkapan berkas pengurusan IMB yang belum lengkap.
2. Proses sinkronisasi rencana Induk sektoral dan rencana rinci yang belum optimal, hal ini salah satunya dipengaruhi oleh waktu penyusunan rencana Induk sektoral dan rencana rinci oleh Perangkat Daerah terkait.
3. Masih terjadinya genangan di beberapa titik di Surabaya karena curah hujan tinggi serta masih adanya jaringan drainase yang belum terintegrasi dan belum berfungsi optimal.
4. Masih tingginya biaya pemeliharaan PJU.

2.3.2.4 Perhubungan

1. Semakin banyaknya pengguna kendaraan pribadi karena rendahnya minat penggunaan transportasi umum dan penambahan ruas jalan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah kendaraan.
2. Masih adanya kejadian kecelakaan lalu lintas dikarenakan kurangnya kesadaran pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas.
3. Terbatasnya kualitas dan kuantitas angkutan umum, sehingga masyarakat masih memilih menggunakan kendaraan pribadi / transportasi online
4. Terbatasnya rute yang dapat digunakan oleh pengguna angkutan barang sehingga terjadi kepadatan pada ruas jalan yang dilalui.

2.3.2.5 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Masih adanya pasangan usia subur yang belum mengikuti KB dan adanya peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi
2. Masih adanya pasangan usia subur yang tidak terpenuhi kebutuhan KB (unmeet need).

3. Masih ada pasangan usia subur (PUS) yang istrinya berusia kurang dari 20 tahun.
4. Terdapat PMKS hasil pelatihan dan pembinaan yang belum berproduksi dan berdaya.

2.3.2.6 Pangan

1. Masih ditemukannya bahan pangan segar beredar dinyatakan tidak aman karena rendahnya kesadaran masyarakat.
2. Masih adanya sampel belum memenuhi syarat keamanan makanan.
3. Masih adanya ketidakseimbangan konsumsi pangan masyarakat.

2.3.2.7 Perdagangan

1. Belum optimalnya pemantauan hargaseluruh pasar di Kota Surabaya.
2. Masih adanya tahapan pengembangan hub dan simpul logistik yang belum terealisasi.
3. Masih adanya UMKM yang belum dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya.
4. Masih adanya sentra yang belum beroperasi secara optimal.
5. Terdapat pembudidaya pertanian binaan yang omzetnya belum meningkat.

2.3.2.8 Kepemudaan dan Olahraga

1. Terbatasnya calon peserta yang akan menjadi kader dikarenakan rendahnya minat masyarakat dan waktu pengkaderan yang sering berbenturan dengan jadwal kegiatan pribadi (sekolah, kuliah, dll).
2. Jadwal kejuaraan cabang olahraga mengikuti dengan penyelenggaraan (Pemerintah Provinsi / Pusat), sehingga terdapat beberapa atlet terbina yang tidak dapat mengikuti event kejuaraan.
3. Terdapat beberapa lokasi rencana pembangunan fasilitas olahraga yang masih terkendala status kepemilikan lahan, sehingga proses pelaksanaan pembangunan tidak dapat segera dilaksanakan.

2.3.2.9 Tenaga Kerja

1. Masih rendahnya pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat diinformasikan.

2. Terdapat beberapa wirausaha yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan terbatasnya modal.
3. Masih adanya peserta pelatihan berbasis kompetensi yang tidak lulus pelatihan.
4. Masih adanya perusahaan yang belum memiliki Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama.
5. Masih adanya perusahaan yang belum diperiksa dan belum mematuhi norma ketenagakerjaan dan/norma K3.
6. Masih adanya kasus PHK yang dilaporkan.

2.3.2.10 Sosial

1. Masih banyaknya PMKS dari luar Kota Surabaya.
2. Masih banyaknya PMKS yang belum ditangani dan direhabilitasi.
3. Rendahnya partisipasi PSKS dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.
4. Belum optimalnya program penanganan PMKS, dilihat dari banyaknya PMKS usia produktif yang dilatih/dibina yang belum berproduksi.

2.3.2.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Masih terdapat permasalahan perempuan dan anak.
2. Masih ada jejaring yang belum berperan dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak.

2.3.2.12 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

1. Masih adanya temuan pelanggaran Perda.
2. Masih terdapat gangguan ketenteraman dan ketertiban umum sebanyak.
3. Masih banyaknya kejadian kebakaran di Kota Surabaya.
4. Masih adanya kelurahan yang belum berstatus tangguh bencana.
5. Masih rendahnya partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan.

2.3.2.13 Pertanahan

1. Penyediaan tanah da-tau bangunan bagi pembangunan untuk kepentingan umum terhambat proses pengumpulan dan verifikasi data yang harus melalui beberapa instansi lain (Pemerintah Propinsi, BPN, dll) sehingga diperlukan waktu untuk berkoordinasi dengan instansi yang bersangkutan.
2. Masih ditemukannya aset tanah yang belum dilakukan pemasangan pagar, papan, patok pada tahun 2018 di mana beberapa lokasi rencana pemasangan pagar, papan, patok yang masih belum jelas batas kepemilikannya.
3. Sertifikasi tanah aset mengalami hambatan di mana terdapat beberapa tanah aset yang kurang lengkap bukti dan batas kepemilikannya.
4. Hambatan dalam penanganan kasus tanah dan/ atau bangunan terutama kurangnya data pendukung dalam penyelesaian kasus dan kurangnya dukungan dari instansi/jajaran samping.

2.3.2.14 Lingkungan Hidup

1. Belum optimalnya pengupayaan peningkatan luasan dan fungsi RTH, terutama hutan kota.
2. Masih terbatasnya fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan Teknologi 3R.
3. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan belum merata antar kecamatan.
4. Masih adanya kegiatan/usaha diawasi yang belum menaati/mematuhi aspek lingkungan.
5. Masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif, di mana masih 6 lingkungan yang berperan serta dalam pengembangan dan atau pemanfaatan energi alternatif.
6. Masih banyaknya kegiatan /usaha yang belum diaudit terkait penerapan konservasi energi.
7. Masih adanya permasalahan lingkungan hidup yang terjadi dan ditangani, antara lain terkait limbah, kebisingan dan polusi udara dari kegiatan usaha dan transportasi.

2.3.2.15 Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Terdapat beberapa calon penghuni rusun yang bukan berasal dari daftar tunggu penghuni rusun, namun berasal dari warga terdampak penertiban Pemerintah Kota.
2. Beberapa pekerjaan pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya terkendala mengalami perubahan desain karena menyesuaikan kondisi di lapangan.
3. Masih belum optimalnya peningkatan kualitas lingkungan permukiman prioritas.

2.3.2.16 Kebudayaan

1. Masih ada bangunan cagar budaya yang belum terpelihara dengan baik.
2. Masih adanya kelompok seni terdaftar yang belum layak tampil.
3. Masih adanya hotel, restoran dan ruang publik yang belum menampilkan budaya lokal.
4. Masih rendahnya partisipasi peserta dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan.
5. Masih adanya peserta kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan yang belum menjadi kader wawasan kebangsaan.

2.3.2.17 Perpustakaan

1. Masih rendahnya persentase siswa yang terlibat dalam tes *reading text levelling*.
2. Masih rendahnya jumlah perpustakaan yang dibina oleh Pemerintah Kota Surabaya.

2.3.2.18 Penanaman Modal

1. Masih rendahnya pertumbuhan investasi fasilitas pendukung logistik.
2. Masih adanya pelayanan perizinan dan non perizinan yang tidak tepat waktu.
3. Masih rendahnya pertumbuhan ijin realisasi investasi.

2.3.2.19 Kebijakan, Pelayanan Publik, dan Koordinasi Perangkat Daerah

1. Masih adanya MoU sektor perdagangan yang belum ditandatangani.

2. Masih adanya MoU sektor perdagangan tertandatangani yang belum terealisasi.
3. Masih adanya MoU kerjasama (non perdagangan) yang belum ditindaklanjuti.
4. Masih adanya POS dan SP yang belum dievaluasi.
5. Masih adanya nama rupabumi yang belum memenuhi syarat untuk diajukan pembakuan.
6. Masih adanya kajian/rekomendasi yang belum termanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan.
7. Masih ada BUMD yang belum memiliki kinerja sesuai standar.

2.3.2.20 Pengawasan

1. Masih ditemukannya pelanggaran tata kelola administrasi pada beberapa Perangkat Daerah.
2. Masih ditemukannya pelanggaran disiplin aparatur pada beberapa Perangkat Daerah.

2.3.2.21 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

1. Masih adanya pejabat struktural yang belum mengikuti diklat struktural.
2. Masih adanya pegawai yang belum mengikuti diklat teknis dan fungsional.

2.3.2.22 Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan

1. Masih adanya pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu pada beberapa Perangkat Daerah.
2. Masih terdapat kegiatan pada beberapa Perangkat Daerah yang capaian outputnya <76%. Hal ini menunjukkan perlu memaksimalkan kualitas Perencanaan Strategis serta Monitoring dan Evaluasi
3. Terdapat beberapa Perangkat Daerah yang dokumen perencanaan tahunannya belum berkualitas.

2.3.2.23 Sarana dan Prasarana Perkantoran

1. Masih ditemukannya sarana dan prasarana perkantoran yang tidak layak pakai.
2. Masih terdapat kendaraan dinas dengan kondisi kurang baik.

2.3.2.24 Statistik

1. Masih adanya data penunjang perencanaan dan hasil pembangunan yang masih belum valid.
2. Masih terdapat beberapa data indikator kinerja yang masih memiliki *margin of error* > 5%.

2.3.2.25 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Masih adanya dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian) yang pengurusannya tidak tepat waktu.
2. Masih adanya penduduk lahir yang belum memperoleh akte kelahiran.
3. Masih adanya penduduk meninggal yang belum memperoleh akte kematian.
4. Masih adanya pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan yang belum terlayani secara optimal.

2.3.2.26 Kearsipan

1. Masih rendahnya jumlah arsip yang diakuisisi.
2. Masih ada beberapa Perangkat Daerah, unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan antara lain disebabkan keterbatasan jumlah dan rendahnya pemahaman SDM pengelola kearsipan.

2.3.2.27 Komunikasi dan Informatika serta Persandian

1. Masih rendahnya layanan publik administratif yang berbasis TIK.
2. Kurangnya keterbukaan data antar sistem/aplikasi.

2.3.2.28 Keuangan

1. Tidak tercapainya pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah.
2. Tidak tercapainya pendapatan dari lain-lain PAD yang Sah.
3. Rendahnya pendapatan Bagi Hasil Pajak yaitu dari Bagi Hasil PBB dan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri, serta PPh Pasal 21.
4. Tidak tercapainya pendapatan dari Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam.
5. Tidak tercapainya pendapatan dari Dana Alokasi Khusus.

6. Tidak tercapainya target pendapatan Dana Bagi Hasil dari Provinsi yaitu dari Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
7. Tidak tercapainya target pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi.

2.3.2.29 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

1. Masih rendahnya jumlah usaha mikro yang mendapatkan bantuan permodalan.
2. Masihrendahnya persentase usaha mikro binaan yang mengaplikasikan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam proses usaha.
3. Hanya sebagian kecil produk usaha mikro yang telah layak diuji mutukan.
4. Masih ada koperasi masih belum berklasifikasi AAB.
5. Pertumbuhan anggota koperasi yang masih lambat, yaitu di bawah 5%.
6. Masih adanya koperasi yang belum meningkat volume usahanya.
7. Rendahnya minat warga usia produktif untuk berwirausaha, dilihat dari jumlah usulan musrenbang Pelatihan untuk potensi wirausaha di bawah 5%.
8. Masih banyak PMKS usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang belum berproduksi.

2.3.2.30 Pertanian

1. Masih rendahnya pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana produksi olehpembudidaya tanaman pangan dan hortikultura binaan.
2. Masih rendahnya pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya.
3. Masih adanya hewan ternak yang belum mendapatkan vaksinasi dan pengobatan.
4. Masih terdapat pembudidaya ternak binaan yang belum menggunakan Teknologi Tepat Guna.

2.3.2.31 Kelautan dan Perikanan

1. Masih rendahnya pembudidaya perikanan dan kelautan binaan yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana yang telah disediakan.
2. Teknologi Tepat Guna (TTG) yang belum sepenuhnya diaplikasikan oleh pembudidaya perikanan.

2.3.2.32 Pariwisata

1. Masih minimnya individu/kelompok yang belum mengaplikasikan keahlian yang didapat dari pembelajaran di rumah kreatif kuliner.
2. Masih rendahnya individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang diperoleh dari proses pembelajaran di rumah kreatif desain dan fashion.
3. Masih adanya individu/kelompok yang belum mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif handicraft.
4. Masih minimnya individu/kelompok yang mengaplikasikan hasil dari proses pembelajaran di rumah kreatif seni pertunjukan.
5. Masih rendahnya pelaku usaha kreatif yang belum mendapatkan legalisasi usaha.
6. Belum semua kebutuhan modal kerja dan modal investasi pelaku usaha kreatif bisa terpenuhi.
7. Belum semua ODTW berhasil dikembangkan.
8. Masih rendahnya capaian kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan.
9. Masih rendahnya kunjungan di objek wisata dibandingkan dengan kunjungan wisatawan.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah harus sesuai dengan arah kebijakan ekonomi nasional, oleh karena itu perlu pemahaman mengenai pokok pokok kebijakan pembangunan umum Nasional. Adapun prioritas nasional dan kebijakan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, dengan kebijakan:
 - a. Meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan penduduk yang terekendala dokumen kependudukan
 - b. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta
 - c. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk
 - d. Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan
 - e. Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi
2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah, dengan kebijakan:
 - a. Meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau
 - b. Mengembangkan aksesibilitas transportasi di kawasan 3T yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda, dan mendukung kawasan yang lebih maju
 - c. Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui inovasi kebencanaan
 - d. Membangun infrastruktur transportasi yang mampu meningkatkan konektivitas dan menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas dan sistem jaringan utama logistik

- e. Mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan
- f. Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penyiaran melalui transformasi digital
- 3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja, dengan kebijakan:
 - a. Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM
 - b. Mempercepat transformasi struktural
 - c. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing
 - d. Menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi
 - e. Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
- 4. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup, dengan kebijakan:
 - a. Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan energi
 - b. Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas
 - c. Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan aksesibilitas air
 - d. Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim
 - e. Mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana
- 5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan, dengan kebijakan:
 - a. Meningkatkan posisi kekuatan pertahanan
 - b. Meningkatkan stabilitas kawasan dan kerja sama pembangunan internasional
 - c. Menegakkan hukum dan anti korupsi
 - d. Membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan terorisme serta gangguan kamtibmas
 - e. Meningkatkan keamanan siber

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkembangan perekonomian Kota Surabaya dapat ditunjukkan oleh besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) dan

PDRB atas dasar harga konstan (ADHK), dimana selama 5 tahun terakhir menunjukkan tren yang semakin meningkat (sebagaimana terangkum dalam tabel III.1 dan III.2). Hingga akhir tahun 2018 PDRB ADHB Kota Surabaya mencapai Rp547.769.496,96 juta. Dari sisi produksi, perekonomian Kota Surabaya didorong oleh hampir semua lapangan usaha. Kategori Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor memberikan kontribusi yang relatif besar bagi perekonomian Kota Surabaya. Pada tahun 2018 lapangan usaha kategori ini sebesar Rp154.687.454,96 juta, diikuti oleh lapangan usaha Industri Pengolahan yang memberikan nilai tambah terhadap perekonomian Kota Surabaya sebesar Rp101.871.621,07 juta. Urutan selanjutnya yang memberikan kontribusi PDRB terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Surabaya adalah lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan nilai PDRB sebesar Rp88.834.803,18 juta.

Tabel III.1
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surabaya
Tahun 2014 -2018 (dalam juta)

Kategori	Uraian	2014 Juta (Rp)	2015 Juta (Rp)	2016 Juta (Rp)	2017* Juta (Rp)	2018** Juta (Rp)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	671.441,50	746.575,00	808.811,90	883.177,30	913.484,74
B	Pertambangan dan Penggalian	24.336,10	26.941,90	29.145,20	30.638,60	31.562,67
C	Industri Pengolahan	70.956.473,90	78.134.471,10	85.214.728,50	92.762.070,10	101.871.621,07
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.001.207,80	2.093.847,80	2.144.720,80	2.263.680,00	2.238.366,85
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	572.049,40	626.533,30	678.586,70	740.173,40	771.856,00
F	Konstruksi	37.876.186,50	40.626.350,00	45.103.247,10	49.603.609,40	52.770.743,61
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	99.966.844,30	111.677.560,30	124.579.579,50	137.322.725,10	154.687.454,96
H	Transportasi dan Pergudangan	19.016.375,30	21.370.858,80	23.617.508,70	26.215.295,80	29.211.518,37
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	54.062.910,60	61.613.863,00	70.854.863,30	78.971.933,90	88.834.803,18
J	Informasi dan Komunikasi	20.137.828,30	22.165.986,70	24.457.105,40	26.571.784,80	29.039.867,68
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	19.275.906,50	21.640.835,20	24.105.835,20	25.631.465,10	28.132.150,09
L	Real Estate	9.372.176,50	10.706.034,40	11.539.141,30	12.495.064,20	14.186.426,67
M,N	Jasa Perusahaan	8.889.028,20	9.852.481,80	10.926.169,80	12.098.851,20	13.339.657,11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.071.610,60	5.602.249,00	6.221.289,50	6.768.287,70	7.171.019,61
P	Jasa Pendidikan	9.259.950,70	10.156.316,50	11.036.182,80	11.958.097,20	12.661.378,86
Q	Jasa Kesehatan dan	2.814.318,80	3.089.796,00	3.389.778,00	3.730.513,90	4.053.988,68

Kategori	Uraian	2014 Juta (Rp)	2015 Juta (Rp)	2016 Juta (Rp)	2017* Juta (Rp)	2018** Juta (Rp)
	Kegiatan Sosial					
R,S,T,U	Jasa lainnya	5.382.299,40	6.092.795,50	6.676.541,90	6.995.936,80	7.853.596,80
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		365.350.944,40	406.223.496,20	451.383.235,70	495.043.304,50	547.769.496,96

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, 2019

Catatan : *) data sementara

**) data sangat sementara

Bila dilihat dari besaran PDRB atas dasar harga konstan yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan tahun dasar (*constant price*). PDRB atas dasar konstan juga dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang sekaligus dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja perekonomian daerah. Pola PDRB atas dasar harga konstan Kota Surabaya saat ini sama dengan pola PDRB atas dasar harga berlaku. Nilai PDRB kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan kategori dengan nilai PDRB terbesar dibandingkan nilai PDRB kategori yang lain, yaitu sebesar Rp109.871.557,54 juta. Pada urutan berikutnya adalah Kategori Industri Pengolahan dengan PRDB atas dasar harga konstan sebesar Rp73.033.402,38 rupiah, serta kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan nilai PDRB sebesar Rp58.460.906,75 juta.

Tabel III.2
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Surabaya
Tahun 2014 -2018 (dalam juta)

Kategori	Uraian	2014 Juta (Rp)	2015 Juta (Rp)	2016 Juta (Rp)	2017* Juta (Rp)	2018** Juta (Rp)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	522.213,90	546.940,30	570.789,40	589.909,40	587.185,38
B	Pertambangan dan Penggalian	18.674,90	19.418,10	20.028,10	20.544,80	20.121,43
C	Industri Pengolahan	59.944.233,70	63.467.797,30	66.582.825,60	69.881.287,90	73.033.402,38
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.579.911,80	1.530.668,40	1.514.658,20	1.541.129,00	1.540.006,38
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	474.293,70	498.808,20	528.322,40	564.406,80	583.121,24
F	Konstruksi	31.355.927,30	32.250.136,20	33.864.739,10	36.208.179,00	38.371.797,07
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	86.711.515,10	92.084.794,20	97.443.597,60	103.301.112,80	109.871.557,54
H	Transportasi dan Pergudangan	14.843.763,20	15.797.144,70	16.569.183,70	17.707.950,20	19.276.049,86
I	Penyediaan	42.503.082,60	45.918.309,10	49.881.297,70	54.192.882,20	58.460.906,75

Kategori	Uraian	2014 Juta (Rp)	2015 Juta (Rp)	2016 Juta (Rp)	2017* Juta (Rp)	2018** Juta (Rp)
	Akomodasi dan Makan Minum					
J	Informasi dan Komunikasi	19.701.365,90	20.958.313,00	22.421.127,20	23.974.911,30	25.925.129,71
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	14.851.437,00	15.964.079,10	17.184.785,50	17.685.808,00	18.536.478,96
L	Real Estate	8.264.384,50	8.683.388,80	9.145.630,80	9.610.228,80	10.165.858,67
M,N	Jasa Perusahaan	7.011.356,20	7.388.567,20	7.761.412,10	8.278.199,90	8.867.969,79
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.994.512,40	4.172.196,30	4.384.611,60	4.597.265,30	4.585.695,63
P	Jasa Pendidikan	7.144.694,90	7.595.525,10	8.052.649,00	8.531.781,70	8.843.385,71
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.405.595,10	2.502.680,00	2.649.121,80	2.804.625,20	3.023.872,00
R,S,T,U	Jasa lainnya	4.620.617,80	4.836.400,60	5.077.815,10	5.224.597,00	5.605.165,63
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		305.947.580,00	324.215.166,90	343.652.595,00	364.714.819,50	387.292.704,09

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, 2019

Catatan : *) data sementara

**) data sangat sementara

b. Sumbangan Sektoral

Perekonomian Kota Surabaya terus tumbuh pesat. Hal tersebut terlihat dari semakin banyaknya pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang terus diupayakan oleh Pemerintah Kota Surabaya demi memudahkan mobilitas orang maupun barang untuk keluar masuk Kota Surabaya. Tentunya dengan kondisi tersebut akan mendorong sektor utama penopang pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya selama ini semakin meningkat yakni lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian pada tahun 2018 sebesar 28,37 persen.

Menggeliatnya sektor Perdagangan di Kota Surabaya tersebut juga didorong oleh perilaku masyarakat Kota Surabaya yang memiliki perilaku konsumtif cukup tinggi. Proporsi konsumsi masyarakat Kota Surabaya sendiri memiliki peran hampir setengah persen dari total komponen pembentuk perekonomian Kota Surabaya dari sisi permintaan. Hal ini sekaligus menimbulkan maraknya warung kecil hingga restoran yang muncul tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya. Tingginya tingkat

konsumsi tersebut turut berkontribusi dalam menstimulus tingginya peran lapangan usaha Industri Pengolahan dan Penyediaan Makan Minum di Kota Surabaya, dengan kontribusi masing-masing sebesar 18,86 persen dan 15,09 persen.

Selain Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor; sektor Industri pengolahan; serta penyediaan akomodasi dan makan minum, lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar selanjutnya di Kota Surabaya yakni lapangan usaha konstruksi. Berbeda dengan Kota Surabaya yang terdahulu, penampakan Kota Surabaya saat ini berubah sangat dinamis, banyak bangunan tinggi dan megah mulai dari hunian, kantor, maupun mall yang telah dibangun di Kota Surabaya. Banyaknya pembangunan baru salah satunya dipengaruhi oleh tingginya permintaan akan hunian maupun tempat hiburan sebagai imbas resiko urbanisasi penduduk di Kota Surabaya. Berdasarkan keterkaitan tersebut, kategori konstruksi menjadi kategori lapangan usaha paling dominan keempat dengan kontribusi rata-rata sebesar 9 persen terhadap PDRB ADHK Kota Surabaya setiap tahunnya.

Tabel III.3
Peranan Ekonomi Per Kategori Terhadap PDRB Kota Surabaya
Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2014-2018 (dalam persen)

Kategori	Uraian	2014		2015		2016		2017*		2018**	
		ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,18	0,17	0,18	0,17	0,18	0,17	0,18	0,17	0,17	0,15
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
C	Industri Pengolahan	19,42	19,59	19,23	19,63	18,88	19,38	18,74	19,37	18,60	18,86
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,55	0,51	0,52	0,47	0,48	0,44	0,46	0,42	0,41	0,40
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,15
F	Konstruksi	10,37	10,25	10,00	9,98	9,99	9,85	10,02	9,84	9,63	9,91
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	27,36	28,34	27,49	28,32	27,60	28,36	27,74	28,39	28,24	28,37

Kategori	Uraian	2014		2015		2016		2017*		2018**	
		ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
H	Transportasi dan Pergudangan	5,20	4,85	5,26	4,91	5,23	4,82	5,30	4,80	5,33	4,98
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,80	13,89	15,17	14,14	15,70	14,52	15,95	14,57	16,22	15,09
J	Informasi dan Komunikasi	5,51	6,44	5,46	6,47	5,42	6,52	5,37	6,55	5,30	6,69
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,28	4,85	5,33	4,90	5,34	5,00	5,18	4,95	5,14	4,79
L	Real Estate	2,57	2,70	5,64	2,71	2,56	2,66	2,53	2,65	2,59	2,62
M,N	Jasa Perusahaan	2,43	2,29	2,43	2,30	2,42	2,26	2,44	2,24	2,44	2,29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,39	1,31	1,38	1,25	1,38	1,28	1,37	1,29	1,31	1,18
P	Jasa Pendidikan	2,53	2,34	2,50	2,35	2,44	2,34	2,42	2,34	2,31	2,28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,77	0,79	0,76	0,78	0,75	0,77	0,75	0,77	0,74	0,78
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,47	1,51	1,50	1,48	1,48	1,48	1,41	1,49	1,43	1,45
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, 2018

Catatan : *) data sementara

**) data sangat sementara

c. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sektoral dari 17 kategori pembentuk PDRB, Kategori yang mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata tertinggi selama ini yaitu kategori lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makanan minuman dan kategori lapangan usaha informasi dan komunikasi. Kategori penyediaan akomodasi dan makanan minuman ini mengalami pertumbuhan tertinggi salah satunya dipengaruhi oleh peran sektor usaha itu sendiri yang selama ini menjadi salah satu kategori utama yang berperan dalam menggerakkan ekonomi Kota Surabaya. Hal ini ditandai dengan maraknya hotel dan restoran yang tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya. Sebagai kota bisnis dengan karakteristik masyarakat modern, gaya hidup yang semakin praktis mendorong tumbuhnya hotel dan rumah makan/restoran cepat saji yang mudah dan cepat dijangkau oleh masyarakat. Ditambah lagi,

semakin majunya transaksi digital yang memberikan berbagai macam fasilitas dan keuntungan turut mendorong kategori ini kedepan tumbuh semakin pesat.

Kategori selanjutnya yakni informasi dan komunikasi dengan kontribusi pada sementara pada tahun 2018 mencapai 18,13 persen. Sebagai kota yang terus berkembang maka kebutuhan akan teknologi otomatis semakin tinggi. Hal tersebut dikarenakan teknologi menjadi salah satu kebutuhan untuk mendukung aktivitas sehari-hari sehingga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi pada kategori lapangan usaha informasi dan komunikasi.

Kategori transportasi dan pergudangan, kategori jasa kesehatan dan jasa lainnya juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Selaras dengan program pemerintah Kota Surabaya yang terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik turut mendorong ketiga kategori tersebut tumbuh pesat.

Tabel III.4
Pertumbuhan Sektoral Kota Surabaya
Tahun 2014 -2018 (dalam persen)

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,54	4,73	4,36	3,35	-1,31
B	Pertambangan dan Penggalian	3,20	3,98	3,14	2,58	-2,06
C	Industri Pengolahan	10,13	5,88	4,91	4,95	4,51
D	Pengadaan Listrik dan Gas	- 1,90	- 3,12	- 1,05	1,75	-0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,76	5,17	5,92	6,83	3,32
F	Konstruksi	6,81	2,85	5,01	6,92	5,98
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,88	6,20	5,82	6,01	6,36
H	Transportasi dan Pergudangan	8,46	6,42	4,89	6,87	8,86
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,06	8,04	8,63	8,64	7,88
J	Informasi dan Komunikasi	6,53	6,38	6,98	6,93	8,13
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,79	7,49	7,65	2,92	4,81
L	Real Estate	6,68	5,07	5,32	5,08	5,78
M,N	Jasa Perusahaan	6,45	5,38	5,05	6,66	7,12

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,33	4,45	5,09	4,85	-0,25
P	Jasa Pendidikan	5,71	6,31	6,02	5,95	3,65
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,39	4,04	5,85	5,87	7,82
R,S,T, U	Jasa lainnya	4,55	4,67	4,99	2,89	7,28
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		6,96	5,97	6,00	6,13	6,19

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, 2019

Catatan : *) data sementara

**) data sangat sementara

Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya terus menunjukkan kecenderungan yang positif. Seperti yang diketahui, Kota Surabaya dengan karakteristik perdagangan dan jasa memiliki potensi produktivitas yang masih cukup besar. Sebagaimana dilihat dari data historinya, meskipun gejolak ekonomi global sepanjang tahun 2018 sangat berfluktuatif dengan segala resikonya, capaian pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya senantiasa masih cukup tinggi berada dilevel lebih dari 6 persen, dan angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional.

Tabel III.5
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya
Tahun 2014 -2018 (dalam persen)

Tahun	Surabaya	Jawa Timur	Nasional
2014	6,96	5,86	5,01
2015	5,97	5,44	4,88
2016	6,00	5,57	5,03
2017*	6,13	5,45	5,07
2018**	6,194	5,50	5,17

Sumber data: BPS Nasional, BPS Jawa Timur, BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, 2019

*) data sementara

**) data sangat sementara

d. Tingkat Inflasi

Pada tahun 2018 tingkat inflasi Kota Surabaya sebesar 3,03 persen. Angka tersebut menurun dibandingkan inflasi Kota Surabaya Tahun 2017 sebesar 4,37 persen. Selaras dengan target yang ditetapkan, tingkat inflasi Kota Surabaya tahun 2018 juga sejalan dengan target sasaran inflasi pemerintah tahun 2018 sebesar $3,5 \pm 1$ persen.

Berdasarkan pemantauan harga yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 10 (sepuluh) komoditas utama yang memberikan sumbangan terbesar secara berurutan yang membentuk inflasi Kota Surabaya tahun 2018 antara lain: bensin, daging ayam ras, beras, kontrak rumah, rokok kretek filter, sekolah dasar, akademi/ perguruan tinggi, bawang merah, emas perhiasan dan tukang bukan mandor.

Jika diamati berdasarkan kelompok pembentuknya, capaian inflasi Kota Surabaya tahun 2018 paling banyak dikontribusi oleh inflasi pada kelompok inti dan kelompok barang yang harganya diatur oleh pemerintah (*administered price*). Sementara untuk inflasi yang berasal dari gejolak harga bahan makanan (*volatile food*) cenderung menjadi penahan laju inflasi Kota Surabaya tahun 2018.

Tabel III.6
Tingkat Inflasi Kota Surabaya
Tahun 2014-2018 dan Perkiraan Tahun 2019 (dalam persen)

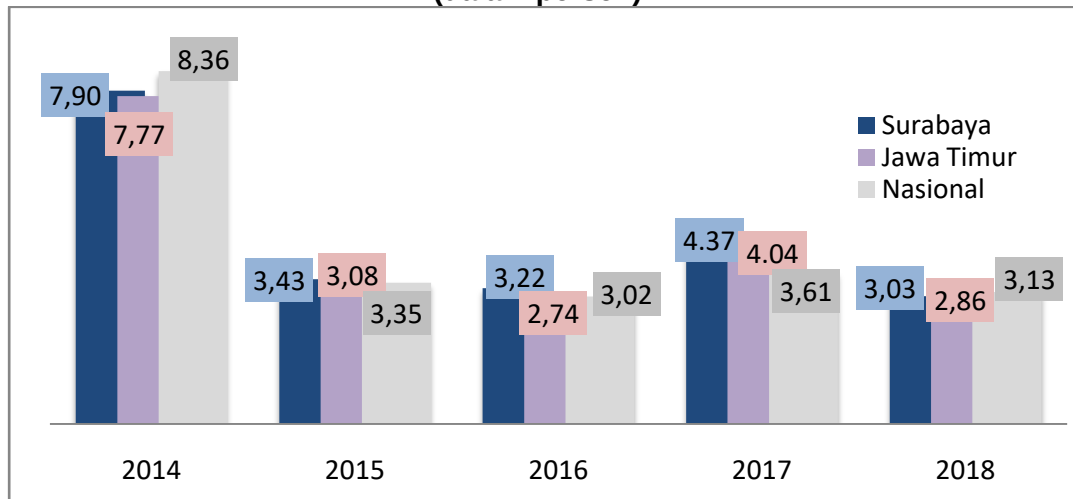
Tahun	Inflasi
2014	7,90
2015	3,43
2016	3,22
2017	4,37
2018	3,03
2019**	3,5 ± 1

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, 2019

Catatan : **) data proyeksi Bappeko Surabaya

Untuk mengetahui fluktuasi harga barang dan jasa di Kota Surabaya dari tahun ke tahun dapat ditunjukkan oleh gambar grafik berikut. Sebagaimana ditunjukkan oleh grafik, pergerakan inflasi Kota Surabaya dari tahun ke tahun selalu selaras dengan inflasi Jawa Timur dan Nasional. Bahkan capaian inflasi Kota Surabaya pada tahun 2018 cukup baik, dimana dalam 3 (tiga) tahun terakhir umumnya inflasi Kota Surabaya sedikit lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur dan Nasional, namun kali ini meskipun lebih tinggi dibanding inflasi Jawa Timur sebesar 2,86% namun lebih rendah dibandingkan Nasional yakni sebesar 3,13 persen.

GambarIII.1
Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2014- 2018
(dalam persen)



Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, 2019

e. Investasi

Kota Surabaya berkembang menjadi Kota Bisnis yang berkembang sangat pesat. Dengan segala daya dukung baik sarana dan prasarana yang memadai menjadikan Kota Surabaya bukan hanya menjadi tempat hunian, melainkan juga menjadi target pasar para pelaku usaha seperti investor. Daya tarik yang kuat sebagai imbas dari semakin pesatnya perkembangan Kota Surabaya dari berbagai aspek baik aspek ekonomi maupun non ekonomi juga menjadi pertimbangan para investor memutuskan untuk memilih Kota Surabaya sebagai sasaran target investasinya.

Investasi yang ditanamkan di Surabaya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas Kota Surabaya. Keberadaan investasi tersebut tentunya akan memberikan multiplier efek terhadap sektor lainnya sebagai hasil dari keterkaitan antar sektor dari aktivitas ekonomi yang dilakukan.

Pada tahun 2018 investasi Kota Surabaya yang berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp4.140.545.316.800. Sementara investasi dari penanaman modal asing (PMA) Rp1.584.216.149.643. Berdasarkan data DPM-PTSP Kota

Surabaya investasi PMDN Kota Surabaya tahun 2018 tersebut berasal dari penanaman modal pada sektor sektor Perdagangan Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; Industri Makanan; perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor; Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Managemen; serta industri logam dasar barang logam, mesin dan elektronik.

Tabel III.7
Realisasi Nilai Investasi Kota Surabaya
Tahun 2014- 2018

Tahun	Jumlah Penanaman Modal	
	PMDN	PMA
2014	Rp 639.625.900.000	Rp 6.411.481.920.000
2015	Rp 828.416.500.000	Rp 206.155.804.800
2016	Rp 1.072.644.600.000	Rp 2.945.139.318.400
2017	Rp1.658.419.300.000	Rp 2.338.348.601.600
2018	Rp 4.140.545.316.800	Rp 1.584.216.149.643

Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2019

Untuk mengetahui seberapa besar peran investasi terhadap suatu perekonomian maka perlu diperkaya dengan indikator tambahan yang dapat menjelaskan seberapa baik kinerja investasi yang sudah ditanamkan tersebut, yakni seperti indikator *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). Nilai ICOR selain dapat digunakan untuk mengevaluasi dan investasi, melainkan juga dapat digunakan untuk melihat produktivitas dan efisiensi dari investasi yang dilakukan.

Besaran ICOR menggambarkan seberapa banyak tambahan investasi yang diperlukan untuk menghasilkan tambahan 1 (satu) unit usaha. Oleh karena itu besaran ICOR digunakan untuk memperkirakan besarnya kebutuhan investasi untuk mencapai target pertumbuhan yang telah ditetapkan pada masa yang akan datang. Semakin kecil nilai ICOR semakin besar pula efisiensi dan produktivitas dari investasi yang ditanamkan. Sebaliknya, semakin besar nilai ICOR maka semakin rendah tingkat efisiensi dan produktivitas dari Investasi yang ditanamkan.

Tabel III.8
Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kota Surabaya
Tahun 2013 - 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018**
ICOR	4,05	4,27	4,89	4,90	4,81	3,0-4,0

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, 2019

Catatan : *) data angka proyeksi Bappeko

Rata-rata nilai ICOR Kota Surabaya sejak tahun 2013 sampai pada 2017 berada pada kisaran angka 4. Angka tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata investasi yang ditanamkan di Kota Surabaya sudah cukup efisien. Investasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktifitas ekonomi di Kota Surabaya, sehingga dapat mendorong peningkatan PDRB dan dapat memberikan *multiplier effect* yaitu membantu dalam perluasan lapangan pekerjaan.

f. Ekspor

Aktivitas perdagangan baik skala domestik maupun internasional juga berkembang cukup baik dan menjadi salah satu motor penggerak perekonomian Kota Surabaya. Ditengah kondisi ekonomi global yang cukup berfluktuatif, aktivitas perdagangan masih berjalan pesat. Pada tahun 2017 nilai ekspor Kota Surabaya sebesar USD18.268.869.178 dan meningkat di tahun 2018 menjadi sebesar USD19.165.996.010. Sementara nilai impor Kota Surabaya pada tahun 2017 sebesar USD16.956.900.232 dan tahun 2018 sebesar USD19.612.835.745.

Tabel III.9
Ekspor Impor Non Migas Kota Surabaya
Tahun 2014–2018

Tahun	Ekspor	Impor
2014	18.022.413.011	17.056.615.375
2015	16.452.486.419	15.628.822.394
2016	17.901.405.669	15.632.269.630
2017	18.268.869.178	16.956.900.232
2018	19.165.996.010	19.612.835.745

Sumber data: Bank Indonesia, diolah, 2019

g. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Surabaya pada tahun 2017 sebesar 5,98 persen dan sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 0,14 persen sehingga TPT Kota Surabaya pada tahun 2018 sebesar 6,12 persen. Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh BPS Kota Surabaya meningkatnya TPT Kota Surabaya dipengaruhi oleh penambahan jumlah partisipasi angkatan kerja yang cukup signifikan dan hal tersebut salah satunya dipicu adanya rekrutmen PNS di tahun 2018. Sebagaimana kota besar pada umumnya, hal yang menarik dari Kota Surabaya adalah daya tarik ekonomi yang sangat kuat bagi para pencari kerja dari luar wilayah Kota Surabaya untuk mencari kerja di Kota Surabaya. Sehingga urbanisasi dan tingginya persaingan dalam mencari kerja menjadi resiko yang terjadi di pasar kerja di Kota Surabaya.

Tabel III.10
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya
Tahun 2014 - 2018

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
2014	5,82
2015	7,01
2016	NA
2017	5,98%
2018*	6,12%

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2019

Catatan : *) data sementara

Indikator lain yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perekonomian terhadap kesejahteraan masyarakat dalam hal ketenagakerjaan dapat diukur dari pengukuran ILOR. ILOR (*Incremental Labour Output Ratio*) menggambarkan sejauh mana pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat meningkatkan perluasan kesempatan kerja pada suatu wilayah. ILOR dapat dilihat sebagai perbandingan antara perubahan jumlah penduduk usia kerja yang terserap dalam aktivitas ekonomi dengan penambahan output perekonomian suatu wilayah.

Nilai perhitungan ILOR Kota Surabaya selama 5 (lima) tahun angkanya cukup bervariasi. Nilai ILOR pada tahun 2013 yang mencapai

0,03. Nilai ILOR Surabaya pada tahun 2014 dan 2015 besarnya sama yakni 0,01. Begitu pula dengan nilai ILOR di tahun 2016 dan 2017 yang memiliki besaran sama sebesar 0,02.

Tabel III.11
Incremental Labour Output Ratio (ILOR) Kota Surabaya
Tahun 2013-2015 dan Perkiraan Tahun 2016 dan 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017*	2018*
ILOR	0,03	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, Februari 2019

Catatan : *) data angka proyeksi Bappeko

3.1.2 Prospek Ekonomi Tahun 2019 dan Tahun 2020

Perekonomian Kota Surabaya ke depan masih dihadapkan beberapa tantangan, baik dorongan dari eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, perekonomian global masih belum kondusif sepenuhnya karena pengaruh dari fluktuatifnya perekonomian beberapa negara maju yang tentunya akan berdampak terhadap perekonomian negara berkembang yang selanjutnya berdampak terhadap ekonomi Kota Surabaya dari sisi perdagangan antar negara. Sementara pada sisi internal, kondisi gejolak politik selama momen pemilu serta karakteristik Kota Surabaya turut mempengaruhi perekonomian Kota Surabaya di tahun 2019 dan 2020. Meskipun demikian, kondisi perekonomian Kota Surabaya masih diperkirakan tetap tumbuh optimis. Optimisme tersebut diperkirakan masih ditopang oleh tingginya konsumsi masyarakat. Sejalan dengan itu, peran belanja pemerintah Kota Surabaya setiap tahunnya turut mengakselerasi tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya. Investasi akan tetap tumbuh seiring dengan semakin banyaknya proyek infrastruktur publik maupun non infrastuktur yang akan dilakukan percepatan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Kinerja ekspor juga diperkirakan terakselerasi sejalan dengan perbaikan kondisi global.

Dari sisi penawaran, kinerja lapangan usaha perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor; industri pengolahan; serta penyedia akomodasi dan makan minum diperkirakan masih memberikan nilai tambah terbesar terhadap perekonomian Kota Surabaya. Besarnya nilai tambah pada kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran serta reparasi

mobil dan sepeda motor sejalan dengan besarnya permintaan baik dari masyarakat dari dalam maupun luar Kota Surabaya, mengingat Kota Surabaya merupakan kota bisnis yang tumbuh pesat dengan segala aktivitasnya sehingga perputaran arus barang dan jasa sangat besar. Sementara peningkatan pada kategori lapangan usaha industri pengolahan serta penyedia akomodasi dan makan minum merupakan imbas dari pesatnya aktivitas ekonomi dan perdagangan. Berlangsungnya momen-momen hari besar keagamaan maupun momen pemilihan umum diperkirakan turut mengakselerasi kinerja lapangan usaha utama Kota Surabaya tersebut pada tahun 2019 dan tahun 2020.

Berdasarkan uraian tersebut maka perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2019 diperkirakan tumbuh pada kisaran 6,2 persen sampai dengan 6,7 persen dan diperkirakan tumbuh kembali di tahun 2020 pada kisaran 6,3 persen sampai dengan 6,7 persen. Sementara tingkat inflasi Kota Surabaya pada tahun 2019 diperkirakan berada dalam sasaran inflasi nasional yakni $3,5 \pm 1$ persen. Begitu pula pada tahun 2020 juga diperkirakan berada dalam sasaran inflasi nasional yakni $3,0 \pm 1$ persen.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kota Surabaya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Surabaya dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan masih mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah Kota Surabaya tahun 2020 :

1. Pengembangan efisiensi dan transparan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas;
3. dengan mengembangkan konsep pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (TI) melalui penyederhanaan sistem dan prosedur serta memberikan banyak alternatif model layanan pembayaran kepada masyarakat;
4. Optimalisasi PAD sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
5. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah;
6. Optimalisasi peran dan kontribusi BUMD pada PAD melalui pembinaan tata kelola BUMD yang efektif dan efisien.

Pendapatan Pemerintah Kota Surabaya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemudian Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan data Pendapatan Daerah Kota Surabaya sebagaimana terlihat pada Tabel III.11

Tabel III.11

**Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan
Kota Surabaya
Tahun 2016 s.d Tahun 2020**

No	Uraian	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	APBD Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	4,090,206,769,388	5,161,844,571,172	4,973,031,004,728	5,190,295,025,246	5,391,096,909,848	7.69%
1.1.1	Pajak Daerah	3,000,152,384,487	3,595,670,492,734	3,817,402,592,324	4,008,794,324,904	4,244,596,988,225	9.23%
1.1.2	Retribusi Daerah	339,453,230,306	557,966,574,670	346,798,583,545	382,785,780,664	392,512,777,081	9.86%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	131,847,096,407	134,668,941,612	140,036,260,033	155,431,097,801	167,501,717,512	6.22%
1.1.4	Lain-Lain PAD yang sah	618,754,058,188	873,538,562,156	668,793,568,826	643,283,821,877	586,485,427,030	1.27%
1.2	Dana Perimbangan	1,941,019,526,654	1,965,635,624,698	2,088,869,968,843	2,316,324,635,003	2,338,172,801,173	4.84%
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	412,788,910,654	375,422,942,034	478,358,706,741	529,799,982,003	551,648,148,173	8.31%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1,233,380,404,000	1,211,713,876,000	1,211,713,876,000	1,308,697,316,000	1,308,697,316,000	1.56%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	294,850,212,000	378,498,806,664	398,797,386,102	477,827,337,000	477,827,337,000	13.39%
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	794,527,979,850	906,092,967,800	1,113,318,147,099	1,252,190,367,618	1,184,077,136,619	10.99%
1.3.1	Hibah	-	-	181,544,145,050	181,409,399,999	191,975,140,000	0%
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	0.00	0.00%
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	786,702,579,850	853,167,802,800	880,120,602,049	981,445,686,619	902,445,686,619	-2.01%
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	-	0	0%
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2,825,400,000	2,903,400,000	2,903,400,000	3,699,400,000	4,020,429,000	2.17%
1.3.6	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5,000,000,000	50,021,765,000	48,750,000,000	85,635,881,000	85,635,881,000	243%
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		6,825,754,275,892	8,033,573,163,670	8,175,219,120,670	8,758,810,027,867	8,913,346,847,640	7.09%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah, 2019

Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebesar 7,09% didukung dari peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 7,69%, peningkatan dana perimbangan sebesar 4,84% dan peningkatan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 10,99%.

Rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 didukung dari peningkatan pajak daerah sebesar 9,23%, peningkatan retribusi daerah sebesar 9,86%, peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 6,22% dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 1,27%

Rata-rata pertumbuhan dana perimbangan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebesar 4,84% didukung dari peningkatan bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar 8,31%, peningkatan dana alokasi umum sebesar 1,56% dan peningkatan dana alokasi khusus sebesar 13,39%. Rata-rata pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebesar 10,99% didukung dari peningkatan dana bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah daerah lainnya sebesar -2,01%, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah

daerah lainnya 2,17% dan peningkatan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 243%.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah Kebijakan Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Berdasarkan visi Kota Surabaya Tahun 2016-2021 yaitu **“Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi”**, Belanja Daerah Kota Surabaya pada Tahun 2020 disesuaikan dengan tema Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2020 yaitu “Mempertahankan daya saing melalui sumber daya manusia berkualitas dan infrastruktur ekologis berkelanjutan” diarahkan untuk :

1. Menjamin terlaksananya program skala besar dan prioritas;
2. Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan dasar pada masyarakat sesuai dengan prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan;
3. Pemanfaatan belanja daerah secara efisien dan efektif yang diarahkan pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga proporsi belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung;
4. Transparansi pengelolaan belanja daerah dengan didukung sistem informasi yang terintegrasi, meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
5. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pajak Rokok, Dana Insentif Daerah dan BLUD) untuk menstimulasi capaian target kinerja sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;

6. Menerapkan sistem manajemen kinerja pegawai melalui Pemberian Tunjangan Profesi Pendidik kepada Pegawai Negeri Sipil Guru dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) non Guru;
7. Meningkatkan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik;
8. Menerapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kecerdasan intelektual, mental spiritual dan ketrampilan SDM dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program, kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat;

Alokasi belanja langsung dioptimalkan pada belanja modal dan belanja barang dan jasa untuk menstimulasi pertumbuhan sektor riil.

Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah kota semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Berdasarkan data realisasi Tahun 2016, Tahun 2017, realisasi Tahun 2018, target Tahun 2019 serta proyeksi Tahun 2020 belanjadaerah Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel III.12.

Tabel III.12
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja
Kota Surabaya
Tahun 2016 s.d Tahun 2020

No	Uraian	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	APBD Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG						
2.1.2	Belanja Pegawai	2,092,288,193,728	1,960,289,143,905	1,857,794,385,641	2,221,237,964,649	2,259,963,015,551	2.44%
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	
2.1.4	Belanja Subsidi	19,005,408,000	-	-	-	-	-25.00%
2.1.5	Belanja Hibah	214,488,143,792	111,504,410,055	81,167,517,434	99,989,015,754	215,415,480,000	15.85%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	
2.1.7	Belanja Bagi Hasil kpd. Prop/Kab/Kota	-	-	9,254,742,990	750,000,000	750,000,000	-22.97%
2.1.8	Belanja Bantuan Keuangan kpd. Prop/Kab/Kota	1,128,270,000	1,376,863,000	2,158,290,000	3,181,420,697	3,181,420,697	31.55%
2.1.9	Belanja Tidak Terduga	-	-	6,085,899,644	15,000,000,000	15,000,000,000	36.62%
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,326,910,015,520	2,073,170,416,960	1,956,460,835,709	2,340,158,401,100	2,494,309,916,248	2.42%
2.2	BELANJA LANGSUNG						
2.2.1	Belanja Pegawai	448,667,099,371	435,954,095,330	483,644,287,890	517,650,383,870	569,028,853,084	6.27%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,586,690,389,712	2,885,392,981,721	3,306,763,333,391	3,841,940,288,330	4,324,716,834,039	13.73%
2.2.3	Belanja Modal	1,789,394,044,827	2,517,891,658,246	2,430,061,039,309	2,806,523,286,995	2,364,032,088,324	9.24%
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	4,824,751,533,910	5,839,238,735,298	6,220,468,660,590	7,166,113,959,195	7,257,777,775,447	11.01%
	TOTAL JUMLAH BELANJA	7,151,661,549,430	7,912,409,152,257	8,176,929,496,299	9,506,272,360,295	9,752,087,691,695	8.21%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah, 2019

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan Kota Surabaya Tahun 2020 diarahkan pada SILPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.

Arah kebijakan pengeluaran pembiayaan Kota Surabaya tahun 2020 diarahkan pada penetapan kebijakan penyertaan modal untuk badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Gambaran pembiayaan riil daerah selama 5 tahun terakhir (2016 – 2020) terlihat seperti yang terdapat pada Tabel III.13.

Tabel III.13
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Kota Surabaya
Tahun 2016 s.d Tahun 2020

No	Uraian	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	APBD Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN						
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) dan Silpa BLUD	1,414,929,806,905	1,068,140,827,993	1,201,993,194,680	756,287,482,428	848,740,844,055	-9.21%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	0.00%
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	0.00%
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	13,183,336	3,300,000	2,000,000	-	-	
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	0.00%
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1,414,942,990,241	1,068,144,127,993	1,201,995,194,680	756,287,482,428	848,740,844,055	-9.21%
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN						
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-	0.00%
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	20,000,000,000	-	-	8,825,150,000	10,000,000,000	3.33%
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	-	-	-	-	-	0.00%
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20,000,000,000	-	-	8,825,150,000	10,000,000,000	-21.67%
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	1,394,942,990,241	1,068,144,127,993	1,201,995,194,680	747,462,332,428	838,740,844,055	-9.12%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah, 2019

3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah Non Pemerintah

Dalam rangka mewujudkan pencapaian pembangunan daerah, pemerintah daerah telah menyusun program-program perencanaan baik perencanaan pembangunan jangka panjang maupun jangka pendek. Namun demikian, jika dilihat dari sisi fiskal daerah, kemandirian keuangan daerah Kota Surabaya masih cukup rentan. Mengingat besarnya rencana program pembangunan Pemerintah

Kota Surabaya baik infrastruktur maupun non infrastruktur maka anggaran belanja yang dikeluarkan selalu meningkat setiap tahunnya dan lebih besar dibanding dengan pendapatan yang diterima. Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat bergantung sepenuhnya terhadap APBD yang tersedia sehingga mengharuskan pemerintah Kota Surabaya untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah dari sumber lainnya.

Alternatif-alternatif kebijakan pembiayaan pembangunan non pemerintah yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya adalah sebagai berikut: (1) *fiscal engineering* yaitu pembiayaan pembangunan yang diarahkan untuk mampu membangun kemandirian fiskal dengan konsep *expenditure reform* melalui perubahan tata kelola menjadi Badan Layanan Umum Daerah pada Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan *cost recovery*. (2) *Creative Financing* yaitu sebuah pendekatan yang dilakukan dengan mengoptimalkan peran sektor swasta dalam melalui beberapa skema yakni skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*Public Private Partnership*) maupun melalui sinergi pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya, antara lain yakni:

1. Kemitraan Pembiayaan Daerah antara Pemerintah dan swasta, melalui
 - a. Peningkatan kerjasama swasta dan pemerintah melalui kerjasama pemerintah swasta (KPS)/ *Public Private Partnership* (PPP). Bentuk kerjasama PKS dapat dilakukan dengan berbagai skema kerjasama seperti build operate and transfer (BOT), build transfer operate (BTO) maupun bentuk lainnya.
 - b. Optimalisasi partisipasi dunia usaha sebagai bagian dari pemangku kepentingan (stakeholder) untuk berperan dan terlibat aktif dalam program pembangunan melalui Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang lebih dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pembiayaan pembangunan di Kota Surabaya melalui CSR dipandang potensial untuk dikembangkan oleh pemerintah daerah Kota Surabaya. Potensi tersebut didukung oleh tingginya peran sektor industri pengolahan, dimana sektor industri pengolahan merupakan sektor kedua dalam menopang pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya

2. Pengembangan kerjasama antar daerah. Kerjasama daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah lainnya tersebut meliputi kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan. Kerjasama antara daerah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi maupun efektivitas guna mendorong pembangunan suatu daerah.
3. Kerjasama kemitraan dengan lembaga non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi maupun ilmu pengetahuan guna menunjang pembangunan daerah.
4. Pengembangan kerjasama melalui pinjaman maupun hibah luar negeri yang digunakan pada bidang-bidang strategis utamanya untuk pembangunan infrastruktur publik yang mempunyai daya ungkit kepada perekonomian daerah.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 berpedoman pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021. Tujuan dan sasaran pembangunan ini memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam urusan pemerintah daerah baik urusan wajib, urusan pilihan maupun penunjang urusan.

Tema pembangunan Kota Surabaya pada Tahun 2020 telah diselaraskan dengan tema pembangunan Nasional Tahun 2020 dan tema pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020. Tema pembangunan nasional Tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pertumbuhan Berkualitas" sedangkan tema pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 adalah "Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Jawa Timur untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berdaya Saing", sehingga tema pembangunan Kota Surabaya Tahun 2020 adalah :

***"Percepatan Peningkatan Daya Saing Melalui Sumber Daya
Manusia Berkualitas dan Infrastruktur Ekologis Berkelanjutan"***

Adapun tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing visi dan misi diuraikan dalam matriks, sebagaimana yang terlihat pada Tabel IV.1.

Tabel IV.1
Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Surabaya

VISI : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran
1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas serta memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	Meningkatkan derajat kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)
		Meningkatkan ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan
		Meningkatkan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan
		Meningkatkan cakupan ketersediaan pelayanan prasarana kesehatan	Persentase cakupan ketersediaan prasarana kesehatan yang memenuhi standar klasifikasi dan akreditasi
		Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
			Persentase indikator Kota Layak Anak (KLA) yang terpenuhi
		Meningkatkan cakupan ketersediaan pelayanan prasarana pendidikan yang memenuhi standar	Persentase cakupan ketersediaan prasarana pendidikan memenuhi standar
		Meningkatkan dan mempertahankan prestasi atlet di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	Indeks prestasi atlet di tingkat regional, nasional dan/atau internasional
		Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan kepemudaan	Persentase kader kenakalan remaja dan pemuda pelopor yang menjalankan fungsi advokasi pembangunan kepemudaan
	Penurunan Penduduk Miskin	Meningkatkan kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani
2. Memelihara keamanan dan ketertiban umum	Mengurangi pengangguran	Meningkatkan kesempatan kerja dan kompetensi angkatan kerja, serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis	Persentase pencari kerja terserap pada pasar kerja formal
	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan ketertiban umum	Rasio pelanggaran Perda per 1.000 Penduduk

VISI : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran
		Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma, toleransi, dan kerukunan masyarakat	Persentase konflik yang menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat
		Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase peserta kegiatan keagamaan yang memahami nilai-nilai keagamaan
		Meningkatkan perlindungan masyarakat	Rasio Linmas per 1.000 penduduk
3. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien	Mewujudkan sistem infrastruktur kota yang terakses, terkoneksi, dan menjamin mobilitas melalui ketahanan terhadap bencana, sinkronisasi sistem penataan ruang dan pertanahan, pengoptimalan utilitas dan sistem drainase kota serta jaringan transportasi kota yang terpadu	Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap	Indeks Penanggulangan Bencana
		Meningkatkan efektivitas perwujudan penataan ruang dan bangunan	Persentase ketersediaan perangkat pengendalian penataan ruang dan bangunan (implementasi SLF)
		Meningkatkan pengamanan dan pengelolaan aset tanah untuk pembangunan infrastruktur	Persentase pengamanan aset tanah dan saluran untuk pembangunan infrastruktur
		Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)	Persentase rencana induk sektoral yang disusun dan telah tersinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
		Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan	Persentase aset tanah dan/atau bangunan yang terintegrasi dalam sistem pengamanan dan pengelolaan aset
		Mewujudkan penyediaan lahan bagi kepentingan umum	Persentase lokasi lahan yang tersedia untuk kepentingan umum
		Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU hemat energi	Persentase panjang jalan yang sudah terpasang PJU hemat energi
		Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien	Indeks Genangan
		Penyediaan sistem lalu lintas yang berkualitas	Persentase jalan kewenangan kota dengan v/c ratio $\leq 0,95$

VISI : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran
		Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan	Persentase tingkat Keandalan Jaringan Jalan
		Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana angkutan	Persentase Load Factor Kendaraan Umum (Angkot)
			Persentase Load Factor Kendaraan Umum (Suroboyo Bus)
		Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya	Persentase pelaksanaan rekomendasi utilitas
	Meningkatkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau	Persentase selisih luasan taman dan jalur hijau yang dibangun dan dipelihara
		Meningkatkan kualitas udara dan air	Indeks Kualitas Air Permukaan
			Indeks Kualitas Udara Ambien
			Persentase wilayah dengan rumah yang dilengkapi jamban
		Optimalisasi sistem pengelolaan dan pelayanan kebersihan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan	Persentase penurunan sampah yang masuk ke TPA melalui TPS
		Peningkatan kapasitas pelayanan pengolahan air limbah	Persentase air limbah yang diolah pada instalasi pengolahan air limbah
4. Memantapkan dan memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat	Meningkatkan nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat	Meningkatkan pemahaman nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase peserta kegiatan kepahlawanan yang memahami nilai-nilai kepahlawanan
		Meningkatnya pelestarian seni dan cagar budaya	Persentase budaya yang dapat dilestarikan
5. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional serta memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal,	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sistem manajemen city logistic, pemantapan daya saing usaha-usaha	Meningkatkan sistem logistik perdagangan dan produktivitas sektor pariwisata dalam upaya menambah nilai ekonomi	PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
			PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
		Mendorong pemantapan daya saing usaha mikro dan koperasi	Persentase Tingkat Produktivitas Koperasi Persentase Tingkat Produktivitas Usaha Mikro

VISI : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran
inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif	ekonomi lokal, serta pengembangan inovasi produk dan jasa	Meningkatkan realisasi investasi	Nilai Realisasi Investasi
6. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan	Memantapkan sarana prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas	Meningkatkan efektivitas pemanfaatan perumahan layak huni bagi MBR	Persentase pemanfaatan rusunawa yang tepat sasaran
		Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni	Luas kawasan permukiman yang telah ditingkatkan kualitas lingkungannya
		Menurunkan potensi wilayah perumahan kumuh	Persentase wilayah dengan rumah tapak yang layak huni seluruhnya
7. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP
		Meningkatkan kompetensi ASN	Indeks Profesionalitas Pegawai
		Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai Kepuasan Masyarakat
			Nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan TIK dalam Pelayanan Publik Administratif
		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan	Persentase Tingkat Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Program
		Meningkatkan cakupan ketersediaan prasarana pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase cakupan ketersediaan prasarana pemerintahan dan pelayanan publik
		Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK
			Persentase kontribusi pajak terhadap PAD
		Meningkatkan peran serta DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase kegiatan DPRD yang terfasilitasi
		Meningkatkan sistem pengawasan internal pemerintah	Rasio Angka Pelanggaran Disiplin Aparatur per 1.000 Pegawai

VISI : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran
			Persentase pelanggaran tata kelola administrasi keuangan pada kasus yang sama yang berhasil diturunkan

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

Prioritas pembangunan Kota Surabaya Tahun 2020 disusun dengan berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan isu strategis dalam dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021. Prioritas yang telah dirumuskan tersebut dikaitkan dengan sasaran pembangunan kota dalam dalam dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021. Selain itu, Prioritas Pembangunan Kota Surabaya juga diselaraskan dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020. Sasaran pembangunan kota tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Kepala Perangkat Daerah.

4.2.1 Isu Strategis

Isu strategis pembangunan Kota Surabaya selaras dan dapat dihubungkan dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Isu strategis Kota Surabaya yang telah tercantum dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 tersebut masih relevan, untuk Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Kebutuhan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam persaingan global
2. Terpeliharanya stabilitas, ketentraman, dan ketertiban umum dalam kerukunan tata kehidupan bermasyarakat
3. Keseimbangan pembangunan dan pelestarian lingkungan dalam mendukung keberlanjutan ekologi
4. Melestarikan budaya lokal untuk menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan masyarakat
5. Posisi strategis Kota Surabaya yang berpotensi sebagai penghubung perekonomian dalam skala nasional dan internasional
6. Peningkatan infrastruktur untuk mendukung peran dan daya saing kota surabaya dalam menghadapi persaingan global
7. Tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik

Hubungan keterkaitan antara isu strategis Kota Surabaya dengan Prioritas Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur dalam Tabel IV.2 sebagai berikut:

Tabel IV.2
Hubungan Keterkaitan Isu Strategis Kota Surabaya dengan
Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	ISU STRATEGIS KOTA SURABAYA	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020
1. Pembangunan Manusiadan Peggantasan Kemiskinan	1. Pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta pengantasan kemiskinan	1. Kebutuhan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam persaingan global 4. Melestarikan budaya lokal untuk menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan masyarakat	1. Peningkatan kualitas SDM melalui pemerataan pendidikan, kesehatan, dan penanganan masalah kesejahteraan sosial
2. Infrastruktut dan Pemerataan Wilayah	2. Pemerataan pembangunan dan penguatan konektivitas serta manajemen kebencanaan	6. Peningkatan infrastruktur untuk mendukung peran dan daya saing kota surabaya dalam menghadapi persaingan global	2. Pengembangan infrastruktur yg terintegrasi dan merata untuk mempercepat pertumbuhan antar wilayah
3. Nilai Tambah Sektor Ril, Industrialsasi	3. Pembangunan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan	5. Posisi strategis Kota Surabaya yang	3. Peningkatan peran sector perdagangan dan jasa pada

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2020	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2020	ISU STRATEGIS KOTA SURABAYA	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2020
dan Kesempatan Kerja	nilai tambah ekonomi dan pariwisata, kualitas ketenagakerjaan, serta perluasan kesempatan kerja	berpotensi sebagai penghubung perekonomian dalam skala nasional dan internasional	pertumbuhan kota
4. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	4. Peningkatan ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, energi, dan pelestarian lingkungan	3. Keseimbangan pembangunan dan pelestarian lingkungan dalam mendukung keberlanjutan ekologi	4. Pemantapan kualitas lingkungan hidup dan pengembangan energi alternatif
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban	2. Terpeliharanya stabilitas, ketentraman, dan ketertiban umum dalam kerukunan tata kehidupan bermasyarakat	5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
		7. Tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik	

Isu strategis pembangunan daerah yang berhubungan dengan penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

Tabel IV.4
Penjabaran Isu Strategis Berdasarkan Urusan

No	Urusan	Isu Strategis
1	PENDIDIKAN	Aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan bagi jenjang pendidikan dasar
		Kualitas layanan pendidikan
		Ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai kualifikasi akademik serta kompeten di semua jenjang pendidikan
		Aksesibilitas dan kualitas pendidikan non formal bagi seluruh masyarakat
		Perwujudan kerjasama di bidang pendidikan dengan pihak lain yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat
2	KESEHATAN	Perwujudan lingkungan sehat di masyarakat
		Aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan bagi warga miskin dan semua segmen masyarakat (ibu, anak, bayi, balita, lansia, dll)
		Ketersediaan, standarisasi, kualitas sarana dan prasarana kesehatan
		Kualitas layanan kesehatan masyarakat baik ibu, anak, bayi, balita, lansia, maupun segmen masyarakat lainnya
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Ketersediaan dan kualitas sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan
		Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi optimal secara ekologis, sosial budaya, ekonomi dan estetika dengan sistem manajemen pengelolaan yang berkualitas
		Rencana tata ruang yang dapat diterapkan sebagai pedoman pembangunan kota
		Sistem mitigasi bencana di kawasan perkotaan yang terintegrasi
		Infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien
		Sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien
		Pelayanan air bersih/air minum bagi masyarakat

No	Urusan	Isu Strategis
		Pengembangan utilitas penerangan jalan umum (PJU) kota secara terpadu dan merata
4	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang memadai dan ramah lingkungan
5	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum untuk menciptakan situasi yang aman, tentram, dan kondusif
6	SOSIAL	Peningkatan upaya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan memberdayakan keluarga miskin dan kelompok usia produktif
7	TENAGA KERJA	Peningkatan kualitas angkatan kerja sehingga mampu bersaing dan dapat diterima di dunia kerja
		Perluasan lapangan kerja bagi warga kota
		Penciptaan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis
		Peningkatan volume usaha UMKM serta kualitas kelembagaan koperasi
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
		Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
9	PANGAN	Peningkatan ketersediaan dan kualitas konsumsi pangan masyarakat
10	PERTANAHAN	Perwujudan keabsahan kepemilikan aset untuk kepentingan pembangunan dan kepentingan umum
11	LINGKUNGAN HIDUP	Pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan secara efektif dan efisien
		Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) yang berfungsi optimal secara ekologis, sosial budaya, ekonomi dan estetika dengan sistem manajemen pengelolaan yang berkualitas
		Peningkatan potensi masyarakat untuk partisipasi pembangunan
12	ADM. KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Perwujudan tertib administrasi pemerintahan, kecamatan dan kelurahan
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pemberdayaan keluarga miskin dan kelompok usia produktif
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pengendalian jumlah penduduk melalui program Keluarga Berencana
		Peningkatan pengendalian arus urbanisasi
		Perwujudan tertib administrasi pemerintahan, kecamatan dan kelurahan

No	Urusan	Isu Strategis
		Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Remaja mengenai Kesehatan Reproduksi dan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga
		Perwujudan tertib administrasi pemerintahan, kecamatan dan kelurahan
15	PERHUBUNGAN	Pengembangan sistem angkutan massal cepat perkotaan Surabaya secara terpadu dan terintegrasi antar moda
		Penyediaan dan penuntasan pembangunan jaringan jalan yang terpadu serta peningkatan kapasitas jalan yang memadai
		Penyediaan sistem manajemen lalu lintas yang berkualitas dan angkutan umum massal yang nyaman, aman dan cepat serta ramah lingkungan
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Perwujudan pelayanan publik berbasis TIK yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat
		Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien
17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Peningkatan daya saing dan aktivitas ekonomi berbasis komunitas
		Peningkatan volume usaha UMKM serta kualitas kelembagaan koperasi
18	PENANAMAN MODAL	Peningkatan realisasi PMA, PMDN dan investasi daerah
		Peningkatan kinerja investasi / akses yang dapat menjalin hubungan baik antara pemangku kepentingan untuk mendukung iklim dan aktivitas investasi, perdagangan, industri
		Peningkatan akses yang dapat menjalin hubungan baik antara pemangku kepentingan untuk mendukung iklim dan aktivitas investasi, perdagangan, industri
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Peningkatan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan dan karakter kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan
		Peningkatan dan pertahanan prestasi olahraga
20	STATISTIK DAN PERSANDIAN	Perwujudan pelayanan publik berbasis TIK yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat
21	KEBUDAYAAN	Perwujudan penggalian dan penguatan budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial
22	PERPUSTAKAAN	Perwujudan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca
23	KEARSIPAN	Perwujudan tertib administrasi pemerintahan, kecamatan dan kelurahan
24	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Peningkatan produktivitas pertanian perkotaan dan perikanan
		Pengembangan teknologi di bidang pertanian, peternakan dan perikanan

No	Urusan	Isu Strategis
25	PARIWISATA	Pengembangan dan pengoptimalan wisata religi, heritage, kuliner, belanja, kesehatan, dan wisata lainnya
		Peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB kota Surabaya melalui pemberdayaan masyarakat sekitar
		Perwujudan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat
		Penyediaan infrastruktur dan utilitas yang memudahkan investor
26	PERTANIAN	Peningkatan produktivitas pertanian perkotaan
27	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Peningkatan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan
28	PERDAGANGAN	Perwujudan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional
		Pengembangan dan penerapan konsep city logistic yang terpadu sebagai pusat serta jaringan dalam kota dan antar kota baik skala regional, nasional, maupun internasional
		Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
29	PERINDUSTRIAN	Peningkatan daya saing dan aktivitas ekonomi berbasis komunitas

4.2.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020, penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2020 serta Provinsi Jawa Timur dalam RKPD 2020. Keterkaitan tema dan prioritas pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

**Keterkaitan Tema RKP, RKPD Provinsi Jawa Timur, dan RKPD Kota Surabaya
Tahun 2020**



TEMA RKP 2020

Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas



TEMA RKPD PROVINSI JAWA TIMUR 2020

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Jawa Timur untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berdaya Saing



TEMA RKPD KOTA SURABAYA 2020

Percepatan Peningkatan Daya Saing Melalui Sumber Daya Berkualitas dan Infrastruktur Ekologis Berkelanjutan

Tabel IV.4

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kota Surabaya Tahun 2020

No.	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Arah Kebijakan Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Arah Kebijakan Kota Surabaya
1	Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan	1. Meningkatkan keterjangkauan perlinungan social bagi kelompok rentan dan penduduk yang terkendala dokumen kependudukan 2. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta 3. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk 4. Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan 5. Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi	Pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan kesehatan serta pengentasan kemiskinan	1. Meningkatkan kualitas vokasional dan keahlian khusus 2. Meningkatkan kualitas pendidikan menengah dan PK-PLK, kompetensi guru dan sarana prasarana 3. Meningkatkan kualitas kesehatan dalam penurunan AKI, stunting, pemberantasan penyakit menular dan tidak menular serta penyediaan sarana sanitasi dan air bersih 4. Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengurangan luasan kawasan kumuh 5. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender 6. Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman dan mengurangi kawasan kumuh	Peningkatan kualitas SDM melalui pemerataan pendidikan, kesehatan, dan penanganan masalah kesejahteraan sosial serta penguatan nilai kebangsaan, budaya lokal dan minat baca	1. Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan pendidikan non formal melalui penyediaan sarana prasarana, tenaga pendidik berkualitas serta penunjang operasional 2. Meningkatkan kualitas layanan baca 3. Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan masyarakat 4. Mempertahankan prestasi olahraga serta Meningkatkan potensi pemuda agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja 5. Meningkatkan pelayanan, keterampilan, pemberdayaan dan perlindungan bagi PMKS serta ibu dan anak 6. Meningkatkan penguatan nilai kebangsaan dan budaya lokal
2	Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah	1. Meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau 2. Mengembangkan aksesibilitas transportasi di kawasan 3T yang mempertimbangkan	Pemerataan pembangunan dan penguatan konektivitas serta manajemen kebencanaan	1. Memperkuat konektivitas dengan meningkatkan infrastruktur darat, laut, dan udara dalam mendukung keadilan akses bagi masyarakat daerah marjinal 2. Mengoptimalkan pemanfaatan telekomunikasi dan informatika	Pengembangan infrastruktur yg terintegrasi dengan sistem transportasi berkelanjutan dan merata untuk mempercepat pertumbuhan antar wilayah didukung	1. Meningkatkan system manajemen angkutan umum massal yang aman, nyaman dan ramah 2. Mengembangkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan yang terkoneksi dengan jaringan jalan dan jembatan regional dan nasional

No.	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Arah Kebijakan Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Arah Kebijakan Kota Surabaya
		karakteristik wilayah, keterpadua multimoda, dan mendukung kawasan yang lebih maju 3. Meningkatkan standard bangunan dan memperkuat rantai paskan konstruksi melalui inovasi kebencanaan 4. Membangun infrastruktur transportasi yang mampu meningkatkan konektivitas dan menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas dan system jaringan utama logistic 5. Mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan 6. Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penyiaran melalui transformasi digital		3. Meningkatkan manajemen penanganan kebencanaan	dengan sistem logistik dan hub yang optimal	3. Koordinasi penataan utilitas dan sarana prasarana

No.	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Arah Kebijakan Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Arah Kebijakan Kota Surabaya
3	Nilai Tambah Sektor Ril, Industriasi dan Kesempatan Kerja	1. Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM 2. Mempercepat transformasi structural 3. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing 4. Menurunkan deficit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi 5. Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Pembangunan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah ekonomi dan pariwisata, kualitas ketenagakerjaan, serta perluasan kesempatan kerja	1. Meningkatkan nilai tambah ekonomi kerakyatan pada kategori pangan dan pertanian, kemaritiman dan perikanan, energy dan mineral serta K-UKM 2. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ekonomi pada sumber daya air dan sumber daya energy 3. Akselerasi kepariwisataan melalui optimalisasi aksesibilitas, amenitas, dan atraksi 4. Meningkatkan produktivitas SDM Pertanian, industry, dan pariwisata melalui penguatan vokasi dan kompetensi 5. Mengembangkan industrialisasi berbasis digital utamanya pada ekonomi kreatif	Peningkatan peran perdagangan dan jasa pada pertumbuhan kota dengan mendorong keterlibatan dunia usaha dalam pembangunan	1. Meningkatkan iklim investasi dan usaha dengan memberikan kepastian usaha dan mengembangkan daya tarik investasi 2. Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk usaha mikro 3. Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk pertanian, kelautan dan perikanan 4. Memperkuat permodalan usaha mikro 5. Meningkatkan proporsi jumlah koperasi sehat melalui penataan kelembagaan dan pembinaan usaha 6. Meningkatkan daya saing usaha mikro melalui pengembangan desiminasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan kualitas SDM
4	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	1. Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan energy 2. Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas 3. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air 4. Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim	Peningkatan ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, energi, dan pelestarian lingkungan hidup	1. Meningkatkan manajemen pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan 2. Melestarikan lingkungan hidup melalui peningkatan peran serta masyarakat secara partisipatif 3. Meningkatkan ketahanan energy melalui pengembangan energi alternatif	Pemantapan kualitas lingkungan hidup, kawasan permukiman dan pengembangan energi alternatif	1. Menerapkan system manajemen dalam pemantauan dan pemeliharaan PJU Hemat Energi secara berkala 2. Mengembangkan dan memelihara sarana dan prasarana drainase secara rutin dan berkelanjutan 3. Memasyarakatkan penggunaan energi alternatif kepada seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha

No.	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Arah Kebijakan Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Surabaya	Arah Kebijakan Kota Surabaya
		5. Mengoptimalkan pembangunan berketahanan pangan				
5	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	1. Meningkatkan posisi kekuatan pertahanan 2. Meningkatkan stabilitas kawasan dan kerjasama pembangunan internasional 3. Menegakkan hukum dan anti korupsi 4. Membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan terorisme serta gangguan kamtibmas 5. Meningkatkan keamanan siber	Peningkatan ketentraman dan ketertiban	1. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban terhadap isu potensi konflik 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang politik, serta kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi 3. Mencegah penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan narkoba	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	1. Meningkatkan ketertiban umum dengan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah 2. Meningkatkan pengendalian keamanan dan ketenteraman lingkungan serta mewujudkan kerukunan hidup bermasyarakat 3. Meningkatkan pengendalian kenyamanan lingkungan 4. Meningkatkan kualitas utilitas teknologi informasi

4.2.3 Sasaran Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan tahun 2020 sebagaimana tersebut diatas merupakan arahan bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2020 yang berkorelasi dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021. Sasaran Pembangunan tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel IV.5
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2020 dengan
Sasaran Pembangunan Kota Surabaya

PRIORITAS	Sasaran	Indikator sasaran	Perangkat Daerah Pengampu Sasaran
1. Peningkatan kualitas SDM melalui pemerataan pendidikan, kesehatan, dan penanganan masalah kesejahteraan sosial	Meningkatkan derajat kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	(1) Dinas Kesehatan (2) RSUD Bhakti Dharma Husada (3) RSUD dr. Mohammad Soewandhie
	Meningkatkan kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	Dinas Sosial
	Meningkatkan ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Meningkatkan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Meningkatkan cakupan ketersediaan pelayanan prasarana kesehatan	Persentase cakupan ketersediaan prasarana kesehatan yang memenuhi standar klasifikasi dan akreditasi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase indikator Kota Layak Anak (KLA) yang terpenuhi	Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Meningkatkan cakupan ketersediaan pelayanan prasarana pendidikan yang memenuhi standar	Persentase cakupan ketersediaan prasarana pendidikan memenuhi standar	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

PRIORITAS	Sasaran	Indikator sasaran	Perangkat Daerah Pengampu Sasaran
	Meningkatkan dan mempertahankan prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	Indeks prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan kepemudaan	Persentase kader kenakalan remaja dan pemuda pelopor yang menjalankan fungsi advokasi pembangunan kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	Meningkatkan kesempatan kerja dan kompetensi angkatan kerja, serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis	Persentase pencari kerja terserap pada pasar kerja formal	Dinas Tenaga Kerja
	Meningkatkan pemahaman nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase peserta kegiatan kepahlawanan yang memahami nilai-nilai kepahlawanan	Dinas Sosial
	Meningkatnya pelestarian seni dan cagar budaya	Persentase budaya yang dapat dilestarikan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Meningkatnya pelestarian seni dan cagar budaya	Persentase budaya yang dapat dilestarikan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2. Pengembangan infrastruktur yg terintegrasi dan merata untuk mempercepat pertumbuhan antar wilayah	Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap	Indeks Penanggulangan Bencana	(1) Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat (2) Dinas Pemadam Kebakaran
	Pengembangan sistem penanggulangan bencana alam yang antisipatif dan tanggap		
	Pengembangan sistem penanggulangan bencana kebakaran yang antisipatif dan tanggap		
	Meningkatkan efektivitas perwujudan penataan ruang dan bangunan	Persentase ketersediaan perangkat pengendalian penataan ruang dan bangunan (implementasi SLF)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

PRIORITAS	Sasaran	Indikator sasaran	Perangkat Daerah Pengampu Sasaran
	Meningkatkan pengamanan dan pengelolaan aset tanah untuk pembangunan infrastruktur	Persentase pengamanan aset tanah dan saluran untuk pembangunan infrastruktur	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
	Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)	Persentase rencana induk sektoral yang disusun dan telah tersinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	Badan Perencanaan Pembangunan
	Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan	Persentase aset tanah dan/atau bangunan yang terintegrasi dalam sistem pengamanan dan pengelolaan aset	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
	Mewujudkan penyediaan lahan bagi kepentingan umum	Persentase lokasi lahan yang tersedia untuk kepentingan umum	(1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (2) Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
	Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU hemat energi	Persentase panjang jalan yang sudah terpasang PJU hemat energi	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
	Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien	Indeks Genangan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
	Penyediaan sistem lalu lintas yang berkualitas	Persentase jalan kewenangan kota dengan v/c ratio $\leq 0,95$	Dinas Perhubungan
	Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan	Persentase tingkat Keandalan Jaringan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
	Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana angkutan	Persentase Load Factor Kendaraan Umum (Angkot)	Dinas Perhubungan
		Persentase Load Factor Kendaraan Umum (Suroboyo Bus)	Dinas Perhubungan
	Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya	Persentase pelaksanaan rekomendasi utilitas	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota	Persentase selisih luasan	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau

PRIORITAS	Sasaran	Indikator sasaran	Perangkat Daerah Pengampu Sasaran
	yang bersih dan hijau	taman dan jalur hijau yang dibangun dan dipelihara	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Meningkatkan kualitas udara dan air	Indeks Kualitas Air Permukaan	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Udara Ambien	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase wilayah dengan rumah yang dilengkapi jamban	Dinas Lingkungan Hidup
	Optimalisasi sistem pengelolaan dan pelayanan kebersihan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan	Persentase penurunan sampah yang masuk ke TPA melalui TPS	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
	Peningkatan kapasitas pelayanan pengolahan air limbah	Persentase air limbah yang diolah pada instalasi pengolahan air limbah	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
3. Peningkatan peran sektor perdagangan dan jasa pada pertumbuhan kota	Meningkatkan sistem logistik perdagangan serta produktivitas sektor pertanian, kelautan, perikanan, dan pariwisata dalam upaya menambah nilai kekayaan ekonomi	PDRB	(1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (2) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (3) Dinas Perdagangan
	Mendorong pemantapan daya saing usaha mikro dan koperasi	Persentase Tingkat Produktivitas Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Persentase Tingkat Produktivitas Usaha Mikro	(1) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (2) Dinas Perdagangan
	Meningkatkan realisasi investasi	Nilai Realisasi Investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Pemantapan kualitas lingkungan hidup dan pengembangan energi alternatif	Meningkatkan efektivitas pemanfaatan perumahan layak huni bagi MBR	Persentase pemanfaatan rusunawa yang tepat sasaran	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
	Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni	Luas kawasan permukiman yang telah ditingkatkan kualitas lingkungannya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

PRIORITAS	Sasaran	Indikator sasaran	Perangkat Daerah Pengampu Sasaran
	Menurunkan potensi wilayah perumahan kumuh	Persentase wilayah dengan rumah tapak yang layak huni seluruhnya	Dinas Sosial
	Meningkatkan upaya penerapan konservasi energi	Persentase jumlah kegiatan usaha yang mengalami peningkatan efisiensi energi	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	Persentase peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
	Meningkatkan upaya penerapan teknologi untuk pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif di gedung milik pemerintah kota	Persentase upaya penerapan teknologi untuk pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif di gedung milik pemerintah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan ketertiban umum	Rasio pelanggaran Perda per 1.000 Penduduk	Satuan Polisi Pamong Praja
	Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma, toleransi, dan kerukunan masyarakat	Persentase konflik yang menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
	Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase peserta kegiatan keagamaan yang memahami nilai-nilai keagamaan	Dinas Sosial
	Meningkatkan perlindungan masyarakat	Rasio Linmas per 1.000 penduduk	Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat
	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Bagian Organisasi
	Meningkatkan kompetensi ASN	Indeks Profesionalitas Pegawai	Badan Kepegawaian dan Diklat
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai Kepuasan Masyarakat	(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (2) Dinas Tenaga Kerja (3) Dinas Perdagangan

PRIORITAS	Sasaran	Indikator sasaran	Perangkat Daerah Pengampu Sasaran
			(4) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (5) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (6) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (7) Dinas Perhubungan (8) Dinas Lingkungan Hidup (9) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (11) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan TIK dalam Pelayanan Publik Administratif	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan	Persentase Tingkat Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Program	Badan Perencanaan Pembangunan
	Meningkatkan cakupan ketersediaan prasarana pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase cakupan ketersediaan prasarana pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
	Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
		Persentase kontribusi pajak terhadap PAD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
	Meningkatkan peran serta DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase kegiatan DPRD yang terfasilitasi	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Meningkatkan sistem pengawasan internal pemerintah	Rasio Angka Pelanggaran Disiplin Aparatur per 1.000 Pegawai	Inspektorat

PRIORITAS	Sasaran	Indikator sasaran	Perangkat Daerah Pengampu Sasaran
		Persentase pelanggaran tata kelola administrasi keuangan pada kasus yang sama yang berhasil diturunkan	Inspektorat
		Persentase pengaduan masyarakat terkait aparatur yang ditindaklanjuti	Inspektorat

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Kota Surabaya merupakan dokumen rencana tahunan memuat program dan kegiatan yang merupakan penjabaran RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021, dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD.

Rencana Program Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2020 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah disampaikan secara detail pada Tabel V.1 tentang Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2020 sebagaimana berikut.

Tabel V.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2020

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	Urusan Pemerintahan				5.783.201.567.429	
1.1	Urusan Wajib				5.739.877.687.086	
1.1.1	Pelayanan Dasar				4.018.067.136.373	
1.1.1.01	Pendidikan				939.805.554.327	
1.1.1.01.01	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Kesenian Olahraga Pendidikan		Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan paket A	73,21%	127.066.124.151	
			Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan paket B	89,27%		
			Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan paket C	91,24%		
			Persentase ketuntasan pendidikan lembaga kursus dan pelatihan	72,25%		
			Persentase ketuntasan pendidikan PAUD	78,50%		
			Persentase prestasi non akademik peserta didik PAUD pada lomba tingkat kecamatan/kota/provinsi/nasional/internasional	0,15%		
			Persentase prestasi non akademik peserta didik SD pada lomba tingkat kota/provinsi/nasional/internasional	1,70%		
			Persentase prestasi non akademik peserta didik SMP pada lomba tingkat kota/provinsi/nasional/internasional	4,00%		
			Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	45,71%		
1.1.1.01.01.0001	Fasilitasi Pelaksanaan TPA/TPQ dan Kelas Minggu	TPA/TPQ hasil verifikasi dari Kemenag	Jumlah guru TPA/TPQ dan kelas minggu yang mendapatkan fasilitasi pelaksanaan TPA/TPQ dan kelas minggu	12000 orang	48.203.633.052	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.01.0002	Fasilitasi Pembelajaran dan Sumber Belajar Pendidikan Keluarga	Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan sumber belajar pendidikan keluarga	2 kali	506.424.163	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.01.0003	Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan	PKBM yang ditunjuk	Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pembinaan pendidikan kesetaraan	34 lembaga	3.465.396.807	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.01.0004	Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan serta PKBM	Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan serta PKBM	289 lembaga	699.144.152	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.01.0005	Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa PLS	Seluruh lembaga sekolah di Kota Surabaya	Jumlah kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa PLS yang dilaksanakan	12 kali	1.914.070.606	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.01.0006	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Pos Paud Terpadu (PPT) di Kota Surabaya	Jumlah Lembaga PAUD yang mendapatkan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	1337 lembaga	5.121.980.203	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.01.0007	Peningkatan Mutu Pendidik PAUD	Lembaga PAUD di Kota Surabaya dan Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Jumlah pendidik PAUD yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	12.010 orang	37.914.908.203	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.01.0008	Penunjang Peningkatan Prestasi Pendidikan Luar Sekolah	Kota Surabaya dan Luar Kota Surabaya	Jumlah kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Pendidikan Luar Sekolah yang dilaksanakan	18 kali	3.656.387.982	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.01.0009	Penunjang Peningkatan Prestasi Siswa dan Masyarakat	Gedung milik Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Siswa dan Masyarakat	3 kali	25.468.978.889	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.1.01.01.0010	Penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik	Lembaga PAUD penerima DAK PAUD	Jumlah lembaga yang mendapatkan penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik selama 12 Bulan	2 lembaga	115.200.094	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02	Program Pengembangan Sekolah Dasar		Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SD/MI	100,00%	303.929.882.126	
			Persentase lembaga pendidikan SD yang sarana prasarannya sesuai standar	92,01%		
			Persentase prestasi akademik peserta didik SD pada lomba tingkat kota/provinsi/nasional/internasional	0,12%		
1.1.1.01.02.0001	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD negeri	SD Negeri di Kota Surabaya	Jumlah lembaga sekolah Dasar Negeri yang mendapatkan biaya Operasional Sekolah (BOS) selama 12 bulan	301 lembaga	122.890.547.601	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Sekolah Dasar	Semua sekolah Dasar di Kota Surabaya yang terdaftar sebagai penyelenggara Kegiatan Ujian Sekolah	Jumlah peserta yang mengikuti Pelaksanaan Ujian sekolah dasar dan Calistung SD	93864 orang	2.470.501.945	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02.0003	Fasilitasi Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Dasar Sederajat	SD Negeri dan SD Swasta di Kota Surabaya yang menerima BOPDA	Jumlah Sekolah Dasar sederajat yang mendapatkan biaya pendidikan daerah selama 12 bulan	698 lembaga	151.342.500.743	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02.0004	Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan inklusi, Pendidikan Layanan Khusus Sekolah Dasar dan unit layanan disabilitas	Sekolah Dasar Negeri penyelenggara Kelas Layanan khusus dan Sekolah Inklusi serta Pusat Layanan Disabilitas	Jumlah Pendidikan inklusi, Pendidikan Layanan Khusus Sekolah Dasar dan unit layanan disabilitas yang diselenggarakan dan dibina selama 12 bulan	73 lembaga	12.537.956.655	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02.0005	Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar	Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Kota Surabaya yang mengikuti proses akreditasi	Jumlah lembaga yang mendapatkan Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar	259 lembaga	775.968.018	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02.0006	Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Dasar	Kantor Dinas Pendidikan	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Dasar	669 lembaga	837.598.980	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02.0007	Peningkatan Perlengkapan Sekolah Dasar	SD Negeri di Kota Surabaya	Jumlah SD yang menerima peningkatan perlengkapan sekolah dasar	301 lembaga	10.609.649.313	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02.0008	Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Dasar	SD Negeri dan SD Swasta di Kota Surabaya	Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Dasar	5 kali	1.752.042.071	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02.0009	Penyediaan Sarana dan Rehabilitasi Gedung Pendidikan Sekolah Dasar yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	Lembaga SD Negeri Penerima DAK Fisik Sekolah Dasar	Jumlah lembaga penerima sarana pendidikan sekolah dasar yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	10 lembaga	713.116.800	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.03	Program Pengembangan Sekolah Menengah		Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SMP/MTS	100,00%	153.840.443.138	
			Persentase lembaga pendidikan SMP yang sarana prasarannya sesuai standar	95,73%		
			Persentase lembaga pendidikan SMP yang terakreditasi	98,78%		
			Persentase prestasi akademik SMP pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	0,14%		

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.1.01.03.0001	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMP Negeri	SMP Negeri di Kota Surabaya	Jumlah lembaga sekolah Menengah Negeri yang mendapatkan biaya Operasional Sekolah (BOS) selama 12 bulan	62 lembaga	58.114.745.750	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.03.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Nasional Sekolah Menengah	Semua Sekolah Menengah di Kota Surabaya yang terdaftar sebagai penyelenggara Kegiatan Ujian Nasional	Jumlah peserta yang mengikuti Ujian Nasional Sekolah Menengah	40993 orang	836.732.942	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.03.0003	Fasilitasi Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Menengah Sederajat	SMP Negeri dan SMP Swasta di Kota Surabaya yang menerima BOPDA	Jumlah sekolah Menengah sederajat yang mendapatkan biaya pendidikan daerah selama 12 bulan	317 lembaga	72.786.168.805	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.03.0004	Fasilitasi Penyelenggaraan Sekolah Menengah Inklusi dan Sekolah Terbuka	Seluruh Lembaga Sekolah dan Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah inklusi dan Sekolah Terbuka yang diselenggarakan dan dibina selama 12 bulan	37 lembaga	7.593.786.798	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.03.0005	Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Menengah	Sekolah Menengah Negeri dan Swasta di Kota Surabaya yang mengikuti proses akreditasi/reakreditasi dan Lomba Budaya Mutu	Jumlah lembaga yang mendapatkan peningkatan dan pemetaan mutu kelembagaan sekolah menengah	294 lembaga	457.117.588	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.03.0006	Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah	Kantor Dinas Pendidikan	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah	245 lembaga	501.583.402	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.03.0007	Peningkatan Perlengkapan Sekolah Menengah	SMP Negeri di Kota Surabaya	Jumlah SMP yang menerima peningkatan perlengkapan sekolah menengah	62 lembaga	9.662.884.033	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.03.0008	Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Menengah	SMP Negeri dan SMP Swasta di Kota Surabaya	Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Menengah	1 kali	1.723.623.820	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.03.0009	Penyediaan Sarana Sekolah Menengah yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	Lembaga SMP Negeri Penerima DAK Fisik Sekolah Menengah	Jumlah lembaga penerima sarana sekolah menengah yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	8 lembaga	2.163.800.000	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.04	Program Peningkatan dan Perbaikan Prasarana Pendidikan		Persentase prasarana pendidikan dalam kondisi baik	88,94%	119.948.904.507	
1.1.1.01.04.0001	Pembangunan / Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan	Fasilitas Pendidikan milik Pemerintah Kota Surabaya yang memerlukan rehab serta pembangunan baru	Jumlah Fasilitas/Gedung Pendidikan yang dibangun dan direhabilitasi	24 bangunan	77.526.823.853	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.01.04.0002	Pemeliharaan Fasilitas Gedung Pendidikan	Gedung Pendidikan milik Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah Gedung/Fasilitas Pendidikan yang dipelihara	160 bangunan	40.199.519.233	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.01.04.0003	Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Gedung Pendidikan	Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Jumlah dokumen perencanaan Fasilitas/Gedung Pendidikan yang disusun	25 dokumen	2.222.561.421	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.01.05	Program Peningkatan Manajemen Sekolah		Persentase lembaga pendidikan SD/MI yang tertib administrasi	81,86%	87.798.278.996	
			Persentase lembaga pendidikan SMP/MTs yang tertib administrasi	87,38%		
1.1.1.01.05.0001	Fasilitasi Penerimaan Peserta Didik Baru	Dinas Pendidikan dan lembaga SD Negeri dan SMP Negeri pelaksana PPDB	Jumlah kegiatan fasilitasi penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan	2 kali	1.980.465.828	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.05.0002	Fasilitasi Pengelolaan Manajemen Sekolah	Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya	jumlah lembaga pendidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengelolaan manajemen sekolah	2567 lembaga	1.028.226.288	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.05.0003	Penunjang Operasional Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah	Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Negeri	Jumlah sekolah yang mendapatkan fasilitas operasional selama 12 bulan	363 lembaga	84.789.586.880	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.1.01.06	Program Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan		Persentase guru PAUD yang kompeten	75,08%	147.221.921.409	
			Persentase guru SD yang berkualitas	90,00%		
			Persentase guru SD yang kompeten	100,00%		
			Persentase guru SD yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik yang dibuktikan melalui ijazah S1 dari fakultas keguruan dan ilmu pendidikan atau AKTA 4	100,00%		
			Persentase guru SMP yang berkualitas	75,00%		
			Persentase guru SMP yang kompeten	100,00%		
			Persentase guru SMP yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar	100,00%		
			Persentase tenaga kependidikan (administrasi) SD yang berkualitas	85,00%		
			Persentase tenaga kependidikan (administrasi) SMP yang berkualitas	90,00%		
			Persentase tenaga kependidikan PAUD jenjang TK yang kompeten	100,00%		
1.1.1.01.06.0001	Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan (APBD / BKK)	Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Jumlah kegiatan Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan	1 kali	1.117.241.749	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.06.0002	Fasilitasi Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan	Kantor Dinas Pendidikan, SD dan SMP di Kota Surabaya	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	2031 orang	64.930.918.074	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.06.0003	Pengawasan serta Penilaian Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan (APBD / BKK)	Kantor Dinas Pendidikan, SD dan SMP di Kota Surabaya	Jumlah lembaga yang mendapatkan pengawasan serta penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan	957 lembaga	26.206.989.044	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.06.0004	Perencanaan Penempatan serta Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan	Kantor Dinas Pendidikan, SD dan SMP di Kota Surabaya	Jumlah dokumen Perencanaan Penempatan serta Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan	2 dokumen	54.966.772.542	Dinas Pendidikan
1.1.1.02	Kesehatan				1.170.857.261.646	
1.1.1.02.01	Program Jaminan Kesehatan		Persentase Kepemilikan Jaminan Kesehatan	100,00%	175.733.535.729	
1.1.1.02.01.0001	Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Puskesmas dan Jaringan se-Kota Surabaya dan FKTL (fasilitas kesehatan tingkat lanjutan) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan	580000 orang	168.177.014.529	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.01.0002	Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja	Puskesmas dan Jaringan se-Kota Surabaya dan FKTL (fasilitas kesehatan tingkat lanjutan) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan	328544 orang	7.556.521.200	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.02	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu		Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan Dinas Kesehatan	100,00%	23.108.395.641	
1.1.1.02.02.0001	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	63 Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan yang diadakan	133 Item	17.608.131.948	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.1.02.02.0002	Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Jumlah obat dan perbekalan kesehatan dasar di Puskesmas yang diadakan	34 jenis	2.840.546.693	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.02.0003	Penyediaan Obat Perbaikan Gizi Masyarakat (DAK)	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Jumlah obat gizi yang diadakan	3 item	2.659.717.000	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.03	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada		Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada	100,00%	32.174.798.660	
1.1.1.02.03.0001	Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	RSUD Bhakti Dharma Husada	Jumlah jenis Obat dan perbekalan Kesehatan RS yang disediakan	2 jenis	32.174.798.660	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.1.1.02.04	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD dr. Mohamad Soewandhie		Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan RSUD dr. Mohamad Soewandhie	100,00%	71.000.000.000	
1.1.1.02.04.0001	Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Jumlah jenis obat dan perbekalan kesehatan rumah sakit yang disediakan	2 jenis	71.000.000.000	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
1.1.1.02.05	Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		Cakupan kunjungan ibu hamil K4	98,49%	36.900.521.792	
			Cakupan kunjungan neonatal lengkap	93,00%		
			Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes)	96,97%		
			Prevalensi balita gizi buruk	<1,00 %		
			Prevalensi balita gizi kurang	9,50%		
			Prevalensi balita stunting	15,00%		
1.1.1.02.05.0001	Jaminan Persalinan (DAK Bidang Kesehatan)	Puskesmas/Puskesmas PONED/RS Pemerintah/RS TNI/POLRI	Jumlah Kunjungan Ibu dan bayi baru lahir yang mendapatkan perawatan persalinan dan pasca persalinan di sarana kesehatan	428 kunjungan	1.667.000.000	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.05.0002	Pelayanan kesehatan keluarga	Wilayah Kerja Puskesmas di Kota Surabaya	Jumlah Lembaga yang melakukan Upaya Pelayanan Kesehatan Keluarga	64 Lembaga	30.170.798.649	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.05.0003	Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Jumlah ibu, calon pengantin wanita (CPW), dan balita yang mendapatkan layanan perbaikan gizi	375 orang	5.062.723.143	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.06	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		Cakupan imunisasi dasar lengkap	93,87%	32.233.850.650	
			Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <20 jam	100,00%		
			Cakupan kelurahan yang memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	100,00%		
1.1.1.02.06.0001	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	154 lembaga	28.011.150.599	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.06.0002	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Jumlah lembaga yang melaksanakan Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular	154 lembaga	2.863.933.792	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.06.0003	Surveilans dan Imunisasi	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Surveilans Terpadu dan Pembinaan Imunisasi	63 lembaga	1.358.766.259	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.07	Program Pengembangan Pola Hidup Bersih Sehat Masyarakat		Persentase kelurahan siaga aktif minimal strata madya	100,00%	71.150.358.056	
			Persentase rumah sehat	79,50%		
			Persentase TPM memenuhi syarat higienis sanitasi	84,00%		
1.1.1.02.07.0001	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Bidang Kesehatan)	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas dan UPTD Gudang Farmasi	Jumlah lembaga yang melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan	64 lembaga	32.717.765.558	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.1.02.07.0002	Pembinaan dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Jumlah lembaga yang melakukan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat	63 lembaga	23.113.004.643	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.07.0003	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Jumlah puskesmas dengan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan	63 lembaga	10.561.202.835	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.07.0004	Penyelenggaraan Upaya Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang melakukan Upaya Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	63 lembaga	4.758.385.020	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.08	Program Pengembangan SDM dan Promosi Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada		Persentase pelaksanaan kegiatan PKRS sesuai standar	80,00%	16.238.103.134	
			Persentase SDM RSUD Bhakti Dharma Husada yang mendapatkan peningkatan kompetensi sesuai standar	60,00%		
1.1.1.02.08.0001	Pengembangan dan Peningkatan SDM Rumah Sakit	RSUD BDH	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Peningkatan SDM Kesehatan	75 kali	15.363.103.154	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.1.1.02.08.0002	Promosi Kesehatan Rumah Sakit	RSUD Bhakti Dharma Husada	Jumlah kegiatan Promosi Kesehatan yang Dilaksanakan	115 kali	874.999.980	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.1.1.02.09	Program Pengembangan SDM dan Sistem Pengelolaan RSUD dr. Mohamad Soewandhie		Persentase SDM RSUD dr. Mohamad Soewandhie yang memiliki kompetensi sesuai standar	50,00%	28.580.067.089	
1.1.1.02.09.0001	Pengembangan Manajemen Rumah Sakit	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Jumlah jenis kegiatan pengembangan manajemen rumah sakit yang dilaksanakan	4 jenis	1.706.407.018	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
1.1.1.02.09.0002	Peningkatan Kinerja SDM Kesehatan	Eksternal dan Internal	Jumlah SDM kesehatan yang mendapatkan peningkatan kinerja	200 orang	26.873.660.071	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
1.1.1.02.10	Program Peningkatan dan Perbaikan Prasarana Layanan Kesehatan		Persentase prasarana layanan kesehatan dalam kondisi baik	88,17%	323.632.811.405	
1.1.1.02.10.0001	Pembangunan / Rehabilitasi dan Pengawasan Prasarana Bangunan Layanan Kesehatan	Puskesmas/Puskesmas Pembantu serta RSUD yang merupakan aset milik Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah Bangunan Layanan Kesehatan yang dibangun/direhabilitasi	3 bangunan	172.569.149.984	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.02.10.0002	Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung RSUD beserta peralatannya (Tahun Jamak / Multiyears)	RSUD milik Pemerintah Kota Surabaya yang memerlukan rehab serta pembangunan baru (Tahun Jamak / Multiyears)	Jumlah bangunan gedung RSUD berserta peralatannya yang dibangun/ direhab (Tahun Jamak / Multiyears)	1 bangunan	150.000.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.02.10.0003	Penyusunan Dokumen Perencanaan Prasarana Bangunan Layanan Kesehatan	Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Jumlah dokumen perencanaan Prasarana Bangunan Layanan Kesehatan	13 Dokumen	1.063.661.421	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.02.11	Program Peningkatan Keamanan Pangan Olahan dan Siap Saji		Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan	88,00%	1.815.189.240	
1.1.1.02.11.0001	Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan dan siap saji	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Jumlah Sampel Yang Diperiksa	5442 sampel	1.815.189.240	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.12	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada		Average Length of Stay (AvLOS)	4 Hari	5.182.688.887	
			Bed Turn Over Ratio (BTO)	45 Kali		
			Turn Over Interval (TOI)	3 Hari		
1.1.1.02.12.0001	Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya	Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan keperawatan	13514 orang	3.126.010.372	RSUD Bhakti Dharma Husada

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.1.02.12.0002	Pelayanan Medik Rumah Sakit	RSUD Bhakti Dharma Husada dan domisili pasien RSUD Bhakti Dharma Husada	Jumlah Pasien RS yang Mendapatkan Pelayanan Medik	2218 orang	2.056.678.515	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.1.1.02.13	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Mohamad Soewandhie		Angka Kejadian Infeksi Nosokomial	1,10%	8.165.044.720	
			Angka Kejadian Infeksi Pasca Operasi	1,25%		
1.1.1.02.13.0001	Pelayanan Gizi Rumah Sakit	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan gizi rumah sakit	28340 orang	7.082.530.840	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
1.1.1.02.13.0002	Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan keperawatan yang diadakan	180 kali	498.812.840	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
1.1.1.02.13.0003	Penyelenggaraan Layanan Medik Rumah Sakit	RSUD dr. Moahamad Soewandhie	Jumlah kegiatan layanan medik Rumah Sakit yang diselenggarakan	155 kali	583.701.040	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
1.1.1.02.14	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu	78,50%	22.285.183.838	
1.1.1.02.14.0001	Pengadaan Sarana Kesehatan Dasar (DAK Bidang Kesehatan)	Kantor Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana Kesehatan Dasar yang diadakan	1 jenis	949.999.000	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.14.0002	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan	Seluruh Layanan Kesehatan Milik Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah sistem informasi manajemen kesehatan yang dikembangkan	1 aplikasi	1.037.255.378	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.14.0003	Penunjang Operasional Pelayanan Kesehatan	Seluruh Wilayah Kerja Puskesmas Kota Surabaya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang Terpenuhi Penunjang Operasionalnya	63 Lembaga	20.297.929.460	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.15	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Mohamad Soewandhie		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohammad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit	90,00%	184.148.430.646	
1.1.1.02.15.0001	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokteran	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Jumlah jenis alat kesehatan/kedokteran yang diadakan dan dipelihara	3 jenis	181.027.374.442	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
1.1.1.02.15.0002	Pengadaan Sarana Kesehatan yang bersumber dari DAK Kesehatan	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Jumlah jenis alat kesehatan yang bersumber dari DAK Kesehatan yang diadakan	1 jenis	3.121.056.204	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
1.1.1.02.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit RSUD Bhakti Dharma Husada		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai standar tipe rumah sakit	90,00%	14.053.095.816	
1.1.1.02.16.0001	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokteran	rsud bhakti dharma husada	Jumlah jenis pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan/Kedokteran	3 jenis	9.127.412.553	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.1.1.02.16.0002	Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	RSUD BDH	Jumlah jenis Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	1 jenis	4.925.683.263	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.1.1.02.17	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		Persentase puskesmas yang terakreditasi	85,71%	89.879.196.772	
1.1.1.02.17.0001	Akreditasi Puskesmas (DAK)	40 Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan akreditasi	13 lembaga	1.011.128.500	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.17.0002	Pelayanan Kesehatan Primer	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan	Jumlah lembaga yang melaksanakan pelayanan kesehatan primer	64 lembaga	86.301.693.984	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.17.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sarana Kesehatan Rujukan	Rumah Sakit, Klinik Utama di Kota Surabaya	Jumlah Sarana Kesehatan yang Dibina dan Diawasi	134 lembaga	452.678.633	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.17.0004	Penanggulangan Kejadian Darurat dan Pasca Kejadian Darurat	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Jumlah lokasi kejadian kegawatdaruratan yang dilayani	900 lokasi	1.221.383.976	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.17.0005	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus dan Tradisional	Rumah ABK dan Puskesmas dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah lembaga yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan khusus dan tradisional	64 lembaga	892.311.679	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.18	Program Sumber Daya Kesehatan		Persentase puskesmas dengan alat kesehatan sesuai standard	70,00%	34.575.989.571	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin	88,00%		
1.1.1.02.18.0001	Analisa Pengembangan Sarana Kesehatan	Kantor Dinas Kesehatan	Jumlah dokumen analisa pengembangan sarana dan prasarana kesehatan	5 dokumen	276.198.678	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.18.0002	Pembinaan dan pengembangan SDM Kesehatan	Kantor Dinas Kesehatan dan Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Jumlah Kegiatan pembinaan dan pengembangan SDM di bidang kesehatan	27 kali	3.767.147.206	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.18.0003	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan	Kantor Dinas Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan Yang Diadakan	50 Jenis	22.852.857.048	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.18.0004	Penyediaan Alat Kesehatan Pengendalian Penyakit (DAK)	Kantor Dinas Kesehatan	Jumlah alat kesehatan pengendalian penyakit yang diadakan	9 item	5.521.226.000	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.18.0005	Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Kantor Dinas Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan Yang Diadakan	3 Jenis	2.158.560.639	Dinas Kesehatan
1.1.1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				1.151.039.264.989	
1.1.1.03.01	Program Pelayanan Rekomendasi Teknis Infrastruktur		Persentase rekomendasi teknis yang dikeluarkan dibanding permohonan rekomendasi teknis yang memenuhi syarat	100,00%	1.354.740.836	
1.1.1.03.01.0001	Fasilitasi dan Rekomendasi Teknis Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perkotaan	Kota Surabaya	Jumlah rekomendasi teknis pendukung penunjang infrastruktur	180 rekomendasi	1.354.740.836	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.02	Program Penataan Ruang		Indeks Pelayanan Tata Ruang	94,00%	18.162.326.872	
1.1.1.03.02.0001	Pemanfaatan Rencana Ruang Kota	Kota Surabaya	Jumlah dokumen pemanfaatan rencana ruang kota	2 dokumen	3.301.348.271	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.02.0002	Pendataan dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang serta Infrastruktur Kota	Kota Surabaya	Jumlah pemanfaatan ruang dan infrastruktur kota yang didata dan dipetakan	12250 Persil	11.021.745.588	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.02.0003	Pendukung perencanaan tata ruang wilayah kota	Kota Surabaya	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang wilayah kota yang dibuat	3 dokumen	2.754.892.155	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.02.0004	Penyusunan Dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman	Kota Surabaya	Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman yang disusun	9 Dokumen	1.084.340.858	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.03	Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan		Persentase jalan yang mendapatkan perbaikan	12,90%	345.080.328.538	
			Persentase jaringan jalan yang terbangun	0,59%		
			Persentase penyediaan prasarana pejalan kaki	28,64%		
1.1.1.03.03.0001	Fasilitasi Penunjang Penyediaan Jaringan Air Bersih/Air Minum	di wilayah Kota Surabaya	Jumlah dokumen fasilitasi penunjang penyediaan jaringan air bersih/air minum	2 dokumen	412.231.500	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.03.0002	Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut	Dinas PU Bina Marga dan Pematusan	Jumlah peralatan dan alat angkut yang dioperasikan dan dipelihara selama 12 bulan sebanyak	200 unit	16.243.180.053	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.03.0003	Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK)	Jalan Arteri Primer, Arteri Sekunder dan Kolektor Sekunder di Kota Surabaya	Jumlah lokasi Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK)	3 lokasi	10.023.010.894	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.1.03.03.0004	Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	Jalan Arteri Primer, Arteri Sekunder dan Kolektor Sekunder di Kota Surabaya	Jumlah lokasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya yang dibangun	21 lokasi	224.955.020.588	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.03.0005	Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya (Tahun Jamak/Multiyears 2019-2020)	Jalan Arteri Primer, Arteri Sekunder dan Kolektor Sekunder di Kota Surabaya	Jumlah lokasi Jembatan yang dibangun	1 lokasi	45.000.000.007	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.03.0006	Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	Jalan Arteri Primer, Arteri Sekunder, Kolektor Primer dan Kolektor Sekunder di Kota Surabaya	Jumlah lokasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya yang dipelihara/direhabilitasi	1222 lokasi	48.446.885.496	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.04	Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU Hemat Energi		Persentase titik pemasangan PJU hemat energi	83,39%	266.489.508.726	
1.1.1.03.04.0001	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Wilayah Kota Surabaya	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	4600 titik	116.601.167.556	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.1.03.04.0002	Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum	Wilayah Kota Surabaya	Jumlah rekening listrik PJU yang dibayarkan	6674 rekening	130.724.114.561	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.1.03.04.0003	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Wilayah Kota Surabaya	Jumlah titik PJU yang dipelihara	73680 titik	19.164.226.609	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.1.03.05	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota		Lama genangan	30 menit	471.923.555.122	
			Luas genangan	600 Ha		
			Tinggi genangan	14 cm		
1.1.1.03.05.0001	Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan	Rumah pompa yang menyebar di Saluran primer dan sekunder di Kota Surabaya	Jumlah unit pompa yang dipelihara selama 12 bulan sebanyak	56 unit	31.469.080.354	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.05.0002	Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan	Saluran primer, sekunder dan tersier di Kota Surabaya	Jumlah Lokasi Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan	21 lokasi	189.479.565.046	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.05.0003	Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears 2019-2020)	Saluran Banyu Urip diversi Gunungsari	Jumlah Lokasi Prasarana Pematusan beserta sarana kelengkapannya yang dibangun dan disediakan	2 lokasi	84.391.879.399	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.05.0004	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Saluran primer, sekunder dan tersier di Kota Surabaya	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	1025 lokasi	166.583.030.323	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.06	Program Pengendalian Bidang Bangunan		Persentase jumlah bangunan yang ber IMB	58,81%	3.709.826.461	
			Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB	100,00%		
1.1.1.03.06.0001	Pendataan Penyelenggaraan Bangunan	Kota Surabaya	Jumlah pendataan penyelenggaraan bangunan	6517 data	1.261.482.467	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.06.0002	Pengawasan Bangunan	Kota Surabaya	Jumlah lokasi pengawasan bangunan yang dilaksanakan	240 lokasi	1.981.036.599	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.06.0003	Penyusunan Dokumen Penataan Bangunan	Kota Surabaya	jumlah dokumen penataan bangunan yang disusun	4 dokumen	467.307.395	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.07	Program Perancangan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan		Persentase dokumen perancangan dan pengawasan jalan dan jembatan yang tepat waktu	100,00%	18.971.557.683	
1.1.1.03.07.0001	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	Jalan Arteri Primer, Arteri Sekunder dan Kolektor Sekunder di Kota Surabaya	jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Jalan dan Jembatan	12 dokumen	10.208.155.627	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.1.03.07.0002	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan (Tahun Jamak/Multiyears 2019 - 2020)	Jalan Arteri Primer, Arteri Sekunder dan Kolektor Sekunder di Kota Surabaya	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jembatan yang disusun	1 dokumen	2.080.000.001	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.07.0003	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan	Kantor Dinas PU Bina Marga dan Pematusan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan yang disusun	35 dokumen	6.683.402.055	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.08	Program Perancangan dan Pengawasan Pematusan		Persentase dokumen perancangan dan pengawasan pematusan yang tepat waktu	100,00%	23.746.092.874	
1.1.1.03.08.0001	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Sarana Prasarana Pematusan	Saluran primer, sekunder dan tersier di Kota Surabaya	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong	20 dokumen	10.919.968.062	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.08.0002	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears 2019-2020)	Saluran Banyu Urip diversi Gunungsari	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong	2 dokumen	5.218.655.996	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.08.0003	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pematusan Kota	Kantor Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pematusan Kota yang disusun	50 dokumen	7.607.468.816	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.09	Program Sinkronisasi Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas		Persentase rekomendasi utilitas yang dikeluarkan dibanding permohonan utilitas yang memenuhi syarat	100,00%	1.601.327.877	
1.1.1.03.09.0001	Fasilitasi Perijinan Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas	Menyebar di 31 Kecamatan Wilayah Kota Surabaya	Jumlah ijin Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas yang diterbitkan	10 izin	1.601.327.877	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.04	Perumahan dan Kawasan Permukiman				359.811.224.402	
1.1.1.04.01	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Bangunan		Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup bangunan	70,00%	4.933.578.328	
1.1.1.04.01.0001	Pelayanan Perijinan Bidang Tata Bangunan	Kota Surabaya	Jumlah berkas Perijinan Bidang Tata Bangunan yang diproses	6517 berkas	4.612.968.433	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.04.01.0002	Pelayanan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Kota Surabaya	jumlah berkas permohonan SLF yang diproses	50 berkas	320.609.895	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.04.02	Program Pelayanan Perizinan Konstruksi		Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup konstruksi	90,00%	389.751.366	
1.1.1.04.02.0001	Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUK)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Jumlah ijin usaha jasa konstruksi yang diterbitkan	700 berkas	389.751.366	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.04.03	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung		Persentase gedung pemerintahan dan pelayanan publik yang berfungsi baik	90,59%	138.357.686.104	
1.1.1.04.03.0001	Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah (Tahun Jamak / Multiyears)	Gedung Pemerintah milik Pemerintah Kota Surabaya yang memerlukan rehab serta pembangunan baru	Jumlah gedung pemerintah dan pemerintah daerah (tahun jamak/multiyears) yang dibangun/direhab	1 bangunan	56.098.888.307	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.1.04.03.0002	Pembangunan / Rehabilitasi dan Pengawasan Prasarana Bangunan Pemerintah Daerah	Bangunan Kantor Pemerintahan serta Pelayanan Publik yang merupakan aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah Bangunan Pemerintah Daerah yang prasarananya dibangun/direhabilitasi	17 Bangunan	48.809.428.154	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.04.03.0003	Pemeliharaan Fasilitas Gedung Pemerintah Daerah	Gedung Pemerintah yang perlu dilakukan pemeliharaan	Jumlah Gedung Pemerintah yang dipelihara	300 bangunan	30.332.858.222	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.04.03.0004	Penyusunan Dokumen Perencanaan Prasarana Bangunan Pemerintah Daerah	Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Prasarana Bangunan Pemerintah Daerah	20 Dokumen	3.116.511.421	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.04.04	Program Pengelolaan Rusunawa		Tingkat kesesuaian penghuni rusunawa	100,00%	29.798.733.038	
1.1.1.04.04.0001	Pemanfaatan dan Pengawasan Rumah dan Rumah Bertingkat	Rumah Ber-SIP dan Rumah Aset Pemerintah Kota Surabaya yang telah memiliki Izin Pemakaian Rumah serta pengawasan dan pemanfaatan rumah susun	Jumlah persil rumah ber-SIP dan rumah sewa aset Pemerintah Kota Surabaya yang dikelola	3981 lokasi	18.084.615.427	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.1.04.04.0002	Pengelolaan Rumah Susun	Rusunawa Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah blok rumah susun sederhana yang dikelola	105 blok	11.714.117.611	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.1.04.05	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman		Persentase pembangunan/rehabilitasi jalan lingkungan dan kelengkapannya	67,65%	186.331.475.566	
			Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	47,00%		
1.1.1.04.05.0001	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Kota Surabaya	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	131 lokasi	55.604.765.112	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.04.05.0002	Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)	Kota Surabaya	Jumlah Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi) yang dibangun	2 Bangunan	1.499.943.676	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.04.05.0003	Pembangunan / Rehabilitasi Rumah	Kota Surabaya	Jumlah rumah yang dibangun	7 bangunan	92.428.702.276	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.04.05.0004	Pemeliharaan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kota Surabaya	Jumlah Lokasi Infrastruktur dan Rumah yang di Rehabilitasi	200 Lokasi	23.170.415.792	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.04.05.0005	Penyusunan Dokumen Perencanaan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kota Surabaya	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	173 dokumen	11.163.841.821	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.04.05.0006	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan / Rehabilitasi Rumah	Kota Surabaya	Jumlah dokumen Perencanaan Penyediaan Perumahan yang disusun	16 dokumen	2.463.806.889	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				156.436.671.688	
1.1.1.05.01	Program Kesatuan Bangsa		Persentase organisasi masyarakat dan partai politik yang mendukung pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	70,00%	1.948.675.735	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.1.05.01.0001	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Kota Surabaya	Jumlah peserta komunikasi, informasi dan edukasi peningkatan wawasan kebangsaan	750 orang	700.819.580	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.01.0002	Pengawasan dan pengendalian di bidang fasilitasi sosial politik	Kota Surabaya	Jumlah lembaga yang mendapatkan pemberdayaan	31 lembaga	365.692.632	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.01.0003	Peningkatan toleransi dan kehidupan beragama	Kota Surabaya	Jumlah kegiatan peningkatan toleransi dan kehidupan beragama	30 kali	882.163.523	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.02	Program Penanganan Strategis Gangguan Ketenteraman Umum		Persentase gangguan ketenteraman umum yang ditangani	100,00%	3.569.450.560	
1.1.1.05.02.0001	Kerjasama pengendalian keamanan kota	Kota Surabaya	Jumlah kegiatan kerjasama pengendalian keamanan kota	194 kali	2.830.378.780	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.02.0002	Kewaspadaan Nasional Dalam Kegiatan Pemantauan, Pengendalian dan Ketenteraman Kota	Kota Surabaya	Jumlah kegiatan pemantauan dan pengendalian ketenteraman kota	54 kali	739.071.780	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.03	Program Penanggulangan Bencana Alam		Persentase penanggulangan kejadian bencana alam ≤ 24 jam	100,00%	4.989.276.798	
1.1.1.05.03.0001	Pengadaan Sarana Penanggulangan Bencana	Kantor BPB Linmas	Jumlah jenis sarana penanggulangan bencana yang diadakan	8 jenis	514.690.181	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.03.0002	Pengembangan Manajemen Tanggap Bencana	Kantor Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat, Gedung pertemuan lainnya	Jumlah Kegiatan Pengembangan Manajemen Penanggulangan Bencana Daerah	2 Kegiatan	2.985.094.936	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Pokok Korban Bencana	31 Kecamatan	Terpenuhinya Kebutuhan Pokok Korban Bencana	100%	1.489.491.681	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.04	Program Penanggulangan Bencana Kebakaran		Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per 1 Juta Penduduk Surabaya	53,00	42.016.866.961	
			Persentase waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	98,00%		
1.1.1.05.04.0001	Operasional Pemadaman Kebakaran	Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya dan Rayon I s/d V	Jumlah pelaksana operasional pemadaman kebakaran yang dipenuhi kebutuhannya	832 orang	38.532.418.946	Dinas Pemadam Kebakaran
1.1.1.05.04.0002	Pengendalian Bahaya Kebakaran	Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan simulasi yang dilaksanakan	62 kali	725.065.059	Dinas Pemadam Kebakaran
1.1.1.05.04.0003	Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Peran Serta Masyarakat	Gedung Diklat / Instansi, Sentra Wisata Kuliner dan Pasar	Jumlah kegiatan peningkatan kompetensi aparatur dan peran serta masyarakat	60 kali	2.759.382.956	Dinas Pemadam Kebakaran
1.1.1.05.05	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Alam		Persentase kelurahan tangguh bencana	79,87%	2.400.189.841	
1.1.1.05.05.0001	Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana	Gedung Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah peserta Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana	1650 orang	1.684.422.297	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.05.0002	Peningkatan Kapabilitas Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Gedung Pertemuan milik Pemerintah Kota Surabaya dan Kelurahan di Kota Surabaya	Jumlah peserta peningkatan kapabilitas kesiapsiagaan menghadapi bencana	500 orang	715.767.544	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.06	Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Ekonomi		Persentase pelanggaran Perda terkait reklame yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100,00%	1.753.605.106	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.1.05.06.0001	Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Ekonomi	31 Kecamatan Kota Surabaya	Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Ekonomi	480 kali	1.753.605.106	Satuan Polisi Pamong Praja
1.1.1.05.07	Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Sarana Prasarana Wilayah		Persentase pelanggaran Perda terkait IMB, kebersihan, parkir umum, Perda lainnya yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100,00%	1.571.826.627	
1.1.1.05.07.0001	Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Sarana Prasarana Wilayah	31 Kecamatan Kota Surabaya	Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Sarana Prasarana Wilayah	192 Kali	854.366.387	Satuan Polisi Pamong Praja
1.1.1.05.07.0002	Penindakan Hasil Evaluasi Pelanggaran Perda	Gedung Instansi Pemerintah dan 31 Kecamatan Kota Surabaya	Jumlah penindakan pelanggaran Perda	84 Kali	717.460.240	Satuan Polisi Pamong Praja
1.1.1.05.08	Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Sosial		Persentase pelanggaran Perda bidang terkait PKL, PSK, anjal dan gepeng, dan RHU yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100,00%	35.359.611.850	
1.1.1.05.08.0001	Pelaksanaan pengawasan hasil operasi penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	31 Kecamatan Kota Surabaya	Jumlah pelaksanaan pengawasan hasil operasi penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1368 kali	30.824.526.468	Satuan Polisi Pamong Praja
1.1.1.05.08.0002	Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Sosial	31 Kecamatan Kota Surabaya	Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Sosial	1368 Kali	4.535.085.382	Satuan Polisi Pamong Praja
1.1.1.05.09	Program Pengembangan Kapasitas Aparatur Polisi Pamong Praja		Persentase aparat yang ditingkatkan kapasitasnya sesuai tugas dan fungsi	100,00%	1.418.395.997	
1.1.1.05.09.0001	Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan bagi anggota Satpol PP	Taman Surya dan fasilitas olahraga di wilayah Kota Surabaya	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pelatihan bagi anggota Satpol PP	96 kali	516.383.711	Satuan Polisi Pamong Praja
1.1.1.05.09.0002	Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa	Taman Surya dan fasilitas olahraga di wilayah Kota Surabaya	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa	228 Kali	902.012.286	Satuan Polisi Pamong Praja
1.1.1.05.10	Program Pengembangan Kapasitas Petugas Perlindungan Masyarakat		Persentase petugas perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya sesuai tugas dan fungsi	76,85%	39.985.342.401	
1.1.1.05.10.0001	Pelatihan kader perlindungan masyarakat	Tempat pelatihan militer	Jumlah peserta pelatihan kader perlindungan masyarakat	100 orang	360.558.054	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.10.0002	Pembinaan Potensi Masyarakat	Balai Kota Surabaya, Taman Makam Pahlawan	Jumlah kegiatan pembinaan potensi masyarakat	81 kali	1.132.963.514	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.10.0003	Pengendalian Perlindungan Masyarakat	Kantor Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat serta seluruh wilayah Kota Surabaya	Jumlah orang yang mendukung pengendalian keamanan, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat	737 orang	38.491.820.833	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.11	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Kebakaran		Persentase sarana dan prasarana pemadam kebakaran dalam kondisi baik	80,00%	21.423.429.812	
1.1.1.05.11.0001	Pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran	Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya dan Rayon I s/d. Rayon V	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran yang terpelihara	210 unit	5.489.210.206	Dinas Pemadam Kebakaran

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.1.05.11.0002	Pemeriksaan Tingkat Resiko Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan	Bangunan gedung di Kota Surabaya	Jumlah bangunan gedung dan lingkungan yang dilaksanakan pemeriksaan	264 bangunan	7.201.900.186	Dinas Pemadam Kebakaran
1.1.1.05.11.0003	Perencanaan dan Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran	Kantor Dinas Kebakaran Kota Surabaya dan Rayon I s/d . Rayon V	Jumlah unit sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran yang diadakan/dibangun	764 unit	8.732.319.420	Dinas Pemadam Kebakaran
1.1.1.06	Sosial				240.117.159.321	
1.1.1.06.01	Program Bantuan Masyarakat Berpenghasilan Rendah		Persentase bantuan pangan non tunai dan program keluarga harapan yang tersalurkan	100,00%	5.244.491.370	
			Persentase sasaran penerima layanan pemakaman dan ambulance gratis dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	50,00%		
1.1.1.06.01.0001	Fasilitasi Pemakaman	31 Kecamatan	Jumlah Orang Yang Mendapat Fasilitasi Pemakaman	960 Orang	966.248.121	Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0002	Koordinasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan	31 Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan Yang Dilaksanakan	24 Kali	1.182.644.322	Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0003	Penyelenggaraan Layanan Ambulance Gratis	31 Kecamatan	Jumlah Kegiatan Layanan Ambulance Gratis Yang Diselenggarakan	4416 Kali	3.095.598.927	Dinas Sosial
1.1.1.06.02	Program Partisipasi Keagamaan		Persentase lembaga/organisasi/kelompok keagamaan yang berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan	100,00%	14.906.715.658	
1.1.1.06.02.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan kegiatan keagamaan	Gedung milik Pemerintah Kota, Gedung Tempat Ibadah, dan 31 Kecamatan	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan	102 kali	14.906.715.658	Dinas Sosial
1.1.1.06.03	Program Partisipasi Kepahlawanan		Persentase lembaga/organisasi/kelompok keahlawanan yang berpartisipasi dalam kegiatan keahlawanan	100,00%	8.216.182.805	
1.1.1.06.03.0001	Fasilitasi kegiatan organisasi sosial keahlawanan	31 kecamatan	Jumlah fasilitasi kegiatan organisasi sosial keahlawanan	62 kali	6.392.263.014	Dinas Sosial
1.1.1.06.03.0002	Pemeliharaan TMP dan MPN	TMP Kusuma Bangsa, TMP Ngagel, TMP 10 Nopember, MPN WR. Soepratman, MPN Dr. Soetomo, MPN Bung Tomo, MPN KH. Mas Mansyur	Jumlah TMP dan MPN yang dipelihara	7 lokasi	1.823.919.791	Dinas Sosial
1.1.1.06.04	Program Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi Sosial		Persentase pemulihan PMKS	30,00%	193.243.741.596	
			Persentase sasaran penerima intervensi sosial dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	100,00%		
1.1.1.06.04.0001	Pembinaan dan Pemulangan PMKS	Kantor Dinas Sosial, UPTD Dinas Sosial dan Luar Kota Surabaya	Jumlah PMKS yang Mendapat Pelayanan	1420 orang	2.733.825.773	Dinas Sosial
1.1.1.06.04.0002	Pemenuhan kebutuhan dasar permakanan bagi anak	31 Kecamatan	Jumlah anak yang mendapat bantuan permakanan	5750 orang	27.831.301.448	Dinas Sosial
1.1.1.06.04.0003	Pemenuhan kebutuhan dasar permakanan bagi lanjut usia	31 Kecamatan	Jumlah lanjut usia yang mendapat bantuan permakanan	20000 orang	84.096.602.213	Dinas Sosial
1.1.1.06.04.0004	Pemenuhan kebutuhan dasar permakanan bagi penyandang disabilitas dan penyakit tertentu	31 Kecamatan	Jumlah penyandang disabilitas dan penyakit tertentu yang mendapat bantuan permakanan	9414 orang	45.059.910.128	Dinas Sosial
1.1.1.06.04.0005	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Babat Jerawat	Kantor UPTD Babat Jerawat Jalan Raya Babat Jerawat Nomor 139 Surabaya	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Babat Jerawat	95 orang	1.574.655.560	Dinas Sosial

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.1.06.04.0006	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Griya Werdha	Kantor UPTD Griya Werdha Jalan Jambangan Baru Tol Nomor 15 A Surabaya	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Griya Werdha	150 orang	6.371.405.182	Dinas Sosial
1.1.1.06.04.0007	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri	Kantor UPTD Kampung Anak Negeri Jalan Wonorejo Timur Nomor 130 Surabaya	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri	45 orang	2.496.955.983	Dinas Sosial
1.1.1.06.04.0008	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih	Kantor UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih Jalan Keputih tegal No.32 Surabaya	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih	1100 orang	19.635.906.380	Dinas Sosial
1.1.1.06.04.0009	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Pondok Sosial Kalijudan	Kantor UPTD Pondok Sosial Kalijudan Jalan Villa Kalijudan Indah 15 Kavling 2-4 Surabaya	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Pondok Sosial Kalijudan	85 orang	2.758.348.532	Dinas Sosial
1.1.1.06.04.0010	Peningkatan peran serta lanjut usia	Kota Surabaya	Jumlah kegiatan peningkatan peran serta lanjut usia	34 kali	684.830.397	Dinas Sosial
1.1.1.06.05	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	40,00%	983.201.794	
1.1.1.06.05.0001	Pemberian bahan pokok kepada panti sosial	Kota Surabaya	Jumlah panti sosial yang mendapat bantuan	17 lembaga	248.763.602	Dinas Sosial
1.1.1.06.05.0002	Pembinaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Kantor Dinas Sosial dan Gedung milik Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah PSKS yang dibina dan diberdayakan	4664 orang	734.438.192	Dinas Sosial
1.1.1.06.06	Program Pengendalian Layanan Sosial		Persentase data kesejahteraan sosial yang termanfaatkan	100,00%	3.676.379.094	
1.1.1.06.06.0001	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Masalah Sosial	31 kecamatan	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi	1 kali	638.620.528	Dinas Sosial
1.1.1.06.06.0002	Pemutakhiran data PMKS dan PSKS	31 Kecamatan	Jumlah lokasi pemutakhiran data PMKS dan PSKS	154 Kelurahan	3.037.758.566	Dinas Sosial
1.1.1.06.07	Program Rehabilitasi Rumah Tapak Tidak Layak Huni		Persentase rumah tapak tidak layak huni yang diperbaiki	85,00%	13.846.447.004	
1.1.1.06.07.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	31 Kecamatan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	319 Unit	13.846.447.004	Dinas Sosial
1.1.2	Non Pelayanan Dasar				1.721.810.550.713	
1.1.2.01	Tenaga Kerja				18.151.232.974	
1.1.2.01.01	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Ketenagakerjaan		Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup ketenagakerjaan	78,00%	153.320.010	
1.1.2.01.01.0001	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ketenagakerjaan	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Jumlah berkas perizinan dan non perizinan ketenagakerjaan yang diproses	1000 berkas	153.320.010	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.02	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja		Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama	7,77%	2.936.137.636	
1.1.2.01.02.0001	Bimtek Harmonisasi Hubungan Industrial	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Jumlah peserta bimtek harmonisasi hubungan industrial	300 orang	911.099.644	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	110 Kasus	544.518.494	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.02.0003	Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Jumlah perusahaan yang mendapat pembinaan syarat kerja	300 lembaga	425.581.099	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.02.0004	Penyusunan Dokumen Perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Surabaya	Pasar Sopenyono, Pasar Balongsari, Pasar Wonokromo dan Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Jumlah dokumen perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Surabaya yang disusun	1 dokumen	1.054.938.399	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.03	Program Peningkatan Kesempatan Kerja		Persentase pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat diinformasikan	5,00%	3.147.164.184	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.2.01.03.0001	Bimtek bagi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja yang mengikuti bimtek	60 lembaga	159.554.270	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.03.0002	Bimtek Bagi Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Jumlah perusahaan pengguna tenaga kerja asing yang mengikuti bimtek	120 lembaga	123.580.740	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.03.0003	Bimtek Pengembangan Softskill Kerja bagi Pencari Kerja	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Jumlah pencari kerja yang mengikuti bimtek pengembangan softskill kerja	1050 orang	313.189.780	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.03.0004	Bimtek Persiapan Usaha Mandiri Pra Purna Kerja	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Jumlah masyarakat pra purna kerja yang mengikuti bimtek persiapan usaha	100 orang	153.012.550	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.03.0005	Fasilitasi Pendampingan Pemilihan Bidang Kerja	Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Surabaya	Jumlah siswa SMK yang mendapatkan pendampingan pemilihan bidang kerja	1000 orang	159.996.350	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.03.0006	Fasilitasi Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pelaku Usaha	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi perluasan kesempatan kerja	150 orang	633.746.459	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.03.0007	Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dan Gedung yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah even job fair yang diselenggarakan	7 kali	1.445.283.135	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.03.0008	Sosialisasi Bidang dan Standar Kerja di Luar Negeri	Kecamatan	Jumlah peserta sosialisasi bidang dan standar kerja di luar negeri	250 orang	158.800.900	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.04	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja		Persentase angkatan kerja yang lulus sertifikasi	68,00%	11.914.611.144	
			Persentase peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan	83,00%		
1.1.2.01.04.0001	Bimtek bagi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta mengikuti bimtek	40 lembaga	196.438.914	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.04.0002	Fasilitasi Magang bagi Pencari Kerja	Perusahaan di wilayah Kota Surabaya	Jumlah pencari kerja yang difasilitasi magang	120 orang	438.689.548	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.04.0003	Fasilitasi Sertifikasi Profesi bagi Angkatan Kerja	Tempat Uji Kompetensi yang ditunjuk oleh Lembaga Sertifikasi Profesi	Jumlah angkatan kerja yang mengikuti sertifikasi profesi	526 orang	3.217.937.725	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.04.0004	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pembinaan, pelatihan, dan sertifikasi keterampilan kerja	902 orang	7.810.140.770	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.04.0005	Penyusunan Dokumen Pengukuran Tingkat Produktivitas Skala Kota	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Jumlah dokumen pengukuran tingkat produktivitas skala kota yang disusun	1 dokumen	251.404.187	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.10	Penanaman Modal				8.717.440.549	
1.1.2.10.01	Program Pengolahan Data dan Pengendalian Penanaman Modal		Persentase perusahaan penanaman modal yang menyusun dan membuat LKPM	40,00%	1.592.322.638	
1.1.2.10.01.0001	Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal	Tempat usaha penanam modal	Jumlah perusahaan penanam modal yang dimonitor dan dievaluasi	3000 perusahaan	648.025.599	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.10.01.0002	Pendampingan PMA dan PMDN	Kota Surabaya	Jumlah PMA dan PMDN yang didampingi	400 perusahaan	533.092.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.10.01.0003	Pengelolaan Data Investasi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya	Jumlah data investasi yang dikelola	45151 data	411.205.039	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.10.02	Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi		Tingkat pertumbuhan izin realisasi investasi	20,00%	1.321.925.391	
1.1.2.10.02.0001	Pengembangan Potensi Penanaman Modal	Kota Surabaya	Jumlah kegiatan pengembangan potensi penanaman modal yang dilaksanakan	2 kali	288.067.684	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.2.10.02.0002	Penyelenggaraan Promosi Investasi	Wilayah Jawa serta luar Jawa	Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan	3 kali	601.551.855	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.10.02.0003	Penyusunan Dokumen Analisa Pengembangan Potensi Penanaman Modal	Surabaya	Jumlah dokumen Analisa Pengembangan Potensi Penanaman Modal yang disusun	4 dokumen	432.305.852	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.10.03	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Penanaman Modal		Persentase industri/perusahaan yang dibina dan diawasi perizinan dan pelaporannya	72,00%	5.803.192.520	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	78,00%		
1.1.2.10.03.0001	Koordinasi Teknis Pelayanan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah koordinasi teknis pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan terpadu yang dilaksanakan	24 kali	769.312.556	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.10.03.0002	Pembinaan Petugas Layanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu	Gedung milik Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah petugas layanan perizinan dan non perizinan terpadu yang dibina	100 orang	323.426.417	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.10.03.0003	Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan	Gedung milik Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh pembinaan tanda daftar perusahaan	750 orang	468.666.919	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.10.03.0004	Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan atau Penggunaan Mesin Pelinting Rokok dan Pemberian Sertifikat / Kode Registrasi Mesin Pelinting Rokok (DBHCHT)	Kota Surabaya	Jumlah pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat / kode registrasi mesin pelinting rokok yang dilaksanakan	2 kali	16.385.765	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.10.03.0005	Pengawasan Perijinan Industri dan SIUP	Kota Surabaya	Jumlah pelaku usaha yang memiliki ijin industri dan SIUP yang diawasi	10300 orang	385.169.055	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.10.03.0006	Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu	Kantor pelayanan perizinan terpadu	Jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu yang dihasilkan	60000 berkas	3.805.231.044	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.10.03.0007	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau (DBHCHT)	Kota Surabaya	Jumlah pelaksanaan pengumpulan informasi hasil tembakau	2 kali	11.704.145	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.10.03.0008	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan atau Pemangku Kepentingan (DBHCHT)	Kota Surabaya	Jumlah penyampaian informasi ketentuan peraturan cukai yang dilakukan	4 kali	23.296.619	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.11	Kepemudaan dan Olahraga				101.273.073.533	
1.1.2.11.01	Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga		Cakupan/sebaran fasilitas olahraga	142 kelurahan	80.090.291.768	
1.1.2.11.01.0001	Operasional Sarana dan Prasarana Olahraga	Kota Surabaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang difasilitasi	9 unit	8.895.349.779	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.11.01.0002	Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Olahraga	Kota Surabaya	Jumlah Prasarana Olahraga yang dibangun dan ditingkatkan	90 unit	50.560.333.418	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.11.01.0003	Penyediaan Sarana Olahraga	Kota Surabaya	Jumlah Sarana Olahraga yang Disediakan	1889 unit	10.346.320.760	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.2.11.01.0004	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Kota Surabaya	Jumlah dokumen perencanaan prasarana olahraga yang disusun	57 dokumen	2.806.410.400	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.11.01.0005	Perbaikan Prasarana Olahraga	Kota Surabaya	Jumlah Prasarana Olahraga yang Diperbaiki	133 unit	7.481.877.411	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.11.02	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga		Akumulasi prestasi atlet di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	1.660 medali	15.189.743.580	
1.1.2.11.02.0001	Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi	Kota Surabaya	Jumlah Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi yang difasilitasi	41 kali	8.971.252.100	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.11.02.0002	Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Olahraga Rekreasi	Kota Surabaya	Jumlah kegiatan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM olahraga rekreasi dan tradisional	25 kali	1.436.195.510	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.11.02.0003	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Anak	Kota Surabaya	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Anak	26 kali	1.306.370.160	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.11.02.0004	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Prestasi	Kota Surabaya	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Prestasi yang diselenggarakan	10 kali	2.224.332.210	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.11.02.0005	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Rekreasi	Kota Surabaya	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Rekreasi yang diselenggarakan	29 kali	1.251.593.600	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.11.03	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan		Persentase pemuda yang aktif memberikan penyuluhan sebagai kader anti kenakalan remaja	15,00%	3.593.671.623	
1.1.2.11.03.0001	Pembentukan Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja	Gedung Fasilitas Umum / Publik dan Gedung Milik Pemerintah	Jumlah Peserta Pemuda yang mendapatkan pembinaan untuk menjadi Kader Anti Kenakalan Remaja	3600 peserta	1.400.110.610	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.11.03.0002	Peningkatan Jiwa Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Gedung Instansi Pemerintah dan Gedung Fasilitas Umum / Publik	Jumlah Kegiatan Peningkatan Jiwa Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda yang diselenggarakan	22 kali	2.193.561.013	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.11.04	Program Peningkatan Prestasi Pemuda		Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran seni kreatif	10,00%	2.399.366.562	
			Persentase pemuda yang membuka wirausaha mandiri	15,00%		
1.1.2.11.04.0001	Pelatihan Seni Musik Modern di Rumah Kreatif	Rumah Kreatif Studio Musik Gelanggang Remaja	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan seni musik modern di rumah kreatif	100 orang	1.071.141.132	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.11.04.0002	Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan Pemuda	Gedung Fasilitas Umum/Publik	Jumlah Pemuda yang mendapatkan Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan	400 Orang	1.328.225.430	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.12	Kebudayaan				8.002.898.166	
1.1.2.12.01	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal		Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal pada 20 lokasi	95,00%	5.882.157.430	
			Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	58,00%		
1.1.2.12.01.0001	Fasilitasi penyelenggaraan even budaya daerah	Balai Budaya Surabaya, Balai Pemuda Surabaya, Ruang publik (taman, Jalan Tunjungan, dan Balai Pemuda)	Jumlah penyelenggaraan event budaya daerah	440 kali	5.180.077.072	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.1.2.12.01.0002	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Lokal	Kota Surabaya	Jumlah pelaksanaan festival budaya lokal	3 kali	423.562.062	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.2.12.01.0003	Monitoring penyelenggaraan seni budaya lokal pada ruang publik dan usaha pariwisata	Taman - taman milik Pemerintah Kota Surabaya dan tempat - tempat usaha pariwisata	Jumlah ruang publik dan usaha pariwisata yang dimonitoring	14 lokasi	278.518.296	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.1.2.12.02	Program Perlindungan Budaya Lokal		Persentase cagar budaya yang terpelihara	91,69%	2.120.740.736	
1.1.2.12.02.0001	Monitoring dan evaluasi cagar budaya	Kota Surabaya	Jumlah cagar budaya yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan kaidah pelestarian	250 lokasi	1.475.406.305	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.1.2.12.02.0002	Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah	Jl. Tunjungan, Tempat Tempat Yang Berhubungan dengan Histori Kepahlawanan Arek Arek Surabaya, Obyek Obyek Bersejarah di Kota Surabaya	Jumlah pelaksanaan event peningkatan nilai-nilai sejarah	9 kali	645.334.431	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.1.2.13	Perpustakaan				27.495.972.624	
1.1.2.13.01	Program Pembinaan Layanan Baca		Persentase perpustakaan yang berhasil dibina	46,60%	900.111.258	
1.1.2.13.01.0001	Pembinaan Pengelolaan Layanan Baca	Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Gedung di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, Perpustakaan Binaan, Yayasan, Perpustakaan Non Pemerintah dan Balai Pemuda	Jumlah layanan baca yang dilakukan pembinaan	500 lembaga	900.111.258	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.1.2.13.02	Program Peningkatan Informasi dan Layanan Perpustakaan		Persentase peningkatan jumlah kegiatan petugas pengelola layanan baca	8,00%	22.940.862.155	
			Persentase pertumbuhan event literasi yang diselenggarakan	10,00%		
1.1.2.13.02.0001	Pengelolaan Layanan Baca	Perpustakaan Umum Kota Surabaya (Rungkut dan Balai Pemuda), Sekolah, Taman di Kota Surabaya, Balai RW, Kelurahan dan Kecamatan, Yayasan, Panti Asuhan, TK	Jumlah layanan baca yang dikelola	1494 lokasi	22.341.935.926	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.1.2.13.02.0002	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Gedung milik Pemerintah Kota Surabaya, Taman Flora, Balai Pemuda, dan Lokasi pameran oleh Pemerintah Kota di wilayah Kota Surabaya	Jumlah kegiatan pengembangan minat dan budaya baca	239 kali	598.926.229	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.1.2.13.03	Program Peningkatan Minat dan Baca Masyarakat		Persentase penambahan koleksi buku	94,41%	3.654.999.211	
1.1.2.13.03.0001	Penyediaan dan Perawatan Sarana Layanan Baca	Perpustakaan Umum Kota Surabaya (Rungkut dan Balai Pemuda) serta Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	Jumlah sarana layanan baca yang disediakan dan dirawat	22460 Buku	3.654.999.211	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.1.2.14	Kearsipan				4.292.591.843	
1.1.2.14.01	Program Pembinaan Penataan Kearsipan		Persentase perangkat daerah, unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang berhasil dibina sistem tata kearsipan sesuai ketentuan	79,90%	479.796.894	
1.1.2.14.01.0001	Pembinaan Sistem Kearsipan	Perangkat Daerah	Jumlah PD/unit kerja dan sekolah yang mendapatkan pembinaan sistem kearsipan	130 lembaga	479.796.894	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.1.2.14.02	Program Peningkatan Informasi dan Layanan Kearsipan		Indeks Kepuasan Pelayanan Kearsipan	81,00	342.467.061	
1.1.2.14.02.0001	Layanan Informasi Kearsipan	Kelurahan, Kecamatan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Taman dan Gedung Kota Surabaya	Jumlah pelaksanaan layanan informasi kearsipan	40 kali	342.467.061	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.1.2.14.03	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah		Persentase arsip sejarah yang didigitalisasi	85,19%	3.470.327.888	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Persentase jumlah arsip yang diakuisisi	20,00%		
1.1.2.14.03.0001	Pendataan dan Penataan Sistem Kearsipan	Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan pendataan dan penataan sistem kearsipan	52 kali	2.451.645.188	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.1.2.14.03.0002	Pengadaan Sarana Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan dan Penyelamatan Kearsipan	Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Depo Arsip Balas Klumprik dan Dukuh Kupang	Jumlah sarana penyimpanan, pengolahan, pemeliharaan dan penyelamatan kearsipan yang diadakan	15 item	1.018.682.700	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.1.2.15	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				23.032.593.927	
1.1.2.15.01	Program Pemasaran Produk Usaha Mikro		Persentase usaha mikro binaan yang mendapatkan fasilitas pemasaran produk	90,00%	9.598.878.906	
1.1.2.15.01.0001	Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro	Surabaya, Jawa Timur, Jakarta dan Luar Jawa	Jumlah UKM Yang Terfasilitasi Pengembangan Usaha Mikro	40 UKM	4.071.107.281	Dinas Perdagangan
1.1.2.15.01.0002	Pengelolaan Rumah Kreatif serta Pelatihan Design dan Fashion	Jl. Kupang Gunung Timur No. 20-22 dan Jl. Putat Jaya Barat 1B / 31	Jumlah Pelaku Usaha Kreatif yang Dilatih	120 Orang	1.009.380.539	Dinas Perdagangan
1.1.2.15.01.0003	Pengelolaan Sentra Usaha Mikro Surabaya	Sentra Usaha Mikro Bukit Barisan, Sentra Usaha Mikro Merr, Sentra Usaha Mikro Tunjungan	Jumlah sentra Usaha Mikro Surabaya yang dikelola	3 lokasi	1.744.350.899	Dinas Perdagangan
1.1.2.15.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pembinaan UKM (DAK)	Gedung milik Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah sarana dan prasarana penunjang pembinaan UKM yang disediakan	23 Unit	119.766.680	Dinas Perdagangan
1.1.2.15.01.0005	Penyediaan Stand Usaha Mikro	Sentra Usaha Mikro ITC Mall, Delta Plaza, Terminal 2 Bandara Juanda, Park and Ride mayjend Sungkono, Surabaya North Quay, Kebun Binatang Surabaya, JMP	Jumlah stand usaha yang disediakan	7 lokasi	2.654.273.507	Dinas Perdagangan
1.1.2.15.02	Program Pengembangan Produk Usaha Mikro		Persentase pelaku usaha mikro yang produknya layak diujimutukan	35,00%	1.198.355.686	
1.1.2.15.02.0001	Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro Binaan	Lokasi pelaku usaha mikro binaan dan Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro binaan yang dimonitoring dan dievaluasi perkembangan usahanya	510 orang	767.480.093	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.15.02.0002	Pembinaan Pelaku Usaha Mikro	Kantor Dinas Koperasi	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pembinaan	635 orang	430.875.593	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.15.03	Program Pengembangan Sentra Usaha		Persentase sentra usaha makanan dan minuman yang beroperasi secara optimal	58,00%	7.610.561.633	
1.1.2.15.03.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan di Sentra Usaha	di lokasi sentra sentra usaha yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah sentra usaha yang difasilitasi	59 lokasi	4.757.392.730	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.15.03.0002	Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Sentra Usaha serta Pasar Tradisional	sentra usaha dan pasar tradisional yang dikelola Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah sentra usaha yang dimonitoring dan dievaluasi	59 lokasi	2.400.964.929	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.15.03.0003	Pembinaan Pelaku Usaha di Sentra Usaha	Sentra usaha yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan	725 orang	452.203.974	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.15.04	Program Pengembangan Usaha Koperasi		Tingkat pertumbuhan koperasi yang meningkat volume usahanya	79,00%	1.533.226.471	
1.1.2.15.04.0001	Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Usaha Bisnis Koperasi	Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah lembaga koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha bisnis	100 lembaga	735.465.793	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.15.04.0002	Fasilitasi Uji Sertifikasi Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK)	Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah lembaga koperasi yang pengelola usaha simpan pinjam - nya mengikuti uji sertifikasi	30 lembaga	151.959.257	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.2.15.04.0003	Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (DAK)	Kota Surabaya	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas koperasi dan UKM	210 Orang	645.801.421	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.15.05	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi		Persentase koperasi berklasifikasi AAB	69,95%	2.425.271.656	
1.1.2.15.05.0001	Fasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi	Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah lembaga koperasi yang mendapatkan fasilitasi pembentukan dan peningkatan kualitas lembaga	50 lembaga	611.713.327	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.15.05.0002	Pengawasan Koperasi	Lokasi koperasi yang dimonitoring	Jumlah lembaga koperasi yang mendapatkan pengawasan	629 lembaga	1.480.367.701	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.15.05.0003	Penilaian Kinerja Koperasi	Lokasi koperasi yang akan diperingkat dan Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah lembaga koperasi yang dinilai kinerjanya	35 lembaga	333.190.628	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.15.06	Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro		Persentase pelaku usaha mikro yang berhasil mendapatkan bantuan permodalan	0,07	666.299.575	
1.1.2.15.06.0001	Fasilitasi Kemitraan dan Pengembangan Usaha Mikro	Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha skala mikro yang mendapatkan fasilitasi kemitraan	125 orang	666.299.575	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.16	Statistik				283.143.583	
1.1.2.16.01	Program Pengelolaan Data Statistik Daerah		Tersedianya data statistik daerah yang terintegrasi	100,00%	283.143.583	
1.1.2.16.01.0001	Penyusunan Data Statistik Daerah	Surabaya	Jumlah dokumen data statistik daerah yang disusun	1 dokumen	283.143.583	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				7.416.553.419	
1.1.2.02.01	Program Keadilan dan Kesetaraan Gender serta Pemberdayaan Perempuan		Persentase kelurahan yang responsif gender	20,13%	2.775.850.683	
			Persentase Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya yang telah menerapkan responsif gender dalam pelaksanaan kegiatan	100,00%		
1.1.2.02.01.0001	Fasilitasi Pembinaan Organisasi Perempuan	Surabaya	Jumlah fasilitasi pembinaan organisasi perempuan	29 kali	1.327.475.402	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.02.01.0002	Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	DP5A, Gedung Siola, Surabaya	jumlah lembaga yang mengikuti Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	289 lembaga	1.047.087.797	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.02.01.0003	Penyusunan Profil Gender dan Evaluasi Atas Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kota Surabaya	Surabaya	Jumlah dokumen yang disusun	2 dokumen	401.287.484	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.02.02	Program Perlindungan Perempuan dan Anak		Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A)	73,84%	4.640.702.736	
			Persentase kelurahan ramah anak	84,42%		
			Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani	100,00%		
1.1.2.02.02.0001	Capacity Building bagi relawan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) dan Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak	Gedung Siola	Jumlah orang yang mengikuti Capacity Building	926 orang	528.711.761	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.2.02.02.0002	Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak	Kota Surabaya	jumlah lembaga yang difasilitasi dalam pencapaian indikator kota layak anak	431 lembaga	1.052.891.913	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.02.02.0003	Pembinaan Pengembangan Kampung Arek Suroboyo	154 Kelurahan yang ada di kota surabaya	Jumlah kampung Kampunge Arek Suroboyo yang dibina dan dikembangkan	154 kampung	713.951.950	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.02.02.0004	Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak	Kota Surabaya	Jumlah Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak	200 kasus	917.990.141	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.02.02.0005	Penyelenggaraan Operasional Shelter	Shelter Laki-Laki : Jl. Gayung Kebonsari VIII/58 Shelter perempuan :Jl. Gayungsari Barat XII GA-GB 15	jumlah shelter yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan	2 lembaga	1.427.156.971	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.03	Pangan				3.620.677.330	
1.1.2.03.01	Program Ketersediaan Informasi Komoditas Pangan		Persentase informasi OD yang diperoleh berdasarkan origin (asal) komoditas pangan	36,40%	717.335.424	
1.1.2.03.01.0001	Monitoring Bidang Ketahanan Pangan	Wilayah Kota Surabaya	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring	15 laporan	717.335.424	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.1.2.03.02	Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman dan Keamanan Pangan		Tingkat/Indeks Kecukupan Pangan	1,00	2.903.341.906	
			Tingkat keamanan bahan pangan segar yang beredar	84,00%		
			Tingkat keanekaragaman konsumsi masyarakat (PPH)	95,00%		
1.1.2.03.02.0001	Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan yang Beredar	Wilayah Kota Surabaya	Jumlah sampel produk pangan segar yang diperiksa	2060 sampel	1.361.651.860	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.1.2.03.02.0002	Pengelolaan Rumah Kreatif Olahan Pangan	Putat Jaya Lebar B/27 dan Putat Jaya 2A/19	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Rumah Kreatif Olahan Pangan Yang Dilaksanakan	19 kali	1.012.260.927	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.1.2.03.02.0003	Pengembangan Diversifikasi Pangan	Wilayah Kota Surabaya	Jumlah pelaksanaan Pengembangan Diversifikasi Pangan	25 kali	529.429.119	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.1.2.04	Pertanahan				639.190.062.394	
1.1.2.04.01	Program Penanganan Sengketa Tanah dan Bangunan		Persentase kasus tanah dan/atau bangunan yang ditangani	100,00%	4.377.423.790	
1.1.2.04.01.0001	Penanganan Sengketa Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Wilayah Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah sengketa bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani	12 Kasus	1.359.068.268	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.01.0002	Penanganan Sengketa Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Wilayah Tanah Aset yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah sengketa tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani	18 obyek	1.447.277.582	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.01.0003	Pengendalian dan Penyuluhan Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Wilayah Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah kegiatan penyuluhan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya	4 kali	1.571.077.940	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.02	Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan Infrastruktur untuk Kepentingan Umum		Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum	6,003 Ha	265.904.492.390	
1.1.2.04.02.0001	Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk infrastruktur	JLLB, JLLT, Wonokromo	Jumlah lokasi tanah dan / atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan infrastruktur	5 lokasi	265.904.492.390	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.2.04.03	Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan Non Infrastruktur untuk Kepentingan Umum		Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	44,90 Ha	350.977.801.838	
1.1.2.04.03.0001	Pendataan dan Persiapan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan	Seluruh Wilayah Kota Surabaya	Jumlah dokumen pendataan dan persiapan pengadaan tanah dan/atau bangunan	4 dokumen	5.629.219.937	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.03.0002	Pengadaan/Pembelian Tanah dan/atau Bangunan untuk Kepentingan Umum guna Pembangunan Non Infrastruktur	Kota Surabaya	Lokasi tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan umum guna pembangunan non infrastruktur yang diadakan	4 lokasi	345.348.581.901	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.04	Program Pengamanan Aset		Persentase tanah aset yang telah dilakukan pemagaran, papan, patok	36,80%	9.473.283.489	
			Persentase tanah aset yang tersertifikasi	43,08%		
1.1.2.04.04.0001	Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Aset Tanah dan/atau Bangunan Milik Kota Surabaya baik yang berada di kota Surabaya maupun di luar kota Surabaya (Gresik, Pasuruan)	Jumlah tanah aset yang diamankan	100 bidang	4.842.285.478	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.04.0002	Perencanaan Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Kota Surabaya	Perencanaan Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	4 dokumen	1.312.387.302	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.04.0003	Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Aset Tanah dan/atau Bangunan Milik Kota Surabaya baik yang berada di kota Surabaya maupun di luar kota Surabaya (Gresik, Pasuruan)	Jumlah dokumen sertifikasi tanah aset yang diajukan	75 dokumen	3.318.610.709	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.05	Program Pengamanan Aset Infrastruktur		Persentase aset tanah, saluran, jalan dan kelengkapannya yang diamankan	2,50%	2.293.629.586	
1.1.2.04.05.0001	Pengamanan Aset Infrastruktur Pemerintah Kota Surabaya	Kota Surabaya	Jumlah tanah aset infrastruktur yang diamankan	40 bidang	2.293.629.586	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.2.04.06	Program Pengelolaan Aset Tanah		Persentase aset tanah yang tercatat pemanfaatannya	81,30%	6.163.431.301	
1.1.2.04.06.0001	Pelayanan Pemanfaatan Tanah Aset	Seluruh tanah aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah izin yang diterbitkan atas pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya	7000 izin	2.433.778.685	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.06.0002	Pendataan dan Penataan Tanah Aset Pemerintah Kota	Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Pendataan dan penataan terhadap tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang dilaksanakan	1 dokumen	2.003.691.237	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.06.0003	Pengukuran dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Di Kota Surabaya	Jumlah lokasi tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang diukur dan dipetakan	8000 lokasi	1.725.961.379	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.05	Lingkungan Hidup				589.252.766.779	
1.1.2.05.01	Program Kebersihan		Persentase pengangkutan sampah dari TPS ke TPA ≤ 1 hari	84,86%	216.118.634.617	
1.1.2.05.01.0001	Operasional dan Penyediaan Sarana Posko Kebersihan	9 wilayah rayon kebersihan Rayon Pusat 1, Rayon Pusat 2, Rayon Timur 1, Rayon Timur 2, Rayon Selatan 1, Rayon Selatan 2, Rayon Utara 1, Rayon Utara 2, Rayon Barat	Jumlah operasional peningkatan pelayanan posko kebersihan yang dilaksanakan	104 Kegiatan	3.908.269.482	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.01.0002	Operasional Pembersihan Jalan dan Jalur Pedestrian	9 Wilayah Rayon Kebersihan: Rayon Pusat 1, Rayon Pusat 2, Rayon Timur 1, Rayon Timur 2, Rayon Barat, Rayon Utara 1, Rayon Utara 2, Rayon Selatan 1 dan Rayon Selatan 2	Jumlah lokasi pelaksanaan pembersihan jalan dan jalur pedestrian	364 lokasi	110.491.021.029	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.2.05.01.0003	Operasional Pembersihan Sampah di Saluran	saluran primer, sekunder, tersier dan rumah pompa di kota surabaya	Jumlah lokasi operasional pembersihan sampah di saluran	415 lokasi	22.617.870.103	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.01.0004	Operasional Pengangkutan Sampah	5 Wilayah pengangkutan sampah di Kota Surabaya: Surabaya Pusat, Surabaya Timur, Surabaya Barat, Surabaya Utara dan Surabaya Selatan	Jumlah lokasi pelaksanaan operasional pengangkutan sampah	267 lokasi	79.101.474.003	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.02	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Lingkungan Hidup		Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup lingkungan hidup	78,00%	2.597.705.736	
1.1.2.05.02.0001	Pelayanan Perijinan Pembuangan Air Limbah	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Jumlah Ijin Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan	50 izin	406.745.623	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.02.0002	Pelayanan Rekomendasi dan Izin Lingkungan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Jumlah rekomendasi dan izin lingkungan yang diterbitkan	1.600 berkas	1.598.647.171	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.02.0003	Peningkatan Pelayanan Perijinan Limbah B3	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Jumlah pelayanan ijin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun yang terlayani dan terverifikasi	45 izin	592.312.942	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.03	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Mandiri		Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	8,75%	3.950.324.086	
1.1.2.05.03.0001	Penyelenggaraan Kompetisi Pengelolaan Lingkungan	Kota Surabaya	Jumlah kompetisi pengelolaan kebersihan yang diselenggarakan	3 kali	3.950.324.086	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.04	Program Pengadaan Prasarana Air Limbah Domestik Rumah Tangga		Persentase jamban yang memenuhi standar minimal ramah lingkungan	80,00%	1.883.569.278	
1.1.2.05.04.0001	Peningkatan Kualitas Sarana Sanitasi Permukiman	Kota Surabaya	Jumlah lokasi rumah yang terpasang jamban	400 Unit	1.883.569.278	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.05	Program Pengelolaan Air Limbah Kota		Persentase instalasi pengolahan air limbah yang beroperasi dengan baik	100,00%	26.630.478.526	
1.1.2.05.05.0001	Operasional, Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan Air Limbah	Kota Surabaya	Jumlah IPAL yang dipelihara dan berfungsi baik	96 lokasi	8.028.548.896	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.05.0002	Penyediaan Sarana, Operasional dan Pemeliharaan Pengelolaan Rumah Kompos/PLTSa/TPS 3R	Kota Surabaya	Jumlah Rumah Kompos/PLTSa/TPS 3R yang dikelola	34 lokasi	18.601.929.630	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.06	Program Pengelolaan dan Peningkatan Kebun Raya dan Hutan Kota		Persentase pertumbuhan luas kebun raya dan hutan kota yang dipelihara dan diawasi	54,76%	25.235.077.537	
1.1.2.05.06.0001	Pembangunan dan Pemeliharaan Hutan Kota dan Kebun Raya	Balas Klumprik, Pakal I, Pakal II, Sumurwelut 1, Sumurwelut 2, Sambikerep 1, Sambikerep 2, Lempung, Jeruk, Hutan Kota Herbal, Kebun Raya Mangrove Wonorejo, Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar, Hutan Kota Anggrek	Jumlah hutan kota dan kebun raya mangrove yang dibangun dan dipelihara	13 lokasi	25.235.077.537	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.1.2.05.07	Program Pengelolaan dan Peningkatan Taman dan Jalur Hijau		Persentase pertumbuhan luas taman dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi	8,68%	87.966.004.930	
1.1.2.05.07.0001	Pemeliharaan, Penyediaan dan Penataan Sarana Taman dan Jalur Hijau	Taman dan jalur hijau yang tersebar di 31 kecamatan Kota Surabaya	Jumlah lokasi taman dan jalur hijau yang ditata dan dipelihara	425 lokasi	57.559.504.854	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.07.0002	Pengembangan Dekorasi Kota	Seluruh Wilayah Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah Pengembangan Dekorasi Kota yang Difasilitasi	15 lokasi	10.707.926.916	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.2.05.07.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Taman Kota	Taman Rekreasi yang Tersebar dan dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya	Jumlah taman yang dipelihara	35 lokasi	19.698.573.160	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.08	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah		Persentase fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi 3R yang beroperasi dengan baik	30,77%	2.646.563.302	
1.1.2.05.08.0001	Penanganan Limbah B3	Kota Surabaya	Jumlah kegiatan penanganan limbah B3 yang dilakukan	1 Kegiatan	2.646.563.302	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.09	Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan		Persentase ketaatan/kepatuhan terhadap aspek lingkungan	80,00%	3.692.461.395	
1.1.2.05.09.0001	Monitoring Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah	Lokasi IPAL komunal	Jumlah titik IPAL kegiatan monitoring pengelolaan air limbah	178 lokasi	331.428.748	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.09.0002	Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Monitoring Udara Ambien dan Data Display	2 Lokasi Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien yakni Kebun Bibit Wonorejo dan Kantor Kelurahan Kebonsari	Jumlah Indeks Standard Pencemar Udara (ISPU) yang terpublish dari 2 Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA) dalam 1 tahun sebanyak	365 data	971.808.170	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.09.0003	Pemantauan Kualitas Air Laut di Kawasan Pesisir	Perairan Pesisir di Kota Surabaya	Jumlah data air laut (dari 48 sampel) dan kuantitas/kualitas ABT (dari 4 sumur pantau selama 1 tahun) yang didapat sebanyak	1508 data	461.220.572	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.09.0004	Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup	Lokasi sumber dampak dan yang terdampak	Jumlah permasalahan lingkungan hidup yang ditangani	50 obyek	539.231.848	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.09.0005	Pengawasan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Kegiatan usaha di Kota Surabaya yang menjadi target pengawasan	Jumlah kegiatan usaha yang diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya	254 lembaga	988.575.558	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.09.0006	Pengujian Kualitas Air dan Udara Ambien	31 Titik/lokasi air badan air (184 Sampel) , 40 Titik/lokasi lokasi pengujian udara ambien di Kota Surabaya	Jumlah sampel air dan udara ambien yang diuji dan dianalisa	224 sampel	400.196.499	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.10	Program Peningkatan Kapasitas Pemahaman dan Evaluasi Lingkungan Hidup		Persentase aspek lingkungan hidup yang dievaluasi	100,00%	3.317.604.955	
			Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat	70,00%		
1.1.2.05.10.0001	Pelaksanaan Car Free Day	Jl. Raya Darmo; Jl. Tunjungan ; Jl. Jimerto, Jl. Jemur Andayani, Jl. Kertajaya	Jumlah pelaksanaan Car Free Day	113 kali	1.431.206.363	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.10.0002	Penyelenggaraan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang lingkungan	Ruang/gedung pertemuan milik Pemerintah Kota Surabaya serta sekolah adiwiyata, pondok pesantren dan kampus	Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang diselenggarakan	12 kali	706.206.435	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.10.0003	Penyusunan Kajian Pemeliharaan Lingkungan Hidup Daerah	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun	7 dokumen	1.180.192.157	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.11	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		Persentase pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R	30,77%	215.214.342.417	
1.1.2.05.11.0001	Layanan Pengolahan Sampah (DAK)	Kota Surabaya	Jumlah Rekening Pengolahan Sampah yang Dibayar	1 Rekening	26.912.253.000	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.11.0002	Operasional sarana dan prasarana Kebersihan	Workshop alat berat/ kendaraan DKRTH dan ATPM alat berat/ kendaraan	Jumlah sarana kebersihan yang dikelola	21 unit	9.597.648.787	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.11.0003	Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Kebersihan dan RTH	Kota Surabaya	Jumlah sarana dan prasarana kebersihan dan RTH yang disediakan	1688 unit	26.239.155.825	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.2.05.11.0004	Pembayaran Operasional Pengolahan Sampah	Kota Surabaya	Jumlah Rekening Pengolahan Sampah yang Dibayar	1 rekening	122.729.788.514	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.11.0005	Pemeliharaan prasarana kebersihan dan sarana pendukungnya	Kota Surabaya	Jumlah lokasi prasarana kebersihan yang dikelola	183 lokasi	9.243.648.860	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.11.0006	Penyediaan Sarana dan Prasarana, Operasional dan Pemeliharaan Makam	14 Lokasi Pemakaman Yang Dikelola Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah Pemakaman yang dibangun/rehab dan dipelihara	14 lokasi	18.923.685.281	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.11.0007	Penyediaan Sarana Prasarana Kebersihan (DAK)	Kota Surabaya	Jumlah sarana prasarana kebersihan yang disediakan	2 Unit	1.568.162.150	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				11.748.190.947	
1.1.2.06.01	Program Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil		Cakupan penerbitan akte kelahiran	99,75%	1.052.910.487	
			Cakupan penerbitan akte kematian	88,00%		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	93,95%		
			Persentase ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	99,75%		
1.1.2.06.01.0001	Pelayanan Akte Kelahiran dan Kematian	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Jumlah berkas permohonan akte kelahiran dan kematian yang dilayani	75130 berkas	538.152.056	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.1.2.06.01.0002	Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Jumlah berkas permohonan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan yang dilayani	3250 berkas	514.758.431	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.1.2.06.02	Program Pelayanan Administrasi Pendaftaran Penduduk		Cakupan penerbitan KTP	92,00%	7.537.286.775	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP dan KK)	100,00%		
1.1.2.06.02.0001	Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Jumlah Blanko dan Formulir Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang bersumber dari DAK yang disediakan	200000 berkas	6.461.104.100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.1.2.06.02.0002	Pelayanan Kartu Keluarga dan KTP-el	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA	Jumlah berkas permohonan kartu keluarga dan KTP-el yang dilayani	300000 berkas	678.390.449	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.1.2.06.02.0003	Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk Non Permanen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Jumlah permohonan berkas pindah datang dan pendataan penduduk musiman	40930 berkas	397.792.226	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.1.2.06.03	Program Pemanfaatan Data Kependudukan		Persentase peningkatan inovasi pelayanan	33,33%	1.258.849.419	
			Persentase sistem informasi intervensi masyarakat yang telah menggunakan data kependudukan	10,00%		
1.1.2.06.03.0001	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah pelaksanaan monitoring pemanfaatan data kependudukan yang dilaksanakan	2 kali	510.878.225	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.1.2.06.03.0002	Pelayanan kerjasama pemanfaatan data dan rekomendasi inovasi pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Jumlah dokumen Pelayanan kerjasama pemanfaatan data dan rekomendasi inovasi pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6 dokumen	747.971.194	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.1.2.06.04	Program Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan		Persentase penurunan data ganda pada database SIAK	85,00%	1.899.144.266	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.2.06.04.0001	Memutakhiran Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	jumlah pemutakhiran data kependudukan yang dilakukan	2 kali	682.524.842	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.1.2.06.04.0002	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Jumlah sistem informasi administrasi kependudukan yang dikembangkan dan dipelihara	6 sistem	1.216.619.424	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.1.2.07	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				12.372.381.466	
1.1.2.07.01	Program Keluarga Berencana		Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	20,05%	7.945.614.245	
			Persentase peserta KB aktif	80,89%		
			Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi	4,95%		
			Persentase peserta KB baru	83,55%		
1.1.2.07.01.0001	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)	31 Kecamatan	jumlah lembaga yang mendapat Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)	31 lembaga	3.894.200.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.07.01.0002	Fasilitasi Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	31 Kecamatan dan Gedung milik Pemkot Surabaya	Jumlah orang Yang Mengikuti Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	2208 orang	1.251.582.273	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.07.01.0003	Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga	Rumah Sakit, Fasilitas Kesehatan, Puskesmas dan Bakti Sosial Kecamatan	Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan KB	650 orang	1.431.034.842	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.07.01.0004	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	DP5A, ULP, BKKBN	jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	2 unit	1.143.636.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.07.01.0005	Penyusunan Profil Pengendalian Penduduk	Kota Surabaya	Jumlah dokumen profil pengendalian penduduk yang disusun	1 dokumen	225.161.130	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.07.02	Program Peningkatan Ketahanan Keluarga		Persentase kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia yang aktif	100,00%	4.426.767.221	
			Persentase perempuan usia produktif dari hasil pendampingan yang berproduksi	19,67%		
1.1.2.07.02.0001	Fasilitasi dan Pendampingan Inkubasi Usaha Mandiri	Surabaya	Jumlah orang yang difasilitasi dan mendapatkan pendampingan inkubasi usaha mandiri	100 orang	1.304.280.603	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.07.02.0002	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Surabaya, Luar Surabaya	Jumlah lembaga yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha ekonomi	15 lembaga	1.022.476.666	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.07.02.0003	Pembinaan Keluarga Sejahtera	seluruh Kecamatan dan/atau tempat lain di Kota Surabaya	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan keluarga sejahtera	1240 orang	699.249.396	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.07.02.0004	Pembinaan terhadap Pendamping Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia	seluruh Kecamatan dan/atau tempat lain di Kota Surabaya	Jumlah pendamping yang mengikuti pembinaan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia yang didampingi	1350 orang	431.705.219	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.2.07.02.0005	Pengelolaan Rumah Kreatif Handycraft	Jl. Klakah Rejo Gang Sampurna No.21 Surabaya	Jumlah rumah kreatif yang dikelola selama 12 bulan	1 bangunan	340.606.157	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.07.02.0006	Penyelenggaraan Operasional PUSPAGA	Mall Pelayanan Publik, Jln. Tunjungan No. 1-3, Lantai 2, Surabaya	Jumlah Puspaga yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan	2 lembaga	628.449.180	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.08	Perhubungan				191.099.479.633	
1.1.2.08.01	Program Pelayanan Publik Lingkup Perhubungan		Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup perhubungan	78,00%	2.981.198.378	
1.1.2.08.01.0001	Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perhubungan	Kota Surabaya	Kebutuhan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perhubungan yang Diadakan	5 Jenis	2.981.198.378	Dinas Perhubungan
1.1.2.08.02	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi		Persentase penyediaan prasarana pendukung transportasi berkelanjutan dalam kondisi baik	100,00%	50.755.284.337	
1.1.2.08.02.0001	Pembangunan Prasarana Transportasi	Kota Surabaya	Jumlah Bangunan Prasarana Transportasi Yang Dibangun	2 bangunan	7.053.456.448	Dinas Perhubungan
1.1.2.08.02.0002	Pemeliharaan Prasarana Transportasi	Kota Surabaya	Jumlah Lokasi Prasarana Transportasi yang Dipelihara	36 lokasi	6.408.644.528	Dinas Perhubungan
1.1.2.08.02.0003	Pengelolaan Terminal Angkutan Umum	Terminal Kota Surabaya	Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan	14 Lokasi	32.709.131.930	Dinas Perhubungan
1.1.2.08.02.0004	Perencanaan dan Pengawasan Prasarana Transportasi	Kota Surabaya	Jumlah Paket Perencanaan dan Pengawasan Prasarana Transportasi	8 Paket	4.584.051.431	Dinas Perhubungan
1.1.2.08.03	Program Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		Persentase kelulusan uji emisi kendaraan bermotor	93,00%	25.006.117.087	
1.1.2.08.03.0001	Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Kota Surabaya	Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Melaksanakan Uji KIR	149069 unit	7.273.909.330	Dinas Perhubungan
1.1.2.08.03.0002	Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan	Kota Surabaya	Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas selama 12 bulan	365 Kali	11.346.766.252	Dinas Perhubungan
1.1.2.08.03.0003	Pengawasan dan Pengendalian Sarana Angkutan Jalan	Kota Surabaya	Jenis Sarana Angkutan Jalan yang Diawasi dan Dikendalikan selama 12 bulan	7 Jenis	3.997.182.057	Dinas Perhubungan
1.1.2.08.03.0004	Pengendalian Pencemaran Udara Melalui Uji Emisi Gas Buang	Kota Surabaya	Jumlah Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor yang Dilaksanakan	48 kali	2.388.259.448	Dinas Perhubungan
1.1.2.08.04	Program Pengembangan Sistem Transportasi yang Berkelanjutan		Cakupan layanan angkutan trunk Suroboyo Bus	100,00%	34.695.441.566	
			Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan	40,00%		
			Rata-rata waktu tempuh kendaraan barang pada rute tertentu	95,05 menit		
1.1.2.08.04.0001	Pengelolaan Transportasi Umum	Kota Surabaya	Jumlah Unit Transportasi Umum yang Diselenggarakan	20 Unit	17.687.121.325	Dinas Perhubungan
1.1.2.08.04.0002	Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor	Kota Surabaya	Jumlah Kegiatan Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor	5 Kali	8.602.441.367	Dinas Perhubungan
1.1.2.08.04.0003	Penyelenggaraan Pelayanan Aksesibilitas Angkutan Barang	Kota Surabaya	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Survey Aksesibilitas Angkutan Barang	2 kali	861.487.271	Dinas Perhubungan
1.1.2.08.04.0004	Penyelenggaraan Sarana Transportasi Bagi Pelajar	Kota Surabaya	Transportasi Pelajar yang Diselenggarakan selama 12 Bulan	8 unit	1.241.727.674	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.2.08.04.0005	Penyelenggaraan Transportasi Umum Perkotaan	Kota Surabaya	Transportasi Umum Perkotaan yang Diselenggarakan	365 kali	2.759.022.686	Dinas Perhubungan
1.1.2.08.04.0006	Perencanaan Angkutan Umum Perkotaan	Kota Surabaya	Perencanaan Angkutan Umum Perkotaan yang Dilaksanakan	10 Dokumen	3.543.641.243	Dinas Perhubungan
1.1.2.08.05	Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	39,00 km/jam	77.661.438.265	
			Persentase selisih tingkat kecelakaan lalu lintas	2,00%		
1.1.2.08.05.0001	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Surabaya	Jenis Perlengkapan Jalan yang Dipelihara	5 Jenis	26.268.689.084	Dinas Perhubungan
1.1.2.08.05.0002	Pengadaan Perlengkapan Jalan	Kota Surabaya	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Diadakan	1200 unit	18.496.260.991	Dinas Perhubungan
1.1.2.08.05.0003	Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Yang Tersusun	13 dokumen	3.759.896.648	Dinas Perhubungan
1.1.2.08.05.0004	Penyelenggaraan Perparkiran	Titik Parkir TJU dan TKP di Kota Surabaya	Jumlah Tempat Parkir yang Diselenggarakan selama 12 bulan	1789 Lokasi	29.136.591.542	Dinas Perhubungan
1.1.2.09	Komunikasi dan Informatika serta Persandian				75.861.491.546	
1.1.2.09.01	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		Persentase layanan publik administratif yang berbasis TIK	53,85%	27.742.226.276	
1.1.2.09.01.0001	Layanan Sistem Informasi Pemerintahan dan Publik	Kota Surabaya	Jumlah layanan sistem informasi pemerintahan dan publik yang disediakan	49 lokasi	25.123.818.659	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.09.01.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Kota Surabaya	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan teknologi informasi yang dilaksanakan	72 lokasi	709.917.431	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.09.01.0003	Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik Dan Sistem Informasi Manajemen	Kotaa Surabaya	Jumlah Aplikasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang Dibangun	15 aplikasi	864.483.236	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.09.01.0004	Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen	Kota Surabaya	Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang dipelihara dan dikembangkan	134 Aplikasi	1.044.006.950	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.09.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		Rata-rata pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya	32.000 Kunjungan	6.805.119.319	
1.1.2.09.02.0001	Pelayanan Keluhan dan Pengaduan Masyarakat, Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik	Wilayah pelayanan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah keluhan dan pengaduan masyarakat, permohonan informasi dan dokumentasi publik yang dilayani	3000 berkas	1.118.128.111	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.09.02.0002	Pengelolaan Saluran Komunikasi	Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah saluran komunikasi yang dikelola	19 Saluran	906.599.588	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.09.02.0003	Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial	Gedung milik Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial	11 kali	1.397.674.397	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.09.02.0004	Penyusunan Dokumen Analisa Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Masyarakat Kota Surabaya yang pernah mengetahui program pemkot/menggunakan layanan pemkot sesuai dengan topik kajian ; 72 perangkat daerah pemkot surabaya dan instansi vertikal di Kota Surabaya seperti Kantor Metereologi, PT Pos, PT KAI, dll	Jumlah Dokumen Analisa Data Dan Informasi Pemerintah Daerah yang disusun	5 dokumen	706.351.471	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.2.09.02.0005	Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	instansi pemerintah penyelenggara event, OPD Pemerintah Kota Surabaya penyelenggara event, Studio Radio di wilayah administratif Kota Surabaya, Studio Televisi yang memiliki jangkauan bisa diakses masyarakat surabaya	Jumlah Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	4 Jenis	2.676.365.752	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.09.03	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi		Persentase pengelolaan sarana TIK pendukung pelayanan publik	100,00%	41.314.145.951	
1.1.2.09.03.0001	Pelaksanaan Sistem Persandian Perkotaan	Kota Surabaya	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persandian	930 unit	2.449.019.998	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.09.03.0002	Pembangunan Sarana Prasarana TIK	Kota Surabaya	Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana TIK	1 Jenis	25.007.528.900	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.09.03.0003	Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana Prasarana TIK	Kota Surabaya	Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana Prasarana TIK	4 Jenis	7.384.946.163	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.09.03.0004	Penanganan Serangan terhadap Sistem Keamanan Informasi	Kota Surabaya	Persentase Serangan terhadap Sistem Keamanan Informasi yang ditangani	100 persen	3.644.430.435	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.09.03.0005	Pengelolaan Pusat Data	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Pusat Data yang dikelola	2 Lokasi	2.828.220.455	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.2	Urusan Pilihan				43.323.880.343	
1.2.2	Non Pelayanan Dasar				43.323.880.343	
1.2.2.01	Pariwisata				14.481.698.344	
1.2.2.01.01	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Pariwisata		Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup pariwisata	60,00%	722.393.411	
1.2.2.01.01.0001	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata	Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, Tempat-tempat usaha jasa dan sarana pariwisata	Jumlah TDUP Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata yang diproses	400 berkas	362.880.300	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.01.01.0002	Pelayanan perizinan dan non perizinan usaha rekreasi dan Hiburan Umum	Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, Tempat-tempat usaha rekreasi dan hiburan umum	Jumlah Tanda Daftar Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang diproses	169 berkas	359.513.111	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.01.02	Program Pemasaran Pariwisata		Persentase kunjungan di objek wisata terhadap kunjungan wisatawan	50,01%	6.240.995.764	
1.2.2.01.02.0001	Fasilitasi promosi wisata	Dalam dan luar propinsi Jawa Timur	Jumlah fasilitasi promosi wisata	246 kali	2.797.973.505	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.01.02.0002	Penyelenggaraan even di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel	THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel	Jumlah Penyelenggaraan event di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel	93 kali	1.212.840.366	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.01.02.0003	Penyelenggaraan even di UPTD Tugu Pahlawan Balai Pemuda dan THR	Gedung Balai Pemuda, Museum Sepuluh Nopember Tugu Pahlawan, THR	Jumlah penyelenggaraan event di UPTD Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR	41 kali	1.175.634.280	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.01.02.0004	Penyelenggaraan pemilihan dan pengiriman duta wisata	Gedung pertemuan di Kota Surabaya; regional dan nasional	Jumlah kegiatan pemilihan dan pengiriman duta wisata yang diselenggarakan dan diikuti	66 kali	1.054.547.613	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.01.03	Program Pengembangan Destinasi Wisata		Persentase ODTW yang berhasil dikembangkan	69,23%	6.803.024.286	
1.2.2.01.03.0001	Fasilitasi Pelatihan dan Pertunjukan di Destinasi Wisata	Balai Pemuda Surabaya, Jl. Gubernur Suryo No.15 Surabaya	Jumlah Pelatihan dan pertunjukan seni budaya di destinasi wisata yg difasilitasi	770 kali	611.727.282	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.01.03.0002	Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM di sektor Pariwisata	Convention Hall Lt. 4 Gedung Siola	Jumlah kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM di sektor pariwisata yang dilaksanakan	4 kali	304.732.996	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.2.2.01.03.0003	Pemeliharaan dan penyediaan Sarana Penunjang obyek wisata THP Kenjeran, wisata air kalimas dan Wisata Religi Ampel	THP Kenjeran, Wisata Air Kalimas dan Wisata Religi Ampel	Jumlah obyek wisata yang dipelihara dan disediakan sarana penunjang	3 lokasi	2.198.611.696	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.01.03.0004	Pemeliharaan dan penyediaan Sarana Penunjang obyek wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR	Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR	Jumlah obyek wisata yang dipelihara dan disediakan sarana penunjang	3 lokasi	1.875.620.867	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.01.03.0005	Peningkatan Destinasi Wisata	Jl. Pahlawan s/d Taman Bungkul, Jawa Timur, Kya Kya Kembang Jepun, sepanjang Jl.Tunjungan	Jumlah Penyelenggaraan Event Peningkatan Destinasi Wisata	6 kali	1.812.331.445	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.01.04	Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata		Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan 5 kesepakatan	80,00%	715.284.883	
1.2.2.01.04.0001	Forum komunikasi pelaku usaha industri pariwisata	Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya	Jumlah pelaksanaan forum komunikasi pelaku usaha industri pariwisata	12 kali	511.222.062	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.01.04.0002	Monitoring dan evaluasi kemitraan usaha jasa dan sarana pariwisata serta usaha rekreasi dan hiburan umum pariwisata	Tempat - tempat usaha jasa dan sarana pariwisata di kota Surabaya	Jumlah lokasi usaha jasa dan sarana pariwisata yang dimonitor dan dievaluasi	6 lokasi	204.062.821	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02	Energi dan Sumber Daya				3.365.651.336	
1.2.2.02.01	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif		Akumulasi entitas lingkungan yang berperan serta dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	11 lingkungan	359.801.940	
1.2.2.02.01.0001	Pendampingan Pengembangan Energi Alternatif di Masyarakat	Kota Surabaya	Jumlah lokasi pendampingan dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	3 Lingkungan	359.801.940	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.2.2.02.02	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif di Gedung Milik Pemerintah Kota		Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan di gedung milik pemerintah kota	45 Unit	2.453.793.990	
1.2.2.02.02.0001	Penyediaan Sarana dalam rangka Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung dan Permukiman	Gedung Milik pemerintah kota Surabaya yang dilakukan konservasi energi	Jumlah Sarana dalam rangka Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung dan Permukiman yang disediakan	7 unit	2.141.357.569	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.2.2.02.02.0002	Penyusunan Dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman	Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Jumlah dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman yang disusun	2 dokumen	312.436.421	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.2.2.02.03	Program Upaya Konservasi Energi		Akumulasi kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi	154	552.055.406	
1.2.2.02.03.0001	Pembinaan Pengusahaan Konservasi Energi	Gedung Milik Pemerintah Kota Surabaya dan Usaha dan/atau Kegiatan	Jumlah kegiatan/usaha yang mendapatkan pembinaan pengusahaan konservasi energi	120 lembaga	552.055.406	Dinas Lingkungan Hidup
1.2.2.03	Perdagangan				8.005.957.274	
1.2.2.03.01	Program Distribusi Perdagangan		Frekuensi fasilitasi pelaku distribusi perdagangan	17 kali	2.999.457.610	
			Frekuensi intervensi ketersediaan komoditas	15 kali/kejadian		
			Tingkat kelengkapan data gudang terdaftar	80,00%		
1.2.2.03.01.0001	Monitoring Kelengkapan Data Gudang Terdaftar	Gudang di kota Surabaya	Jumlah gudang yang dimonitor	250 lokasi	570.163.254	Dinas Perdagangan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.2.2.03.01.0002	Pembinaan terhadap pelaku distribusi perdagangan	Kota Surabaya	Jumlah Pelaku Distribusi Perdagangan yang dibina	10 Kelompok	894.343.651	Dinas Perdagangan
1.2.2.03.01.0003	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	31 wilayah Kecamatan di Kota Surabaya	Jumlah kegiatan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting lainnya yang diselenggarakan	142 kali	1.534.950.705	Dinas Perdagangan
1.2.2.03.02	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Perdagangan		Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup perdagangan	78,00%	1.639.982.976	
1.2.2.03.02.0001	Pelayanan Perijinan di Bidang Perdagangan	Dinas Perdagangan Kota Surabaya	Jumlah ijin bidang perdagangan yang diterbitkan	400 berkas	451.510.476	Dinas Perdagangan
1.2.2.03.02.0002	Pengawasan Perijinan di Bidang Perdagangan	Wilayah-wilayah perdagangan di Kota Surabaya	Jumlah usaha di bidang perdagangan yang diawasi perijinannya	1552 Lembaga	1.188.472.500	Dinas Perdagangan
1.2.2.03.03	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		Persentase temuan yang ditindaklanjuti	85,00%	3.366.516.688	
1.2.2.03.03.0001	Operasional UPTD Metrologi legal	Kantor UPTD Metrologi Legal	Jumlah Sarana Pendukung Pelayanan UPTD Metrologi Legal yang dipelihara dan disediakan	21 Jenis	1.149.483.970	Dinas Perdagangan
1.2.2.03.03.0002	Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Lokasi UTTP, Kantor UPTD Metrologi Legal, dan Pasar/Kecamatan	Jumlah alat UTTP yang dilayani	23855 unit	1.508.858.373	Dinas Perdagangan
1.2.2.03.03.0003	Pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Tempat usaha yang menggunakan peralatan UTTP	Jumlah alat UTTP yang diawasi	4500 unit	708.174.345	Dinas Perdagangan
1.2.2.04	Kelautan dan Perikanan				5.539.059.297	
1.2.2.04.01	Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Perikanan dan Kelautan		Persentase pembudidaya perikanan dan kelautan yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	65,00%	461.003.460	
1.2.2.04.01.0001	Pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan	Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya dan Kecamatan	Jumlah pelaksanaan pelatihan teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan	15 kali	461.003.460	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.04.02	Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan		Persentase pembudidaya yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana perikanan dan kelautan	15,00%	5.078.055.837	
1.2.2.04.02.0001	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	Wilayah Kota Surabaya	Jumlah unit sarana dan prasarana perikanan budidaya yang dipelihara dan diadakan	348 unit	1.377.481.665	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.04.02.0002	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Kawasan pesisir Surabaya	Jumlah unit sarana dan prasarana perikanan tangkap yang dipelihara dan diadakan	38 unit	1.825.812.207	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.04.02.0003	Pengawasan dan Rehabilitasi Kawasan Pesisir	Kawasan Pesisir di Kota Surabaya	Jumlah laporan kegiatan pengawasan dan rehabilitasi kawasan pesisir	12 laporan	1.874.761.965	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.05	Pertanian				11.931.514.092	
1.2.2.05.01	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Pertanian		Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup pertanian	78,00%	216.538.320	
1.2.2.05.01.0001	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian	Wilayah Kota Surabaya	Jumlah berkas perizinan dan non perizinan bidang pertanian yang diproses	255 berkas	216.538.320	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.05.02	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak		Persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan	88,00%	1.142.341.245	
1.2.2.05.02.0001	Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan serta Zoonosis	Wilayah Kota Surabaya	Jumlah pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit hewan serta Zoonosis	1562 kali	1.142.341.245	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.05.03	Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Peternakan		Persentase pembudidaya ternak yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	65,00%	778.933.564	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.2.2.05.03.0001	Pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya peternakan	Wilayah Kota Surabaya	Jumlah pelaksanaan pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya peternakan	8 kali	379.666.330	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.05.03.0002	Penyediaan Sarana Budidaya Peternakan	Sentra Pertanian Terpadu Kelurahan Sumur Welut Kecamatan Lakarsantri	Jumlah Jenis Sarana Budidaya Peternakan yang disediakan	6 jenis	399.267.234	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.05.04	Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura		Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	65,00%	6.314.392.805	
1.2.2.05.04.0001	Pelatihan dan pendampingan pemanfaatan teknologi tepat guna budidaya tanaman pangan dan hortikultura	Wilayah Kota Surabaya	jumlah peserta pelatihan dan pendampingan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Budidaya Pangan dan Hortikultura	300 orang	500.306.930	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.05.04.0002	Pembibitan	Miniagrowisata, STA Karah dan Jambangan	Jumlah bahan pembibitan yang disediakan	13 jenis	4.540.777.683	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.05.04.0003	Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian	DKPP, Taman Surya	Jumlah peserta pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian	125 orang	1.273.308.192	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.05.05	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian dan Perikanan Kelautan		Persentase pembudidaya yang omzetnya meningkat	64,00%	904.721.910	
1.2.2.05.05.0001	Promosi Pemasaran Produk Pertanian	Taman Kota dan ruang publik	Jumlah kegiatan promosi pemasaran produk pertanian yang dilaksanakan	67 kali	904.721.910	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.05.06	Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura		Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi	16,00%	2.574.586.248	
1.2.2.05.06.0001	Pembinaan Pemanfaatan Lahan Pekarangan	31 Kecamatan di Surabaya	Jumlah peserta pembinaan pemanfaatan lahan pekarangan	1100 orang	814.901.706	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.05.06.0002	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	Wilayah Kota Surabaya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura yang disediakan dan dipelihara	5 Jenis	1.759.684.542	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Fungsi Penunjang Urusan				1.474.576.208.018	
2.1	Fungsi Manajemen				845.710.730.007	
2.1.2	Non Pelayanan Dasar				845.710.730.007	
2.1.2.01	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				790.655.276.066	
2.1.2.01.01	Program Fasilitas Informasi dan Protokol DPRD		Persentase kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang terfasilitasi	100,00%	82.906.464.081	
2.1.2.01.01.0001	Fasilitasi Reses DPRD	Daerah Pemilihan masing masing anggota DPRD Kota Surabaya	Jumlah Fasilitasi Reses	3 kali	11.408.739.190	Sekretariat DPRD
2.1.2.01.01.0002	Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Lokasi Tujuan Kunjungan Kerja di Jawa Timur, luar Jawa Timur, luar negeri	Jumlah Kegiatan Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	185 kali	50.571.794.531	Sekretariat DPRD
2.1.2.01.01.0003	Penerimaan Studi Banding	Gedung DPRD Kota Surabaya	Jumlah studi banding yang difasilitasi	240 kali	2.710.942.930	Sekretariat DPRD
2.1.2.01.01.0004	Pengendalian Keamanan	Kantor DPRD Kota Surabaya	Jumlah kegiatan pengendalian keamanan yang dilaksanakan	264 kali	1.359.259.540	Sekretariat DPRD
2.1.2.01.01.0005	Publikasi Kegiatan DPRD	Kantor Sekretariat DPRD Kota Surabaya, media cetak, media on line, media radio, media televisi dan media majalah	Jumlah pelaksanaan publikasi kegiatan DPRD	5 media	16.855.727.890	Sekretariat DPRD
2.1.2.01.02	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	66.270.787.094	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.02.0001	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Asemrowo	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	139 Lembaga	871.714.286	Kec. Asemrowo
2.1.2.01.02.0002	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Asemrowo	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	145.748.606	Kec. Asemrowo
2.1.2.01.02.0003	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Benowo	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	183 Lembaga	1.113.225.000	Kec. Benowo
2.1.2.01.02.0004	Pengembangan Kampung Edukasi (Jamur, Anggrek dan Hidroponik)	Kecamatan Benowo	Pengembangan Kampung Edukasi	3 kali	88.271.040	Kec. Benowo
2.1.2.01.02.0005	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Benowo	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	120.795.320	Kec. Benowo
2.1.2.01.02.0006	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Bubutan	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	414 Lembaga	2.375.423.289	Kec. Bubutan
2.1.2.01.02.0007	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Bubutan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	67.976.832	Kec. Bubutan
2.1.2.01.02.0008	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Bulak	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	157 Lembaga	1.019.160.220	Kec. Bulak
2.1.2.01.02.0009	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Bulak	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	138.183.171	Kec. Bulak
2.1.2.01.02.0010	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Dukuh Pakis	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	195 Lembaga	1.199.240.000	Kec. Dukuh Pakis
2.1.2.01.02.0011	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Dukuh Pakis	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	168.198.600	Kec. Dukuh Pakis
2.1.2.01.02.0012	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Gayungan	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	197 Lembaga	1.164.664.000	Kec. Gayungan
2.1.2.01.02.0013	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Gayungan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	126.992.560	Kec. Gayungan
2.1.2.01.02.0014	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Genteng	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	364 Lembaga	2.080.635.000	Kec. Genteng
2.1.2.01.02.0015	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Genteng	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	72.643.420	Kec. Genteng
2.1.2.01.02.0016	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Gubeng	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	480 Lembaga	2.736.331.765	Kec. Gubeng
2.1.2.01.02.0017	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Gubeng	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	129.887.269	Kec. Gubeng
2.1.2.01.02.0018	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Gunung Anyar	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	215 Lembaga	1.293.728.000	Kec. Gunung Anyar

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.02.0019	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Gunung Anyar	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	121.206.920	Kec. Gunung Anyar
2.1.2.01.02.0020	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Jambangan	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	168 Lembaga	1.030.632.000	Kec. Jambangan
2.1.2.01.02.0021	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Jambangan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	59.148.000	Kec. Jambangan
2.1.2.01.02.0022	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Karangpilang	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	220 Lembaga	1.314.368.000	Kec. Karangpilang
2.1.2.01.02.0023	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Karangpilang	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	146.732.000	Kec. Karangpilang
2.1.2.01.02.0024	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Kenjeran	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	455 Lembaga	2.602.384.000	Kec. Kenjeran
2.1.2.01.02.0025	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Kenjeran	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	164.797.790	Kec. Kenjeran
2.1.2.01.02.0026	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Krembangan	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	430 Lembaga	2.525.970.000	Kec. Krembangan
2.1.2.01.02.0027	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Krembangan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	161.648.960	Kec. Krembangan
2.1.2.01.02.0028	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Lakarsantri	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	199 Lembaga	1.215.952.941	Kec. Lakarsantri
2.1.2.01.02.0029	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Lakarsantri	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	154.428.141	Kec. Lakarsantri
2.1.2.01.02.0030	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Mulyorejo	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	346 Lembaga	1.966.896.075	Kec. Mulyorejo
2.1.2.01.02.0031	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Mulyorejo	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	143.096.555	Kec. Mulyorejo
2.1.2.01.02.0032	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Pabean Cantian	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	377 Lembaga	2.165.703.412	Kec. Pabean Cantian
2.1.2.01.02.0033	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Pabean Cantian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	213.298.292	Kec. Pabean Cantian
2.1.2.01.02.0034	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Pakal	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	226 Lembaga	1.351.448.000	Kec. Pakal
2.1.2.01.02.0035	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Pakal	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	186.959.040	Kec. Pakal
2.1.2.01.02.0036	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Rungkut	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	488 Lembaga	2.792.181.176	Kec. Rungkut

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.02.0037	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Rungkut	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	159.206.096	Kec. Rungkut
2.1.2.01.02.0038	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Sambikerep	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	250 Lembaga	1.482.080.000	Kec. Sambikerep
2.1.2.01.02.0039	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Sambikerep	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	156.662.840	Kec. Sambikerep
2.1.2.01.02.0040	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Sawahan	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	627 Lembaga	3.646.058.332	Kec. Sawahan
2.1.2.01.02.0041	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Sawahan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	163.211.142	Kec. Sawahan
2.1.2.01.02.0042	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Semampir	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	636 Lembaga	3.595.428.053	Kec. Semampir
2.1.2.01.02.0043	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Semampir	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	165.239.963	Kec. Semampir
2.1.2.01.02.0044	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Simokerto	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	356 Lembaga	2.060.955.000	Kec. Simokerto
2.1.2.01.02.0045	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Simokerto	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	67.751.640	Kec. Simokerto
2.1.2.01.02.0046	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Sukolilo	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	439 Lembaga	2.555.145.679	Kec. Sukolilo
2.1.2.01.02.0047	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Sukolilo	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	129.546.756	Kec. Sukolilo
2.1.2.01.02.0048	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Sukomanunggal	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	323 Lembaga	1.859.847.251	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.01.02.0049	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Sukomanunggal	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	140.941.486	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.01.02.0050	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Tambaksari	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	748 Lembaga	4.216.086.316	Kec. Tambaksari
2.1.2.01.02.0051	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Tambaksari	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	127.226.316	Kec. Tambaksari
2.1.2.01.02.0052	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Tandes	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	371 Lembaga	2.193.677.647	Kec. Tandes
2.1.2.01.02.0053	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Tandes	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	143.831.563	Kec. Tandes
2.1.2.01.02.0054	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Tegalsari	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	366 Lembaga	2.130.585.000	Kec. Tegalsari

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.02.0055	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Tegalsari	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	76.579.800	Kec. Tegalsari
2.1.2.01.02.0056	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Tenggilis Mejoyo	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	185 Lembaga	1.103.832.000	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.1.2.01.02.0057	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Tenggilis Mejoyo	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	168.726.400	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.1.2.01.02.0058	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Wiyung	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	210 Lembaga	1.314.208.000	Kec. Wiyung
2.1.2.01.02.0059	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Wiyung	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	150.686.480	Kec. Wiyung
2.1.2.01.02.0060	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Wonocolo	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	278 Lembaga	1.639.425.000	Kec. Wonocolo
2.1.2.01.02.0061	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Wonocolo	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	140.738.980	Kec. Wonocolo
2.1.2.01.02.0062	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Wonokromo	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	574 Lembaga	3.295.397.647	Kec. Wonokromo
2.1.2.01.02.0063	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Wonokromo	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	158.042.027	Kec. Wonokromo
2.1.2.01.03	Program Fasilitas Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD		Persentase kegiatan peningkatan kapasitas Sekretariat DPRD yang terfasilitasi	100,00%	3.683.898.025	
2.1.2.01.03.0001	Fasilitas Peningkatan Kapasitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Wilayah Provinsi Jawa Timur dan luar Provinsi Jawa Timur	Jumlah kegiatan Fasilitas Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD	38 kali	3.683.898.025	Sekretariat DPRD
2.1.2.01.04	Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat		Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	17.317.313.956	
			Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%		
2.1.2.01.04.0001	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Asemrowo	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	16 Kali	167.908.006	Kec. Asemrowo
2.1.2.01.04.0002	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Asemrowo	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	92.289.206	Kec. Asemrowo
2.1.2.01.04.0003	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Kecamatan Asemrowo	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	14412 berkas	161.393.406	Kec. Asemrowo
2.1.2.01.04.0004	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Benowo	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	14 Kali	151.808.000	Kec. Benowo
2.1.2.01.04.0005	Pengumpulan, Verifikasi dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Benowo	Jumlah pelaksanaan pengumpulan, verifikasi, dan validasi data kesejahteraan rakyat	60 kali	105.470.100	Kec. Benowo
2.1.2.01.04.0006	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Kecamatan Benowo	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	22340 berkas	182.555.060	Kec. Benowo
2.1.2.01.04.0007	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Bubutan	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	22 Kali	244.047.687	Kec. Bubutan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.04.0008	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Bubutan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	128.028.507	Kec. Bubutan
2.1.2.01.04.0009	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Kecamatan Bubutan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	11250 berkas	302.228.009	Kec. Bubutan
2.1.2.01.04.0010	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Bulak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	32 Kali	163.704.557	Kec. Bulak
2.1.2.01.04.0011	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Bulak	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	91.181.657	Kec. Bulak
2.1.2.01.04.0012	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Kecamatan Bulak	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	11400 berkas	203.029.620	Kec. Bulak
2.1.2.01.04.0013	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Dukuh Pakis	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	20 Kali	180.529.360	Kec. Dukuh Pakis
2.1.2.01.04.0014	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Dukuh Pakis	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	120.922.560	Kec. Dukuh Pakis
2.1.2.01.04.0015	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Kecamatan Dukuh Pakis	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	12616 berkas	213.546.500	Kec. Dukuh Pakis
2.1.2.01.04.0016	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Gayungan	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	22 Kali	175.848.400	Kec. Gayungan
2.1.2.01.04.0017	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Gayungan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	88.501.840	Kec. Gayungan
2.1.2.01.04.0018	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Kecamatan Gayungan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	5858 berkas	190.808.920	Kec. Gayungan
2.1.2.01.04.0019	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Genteng	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	22 Kali	127.069.360	Kec. Genteng
2.1.2.01.04.0020	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Genteng	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	95.654.880	Kec. Genteng
2.1.2.01.04.0021	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Kecamatan Genteng	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	14463 berkas	253.259.740	Kec. Genteng
2.1.2.01.04.0022	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Gubeng	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	18 Kali	267.706.861	Kec. Gubeng
2.1.2.01.04.0023	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Gubeng	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	6 Kali	79.021.765	Kec. Gubeng
2.1.2.01.04.0024	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Kecamatan Gubeng	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	15397 berkas	304.027.765	Kec. Gubeng
2.1.2.01.04.0025	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Gunung Anyar	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	12 Kali	122.907.000	Kec. Gunung Anyar
2.1.2.01.04.0026	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Gunung Anyar	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	20 Kali	92.849.600	Kec. Gunung Anyar
2.1.2.01.04.0027	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Kecamatan Gunung Anyar	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	11226 berkas	191.134.340	Kec. Gunung Anyar
2.1.2.01.04.0028	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Jambangan	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	24 Kali	138.670.123	Kec. Jambangan
2.1.2.01.04.0029	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Jambangan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	93.148.800	Kec. Jambangan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.04.0030	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Kecamatan Jambangan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	12785 berkas	180.690.000	Kec. Jambangan
2.1.2.01.04.0031	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Karangpilang	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	38 Kali	165.948.040	Kec. Karangpilang
2.1.2.01.04.0032	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Karangpilang	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	80.348.620	Kec. Karangpilang
2.1.2.01.04.0033	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Kecamatan Karangpilang	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	11000 berkas	219.560.500	Kec. Karangpilang
2.1.2.01.04.0034	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Kenjeran	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	16 Kali	140.603.540	Kec. Kenjeran
2.1.2.01.04.0035	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Kenjeran	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	109.926.160	Kec. Kenjeran
2.1.2.01.04.0036	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Kecamatan Kenjeran	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	72000 berkas	230.134.570	Kec. Kenjeran
2.1.2.01.04.0037	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	5 Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	23 Kali	245.593.250	Kec. Krembangan
2.1.2.01.04.0038	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Krembangan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	128.179.030	Kec. Krembangan
2.1.2.01.04.0039	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Kecamatan Krembangan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	28440 berkas	295.231.730	Kec. Krembangan
2.1.2.01.04.0040	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Lakarsantri	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	19 Kali	224.043.381	Kec. Lakarsantri
2.1.2.01.04.0041	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Lakarsantri	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	100.961.261	Kec. Lakarsantri
2.1.2.01.04.0042	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Kecamatan Lakarsantri	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	19.605 berkas	210.509.721	Kec. Lakarsantri
2.1.2.01.04.0043	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Mulyorejo	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	16 Kali	109.353.635	Kec. Mulyorejo
2.1.2.01.04.0044	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Mulyorejo	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	91.114.235	Kec. Mulyorejo
2.1.2.01.04.0045	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Kecamatan Mulyorejo	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	16551 berkas	279.191.075	Kec. Mulyorejo
2.1.2.01.04.0046	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Pabean Cantian	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	20 Kali	244.409.334	Kec. Pabean Cantian
2.1.2.01.04.0047	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Pabean Cantian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	129.517.584	Kec. Pabean Cantian
2.1.2.01.04.0048	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Kecamatan Pabean Cantian	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	18209 berkas	270.246.412	Kec. Pabean Cantian
2.1.2.01.04.0049	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Pakal	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	10 Kali	127.640.850	Kec. Pakal
2.1.2.01.04.0050	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Pakal	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	76.761.560	Kec. Pakal
2.1.2.01.04.0051	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Kecamatan Pakal	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	15500 berkas	211.955.520	Kec. Pakal

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.04.0052	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Rungkut	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	18 Kali	146.566.376	Kec. Rungkut
2.1.2.01.04.0053	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Rungkut	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	107.415.176	Kec. Rungkut
2.1.2.01.04.0054	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Kecamatan Rungkut	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	19608 berkas	366.474.176	Kec. Rungkut
2.1.2.01.04.0055	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Sambikerep	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	20 Kali	216.508.600	Kec. Sambikerep
2.1.2.01.04.0056	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Sambikerep	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	97.327.200	Kec. Sambikerep
2.1.2.01.04.0057	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Kecamatan Sambikerep	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	9318 berkas	217.880.330	Kec. Sambikerep
2.1.2.01.04.0058	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Sawahan	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	16 Kali	239.758.653	Kec. Sawahan
2.1.2.01.04.0059	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Sawahan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	135.820.793	Kec. Sawahan
2.1.2.01.04.0060	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Kecamatan Sawahan	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	40320 berkas	468.426.252	Kec. Sawahan
2.1.2.01.04.0061	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Semampir	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	12 Kali	236.978.221	Kec. Semampir
2.1.2.01.04.0062	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Semampir	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	112.331.461	Kec. Semampir
2.1.2.01.04.0063	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Kecamatan Semampir	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	24931 berkas	370.428.053	Kec. Semampir
2.1.2.01.04.0064	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Simokerto	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	20 Kali	252.287.540	Kec. Simokerto
2.1.2.01.04.0065	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Simokerto	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	79.429.320	Kec. Simokerto
2.1.2.01.04.0066	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Kecamatan Simokerto	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	10977 berkas	244.107.000	Kec. Simokerto
2.1.2.01.04.0067	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Sukolilo	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	20 Kali	189.778.517	Kec. Sukolilo
2.1.2.01.04.0068	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Sukolilo	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	101.745.557	Kec. Sukolilo
2.1.2.01.04.0069	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Kecamatan Sukolilo	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	22442 berkas	331.841.179	Kec. Sukolilo
2.1.2.01.04.0070	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Sukomanunggal	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	42 Kali	196.659.383	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.01.04.0071	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Sukomanunggal	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	6 Kali	81.899.183	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.01.04.0072	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Kecamatan Sukomanunggal	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	3600 berkas	193.071.251	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.01.04.0073	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Tambaksari	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	22 Kali	224.517.996	Kec. Tambaksari

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.04.0074	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Tambaksari	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	86.781.276	Kec. Tambaksari
2.1.2.01.04.0075	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Kecamatan Tambaksari	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	39620 berkas	348.633.316	Kec. Tambaksari
2.1.2.01.04.0076	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Tandes	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	24 Kali	220.949.157	Kec. Tandes
2.1.2.01.04.0077	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Tandes	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	36 Kali	85.562.492	Kec. Tandes
2.1.2.01.04.0078	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Kecamatan Tandes	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	20944 berkas	359.943.667	Kec. Tandes
2.1.2.01.04.0079	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Tegalsari	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	21 Kali	178.695.540	Kec. Tegalsari
2.1.2.01.04.0080	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Tegalsari	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	97.342.560	Kec. Tegalsari
2.1.2.01.04.0081	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Kecamatan Tegalsari	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	14557 berkas	308.971.846	Kec. Tegalsari
2.1.2.01.04.0082	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Tenggilis Mejoyo	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	12 Kali	235.699.512	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.1.2.01.04.0083	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Tenggilis Mejoyo	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	114.267.320	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.1.2.01.04.0084	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Kecamatan Tenggilis Mejoyo	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	17850 berkas	175.596.300	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.1.2.01.04.0085	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Wiyung	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	25 Kali	193.017.660	Kec. Wiyung
2.1.2.01.04.0086	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Wiyung	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	116.463.975	Kec. Wiyung
2.1.2.01.04.0087	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Kecamatan Wiyung	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	7253 berkas	257.201.360	Kec. Wiyung
2.1.2.01.04.0088	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Wonocolo	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	20 Kali	171.522.500	Kec. Wonocolo
2.1.2.01.04.0089	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Wonocolo	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	60 Kali	92.425.000	Kec. Wonocolo
2.1.2.01.04.0090	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Kecamatan Wonocolo	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	18000 berkas	241.271.000	Kec. Wonocolo
2.1.2.01.04.0091	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Wonokromo	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	25 Kali	295.062.647	Kec. Wonokromo
2.1.2.01.04.0092	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Wonokromo	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat	48 Kali	144.350.047	Kec. Wonokromo
2.1.2.01.04.0093	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Kecamatan Wonokromo	Jumlah berkas kependudukan yang dilayani	24000 berkas	381.132.927	Kec. Wonokromo
2.1.2.01.05	Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah		Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	494.341.886.874	
2.1.2.01.05.0001	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Asem Rowo	Kelurahan Asem Rowo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	2.777.149.725	Kec. Asemrowo

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.05.0002	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Genting Kalianak	Kelurahan Genting Kalianak	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	1.446.398.006	Kec. Asemrowo
2.1.2.01.05.0003	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambak Sarioso	Kelurahan Tambak Sarioso	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	2.212.915.192	Kec. Asemrowo
2.1.2.01.05.0004	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	kecamatan asemrowo	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	288 kali	461.890.766	Kec. Asemrowo
2.1.2.01.05.0005	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Asemrowo	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	61.556.846	Kec. Asemrowo
2.1.2.01.05.0006	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kecamatan Asemrowo	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	5 Kali	63.651.586	Kec. Asemrowo
2.1.2.01.05.0007	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Asemrowo	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	61.934.116	Kec. Asemrowo
2.1.2.01.05.0008	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kandangan	Kelurahan Kandangan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	3.109.055.147	Kec. Benowo
2.1.2.01.05.0009	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Romokalisari	Kelurahan Romokalisari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	3 Lembaga	1.403.265.589	Kec. Benowo
2.1.2.01.05.0010	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sememi	Kelurahan Sememi	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	3.111.475.881	Kec. Benowo
2.1.2.01.05.0011	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambak Oso Wilangan	Kelurahan Tambak Oso Wilangan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	1.612.046.719	Kec. Benowo
2.1.2.01.05.0012	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Benowo	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	336 kali	537.393.240	Kec. Benowo
2.1.2.01.05.0013	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Benowo	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	59.995.320	Kec. Benowo
2.1.2.01.05.0014	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kecamatan Benowo	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	4 Kali	54.714.440	Kec. Benowo
2.1.2.01.05.0015	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Benowo	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	58.256.690	Kec. Benowo
2.1.2.01.05.0016	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Alun-alun Contong	Kelurahan Alun-alun Contong	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	2.191.029.042	Kec. Bubutan
2.1.2.01.05.0017	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bubutan	Kelurahan Bubutan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	3.057.138.095	Kec. Bubutan
2.1.2.01.05.0018	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gundih	Kelurahan Gundih	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	3.361.569.367	Kec. Bubutan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.05.0019	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jepara	Kelurahan Jepara	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	3.061.203.876	Kec. Bubutan
2.1.2.01.05.0020	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tembok Dukuh	Kelurahan Tembok Dukuh	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	12 Lembaga	3.361.523.888	Kec. Bubutan
2.1.2.01.05.0021	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Bubutan	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	539.354.503	Kec. Bubutan
2.1.2.01.05.0022	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Bubutan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	68.731.392	Kec. Bubutan
2.1.2.01.05.0023	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kecamatan Bubutan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	10 Kali	78.316.272	Kec. Bubutan
2.1.2.01.05.0024	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Bubutan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	47.151.832	Kec. Bubutan
2.1.2.01.05.0025	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bulak	Kelurahan Bulak	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	4.119.531.310	Kec. Bulak
2.1.2.01.05.0026	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedung Cowek	Kelurahan Kedung Cowek	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	3 Lembaga	3.372.220.828	Kec. Bulak
2.1.2.01.05.0027	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kenjeran	Kelurahan Kenjeran	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	3 Lembaga	4.372.158.963	Kec. Bulak
2.1.2.01.05.0028	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukolilo Baru	Kelurahan Sukolilo Baru	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	4.020.563.468	Kec. Bulak
2.1.2.01.05.0029	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Bulak	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	336 kali	588.363.635	Kec. Bulak
2.1.2.01.05.0030	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Bulak	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	71.566.932	Kec. Bulak
2.1.2.01.05.0031	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kecamatan Bulak	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	6 Kali	82.115.542	Kec. Bulak
2.1.2.01.05.0032	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Bulak	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 Lembaga / Kelurahan	78.154.512	Kec. Bulak
2.1.2.01.05.0033	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dukuh Kupang	Kelurahan Dukuh Kupang	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	2.746.356.225	Kec. Dukuh Pakis
2.1.2.01.05.0034	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dukuh Pakis	Kelurahan Dukuh Pakis	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5 Lembaga	2.479.756.684	Kec. Dukuh Pakis
2.1.2.01.05.0035	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunung Sari	Kelurahan Gunung Sari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	2.477.928.451	Kec. Dukuh Pakis

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.05.0036	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pradah Kalikendal	Kelurahan Pradah Kalikendal	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	3.112.830.286	Kec. Dukuh Pakis
2.1.2.01.05.0037	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Dukuh Pakis	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	411.319.940	Kec. Dukuh Pakis
2.1.2.01.05.0038	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Dukuh Pakis	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	87.004.000	Kec. Dukuh Pakis
2.1.2.01.05.0039	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kecamatan Dukuh Pakis	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	4 Kali	82.326.900	Kec. Dukuh Pakis
2.1.2.01.05.0040	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Dukuh Pakis	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	67.436.006	Kec. Dukuh Pakis
2.1.2.01.05.0041	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Duku Menanggal	Kelurahan Duku Menanggal	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	2.873.539.772	Kec. Gayungan
2.1.2.01.05.0042	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gayungan	Kelurahan Gayungan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	2.492.252.536	Kec. Gayungan
2.1.2.01.05.0043	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ketintang	Kelurahan Ketintang	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	2.801.075.888	Kec. Gayungan
2.1.2.01.05.0044	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Menanggal	Kelurahan Menanggal	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	2.169.071.289	Kec. Gayungan
2.1.2.01.05.0045	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Gayungan	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	300 kali	494.241.890	Kec. Gayungan
2.1.2.01.05.0046	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Gayungan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 kali	60.633.890	Kec. Gayungan
2.1.2.01.05.0047	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kecamatan Gayungan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	6 Kali	74.260.380	Kec. Gayungan
2.1.2.01.05.0048	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kota Surabaya	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	64.074.650	Kec. Gayungan
2.1.2.01.05.0049	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Embong Kaliasin	Kelurahan Embong Kaliasin	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	3.175.640.863	Kec. Genteng
2.1.2.01.05.0050	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Genteng	Kelurahan Genteng	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	4.374.501.799	Kec. Genteng
2.1.2.01.05.0051	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kapasari	Kelurahan Kapasari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	12 Lembaga	3.733.477.466	Kec. Genteng
2.1.2.01.05.0052	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ketabang	Kelurahan Ketabang	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	4.360.465.233	Kec. Genteng

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.05.0053	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Peneleh	Kelurahan Peneleh	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	15 Lembaga	4.373.710.459	Kec. Genteng
2.1.2.01.05.0054	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Genteng	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	348 kali	540.752.640	Kec. Genteng
2.1.2.01.05.0055	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Genteng	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	60.953.280	Kec. Genteng
2.1.2.01.05.0056	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kecamatan Genteng	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	12 Kali	75.251.280	Kec. Genteng
2.1.2.01.05.0057	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Genteng	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	69.805.120	Kec. Genteng
2.1.2.01.05.0058	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Airlangga	Kelurahan Airlangga	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	2.767.068.569	Kec. Gubeng
2.1.2.01.05.0059	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baratajaya	Kelurahan Baratajaya	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	2.538.812.872	Kec. Gubeng
2.1.2.01.05.0060	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gubeng	Kelurahan Gubeng	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	3 Lembaga	1.318.784.873	Kec. Gubeng
2.1.2.01.05.0061	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kertajaya	Kelurahan Kertajaya	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	3.668.122.275	Kec. Gubeng
2.1.2.01.05.0062	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mojo	Kelurahan Mojo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	12 Lembaga	4.267.056.478	Kec. Gubeng
2.1.2.01.05.0063	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pucang Sewu	Kelurahan Pucang Sewu	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	2.788.497.931	Kec. Gubeng
2.1.2.01.05.0064	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Gubeng	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	545.222.845	Kec. Gubeng
2.1.2.01.05.0065	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Gubeng	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	61.256.313	Kec. Gubeng
2.1.2.01.05.0066	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kecamatan Gubeng	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	6 Kali	66.090.861	Kec. Gubeng
2.1.2.01.05.0067	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Gubeng	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	6 lembaga	70.910.029	Kec. Gubeng
2.1.2.01.05.0068	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunung Anyar	Kelurahan Gunung Anyar	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	2.771.894.109	Kec. Gunung Anyar
2.1.2.01.05.0069	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunung Anyar Tambak	Kelurahan Gunung Anyar Tambak	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	2.778.257.054	Kec. Gunung Anyar

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.05.0070	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rungkut Menanggal	Kelurahan Rungkut Menanggal	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	1.574.259.913	Kec. Gunung Anyar
2.1.2.01.05.0071	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rungkut Tengah	Kelurahan Rungkut Tengah	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	3.070.155.976	Kec. Gunung Anyar
2.1.2.01.05.0072	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Gunung Anyar	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	336 kali	363.132.440	Kec. Gunung Anyar
2.1.2.01.05.0073	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Gunung Anyar	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	68.585.840	Kec. Gunung Anyar
2.1.2.01.05.0074	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kecamatan Gunung Anyar	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	3 Kali	65.621.680	Kec. Gunung Anyar
2.1.2.01.05.0075	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Gunung Anyar	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	67.511.970	Kec. Gunung Anyar
2.1.2.01.05.0076	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jambangan	Kelurahan Jambangan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	2.461.509.068	Kec. Jambangan
2.1.2.01.05.0077	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karah	Kelurahan Karah	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	12 Lembaga	3.971.202.928	Kec. Jambangan
2.1.2.01.05.0078	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kebonsari	Kelurahan Kebonsari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	3 Lembaga	1.416.093.163	Kec. Jambangan
2.1.2.01.05.0079	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pagesangan	Kelurahan Pagesangan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	1.571.222.946	Kec. Jambangan
2.1.2.01.05.0080	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Jambangan	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	535.305.600	Kec. Jambangan
2.1.2.01.05.0081	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Jambangan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	52.596.000	Kec. Jambangan
2.1.2.01.05.0082	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kecamatan Jambangan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	3 Kali	72.132.000	Kec. Jambangan
2.1.2.01.05.0083	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Jambangan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	61.862.000	Kec. Jambangan
2.1.2.01.05.0084	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karang Pilang	Kelurahan Karang Pilang	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	1.542.836.324	Kec. Karangpilang
2.1.2.01.05.0085	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kebraon	Kelurahan Kebraon	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	12 Lembaga	4.275.440.229	Kec. Karangpilang
2.1.2.01.05.0086	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedurus	Kelurahan Kedurus	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	3.090.295.690	Kec. Karangpilang

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.05.0087	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Waru Gunung	Kelurahan Waru Gunung	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	3 Lembaga	1.267.053.027	Kec. Karangpilang
2.1.2.01.05.0088	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Karangpilang	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	312 kali	540.867.800	Kec. Karangpilang
2.1.2.01.05.0089	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Karangpilang	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	56.136.000	Kec. Karangpilang
2.1.2.01.05.0090	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kecamatan Karangpilang	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	9 Kali	74.251.150	Kec. Karangpilang
2.1.2.01.05.0091	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Karangpilang	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	68.297.220	Kec. Karangpilang
2.1.2.01.05.0092	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bulak Banteng	Kelurahan Bulak Banteng	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	2.774.407.487	Kec. Kenjeran
2.1.2.01.05.0093	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidotopo Wetan	Kelurahan Sidotopo Wetan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	2 Lembaga	4.572.391.448	Kec. Kenjeran
2.1.2.01.05.0094	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambak Wedi	Kelurahan Tambak Wedi	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5 Lembaga	1.577.291.937	Kec. Kenjeran
2.1.2.01.05.0095	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanah Kali Kedinding	Kelurahan Tanah Kali Kedinding	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	4.035.475.179	Kec. Kenjeran
2.1.2.01.05.0096	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Kenjeran	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	264 kali	575.515.600	Kec. Kenjeran
2.1.2.01.05.0097	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Kenjeran	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	69.061.840	Kec. Kenjeran
2.1.2.01.05.0098	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kecamatan Kenjeran	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	6 Kali	69.182.860	Kec. Kenjeran
2.1.2.01.05.0099	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Kenjeran	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	68.434.040	Kec. Kenjeran
2.1.2.01.05.0100	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dupak	Kelurahan Dupak	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5 Lembaga	1.876.405.043	Kec. Krembangan
2.1.2.01.05.0101	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kemayoran	Kelurahan Kemayoran	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	3.073.750.921	Kec. Krembangan
2.1.2.01.05.0102	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Krembangan Selatan	Kelurahan Krembangan Selatan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	13 Lembaga	4.311.161.329	Kec. Krembangan
2.1.2.01.05.0103	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Morokrembangan	Kelurahan Morokrembangan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	2.400.911.121	Kec. Krembangan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.05.0104	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Perak Barat	Kelurahan Perak Barat	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	2.772.688.057	Kec. Krembangan
2.1.2.01.05.0105	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Krembangan	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	424.876.870	Kec. Krembangan
2.1.2.01.05.0106	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Wilayah Kecamatan Krembangan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali/Tahun	96.368.920	Kec. Krembangan
2.1.2.01.05.0107	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kantor Kecamatan Krembangan dan RW/RT di Wilayah Kelurahan se Kecamatan Krembangan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	12 Kali	91.409.920	Kec. Krembangan
2.1.2.01.05.0108	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Krembangan dan Kelurahan se Kecamatan Krembangan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kelurahan dan Kecamatan	6 lembaga	116.679.370	Kec. Krembangan
2.1.2.01.05.0109	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bangkingan	Kelurahan Bangkingan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5 Lembaga	1.862.850.255	Kec. Lakarsantri
2.1.2.01.05.0110	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jeruk	Kelurahan Jeruk	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	3 Lembaga	1.466.852.047	Kec. Lakarsantri
2.1.2.01.05.0111	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lakarsantri	Kelurahan Lakarsantri	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	1.568.841.208	Kec. Lakarsantri
2.1.2.01.05.0112	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lidah Kulon	Kelurahan Lidah Kulon	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	2.769.830.607	Kec. Lakarsantri
2.1.2.01.05.0113	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lidah Wetan	Kelurahan Lidah Wetan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5 Lembaga	2.470.257.095	Kec. Lakarsantri
2.1.2.01.05.0114	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumurwelut	Kelurahan Sumurwelut	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	3 Lembaga	1.493.352.873	Kec. Lakarsantri
2.1.2.01.05.0115	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Lakarsantri	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	516.947.181	Kec. Lakarsantri
2.1.2.01.05.0116	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Lakarsantri	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	66.861.661	Kec. Lakarsantri
2.1.2.01.05.0117	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kecamatan Lakarsantri	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	6 Kali	84.062.101	Kec. Lakarsantri
2.1.2.01.05.0118	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Lakarsantri	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	83.827.591	Kec. Lakarsantri
2.1.2.01.05.0119	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dukuh Sutorejo	Kelurahan Dukuh Sutorejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	3.072.568.001	Kec. Mulyorejo
2.1.2.01.05.0120	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kaliudan	Kelurahan Kaliudan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	2.795.463.455	Kec. Mulyorejo

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.05.0121	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kalisari	Kelurahan Kalisari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	2.795.578.109	Kec. Mulyorejo
2.1.2.01.05.0122	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kejawen Putih Tambak	Kelurahan Kejawen Putih Tambak	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	1.567.560.007	Kec. Mulyorejo
2.1.2.01.05.0123	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manyar Sabrangan	Kelurahan Manyar Sabrangan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	13 Lembaga	4.005.389.166	Kec. Mulyorejo
2.1.2.01.05.0124	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mulyorejo	Kelurahan Mulyorejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	3.640.877.693	Kec. Mulyorejo
2.1.2.01.05.0125	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Mulyorejo	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	408 kali	515.256.235	Kec. Mulyorejo
2.1.2.01.05.0126	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Mulyorejo	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	71.251.325	Kec. Mulyorejo
2.1.2.01.05.0127	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kecamatan Mulyorejo	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	6 Kali	72.639.785	Kec. Mulyorejo
2.1.2.01.05.0128	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Mulyorejo	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	62.903.435	Kec. Mulyorejo
2.1.2.01.05.0129	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bongkaran	Kelurahan Bongkaran	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	3.361.235.288	Kec. Pabean Cantian
2.1.2.01.05.0130	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Krembangan Utara	Kelurahan Krembangan Utara	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	3.368.396.582	Kec. Pabean Cantian
2.1.2.01.05.0131	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nyamplungan	Kelurahan Nyamplungan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	3.985.850.012	Kec. Pabean Cantian
2.1.2.01.05.0132	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Perak Timur	Kelurahan Perak Timur	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	3.298.221.654	Kec. Pabean Cantian
2.1.2.01.05.0133	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Perak Utara	Kelurahan Perak Utara	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	3.103.921.625	Kec. Pabean Cantian
2.1.2.01.05.0134	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Pabean Cantian	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	294.226.365	Kec. Pabean Cantian
2.1.2.01.05.0135	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Pabean Cantian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	76.759.191	Kec. Pabean Cantian
2.1.2.01.05.0136	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kecamatan Pabean Cantian	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	6 Kali	79.396.191	Kec. Pabean Cantian
2.1.2.01.05.0137	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Pabean Cantian	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	71.258.701	Kec. Pabean Cantian

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.05.0138	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Babat Jerawat	Kelurahan Babat Jerawat	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	4.550.784.847	Kec. Pakal
2.1.2.01.05.0139	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Benowo	Kelurahan Benowo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5 Lembaga	2.214.681.608	Kec. Pakal
2.1.2.01.05.0140	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakal	Kelurahan Pakal	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	2.174.850.404	Kec. Pakal
2.1.2.01.05.0141	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumber Rejo	Kelurahan Sumber Rejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	2.815.397.603	Kec. Pakal
2.1.2.01.05.0142	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Pakal	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	336 kali	460.007.010	Kec. Pakal
2.1.2.01.05.0143	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Pakal	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	74.992.320	Kec. Pakal
2.1.2.01.05.0144	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kecamatan Pakal	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	6 Kali	79.137.500	Kec. Pakal
2.1.2.01.05.0145	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Pakal	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	79.496.280	Kec. Pakal
2.1.2.01.05.0146	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kalirungkut	Kelurahan Kalirungkut	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	13 Lembaga	4.871.815.934	Kec. Rungkut
2.1.2.01.05.0147	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedung Baruk	Kelurahan Kedung Baruk	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	3.407.062.046	Kec. Rungkut
2.1.2.01.05.0148	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Medokan Ayu	Kelurahan Medokan Ayu	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	15 Lembaga	4.877.115.658	Kec. Rungkut
2.1.2.01.05.0149	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Penjaringan Sari	Kelurahan Penjaringan Sari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	15 Lembaga	3.974.689.496	Kec. Rungkut
2.1.2.01.05.0150	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rungkut Kidul	Kelurahan Rungkut Kidul	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	12 Lembaga	3.908.231.391	Kec. Rungkut
2.1.2.01.05.0151	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonorejo	Kelurahan Wonorejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	3.397.657.767	Kec. Rungkut
2.1.2.01.05.0152	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Rungkut	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	336 kali	476.495.406	Kec. Rungkut
2.1.2.01.05.0153	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Rungkut	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	86.721.176	Kec. Rungkut
2.1.2.01.05.0154	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kecamatan Rungkut	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	2 Kali	82.258.486	Kec. Rungkut

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.05.0155	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Rungkut	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	88.419.840	Kec. Rungkut
2.1.2.01.05.0156	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bringin	Kelurahan Bringin	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	1.479.862.772	Kec. Sambikerep
2.1.2.01.05.0157	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lontar	Kelurahan Lontar	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	12 Lembaga	5.175.677.486	Kec. Sambikerep
2.1.2.01.05.0158	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Made	Kelurahan Made	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	2.481.900.186	Kec. Sambikerep
2.1.2.01.05.0159	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sambikerep	Kelurahan Sambikerep	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	3.681.801.260	Kec. Sambikerep
2.1.2.01.05.0160	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Sambikerep	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	312 kali	520.068.260	Kec. Sambikerep
2.1.2.01.05.0161	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Sambikerep	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	70.823.320	Kec. Sambikerep
2.1.2.01.05.0162	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kecamatan Sambikerep	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	3 Kali	75.043.000	Kec. Sambikerep
2.1.2.01.05.0163	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Sambikerep	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	79.165.140	Kec. Sambikerep
2.1.2.01.05.0164	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banyu Urip	Kelurahan Banyu Urip	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	3.072.332.186	Kec. Sawahan
2.1.2.01.05.0165	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kupang Krajan	Kelurahan Kupang Krajan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	2.451.565.690	Kec. Sawahan
2.1.2.01.05.0166	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakis	Kelurahan Pakis	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	12 Lembaga	3.379.387.061	Kec. Sawahan
2.1.2.01.05.0167	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Petemon	Kelurahan Petemon	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	18 Lembaga	5.782.156.271	Kec. Sawahan
2.1.2.01.05.0168	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Putat Jaya	Kelurahan Putat Jaya	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	14 Lembaga	4.661.880.882	Kec. Sawahan
2.1.2.01.05.0169	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sawahan	Kelurahan Sawahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	3.616.213.876	Kec. Sawahan
2.1.2.01.05.0170	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Sawahan	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	656.485.049	Kec. Sawahan
2.1.2.01.05.0171	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	66.800.641	Kec. Sawahan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.05.0172	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kecamatan Sawahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	12 Kali	100.104.501	Kec. Sawahan
2.1.2.01.05.0173	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	6 lembaga	65.034.871	Kec. Sawahan
2.1.2.01.05.0174	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ampel	Kelurahan Ampel	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	17 Lembaga	5.457.155.475	Kec. Semampir
2.1.2.01.05.0175	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pegirian	Kelurahan Pegirian	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	3.639.784.588	Kec. Semampir
2.1.2.01.05.0176	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidotopo	Kelurahan Sidotopo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	3.467.043.376	Kec. Semampir
2.1.2.01.05.0177	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ujung	Kelurahan Ujung	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	14 Lembaga	4.563.559.809	Kec. Semampir
2.1.2.01.05.0178	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonokusumo	Kelurahan Wonokusumo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	16 Lembaga	4.843.128.944	Kec. Semampir
2.1.2.01.05.0179	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Semampir	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	312 kali	611.948.074	Kec. Semampir
2.1.2.01.05.0180	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Semampir	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	67.167.845	Kec. Semampir
2.1.2.01.05.0181	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kecamatan Semampir	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	5 Kali	82.259.785	Kec. Semampir
2.1.2.01.05.0182	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Semampir	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	71.676.085	Kec. Semampir
2.1.2.01.05.0183	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kapasan	Kelurahan Kapasan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	2.933.993.330	Kec. Simokerto
2.1.2.01.05.0184	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidodadi	Kelurahan Sidodadi	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	2.433.397.332	Kec. Simokerto
2.1.2.01.05.0185	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simokerto	Kelurahan Simokerto	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	14 Lembaga	4.464.826.110	Kec. Simokerto
2.1.2.01.05.0186	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simolawang	Kelurahan Simolawang	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	2.725.101.347	Kec. Simokerto
2.1.2.01.05.0187	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambakrejo	Kelurahan Tambakrejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	3.369.276.591	Kec. Simokerto
2.1.2.01.05.0188	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Simokerto	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	312 kali	553.307.400	Kec. Simokerto

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.05.0189	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Simokerto	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	120 Kali	114.301.560	Kec. Simokerto
2.1.2.01.05.0190	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kecamatan Simokerto	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	10 Kali	81.123.700	Kec. Simokerto
2.1.2.01.05.0191	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Simokerto	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	64.749.360	Kec. Simokerto
2.1.2.01.05.0192	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gebang Putih	Kelurahan Gebang Putih	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	2.468.540.221	Kec. Sukolilo
2.1.2.01.05.0193	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keputih	Kelurahan Keputih	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5 Lembaga	3.061.265.096	Kec. Sukolilo
2.1.2.01.05.0194	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klampis Ngasem	Kelurahan Klampis Ngasem	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	3.046.903.061	Kec. Sukolilo
2.1.2.01.05.0195	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Medokan Semampir	Kelurahan Medokan Semampir	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	3.075.787.495	Kec. Sukolilo
2.1.2.01.05.0196	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Menur Pumpungan	Kelurahan Menur Pumpungan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	2.868.505.092	Kec. Sukolilo
2.1.2.01.05.0197	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nginden Jangkungan	Kelurahan Nginden Jangkungan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	3.688.950.200	Kec. Sukolilo
2.1.2.01.05.0198	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semolowaru	Kelurahan Semolowaru	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	13 Lembaga	3.879.086.231	Kec. Sukolilo
2.1.2.01.05.0199	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Sukolilo	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	336 kali	619.439.548	Kec. Sukolilo
2.1.2.01.05.0200	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Sukolilo	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	56.279.300	Kec. Sukolilo
2.1.2.01.05.0201	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kecamatan Sukolilo	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	4 Kali	53.535.540	Kec. Sukolilo
2.1.2.01.05.0202	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Sukolilo	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	67.276.090	Kec. Sukolilo
2.1.2.01.05.0203	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Putat Gede	Kelurahan Putat Gede	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	1.559.069.262	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.01.05.0204	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simomulyo	Kelurahan Simomulyo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	2.462.888.741	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.01.05.0205	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simomulyo Baru	Kelurahan Simomulyo Baru	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	3.363.203.765	Kec. Sukomanunggal

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.05.0206	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sonokwijenan	Kelurahan Sonokwijenan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	2.159.040.665	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.01.05.0207	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukomanunggal	Kelurahan Sukomanunggal	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5 Lembaga	1.857.852.949	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.01.05.0208	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanjungsari	Kelurahan Tanjungsari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	1.651.321.875	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.01.05.0209	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Sukomanunggal	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	288 kali	673.931.394	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.01.05.0210	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Sukomanunggal	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	44 Kali	53.558.503	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.01.05.0211	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kecamatan Sukomanunggal	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	4 Kali	53.448.503	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.01.05.0212	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Sukomanunggal	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	6 lembaga	61.091.003	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.01.05.0213	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dukuh Setro	Kelurahan Dukuh Setro	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5 Lembaga	2.423.995.765	Kec. Tambaksari
2.1.2.01.05.0214	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gading	Kelurahan Gading	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	3.640.260.849	Kec. Tambaksari
2.1.2.01.05.0215	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kapasmadya Baru	Kelurahan Kapasmadya Baru	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	2.762.655.541	Kec. Tambaksari
2.1.2.01.05.0216	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pacarkeling	Kelurahan Pacarkeling	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	3.972.541.374	Kec. Tambaksari
2.1.2.01.05.0217	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pacarkembang	Kelurahan Pacarkembang	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	3.672.797.971	Kec. Tambaksari
2.1.2.01.05.0218	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ploso	Kelurahan Ploso	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	3.673.581.497	Kec. Tambaksari
2.1.2.01.05.0219	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rangkah	Kelurahan Rangkah	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	3.065.570.790	Kec. Tambaksari
2.1.2.01.05.0220	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambaksari	Kelurahan Tambaksari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	3.034.591.120	Kec. Tambaksari
2.1.2.01.05.0221	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Tambaksari	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	568.125.076	Kec. Tambaksari
2.1.2.01.05.0222	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Tambaksari	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	60.593.276	Kec. Tambaksari

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.05.0223	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kecamatan Tambaksari	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	8 Kali	83.739.856	Kec. Tambaksari
2.1.2.01.05.0224	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Tambaksari	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	76.628.106	Kec. Tambaksari
2.1.2.01.05.0225	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Balongsari	Kelurahan Balongsari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	2.479.904.090	Kec. Tandes
2.1.2.01.05.0226	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banjar Sugihan	Kelurahan Banjar Sugihan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	1.593.724.976	Kec. Tandes
2.1.2.01.05.0227	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karang Poh	Kelurahan Karang Poh	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	3.042.254.492	Kec. Tandes
2.1.2.01.05.0228	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manukan Kulon	Kelurahan Manukan Kulon	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	14 Lembaga	4.907.895.291	Kec. Tandes
2.1.2.01.05.0229	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manukan wetan	Kelurahan Manukan wetan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	2.515.674.779	Kec. Tandes
2.1.2.01.05.0230	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tandes	Kelurahan Tandes	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	3.077.508.305	Kec. Tandes
2.1.2.01.05.0231	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Tandes	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	324 kali	484.177.227	Kec. Tandes
2.1.2.01.05.0232	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Tandes	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	88.461.675	Kec. Tandes
2.1.2.01.05.0233	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kecamatan Tandes	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	5 Kali	91.242.643	Kec. Tandes
2.1.2.01.05.0234	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Tandes	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	6 lembaga	94.495.859	Kec. Tandes
2.1.2.01.05.0235	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dr. Soetomo	Kelurahan Dr. Soetomo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	14 Lembaga	4.365.722.905	Kec. Tegalsari
2.1.2.01.05.0236	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedungdoro	Kelurahan Kedungdoro	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	3.902.997.007	Kec. Tegalsari
2.1.2.01.05.0237	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keputran	Kelurahan Keputran	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	2.370.311.824	Kec. Tegalsari
2.1.2.01.05.0238	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalsari	Kelurahan Tegalsari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	2.884.421.206	Kec. Tegalsari
2.1.2.01.05.0239	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonorejo	Kelurahan Wonorejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	3.413.151.878	Kec. Tegalsari

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.05.0240	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Tegalsari	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	264 kali	552.926.560	Kec. Tegalsari
2.1.2.01.05.0241	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Tegalsari	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	78.394.500	Kec. Tegalsari
2.1.2.01.05.0242	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kecamatan Tegalsari	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	10 Kali	72.803.200	Kec. Tegalsari
2.1.2.01.05.0243	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Tegalsari	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	61.091.100	Kec. Tegalsari
2.1.2.01.05.0244	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kendangsari	Kelurahan Kendangsari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5 Lembaga	1.865.332.375	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.1.2.01.05.0245	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kutisari	Kelurahan Kutisari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	2.253.018.803	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.1.2.01.05.0246	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panjang Jiwo	Kelurahan Panjang Jiwo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	2.795.409.138	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.1.2.01.05.0247	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tenggilis Mejoyo	Kelurahan Tenggilis Mejoyo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	2.133.171.482	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.1.2.01.05.0248	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Tenggilis Mejoyo	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	556.771.440	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.1.2.01.05.0249	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Tenggilis Mejoyo	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	12 Kali	100.350.200	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.1.2.01.05.0250	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kecamatan Tenggilis Mejoyo	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	12 Kali	94.322.400	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.1.2.01.05.0251	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Tenggilis Mejoyo	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	86.353.800	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.1.2.01.05.0252	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Babatan	Kelurahan Babatan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	3.724.888.323	Kec. Wiyung
2.1.2.01.05.0253	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Balas Klumprik	Kelurahan Balas Klumprik	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	2.783.837.077	Kec. Wiyung
2.1.2.01.05.0254	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jajar Tunggal	Kelurahan Jajar Tunggal	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5 Lembaga	2.148.315.776	Kec. Wiyung
2.1.2.01.05.0255	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wiyung	Kelurahan Wiyung	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	3.081.196.692	Kec. Wiyung
2.1.2.01.05.0256	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Wiyung	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	402.329.680	Kec. Wiyung
2.1.2.01.05.0257	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Wiyung	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	72.440.536	Kec. Wiyung

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.05.0258	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kecamatan Wiyung	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	12 Kali	99.287.440	Kec. Wiyung
2.1.2.01.05.0259	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Wiyung	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	78.387.084	Kec. Wiyung
2.1.2.01.05.0260	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bendul Merisi	Kelurahan Bendul Merisi	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	13 Lembaga	3.980.712.981	Kec. Wonocolo
2.1.2.01.05.0261	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari	Kelurahan Jemur Wonosari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	3.449.776.375	Kec. Wonocolo
2.1.2.01.05.0262	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Margorejo	Kelurahan Margorejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	2.904.888.957	Kec. Wonocolo
2.1.2.01.05.0263	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidosermo	Kelurahan Sidosermo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	2.778.077.527	Kec. Wonocolo
2.1.2.01.05.0264	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Siwalankerto	Kelurahan Siwalankerto	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	2.178.328.490	Kec. Wonocolo
2.1.2.01.05.0265	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Wonocolo	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	300 kali	488.034.000	Kec. Wonocolo
2.1.2.01.05.0266	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Wilayah Kecamatan Wonocolo	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi dan Validasi Data Sarana	48 Kali	71.358.440	Kec. Wonocolo
2.1.2.01.05.0267	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kecamatan Wonocolo	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	10 kali	69.677.500	Kec. Wonocolo
2.1.2.01.05.0268	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Wonocolo	Jumlah Lembaga Peserta dari seluruh Kelurahan di wilayah Kecamatan Wonocolo	4 Lembaga	79.371.960	Kec. Wonocolo
2.1.2.01.05.0269	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Darmo	Kelurahan Darmo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	3.207.960.563	Kec. Wonokromo
2.1.2.01.05.0270	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jagir	Kelurahan Jagir	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	3.658.589.075	Kec. Wonokromo
2.1.2.01.05.0271	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngagel	Kelurahan Ngagel	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5 Lembaga	2.389.520.418	Kec. Wonokromo
2.1.2.01.05.0272	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngagel Rejo	Kelurahan Ngagel Rejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	12 Lembaga	4.363.606.413	Kec. Wonokromo
2.1.2.01.05.0273	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sawunggaling	Kelurahan Sawunggaling	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	12 Lembaga	4.023.320.700	Kec. Wonokromo
2.1.2.01.05.0274	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonokromo	Kelurahan Wonokromo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	2.698.150.793	Kec. Wonokromo

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.05.0275	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Wonokromo	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	814.152.127	Kec. Wonokromo
2.1.2.01.05.0276	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Wonokromo	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	48 Kali	93.138.387	Kec. Wonokromo
2.1.2.01.05.0277	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kecamatan Wonokromo	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	10 Kali	79.581.647	Kec. Wonokromo
2.1.2.01.05.0278	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Wonokromo	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	67.244.867	Kec. Wonokromo
2.1.2.01.06	Program Fasilitasi Rapat dan Perundang-Undangan DPRD		Persentase kegiatan DPRD terkait rapat dan perundang-undangan yang terfasilitasi	100,00%	7.797.727.280	
2.1.2.01.06.0001	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kantor DPRD Kota Surabaya	Jumlah Raperda usul prakarsa DPRD yang dibahas	6 dokumen	2.195.802.220	Sekretariat DPRD
2.1.2.01.06.0002	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Kantor DPRD Kota Surabaya	Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan Dewan yang diselenggarakan	930 kali	2.477.004.960	Sekretariat DPRD
2.1.2.01.06.0003	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Paripurna	Kantor DPRD Kota Surabaya	jumlah rapat paripurna yang diselenggarakan	45 kali	1.853.108.300	Sekretariat DPRD
2.1.2.01.06.0004	Penyusunan Dokumen Kajian/Telaah terhadap Kebijakan Daerah	Kantor DPRD Kota Surabaya	Jumlah dokumen kajian/telaah terhadap kebijakan daerah yang disusun	10 dokumen	1.271.811.800	Sekretariat DPRD
2.1.2.01.07	Program Pembinaan Peningkatan Kinerja BUMD		Persentase BUMD yang berhasil dibina	67,00%	1.162.871.681	
2.1.2.01.07.0001	Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Kantor Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah serta Kantor 9 BUMD	Jumlah BUMD yang dimonitor dan dievaluasi	9 BUMD	1.162.871.681	Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah
2.1.2.01.08	Program Penataan Daerah Otonom		Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100,00%	5.043.441.055	
			Persentase nama rupabumi yang memenuhi syarat untuk diajukan pembakuan	85,65%		
			Persentase pendataan batas wilayah kecamatan	45,16%		
			Persentase permasalahan tanah yang terfasilitasi	60,00%		
2.1.2.01.08.0001	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta 31 kecamatan	Jumlah dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2 dokumen	727.452.195	Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
2.1.2.01.08.0002	Evaluasi Perkembangan Kelurahan	Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta kelurahan	Jumlah pelaksanaan evaluasi perkembangan kelurahan	1 kali	400.420.523	Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
2.1.2.01.08.0003	Fasilitasi Permasalahan Pertanahan Kota Surabaya	Kota Surabaya	Jumlah fasilitasi permasalahan pertanahan Kota Surabaya	720 kali	421.808.507	Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
2.1.2.01.08.0004	Pembakuan Nama Rupabumi di Kota Surabaya	Kelurahan dan Kecamatan di Kota Surabaya	Jumlah objek rupabumi yang berpotensi diajukan pembakuan	115 objek	409.517.401	Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
2.1.2.01.08.0005	Pembinaan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan	Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Gedung pertemuan di Kota Surabaya	Jumlah Pembinaan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan	16 kali	1.548.118.730	Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
2.1.2.01.08.0006	Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan	Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta kecamatan dan kelurahan	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang mengikuti pembinaan administrasi umum pemerintahan	185 lembaga	640.400.362	Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.08.0007	Penataan, Pembinaan dan Penegasan Wilayah Kecamatan	Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta kecamatan dan kelurahan	Jumlah dokumen Penataan, Pembinaan dan Penegasan Wilayah Kecamatan	1 dokumen	895.723.337	Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
2.1.2.01.09	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		Persentase instansi yang memiliki POS sesuai probis	74,29%	2.309.210.098	
			Persentase instansi yang probisnya telah menggambarkan keterhubungan antar proses	50,00%		
			Persentase kinerja unit penyelenggara pelayanan yang minimal mutu pelayanannya kategori baik	70,00%		
2.1.2.01.09.0001	Monitoring Kinerja Pelayanan Publik	Kantor Bagian Organisasi dan Perangkat Daerah terkait	Jumlah penyelenggara pelayanan publik yang dilakukan monitoring	254 lembaga	267.525.930	Bagian Organisasi
2.1.2.01.09.0002	Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Penyusunan Standar Kompetensi	Kantor Bagian Organisasi	Jumlah dokumen pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta standar kompetensi yang disusun	1 dokumen	423.411.859	Bagian Organisasi
2.1.2.01.09.0003	Pelaksanaan Analisis Kelembagaan	Kantor Bagian Organisasi	Jumlah dokumen pelaksanaan analisis kelembagaan yang disusun	1 dokumen	329.822.001	Bagian Organisasi
2.1.2.01.09.0004	Pembinaan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah POS perangkat daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi	155 POS	560.821.508	Bagian Organisasi
2.1.2.01.09.0005	Survey Kepuasan Masyarakat	Unit Pelayanan di Kota Surabaya, Gedung pertemuan milik Pemerintah Kota Surabaya atau gedung pertemuan lainnya	Jumlah unit layanan publik yang dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat	254 lembaga	727.628.800	Bagian Organisasi
2.1.2.01.10	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan		Persentase produk hukum yang disebarluaskan	100,00%	5.546.035.566	
			Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	100,00%		
2.1.2.01.10.0001	Evaluasi Produk Hukum Daerah	Kantor Bagian Hukum Kota Surabaya	Jumlah dokumen hasil evaluasi produk hukum daerah	12 dokumen	269.430.000	Bagian Hukum
2.1.2.01.10.0002	Penanganan Permasalahan Bidang Hukum	Kantor Bagian Hukum Kota Surabaya	Jumlah permasalahan hukum yang ditangani	65 permasalahan hukum	2.790.992.620	Bagian Hukum
2.1.2.01.10.0003	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah	Kantor Bagian Hukum Kota Surabaya	Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun	70 rancangan produk hukum	1.384.008.392	Bagian Hukum
2.1.2.01.10.0004	Publikasi Produk Hukum	Kantor Bagian Hukum, Gedung milik Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah produk hukum yang dipublikasi	70 produk hukum	1.101.604.554	Bagian Hukum
2.1.2.01.11	Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar	100,00%	14.268.801.353	
2.1.2.01.11.0001	Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Lokasi Aktivitas Walikota dan Wakil Walikota	Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	14.268.801.353	Bagian Umum Dan Protokol
2.1.2.01.12	Program Pengelolaan Bangunan Gedung		Persentase bangunan gedung yang dipelihara	100,00%	18.887.283.706	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.12.0001	Pengawasan dan Pengelolaan Bangunan Sewa	Bangunan sewa yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya, antara lain : Gedung Serba Guna "Arief Rahman Hakim", Gedung Wanita Candra Kencana, Gedung Siola, Jl. Walikota Mustajab No. 84 (PT. BPR SAU), dan Jl. Tunjungan No. 3 (Eks Gedung Tunjungan Center Lantai 6), dan 19 lokasi bangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)	Jumlah bangunan yang diawasi dan dikelola	24 lokasi	18.887.283.706	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
2.1.2.01.13	Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat		Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan	100,00%	1.212.153.659	
2.1.2.01.13.0001	Evaluasi bidang kesejahteraan masyarakat	Kota Surabaya	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi bidang kesejahteraan masyarakat yang disusun	2 dokumen	500.671.751	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
2.1.2.01.13.0002	Evaluasi Bidang Ketahanan Masyarakat	Kota Surabaya	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi bidang ketahanan masyarakat yang disusun	1 dokumen	282.260.121	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
2.1.2.01.13.0003	Evaluasi Bidang Pengembangan Potensi Masyarakat	Kota Surabaya	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi Bidang Pengembangan Potensi Masyarakat yang disusun	1 dokumen	429.221.787	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
2.1.2.01.14	Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup Kehumasan		Persentase berita positif Pemerintah Kota Surabaya yang terinformasikan kepada masyarakat	85,00%	11.525.688.792	
2.1.2.01.14.0001	Pelaksanaan Komunikasi Informasi Media Massa	Kantor Bagian Hubungan Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Komunikasi Media Massa	2033 kali	10.276.797.318	Bagian Hubungan Masyarakat
2.1.2.01.14.0002	Penyelenggaraan Komunikasi Kehumasan	Kantor Bagian Hubungan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Komunikasi Kehumasan	89 kali	537.590.732	Bagian Hubungan Masyarakat
2.1.2.01.14.0003	Penyusunan Dokumentasi, Data dan Informasi	Kantor Bagian Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumentasi, Data dan Informasi disusun	9 dokumen	711.300.742	Bagian Hubungan Masyarakat
2.1.2.01.15	Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup Pembangunan		Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya $\geq$ 76%	94,00%	4.795.815.551	
2.1.2.01.15.0001	Evaluasi Kinerja APBD Perangkat Daerah	Gedung pertemuan/rapat di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja APBD yang disusun	16 dokumen	871.050.240	Bagian Administrasi Pembangunan
2.1.2.01.15.0002	Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan	Gedung pertemuan/rapat di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring kegiatan pembangunannya	72 lembaga	1.068.694.070	Bagian Administrasi Pembangunan
2.1.2.01.15.0003	Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan	Kantor Bagian Administrasi Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah sistem informasi manajemen sumber daya pemerintahan yang dikembangkan dan dipelihara	6 sistem	1.727.979.561	Bagian Administrasi Pembangunan
2.1.2.01.15.0004	Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD	Kantor Bagian Administrasi Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah dokumen bahan RAPBD dan perubahan APBD yang disusun	6 dokumen	1.128.091.680	Bagian Administrasi Pembangunan
2.1.2.01.16	Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah lingkup Pengelolaan Aset		Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik	88,00%	44.117.959.977	
			Persentase pemanfaatan aset	96,00%		
			Persentase sistem informasi pemerintah kota surabaya yang diintegrasikan dengan sistem informasi barang daerah	80,00%		

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.16.0001	Evaluasi dan Penghapusan Aset/Barang Daerah	Kota Surabaya	Jumlah berkas penetapan Penghapusan Aset/Barang Daerah	6 Berkas	3.119.504.214	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
2.1.2.01.16.0002	Monitoring Pencatatan Barang Milik Daerah	Kantor Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset	Jumlah perangkat daerah yang pencatatan Barang Milik Daerah nya dimonitor	72 lembaga	2.294.445.276	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
2.1.2.01.16.0003	Pelayanan Unit Layanan Pengadaan	Kantor Unit Layanan Pengadaan	Jumlah dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan	900 dokumen	6.099.491.872	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
2.1.2.01.16.0004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara dan diurus administrasinya	2346 unit	7.317.527.130	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
2.1.2.01.16.0005	Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Kantor Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan	8891 stel	3.458.515.810	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
2.1.2.01.16.0006	Pengadaan Sarana Kedinasan	Kantor Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset	Jumlah sarana kedinasan yang diadakan	402 unit	21.828.475.675	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
2.1.2.01.17	Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup Perekonomian		Persentase kajian/rekomendasi terkait perekonomian yang termanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan	100,00%	723.169.840	
2.1.2.01.17.0001	Analisa dan Evaluasi Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah	Kantor Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah	Jumlah Laporan Analisa Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah	12 laporan	500.790.200	Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah
2.1.2.01.17.0002	Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Mikro	Kantor Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Mikro	4 dokumen	222.379.640	Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah
2.1.2.01.18	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja		Persentase instansi yang nilai akuntabilitas kinerjanya minimal BB	84,72%	339.691.859	
2.1.2.01.18.0001	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Kantor Bagian Organisasi dan PD terkait	Jumlah dokumen pendampingan penyusunan laporan kinerja dan monitoring implementasi reformasi birokrasi yang disusun	2 dokumen	339.691.859	Bagian Organisasi
2.1.2.01.19	Program Peningkatan Kerjasama Daerah		Persentase MoU kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti	95,00%	8.405.075.619	
			Persentase MoU kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti	87,50%		
			Persentase MoU kerjasama yang dievaluasi	85,00%		
2.1.2.01.19.0001	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Kantor Bagian Administrasi Kerjasama dan/atau di Kota lokasi mitra kerjasama Pemerintah Kota Surabaya, serta lokasi lain yang dirancang oleh pengurus Asosiasi Kerjasama Pemerintah Daerah	Jumlah mitra kerjasama dalam negeri yang difasilitasi	16 lembaga	884.148.787	Bagian Administrasi Kerjasama
2.1.2.01.19.0002	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	di wilayah Indonesia dan di wilayah mitra kerja sama luar negeri	Jumlah mitra kerjasama luar negeri yang difasilitasi	10 lembaga	1.413.799.325	Bagian Administrasi Kerjasama
2.1.2.01.19.0003	Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan ke Luar Negeri	kota/lembaga di luar negeri	Jumlah delegasi pendidikan yang difasilitasi	63 orang	5.434.609.328	Bagian Administrasi Kerjasama
2.1.2.01.19.0004	Monitoring dan evaluasi kerjasama daerah	Kantor Bagian Administrasi Kerjasama	Jumlah mitra kerjasama daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi	29 lembaga	672.518.179	Bagian Administrasi Kerjasama
2.1.2.02	Keuangan				33.648.635.084	
2.1.2.02.01	Program Penagihan Pajak Daerah		Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar	84,50%	4.584.028.527	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.02.01.0001	Penagihan, Pelayanan Pengurangan, Angsuran, Restitusi, Kompensasi, Keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir	Kantor UPTB 1, UPTB 2, UPTB 3, UPTB 4, UPTB 5 dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Jumlah berkas Penagihan dan Pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir yang ditagih dan dilayani	6852 berkas	1.008.084.211	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.01.0002	Penagihan, Pelayanan Pengurangan, Angsuran, Restitusi, Kompensasi, Keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Air Tanah	Kantor UPTB 1, UPTB 2, UPTB 3, UPTB 4, UPTB 5 dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Air Tanah yang ditagih dan dilayani	4376 berkas	806.976.212	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.01.0003	Penagihan, Pelayanan Pengurangan, Angsuran, Restitusi, Kompensasi, Keberatan dan Penghapusan Piutang PBB dan BPHTB	Kantor UPTB 1, UPTB 2, UPTB 3, UPTB 4, UPTB 5 dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang PBB dan BPHTB yang ditagih dan dilayani	195392 berkas	2.768.968.104	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan	90,00%	4.044.714.215	
2.1.2.02.02.0001	Pelayanan Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran	Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Jumlah Berkas Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang dilayani	72000 berkas	2.471.718.201	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.02.0002	Pengelolaan dan Penatausahaan Penerimaan serta Pengeluaran Daerah	Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Jumlah dokumen Penerimaan serta Pengeluaran Daerah yang dikelola	245 dokumen	421.879.270	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.02.0003	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	22 dokumen	1.151.116.744	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.03	Program Peningkatan Pendataan dan Penetapan Objek Pajak Daerah		Persentase objek pajak daerah yang telah ditetapkan	84,00%	23.582.611.782	
2.1.2.02.03.0001	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah	Kantor UPTB 1, UPTB 2, UPTB 3, UPTB 4, UPTB 5 dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Jumlah Objek Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi	34900 objek pajak	4.863.931.694	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.03.0002	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir	Kantor UPTB 1, UPTB 2, UPTB 3, UPTB 4, UPTB 5 dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Jumlah Objek Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi	6555 objek pajak	7.791.466.784	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.03.0003	Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB	Kantor UPTB 1, UPTB 2, UPTB 3, UPTB 4, UPTB 5 dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Jumlah Objek PBB dan BPHTB hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi	695022 objek pajak	10.927.213.304	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.04	Program Perencanaan Anggaran Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran	75,00%	1.437.280.560	
2.1.2.02.04.0001	Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah	Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah	4 dokumen	322.734.116	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.04.0002	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perimbangan Keuangan Daerah	Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perimbangan Keuangan Daerah yang disusun	4 dokumen	167.954.963	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.04.0003	Penyusunan APBD, Perubahan APBD, RAPBD dan Anggaran Kas	Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Jumlah dokumen APBD, Perubahan APBD, RAPBD dan Anggaran Kas yang disusun	5 Laporan	946.591.481	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.03	Pengawasan				3.781.383.260	

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.03.01	Program Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		Persentase Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang ditingkatkan kapabilitasnya	100,00%	694.160.380	
2.1.2.03.01.0001	Inventarisasi dan Monitoring Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah dokumen inventarisasi dan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan	12 dokumen	275.630.280	Inspektorat
2.1.2.03.01.0002	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Inspektorat	Jumlah pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP	50 kali	179.750.620	Inspektorat
2.1.2.03.01.0003	Survey Penilaian Integritas (SPI)	Inspektorat	Jumlah Laporan Survey Penilaian Integritas (SPI)	1 Laporan	238.779.480	Inspektorat
2.1.2.03.02	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah I		Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah I	100,00%	823.623.170	
			Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah I	100,00%		
2.1.2.03.02.0001	Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I	Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan	35 lembaga	412.811.800	Inspektorat
2.1.2.03.02.0002	Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah I	Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang merupakan wilayah Irban I	Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja	18 lembaga	410.811.370	Inspektorat
2.1.2.03.03	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah II		Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah II	100,00%	749.015.270	
			Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah II	100,00%		
2.1.2.03.03.0001	Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II	Perangkat Daerah / Sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang merupakan wilayah kerja Irban II	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan	35 lembaga	376.723.900	Inspektorat
2.1.2.03.03.0002	Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah II	Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang merupakan wilayah Irban II	Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja	18 lembaga	372.291.370	Inspektorat
2.1.2.03.04	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah III		Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah III	100,00%	794.145.270	
			Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah III	100,00%		
2.1.2.03.04.0001	Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III	Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang merupakan wilayah Irban III	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan	35 lembaga	407.813.900	Inspektorat
2.1.2.03.04.0002	Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah III	Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang merupakan wilayah Irban III	Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja	18 lembaga	386.331.370	Inspektorat
2.1.2.03.05	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah IV		Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah IV	100,00%	720.439.170	
			Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah IV	100,00%		
2.1.2.03.05.0001	Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektur Pembantu Wilayah IV	Perangkat Daerah/Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang merupakan Wilayah Kerja Irban 4	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan	35 lembaga	361.219.800	Inspektorat
2.1.2.03.05.0002	Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah IV	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang merupakan wilayah kerja Irban IV	Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja	18 lembaga	359.219.370	Inspektorat

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.04	Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan				17.625.435.597	
2.1.2.04.01	Program Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan		Persentase rekomendasi penelitian, pengembangan dan evaluasi yang ditindaklanjuti	100,00%	1.448.473.380	
			Tingkat capaian keberhasilan kegiatan di aspek output	99,00%		
2.1.2.04.01.0001	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah	72 PD	709.844.265	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.04.01.0002	Penelitian dan Pengembangan Inovasi Pembangunan	Bappeko	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi	4 dokumen	738.629.115	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.04.02	Program Pengembangan Data dan Informasi		Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan	100,00%	1.424.314.518	
2.1.2.04.02.0001	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Jumlah data urusan yang dikelola	17 data urusan	1.424.314.518	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.04.03	Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100,00%	5.062.906.267	
2.1.2.04.03.0001	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah	kantor BPKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	36.190.260	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.04.03.0002	Penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan dan pajak daerah	kantor BPKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah yang disusun	5 dokumen	854.096.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.04.03.0003	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	214.866.900	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.04.03.0004	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kantor Bagian Umum Dan Protokol	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	832.436.880	Bagian Umum Dan Protokol
2.1.2.04.03.0005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	248.279.266	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.1.2.04.03.0006	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kantor Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	688.840.138	Dinas Kesehatan
2.1.2.04.03.0007	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	548.512.300	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
2.1.2.04.03.0008	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kantor Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	693.460.788	Dinas Pendidikan
2.1.2.04.03.0009	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	397.922.675	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
2.1.2.04.03.0010	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kantor Inspektorat	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	355.565.700	Inspektorat
2.1.2.04.03.0011	Reviu Dokumen Pelaporan Kinerja Tingkat Kota	Inspektorat Kota Surabaya	Jumlah dokumen pelaporan kinerja tingkat kota yang direviu	2 dokumen	140.130.900	Inspektorat

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.04.03.0012	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kantor RSUD Bhakti Dharma Husada	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	24.999.900	RSUD Bhakti Dharma Husada
2.1.2.04.03.0013	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kantor RSUD Dr. Mohamad Soewandie	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	27.604.560	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
2.1.2.04.04	Program Perencanaan Kota		Persentase penyusunan rencana induk sektoral	92,86%	2.127.817.581	
2.1.2.04.04.0001	Penyusunan Perencanaan Induk Sektoral Transportasi dan Drainase	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Induk Sektoral Transportasi dan Drainase	1 dokumen	1.172.977.265	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.04.04.0002	Penyusunan Perencanaan Tata Ruang Kota dan Pertanahan	Kota Surabaya	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang kota dan pertanahan	1 dokumen	954.840.316	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.04.05	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100,00%	1.385.976.613	
2.1.2.04.05.0001	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Jumlah dokumen rencana dan anggaran rencana pembangunan daerah yang disusun	9 dokumen	1.385.976.613	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.04.06	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		Persentase perencanaan pembangunan ekonomi yang diimplementasikan di dokumen perencanaan	80,00%	2.423.165.041	
2.1.2.04.06.0001	Analisa Kinerja Indikator Ekonomi Daerah	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Kinerja Indikator Ekonomi yang disusun	6 dokumen	699.014.529	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.04.06.0002	Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Kepariwisata dan Pertanian	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Kepariwisata dan Pertanian yang disusun	2 dokumen	520.194.296	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.04.06.0003	Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Perdagangan dan Ketenagakerjaan	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Perdagangan dan Ketenagakerjaan yang disusun	2 dokumen	543.392.291	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.04.06.0004	Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pendapatan Daerah yang disusun	2 dokumen	660.563.925	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.04.07	Program Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah		Persentase perencanaan pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang diimplementasikan	80,00%	1.852.713.606	
2.1.2.04.07.0001	Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Infrastruktur Kota	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Infrastruktur Kota	1 dokumen	978.656.537	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.04.07.0002	Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Kependudukan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	Kota Surabaya	Jumlah dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Kependudukan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	1 dokumen	874.057.069	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.04.08	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan		Persentase perencanaan pembangunan sosial dan pemerintahan yang diimplementasikan di dokumen perencanaan	80,00%	1.900.068.591	
2.1.2.04.08.0001	Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Forum Kota Sehat	Kecamatan, Puskesmas, lokasi-lokasi tertentu terkait Forum Kota Sehat di Kota Surabaya	Jumlah pelaksanaan kegiatan Forum Kota Sehat yang difasilitasi	12 kali	685.666.656	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.04.08.0002	Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Kesejahteraan Rakyat	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya / Ruang pertemuan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah dokumen kajian pendukung perencanaan kesejahteraan rakyat	1 dokumen	574.456.072	Badan Perencanaan Pembangunan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.04.08.0003	Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya / ruang pertemuan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah dokumen kajian pendukung perencanaan tata kelola pemerintahan yang disusun	2 dokumen	639.945.863	Badan Perencanaan Pembangunan
2.2	Unsur Manajemen				628.865.478.011	
2.2.2	Non Pelayanan Dasar				628.865.478.011	
2.2.2.01	Sarana dan Prasarana				615.863.803.802	
2.2.2.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87,00 %	522.034.818.478	
2.2.2.01.01.0001	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.565.962.527	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0002	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.178.452.083	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
2.2.2.01.01.0003	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.041.129.333	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
2.2.2.01.01.0004	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	7.131.223.274	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.2.2.01.01.0005	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.573.716.453	Badan Perencanaan Pembangunan
2.2.2.01.01.0006	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Bagian Administrasi Kerjasama	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.294.436.931	Bagian Administrasi Kerjasama
2.2.2.01.01.0007	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	990.144.637	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
2.2.2.01.01.0008	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Bagian Administrasi Pembangunan	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	894.233.217	Bagian Administrasi Pembangunan
2.2.2.01.01.0009	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	675.463.518	Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
2.2.2.01.01.0010	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	423.957.435	Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah
2.2.2.01.01.0011	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Bagian Hubungan Masyarakat	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.752.325.875	Bagian Hubungan Masyarakat
2.2.2.01.01.0012	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Bagian Hukum	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	668.952.008	Bagian Hukum
2.2.2.01.01.0013	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.717.175.144	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
2.2.2.01.01.0014	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Bagian Organisasi	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	236.219.527	Bagian Organisasi
2.2.2.01.01.0015	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Bagian Umum Dan Protokol	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	72.950.602.199	Bagian Umum Dan Protokol
2.2.2.01.01.0016	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	8.414.791.079	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
2.2.2.01.01.0017	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	11.600.443.208	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.2.2.01.01.0018	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	3.216.260.728	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
2.2.2.01.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	6.438.070.461	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.2.2.01.01.0020	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Dinas Kesehatan	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	113.987.182.263	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.2.2.01.01.0021	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	3.907.074.026	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.2.2.01.01.0022	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.194.740.429	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.2.2.01.01.0023	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.369.664.146	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.2.2.01.01.0024	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.196.809.895	Dinas Lingkungan Hidup
2.2.2.01.01.0025	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	31.757.339.660	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
2.2.2.01.01.0026	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Dinas Pemadam Kebakaran	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	3.922.566.904	Dinas Pemadam Kebakaran
2.2.2.01.01.0027	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.845.540.091	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.2.2.01.01.0028	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Dinas Pendidikan	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	13.228.789.223	Dinas Pendidikan
2.2.2.01.01.0029	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	3.257.506.194	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
2.2.2.01.01.0030	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	4.175.863.652	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.2.2.01.01.0031	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Dinas Perdagangan	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	4.396.624.445	Dinas Perdagangan
2.2.2.01.01.0032	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Dinas Perhubungan	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	12.023.019.107	Dinas Perhubungan
2.2.2.01.01.0033	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.899.739.839	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.2.2.01.01.0034	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	8.834.856.816	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
2.2.2.01.01.0035	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Dinas Sosial	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	5.098.627.371	Dinas Sosial
2.2.2.01.01.0036	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Dinas Tenaga Kerja	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.319.216.084	Dinas Tenaga Kerja
2.2.2.01.01.0037	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Inspektorat	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.473.490.367	Inspektorat
2.2.2.01.01.0038	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Asemrowo	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	963.596.275	Kec. Asemrowo
2.2.2.01.01.0039	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Benowo	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.288.729.501	Kec. Benowo
2.2.2.01.01.0040	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Bubutan	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.246.288.715	Kec. Bubutan
2.2.2.01.01.0041	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Bulak	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.460.559.128	Kec. Bulak
2.2.2.01.01.0042	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Dukuh Pakis	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.112.906.604	Kec. Dukuh Pakis
2.2.2.01.01.0043	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Gayungan	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.507.592.216	Kec. Gayungan
2.2.2.01.01.0044	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Genteng	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.507.047.369	Kec. Genteng

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.2.2.01.01.0045	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Gubeng	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.697.865.846	Kec. Gubeng
2.2.2.01.01.0046	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Gunung Anyar	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.238.958.603	Kec. Gunung Anyar
2.2.2.01.01.0047	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Jambangan	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.142.296.179	Kec. Jambangan
2.2.2.01.01.0048	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Karangpilang	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.067.373.420	Kec. Karangpilang
2.2.2.01.01.0049	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Kenjeran	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.577.255.226	Kec. Kenjeran
2.2.2.01.01.0050	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	kantor kecamatan krembangan	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.824.767.086	Kec. Krembangan
2.2.2.01.01.0051	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Lakarsantri	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.122.318.436	Kec. Lakarsantri
2.2.2.01.01.0052	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Mulyorejo	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.169.032.337	Kec. Mulyorejo
2.2.2.01.01.0053	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Pabean Cantian	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.618.958.725	Kec. Pabean Cantian
2.2.2.01.01.0054	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Pakal	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.446.995.351	Kec. Pakal
2.2.2.01.01.0055	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Rungkut	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.873.614.948	Kec. Rungkut
2.2.2.01.01.0056	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Sambikerep	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.247.949.268	Kec. Sambikerep
2.2.2.01.01.0057	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Sawahan	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.303.925.219	Kec. Sawahan
2.2.2.01.01.0058	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Semampir	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.996.602.104	Kec. Semampir
2.2.2.01.01.0059	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Simokerto	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.197.285.708	Kec. Simokerto
2.2.2.01.01.0060	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Sukolilo	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.123.439.618	Kec. Sukolilo
2.2.2.01.01.0061	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Sukomanunggal	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.539.757.209	Kec. Sukomanunggal
2.2.2.01.01.0062	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Tambaksari	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.244.214.213	Kec. Tambaksari
2.2.2.01.01.0063	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Tandes	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.400.199.885	Kec. Tandes
2.2.2.01.01.0064	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Tegalsari	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.211.390.715	Kec. Tegalsari
2.2.2.01.01.0065	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kecamatan Tenggilis Mejoyo	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.331.952.645	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.2.2.01.01.0066	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Wiyung	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.372.804.865	Kec. Wiyung
2.2.2.01.01.0067	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Wonocolo	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.555.353.418	Kec. Wonocolo
2.2.2.01.01.0068	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Wonokromo	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.538.683.433	Kec. Wonokromo
2.2.2.01.01.0069	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor RSUD Bhakti Dharma Husada	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	35.526.021.756	RSUD Bhakti Dharma Husada
2.2.2.01.01.0070	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor RSUD Dr. Mohamad Soewandie	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	68.391.149.768	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
2.2.2.01.01.0071	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.605.890.215	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.2.2.01.01.0072	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Sekretariat DPRD	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	22.929.832.325	Sekretariat DPRD
2.2.2.01.02	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan		Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	93.828.985.324	
			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%		
2.2.2.01.02.0001	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	432.362.697	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.02.0002	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	303.421.490	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
2.2.2.01.02.0003	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	854.598.685	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
2.2.2.01.02.0004	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	2.256.073.433	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.2.2.01.02.0005	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	484.103.003	Badan Perencanaan Pembangunan
2.2.2.01.02.0006	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Bagian Administrasi Kerjasama	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	258.832.897	Bagian Administrasi Kerjasama
2.2.2.01.02.0007	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	147.700.145	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
2.2.2.01.02.0008	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Bagian Administrasi Pembangunan	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	1.559.948.825	Bagian Administrasi Pembangunan
2.2.2.01.02.0009	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	281.095.284	Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
2.2.2.01.02.0010	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	190.001.000	Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah
2.2.2.01.02.0011	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Bagian Hubungan Masyarakat	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	471.126.935	Bagian Hubungan Masyarakat
2.2.2.01.02.0012	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Bagian Hukum	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	285.012.300	Bagian Hukum
2.2.2.01.02.0013	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	806.596.950	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
2.2.2.01.02.0014	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Bagian Organisasi	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	149.993.040	Bagian Organisasi
2.2.2.01.02.0015	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kantor Bagian Umum Dan Protokol	Persentase Kelayakan dan Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran	100%	4.924.920.595	Bagian Umum Dan Protokol
2.2.2.01.02.0016	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	2.012.263.170	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
2.2.2.01.02.0017	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	745.777.207	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.2.2.01.02.0018	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	602.412.420	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
2.2.2.01.02.0019	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	786.949.377	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.2.2.01.02.0020	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Dinas Kesehatan	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	6.641.756.310	Dinas Kesehatan
2.2.2.01.02.0021	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	1.766.594.588	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.2.2.01.02.0022	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	1.357.813.853	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.2.2.01.02.0023	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	865.291.076	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.2.2.01.02.0024	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	428.052.165	Dinas Lingkungan Hidup
2.2.2.01.02.0025	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	4.818.358.328	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
2.2.2.01.02.0026	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Dinas Pemadam Kebakaran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	1.339.626.126	Dinas Pemadam Kebakaran
2.2.2.01.02.0027	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	430.724.070	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.2.2.01.02.0028	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Dinas Pendidikan	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	1.978.633.172	Dinas Pendidikan
2.2.2.01.02.0029	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	1.061.661.882	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
2.2.2.01.02.0030	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	1.035.201.467	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.2.2.01.02.0031	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Dinas Perdagangan	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	1.471.069.472	Dinas Perdagangan
2.2.2.01.02.0032	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Dinas Perhubungan	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	7.167.066.134	Dinas Perhubungan
2.2.2.01.02.0033	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	719.893.460	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.2.2.01.02.0034	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	1.642.354.691	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
2.2.2.01.02.0035	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Dinas Sosial	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	982.669.546	Dinas Sosial
2.2.2.01.02.0036	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Dinas Tenaga Kerja	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	458.783.350	Dinas Tenaga Kerja
2.2.2.01.02.0037	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Inspektorat	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	497.335.395	Inspektorat
2.2.2.01.02.0038	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Asemrowo	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	258.169.886	Kec. Asemrowo
2.2.2.01.02.0039	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Benowo	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	298.745.184	Kec. Benowo
2.2.2.01.02.0040	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Bubutan	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	248.501.989	Kec. Bubutan
2.2.2.01.02.0041	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Bulak	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	289.198.730	Kec. Bulak
2.2.2.01.02.0042	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Dukuh Pakis	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	264.104.648	Kec. Dukuh Pakis
2.2.2.01.02.0043	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Gayungan	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	283.235.800	Kec. Gayungan
2.2.2.01.02.0044	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Genteng	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	253.490.250	Kec. Genteng
2.2.2.01.02.0045	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Gubeng	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	608.471.819	Kec. Gubeng

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.2.2.01.02.0046	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Gunung Anyar	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	245.866.800	Kec. Gunung Anyar
2.2.2.01.02.0047	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Jambangan	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	290.322.400	Kec. Jambangan
2.2.2.01.02.0048	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Karangpilang	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	212.920.600	Kec. Karangpilang
2.2.2.01.02.0049	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Kenjeran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	267.872.800	Kec. Kenjeran
2.2.2.01.02.0050	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kecamatan Krembangan	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	553.510.800	Kec. Krembangan
2.2.2.01.02.0051	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Lakarsantri	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	233.543.691	Kec. Lakarsantri
2.2.2.01.02.0052	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Mulyorejo	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	315.735.085	Kec. Mulyorejo
2.2.2.01.02.0053	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Pabean Cantian	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	272.272.468	Kec. Pabean Cantian
2.2.2.01.02.0054	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Pakal	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	234.838.600	Kec. Pakal
2.2.2.01.02.0055	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Rungkut	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	250.239.601	Kec. Rungkut
2.2.2.01.02.0056	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Sambikerep	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	222.152.125	Kec. Sambikerep
2.2.2.01.02.0057	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Sawahan	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	279.641.290	Kec. Sawahan
2.2.2.01.02.0058	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Semampir	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	312.273.294	Kec. Semampir
2.2.2.01.02.0059	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Simokerto	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	268.245.950	Kec. Simokerto
2.2.2.01.02.0060	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Sukolilo	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	327.387.672	Kec. Sukolilo
2.2.2.01.02.0061	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Sukomanunggal	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	245.972.533	Kec. Sukomanunggal
2.2.2.01.02.0062	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Tambaksari	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	359.828.716	Kec. Tambaksari
2.2.2.01.02.0063	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Tandes	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	311.760.147	Kec. Tandes
2.2.2.01.02.0064	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Tegalsari	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	339.913.200	Kec. Tegalsari
2.2.2.01.02.0065	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kecamatan Tenggilis Mejoyo	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	261.340.150	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.2.2.01.02.0066	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Wiyung	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	227.329.300	Kec. Wiyung
2.2.2.01.02.0067	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Wonocolo	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	278.543.400	Kec. Wonocolo
2.2.2.01.02.0068	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Wonokromo	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	301.397.423	Kec. Wonokromo
2.2.2.01.02.0069	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor RSUD Bhakti Dharma Husada	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	6.800.291.744	RSUD Bhakti Dharma Husada
2.2.2.01.02.0070	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor RSUD Dr. Mohamad Soewandie	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	16.974.722.067	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
2.2.2.01.02.0071	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	2.290.667.618	Satuan Polisi Pamong Praja
2.2.2.01.02.0072	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Sekretariat DPRD	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	6.430.403.006	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.2.2.02	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan				13.001.674.209	
2.2.2.02.01	Program Pengembangan dan Penilaian Kinerja Pegawai		Persentase pegawai yang difasilitasi penilaian kinerja	100,00%	4.187.998.064	
2.2.2.02.01.0001	Pengelolaan Data Pegawai	BKD	Jumlah data pegawai yang dikelola	8326 data	430.233.027	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.02.01.0002	Pengembangan Wawasan Aparatur	BKD	Jumlah aparatur yang dikembangkan wawasannya	268 orang	1.412.780.000	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.02.01.0003	Penilaian Kinerja Pegawai	BKD	Jumlah pegawai yang dinilai kinerjanya	6954 orang	683.262.598	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.02.01.0004	Seleksi Penerimaan Calon PNS	surabaya	Jumlah tahapan seleksi penerimaan Calon PNS	4 tahap	1.661.722.439	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.02.02	Program Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM		Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	50,03%	6.317.639.957	
			Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural	65,06%		
2.2.2.02.02.0001	Pelaksanaan Assesment Centre	BKD	Jumlah pelaksanaan assesment pegawai	5 kali	429.696.400	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.02.02.0002	Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Fungsional dan Sosial Kultural	BKD	Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi fungsional dan sosial kultural	2 jenis	901.456.920	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.02.02.0003	Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial	BKD	Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial	2 jenis	2.637.154.510	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.02.02.0004	Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis	BKD	Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis	2 jenis	2.043.877.310	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.02.02.0005	Penyiapan Materi Diklat Pembelajaran (e-learning)	BKD	Jumlah materi diklat pembelajaran (e-learning)	3 materi	305.454.817	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.02.03	Program Peningkatan Pelayanan dan Penataan Pegawai		Persentase penataan pegawai sesuai analisa jabatan	100,00%	2.496.036.188	
2.2.2.02.03.0001	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	BKD	Jumlah orang yang dilayani administrasi kepegawaiannya	500 orang	250.447.274	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.02.03.0002	Penataan Administrasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian Dan Diklat	Jumlah berkas penataan administrasi kepegawaian	8326 berkas	682.043.408	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.02.03.0003	Penempatan Pegawai, Promosi dan Rotasi Jabatan	BKD	Jumlah berkas penempatan pegawai, promosi dan rotasi jabatan	127 berkas	996.490.106	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.02.03.0004	Pengelolaan Disiplin Pegawai	BKD	Jumlah pegawai yang mendapatkan intervensi pengelolaan disiplin pegawai	306 orang	567.055.400	Badan Kepegawaian dan Diklat
TOTAL					7.257.777.775.447	

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Indikator yang termasuk dalam Indikator Kinerja Daerah merupakan indikator kinerja yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci, dimana Indikator Kinerja Utama merupakan indikator tujuan kota, sedangkan Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator sasaran kota yang menjadi tujuan dari Perangkat Daerah.

Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari tiga aspek pencapaian kinerja melalui aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat impact yang dipantau capaiannya serta diukur keberhasilannya pada akhir tahun masa berlaku dokumen.

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat/warga Kota Surabaya terkait pembangunan manusia, ketertiban dan ketentraman, pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja. Aspek pelayanan umum mengukur kinerja Pemerintah Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain pengarusutamaan gender, kualitas lingkungan hidup dan persampahan, perumahan dan kawasan permukiman, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (sustainable growth) didukung oleh pertumbuhan volume komoditi keluar masuk Kota Surabaya, serta masyarakat yang menerapkan budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan.

Indikator kinerja daerah sebagai indikator kinerja utama (key performance indicators) berdasarkan uraian tersebut di atas sebagai alat ukur menilai kinerja

organisasi, maka indikator kinerja daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
- b. Menggunakan indikator pencapaian sasaran dan program pembangunan yang diharapkan;
- c. Memfokuskan pada hal-hal utama, kearifan lokal yang penting dan sinergi dengan pembangunan antar jenjang pemerintahan;
- d. Terkait dengan penanggung jawab pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, dapat dilihat pada Tabel VI.1 dan Tabel VI.2

Tabel VI.1
Indikator Kinerja Utama Kota Surabaya

No.	Indikator	Capaian			Target		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Pembangunan Manusia	80,38	81,07	81,74	80-81	80-81	80-81
2	Persentase Penduduk Miskin	N/A	N/A	N/A	N/A	4,75-4,70%	4,71-4,6%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	N/A	5,98%	5,48%	6,47%	6,34%	6,22%
4	Indeks Ketertiban dan Ketenteraman Kota	1,39	1,45	1,73	0,99	1,01	1,04
5	Indeks Infrastruktur Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	0,80	0,84
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	62,09	64,86	64,91	64,90	65,00	65,10
7	Indeks Budaya Lokal	N/A	70,73%	78,39%	79,61%	80%	81,50%
8	Pertumbuhan Ekonomi	6,00	6,13	N/A	N/A	6,3 - 6,7	6,3 - 6,8
9	Indeks Gini	0,41	0,39	0,375	0,38-0,37	0,38-0,37	0,38-0,38
10	Persentase luas kawasan permukiman kumuh	N/A	0,73%	0,25%	0,28%	0,22%	0,00%
11	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	N/A	N/A	N/A	BB	A

Tabel VI.2
Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kota Surabaya

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD		Target	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
		2017	2018	2019	2020	2021		
1	Aspek Kesejahteraan Masyarakat							
1.1	Persentase luas kawasan permukiman kumuh prioritas	N/A	N/A	0,28%	0,22%	0%	0%	
	Perumahan dan Kawasan Permukiman							
	1.1.1	Kawasan permukiman yang telah ditingkatkan kualitas lingkungannya	4,053.29 Ha	6,086.26 Ha	8295,64 Ha	9.853,57 Ha	11.437,03 Ha	11.437,03 Ha
1.2	Indeks Pembangunan Manusia		81,07	81,74	80-81	80-81	80-81	80-81
	Kesehatan							
	1.2.1	Angka Harapan Hidup (AHH)	73.89	73.89	73.89	73,9	73,91	73,91
	Pangan							
	1.2.2	Indeks Ketahanan Pangan	N/A	N/A	N/A	0,93	0,93	0,93
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							

No.			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD		Target	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	
		1.2.3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	N/A	N/A	93,68	93,69	93,7	93,7
		<i>Pendidikan</i>							
		1.2.4	Indeks Pendidikan	N/A	N/A	N/A	79,23	80,16	80,16
	1. 3	Persentase Penduduk Miskin		N/A	N/A	N/A	4,75-4,70%	4,71-4,6%	4,71-4,6%
		<i>Sosial</i>							
		1.3.1	Persentase PMKS yang tertangani	N/A	N/A	N/A	45,00%	45,00%	45,00%
2	Aspek Daya Saing Daerah								
	2.1	Indeks Infrastruktur Kota		N/A	N/A	N/A	0,8	0,84	0,84
		<i>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>							
		2.1.1	Indeks Genangan	26.52%	41.53%	41,41%	40,58%	39,77%	39,77%
		<i>Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</i>							
		2.1.2	Indeks Penanggulangan Bencana	98.15	89.09	74,33	86,47	92,5	92,5

No.			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD		Target	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	
		Perhubungan							
		2.1.3	Persentase jalan kewenangan kota dengan v/c ratio ≤ 0,95	N/A	N/A	N/A	77.39%	78.00%	78.00%
	2.2	Pertumbuhan Ekonomi		6,13	N/A	N/A	6,3 - 6,7	6,3 - 6,8	6,3 - 6,8
		Perdagangan							
		2.2.1	PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	N/A	N/A	N/A	Rp17.387.488,70	Rp19.161.012,50	Rp19.161.012,50
		Pariwisata							
		2.2.2	PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	N/A	N/A	N/A	Rp11.881.832,59	Rp13.751.240,92	Rp13.751.240,92
	2. 3	Indeks Gini		0,39	0,375	0,38-0,37	0,38-0,37	0,38-0,38	0,38-0,39
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
		2.3.1	Tingkat Produktivitas Koperasi	N/A	N/A	N/A	30,00%	32,00%	32,00%

No.			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD		Target	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	
		2.3.2	Tingkat Produktivitas Usaha Mikro	N/A	N/A	N/A	53,00%	62,00%	62,00%
	2.4	Indeks Reformasi Birokrasi		N/A	N/A	N/A	BB	A	A
		<i>Pertanian, Pariwisata, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perdagangan, Perhubungan, Perpustakaan, Kearsipan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tenaga Kerja, Penanaman Modal</i>							
		2.4.1	Nilai Kepuasan Masyarakat	76.46%	83.74%	N/A	80,00%	80,00%	80,00%
		<i>Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah, Sarana dan Prasarana Perkantoran</i>							
		2.4.2	Nilai SAKIP	B	BB	N/A	BB	A	A
		<i>Keuangan</i>							
		2.4.3	Opini BPK	N/A	N/A	N/A	WTP	WTP	WTP
	2.5	Indeks Ketertiban dan Ketenteraman Kota		1,45	1,73	0,99	1,01	1,04	1,04
		<i>Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</i>							
		2.5.1	Persentase konflik yang menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	N/A	N/A	N/A	4,50%	4,00%	4,00%
3	Aspek Pelayanan Umum								

No.			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD		Target	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	
	3.1	Indeks Pembangunan Manusia		81,07	81,74	80-81	80-81	80-81	80-81
		Kesehatan							
		3.1.1	Peningkatan keamanan pangan olahan di masyarakat	N/A	N/A	N/A	2,00%	2,00%	2,00%
		3.1.2	Persentase cakupan ketersediaan prasarana kesehatan yang memenuhi standar klasifikasi dan akreditasi	N/A	N/A	N/A	95,23%	98,35%	98,35%
		Pendidikan							
		3.1.3	Persentase capaian prasarana pendidikan yang dibangun/direhabilitasi	N/A	N/A	N/A	92,15%	92,68%	92,68%
		Kepemudaan dan Olahraga							
		3.1.4	Indeks prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	N/A	N/A	N/A	1,99	2,01	2,01

No.			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD		Target	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	
		3.1.5	Persentase kader kenakalan remaja dan pemuda pelopor yang menjalankan fungsi advokasi pembangunan kepemudaan	N/A	N/A	N/A	10,00%	20,00%	20,00%
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
		3.1.6	Persentase indikator Kota Layak Anak (KLA) yang terpenuhi	N/A	N/A	N/A	100,00%	100,00%	100,00%
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
		3.1.7	Total Fertility Rate (TFR)	1.78	1.73	1,8-1,9	1,8-1,9	1,8-1,9	1,8-1,9
	3.2	Indeks Ketertiban dan Ketenteraman Kota		1,45	1,73	0,99	1,01	1,04	1,04
		Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							
		3.2.1	Pelanggaran Perda per 1.000 Penduduk	N/A	N/A	N/A	2,29	2,18	2,18
		3.2.2	Rasio Linmas per 1.000 penduduk	N/A	N/A	N/A	62,6	62,6	62,6
		Pengawasan							

No.			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD		Target	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	
		3.2.3	Angka Pelanggaran Disiplin Aparatur per 1.000 Pegawai	1.03	1.14	1,26	1,21	1,15	1,15
		3.2.4	Persentase pelanggaran tata kelola administrasi keuangan pada kasus yang sama yang berhasil diturunkan	6.60%	31.98%		14,20%	16,80%	16,80%
	3.3	Indeks Infrastruktur Kota		N/A	N/A	N/A	0,8	0,84	0,84
		<i>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>							
		3.3.1	Ketersediaan perangkat pengendalian penataan ruang dan bangunan (implementasi SLF)	N/A	N/A	N/A	22,32%	31,25%	31,25%
		<i>Pertanahan</i>							
		3.3.2	Persentase lokasi lahan yang tersedia untuk kepentingan umum	N/A	N/A	N/A	100,00%	100,00%	100,00%
		<i>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>							
		3.3.3	Persentase pelaksanaan rekomendasi utilitas	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD		Target	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	
3.3.4	Tingkat Keandalan Jaringan Jalan	0.40%	0.41%	0,41%	0,42%	0,42%	0,42%
	<i>Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan</i>						
3.3.5	Persentase rencana induk sektoral yang disusun dan telah tersinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	N/A	N/A	N/A	34,48%	41,38%	41,38%
	<i>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>						
3.3.6	Persentase panjang jalan yang sudah terpasang PJU hemat energi	N/A	N/A	N/A	14,98%	17,51%	17,51%
	<i>Perhubungan</i>						
3.3.7	Load Factor Kendaraan Umum (Angkot)	30.00%	29.53%	26.00%	28,00%	30,00%	30,00%
3.3.8	Load Factor Kendaraan Umum (Suroboyo Bus)	N/A	N/A	N/A	40,00%	42,00%	42,00%
	<i>Pertanahan</i>						

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD		Target	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	
3.3.9	Persentase aset tanah dan/atau bangunan yang terintegrasi dalam sistem pengamanan dan pengelolaan aset	15.10%	26.47%	41,88%	58,55%	75,22%	75,22%
3.4	Persentase luas kawasan permukiman kumuh prioritas	N/A	N/A	0,28%	0,22%	0%	0%
	<i>Perumahan dan Kawasan Permukiman</i>						
3.4.1	Persentase pemanfaatan rusunawa yang tepat sasaran	N/A	N/A	N/A	100,00%	100,00%	100,00%
	<i>Sosial</i>						
3.4.2	Persentase wilayah dengan rumah tapak yang layak huni seluruhnya	N/A	N/A	N/A	85,00%	100,00%	100,00%
3.5	Indeks Budaya Lokal	70.73%	78.39%	79,61%	73%	75%	75%
	<i>Kebudayaan</i>						
3.5.1	Persentase budaya yang dapat dilestarikan	90.31%	90.84%	91,39%	90,95%	90,95%	90,95%
3.6	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	N/A	N/A	BB	A	A

No.		Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD		Target	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			2017	2018	2019	2020	2021		
		Komunikasi dan Informatika serta Persandian, dan Statistik							
		3.6.1	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan TIK dalam Pelayanan Publik Administratif	97.63	97.59	75.00 (Cukup)	Baik	Baik	Baik
		Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan							
		3.6.2	Indeks Profesionalitas Pegawai	N/A	N/A	N/A	71,08%	71,97%	71,97%
		Perumahan dan Kawasan Permukiman							
		3.6.3	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana pemerintahan dan pelayanan publik	N/A	N/A	N/A	91,23%	92,35%	92,35%
		Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah							
		3.6.4	Persentase kegiatan DPRD yang terfasilitasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Keuangan							
		3.6.5	Persentase kontribusi pajak terhadap PAD	69.92%	78.03%	75,54%	79,78%	80,12%	80,12%

No.			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD		Target	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	
		Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan							
		3.6.6	Tingkat Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Program	91.18%	98.04%	91,96%	98,00%	98,00%	98,00%
	3.7	Pertumbuhan Ekonomi		6,13	N/A	N/A	6,3 - 6,7	6,3 - 6,8	6,3 - 6,8
		Penanaman Modal							
		3.7.1	Nilai Realisasi Investasi	N/A	N/A	N/A	Rp71.161.699.310.450,00	Rp74.719.784.275.973,00	Rp74.719.784.275.973,00
	3.8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)		64,86	64,91	64,9	65	65,1	65,1
		Lingkungan Hidup							
		3.8.1	Indeks Kualitas Air Permukaan	57.5	57.62	52,68	53,08	53,48	53,48
		3.8.2	Indeks Kualitas Udara Ambien	90.26	90.26	84,75	85	85,25	85,25
		3.8.3	Persentase air limbah yang diolah pada instalasi pengolahan air limbah	N/A	N/A	N/A	57,81%	69,07%	69,07%

No.			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD		Target	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	
		3.8.4	Persentase penurunan sampah yang masuk ke TPA melalui TPS	N/A	N/A	N/A	20,40%	21,90%	21,90%
		3.8.5	Persentase selisih luasan taman dan jalur hijau yang dibangun dan dipelihara	N/A	N/A	N/A	9,33%	11,20%	11,20%
		3.8.6	Persentase wilayah dengan rumah yang dilengkapi jamban	N/A	N/A	N/A	80,00%	85,00%	85,00%
	3.9	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		5.98%	5.48%	6,47%	6,34%	6,22%	6,22%
		<i>Tenaga Kerja</i>							
		3.9.1	Persentase pencari kerja terserap pada pasar kerja formal	53.58%	70.03%	> 40%	> 40,00%	> 40,00%	> 40,00%

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan pembangunan Tahunan Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021 serta mengacu RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 dan RKP Tahun 2020. Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka Ekonomi Daerah, Program Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik.

RKPD Kota Surabaya Tahun 2020 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan Tahun 2020, memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan Tahun 2020 yang mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka Ekonomi Daerah dan kerangka pendanaan serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

Dalam rangka menjamin substansi dokumen RKPD yang mendorong terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka telah dilaksanakan hal-hal yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu RKPD Tahun 2020 telah mencakup analisis gambaran umum Kondisi Daerah, analisis rancangan kerangka Ekonomi Daerah, analisis kapasitas riil Keuangan Daerah, penelaahan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah, perumusan permasalahan Pembangunan Daerah, penelaahan terhadap sasaran RPJMD, penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD, penelaahan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur serta program strategis Nasional, perumusan Prioritas Pembangunan Daerah, serta perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Surabaya, 1 Juli 2019

WALIKOTA SURABAYA

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


Ira Tursilowati, S.H.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006